PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

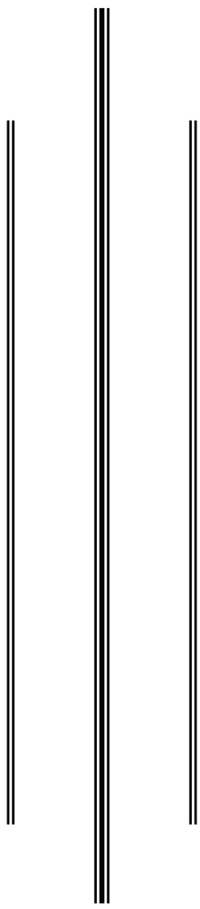
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH PROVINSI BALI

2025

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH PROVINSI BALI

TAHUN 2025



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

b. bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali.

6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
12. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
13. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
14. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
15. Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
16. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

17. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.

BAB II
MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

Pasal 2

(1) RPJMD Semesta Berencana Provinsi memuat dan menjabarkan visi, misi dan program Gubernur.
(2) Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 3

RPJMD Semesta Berencana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) RPJMD Semesta Berencana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
    a. BAB I : PENDAHULUAN;
    b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
    c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
    d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
    e. BAB V : PENUTUP.

(2) Isi beserta uraian sistematika RPJMD Semesta Berencana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

Pasal 5

(1) RPJMD Semesta Berencana Provinsi sebagai pedoman penyusunan:
   a. Renstra Perangkat Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi; dan
   b. RPJMD Kabupaten/Kota.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
(3) RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB V
PENGENDALIAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Provinsi.
(2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Provinsi.
(3) Evaluasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Agustus 2025

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (3-89/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Tahun 2025-2029 memuat dan menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode Tahun 2025-2029. RPJMD Semesta Berencana merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bali yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD Semesta Berencana Provinsi merupakan dokumen yang memuat perencanaan pembangunan sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana, yaitu suatu haluan pembangunan yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara *niskala-sakala* dalam tata kehidupan Bali Era Baru sesuai prinsip Trisakti; berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana mencakup upaya dan strategi untuk menjaga keharmonisan dan kesucian alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan bersifat lokal, nasional, dan internasional. RPJMD Semesta Berencana merupakan pola pembangunan yang memakai pendekatan satu kesatuan wilayah: 1 (satu) pulau, 1 (satu) pola, dan 1 (satu) tata kelola.

Secara filosofis RPJMD Semesta Berencana dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi.* Secara esensial Pembangunan Bali ditujukan untuk menjaga *unteng* Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu 6 (enam) sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan secara *niskala-sakala*, terdiri dari: 1) *Atma Kerthi* (penyucian dan pemuliaan *Atman*/Jiwa); 2) *Segara Kerthi* (penyucian dan pemuliaan laut dan pantai); 3) *Danu Kerthi* (penyucian dan pemuliaan sumber air); 4) *Wana Kerthi* (penyucian dan pemuliaan tumbuh tumbuhan); 5) *Jana Kerthi* (penyucian dan pemuliaan manusia); dan 6) *Jagat Kerthi* (penyucian dan pemuliaan alam semesta)

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana secara Proses dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Sedangkan secara substansi, penyusunannya dilakukan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
BALI NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN
2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 4
1.3.1 Telaah Dokumen RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2045 7
1.3.2 Telaah Dokumen RPJM Nasional Tahun 2025-2029 8
1.3.3 Telaah Dokumen RTRW Provinsi Bali 10
1.3.4 Telaah Dokumen KLHS Provinsi 12
1.3.5 Telaah Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ PID) Provinsi Bali 14
1.3.6 Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 16
1.3.7 Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali 17
1.4 Maksud dan Tujuan 18
1.5 Sistematika Penulisan 19
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **21**
2.1 Aspek Geografi dan Demografi 21
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 21
2.1.2 Klimatologi 24
2.1.2.1 Tipe dan Kondisi Iklim 24
2.1.2.2 Curah Hujan 25
2.1.2.3 Suhu Udara 26
2.1.2.4 Kelembapan Udara 27
2.1.3 Potensi Sumber Daya Alam 28
2.1.3.1 Status Mutu dan Ketersediaan Sumber Daya Hutan 28
2.1.3.2 Status Mutu dan Ketersediaan Sumber Daya Lahan 30
2.1.3.3 Status Mutu dan Ketersediaan Sumber Daya Air 32
2.1.3.4 Kualitas Udara 33

2.1.3.5 Status Mutu dan Ketersediaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 34
2.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup .. 37
2.1.4.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Air..... 37
2.1.4.2 Daya Dukung Pangan 41
2.1.5 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 53
2.1.5.1 Indeks Ketahanan Pangan 53
2.1.5.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan. 55
2.1.5.3 Konsumsi Listrik Per Kapita 56
2.1.5.4 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum 58
2.1.6 Lingkungan Hidup Berkualitas 59
2.1.6.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup..... 59
2.1.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak .. 61
2.1.6.3 Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 61
2.1.7 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 64
2.1.7.1 Penurunan Intensitas Emisi GRK 64
2.1.7.2 Indeks Risiko Bencana..... 66
2.1.7.3 Indeks Ketahanan Daerah 67
2.1.8 Demografi 68
2.1.8.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk 68
2.1.8.2 Proyeksi dan Analisis Penduduk 5 (Lima) Tahun ke Depan 71
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... 74
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 74
2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi..... 74
2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan..... 76
2.2.1.3 PDRB Per Kapita..... 79
2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka 80
2.2.1.5 Indeks Gini 85
2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia..... 86
2.2.2 Kesehatan untuk Semua..... 87
2.2.2.1 Angka Kematian Balita 87
2.2.2.2 Angka Kematian Ibu 89
2.2.2.3 Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*)..... 91
2.2.2.4 Usia Harapan Hidup 92
2.2.2.5 Indeks Keluarga Sehat..... 93
2.2.2.6 Tuberkulosis..... 94
2.2.2.7 Prevalensi *Stunting*..... 97
2.2.2.8 Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap..... 100
2.2.2.9 Persentase Hipertensi dalam Pengendalian 101
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata..... 102
2.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah..... 102

2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah 104
2.2.3.3 Penyandang Disabilitas 105
2.2.3.4 Sekolah Luar Biasa (SLB) 108
2.2.3.5 Angka Literasi/Numerasi 110
2.2.3.6 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 112
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif 120
2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 120
2.2.4.2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 122
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 123
2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama 123
2.2.5.2 Objek Pemajuan Kebudayaan 124
2.2.5.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan 126
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyrakat Inklusif 128
2.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak 128
2.2.6.2 Indeks Kualitas Keluarga 132
2.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender 133
2.2.6.4 Indeks Pemberdayaan Gender 134
2.2.6.5 Indeks Pembangunan Gender 135
2.2.6.6 Indeks Pembangunan Pemuda 136
2.3 Aspek Daya Saing Daerah 137
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 137
2.3.1.1 Angka Ketergantungan 137
2.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 139
2.3.2.1 PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 139
2.3.2.2 Rasio Kewirausahaan 143
2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 146
2.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah 150
2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 152
2.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau 152
2.3.3.2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia 153
2.3.3.3 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 155
2.3.4 Transformasi Digital 156
2.3.4.1 Indeks Keamanan Informasi 156
2.3.4.2 Indeks Pembangunan TIK 157
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 159
2.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto 159
2.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa 161
2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 169
2.3.6.1 Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 169

2.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak . 170
2.3.6.3 Persentase Desa Mandiri..... 171
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro..... 173
2.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB..... 173
2.3.7.2 Tingkat Inflasi..... 176
2.4 Aspek Pelayanan Umum 178
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif..... 178
2.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum 178
2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik..... 179
2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik..... 181
2.4.1.4 Indeks Integritas Nasional 182
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial..... 183
2.4.2.1 Persentase Penegakan Perda..... 183
2.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM 185
2.4.2.3 Indeks Demokrasi Provinsi..... 186
2.4.2.4 Indeks Rasa Aman 188
2.4.2.5 Indeks Ketentraman dan Ketertiban 189
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 192
2.4.4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... 196
2.5 Standar Pelayanan Minimal 231
2.6 Kerjasama Daerah..... 235
2.7 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Bali 248
2.7.1 Sasaran Pembangunan Provinsi Bali..... 248
2.7.2 *Highlight* Indikasi Intervensi dalam RPJMN Tahun 2025-2029 251
2.7.3 Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali..... 258
2.8 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah 263
2.9 Gambaran Keuangan Daerah..... 272
2.10 Permasalahan dan Isu Strategis..... 291
2.10.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 291
2.10.2 Isu Strategis Daerah 296
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 329
3.1 Visi dan Misi 329
3.2 Tujuan dan Sasaran..... 345
3.3 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 356
3.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Dalam Mencapai

Tujuan dan Sasaran 356
3.3.2 Program Prioritas Daerah..... 398
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 479
4.1 Program Perangkat Daerah 480
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 524
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintahan Provinsi Bali..... 524
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi Bali..... 532
BAB V PENUTUP.....581

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi Provinsi Bali	21
Tabel 2.2	Curah Hujan Menurut Stasiun Pengamatan di Provinsi Bali Tahun 2020-2024	25
Tabel 2.3	Suhu Udara Rata-Rata Menurut Stasiun Pengamatan di Provinsi Bali Tahun 2020-2024	27
Tabel 2.4	Kelembapan Udara Rata-Rata Menurut Stasiun Pengamatan di Provinsi Bali Tahun 2020-2024	27
Tabel 2.5	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di Provinsi Bali	40
Tabel 2.6	Defisit Air di Provinsi Bali	40
Tabel 2.7	Produksi Energi Bahan Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018	44
Tabel 2.8	Konsumsi Energi Bahan Pangan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2018	45
Tabel 2.9	Jumlah Selisih Produksi dan Konsumsi Energi Bahan Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018	46
Tabel 2.10	Jumlah Ambang Batas DDLH Penyedia Bahan Pangan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018	47
Tabel 2.11	Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Status DDLH Penyedia Bahan Pangan Setiap Kabupaten /Kota di Provinsi Bali Tahun 2018	48
Tabel 2.12	Produksi Pangan di Provinsi Bali Tahun 2018	49
Tabel 2.13	Status Daya Dukung Pangan Provinsi Bali Tahun 2018	50
Tabel 2.14	Status Keberlanjutan Ketersediaan Pangan di Provinsi Bali	51
Tabel 2.15	Indeks Ketahanan Pangan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020–2024	54
Tabel 2.16	Penjualan Tenaga Listrik Provinsi Bali Tahun 2020-2024	57
Tabel 2.17	Konsumsi Listrik Perkapita di Provinsi Bali Tahun 2020-2024	57
Tabel 2.18	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Persen) Tahun 2020–2024	58
Tabel 2.19	Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Bali Tahun 2020–2024	60
Tabel 2.20	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024	61

Tabel 2.21 Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 65
Tabel 2.22 Nilai Indeks Risiko Bencana di Provinsi Bali Tahun 2020–2024 66
Tabel 2.23 Indeks Ketahanan Daerah di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 67
Tabel 2.24 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020 68
Tabel 2.25 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021 68
Tabel 2.26 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022 69
Tabel 2.27 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023 69
Tabel 2.28 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024 70
Tabel 2.29 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali 72
Tabel 2.30 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Berdasarkan Jenis Kelamin 73
Tabel 2.31 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 74
Tabel 2.32 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2020–2024 75
Tabel 2.33 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali 77
Tabel 2.34 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 .. 78
Tabel 2.35 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah)..... 79
Tabel 2.36 Persentase Pengangguran di Provinsi Bali 81
Tabel 2.37 Banyaknya Pengangguran di Provinsi Bali 82
Tabel 2.38 Kondisi Umum Ketenagakerjaan Provinsi Bali Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2019-2024 83
Tabel 2.39 Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020–2024 85
Tabel 2.40 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali 86

Tabel 2.41 Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020–2024 90
Tabel 2.42 Usia Harapan Hidup di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Tahun)..... 92
Tabel 2.43 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024 93
Tabel 2.44 Prevalensi *Stunting* Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2022-2024 98
Tabel 2.45 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2020–2024 103
Tabel 2.46 Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2020–2024 105
Tabel 2.47 Data Penyandang Disabilitas Umur 4-18 Tahun di Provinsi Bali Semester I Tahun 2024..... 107
Tabel 2.48 Sarana Sekolah Luar Biasa di Provinsi Bali..... 109
Tabel 2.49 Jumlah Guru SMA, SMK, dan SLB Tahun 2024 di Provinsi Bali 110
Tabel 2.50 Skor Kemampuan Literasi di Provinsi Bali..... 111
Tabel 2.51 Skor Kemampuan Numerasi di Provinsi Bali 111
Tabel 2.52 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada Tahun 2024 114
Tabel 2.53 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2024 121
Tabel 2.54 Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi Menurut Dimensi Tahun 2019–2024..... 126
Tabel 2.55 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2019-2023 131
Tabel 2.56 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2023 132
Tabel 2.57 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2020-2024 134
Tabel 2.58 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2020-2024 134
Tabel 2.59 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2020-2024 135
Tabel 2.60 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Bali Tahun 2019-2023 136
Tabel 2.61 PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2022-2024 140
Tabel 2.62 Jumlah UMKM dan Rasio Kewirausahaan di Provinsi Bali Tahun 2020-2024..... 143

Tabel 2.63 Penduduk Usia Kerja di Provinsi Bali Tahun 2020–2024 146
Tabel 2.64 Angkatan Kerja di Provinsi Bali Tahun 2020–2024 .. 147
Tabel 2.65 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Bali Tahun 2020–2024 148
Tabel 2.66 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Persen) Tahun 2020-2024 149
Tabel 2.67 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024 151
Tabel 2.68 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Bali 152
Tabel 2.69 Bauran Sumber Energi Primer 155
Tabel 2. 70 Indeks Keamanan Informasi Provinsi Bali Tahun 2020-2024 156
Tabel 2.71 Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Tahunan Provinsi Bali Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020-2024 160
Tabel 2.72 Kelompok Komoditas Utama Ekspor Provinsi Bali Tahun 2021 163
Tabel 2.73 Kelompok Komoditas Utama Ekspor Provinsi Bali Tahun 2022 163
Tabel 2.74 Kelompok Komoditas Utama Ekspor Provinsi Bali Tahun 2023 164
Tabel 2.75 Kelompok Komoditas Utama Ekspor Provinsi Bali Tahun 2024 164
Tabel 2.76 Kelompok Komoditas Utama Impor Provinsi Bali Tahun 2021 166
Tabel 2.77 Kelompok Komoditas Utama Impor Provinsi Bali Tahun 2022 167
Tabel 2.78 Kelompok Komoditas Utama Impor Provinsi Bali Tahun 2023 167
Tabel 2.79 Kelompok Komoditas Utama Impor Provinsi Bali Tahun 2024 168
Tabel 2.80 Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Tahunan Provinsi Bali Tahun 2020-2024 169
Tabel 2.81 Data Indeks Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali 170
Tabel 2.82 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi (Persen) 170
Tabel 2.83 Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bali 171
Tabel 2.84 Persentase dan Jumlah Desa Mandiri Provinsi Bali Tahun 2020-2024 173

Tabel 2.85 Distribusi PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) .. 174
Tabel 2.86 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Provinsi Bali Tahun 2022 - 2024 180
Tabel 2.87 Indeks Demokrasi Provinsi Bali Tahun 2019–2024 . 187
Tabel 2.88 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) Provinsi Bali Tahun 2020–2024 190
Tabel 2.89 Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan (*Crime Cleareance*) Provinsi Bali Tahun 2020-2024 191
Tabel 2.90 Jenis Tindak Pidana Menonjol Provinsi Bali Tahun 2020–2024 192
Tabel 2.91 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 195
Tabel 2.92 Capaian Berdasarkan Aspek atau Indikator Kinerja Provinsi Bali Tahun 2020-2024 197
Tabel 2.93 Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2024 232
Tabel 2.94 Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2024 233
Tabel 2.95 Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 234
Tabel 2.96 Capaian Penerapan SPM Perumahan Rakyat Provinsi Bali Tahun 2024 234
Tabel 2.97 Realisasi SPM Bidang Trantibumlinmas 234
Tabel 2.98 Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2024 235
Tabel 2.99 Data Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain 238
Tabel 2.100 Data Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga 240
Tabel 2.101 Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah 247
Tabel 2.102 Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 248
Tabel 2.103 Sasaran Pembangunan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan 2030 250
Tabel 2.104 *Highlight* Indikasi Intervensi di Provinsi Bali 251
Tabel 2.105 Daftar Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali Tahun 2025-2030 260
Tabel 2.106 Realisasi APBD Provinsi Bali Tahun 2020-2024 273
Tabel 2.107 Neraca Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2024 279
Tabel 2.108 Proyeksi Kerangka Pendanaan Provinsi Bali Tahun 2026-2030 286
Tabel 2.109 Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Bali . 291
Tabel 2.110 Isu Strategis Dalam Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 309
Tabel 2.111 Isu Strategis Daerah 315

Tabel 3.1 Keterkaitan 22 Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali dengan 6 Bidang Prioritas Pembangunan 334
Tabel 3.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 339
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali 346
Tabel 3.4 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali 358
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bali..... 393
Tabel 3.6 Program Prioritas Daerah Provinsi Bali 400
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2026-2030 482
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali .. 527
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Bali 535

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya 5
Gambar 2.1 Peta Wilayah Provinsi Bali 22
Gambar 2.2 Peta Tipe Iklim Klasifikasi *Schmidt-Ferguson* di Wilayah Provinsi Bali 25
Gambar 2.3 Peta Curah Hujan di Wilayah Provinsi Bali..... 26
Gambar 2.4 Angka Deforestasi *Netto* Kawasan Hutan di Provinsi Bali 29
Gambar 2.5 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Bali..... 31
Gambar 2.6 Indeks Kualitas Air di Provinsi Bali Tahun 2020–2024 33
Gambar 2.7 Indeks Kualitas Udara di Provinsi Bali 34
Gambar 2.8 Indeks Kualitas Air Laut di Provinsi Bali 37
Gambar 2.9 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di Provinsi Bali..... 41
Gambar 2.10 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2020-2024 53
Gambar 2.11 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen)..... 56
Gambar 2.12 Persentase Rumah Tangga Per Kabupaten di Provinsi Bali yang Mengelola Sampah Tahun 2024 (%)..... 62
Gambar 2.13 Timbulan, Pengurangan, dan Penanganan Sampah (Ton/Tahun) di Provinsi Bali 63
Gambar 2.14 Persentase Sampah Terkelola di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 64
Gambar 2.15 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024 73
Gambar 2.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 75
Gambar 2.17 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 77
Gambar 2.18 Tren AKN, AKB dan Akaba Provinsi Bali Tahun 2020 – 2024 87
Gambar 2.19 Persentase jumlah kematian Neonatus, Bayi dan Balita Provinsi Bali Tahun 2024 88
Gambar 2.20 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 90
Gambar 2.21 Capaian Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) Usia 15–49 Tahun..... 91

Gambar 2.22 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*/TSR) menurut Kab/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024 97
Gambar 2.23 Grafik Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2023-2024 99
Gambar 2.24 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2024..... 100
Gambar 2.25 Jumlah Penderita Hipertensi Pada Usia >15 Tahun yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bali Tahun 2024 101
Gambar 2.26 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 102
Gambar 2.27 Literasi Digital Secara Nasional dan Bali pada Tahun 2020 116
Gambar 2.28 Literasi Digital Secara Nasional dan Bali pada Tahun 2021 117
Gambar 2.29 Literasi Digital Secara Nasional dan Bali pada Tahun 2022 117
Gambar 2.30 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Secara Nasional dan Bali pada Tahun 2023 118
Gambar 2.31 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Secara Nasional dan Bali pada Tahun 2024 119
Gambar 2.32 Jumlah Peserta Aktif Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 122
Gambar 2.33 Indeks Kerukunan Umat Beragama 124
Gambar 2.34 Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional dan Provinsi Bali 126
Gambar 2.35 Indeks Perlindungan Anak Tahun 2020-2023 se-Indonesia 130
Gambar 2.36 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Bali Tahun 2020-2024 133
Gambar 2.37 Rasio Ketergantungan Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2023 139
Gambar 2.38 Perkembangan UMKM di Provinsi Bali Berdasarkan Tahun 2020-2024 144
Gambar 2.39 Perkembangan UMKM di Provinsi Bali Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2024 145
Gambar 2.40 Perkembangan Indeks Pembangunan TIK di Indonesia Tahun 2018-2023 157
Gambar 2.41 Indeks Pembangunan TIK di Provinsi Bali Tahun 2022-2023 158
Gambar 2.42 Tren Nilai (Juta US$) dan Volume (Juta Ton) Ekspor Provinsi Bali Tahun 2020–2024 162
Gambar 2.43 Tren Nilai (Juta US$) dan Volume (Juta Ton) Impor Provinsi Bali Tahun 2020–2024 165

Gambar 2.44 Indeks Reformasi Hukum Provinsi Bali Tahun 2023-2024 179
Gambar 2.45 Persentase Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali 184
Gambar 2.46 Jumlah Tindak Pidana di Provinsi Bali..... 189
Gambar 2.47 Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2023 193
Gambar 2.48 Perbandingan Total Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali (dalam Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024 275
Gambar 2.49 Komposisi Pendapatan ABPD Provinsi Bali Tahun 2024 276
Gambar 2.50 Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Bali (dalam Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024..... 277
Gambar 2.51 Komponen Belanja Daerah Provinsi Bali (dalam Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024..... 277
Gambar 2.52 Pertumbuhan Total Aset Provinsi Bali Tahun 2020-2024 280
Gambar 2.53 Komposisi Aset Per Tahun Provinsi Bali Tahun 2020-2024 281
Gambar 2.54 Pertumbuhan Total Kewajiban Provinsi Bali Tahun 2020-2024 282
Gambar 2.55 Komposisi Kewajiban Provinsi Bali per Tahun 2020-2024 282
Gambar 2.56 Perkembangan Ekuitas Provinsi Bali Tahun 2020-2024 283
Gambar 2.57 Perbandingan Komponen Neraca Provinsi Bali Tahun 2020-2024 284
Gambar 2.58 Keseimbangan Neraca Provinsi Bali Tahun 2020-2024 285
Gambar 2.59 Tren Pendapatan, Belanja, dan Surplus/Defisit (dalam Miliar Rupiah)..... 288
Gambar 2.60 Struktur Belanja Daerah per Kategori (Miliar Rupiah) 289
Gambar 2.61 Komponen Pendapat Asli Daerah (Miliar Rupiah) 290

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini bertujuan memperkuat daya saing daerah di tengah dinamika global, dengan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara terencana dengan memerhatikan karakteristik daerah dengan pendekatan satu kesatuan wilayah: satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola, guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memerhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Hal ini selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang menyatakan bahwa RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan dan keuangan daerah secara sistematis dan terukur.

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 menjadi instrumen strategis sebagai penerjemahan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali periode 2025–2030 ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan yang implementatif, serta sebagai komitmen politik yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 disusun dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025–2029, khususnya dalam hal penyelarasan terhadap 8 Prioritas Nasional (*Asta Cita*), 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/*Quick Wins* yang menjadi agenda Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Penyelarasan ini mencakup aspek strategi, sasaran pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan wilayah, dengan tetap memerhatikan karakteristik dan kewenangan daerah.

RPJMD ini disusun dalam kerangka besar pembangunan daerah Bali yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Haluan ini menjadi arah dan strategi fundamental dalam membangun peradaban Bali yang maju dan berkelanjutan, dengan menempatkan keharmonisan antara *unteng alam* (alam lingkungan), *unteng manusa* (manusia), dan *unteng budaya* (kebudayaan) sebagai inti dari seluruh proses pembangunan Bali ke masa depan.

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratik melalui metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai sasaran pembangunan.
2. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
3. Pendekatan politis memandang bahwa pemilihan presiden/kepala daerah adalah proses penyusunan rencana karena rakyat/pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden/kepala daerah.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas melalui penyelarasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
5. Pendekatan *holistik-tematik* dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan.
6. Pendekatan *integratif* dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
7. Pendekatan *spasial* dengan mempertimbangkan dimensi ruang dalam perencanaan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

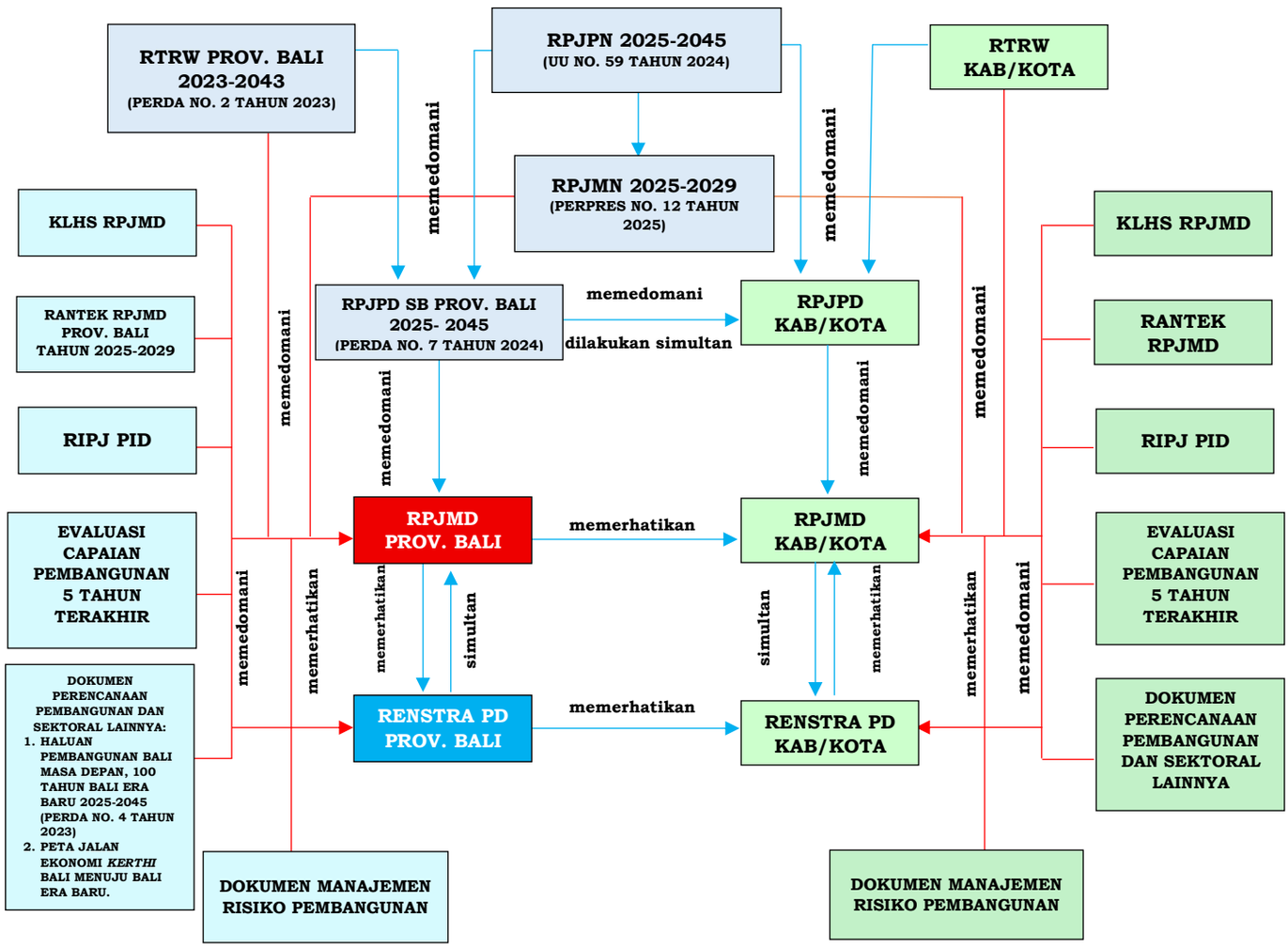
Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7).

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Keterkaitan dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Keterkaitan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya, dideskripsikan sebagaimana di bawah ini:

1. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 disusun dengan memerhatikan RPJMN Tahun 2025-2029 (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025) dan memedomani RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025-2045 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024).
2. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 disusun dengan memerhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029.
3. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD Semesta Berencana dan Renstra Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
5. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029.
6. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, yaitu:
    a. Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023).
    b. Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali menuju Bali Era Baru.

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2045 sebagai pedoman arah pembangunan jangka panjang, serta mempedomani RPJMN Tahun 2025–2029 agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, RPJMD ini terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2023–2043 guna menjamin kesesuaian program dengan struktur dan pola ruang, zonasi, pusat pertumbuhan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan diintegrasikan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi acuan mitigasi dampak lingkungan dan penguatan konsep Bali Hijau.

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 juga memedomani strategi sektoral seperti Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ PID) untuk memperkuat inovasi dan daya saing daerah, Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun (2025–2125) sebagai panduan menjaga kesucian alam, manusia, dan budaya Bali, serta Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali yang mengarahkan transformasi ekonomi menuju enam sektor prioritas ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal. Keterpaduan dokumen ini memastikan bahwa arah pembangunan lima tahunan Provinsi Bali tidak hanya responsif terhadap tantangan aktual, tetapi juga konsisten mendukung visi jangka panjang Bali menuju 2045 dan cita-cita Indonesia Emas 2045.

1.3.1 Telaah Dokumen RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2045

RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang selama 20 tahun yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan RPJMD setiap periode lima tahunan. Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 wajib mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD agar selaras dengan tujuan jangka panjang pembangunan daerah dan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 sebagai dokumen rencana pembangunan jangka menengah merefleksikan dan mengoperasionalkan visi jangka panjang RPJPD, yaitu: "Bali *Dwipa* Jaya: Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan, dengan *Nangun Sat Kerthi* Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru."

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang secara konkret mendukung pencapaian visi tersebut melalui perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dengan tetap menjaga keharmonisan alam, manusia (*krama*), dan budaya Bali.

Periode RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 merupakan tahap pertama implementasi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2045, yang difokuskan pada: “Membangun Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan”. Oleh karena itu, dokumen RPJMD menjabarkan arah kebijakan dan program prioritas yang mencerminkan pencapaian sasaran pada tahap awal transformasi pembangunan, yang meliputi:

1. Transformasi Sosial: Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar, serta penguatan kesejahteraan sosial masyarakat Bali.
2. Transformasi Ekonomi: Mendorong ekonomi produktif dan inovatif melalui penguatan sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekosistem digital Bali.
3. Transformasi Tata Kelola: Penguatan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, serta reformasi kelembagaan dan partai politik.
4. Stabilitas dan Ketahanan Daerah: Penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Pelestarian budaya Bali, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah terpadu, dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
6. Pemerataan Pembangunan Wilayah: Pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Bali.

7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan: Konektivitas antardaerah dengan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Kesinambungan Pembangunan: Penguatan sistem pendanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang menyeluruh dan terpadu.

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 secara eksplisit menetapkan indikator kinerja, target, dan program prioritas yang mendukung pencapaian lima sasaran utama RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2045, yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan per kapita.
2. Menurunkan angka kemiskinan menuju 0% dan mengurangi ketimpangan.
3. Mewujudkan kepemimpinan daerah yang inovatif dan transformatif.
4. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia.
5. Menurunkan emisi gas rumah kaca menuju *Net Zero Emission*.

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 mengintegrasikan arah kebijakan RPJPD dengan kebutuhan pembangunan lima tahunan secara responsif, adaptif, dan terukur. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan jangka menengah tidak hanya merespons isu-isu kontemporer, tetapi juga membangun kesinambungan menuju visi 2045, sesuai dengan karakter pembangunan Semesta Berencana yang holistik, *integratif*, tematik, dan *spasial*. Dengan mengacu pada arah kebijakan RPJPD, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 juga menjadi dasar bagi penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD, dan APBD agar anggaran pembangunan sepenuhnya mendukung pencapaian target jangka menengah yang linier dengan target jangka panjang.

RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2045 merupakan kerangka strategis dan normatif utama dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029. Menjamin bahwa RPJMD tidak hanya responsif terhadap dinamika jangka pendek, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi jangka panjang Bali menuju 2045.

1.3.2 Telaah Dokumen RPJM Nasional Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024, serta merupakan turunan dari RPJPN Tahun 2025–2045. Dokumen ini menjadi dasar hukum dan operasional bagi penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga, penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/ Kota, evaluasi kinerja pembangunan daerah, serta penentuan arah dukungan fiskal nasional ke daerah. RPJMD Semesta Berencana

Provinsi Bali Tahun 2025-2029 harus tersusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas RPJMN, guna memastikan keselarasan antara pembangunan daerah dan nasional.

RPJMN Tahun 2025–2029 menetapkan Prioritas Nasional diantaranya, penguatan kualitas SDM dan pendidikan, transformasi ekonomi digital dan hijau, ketahanan energi, pangan, dan air, reformasi kesehatan dan jaminan sosial, peningkatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 harus menerjemahkan prioritas nasional tersebut ke dalam program strategis daerah, dengan mempertimbangkan kekhasan Bali seperti budaya dan kearifan lokal *Subak* dan *Tri Hita Karana*, ekonomi berbasis pariwisata budaya dan industri kreatif, keunggulan geografis sebagai pintu gerbang pariwisata internasional.

RPJMN Tahun 2025-2029 menetapkan target-target indikator makro dan sektoral seperti penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dan pengangguran terbuka, peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM), peningkatan investasi, produktivitas, dan daya saing daerah, pengurangan emisi karbon dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 harus mengintegrasikan indikator pembangunan daerah yang relevan dengan target nasional, menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan selaras dengan arah nasional, serta memastikan bahwa capaian pembangunan Bali kontributif terhadap pembangunan nasional.

RPJMN Tahun 2025-2029 mencantumkan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap wilayah Bali, seperti: pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), proyek infrastruktur konektivitas (jalan tol, pelabuhan, bandara), pengembangan kawasan industri hijau dan ekonomi digital. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 harus mendukung keberlanjutan dan percepatan PSN melalui sinkronisasi kebijakan dan penganggaran, menyelaraskan program prioritas daerah dengan arah PSN di wilayah Bali, mendorong kemitraan lintas sektor dan lintas wilayah dalam pelaksanaan PSN.

RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi pelaksanaan RPJMD tematik seperti *stunting*, kemiskinan ekstrem, dan pendidikan vokasi, sinergi program kementerian/lembaga dengan Pemda, khususnya pada pelaksanaan Musrenbang, penguatan desentralisasi asimetris dan integrasi pembangunan sektoral. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 harus berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan tema pembangunan nasional tersebut melalui penguatan kolaborasi dan implementasi di tingkat lokal.

RPJMN Tahun 2025-2029 dijadikan acuan oleh pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah menentukan dukungan fiskal pusat ke daerah seperti: Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan transfer ke daerah berbasis kinerja dan prioritas nasional. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yang selaras dan mendukung RPJMN akan memperkuat daya saing fiskal daerah, memungkinkan peningkatan akses terhadap pendanaan nasional dan internasional, meningkatkan kepercayaan pusat terhadap kapasitas daerah dalam mengelola program prioritas nasional.

RPJMN 2025–2029 memiliki keterkaitan struktural dan fungsional yang erat dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Bali mengintegrasikan substansi RPJMN agar:

1. Kebijakan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional secara nyata dan terukur,
2. Pemerintah Provinsi Bali memperoleh sinergi pembiayaan dan dukungan kebijakan dari pusat,
3. Bali memainkan peran strategis dan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis budaya lokal.

1.3.3 Telaah Dokumen RTRW Provinsi Bali

RTRW Provinsi Bali sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 merupakan dokumen rencana tata ruang jangka panjang (2023-2043) yang menetapkan arah pemanfaatan ruang wilayah Bali. Dokumen RTRW Provinsi Bali menjadi acuan utama dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029, khususnya dalam aspek struktur ruang, mencakup jaringan transportasi dan pusat kegiatan ekonomi, pola ruang, berupa peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya, instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, guna menjaga daya dukung lingkungan dan legalitas pembangunan. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 agar merujuk pada struktur dan pola ruang ini agar pembangunan tidak bertentangan dengan ketentuan zonasi serta rencana pengembangan wilayah yang sah secara hukum.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 tidak hanya memuat program sektoral, tetapi juga harus memastikan keterpaduannya dengan tata ruang wilayah. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjamin kesesuaian lokasi program pembangunan (infrastruktur, industri, pertanian, pariwisata, permukiman) dengan zonasi ruang yang telah ditetapkan, mencegah konflik ruang, seperti tumpang tindih pemanfaatan lahan atau degradasi kawasan lindung,

menjaga daya dukung dan daya tampung ruang melalui pengendalian pembangunan yang berbasis tata ruang. Dengan mengintegrasikan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dengan RTRW Provinsi Bali, pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis, terarah, dan minim risiko lingkungan dan sosial.

RTRW Provinsi Bali menetapkan bahwa pembangunan wilayah Bali diarahkan untuk mewujudkan ruang yang berkualitas, aman, nyaman, dan berkelanjutan**,** berdaya saing dan produktif, dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi berbasis pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri kreatif, menjaga jati diri dan keharmonisan Bali berdasarkan nilai-nilai *Sad Kerthi* dan *Tri Hita Karana*. Maka, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 memastikan bahwa setiap program pembangunan berlandaskan prinsip keharmonisan alam, manusia, dan budaya, mendorong transformasi ekonomi hijau dan inklusif, serta memperkuat identitas lokal sebagai basis daya saing daerah.

RTRW Provinsi Bali menetapkan struktur sistem perkotaan dan pusat pertumbuhan wilayah secara hierarkis yaitu: Sarbagita sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Singaraja, Negara, dan Semarapura sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), kawasan perkotaan lainnya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), empat klaster wilayah pelayanan Bali Utara, Timur, Selatan, dan Barat**.** RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 agar menyelaraskan pengembangan wilayah kabupaten/kota dalam sistem tersebut, mengarahkan investasi strategis dan infrastruktur ke pusat-pusat pertumbuhan, serta membangun keterkaitan antara wilayah urban dan perdesaan (*urban–rural linkage*) sebagai strategi pemerataan wilayah.

RTRW Provinsi Bali memuat batasan dan strategi pengelolaan kawasan lindung berbasis ekosistem dan kearifan lokal. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan Bali yang rendah karbon, berbasis mitigasi bencana, dan menjaga keberlanjutan. Dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029, aspek ini diterjemahkan ke dalam pengendalian kegiatan pembangunan yang berpotensi menekan daya dukung lingkungan, perlindungan terhadap kawasan konservasi, sempadan pantai, dan daerah rawan bencana, penyesuaian program pembangunan dengan analisis daya tampung dan daya dukung lingkungan (DDDTLH).

RTRW Provinsi Bali menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur seperti: jaringan jalan dan transportasi multimoda, sistem air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah, jaringan energi (listrik dan energi terbarukan), pelabuhan dan bandar udara penunjang konektivitas regional dan global. Oleh karena itu, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 menyesuaikan program infrastruktur dengan peta jaringan RTRW, mendorong pengembangan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis

pariwisata dan pertumbuhan ekonomi lokal, serta menghindari pembangunan infrastruktur di kawasan yang tidak sesuai peruntukan. Selain itu salah satu fungsi strategis RTRW adalah memberikan payung hukum dan legalitas atas lokasi kegiatan pembangunan. Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 yang mengacu pada RTRW akan mempercepat proses perizinan, pengadaan lahan, dan pelaksanaan proyek, meminimalisasi potensi sengketa tata ruang, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran**.**

RTRW Provinsi Bali 2023–2043 merupakan dokumen *spasial* yang wajib menjadi acuan utama dan substansial dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029. Dengan memastikan keterpaduan RPJMD terhadap RTRW, maka pembangunan Bali dapat dirancang dan dilaksanakan secara terarah dan legal, sesuai peruntukan dan struktur ruang, berbasis keberlanjutan dan kearifan lokal, selaras dengan nilai *Sad Kerthi* dan *Tri Hita Karana*, mendukung daya saing wilayah, melalui pemanfaatan ruang yang efisien dan terencana, berdaya ungkit tinggi, karena selaras dengan pusat-pusat pertumbuhan, kawasan strategis, dan jaringan infrastruktur utama.

1.3.4 Telaah Dokumen KLHS Provinsi

Telaah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis yang memastikan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Telaah Dokumen KLHS bertujuan untuk memastikan aspek-aspek lingkungan dipertimbangkan secara komprehensif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali. Sesuai dengan tahapan penyusunan RPJMD dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU-PPLH), Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

KLHS merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program 'lebih hijau' dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau

program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. KLHS sebagai bagian dalam penyusunan RPJMD merupakan pengkajian dan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dengan mengacu kepada target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang ditetapkan secara nasional.

KLHS memungkinkan Pemerintah Provinsi Bali untuk secara dini untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari rencana pembangunan dalam RPJMD, menakar daya dukung dan daya tampung lingkungan yang akan digunakan, menganalisis risiko ekologis yang timbul seperti perubahan iklim, konversi lahan, dan degradasi sumber daya. KLHS menyediakan arahan teknis dan strategis untuk memitigasi dampak pembangunan, termasuk pengendalian alih fungsi lahan, khususnya kawasan pertanian dan hutan, konservasi air dan kawasan lindung**,** ketahanan iklim lokal, seperti penguatan vegetasi pesisir atau adaptasi pertanian berbasis iklim, indikator keberlanjutan lokal yang disesuaikan dengan karakteristik ekosistem dan budaya Bali. Hal tersebut menjadi pijakan dalam menetapkan arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja dalam RPJMD.

Konsep "Bali Hijau" sebagai identitas ekologis Provinsi Bali ditopang oleh integrasi KLHS, yang memastikan implementasi ekonomi hijau dan ekonomi sirkular dalam perencanaan pembangunan, perlindungan terhadap kawasan sakral dan budaya, penguatan kapasitas daerah dalam mengembangkan program *green development* yang kontekstual dengan kearifan lokal seperti *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi*. KLHS menjamin bahwa RPJMD Semesta Berencana tidak hanya progresif secara pembangunan, tapi juga reflektif terhadap ekosistem dan nilai-nilai spiritual Bali.

KLHS sebagai instrumen pengendali pasca penyusunan. Fungsi pengendalian mencakup penjaminan bahwa kebijakan dan proyek tidak melampaui batas daya dukung lingkungan, penyediaan dasar evaluasi jangka panjang terhadap efektivitas kebijakan pembangunan hijau, pelindung terhadap penyimpangan implementatif dari RPJMD yang berpotensi menciptakan degradasi ekologis. KLHS menjadi garda depan dalam penyaringan dan pengendalian agenda pembangunan daerah.

1.3.5 Telaah Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ PID) Provinsi Bali

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ PID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat tentang peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

RIPJ PID disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD. RIPJ PID Provinsi dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di kabupaten/kota.

Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Secara umum Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi Bali bertujuan memanfaatkan Riset dan Inovasi untuk:

1. Perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
2. Landasan pengambilan keputusan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
4. Naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah; dan/atau
5. Solusi permasalahan pembangunan.

Berdasarkan tantangan yang dihadapi Bali ke depan dapat dirumuskan 6 (enam) strategi utama yaitu:

1. Pembangunan yang Harmonis terhadap Alam untuk Mewujudkan Bali Hijau.

Dalam mewujudkan pembangunan Bali yang harmonis terhadap alam untuk mewujudkan Bali Hijau, Pemerintah Provinsi Bali menghadapi beberapa tantangan, utamanya emisi energi, sampah dan ekonomi sirkular, serta kenaikan permukaan air laut. Ke depannya, Pemerintah Provinsi Bali perlu mengadakan program dan mengarusutamakan prinsip prinsip ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunannya.

2. Pembangunan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Bali Unggul.

Berdasarkan isu-isu strategis kondisi SDM Bali saat ini terkait dengan kesehatan, pendidikan serta kapasitas riset dan inovasi dalam pengembangan SDM, maka diperlukan strategi transformasi agar SDM Bali yang lebih unggul dan berdaya saing dapat segera tercapai. Berikut strategi-strategi transformasi yang diperlukan adalah:

a. Mewujudkan SDM Bali yang sehat dan bergizi.
b. Mewujudkan SDM Bali yang cerdas berkarakter kuat.
c. Mewujudkan SDM yang inovatif dan kreatif.

3. Pembangunan Bali untuk Mewujudkan Bali Produktif.

Strategi kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sektor ekonomi Bali sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing adalah:

a. Peningkatan produktivitas tenaga kerja menuju pekerja kelas menengah.
b. Modernisasi pertanian menuju Bali organik.
c. Mengembangkan industri hijau berdaya saing dan berorientasi ekspor.
d. Mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
e. Mengembangkan ekonomi kreatif berdaya saing dengan pasar yang luas.
f. Membangun ekosistem UMKM tangguh dan berorientasi ekspor.

4. Pembangunan Bali untuk Mewujudkan Bali Terintegrasi.

Tujuan dari integrasi ekonomi Bali dalam jangka panjang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih memeratakan pembangunan ekonomi, dan menjadikan Bali sebagai hub logistik udara. Hal ini juga mendukung upaya diversifikasi ekonomi Bali. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas darat maupun konektivitas laut antara Bali dan wilayah lainnya, terutama Bali dengan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur. Sejalan dengan hal tersebut, sasaran integrasi ekonomi Bali dalam jangka menengah adalah tersedianya infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang efisien mendukung perdagangan antara Bali dengan Kawasan Timur Indonesia dan Bali dengan negara mitra dagang utama.

5. Pembangunan Bali untuk Mewujudkan Bali *Smart Island.*

Tujuan transformasi digital Bali dalam jangka panjang adalah mewujudkan Bali *Smart Island* yaitu dengan memanfaatkan ekosistem digital dalam mendukung pengembangan model bisnis, penciptaan inovasi dan peningkatan konektivitas berbasis teknologi digital pada aktivitas pariwisata, dunia usaha, pelayanan publik dan aktivitas strategis lainnya dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Bali *Smart Island* dilakukan strategi berikut:

a. Peningkatan literasi digital dan kompetensi SDM.
b. Peningkatan kualitas infrastruktur digital.
c. Penguatan praktik digital pada dunia usaha dan pelayanan publik.
d. Destinasi *startup* global.

6. Pembangunan Bali untuk Mewujudkan Bali Kondusif.

Pembangunan Bali yang kondusif sangat diperlukan agar transformasi ekonomi Bali berlangsung secara optimal dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang diperlukan termasuk sumber daya lokal Bali. Untuk mencapai Bali yang kondusif, dilaksanakan langkah-langkah berikut:

a. Penguatan keuangan daerah.
b. Peningkatan dukungan lembaga keuangan dalam meningkatkan pembiayaan pembangunan.
c. Penguatan perbaikan kemudahan berusaha.
d. Percepatan reformasi birokrasi dan kelembagaan.

1.3.6 Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125

Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Haluan Pembangunan Bali adalah landasan strategis yang memberikan arah, pedoman, dan tuntunan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bali secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi yang bersumber dari nilai kearifan lokal Bali *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru selama Tahun 2025-2125.

Bali Era Baru adalah suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru: Bali yang *Kawista*, Bali yang *Kang Tata-Titi Tentram Kerta Raharja*, dan Bali yang *Gemah Ripah Lohjinawi*, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama: menjaga keseimbangan Alam, Manusia dan Kebudayaan Bali; memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Masyarakat Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Dokumen Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 ini sebagai pedoman sebagai berikut:

1. Memastikan kesucian dan keharmonisan *unteng* Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali terjaga dengan baik secara berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan Masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia *Niskala-Sakala* dalam Bali Era Baru;
2. Memperkuat Manusia Bali yang berkarakter jujur, teguh, konsisten, santun, tabah, loyal, *lascarya*, *tragia*, ulet, gigih, tekun, kreatif, serta inovatif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. Penyusunan visi, misi, dan strategi dengan pendekatan tematik, menyeluruh, serta terintegrasi antara Alam, Manusia dan Kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola, dan tata kelola bagi setiap calon kepala daerah dan kepala desa;

4. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana atau sebutan lain tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Bali;
5. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melestarikan, melindungi, mengembangkan dan/atau memberdayakan adat-istiadat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal yang adiluhung sebagai jati diri Masyarakat Bali; dan
6. Mewujudkan pemerintahan di Bali yang konsisten berkomitmen kuat menjaga kesucian serta keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali untuk kemuliaan generasi Bali sepanjang zaman.

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan arah serta strategi pemerintahan dan pembangunan Bali yang fundamental untuk secara konsisten memuliakan serta menyucikan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali dalam menyejahterakan Masyarakat Bali sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru dalam satu kesatuan wilayah: Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola. Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi: jangka waktu, Haluan Pembangunan Bali, pembinaan dan pengawasan, peran aktif Masyarakat Bali, serta pendanaan.

1.3.7 Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali

Dalam perjalanan pembangunan Bali menuju masa depan yang lebih tangguh, hijau, dan sejahtera, Pemerintah Provinsi Bali menyadari perlunya arah baru yang menyeluruh dan berkelanjutan, terutama pasca pukulan berat akibat pandemi *COVID-19*. Situasi pandemi menjadi cermin sekaligus momentum untuk mengevaluasi kembali struktur ekonomi Bali yang terlalu bertumpu pada sektor pariwisata massal yang rentan terhadap krisis global. Maka, lahirlah Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali, sebuah dokumen strategis yang dirancang untuk menuntun transformasi ekonomi Bali secara fundamental ke arah ekonomi hijau, inklusif, dan berketahanan tinggi.

Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali bukan hanya respons jangka pendek terhadap krisis, melainkan menjadi landasan konseptual dan operasional yang sangat penting dalam perumusan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029. Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali menetapkan enam sektor prioritas yang diyakini mampu menjadi lokomotif transformasi struktural ekonomi daerah, yaitu: pariwisata berbasis budaya dan kualitas, pertanian organik dan berkelanjutan, kelautan dan perikanan, industri kreatif dan digital, ekonomi hijau dan energi bersih, serta UMKM dan koperasi berbasis digitalisasi. Keenam sektor ini tidak hanya menjawab tantangan pembangunan pasca-

pandemi, tetapi juga menawarkan peluang baru yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.

Dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029, prinsip dan strategi dari peta jalan ini diadopsi secara eksplisit agar tercipta konsistensi arah dan keberlanjutan kebijakan. Hal ini mencakup upaya membangun *ekosistem ekonomi hijau* melalui pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan limbah, transportasi ramah lingkungan, serta pengembangan ekowisata dan konservasi. Pembangunan yang didorong oleh nilai-nilai *Tri Hita Karana* ini memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak mengorbankan alam, krama, dan budaya Bali. Lebih lanjut, peta jalan ini memberi panduan praktis yang dapat langsung ditransformasikan menjadi program-program prioritas dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029, seperti digitalisasi ekonomi desa adat, peningkatan produktivitas petani dan nelayan berbasis teknologi, pengembangan *green industrial park*, hingga edukasi dan pelatihan talenta ekonomi digital. Selain itu, Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali juga menekankan pentingnya sinergi multipihak dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah, dunia usaha dan BUMD, perguruan tinggi, masyarakat adat, serta komunitas kreatif, semua perlu berkolaborasi dalam satu semangat yang sama: mewujudkan ekonomi Bali yang tidak hanya pulih, tetapi bangkit lebih kuat, lebih adil, dan berkelanjutan.

Pengintegrasian Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 sebagai roh dari arah pembangunan ekonomi Bali ke depan serta menjadi pondasi dalam menyusun kebijakan, program, dan indikator kinerja pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai lokal Bali dan sekaligus menjawab tantangan global.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan pembangunan jangka menengah di Provinsi Bali guna mewujudkan pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi sesuai dengan amanat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 bertujuan:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang akan menjadi arah pembangunan Provinsi Bali selama lima tahun ke depan.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan serta tantangan pembangunan daerah guna menentukan kebijakan dan strategi

yang tepat dalam mengatasi isu-isu strategis yang dihadapi Provinsi Bali.

3. Menjabarkan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan RPJPD, RPJMN dan RPJMD Kabupaten/Kota se-Bali, sehingga kebijakan pembangunan daerah memiliki kesinambungan dengan perencanaan pembangunan yang lebih luas.
4. Menetapkan indikator kinerja pembangunan daerah yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi dalam mengukur efektivitas dan dampak dari kebijakan pembangunan yang diterapkan.
5. Menjamin keterpaduan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, sehingga alokasi anggaran dapat digunakan secara efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan.
6. Mendorong pembangunan daerah yang berbasis potensi unggulan Provinsi Bali, dengan tetap memerhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta keberlanjutan sosial dan budaya.
7. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, DPRD, masyarakat, serta sektor swasta, guna mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berbasis kolaborasi *multi-stakeholder*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan
   Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Umum Daerah
   Bab ini menyajikan uraian mengenai kondisi umum daerah yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, standar pelayanan minimal, kerja sama daerah, serta rencana pembangunan infrastruktur yang didanai melalui APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota. Selain itu, bab ini juga memuat penjelasan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendukung kinerja pelayanan pemerintah daerah, gambaran keuangan daerah yang mencakup realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 serta proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2030, dan sub bab yang membahas permasalahan serta isu pembangunan daerah.

3. Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
   Bab ini menjabarkan subbab visi dan misi; dan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu juga memuat subbab strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 serta program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
4. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
   Bab ini memuat subbab program perangkat daerah, mengenai daftar program perangkat daerah tahun 2026-2030 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2026-2030. Pada bab ini juga memuat subbab kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).
5. Bab V Penutup
   Bab ini memuat kesimpulan yang bersifat substansial, serta ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Sub-bab Aspek Geografi dan Demografi menyajikan gambaran ringkas dan komprehensif mengenai kondisi fisik dan karakteristik penduduk wilayah yang menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Pulau Bali merupakan satu di antara 38 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (*Island of God*). Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan Ibu Kota Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. Pulau Bali termasuk wilayah Indonesia bagian tengah pada posisi 07°51'39" LS-09°03'01" LS dan 114°24'43" BT - 115°52'28" BT.

Provinsi Bali memiliki luas wilayah 5.590,15 km^2 atau 559.015 Ha. Secara administratif Provinsi Bali terdiri atas delapan kabupaten dan satu kota, 57 kecamatan, dan 716 desa/kelurahan (80 kelurahan dan 636 desa) dengan batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

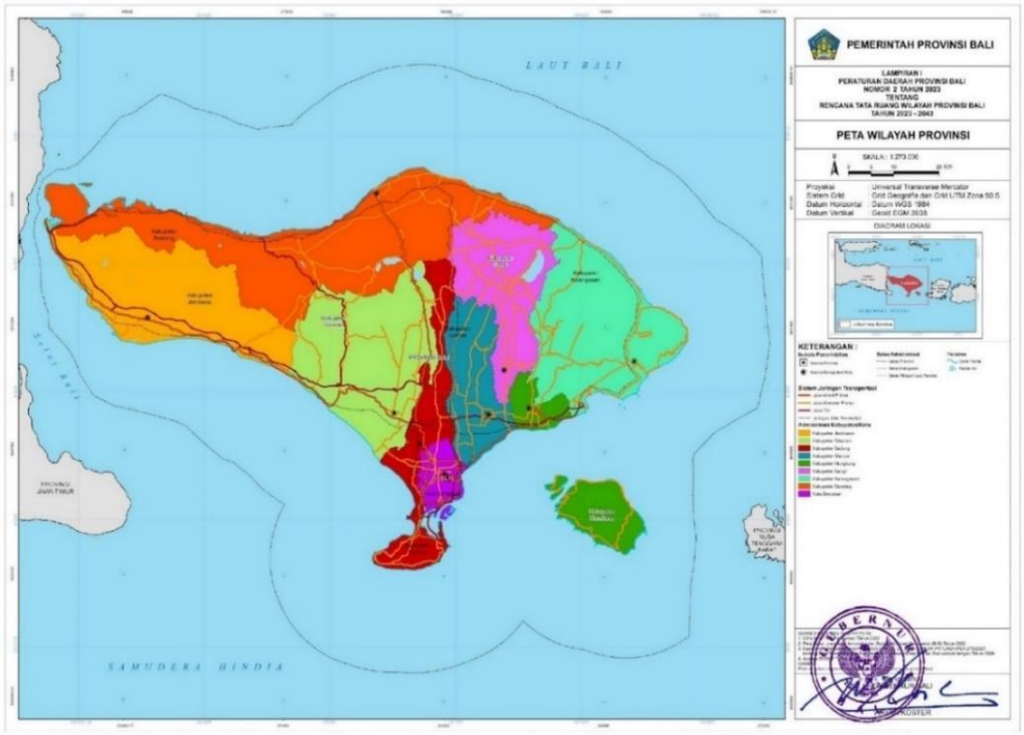
Sebelah Utara : Laut Bali
Sebelah Timur : Selat Lombok
Sebelah Selatan : Samudera Hindia
Sebelah Barat : Selat Bali

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Luas (km^2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa Adat
Jembrana	849,13	5	51	64
Tabanan	849,31	10	133	349
Badung	398,75	6	62	124
Gianyar	364,36	7	70	273
Klungkung	313,96	4	59	125
Bangli	526,76	4	72	170
Karangasem	839,32	8	78	190
Buleleng	1.322,68	9	148	170
Denpasar	125,87	4	43	35
Jumlah	**5.590,15**	**57**	**716**	**1.500**

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka 2024 dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (2025)

Bali juga memiliki beberapa lembaga tradisional, seperti desa adat sebanyak 1.500, banjar adat sebanyak 3.625, subak sawah sebanyak 1.598, dan subak abian sebanyak 1.232. Lembaga-lembaga inilah yang menjadi tulang punggung penjaga kelestarian budaya Bali sampai ke depan nanti.



Gambar 2.1
Peta Wilayah Provinsi Bali
Sumber: *https://tarubali.baliprov.go.id/album-peta/*

Dengan memiliki letak yang strategis, Provinsi Bali dalam perencanaan pembangunan nasional Indonesia memiliki peran strategis yang dicantumkan dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Tema Koridor Ekonomi: *Superhub* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki potensi pariwisata yang beragam mulai dari wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, wisata buatan dan wisata minat khusus yang tersebar di seluruh wilayah, serta potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal. Pengembangan potensi ini telah didukung dengan adanya penetapan DPP, KSPN, dan destinasi pariwisata pengembangan yang diharapkan mampu memberikan *multiplier effects* pada berbagai sektor khususnya terkait industri pariwisata dan ekonomi kreatif seperti akomodasi, kuliner, fesyen, kriya, seni pertunjukan, dan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Wilayah Bali-Nusa Tenggara juga memiliki berbagai potensi ekonomi kreatif baik yang didukung oleh komoditas unggulan maupun yang dipengaruhi oleh ragam budaya dan tradisi lokal.

Provinsi Bali sebagai salah satu tulang punggung pariwisata di Indonesia, telah memiliki 3.219 usaha ekonomi kreatif dan memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan berupa kopi Kintamani dan Pupuan, Mete Kubu, Salak Sibetan Karangasem, Garam Amed, Kerajinan Perak Celuk Gianyar, dan Tenun Gringsing. Tenun di Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki motif yang khas sebagai wujud rantai budaya dan tradisi turun temurun yang bernilai ekonomi, serta potensial untuk dikembangkan hingga mampu berkontribusi pada industri fesyen internasional.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki beragam komoditas unggulan berupa komoditas tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya. Potensi ini dapat dilihat dari besarnya produksi yang dapat mendukung peningkatan hilirisasi komoditas unggulan yang berorientasi ekspor. Provinsi Bali memiliki potensi seperti cabai, kopi, udang, tuna, cengkeh, sapi, babi, ayam, dan rumput laut. Pengembangan potensi khususnya untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan dan peternakan telah didukung dengan adanya Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan Kawasan *Food Estate*. Sementara, pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) juga dilakukan untuk mendukung pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan. Potensi komoditas unggulan juga dapat menopang rantai pasok industri akomodasi dan makan minum, serta bahan baku ekonomi kreatif lainnya dalam menunjang pengembangan pariwisata wilayah. Wilayah Bali juga memiliki sumber EBT yang sangat potensial untuk dikembangkan. Provinsi Bali memiliki potensi tenaga surya sebesar 21,56 GW.

Provinsi Bali memiliki potensi demografi yang menarik, di mana sebagian besar penduduknya berada di usia produktif, sehingga ini menjadi bonus demografi, dengan sekitar 70,96% penduduknya berada di usia produktif. Hal ini menunjukkan potensi sumber daya manusia yang besar untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan inovasi.

Bali juga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan budaya yang kaya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kepadatan penduduk Bali mencapai 793 jiwa per kilometer persegi, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kepadatan ini memberikan potensi untuk pengembangan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik.

Bali memiliki budaya yang kaya, termasuk seni tari, pertunjukan, dan upacara adat yang menarik wisatawan lokal dan internasional. Penguatan Lembaga-lembaga adat juga akan mendukung lestarinya budaya Bali. Budaya ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Bali

terkenal sebagai destinasi wisata andalan dengan berbagai keindahan alam, budaya, dan kuliner. Sektor pariwisata dapat terus dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

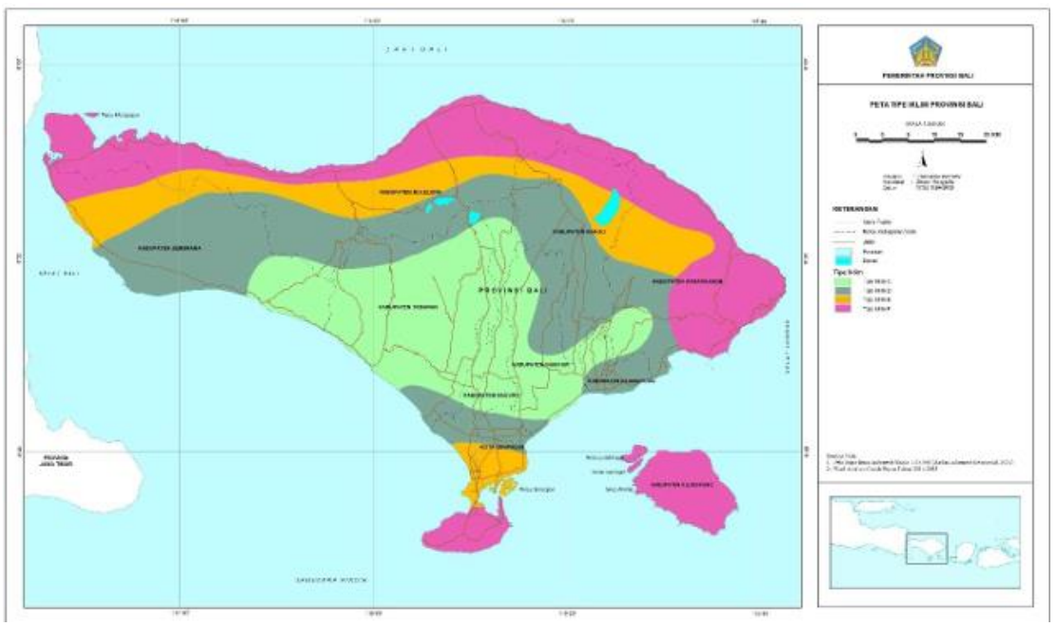
2.1.2 Klimatologi

Klimatologi menjelaskan karakteristik iklim daerah yang meliputi variabel-variabel dasar seperti tipe dan kondisi iklim, curah hujan, suhu udara, dan kelembapan udara.

2.1.2.1 Tipe dan Kondisi Iklim

Berdasarkan klasifikasi *Schmidt-Ferguson* (persentase perbandingan rata-rata bulan kering dengan rata-rata bulan basah, Q) wilayah Provinsi Bali dapat diklasifikasikan ke dalam tipe iklim C sampai F. Tipe iklim F (Kering, Q 167 – 300%) umumnya tersebar di wilayah pesisir utara dan timur Pulau Bali, wilayah perbukitan Bali selatan dan pulau-pulau di Kecamatan Nusa Penida. Tipe iklim E (Agak Kering, Q = 100 – 167%) terdapat di wilayah Kota Denpasar (Denpasar Selatan), Kabupaten Badung (Kuta dan Kuta Utara), Jembrana (Melaya), dan Buleleng (Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan dan Kubutambahan). Tipe iklim D (Sedang, Q = 60 – 100%) tesebar di Kota Denpasar (Denpasar Timur), Kabupaten Badung (Mengwi), Tabanan (Kediri), Jembrana (Negara, Jembrana dan Mendoyo), Klungkung (Banjarangkan, Klungkung dan Dawan), Gianyar (Sukawati) dan Kabupaten Karangasem (Manggis). Sedangkan tipe iklim C (Agak Basah, Q = 33,3 – 60%) tersebar di sebagian besar wilayah pesisir Kabupaten Tabanan, Jembrana (Pekutatan), dan Gianyar (Blahbatuh dan Gianyar).

Bali termasuk ke dalam daerah monsun yang ditandai dengan pergantian arah angin permukaan sekitar enam bulan sekali. Pada musim Barat (Oktober - Maret), cuaca di Bali dipengaruhi oleh angin Barat, baik yang melalui Laut Jawa (disebut Monsun Pasifik), maupun yang melalui Samudra Hindia. Dua samudera ini mempengaruhi karakteristik curah hujan di wilayah Bali, dengan pengaruh angin monsun Barat Samudera Hindia dominan di sebelah Selatan, dan Monsun Pasifik di sebelah Utara. Monsun barat umumnya menimbulkan banyak hujan (musim hujan) yang terjadi sekitar bulan Januari, monsun timur umumnya menyebabkan kondisi kurang hujan (musim kemarau) yang terjadi sekitar bulan Agustus.



Gambar 2.2
Peta Tipe Iklim Klasifikasi *Schmidt-Ferguson* di Wilayah Provinsi Bali
Sumber: *https://tarubali.baliprov.go.id/album-peta/*

2.1.2.2 Curah Hujan

Secara umum, data curah hujan di Provinsi Bali periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuasi yang menggambarkan variabilitas iklim regional; setelah mengalami kenaikan yang signifikan, curah hujan kemudian menurun cukup drastis sebelum kembali menunjukkan pemulihan moderat. Kondisi ini mencerminkan pengaruh faktor-faktor klimatologis seperti monsun dan fenomena *El Niño/La Niña*, sehingga menuntut pendekatan manajemen sumber daya air yang antisipatif dan adaptif terhadap potensi ekstrim hujan maupun kekeringan.

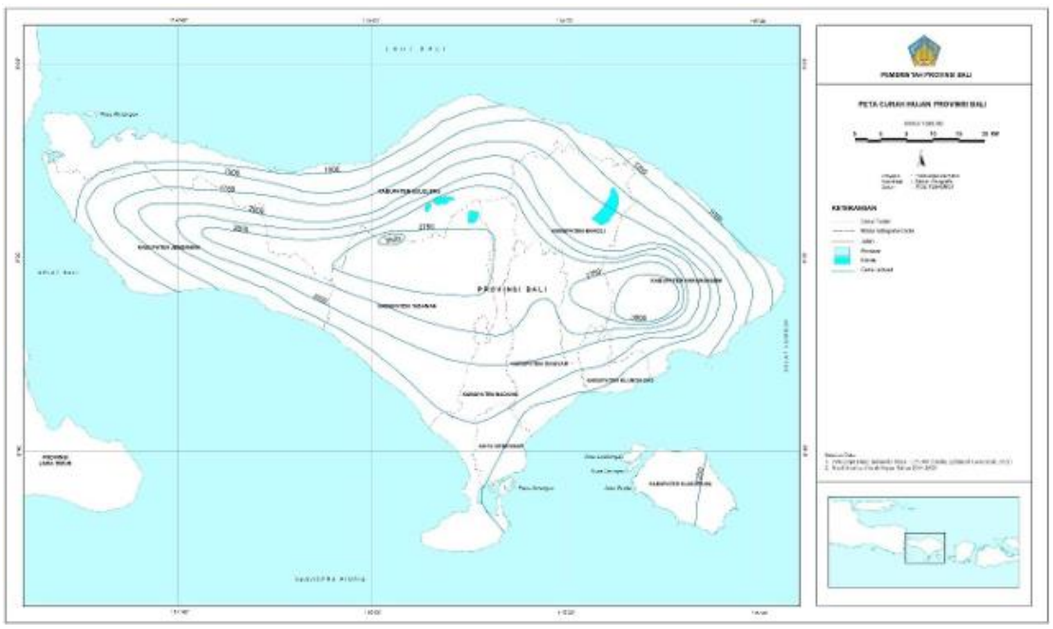
Tabel 2.2
Curah Hujan Menurut Stasiun Pengamatan di Provinsi Bali
Tahun 2020-2024

No	Stasiun	Curah Hujan (mm)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Klimatologi Jembrana	2600	2642	2834	1907	2019
2	Meteorologi Ngurah Rai	1391	2993	2492	1562	2206
3	Geofisika Karangasem	1845	2382	2410	1688	2152
4	Gefisika Denpasar	1650	3341	2546	1708	2063

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka 2020-2025 (BPS Provinsi Bali, 2020-2025)

Berdasarkan Tabel 2.2 yang menyajikan data curah hujan di lima stasiun pengamatan Provinsi Bali periode 2020-2024, terlihat adanya variasi *spasial* dan temporal yang signifikan. Dari aspek temporal, tahun 2021 dan 2022 merupakan periode dengan curah hujan tertinggi di hampir seluruh stasiun pengamatan, sementara tahun 2020 dan 2024 cenderung mencatat curah hujan yang lebih rendah. Pola fluktuasi ini kemungkinan dipengaruhi oleh fenomena iklim regional seperti *La Niña* dan *El Niño* yang memengaruhi distribusi curah hujan di wilayah Indonesia, termasuk Bali.

Sebaran curah hujan berdasarkan peta curah hujan menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Bali memiliki curah hujan rata-rata tahunan berkisar 1.000-3.500 mm. Semakin tinggi letak dari permukaan laut sampai tinggi curah hujan. Curah hujan tahunan di wilayah pesisir berkisar 1.000-2.000 mm sedangkan di daerah pegunungan berkisar 2.750-3.500 mm.



Gambar 2.3
Peta Curah Hujan di Wilayah Provinsi Bali
Sumber: *https://tarubali.baliprov.go.id/album-peta/*

2.1.2.3 Suhu Udara

Secara keseluruhan, rata-rata suhu udara di berbagai stasiun pengamatan di Provinsi Bali selama periode 2020–2024 cenderung menunjukkan kecenderungan kenaikan hingga sekitar tahun 2021–2022, diikuti oleh penurunan moderat pada 2023 dan sedikit pemulihan pada 2024. Pola ini merefleksikan variabilitas iklim mikro-regional yang dipengaruhi oleh dinamika lokal dan global, termasuk perubahan iklim dan pola monsun yang menyebabkan fluktuasi suhu meski pada umumnya bergerak naik. Dengan demikian, meski tidak terjadi lonjakan ekstrem, perlunya strategi adaptasi terintegrasi dalam sektor pertanian, kesehatan, dan perencanaan perkotaan menjadi

semakin mendesak untuk mengantisipasi dampak kenaikan suhu yang bersifat kumulatif.

Tabel 2.3
Suhu Udara Rata-Rata Menurut Stasiun Pengamatan di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

No	Stasiun	Suhu Udara (°C)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Klimatologi Jembrana	26,9	28,0	28,0	28,2	-
2	Meteorologi Ngurah Rai	27,7	27,6	27,7	27,5	28,0
3	Geofisika Karangasem	26,3	28,1	28,1	28,2	-
4	Geofisika Denpasar	28,2	29,9	30,0	28,0	28,3

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka 2020-2025 (BPS Provinsi Bali, 2020-2025)

2.1.2.4 Kelembapan Udara

Berdasarkan data kelembapan udara rata-rata di empat stasiun pengamatan Provinsi Bali periode 2020-2024, terlihat bahwa seluruh stasiun menunjukkan tingkat kelembapan yang tinggi dengan rentang 73,7% hingga 84,0%, yang mengonfirmasi karakteristik iklim tropis lembab Bali. Analisis temporal mengungkapkan pola penurunan kelembapan secara umum dari tahun 2020 hingga 2023, dengan Stasiun Klimatologi Jembrana mengalami penurunan paling signifikan dari 84,0% menjadi 78,6%, sementara Stasiun Meteorologi Ngurah Rai relatif stabil dengan fluktuasi minimal. Variasi *spasial* antar stasiun menunjukkan adanya pengaruh faktor geografis lokal, dimana Jembrana konsisten memiliki kelembapan tertinggi, kemungkinan akibat posisinya yang lebih dekat dengan perairan dan topografi yang mendukung retensi uap air. Pola pemulihan kelembapan yang terlihat pada tahun 2024 di beberapa stasiun mengindikasikan adanya siklus klimatologis alami atau pengaruh fenomena iklim regional seperti variabilitas monsun. Data ini memberikan gambaran penting untuk pemahaman dinamika iklim mikro Bali yang dapat mendukung perencanaan pertanian, pariwisata, dan mitigasi perubahan iklim di tingkat provinsi.

Tabel 2.4
Kelembapan Udara Rata-Rata Menurut Stasiun Pengamatan di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

No	Stasiun	Kelembapan Udara (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Klimatologi Jembrana	84,0	81,0	81,1	78,6	-
2	Meteorologi Ngurah Rai	80,0	81,0	81,4	81,6	79,6
3	Geofisika Karangasem	80,0	76,1	76,3	74,3	-
4	Geofisika Denpasar	78,0	73,7	73,8	78,8	79,6

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka 2020-2025 (BPS Provinsi Bali, 2020-2025)

2.1.3 Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam meliputi sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, serta sumber daya kelautan dan perikanan.

2.1.3.1 Status Mutu dan Ketersediaan Sumber Daya Hutan

Kawasan hutan dibagi ke dalam hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri atas hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi dibagi dalam Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam), serta Taman Buru. Sedangkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Status mutu kawasan hutan salah satunya dapat dilihat dari kondisi tutupan hutan dan kondisi lahan kritis di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan dengan kondisi lahan kritis dan sangat kritis tahun 2022 sebesar 9,62%, sementara lahan potensi kritis dan agak kritis masing-masing 6,63% dan 73,21%.

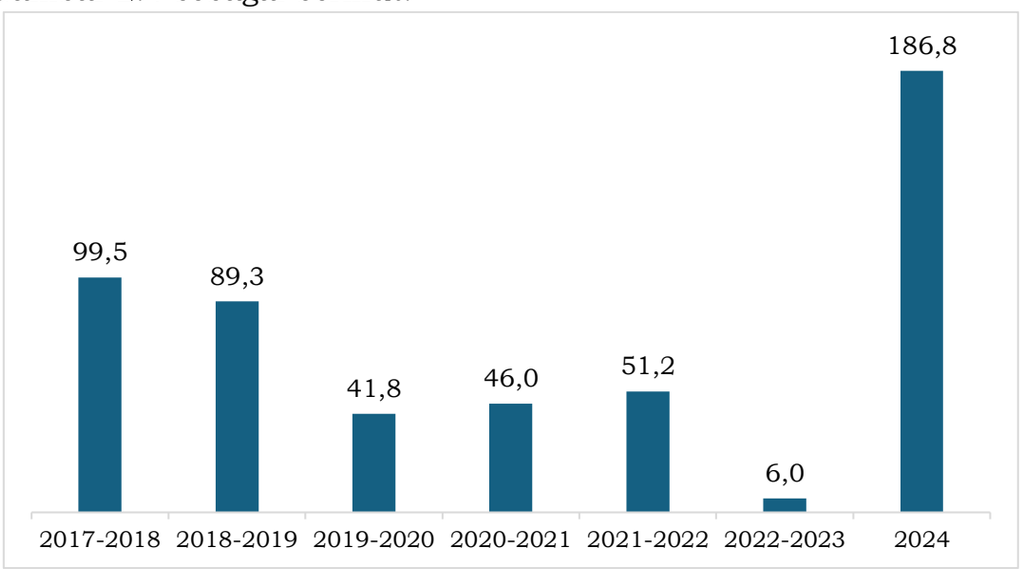
Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, hutan memiliki potensi untuk menyediakan sumber daya alam berupa kayu dan non-kayu (hasil hutan bukan kayu), serta jasa-jasa lingkungan. Sebagian besar kawasan hutan di Bali adalah hutan lindung. Potensi sumber daya alam yang tersedia yang dapat dimanfaatkan di kawasan hutan lindung adalah hasil hutan bukan kayu dan jasa-jasa lingkungan. Jasa-jasa lingkungan diantaranya berupa sumber daya air, wisata alam, dan penyerapan karbon. Demikian juga sumber daya alam yang dapat disediakan oleh hutan konservasi adalah hasil hutan bukan kayu dan jasa-jasa lingkungan. Sedangkan potensi sumber daya alam kawasan hutan produksi berupa hasil kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa-jasa lingkungan. Namun demikian, potensi kayu di dalam kawasan hutan produksi di Bali sangat kecil dan selama ini tidak dapat dimanfaatkan kayunya karena sebagian besar hutan produksi kondisinya kritis.

Untuk meningkatkan status mutu kawasan hutan, pemerintah telah berupaya melakukan rehabilitasi kawasan hutan. Lahan kritis di dalam kawasan hutan dan daerah aliran sungai yang direhabilitasi di Bali dalam periode 2015-2022 seluas 27.652 ha. Rehabilitas hutan dan lahan di Bali melalui rehabilitasi vegetatif, *mangrove*, penanaman kebun bibit rakyat dan kebun bibit desa dalam periode 2015-2022

berkisar 750 – 5.687 ha, terluas pada tahun 2015 dan terkecil tahun 2019. Memperhatikan luas lahan kritis yang cukup besar maka kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Bali masih relatif kecil dan perlu terus ditingkatkan, termasuk melibatkan masyarakat melalui program hutan kemasyarakatan. Sementara itu, praktik-praktik perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar di Bali sudah dapat ditekan sehingga kasus-kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar tidak lagi menonjol dalam pengelolaan hutan.

Kualitas hutan dapat pula diketahui dari kondisi tutupan hutan. Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan dan kebakaran hutan maupun kegiatan rehabilitasi hutan.

Jika dilihat tren deforestasi, angka deforestasi *netto* kawasan hutan di Bali mengalami peningkatan sejak tahun 2021 sampai tahun 2022. Angka deforestasi *netto* pada tahun 2017-2018 mencapai 99,5 ha/tahun, dapat diturunkan menjadi 89,3 ha/tahun pada tahun 2018-2019 dan 41,8 ha/tahun pada 2019-2020. Namun pada 2020-2021 kembali meningkat menjadi 46,00 ha/tahun dan 2021-2022 sebesar 51,2 ha/tahun, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Gambar 2.4 sebagai berikut.



Gambar 2.4
Angka Deforestasi *Netto* Kawasan Hutan di Provinsi Bali
Sumber: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laporan Kinerja KLHK 2024, LPPD DKLH Provinsi Bali 2024

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai deforestasi *netto* kawasan hutan di Provinsi Bali periode 2017-2024 menunjukkan fluktuasi yang sangat dinamis dengan kecenderungan yang mengkhawatirkan pada tahun terakhir. Setelah mengalami tren penurunan yang konsisten dari 99,5 hektar (2017-2018) menjadi 41,8 hektar (2019-2020), deforestasi sempat meningkat kembali pada

periode 2020-2021 dan 2021-2022 dengan luas masing-masing 46,0 dan 51,2 hektar.

Pencapaian terbaik terjadi pada periode 2022-2023 dengan deforestasi *netto* hanya 6,0 hektar, menunjukkan keberhasilan upaya konservasi dan penegakan hukum lingkungan. Namun, data tahun 2024 mengungkap lonjakan dramatis menjadi 186,8 hektar, merupakan angka tertinggi sepanjang periode pemantauan dan hampir tiga kali lipat dari rekor tertinggi sebelumnya.

Peningkatan ekstrem sebesar 3.013% dari tahun sebelumnya ini mengindikasikan adanya tekanan luar biasa terhadap kawasan hutan Bali, kemungkinan dipicu oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi, peningkatan aktivitas pembangunan, atau melemahnya pengawasan. Kondisi ini memerlukan respons kebijakan yang cepat dan tegas, mengingat keterbatasan luas hutan di Bali yang hanya sekitar 130.000 hektar. Kehilangan 186,8 hektar dalam setahun merupakan ancaman serius terhadap keseimbangan ekosistem, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali.

2.1.3.2 Status Mutu dan Ketersediaan Sumber Daya Lahan

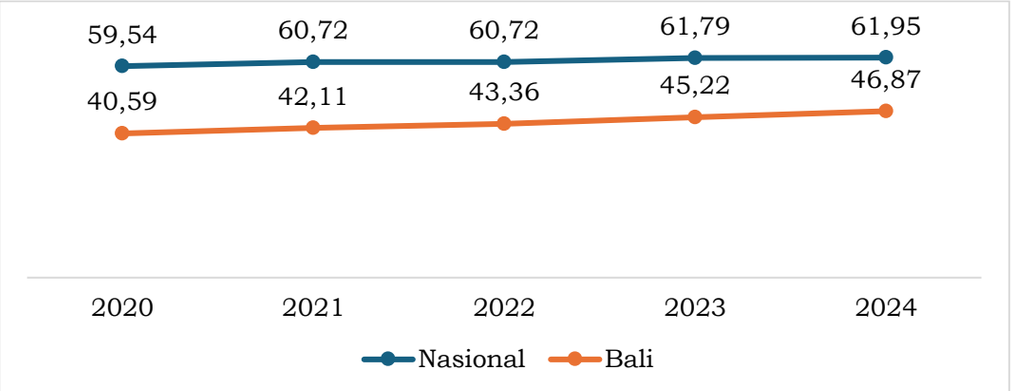
Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2025–2045, menyatakan bahwa luas lahan di luar kawasan hutan dan badan air di Bali adalah 418.805 ha atau 74,92% dari luas wilayah. Sebaran menurut kabupaten/kota, yaitu berkisar 11.931–74.511 ha, terluas di Kabupaten Buleleng dan terkecil di Kota Denpasar. Permasalahan utama terkait dengan status mutu lahan di Bali adalah lahan kritis. Lahan kritis dan sangat kritis di luar kawasan hutan tahun 2022 mencapai 6,63%, lahan potensi kritis 11,36% dan agak kritis 47,73%.

Lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air, unsur produksi pertanian, ataupun unsur perlindungan alam dan lingkungannya. Lahan kritis merupakan suatu lahan yang kondisi tanahnya telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik, kimia, atau biologi yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi, orologi, produksi pertanian, pemukiman, dan kehidupan sosial ekonomi di sekitar daerah pengaruhnya.

Selain menghadapi masalah mutu lahan dengan tingginya proposi lahan kritis, ketersediaan sumber daya lahan untuk produksi di Bali dihadapkan masalah tingginya rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk. Lahan terbangun adalah area tidak bervegetasi yang memiliki tutupan lahan buatan yang biasanya bersifat kedap air dan relatif permanen. Selama 10 tahun (2010–2020) telah terjadi perluasan lahan terbangun seluas

66.722,62 ha atau 191,93% dengan rata-rata laju perluasan lahan terbangun sebesar 19,19% pertahun. Sementara itu, jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2020 adalah 4.317.404 jiwa. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Bali sebanyak 3.890.757 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dalam periode 2010–2020, yaitu rata-rata 1,01% per tahun. Dengan demikian, rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk dalam periode 2010–2020 adalah 19,19% berbanding 1,01% atau 19,00.

Berdasarkan data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) periode 2020-2024 yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, teridentifikasi adanya tren peningkatan signifikan pada indeks tutupan lahan baik di tingkat nasional maupun Provinsi Bali. Indeks tutupan lahan nasional mengalami kenaikan moderat sebesar 2,41 poin (4,0%) dari 59,54 pada 2020 menjadi 61,95 pada 2024, sementara Provinsi Bali menunjukkan peningkatan lebih substansial sebesar 6,28 poin (15,5%) dari 40,59 menjadi 46,87 pada periode yang sama. Meskipun Bali mengalami laju pertumbuhan indeks yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, nilai absolut indeks Bali masih berada jauh di bawah capaian nasional dengan selisih 15,08 poin pada 2024, meski terjadi penyempitan kesenjangan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 18,95 poin. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan kualitas tutupan lahan yang progresif di Provinsi Bali, masih diperlukan intensifikasi program pengelolaan tutupan lahan untuk mencapai paritas dengan standar nasional. Temuan ini merefleksikan adanya tantangan spesifik dalam konteks tutupan lahan di Bali yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

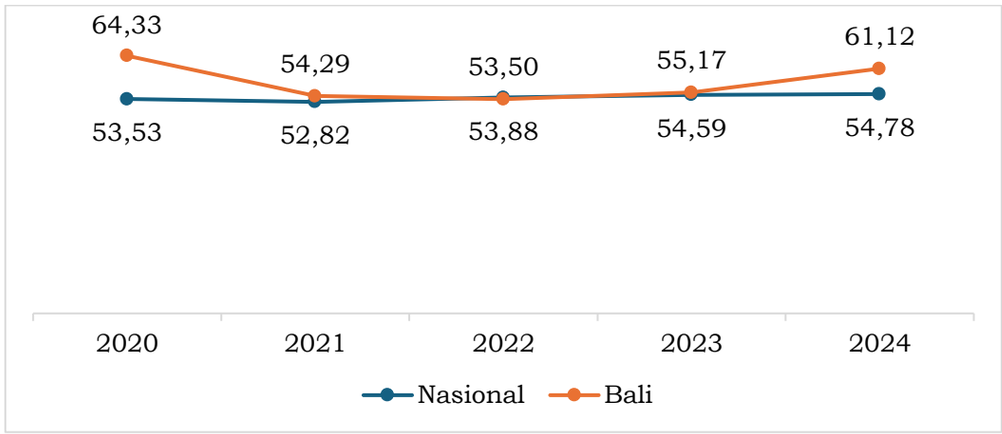


Gambar 2.5
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Bali
Sumber: IKLH 2020-2024 (Kementerian LHK, 2020-2024)

2.1.3.3 Status Mutu dan Ketersediaan Sumber Daya Air

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023, Provinsi Bali mempunyai karakteristik hidrologi yang beragam meliputi sungai, danau, mata air, dan air tanah. Secara umum jenis sumber air dapat dikategorikan sebagai air permukaan dan air tanah. Air permukaan dapat berasal dari: (1) air hujan yang mengalir di permukaan bumi dan terkumpul pada suatu tempat yang relatif rendah, seperti sungai, danau, laut, dan sebagainya; (2) air tanah yang mengalir ke luar permukaan bumi, misalnya air dari mata air yang mengalir ke permukaan bumi; dan (3) air buangan bekas aktivitas manusia. Sementara itu, air tanah adalah air permukaan yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan air tanah yang disebut "*aquifer*". Jenis-jenis air tanah adalah (1) air tanah dangkal, yaitu air hujan/air permukaan yang hanya meresap sampai muka air tanah yang berada di atas lapisan rapat air, umumnya mempunyai kedalaman kurang dari 50 m; (2) air tanah dalam, yaitu air tanah yang terletak di antara dua lapisan kedap air, letaknya biasanya cukup jauh dari permukaan tanah; dan (3) mata air, yaitu air di dalam tanah mengalir pada lapisan tanah berpasir atau berkerikil, atau mengalir melalui celah pada lapisan kedap air. Tempat keluarnya air di permukaan tanah ini disebut mata air.

Jumlah total ketersediaan air di Provinsi Bali adalah 2.078.807.392,80 m^3/tahun. Ketersediaan air menurut kabupaten/kota berkisar 34.779.742,42 – 491.070.463,68 m^3/tahun. Sesuai dengan luas wilayah, ketersediaan air tertinggi terdapat di Buleleng dan terkecil di Denpasar. Sedangkan jumlah kebutuhan air di Provinsi Bali yaitu 4.061.324.302,72 m^3/tahun, terdiri dari kebutuhan air domestik sebanyak 373.035.456,00 m^3/tahun (9,19%) dan kebutuhan lahan untuk pertanian, perikanan dan perkebunan sebanyak 3.688.288.846,72 m^3/tahun (90,81%). Berdasarkan jumlah ketersediaan air dibandingkan dengan jumlah kebutuhan air, indikasi status daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Bali adalah "terlampaui". Jumlah defisit air di Bali mencapai (-)1.982.516.909,92 m^3/tahun atau (-)95,37% dari jumlah ketersediaan air.



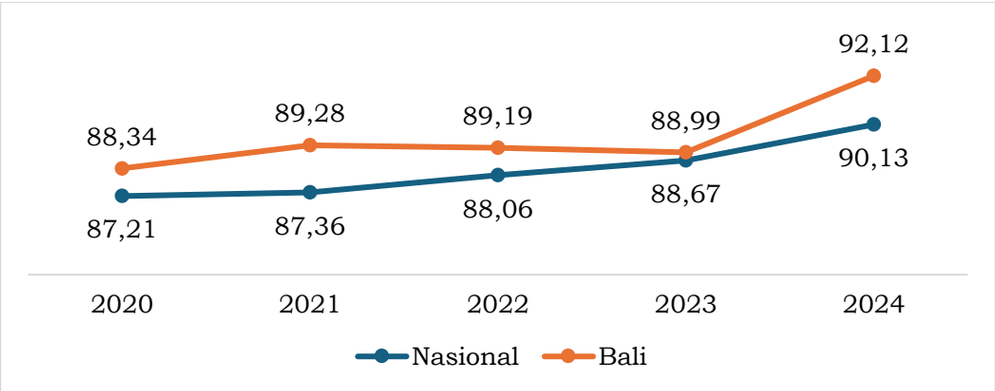
Gambar 2.6
Indeks Kualitas Air di Provinsi Bali Tahun 2020–2024
Sumber: SIPD; Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali; Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2024

Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara periode 2020-2024, terjadi fluktuasi yang signifikan pada kualitas udara di Provinsi Bali, sementara indeks nasional cenderung stabil dengan kenaikan moderat. Pada tahun 2020, Bali mencatatkan indeks 64,33, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 53,53. Fenomena menarik teridentifikasi pada periode 2021-2022 ketika indeks Bali mengalami penurunan substansial hingga mencapai 53,50, sedikit di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini mengalami pembalikan tren pada 2023-2024, dengan peningkatan progresif hingga mencapai 61,12 pada 2024, kembali melampaui indeks nasional yang hanya mencapai 54,78. Pola fluktuatif ini mengindikasikan adanya dinamika kompleks dalam pengelolaan kualitas udara di Bali yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti aktivitas pariwisata, industrialisasi, transportasi, atau perubahan kebijakan lingkungan. Peningkatan signifikan pada dua tahun terakhir menunjukkan adanya upaya mitigasi pencemaran udara yang efektif, meskipun perlu dilakukan studi lanjutan untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang mempengaruhi volatilitas indeks kualitas udara di Provinsi Bali.

2.1.3.4 Kualitas Udara

Kualitas udara dapat dinilai dari Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara adalah gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum, parameter tersebut yakni kadar *Sulfur Dioksida* (SO_2) dan *Nitrogen Dioksida* (NO_2).

Analisis terhadap data Indeks Kualitas Udara periode 2020-2024 mengungkapkan bahwa Provinsi Bali secara konsisten mempertahankan nilai indeks yang superior dibandingkan rerata nasional. Tren peningkatan kualitas udara teridentifikasi pada kedua entitas, dengan Bali menunjukkan peningkatan dari 88,34 pada 2020 menjadi 92,12 pada 2024 (peningkatan 3,78 poin atau 4,3%), sementara indeks nasional meningkat dari 87,21 menjadi 90,13 (peningkatan 2,92 poin atau 3,3%). Fenomena fluktuasi minor terjadi pada indeks Bali periode 2021-2023 dengan penurunan gradual dari 89,28 menjadi 88,99, sebelum mengalami akselerasi signifikan pada 2024 dengan kenaikan 3,13 poin. Kontras dengan pola tersebut, indeks nasional memperlihatkan tren kenaikan yang lebih linier dan stabil. Disparitas antara indeks Bali dan nasional yang melebar pada 2024 (selisih 1,99 poin) mengindikasikan keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian pencemaran udara di Provinsi Bali yang lebih efektif dibandingkan rerata nasional, meskipun diperlukan investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi determinan spesifik yang mempengaruhi dinamika kualitas udara di Bali.



Gambar 2.7
Indeks Kualitas Udara di Provinsi Bali
Sumber: IKLH 2020-2024 (Kementerian LHK, 2020-2024); Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2024

2.1.3.5 Status Mutu dan Ketersediaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Potensi lestari sumber daya ikan di perairan laut wilayah Provinsi Bali sebesar 147.278,75 ton/tahun, terdiri dari ikan pelagis 123.906,0 ton/tahun dan ikan demersal 23.372,75 ton/tahun. Berdasarkan volume hasil tangkapan ikan maka proporsi tangkapan ikan di laut terhadap potensi lestari sumber daya ikan dalam periode 2013–2022 berkisar 64,51–79,38%. Ini berarti bahwa perikanan tangkap di Bali masih berada dalam tingkat yang aman (tidak *overfishing*).

Sebaran sumber daya ikan dapat dikelompokkan ke dalam tiga Daerah Penangkapan Ikan (DPI) atau *fishing ground*, yaitu:

1. DPI Bali Barat, meliputi perairan Selat Bali; termasuk ke dalam WPPNRI 573.
2. DPI Bali Timur, meliputi perairan Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan sekitar Nusa Penida); termasuk ke dalam WPPNRI 573.
3. DPI Bali Utara, meliputi perairan Laut Bali; termasuk ke dalam WPPNRI 713.

Sumber daya ikan yang menjadi unggulan di DPI Bali Barat adalah ikan pelagis kecil khususnya ikan lemuru (*Sardinella lemuru*). Kapasitas produksi ikan lemuru rata-rata mencapai 28.126 ton/tahun. Distribusi ikan lemuru ini menyebar hampir di seluruh perairan Selat Bali. Daerah penangkapannya tersebar di sepanjang pantai barat Pulau Bali dan pantai Timur Banyuwangi. Sumber daya ikan pelagis kecil lainnya di perairan Selat Bali, yaitu ikan layang (*Decapterus spp.*), tembang (*Sardinella fimbriata*), teri (*Stolephorus sp.*), kenyar (*Sarda orientalis*) dan slengseng atau makerel (*Scomber scombrus*). DPI Bali Barat juga memiliki potensi komoditas ikan pelagis besar, ikan demersal dan ikan karang, cumi-cumi, dan lobster, akan tetapi kapasitas produksinya tidak sebesar ikan pelagis kecil. Ikan pelagis besar terutama tongkol komo (*Euthynnus affinis*), cakalang (*Katsuwonus pelamis*), tongkol abu-abu (*Thunnus tonggol*), dan tenggiri (*Scomberomorus commerson*), sedangkan ikan demersal dan ikan karang meliputi beronang (*Siganus spp.*), kakap putih (*Lates calcarifer*), kerapu karang, dan layur (*Trichiurus lepturus*).

DPI Bali Timur memiliki potensi sumber daya ikan unggulan dari kelompok ikan pelagis besar, terutama ikan tongkol dengan kapasitas produksi sebesar 11.558 ton/tahun. Komoditas ikan tongkol terdiri atas tongkol krei (*Auxis thazard*), tongkol komo, tongkol abu-abu. Komoditas ikan pelagis besar lainnya adalah cakalang, lemadang (*Coryphaena hipporus*), albakor (*Thunnus alalunga*), dan cucut (*Carcharinus spp.*). Sementara itu, potensi ikan pelagis kecil pada DPI Bali Timur tidak signifikan, hanya terdapat jenis ikan selar (*Selaroides leptolepis*), sunglir (*Elagastis bipinnulatus*), dan tembang di perairan Selat Badung. Sementara itu, potensi jenis ikan demersal yang menjadi unggulan di DPI Bali Timur meliputi kakap merah (*Lutjanus sp.*), kerapu karang (*famili Serranidae*), dan kurisi (*Nemitharus nemathoporus*). DPI ini juga memiliki potensi udang lobster di perairan pantai Kabupaten Gianyar. Jenis lobster yang dominan adalah lobster pasir (*Panulirus humarus*) dan lainnya, meliputi lobster bambu merah (*P. longipes*), lobster bambu coklat (*P. polyphagus*), lobster mutiara (*P. ornatus*), dan lobster batu (*P. penicilatus*).

DPI Bali Utara memiliki beberapa komoditas unggulan dari kelompok ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, serta ikan demersal dan ikan karang. Komoditas ikan pelagis besar didominasi oleh jenis

ikan tongkol komo dan cakalang dengan kapasitas produksi rata-rata masing-masing 4.306 ton/tahun dan 3.568 ton/tahun. Ikan pelagis besar lainnya, yaitu madidihang (*Thunnus albacores*), tenggiri, dan lemadang. Ikan pelagis kecil yang menjadi unggulan di DPI ini, meliputi ikan terbang (*Cheilopogon katoptron*), lemuru, tembang, layang, teri, kembung (*Rastrelliger kanagurta*), selar, dan sunglir, sedangkan ikan demersal dan ikan karang yang menjadi unggulan adalah kurisi, kakap merah, dan kerapu.

Tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga untuk ekspor adalah memantapkan pelaksanaan pendekatan pengelolaan sumber daya ikan berbasis ekosistem. Pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem difokuskan pada upaya menjaga integritas ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang penting bagi kesejahteraan manusia. Manajemen berbasis ekosistem adalah pendekatan terintegrasi berbasis ilmu pengetahuan untuk mengelola sumber daya alam yang bertujuan untuk menjaga kesehatan, ketahanan, dan keanekaragaman ekosistem sambil memungkinkan penggunaan oleh manusia berkelanjutan atas barang dan jasa yang disediakan.

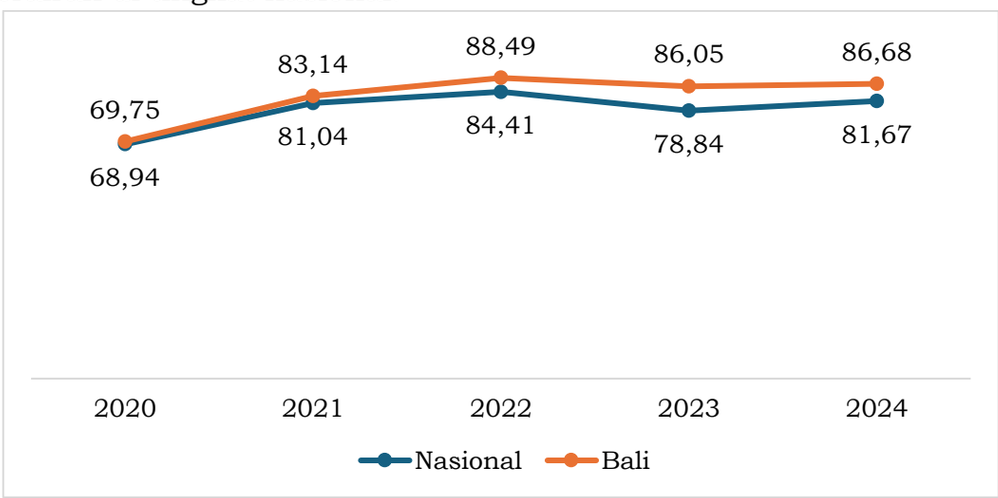
Pendekatan berbasis ekosistem menyatakan bahwa pengelolaan ekosistem yang efektif memerlukan pengelolaan interaksi manusia dengan lingkungan. Hal ini terutama mengingat temuan dari *Millennium Ecosystem Assessment* (2006) bahwa permintaan masyarakat yang meningkat pesat untuk makanan, air, dan sumber daya lainnya telah menyebabkan degradasi layanan ekosistem yang mendadak dan ekstensif yang telah menjadi penghalang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan ini juga memfasilitasi peningkatan pengelolaan pesisir terpadu (*Integrated Coastal Management*/ICM), baik secara *spasial* maupun temporal. Masalah lingkungan di tempat tertentu sering dipengaruhi secara kritis oleh interaksi faktor ekologis, sosial ekonomi, dan politik di tempat lain. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi kebutuhan untuk meningkatkan dan melihat “gambaran yang lebih besar” dari pencapaian pengelolaan pesisir yang berhasil guna.

Instrumen hukum yang digunakan untuk mengimplementasikan pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem di Bali saat ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2023-2043 yang telah mengintegrasikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali ke dalam RTRW.

Berdasarkan data Indeks Kualitas Air Laut periode 2020-2024, teridentifikasi pola dinamis yang menggambarkan fluktuasi kualitas air laut di Provinsi Bali dan tingkat nasional. Kedua entitas menunjukkan peningkatan signifikan pada periode awal 2020-2021,

dengan Bali mengalami kenaikan dari 69,75 menjadi 83,14 (peningkatan 19,2%) dan indeks nasional meningkat dari 68,94 menjadi 81,04 (peningkatan 17,6%). Pada tahun 2022, indeks Bali mencapai puncaknya pada nilai 88,49, sementara indeks nasional mencapai 84,41. Fenomena menarik terjadi pada 2023 ketika kedua indeks mengalami penurunan simultan, dengan indeks nasional menunjukkan depresiasi lebih signifikan hingga 78,84, sedangkan Bali relatif lebih stabil pada 86,05. Periode 2023-2024 kemudian ditandai dengan pemulihan moderat pada indeks nasional (meningkat 3,6% menjadi 81,67) dan stabilisasi indeks Bali pada 86,68. Sepanjang periode observasi, Provinsi Bali secara konsisten mempertahankan kualitas air laut superior dibandingkan rata-rata nasional, dengan disparitas yang semakin melebar dari hanya 0,81 poin pada 2020 menjadi 5,01 poin pada 2024. Temuan ini mengindikasikan efektivitas pengelolaan ekosistem maritim di Bali yang berpotensi menjadi model referensi bagi implementasi kebijakan perlindungan lingkungan perairan di tingkat nasional.



Gambar 2.8
Indeks Kualitas Air Laut di Provinsi Bali
Sumber: IKLH 2020-2024 (Kementerian LHK, 2020-2024)

2.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.4.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Air merupakan inti dari pembangunan berkelanjutan dan sangat penting bagi pembangunan sosio-ekonomi, ekosistem yang sehat, dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Air juga penting dalam produksi (terutama produksi pangan) dan pelestarian sejumlah manfaat dan layanan bagi masyarakat. Air juga merupakan jantung adaptasi terhadap perubahan iklim, berperan sebagai penghubung penting antara sistem iklim, masyarakat manusia, dan lingkungan.

Air adalah sumber daya terbatas dan tak tergantikan yang penting bagi kesejahteraan manusia. Air hanya dapat diperbarui jika dikelola dengan baik. Sehingga air dapat menjadi tantangan serius

bagi pembangunan berkelanjutan, namun jika dikelola secara efisien dan adil, air dapat memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan sistem sosial, ekonomi dan lingkungan dalam menghadapi perubahan yang cepat dan tidak dapat diprediksi.

Populasi yang semakin bertambah dan kondisi sosial ekonomi semakin meningkat menyebabkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap produksi pangan dan banyak daerah yang paling produktif secara pertanian telah mengalami kekurangan air. Meskipun air merupakan sumber daya terbarukan, terdapat batasan dalam penggunaannya; dibutuhkan sejumlah besar energi untuk mengekstraksinya dan mengubah air yang tercemar atau asin menjadi air tawar yang dapat digunakan. Sementara itu, meskipun kemajuan telah dicapai, masih terdapat kesenjangan besar dalam akses dasar terhadap air minum dan air untuk sanitasi dan kebersihan secara global.

Pentingnya air dalam pembangunan berkelanjutan maka setiap perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan kapasitas daya dukung dan daya tampung air untuk pembangunan. Saat ini, kontradiksi antara pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup menjadi semakin serius. Akibat perkembangan ekonomi dan populasi, konsumsi air yang besar dan sejumlah besar polutan telah mempengaruhi daya dukung dan daya tampung air. Hal ini dapat menyebabkan masalah air yang parah, seperti kekurangan air, pencemaran lingkungan air dan kerusakan ekologi air, dan lain-lain. Masalah-masalah ini, pada gilirannya, menimbulkan ancaman yang tidak dapat dihindari terhadap pembangunan berkelanjutan dan membahayakan kesehatan manusia, sehingga mengancam produksi serta kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

1. Ketersediaan Air

Daya dukung dan daya tampung air nasional sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023, ditentukan berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup di tingkat ekoregion, yang meliputi jumlah populasi, potensi dan ketersediaan sumber daya alam, serta bentuk pemanfaatan sumber daya alam untuk pertanian, perikanan, perkebunan, dan permukiman/lahan terbangun. Daya dukung dan daya tampung air nasional ditetapkan berdasarkan:

a. Penghitungan ketersediaan air dibandingkan dengan jumlah pemanfaatan air untuk pertanian, perikanan, perkebunan, dan permukiman/lahan terbangun;
b. Ketersediaan air dapat berasal dari air permukaan dan air tanah tidak tertekan atau air tanah bebas; dan
c. Kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur air yang mempengaruhi ketersediaan air, periode 1996 sampai dengan 2020.

Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023, jumlah ketersediaan air di Provinsi Bali adalah 2.078.807.392,80 m^3/tahun. Ketersediaan air menurut kabupaten/kota berkisar 34.779.742,42 – 491.070.463,68 m^3/tahun. Sesuai dengan luas wilayah, ketersediaan air tertinggi terdapat di Buleleng dan terkecil di Denpasar.

2. Kebutuhan Air

Jumlah kebutuhan air di Provinsi Bali yaitu 4.061.324.302,72 m^3/tahun, terdiri dari kebutuhan air domestik sebanyak 373.035.456,00 m^3/tahun (9,19%) dan kebutuhan air untuk pertanian, perikanan dan perkebunan sebanyak 3.688.288.846,72 m^3/tahun (90,81%). Kebutuhan air menurut kabupaten/kota berkisar 103.142.016,67– 834.623.841,58 m^3/tahun. Kebutuhan air terbanyak di Tabanan dan terkecil di Denpasar. Banyaknya kebutuhan air di Tabanan karena tingginya kebutuhan air untuk lahan (pertanian) yang mencapai 794.742.638,38 m^3/tahun. Sebagaimana diketahui Kabupaten Tabanan memiliki lahan sawah terluas di Bali sehingga pemanfaatan air untuk pertanian khususnya pertanian lahan basah (sawah) juga paling tinggi. Sedangkan kebutuhan air untuk lahan paling rendah di Denpasar yaitu hanya 40.475.146,27 m^3/tahun karena luas lahan pertanian di Denpasar paling kecil.

Sementara itu kebutuhan air domestik menurut kabupaten/kota berkisar 17.880.566,40–68.427.331,20 m^3/tahun, tertinggi di Buleleng dan terendah di Klungkung. Jumlah kebutuhan air domestik sesuai dengan jumlah populasi dan kegiatan sosial dan ekonomi di suatu wilayah.

3. Indikasi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Berdasarkan jumlah ketersediaan air dibandingkan dengan jumlah kebutuhan air, indikasi status daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Bali adalah “terlampaui”. Jumlah defisit air di Bali mencapai (-)1.982.516.909,92 m^3/tahun atau (-) 95,37% dari jumlah ketersediaan air.

Status “terlampaui” daya dukung dan daya tampung air terjadi di semua kabupaten/kota. Jumlah defisit air menurut kabupaten/kota berkisar (-)86.584.420,17 – (-) 443.607.856,92 m^3/tahun, tertinggi di Tabanan dan terendah di Klungkung. Defisit air di Gianyar juga relatif tinggi yaitu mencapai (-)347.508.734,01 m^3/tahun. Tingginya defisit air di Tabanan dan Gianyar yang merupakan dua kabupaten penyumbang terbesar produksi padi di Bali dapat mengancam ketersediaan pangan khususnya beras dalam jangka panjang. Sedangkan persentase defisit air menurut kabupaten/kota berkisar (-)33,32 – (-)279,72%, tertinggi di Gianyar dan terendah di Jembrana.

Tabel 2.5
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di Provinsi Bali

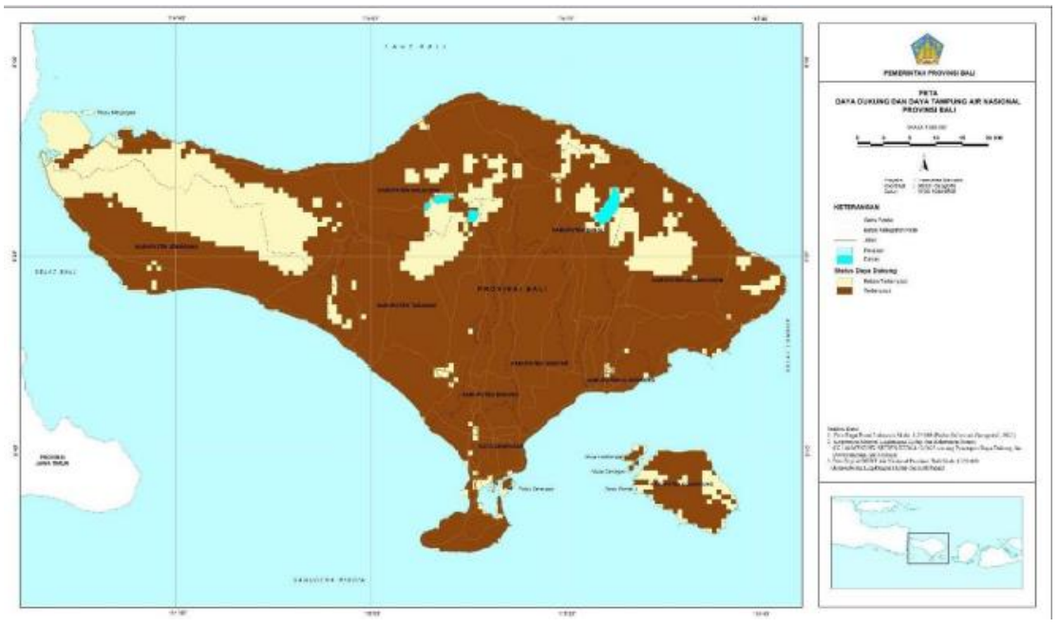
Kabupaten /Kota	Sediaan Air (m^3/Thn)	Kebutuhan Air (m^3/Thn)			Status	Luas Menurut Status (Ha)	
		Domestik	Lahan	Jumlah		Terlampaui	Belum Terlampaui
Jembrana	324.464.970,07	27.396.230,40	405.193.489,70	432.589.720,10	Terlampaui	49.194,72	35.841,97
Tabanan	391.015.984,65	39.881.203,20	794.742.638,38	834.623.841,58	Terlampaui	72.916,14	11.845,07
Badung	126.316.503,59	47.361.369,60	334.868.008,35	382.229.377,95	Terlampaui	37.715,98	2.797,44
Gianyar	124.233.000,84	44.525.203,20	427.216.531,65	471.741.734,85	Terlampaui	36.628,03	5,34
Klungkung	142.389.489,81	17.880.566,40	211.093.343,57	228.973.909,97	Terlampaui	24.824,61	6.397,42
Bangli	165.502.462,10	22.351.852,80	314.739.002,03	337.090.854,83	Terlampaui	44.504,46	8.292,81
Karangasem	279.034.775,64	42.544.828,80	482.221.332,80	524.766.161,60	Terlampaui	69.120,74	14.649,47
Buleleng	491.070.463,68	68.427.331,20	677.739.353,97	746.166.685,17	Terlampaui	86.403,83	45.674,55
Denpasar	34.779.742,42	62.666.870,40	40.475.146,27	103.142.016,67	Terlampaui	11.650,43	713,36
Provinsi Bali	2.078.807.392,80	373.035.456,00	3.688.288.846,72	4.061.324.302,72	Terlampaui	432.958,95	126.217,43

Sumber: Peta Digital Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Provinsi Bali skala 1:250.000 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023)

Tabel 2.6
Defisit Air di Provinsi Bali

Kabupaten /Kota	Sediaan Air (m^3/Thn)	Kebutuhan Air (m^3/Thn)	Defisit Air	
			Jumlah (m^3/Thn)	Persen
Jembrana	324.464.970,07	432.589.720,10	-108.124.750,03	-33,32
Tabanan	391.015.984,65	834.623.841,58	-443.607.856,92	-113,45
Badung	126.316.503,59	382.229.377,95	-255.912.874,36	-202,60
Gianyar	124.233.000,84	471.741.734,85	-347.508.734,01	-279,72
Klungkung	142.389.489,81	228.973.909,97	-86.584.420,17	-60,81
Bangli	165.502.462,10	337.090.854,83	-171.588.392,72	-103,68
Karangasem	279.034.775,64	524.766.161,60	-245.731.385,96	-88,06
Buleleng	491.070.463,68	746.166.685,17	-255.096.221,49	-51,95
Denpasar	34.779.742,42	103.142.016,67	-68.362.274,25	-196,56
Provinsi Bali	**2.078.807.392,80**	**4.061.324.302,72**	**-1.982.516.909,92**	**-95,37**

Sumber: Peta Digital Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Provinsi Bali skala 1:250.000 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023)



Gambar 2.9
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional di Provinsi Bali
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Berdasarkan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air, Provinsi Bali mengalami defisit air yang signifikan dengan status daya dukung dan daya tampung air dikategorikan "terlampaui" di seluruh kabupaten/kota. Total defisit air mencapai sekitar 1,98 miliar m^3 per tahun (-95,37%). Kabupaten dengan defisit terbesar adalah Tabanan dan Gianyar, yang juga merupakan sentra produksi padi, sehingga kondisi ini berpotensi mengganggu ketahanan pangan. Persentase defisit tertinggi terjadi di Gianyar (−279,72%) dan terendah di Jembrana (−33,32%). Data ini menekankan pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan guna menjaga keseimbangan ekosistem dan kebutuhan manusia di Bali.

2.1.4.2 Daya Dukung Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi untuk keberlanjutan kehidupannya. Peningkatan produksi pangan dilakukan secara berkelanjutan untuk mengimbangi peningkatan konsumsi akibat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga masyarakat berada dalam kondisi ketahanan pangan. Di Indonesia, peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama nasional dalam satu dasawarsa terakhir. Ketahanan pangan daerah merupakan pilar ketahanan pangan nasional, yang harus dicapai oleh daerah yang memiliki potensi produksi pangan.

Pada KLHS, dijabarkan bahwa permasalahan pangan di Provinsi Bali meliputi:

1. Aspek kapasitas produksi pangan lokal mengalami tantangan perubahan iklim;
2. Daya dukung lahan dan air yang terbatas

3. Kondisi wilayah dengan jasa ekosistem penyediaan pangan yang sebagian besar tergolong rendah
4. Tingginya laju alih fungsi lahan pertanian terutama sawah
5. Infrastruktur pertanian (irigasi) tidak bertambah dan kemampuannya semakin menurun
6. Nilai tambah ekonomi dalam mengusahakan lahan pertanian pangan relatif kecil yang turut mendororong usaha pertaian pangan ditingalkan oleh petani
7. Pelestarian sumber daya genetik (plasma nutfah) tanaman dan hewan lokal serta penerapan varietas unggul untuk pertanian belum optimal
8. Pemerataan akses pangan yang cukup bagi semua belum merata dan kualitas konsumsi pangan masih rendah
9. Masih terdapat keterbatasan akses secara ekonomi bagi sebagian individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup dan terjangkau.
10. Kualitas pola konsumsi pangan yang beragam dan sehat masih belum optimal diindikasi dengan skor pola pangan harapan dan angka konsumsi ikan yang masih rendah, disebabkan karena pengetahuan individu /rumah tangga tentang pola konsumsi dengan energi yang cukup belum merata
11. Tingkat keanekaragaman pangan masih rendah
12. Pemanfaatan sumber pangan lokal semakin menurun dan perubahan pola konsumsi mengarah pada kegemaran terhadap makanan instan cenderung meningkat

Lahan pertanian semakin berkurang karena adanya tren perubahan pemanfaatan lahan. Tampak bahwa terjadi penurunan lahan sawah dari tahun 2018-2022 dari 75.554 Ha menjadi 71.347 Ha, berkurang 4.207 Ha atau 5,57 % atau rata-rata 841.4 Ha per tahun. Dalam RTRW Provinsi Bali, kawasan pertanian yang masuk dalam kawasan budidaya seluas kurang lebih 300.411 Ha (tiga ratus ribu empat ratus sebelas hektare) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dimana kawasan pertanian tersebut terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan holtikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Ditetapkan pula KP2B seluas kurang lebih 53.663 Ha (lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga hektar) di wilayah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Renstra 2024-2026 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provisi Bali, pengembangan kawasan pertanian, peternakan dan perkebunan diarahkan di beberapa lokasi di Provinsi Bali antara lain:

1. Padi sebagai komoditas tanaman pangan dikembangkan di kabupaten/kota se-Bali.
2. Jagung sebagai komoditas tanaman pangan dikembangkan di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng.

3. Bawang merah sebagai komoditas holtikultura dikembangkan di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli.
4. Cabai sebagai komoditas holtikultura dikembangkan di Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar.
5. Jeruk sebagai komoditas holtikultura dikembangkan di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng.
6. Kopi sebagai komoditas perkebunan dikembangkan di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan.
7. Kakao sebagai komoditas perkebunan dikembangkan di Kabupaten Jembrana.
8. Jambu Mete merupakan komoditas perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem.
9. Cengkeh sebagai komoditas perkebunan di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.
10. Sapi potong sebagai komoditas peternakan dikembangkan di Kabupaten Badung, Klungkung, Karangasem dan Kabupaten Buleleng.
11. Kambing sebagai komoditas peternakan dikembangkan di Kabupaten Tabanan.
12. Babi komoditas peternakan dikembangkan di Kabupaten Gianyar.

1. DDDTLH Indikatif Berbasis Jasa Ekosistem – Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Pangan

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) penyedia pangan adalah kemampuan lingkungan menyediakan bahan pangan bagi penduduk suatu wilayah, yang berfungsi sebagai dasar informasi bagi pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan menjamin produksi pangan. Status dan persebaran DDLH di Provinsi Bali dapat diketahui melalui pemodelan kuantitatif dan *spasial* produksi-konsumsi pangan untuk mengidentifikasi wilayah yang telah melampaui atau belum melampaui ambang batas kemampuan lingkungannya. Pemodelan dilakukan secara in situ, yaitu perhitungan pada setiap sel grid individual tanpa mempertimbangkan aliran antar sel grid.

a. Produksi Pangan

Berdasarkan data produksi energi bahan pangan di Provinsi Bali tahun 2018, terlihat adanya disparitas signifikan antar kabupaten/kota dengan total produksi mencapai 3,41 triliun kkal. Kabupaten Tabanan mendominasi produksi dengan kontribusi tertinggi sebesar 17,65%, diikuti Buleleng (16,98%) dan Gianyar (15,92%), yang mencerminkan karakteristik wilayah-wilayah tersebut sebagai sentra pertanian utama dengan lahan subur dan sistem irigasi yang baik. Sebaliknya, Klungkung menunjukkan produksi terendah (4,79%) yang dapat dikaitkan

dengan statusnya sebagai kabupaten terkecil di Bali, sementara Denpasar dengan produksi 6,87% mencerminkan keterbatasan lahan pertanian akibat dominasi fungsi perkotaan sebagai ibu kota provinsi. Distribusi produksi ini mengindikasikan adanya spesialisasi wilayah berdasarkan potensi geografis dan agroekologi, dimana kabupaten dengan topografi dataran dan akses irigasi yang memadai cenderung menjadi kontributor utama produksi pangan, sehingga pengelolaan ketahanan pangan regional memerlukan strategi koordinasi antar wilayah untuk mengoptimalkan distribusi dan akses pangan bagi seluruh penduduk Bali.

Tabel 2.7
Produksi Energi Bahan Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Energi Bahan Pangan (kkal)	Persen (%)
Jembrana	296.962.079.841,95	8,70
Tabanan	602.464.304.341,50	17,65
Badung	426.429.261.783,38	12,50
Gianyar	543.177.895.400,63	15,92
Klungkung	163.498.832.956,50	4,79
Bangli	173.948.322.824,13	5,10
Karangasem	391.943.599.563,00	11,49
Buleleng	579.626.477.760,00	16,98
Denpasar	234.545.905.720,00	6,87
Provinsi Bali	**3.412.596.680.191,09**	**100,00**

Sumber: P3E Bali Nusra (2021)

b. Konsumsi Pangan

Pola konsumsi energi bahan pangan di Provinsi Bali menunjukkan korelasi yang kuat dengan distribusi demografi dan tingkat urbanisasi, dimana Kota Denpasar sebagai pusat metropolitan mendominasi konsumsi dengan 21,68% dari total provinsi, mencerminkan konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Distribusi konsumsi yang hampir merata antara Kabupaten Badung dan Buleleng mengindikasikan perkembangan wilayah suburban dan kawasan pariwisata yang mengalami pertumbuhan populasi signifikan, sementara konsumsi rendah di Kabupaten Klungkung dan Bangli mencerminkan karakteristik wilayah dengan kepadatan penduduk lebih rendah dan ekonomi berbasis pertanian. Disparitas konsumsi antar wilayah ini mengimplikasikan tantangan ketahanan pangan yang berbeda-beda, dimana daerah dengan konsumsi tinggi memerlukan sistem distribusi dan pasokan pangan yang lebih kompleks, sedangkan daerah dengan konsumsi rendah berpotensi memiliki tingkat swasembada pangan yang lebih baik. Pola ini juga menunjukkan pentingnya

integrasi sistem pangan regional untuk menjamin stabilitas pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit guna mencapai ketahanan pangan berkelanjutan di tingkat provinsi.

Tabel 2.8
Konsumsi Energi Bahan Pangan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2018

Kabupaten /Kota	Jumlah Konsumsi Energi Bahan Pangan (kkal)	Persentase (%)
Jembrana	243.053.090.105,00	6,44
Tabanan	389.677.532.470,00	10,33
Badung	577.223.080.405,00	15,30
Gianyar	446.458.312.389,00	11,84
Klungkung	156.667.116.094,00	4,15
Bangli	198.761.287.499,00	5,27
Karangasem	364.471.994.285,00	9,66
Buleleng	577.484.933.303,00	15,31
Denpasar	817.716.514.497,00	21,68
Provinsi Bali	**3.771.513.861.047,00**	**100,00**

Sumber: P3E Bali Nusra (2021)

c. Selisih Antara Produksi dengan Konsumsi Energi Bahan Pangan

Neraca energi bahan pangan Provinsi Bali tahun 2018 mengungkapkan polarisasi yang jelas antara wilayah produksi dan konsumsi, dimana enam kabupaten mengalami surplus pangan sementara tiga kabupaten/kota mengalami defisit, dengan Kota Denpasar sebagai defisit terbesar (-583,2 miliar kkal) dan Kabupaten Tabanan sebagai surplus terbesar (212,8 miliar kkal). Pola ini mencerminkan spesialisasi ekonomi regional yang logis, dimana wilayah urban dan semi-urban seperti Denpasar dan Badung mengalami defisit karena dominasi sektor tersier dan konversi lahan pertanian, sementara kabupaten dengan basis pertanian kuat seperti Tabanan, Gianyar, dan Jembrana mampu memproduksi surplus untuk memenuhi kebutuhan regional. Meskipun terdapat wilayah surplus, Provinsi Bali secara keseluruhan mengalami defisit pangan sebesar 358,9 miliar kkal, mengindikasikan ketergantungan pada pasokan eksternal dan perlunya optimalisasi sistem distribusi pangan antar wilayah untuk menjamin ketahanan pangan. Disparitas ini juga menekankan pentingnya sinergi antarwilayah dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan pangan untuk menciptakan sistem pangan regional yang berkelanjutan.

Tabel 2.9
Jumlah Selisih Produksi dan Konsumsi Energi Bahan Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018

Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Energi Bahan Pangan (kkal)	Jumlah Konsumsi Energi Bahan Pangan (kkal)	Jumlah Selisih Produksi dan Konsumsi	Keterangan
Jembrana	296.962.079.841,95	243.053.090.105,00	53.908.989.736,95	Surplus
Tabanan	602.464.304.341,50	389.677.532.470,00	212.786.771.871,50	Surplus
Badung	426.429.261.783,38	577.223.080.405,00	-150.793.818.621,62	Defisit
Gianyar	543.177.895.400,63	446.458.312.389,00	96.719.583.011,63	Surplus
Klungkung	163.498.832.956,50	156.667.116.094,00	6.831.716.862,50	Surplus
Bangli	173.948.322.824,13	198.761.287.499,00	-24.812.964.674,87	Defisit
Karangasem	391.943.599.563,00	364.471.994.285,00	27.471.605.278,00	Surplus
Buleleng	579.626.477.760,00	577.484.933.303,00	2.141.544.457,00	Surplus
Denpasar	234.545.905.720,00	817.716.514.497,00	-583.170.608.777,00	Defisit
Provinsi Bali	**3.412.596.680.191,09**	**3.771.513.861.047,00**	**-358.917.180.855,91**	Defisit

Sumber: P3E Bali Nusra (2021)

d. Ambang Batas DDLH Penyedia Pangan

Analisis ambang batas daya dukung lingkungan hidup penyedia pangan di Provinsi Bali menunjukkan ketidakseimbangan *spasial* yang signifikan antara kapasitas ekologis dan tekanan demografis, dimana tiga wilayah urban dan semi-urban (Denpasar, Badung, dan Bangli) telah melampaui ambang batas daya dukung dengan defisit mencapai 863.522 jiwa, sementara enam kabupaten lainnya masih memiliki surplus kapasitas sebesar 455.059 jiwa. Kota Denpasar mengalami tekanan paling ekstrem dengan defisit 663.674 jiwa, mencerminkan intensitas urbanisasi dan kepadatan populasi yang jauh melampaui kemampuan lingkungan lokal dalam menyediakan pangan, sedangkan Kabupaten Tabanan menunjukkan potensi terbesar dengan surplus 242.161 jiwa yang mengindikasikan optimalisasi sistem pertanian dan keseimbangan ekologis yang baik. Secara agregat, Provinsi Bali mengalami defisit 408.463 jiwa dari total ambang batas 3,88 juta jiwa, yang menunjukkan bahwa populasi aktual telah melebihi kapasitas optimal lingkungan untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Kondisi ini mengimplikasikan perlunya redistribusi demografis, intensifikasi produksi pangan di wilayah surplus, dan implementasi teknologi berkelanjutan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan di wilayah defisit.

Tabel 2.10
Jumlah Ambang Batas DDLH Penyedia Bahan Pangan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018

Kabupaten /Kota	Jumlah Ambang Batas (Jiwa)	Jumlah Selisih Ambang Batas (Jiwa)
Jembrana	337.956	61.351
Tabanan	685.631	242.161
Badung	485.295	-171.610
Gianyar	618.160	110.071
Klungkung	186.069	7.775
Bangli	197.961	-28.238
Karangasem	446.049	31.264
Buleleng	618.160	2.437
Denpasar	266.923	-663.674
Provinsi Bali	**3.883.684**	**-408.463**

Sumber: P3E Bali Nusra (2021)

e. Status DDLH Penyedia Pangan

Distribusi *spasial* status daya dukung lingkungan hidup penyedia pangan di Provinsi Bali mengungkapkan gradient urbanisasi yang jelas, dimana wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi menunjukkan degradasi daya dukung yang signifikan, sementara wilayah agraris masih mempertahankan keseimbangan ekologis yang relatif baik. Kota Denpasar menunjukkan kondisi paling kritis dengan 92,84% wilayahnya telah melampaui daya dukung, diikuti Kabupaten Badung (67,95%) dan Bangli (54,50%), mencerminkan tekanan antropogenik intensif akibat urbanisasi, konversi lahan, dan kepadatan populasi yang tinggi. Sebaliknya, Kabupaten Tabanan menunjukkan keberlanjutan terbaik dengan 80,96% wilayah masih belum melampaui ambang batas, diikuti Gianyar (73,04%) yang mengindikasikan pengelolaan lahan pertanian yang optimal dan keseimbangan antara produksi pangan dengan tekanan demografis. Meskipun secara agregat Provinsi Bali masih memiliki mayoritas wilayah (57,13%) dalam status belum melampaui, disparitas yang tajam antar kabupaten/kota menunjukkan perlunya strategi diferensiasi dalam pengelolaan daya dukung, dengan fokus restorasi dan intensifikasi berkelanjutan di wilayah kritis, serta konservasi dan optimalisasi di wilayah yang masih berkelanjutan.

Tabel 2.11
Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Status DDLH Penyedia Bahan Pangan Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018

Kabupaten /Kota	Persentase Luas Belum Melampaui (%)	Persentase Luas Telah Melampaui (%)
Jembrana	57,00	43,00
Tabanan	80,96	19,04
Badung	32,05	67,95
Gianyar	73,04	26,96
Klungkung	53,48	46,52
Bangli	45,50	54,50
Karangasem	57,05	42,95
Buleleng	55,40	44,60
Denpasar	7,16	92,84
Provinsi Bali	**57,13**	**42,87**

Sumber: P3E Bali Nusra (2021)

2. Status Keberlanjutan Pangan

a. Produksi Pangan

Struktur produksi pangan Provinsi Bali menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada sumber karbohidrat dengan kontribusi 65,49% (2,23 triliun kkal) dari total produksi, mencerminkan dominasi sistem pertanian berbasis padi dan tanaman pangan utama, sementara protein nabati hanya berkontribusi 0,95% yang mengindikasikan kelemahan dalam diversifikasi tanaman leguminosa dan kacang-kacangan. Distribusi produksi menunjukkan konsentrasi di tiga kabupaten utama yaitu Tabanan (17,65%), Buleleng (16,98%), dan Gianyar (15,92%) yang menegaskan peran sentral wilayah-wilayah ini sebagai lumbung pangan provinsi, sementara produksi protein hewani yang mencapai 20,17% mengindikasikan perkembangan sektor peternakan dan perikanan yang cukup signifikan. Ketimpangan produksi antar kabupaten dan rendahnya diversifikasi protein nabati menunjukkan potensi kerentanan sistem pangan terhadap guncangan eksternal dan ketidakseimbangan nutrisi, sehingga memerlukan strategi intensifikasi dan diversifikasi produksi untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan bergizi seimbang di tingkat provinsi.

Tabel 2.12
Produksi Pangan di Provinsi Bali Tahun 2018

Kabupaten /Kota	Jenis Pangan (Kkal)					Total
	Karbohidrat	Protein Nabati	Hewani	Vitamin & Mineral	Lain-Lain	
Jembrana	181.328.733.660	5.208.668.900	52.676.265.856	11.821.195.089	45.927.216.338	296.962.079.842
Tabanan	423.377.910.000	6.320.600	110.750.596.530	28.184.734.918	40.144.742.294	602.464.304.342
Badung	298.102.971.088	3.728.342.030	99.608.509.233	21.863.856.145	3.125.583.288	426.429.261.783
Gianyar	432.800.264.000	2.238.540.000	89.305.056.154	1.031.868.678	17.802.166.569	543.177.895.401
Klungkung	88.195.873.000	597.740.000	58.698.579.860	11.356.844.111	4.649.795.986	163.498.832.957
Bangli	87.529.234.645	2.846.720.000	18.093.077.820	64.472.643.770	1.006.646.589	173.948.322.824
Karangasem	252.274.212.050	9.441.831.800	49.597.451.790	46.827.242.580	33.802.861.343	391.943.599.563
Buleleng	401.254.968.000	7.908.380.000	52.621.402.760	57.923.010.600	59.918.716.400	579.626.477.760
Denpasar	70.046.613.000	374.660.000	156.878.126.720	7.246.506.000	-	234.545.905.720
Provinsi Bali	**2.234.910.779.443**	**32.351.203.330**	**688.229.066.722**	**250.727.901.890**	**206.377.728.806**	**3.412.596.680.191**

Sumber: P3E Bali Nusra (2021)

b. Daya Dukung Pangan

Status daya dukung pangan Provinsi Bali mencerminkan polarisasi yang jelas antara wilayah agraris dan urban, dimana enam kabupaten dengan basis pertanian kuat mampu mencapai surplus ketersediaan pangan di atas standar regional (2.407,4 kkal/kapita/hari), sementara tiga wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi mengalami defisit yang signifikan. Kota Denpasar menunjukkan kondisi paling kritis dengan ketersediaan hanya 690,51 kkal/kapita/hari, mencerminkan ketergantungan total pada pasokan eksternal akibat konversi lahan dan spesialisasi ekonomi non-agraris, sedangkan Kabupaten Tabanan menunjukkan optimalisasi terbaik dengan ketersediaan 3.721,73 kkal/kapita/hari yang mengindikasikan efisiensi sistem produksi pangan. Meskipun mayoritas kabupaten mengalami surplus, defisit agregat Provinsi Bali sebesar 229,13 kkal/kapita/hari dari standar regional menunjukkan ketidakseimbangan distribusi pangan dan perlunya sistem integrasi regional yang efektif. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa ketahanan pangan Bali sangat bergantung pada keberlanjutan produksi di wilayah surplus dan efektivitas sistem distribusi untuk memenuhi kebutuhan wilayah defisit, sehingga memerlukan strategi holistik yang mengintegrasikan intensifikasi pertanian, diversifikasi pangan, dan optimalisasi rantai pasok regional.

Tabel 2.13
Status Daya Dukung Pangan Provinsi Bali Tahun 2018

Kabupaten /Kota	Total Produksi Pangan (kkal)	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Ketersediaan Pangan per Kapita/Hari (Kkal)	Status Daya Dukung
Jembrana	296.962.079.841,94	276,60	2.941,41	Surplus
Tabanan	602.464.304.341,50	443,50	3.721,73	Surplus
Badung	426.429.261.783,38	656,90	1.778,50	Defisit
Gianyar	543.177.895.400,63	508,10	2.928,87	Surplus
Klungkung	163.498.832.956,50	178,30	2.512,29	Surplus
Bangli	173.948.322.824,13	226,20	2.106,86	Defisit
Karangasem	391.943.599.563,00	414,80	2.588,76	Surplus
Buleleng	579.626.477.760,00	657,20	2.416,34	Surplus
Denpasar	234.545.905.720,00	930,60	690,51	Defisit
Provinsi Bali	**3.412.596.680.191,08**	**4.292,20**	**2.178,27**	Defisit

Keterangan: KMF Bali =2407,4 Kkal/kapita/hari; KMF Nasional = 2100 Kkal/kapita/hari
Sumber: P3E Bali Nusra (2021)

c. Status Keberlanjutan Pangan

Analisis keberlanjutan ketersediaan pangan di Provinsi Bali menunjukkan diferensiasi *spasial* yang signifikan dengan dominasi status "berkelanjutan" di wilayah-wilayah agraris dan "terbatas" di kawasan urban-suburban, dimana 45 dari 69 kecamatan (65,2%) memiliki status berkelanjutan, 19 kecamatan (27,5%) berstatus terbatas, 4 kecamatan bersyarat, dan hanya 1 kecamatan tidak berkelanjutan. Kabupaten dengan basis pertanian kuat seperti Jembrana, Tabanan, Bangli, Karangasem, dan Buleleng menunjukkan dominasi status berkelanjutan dengan nilai daya dukung tinggi (3,17-3,49) dan daya tampung yang memadai (3,13-3,53), mencerminkan keseimbangan ekosistem yang optimal untuk produksi pangan berkelanjutan. Sebaliknya, Kota Denpasar dan sebagian besar kecamatan di Kabupaten Gianyar mengalami keterbatasan akibat nilai daya tampung rendah (2,16-2,90) meskipun daya dukung masih memadai, mengindikasikan tekanan lingkungan yang tinggi dari aktivitas antropogenik intensif. Kondisi ini menekankan bahwa keberlanjutan pangan Bali sangat bergantung pada konservasi dan optimalisasi wilayah-wilayah berkelanjutan sambil melakukan intervensi teknologi dan kebijakan untuk meningkatkan daya tampung di wilayah terbatas, guna mempertahankan keseimbangan ekosistem regional yang mendukung ketahanan pangan jangka panjang.

Tabel 2.14
Status Keberlanjutan Ketersediaan Pangan di Provinsi Bali

No	Kabupaten /Kota/Kecamatan	Daya Dukung	Daya Tampung	Manfaat	Risiko	Keberlanjutan
1	**Kabupaten Jembrana**					
1.1	Jembrana	3,53	3,41	+	+	Berkelanjutan
1.2	Melaya	3,41	3,59	+	+	Berkelanjutan
1.3	Mendoyo	3,65	3,79	-	+	Bersyarat
1.4	Negara	3,34	2,98	+	-	Terbatas
1.5	Pekutatan	3,36	3,34	-	-	Tidak Berkelanjutan
	Total Kabupaten Jembrana	3,49	3,53	+	+	Berkelanjutan
2	**Kabupaten Tabanan**					
2.1	Baturiti	3,48	3,29	+	+	Berkelanjutan
2.2	Kediri	3,46	2,52	+	-	Terbatas
2.3	Kerambitan	3,51	2,9	+	-	Terbatas
2.4	Marga	3,40	3,09	+	-	Terbatas
2.5	Penebel	3,58	3,53	+	+	Berkelanjutan
2.6	Pupuan	3,46	3,55	+	+	Berkelanjutan
2.7	Selemadeg	3,45	3,36	+	-	Terbatas
2.8	Selemadeg Barat	3,27	3,42	-	+	Bersyarat
2.9	Selemadeg Timur	3,49	3,15	+	-	Terbatas
	Total Kabupaten Tabanan	3,45	3,29	+	+	Berkelanjutan
3	**Kabupaten Badung**					
3.1	Abiansemal	3,27	2,91	+	-	Terbatas
3.2	Kuta	2,38	2,05	+	-	Terbatas
3.3	Kuta Selatan	2,66	2,98	-	+	Bersyarat
3.4	Kuta Utara	3,17	2,12	+	-	Terbatas
3.5	Mengwi	3,38	2,70	+	-	Terbatas
3.6	Petang	3,47	3,29	+	+	Berkelanjutan
	Total Kabupaten Badung	3,13	2,86	+	+	Berkelanjutan
4	**Kabupaten Gianyar**					
4.1	Blahbatuh	3,48	2,57	+	-	Terbatas
4.2	Gianyar	3,28	2,72	+	-	Terbatas
4.3	Payangan	3,37	3,20	+	-	Terbatas
4.4	Sukawati	3,35	2,49	+	-	Terbatas
4.5	Tampaksiring	3,27	3,04	+	-	Terbatas
4.6	Tegallalang	3,34	3,17	+	-	Terbatas
4.7	Ubud	3,19	2,85	+	-	Terbatas
	Total Kabupaten Gianyar	3,33	2,9	+	-	Terbatas
5	**Kabupaten Klungkung**					
5.1	Banjarangkan	3,39	2,81	+	-	Terbatas
5.2	Dawan	3,23	2,90	+	-	Terbatas
5.3	Klungkung	3,34	2,68	+	-	Terbatas
5.4	Nusa Penida	2,66	3,07	-	+	Bersyarat
	Total Kabupaten Klungkung	2,88	2,98	-	+	Bersyarat
6	**Kabupaten Bangli**					
6.1	Bangli	3,29	3,05	+	-	Terbatas

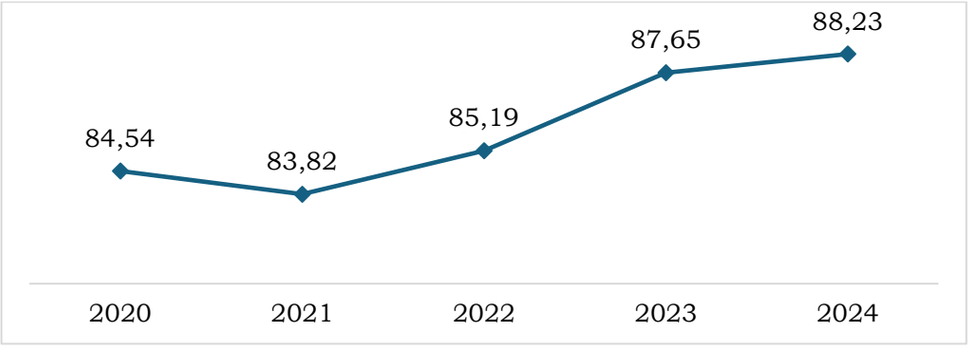
No	Kabupaten /Kota/Kecamatan	Daya Dukung	Daya Tampung	Manfaat	Risiko	Keberlanjutan
6.2	Kintamani	3,32	3,15	+	+	Berkelanjutan
6.3	Susut	3,28	3,11	+	-	Terbatas
6.4	Tembuku	3,18	3,08	+	-	Terbatas
	Total Kabupaten Bangli	3,29	3,13	+	+	Berkelanjutan
7	**Kabupaten Karangasem**					
7.1	Abang	3,17	3,19	+	+	Berkelanjutan
7.2	Bebandem	3,28	3,29	+	+	Berkelanjutan
7.3	Karangasem	3,18	2,98	+	-	Terbatas
7.4	Kubu	3,01	3,06	+	+	Berkelanjutan
7.5	Manggis	3,10	3,00	+	-	Terbatas
7.6	Rendang	3,39	3,47	+	+	Berkelanjutan
7.7	Selat	3,21	3,24	-	-	Tidak Berkelanjutan
7.8	Sidemen	3,27	2,99	+	-	Terbatas
	Total Kabupaten Karangasem	3,17	3,15	+	+	Berkelanjutan
8	**Kabupaten Buleleng**					
8.1	Banjar	3,42	3,31	+	+	Berkelanjutan
8.2	Buleleng	3,01	2,60	-	-	Tidak Berkelanjutan
8.3	Busungbiu	3,54	3,54	+	+	Berkelanjutan
8.4	Gerokgak	3,44	3,70	+	+	Berkelanjutan
8.5	Kubutambahan	3,31	3,40	+	+	Berkelanjutan
8.6	Sawan	3,40	3,26	+	+	Berkelanjutan
8.7	Seririt	3,48	3,40	+	+	Berkelanjutan
8.8	Sukasada	3,45	3,33	+	+	Berkelanjutan
8.9	Tejakula	3,14	3,19	+	+	Berkelanjutan
	Total Kabupaten Buleleng	3,40	3,44	+	+	Berkelanjutan
9	**Kota Denpasar**					
9.1	Denpasar Barat	2,86	1,97	+	-	Terbatas
9.2	Denpasar Selatan	2,85	2,20	+	-	Terbatas
9.3	Denpasar Timur	3,11	2,17	+	-	Terbatas
9.4	Denpasar Utara	2,92	2,23	+	-	Terbatas
	Total Kota Denpasar	2,92	2,16	+	-	Terbatas
Provinsi Bali		**3,31**	**3,23**	+	+	Berkelanjutan

Sumber: P3E Bali Nusra (2021)

2.1.5 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.5.1 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Adapun indeks ketahanan pangan Provinsi Bali dapat terlihat pada Gambar 2.10 dan Tabel 2.15 berikut.



Gambar 2.10
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
URL:https://satudata.badanpangan.go.id/nfs_storage/public/publication/documents/1728546912.pdf

Provinsi Bali secara konsisten menempati peringkat pertama nasional dengan pencapaian yang sangat memuaskan. Pada tahun 2020, Bali mencatat IKP sebesar 84,54 dan terus mengalami fluktuasi positif hingga mencapai 87,65 pada tahun 2023, merupakan nilai tertinggi dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia.

Perjalanan IKP Bali menunjukkan tren yang cukup stabil meskipun sempat mengalami penurunan tipis menjadi 83,82 pada tahun 2021. Namun demikian, provinsi ini mampu melakukan pemulihan dengan peningkatan signifikan menjadi 85,10 pada tahun 2022 dan berlanjut hingga 87,65 pada tahun 2023. Peningkatan sebesar 2,55 poin dalam kurun waktu satu tahun terakhir menandakan adanya upaya serius dalam memperkuat sistem ketahanan pangan daerah.

Keunggulan Bali dalam IKP nasional terlihat dari konsistensi perbedaan positif dengan provinsi lain. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023, selisih IKP Bali dengan Jawa Tengah di peringkat kedua mencapai 2,85 poin (87,65 berbanding 84,80), menunjukkan keunggulan yang cukup signifikan. Pencapaian ini menempatkan Bali sebagai model terbaik ketahanan pangan di Indonesia, jauh melampaui provinsi-provinsi dengan tantangan geografis serupa seperti Nusa Tenggara Barat (76,51) dan Nusa Tenggara Timur (71,25).

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali periode 2020-2024, terlihat dinamika yang mencerminkan resiliensi sistem pangan daerah dengan pola pemulihan yang progresif pasca-pandemi. Indeks mengalami kontraksi minor dari 84,54 pada 2020 menjadi 83,82 pada 2021, yang mengindikasikan dampak *disruption COVID-19* terhadap rantai pasok pangan, distribusi, dan daya beli masyarakat. Periode 2022-2024 menunjukkan tren peningkatan konsisten dengan indeks mencapai 85,19 pada 2022, kemudian mengalami akselerasi menjadi 87,65 pada 2023, dan mencapai puncak tertinggi 88,23 pada 2024. Peningkatan berkelanjutan ini mencerminkan efektivitas kebijakan ketahanan pangan daerah, stabilisasi produksi pertanian lokal, perbaikan infrastruktur distribusi, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, Provinsi Bali berhasil tidak hanya memulihkan kondisi ketahanan pangan pasca-pandemi, tetapi juga mencapai level yang lebih tinggi dibandingkan kondisi pra-pandemi, dengan total peningkatan 3,69 poin selama periode observasi, yang menunjukkan fondasi ketahanan pangan yang semakin solid dan berkelanjutan.

Tabel 2.15
Indeks Ketahanan Pangan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2020–2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	82,56	82,51	83,29	86,59	87,64
Tabanan	90,05	90,17	92,20	90,54	92,51
Badung	89,29	89,38	91,29	91,59	92,90
Gianyar	89,96	89,46	91,07	92,16	92,77
Klungkung	85,35	82,80	83,29	87,53	87,47
Bangli	73,89	70,04	75,10	77,35	77,19
Karangasem	78,25	80,24	78,79	85,28	83,97
Buleleng	78,16	75,79	79,91	82,02	83,26
Denpasar	93,32	93,97	91,82	95,80	96,37
Provinsi Bali	**84,54**	**83,82**	**85,19**	**87,65**	**88,23**

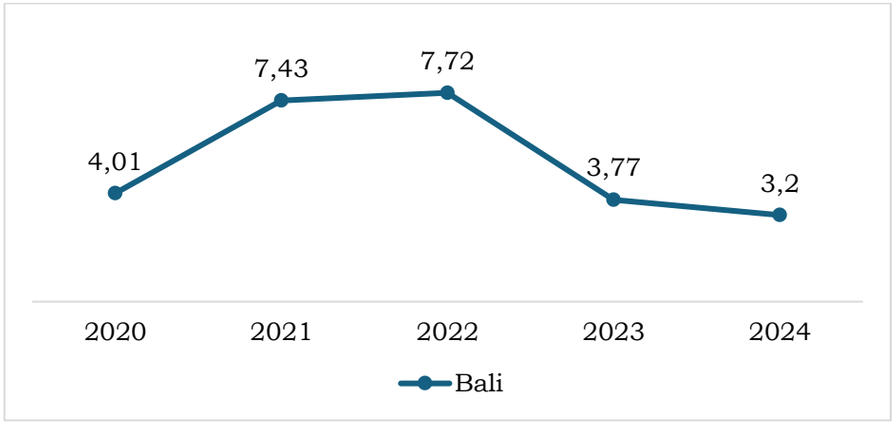
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

Data Indeks Ketahanan Pangan per kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2020-2024, terlihat dinamika *spasial* yang mencerminkan heterogenitas kondisi ketahanan pangan dengan pola pemulihan yang bervariasi antar wilayah. Kota Denpasar secara konsisten mempertahankan posisi tertinggi dengan indeks berkisar antara 91,82-96,37, mencerminkan keunggulan sebagai pusat ekonomi dan perdagangan dengan akses infrastruktur distribusi pangan yang optimal, daya beli masyarakat yang tinggi, serta diversifikasi sumber

pangan yang lebih baik. Sebaliknya, Kabupaten Bangli menunjukkan indeks terendah dalam rentang 70,04-77,35, mengindikasikan tantangan struktural terkait akses pangan, kondisi geografis pegunungan yang membatasi distribusi, serta keterbatasan infrastruktur ekonomi. Dampak pandemi *COVID-19* terlihat jelas pada penurunan indeks di hampir seluruh wilayah pada 2021, dengan Bangli mengalami kontraksi terdalam dari 73,89 menjadi 70,04, sementara periode 2022-2024 menunjukkan pemulihan progresif di semua kabupaten/kota.

2.1.5.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Bali periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang kompleks. Berdasarkan Gambar 2.11 mengenai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Bali selama periode 2020-2024, data menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan dengan implikasi sosio-ekonomi yang substansial. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas pengaruh faktor-faktor determinan terhadap ketahanan pangan di Bali. Peningkatan tajam pada periode 2020-2022 berkorelasi temporal dengan dampak pandemi *COVID-19* yang menyebabkan disrupsi rantai pasok pangan dan penurunan daya beli masyarakat akibat kontraksi ekonomi, khususnya di sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian regional. Sebaliknya, penurunan substansial pada periode 2022-2024 mengindikasikan efektivitas intervensi kebijakan ketahanan pangan dan pemulihan gradual sektor ekonomi vital. Meskipun terjadi perbaikan, perlu dicatat bahwa prevalensi tahun 2024 (3,2%) masih berada di bawah ambang batas optimal yang direkomendasikan dalam konteks ketahanan pangan global. Temuan ini menyoroti urgensi penguatan sistem ketahanan pangan yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan fokus pada diversifikasi sumber daya pangan lokal dan peningkatan resiliensi masyarakat terhadap guncangan eksternal.



Gambar 2.11
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik
URL: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MyMy/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan.html

2.1.5.3 Konsumsi Listrik Per Kapita

Pemulihan konsumsi listrik di Provinsi Bali pascapandemi menunjukkan transformasi struktural dalam pola penggunaan energi yang mencerminkan dinamika ekonomi regional. Kontraksi pada periode awal mengindikasikan dampak pembatasan aktivitas yang mempengaruhi seluruh sektor, namun akselerasi pertumbuhan pada periode selanjutnya menandakan tidak hanya pemulihan, tetapi juga ekspansi aktivitas ekonomi yang melampaui kondisi prapandemi. Fenomena ini sejalan dengan revitalisasi sektor pariwisata dan percepatan digitalisasi yang mendorong kebutuhan energi lebih tinggi.

Pergeseran pola konsumsi antar-sektor mengungkapkan restrukturisasi ekonomi yang sedang berlangsung di Bali. Dominasi sektor bisnis dalam pertumbuhan konsumsi listrik mencerminkan kebangkitan industri perhotelan, restoran, dan layanan pariwisata yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Sementara itu, peningkatan konsumsi rumah tangga yang konsisten menandakan perubahan gaya hidup masyarakat dengan adopsi teknologi dan peralatan elektronik yang semakin masif, termasuk penetrasi kendaraan listrik dan sistem pendingin ruangan.

Lonjakan signifikan pada sektor layanan khusus mengisyaratkan modernisasi infrastruktur dan fasilitas publik di Bali. Hal ini dapat mencakup pengembangan bandara, pelabuhan, sistem transportasi modern, dan fasilitas kesehatan yang memerlukan pasokan listrik andal. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa tren peningkatan konsumsi akan terus berlanjut, sehingga diperlukan perencanaan kapasitas pembangkitan dan distribusi yang antisipatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di provinsi ini.

Tabel 2.16
Penjualan Tenaga Listrik Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Tahun	Penjualan Tenaga Listrik (GWh)						
	Sosial	Rumah Tangga	Bisnis	Industri	Pemerintah	Layanan Khusus	Total
2020	156,27	2.434,38	1.916,12	189,25	195,18	55,67	4.946,86
2021	159,46	2.343,14	1.784,06	183,47	188,47	49,42	4.708,02
2022	186,28	2.473,52	2.364,58	194,67	184,93	66,52	5.470,51
2023	210,03	2.738,18	2.948,93	207,62	164,87	84,92	6.354,53
2024	238,95	3.173,66	3.386,32	227,34	166,45	108,63	7.301,34

Sumber:PT. PLN (Persero) UID Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, 2024

Tabel di atas menyajikan data penjualan tenaga listrik di Provinsi Bali selama periode 2020-2024 yang menunjukkan tren peningkatan konsumsi listrik secara signifikan. Total penjualan tenaga listrik mengalami kenaikan dari 4.946,86 GWh pada tahun 2020 menjadi 6.810,34 GWh pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 37,7% dalam kurun waktu lima tahun. Sektor rumah tangga mendominasi konsumsi listrik dengan kontribusi terbesar, yaitu mencapai 3.386,32 GWh pada tahun 2024, diikuti oleh sektor bisnis sebesar 2.948,93 GWh. Peningkatan konsumsi yang konsisten terjadi di hampir seluruh sektor, kecuali sektor industri yang cenderung fluktuatif dengan kisaran 189-227 GWh. Fenomena menarik terlihat pada munculnya kategori layanan khusus yang tercatat mulai tahun 2022 dengan nilai konsumsi yang terus meningkat hingga mencapai 108,63 GWh pada tahun 2024. Pertumbuhan konsumsi listrik ini mencerminkan perkembangan ekonomi dan peningkatan aktivitas masyarakat di Provinsi Bali, terutama pasca pandemi *COVID-19*, yang ditandai dengan pemulihan sektor pariwisata dan bisnis yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah tersebut.

Tabel 2.17
Konsumsi Listrik Perkapita di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Konsumsi Listrik Perkapita/KWh			
Tahun	Penduduk	KWh/Tahun	Konsumsi Listrik Perkapita
2020	4.317.404	4.963.631.934,00	1.149,68
2021	4.343.500	4.708.017.336,42	1.083,92
2022	4.374.300	5.470.511.133,26	1.250,60
2023	4.404.300	6.354.529.520,82	1.442,80
2024	4.433.300	7.301.364.279,00	1.646,94

Sumber: PT. PLN (Persero) UID Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, 2024

Tabel 2.17 menggambarkan perkembangan konsumsi listrik per kapita di Provinsi Bali selama periode 2020-2024 yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan energi listrik. Meskipun jumlah penduduk hanya meningkat moderat dari 4,32 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 4,43 juta jiwa pada tahun 2024 (naik 2,6%), konsumsi listrik total mengalami lonjakan drastis dari 4,96 miliar kWh menjadi 7,30 miliar kWh, atau meningkat 47,1% dalam periode yang sama. Konsumsi listrik per kapita menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, yaitu dari 1.149,68 kWh per orang pada tahun 2020 menjadi 1.646,94 kWh per orang pada tahun 2024, mencerminkan kenaikan sebesar 43,3%. Peningkatan tajam ini mengindikasikan beberapa faktor penting, antara lain pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID*-19, pertumbuhan sektor pariwisata yang merupakan penggerak utama ekonomi Bali, meningkatnya elektrifikasi dan modernisasi kehidupan masyarakat, serta bertambahnya aktivitas industri dan komersial. Tingkat konsumsi listrik per kapita yang terus meningkat ini juga menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat dan akses yang lebih baik terhadap peralatan elektronik, sekaligus menjadi indikator penting bagi perencanaan kapasitas pembangkit dan distribusi listrik di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang.

2.1.5.4 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Air bersih merupakan air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sementara itu, sumber air minum layak adalah sumber air yang dapat memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari masyarakat. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah (Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum). Adapun persentase rumah tangga memiliki akses air sumber air minum bersih dan layak di Provinsi Bali tahun 2019–2023 terlihat pada Tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.18
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Persen) Tahun 2020–2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	93,82	92,11	97,23	96,02	95,14
Tabanan	96,88	98,15	94,60	98,41	98,38
Badung	99,31	100,00	98,79	99,52	100,00
Gianyar	100,00	98,71	98,98	99,88	99,55
Klungkung	98,35	99,96	98,25	98,64	99,02

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bangli	97,24	91,16	93,12	96,32	96,07
Karangasem	93,72	98,45	100,00	100,00	99,50
Buleleng	94,59	93,38	98,99	95,49	94,36
Denpasar	99,25	100,00	100,00	99,84	99,96
Provinsi Bali	**97,36**	**97,56**	**98,42**	**98,31**	**98,32**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali (BPS Provinsi Bali)
URL:https://bali.bps.go.id/publication/2023/12/28/354e50947df8b0f270c8823b/statistik-kesejahteraan-rakyat-provinsi-bali-2023.html

Capaian akses air minum layak di Provinsi Bali yang mendekati universal menunjukkan keberhasilan pembangunan infrastruktur dasar yang merata di seluruh wilayah. Pencapaian ini menempatkan Bali sebagai salah satu provinsi dengan tingkat pelayanan air bersih terbaik di Indonesia, mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar warga atas air bersih. Konsistensi angka yang tinggi di seluruh kabupaten/kota mengindikasikan bahwa disparitas wilayah dalam hal akses air telah berhasil diminimalkan.

Fluktuasi minor yang terjadi di beberapa wilayah mencerminkan dinamika pembangunan perkotaan dan perubahan demografi yang terus berlangsung. Pertumbuhan penduduk dan ekspansi permukiman baru menciptakan tantangan berkelanjutan dalam mempertahankan cakupan universal, namun kemampuan daerah untuk menjaga tingkat akses tetap tinggi menunjukkan responsivitas sistem penyediaan air yang baik. Fenomena ini juga mengisyaratkan bahwa infrastruktur air minum di Bali telah mencapai tahap kematangan dengan kapasitas adaptasi yang memadai.

Pencapaian mendekati 100 persen di beberapa kabupaten menegaskan bahwa target universal akses air minum layak bukanlah utopia, melainkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai dengan perencanaan yang tepat. Keberhasilan Bali dalam aspek ini dapat menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia, menunjukkan bahwa kombinasi antara investasi infrastruktur yang konsisten, tata kelola yang baik, dan partisipasi masyarakat dapat mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh warga.

2.1.6 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.6.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH bertujuan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri atas 4 indikator, yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter DO (Oksigen Terlarut), *Fecal Coliform*, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat (NO_3-N), dan TSS. (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan parameter NO_2, dan SO_2, (3) Indeks Kualitas Lahan diukur berdasarkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan parameter tutupan hutan, tutupan vegetasi non-hutan termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan/lahan, dan dengan menambahkan faktor koreksi berupa dampak kebakaran dan kanal pada ekosistem lahan gambut, (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) diukur dengan parameter TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat). Hasil IKLH Provinsi Bali tahun 2020–2024 seperti pada Tabel 2.19 sebagai berikut.

Tabel 2.19
Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

IKLH dan Indikatornya	2020	2021	2022	2023	2024
IKLH Provinsi Bali	**71,99**	**70,70**	**70,89**	**71,38**	**75,02**
Indeks Kualitas Air	64,33	54,29	53,50	86,05	61,12
Indeks Kualitas Udara	88,34	89,28	89,19	55,17	92,12
Indeks Kualitas Air Laut	69,75	85,14	88,49	88,99	86,68
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	40,59	42,11	43,36	45,22	66,49
IKLH Nasional	**70,27**	**71,45**	**72,42**	**72,54**	**73,53**
Indeks Kualitas Air	53,53	52,82	53,88	54,59	54,78
Indeks Kualitas Udara	87,21	87,36	88,06	88,67	90,13
Indeks Kualitas Air Laut	68,94	81,04	84,41	78,84	81,67
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,54	60,72	60,72	61,79	61,95

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023; Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Bali menunjukkan tren meningkat dari 71,99 (2020) menjadi 75,02 (2024), mencerminkan perbaikan kualitas lingkungan. Peningkatan signifikan terjadi pada kualitas tutupan lahan dan udara, sementara kualitas air masih fluktuatif. Secara keseluruhan, Bali mencatat kinerja lingkungan di atas rata-rata nasional, terutama berkat keberhasilan konservasi lahan dan pengelolaan udara, meski kualitas air butuh perhatian lebih lanjut.

2.1.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Selama periode 2020–2024, akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Provinsi Bali menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung positif. Penurunan tajam pada 2022 (88,73%) dari tahun sebelumnya (95,95%) diduga disebabkan faktor eksternal kolektif, namun seluruh kabupaten/kota berhasil pulih pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2024 menunjukkan capaian rata-rata provinsi sebesar 96,83%, dengan Denpasar dan Badung mencatat lebih dari 99%. Karangasem dan Bangli tetap menjadi daerah dengan capaian terendah meskipun menunjukkan peningkatan. Ini mencerminkan keberhasilan pemulihan infrastruktur sanitasi pasca-disrupsi dan efektivitas intervensi kebijakan di tingkat lokal

Tabel 2.20
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	93,03	96,24	85,84	96,05	96,13
Tabanan	94,70	98,34	79,35	95,56	96,25
Badung	98,88	99,59	87,77	98,98	99,30
Gianyar	97,98	93,48	91,77	99,00	99,52
Klungkung	94,44	95,91	93,39	97,70	99,23
Bangli	90,53	87,01	82,43	91,58	92,49
Karangasem	85,44	87,36	89,55	90,55	91,31
Buleleng	91,71	94,15	80,90	90,99	93,79
Denpasar	98,74	99,97	98,51	99,92	99,01
Provinsi Bali	**95,01**	**95,95**	**88,73**	**95,70**	**96,83**

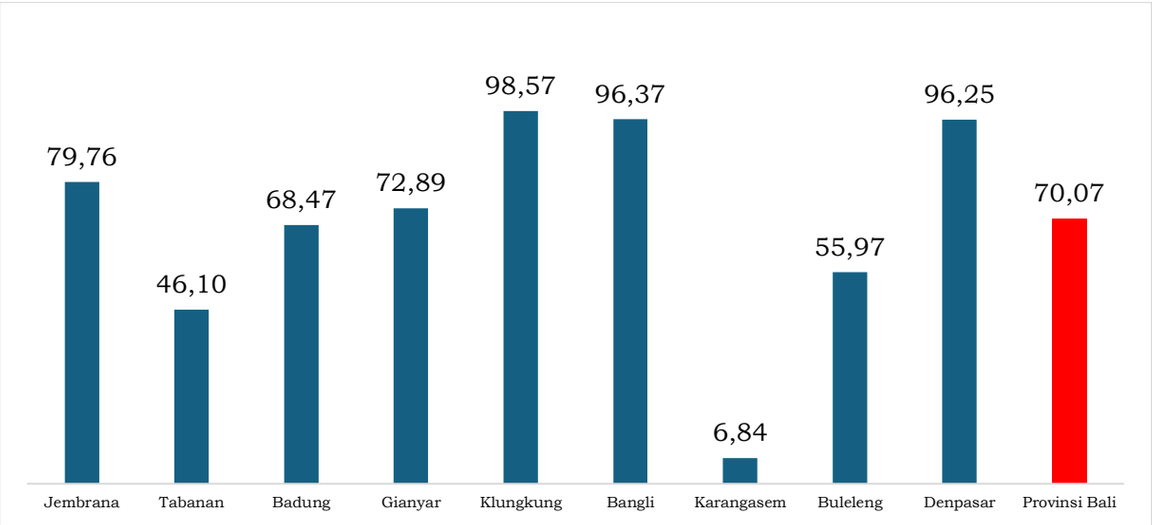
Sumber: BPS Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/3/VGtGTU5qbDFlQzl1VWxCTVNWZElXbWRhWkUwMFVUMDkjMw==/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali--2023.html?year=2023

2.1.6.3 Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Provinsi Bali telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Gubernur Bali juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, dan Instruksi Gubernur Bali Nomor

8324 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat. Kebijakan dan regulasi tersebut untuk membudayakan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan desa/kelurahan dan desa adat secara gotong royong.

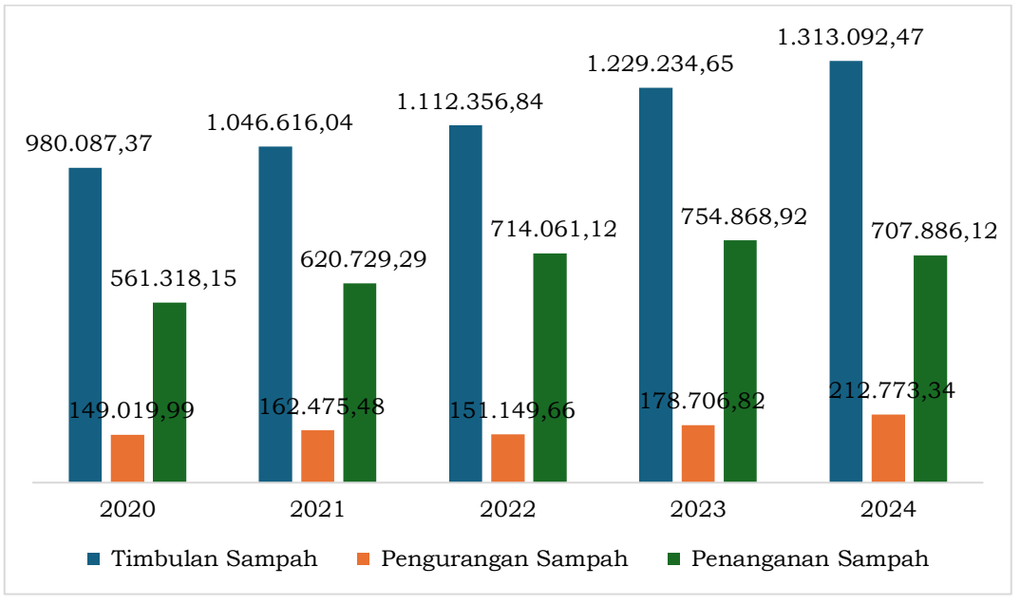
Berdasarkan data persentase rumah tangga yang mengelola sampah di Provinsi Bali tahun 2024, terlihat disparitas signifikan dalam implementasi pengelolaan sampah antar kabupaten/kota dengan rentang ekstrem dari 6,84% hingga 98,57%. Tiga kabupaten dengan capaian tertinggi, yakni Kabupaten Klungkung (98,57%), Kabupaten Bangli (96,37%), dan Kota Denpasar (96,25%). Hal ini mengindikasikan keberhasilan kebijakan lokal dan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, sementara Karangasem menunjukkan kondisi kritis dengan capaian terendah 6,84% yang memerlukan intervensi mendesak. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan pembangunan infrastruktur lingkungan dan variasi kapasitas kelembagaan daerah dalam mengimplementasikan program pengelolaan sampah. Meskipun rata-rata provinsi mencapai 70,07% yang relatif baik, namun koefisien variasi yang tinggi menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan dan redistribusi sumber daya untuk mencapai target pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Disparitas ini juga mengimplikasikan bahwa faktor geografis, ekonomi, dan kapasitas pemerintah daerah menjadi determinan utama keberhasilan program pengelolaan sampah, sehingga diperlukan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik spesifik setiap wilayah.



Gambar 2.12
Persentase Rumah Tangga Per Kabupaten di Provinsi Bali yang Mengelola Sampah Tahun 2024 (%)
Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)
URL: https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/capaian

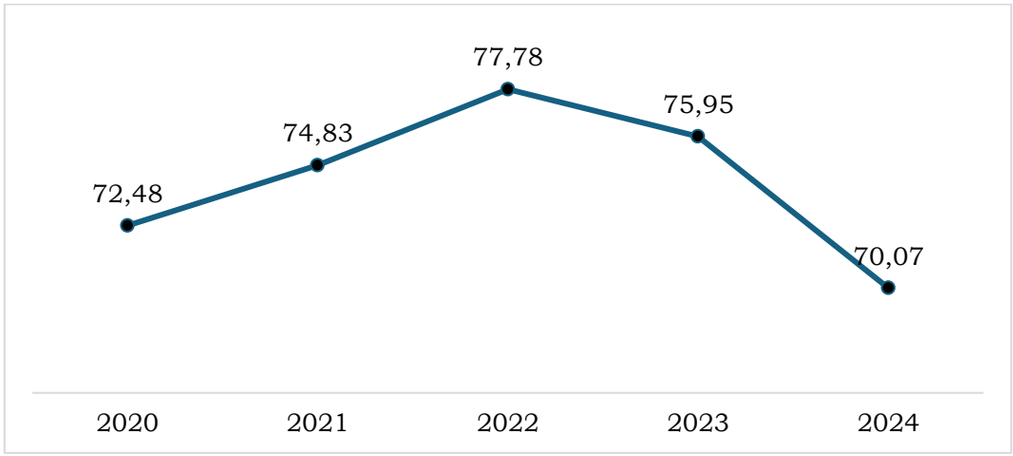
Persentase sampah daerah yang terkelola adalah banyaknya jumlah timbulan sampah yang dikelola sampai proses akhir dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah daerah yang diproduksi secara keseluruhan.

Berdasarkan data timbulan, pengurangan, dan penanganan sampah Provinsi Bali periode 2020-2024, terlihat ketidakseimbangan kritis dalam sistem pengelolaan sampah regional. Timbulan sampah mengalami eskalasi konsisten dari 980.087,37ton pada tahun 2020 menjadi 1.313.092,47ton pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan 34% yang mencerminkan ekspansi aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat pasca-pandemi. Namun, kapasitas pengurangan sampah stagnan pada level rendah sekitar 60.000-90.000 ton per tahun atau hanya 7% dari total timbulan, mengindikasikan lemahnya implementasi program *reduce, reuse, dan recycle*. Meskipun penanganan sampah meningkat hingga 754.868,92ton pada tahun 2023, penurunan menjadi 707.886,12ton pada tahun 2024 menunjukkan keterbatasan infrastruktur pengelolaan yang tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan timbulan. Kesenjangan substansial antara timbulan sampah dengan kombinasi pengurangan dan penanganan mencapai sekitar 500.000 ton per tahun mengimplikasikan akumulasi sampah yang tidak terkelola dan berpotensi menciptakan krisis lingkungan jangka panjang, sehingga memerlukan transformasi fundamental dalam kebijakan pengelolaan sampah menuju ekonomi sirkular dan peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah secara masif.



Gambar 2.13
Timbulan, Pengurangan, dan Penanganan Sampah (Ton/Tahun) di Provinsi Bali
Sumber: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
URL: https://bit.ly/JAKSTRADABALI

Berdasarkan data persentase sampah terkelola di Provinsi Bali periode 2020-2024, terlihat pola dinamis berupa kurva terbalik dengan puncak capaian di tahun 2022 sebesar 77,78%, kemudian mengalami degradasi konsisten hingga 70,07% pada 2024. Fase awal menunjukkan tren positif dari 72,48% (2020) menjadi 77,78% (2022), yang mengindikasikan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah selama masa pandemi ketika timbulan sampah relatif terkendali akibat pembatasan aktivitas ekonomi. Namun, penurunan signifikan mulai 2023 hingga 2024 dengan margin 7,71 poin persentase mencerminkan ketidakmampuan sistem pengelolaan mengimbangi lonjakan timbulan sampah akibat pemulihan ekonomi dan normalisasi aktivitas masyarakat pasca-pandemi. Fenomena ini mengkonfirmasi hipotesis bahwa pertumbuhan timbulan sampah melampaui kapasitas ekspansi infrastruktur pengelolaan, sehingga menciptakan kesenjangan struktural dalam sistem pengelolaan sampah regional. Tren menurun ini mengindikasikan perlunya reorientasi kebijakan dari pendekatan *end-of-pipe* menuju strategi pencegahan dan pengurangan sampah di sumber, serta akselerasi pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang adaptif terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2.14
Persentase Sampah Terkelola di Provinsi Bali Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
URL: https://bit.ly/JAKSTRADABALI

2.1.7 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.7.1 Penurunan Intensitas Emisi GRK

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang menyerap dan memancarkan energi radiasi (energi panas) dalam kisaran inframerah termal. Tingginya gas ini di atmosfer akan menyebabkan efek rumah kaca. Gas rumah kaca terdiri atas beberapa jenis senyawa, termasuk karbon dioksida, metana, gas berfluorinasi, dan dinitrogen oksida. Meski banyak senyawa yang terkandung dalam GRK, tetapi emisi GRK disetarakan dengan emisi karbon dioksida atau CO_2 karena kandungan CO_2 paling mendominasi dalam gas rumah kaca. Upaya

penurunan emisi GRK adalah pelaksanaan rencana kerja dari berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi GRK sesuai dengan target pembangunan nasional ataupun pembangunan daerah.

Berdasarkan data emisi gas rumah kaca Provinsi Bali periode 2019-2023, terdapat penurunan signifikan emisi total dari 17.958,72 Gg CO_2e pada 2019 menjadi 10.932,96 Gg CO_2e pada 2023. Sektor energi merupakan kontributor emisi terbesar dengan pola fluktuatif, mengalami penurunan drastis pada 2020-2021 (kemungkinan dampak pandemi *COVID-19*), kemudian meningkat kembali pada 2022-2023 bahkan melampaui level pra-pandemi. Transformasi sektor kehutanan menjadi aspek paling positif, berubah dari sumber emisi 2.730,94 Gg CO_2e pada 2019 menjadi penyerap karbon konsisten sejak 2020 dengan kapasitas penyerapan tertinggi -1.215,12 Gg CO_2e pada 2023. Sektor pertanian menunjukkan emisi relatif stabil berkisar 1.600-1.770 Gg CO_2e, sementara sektor limbah mengalami penurunan drastis dari 3.520,69 Gg CO_2e pada 2019 menjadi 378,15 Gg CO_2e pada 2023, mengindikasikan perbaikan pengelolaan limbah yang signifikan. Secara keseluruhan, data menunjukkan Provinsi Bali berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 39,1% dibandingkan *baseline* 2019, terutama didorong oleh optimalisasi fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan perbaikan pengelolaan limbah.

Tabel 2.21
Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Sumber Emisi GRK	Emisi Gas Rumah Kaca (Gg CO_2e)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Energi	7.586,31	6.911,40	8.205,87	10.169,94	12.239,68
IPPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pertanian	1.612,13	1.744,20	1.770,33	1.599,99	1.203,89
Kehutanan	-1.123,71	-1.156,42	-1.153,96	-1.215,12	-1.200,73
Limbah	3.849,91	4.140,84	3.852,40	378,15	355,95
Jumlah	**11.924,64**	**11.640,02**	**12.674,64**	**10.932,96**	**12.598,79**

Sumber: *Sign Smart* - KLHK

Data emisi gas rumah kaca (GRK) Provinsi Bali periode 2020-2024 yang bersumber dari *Sign Smart* - KLHK menunjukkan dinamika perubahan yang signifikan dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Total emisi GRK Bali mengalami penurunan bertahap dari 11.924,64 Gg CO2e pada tahun 2020 menjadi 10.932,96 Gg CO2e pada tahun 2023, namun melonjak kembali mencapai 12.698,79 Gg CO2e pada tahun 2024, melampaui level awal periode pemantauan.

Analisis sektoral mengungkap pola yang kontras antarsektor. Sektor energi sebagai kontributor utama menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan, naik 61% dari 7.586,31 Gg CO2e (2020) menjadi 12.239,68 Gg CO2e (2024), mengindikasikan

meningkatnya konsumsi energi seiring pemulihan ekonomi dan pariwisata pasca-pandemi. Sebaliknya, sektor limbah mencatat penurunan drastis sebesar 91% dari 3.849,91 menjadi 355,95 Gg CO2e, menunjukkan keberhasilan pengelolaan limbah yang lebih baik.

Sektor pertanian dan kehutanan menunjukkan penurunan moderat, dengan pertanian turun 26% dan kehutanan turun 6% selama periode tersebut. Menariknya, sektor Industri Proses dan Penggunaan Produk (IPPU) tidak mencatatkan emisi sepanjang periode pemantauan. Lonjakan total emisi pada 2024 yang didominasi sektor energi menjadi peringatan penting bagi Bali untuk segera mengakselerasi transisi energi bersih dan efisiensi energi, terutama di sektor pariwisata dan transportasi, guna mencapai target penurunan emisi sesuai komitmen iklim Indonesia.

2.1.7.2 Indeks Risiko Bencana

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Bali Tahun 2020-2024 terlihat seperti pada Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22
Nilai Indeks Risiko Bencana di Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Kabupaten /Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	160,41	152,62	157,92	150,15	133,06
Tabanan	153,27	153,27	143,87	136,90	122,13
Gianyar	129,79	129,79	130,56	129,03	122,96
Karangasem	137,94	123,15	129,11	121,24	110,78
Bangli	139,46	133,69	128,65	125,04	117,37
Klungkung	133,42	124,22	125,41	126,93	124,33
Badung	101,81	101,81	103,29	102,92	94,74
Kota Denpasar	106,70	106,70	104,39	98,18	90,13
Buleleng	102,05	92,45	92,64	91,49	86,02
Provinsi Bali	**141,65**	**138,81**	**135,56**	**132,25**	**128,52**

Sumber: inaRISK (BNPB)
URL: https://inarisk.bnpb.go.id/irbi

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Provinsi Bali tahun 2020-2024, terlihat tren penurunan tingkat risiko bencana yang konsisten di seluruh kabupaten/kota. Seluruh wilayah mengalami reduksi nilai indeks dengan rata-rata penurunan berkisar 15-25 poin, menunjukkan perbaikan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana yang signifikan. Tabanan mencatat penurunan terbesar dari 153,27 menjadi 122,12, sedangkan Badung mempertahankan posisi terendah dengan nilai 94,74 pada tahun 2024.

Klasifikasi risiko "sedang" yang seragam pada 2024 mengindikasikan standardisasi pengelolaan risiko bencana yang relatif merata, meskipun masih terdapat disparitas nilai antar wilayah. Kota Denpasar dan Buleleng menunjukkan kinerja terbaik dengan nilai di bawah 95, sementara Jembrana dan Klungkung masih memerlukan perhatian khusus dengan nilai di atas 120. Pola ini menggambarkan korelasi antara tingkat urbanisasi, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan dalam mengurangi kerentanan terhadap bencana alam.

2.1.7.3 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah di Provinsi Bali selama periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang bervariasi antarwilayah. Secara umum, indeks provinsi mengalami peningkatan dari 0,49 pada tahun 2020-2022 menjadi 0,63 pada tahun 2024, yang mengindikasikan membaiknya ketahanan daerah secara keseluruhan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Indeks Ketahanan Daerah di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Karangasem	0,67	0,67	0,57	0,58	0,69
Denpasar	0,52	0,52	0,54	0,64	0,76
Klungkung	0,57	0,57	0,49	0,49	0,50
Tabanan	0,41	0,41	0,46	0,47	0,64
Badung	0,64	0,64	0,54	0,57	0,76
Bangli	0,41	0,41	0,42	0,42	0,50
Gianyar	0,39	0,39	0,34	0,36	0,42
Buleleng	0,77	0,77	0,59	0,61	0,74
Jembrana	0,43	0,43	0,43	0,44	0,62
Provinsi Bali	**0,49**	**0,49**	**0,49**	**0,51**	**0,63**

Sumber: Bali Satu Data
URL: https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/nilai-indeks-ketahanan-daerah-ikd-kabupatenkota-di-provinsi-bali?district_id=&sub_district_id=&year=2024&month=&date=

Kabupaten Buleleng konsisten mempertahankan posisi tertinggi dengan indeks 0,77 sepanjang periode pengamatan, menunjukkan ketahanan daerah yang paling baik di antara kabupaten/kota lainnya. Sementara itu, Kabupaten Gianyar dan Bangli tercatat memiliki indeks terendah, meskipun keduanya menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2024.

Perkembangan positif terlihat pada beberapa daerah, terutama Kota Denpasar yang mengalami peningkatan signifikan dari 0,52 (2020) menjadi 0,76 (2024), serta Kabupaten Badung yang meningkat dari 0,64 menjadi 0,76. Kabupaten Jembrana juga menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dari 0,43 menjadi 0,62. Peningkatan ini mencerminkan upaya perbaikan ketahanan daerah yang berhasil dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

2.1.8 Demografi

2.1.8.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah penduduk Bali berjumlah 4.433.300 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,66% per tahun, kepadatan penduduk sebesar 793 per km^2, dan rasio jenis kelamin 100,5 di tahun 2024. Sedangkan menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km^2)	Ratio Jenis Kelamin
Jembrana	317,1	1,88	7,34	377	100,3
Tabanan	461,6	0,90	10,69	455	100,5
Badung	548,2	0,09	12,70	1.310	100,4
Gianyar	515,3	0,90	11,94	1.400	100,6
Klungkung	206,9	1,89	4,79	657	100,4
Bangli	258,7	1,79	5,99	527	101,5
Karangasem	492,4	2,12	11,41	587	102,7
Buleleng	791,8	2,33	18,34	580	101,1
Denpasar	725,3	-0,81	16,80	5.676	102,0
Bali	**4.317,4**	**1,01**	**100,00**	**747**	**101,2**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3lTbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali--2024.html?year=2020

Tabel 2.25
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km^2)	Ratio Jenis Kelamin
Jembrana	321,9	2,05	7,38	382	100,2
Tabanan	465,3	1,07	10,67	459	100,5
Badung	549,3	0,26	12,59	1.312	100,3
Gianyar	519,5	1,07	11,91	1.412	100,6
Klungkung	210,1	2,06	4,82	667	100,4
Bangli	262,5	1,97	6,02	535	101,5
Karangasem	500,8	2,29	11,48	597	102,7
Buleleng	806,6	2,51	18,49	591	101,1

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km²)	Ratio Jenis Kelamin
Denpasar	726,6	0,24	16,65	5.686	102,0
Bali	**4.362,7**	**1,40**	**100,00**	**755**	**101,1**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3lTbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali--2024.html?year=2021

Tabel 2.26
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km²)	Ratio Jenis Kelamin
Jembrana	327,9	1,93	7,43	389	100,2
Tabanan	469,3	0,95	10,63	463	100,5
Badung	549,5	0,14	12,45	1.313	100,3
Gianyar	524,0	0,95	11,87	1.424	100,6
Klungkung	214,0	1,94	4,85	679	100,3
Bangli	267,1	1,85	6,05	544	101,4
Karangasem	511,3	2,17	11,58	609	102,7
Buleleng	825,1	2,38	18,69	605	101,1
Denpasar	726,8	0,12	16,46	5.688	102,0
Bali	**4.415,1**	**1,29**	**100,00**	**764**	**101,1**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3lTbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali--2024.html?year=2022

Tabel 2.27
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km²)	Ratio Jenis Kelamin
Jembrana	323,5	0,67	7,34	381	100,3
Tabanan	466,1	0,32	10,58	549	99,5
Badung	563,3	0,91	12,79	1.413	100,5
Gianyar	524,0	0,56	11,90	1.438	99,5
Klungkung	208,7	0,29	4,74	665	100,6
Bangli	261,4	0,34	5,93	496	101,3
Karangasem	500,0	0,51	11,35	596	100,9
Buleleng	808,9	0,71	18,37	612	100,9

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km²)	Ratio Jenis Kelamin
Denpasar	748,4	1,05	16,99	5.946	102,1
Bali	**4.404,3**	**0,67**	**100,00**	**788**	**100,7**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3lTbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali--2024.html?year=2023

Tabel 2.28
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km²)	Ratio Jenis Kelamin
Jembrana	325,6	0,67	7,35	383	100,3
Tabanan	467,7	0,33	10,55	551	99,1
Badung	568,5	0,92	12,82	1.426	100,5
Gianyar	527,1	0,57	11,89	1.447	99,1
Klungkung	209,3	0,29	4,72	667	100,6
Bangli	262,3	0,34	5,92	498	101,2
Karangasem	502,3	0,50	11,33	599	100,3
Buleleng	814,8	0,72	18,38	616	100,8
Denpasar	755,6	1,03	17,04	6.003	102,1
Bali	**4.433,3**	**0,66**	**100,00**	**793**	**100,5**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3lTbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali--2024.html?year=2024

Berdasarkan data statistik kependudukan Provinsi Bali periode 2020-2024, terlihat dinamika pertumbuhan penduduk yang menunjukkan pola fluktuatif namun tetap positif. Jumlah penduduk Bali mengalami peningkatan konsisten dari 4,317 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 4,484 juta jiwa pada tahun 2024, dengan pertambahan sekitar 166.400 jiwa selama lima tahun tersebut.

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan variasi yang menarik, dimulai dari 1,01% pada tahun 2020, mencapai puncaknya di tahun 2021 sebesar 1,40%, kemudian mengalami perlambatan signifikan menjadi 0,67% pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 1,06% pada tahun 2024. Pola ini kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi yang mempengaruhi mobilitas penduduk.

Kepadatan penduduk mengalami peningkatan progresif dari 747 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2020 menjadi 793 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan intensifikasi penggunaan lahan dan urbanisasi yang terus berlanjut di Provinsi Bali.

Dari aspek komposisi gender, rasio jenis kelamin menunjukkan tren penurunan dari 101,2 pada tahun 2020 menjadi 100,5 pada tahun 2024, mengindikasikan keseimbangan populasi antara laki-laki dan perempuan yang semakin proporsional. Secara konsisten, Kabupaten Badung memiliki jumlah penduduk terbesar, diikuti oleh Tabanan dan Gianyar, sementara Jembrana tetap menjadi kabupaten dengan populasi terkecil. Distribusi ini mencerminkan konsentrasi aktivitas ekonomi dan pariwisata yang terpusat di wilayah selatan Bali.

2.1.8.2 Proyeksi dan Analisis Penduduk 5 (Lima) Tahun ke Depan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa yang tersebar di 34 provinsi. Penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sekitar 56 persen penduduk mendiami pulau tersebut, sedangkan penduduk Bali tidak lebih dari dua persen dari penduduk Indonesia. Namun, kepadatan penduduk di Bali menjadi salah satu yang tertinggi selain provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan data proyeksi penduduk hasil SP 2020, jumlah penduduk Bali pada tahun 2023 tercatat sebanyak 4,40 juta jiwa. Jumlah penduduk Bali meningkat hampir dua kali lipat selama empat dekade lebih yang pada SP 1980, jumlah penduduk Bali tercatat hanya sebanyak 2,47 juta jiwa. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Buleleng yang tercatat sebanyak 808,9 ribu jiwa, sedangkan jumlah terendah berada di Kabupaten Bangli.

1. Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali

Proyeksi penduduk digunakan untuk melihat tren demografi atau pertumbuhan penduduk berdasarkan komponen laju pertumbuhan penduduk. Proyeksi ini sebagai pemetaan dan perkiraan sebagai perubahan jumlah penduduk dalam menentukan alokasi sumber daya.

Berdasarkan data proyeksi penduduk Provinsi Bali periode 2024-2030, diperkirakan terjadi pertumbuhan penduduk yang konsisten namun mengalami perlambatan progresif dari 4,43 juta jiwa pada 2024 menjadi 4,58 juta jiwa pada 2030. Pola pertumbuhan menunjukkan tren penurunan laju pertumbuhan absolut setiap tahunnya, dimulai dari 28.010 jiwa pada periode 2024-2025 menurun secara bertahap hingga 22.460 jiwa pada periode 2029-2030, mengindikasikan fenomena transisi demografi menuju stabilitas populasi. Total proyeksi penambahan penduduk selama enam tahun mencapai 151.850 jiwa atau setara dengan tingkat pertumbuhan

kumulatif 3,42%, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 0,57%. Pola perlambatan pertumbuhan ini sejalan dengan teori transisi demografi pada wilayah yang mengalami perkembangan sosial-ekonomi, di mana peningkatan kualitas hidup dan urbanisasi cenderung menurunkan tingkat kelahiran, sehingga pertumbuhan penduduk Bali diproyeksikan akan semakin moderat dan terkendali.

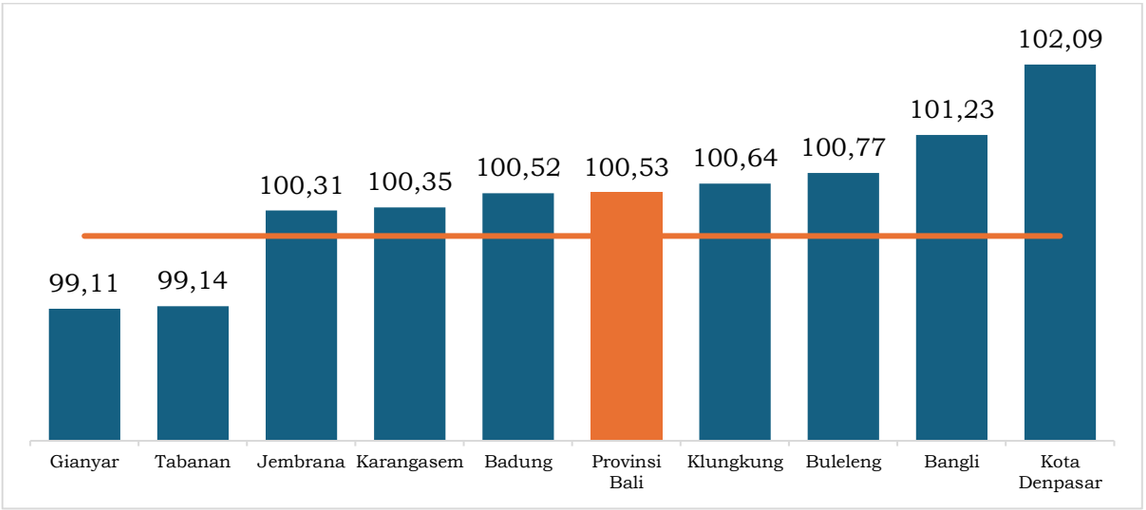
Tabel 2.29
Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali

Penduduk Tahun 2024 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.433.260	4.461.270	4.488.240	4.514.160	4.538.990	4.562.650	4.585.110

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020

2. Proyeksi Penduduk Provinsi Bali Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data rasio jenis kelamin kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2024, terdapat ketimpangan gender yang cukup bervariasi antarwilayah dengan kecenderungan dominasi populasi perempuan di sebagian besar kabupaten. Delapan dari sembilan kabupaten/kota menunjukkan rasio jenis kelamin di bawah 100, mengindikasikan jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan Kabupaten Gianyar memiliki rasio terendah (99,11) dan Kabupaten Tabanan (99,14). Hanya Kabupaten Karangasem yang menunjukkan rasio di atas 100 (102,09), menandakan populasi laki-laki lebih dominan di wilayah tersebut. Secara provinsi, Bali memiliki rasio jenis kelamin 100,53 yang menunjukkan komposisi gender relatif seimbang dengan sedikit kelebihan populasi laki-laki. Disparitas rasio antarwilayah berkisar antara 99,11 hingga 102,09 dengan rentang 2,98 poin, mengindikasikan adanya faktor geografis, sosial-ekonomi, dan migrasi yang memengaruhi distribusi gender di masing-masing kabupaten/kota, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami determinan ketimpangan gender regional tersebut dalam konteks perencanaan pembangunan yang responsif gender.



Gambar 2.15
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Bali 2024

Berkaitan dengan hal tersebut, proyeksi Penduduk Provinsi Bali berdasarkan jenis kelamin hingga Tahun 2030 dapat dilihat pada Tabel 2.30 sebagai berikut.

Tabel 2.30
Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki	2.222.440	2.234.560	2.246.080	2.257.020	2.267.340	2.277.040	2.286.080
Perempuan	2.210.820	2.226.710	2.242.160	2.257.150	2.271.650	2.285.620	2.299.040

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Bali 2023 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020

3. Proyeksi Penduduk Provinsi Bali Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan data proyeksi penduduk Provinsi Bali berdasarkan kelompok umur periode 2024-2030, terjadi transformasi struktur demografi yang menunjukkan fenomena penuaan populasi (*aging population*) dengan pola pertumbuhan diferensial antarkelompok usia. Kelompok usia muda (0-19 tahun) mengalami penurunan konsisten dari 1,35 juta jiwa menjadi 1,24 juta jiwa, mencerminkan tren penurunan fertilitas dan transisi demografi menuju keluarga kecil. Sebaliknya, kelompok usia lanjut (60+ tahun) mengalami peningkatan signifikan dari 645.840 jiwa menjadi 798.330 jiwa atau meningkat 23,6%, mengindikasikan peningkatan harapan hidup dan kemajuan layanan kesehatan. Kelompok usia produktif (15-64 tahun) tetap dominan dengan proporsi sekitar 70% dari total populasi, namun mengalami pergeseran internal dengan kelompok usia produktif muda (15-39 tahun) cenderung menurun sementara kelompok usia produktif tua (40-64 tahun) meningkat. Transformasi demografis ini mencerminkan bonus demografi yang sedang bergeser menuju

tantangan *dependency ratio* yang meningkat, sehingga Provinsi Bali perlu mempersiapkan strategi pembangunan yang mengantisipasi kebutuhan infrastruktur kesehatan, sistem jaminan sosial, dan optimalisasi produktivitas tenaga kerja.

Tabel 2.31
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Usia	Jumlah Penduduk Tahun 2024 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
0–4	319,16	324,62	323,12	321,65	320,18	318,56	316,91
5–9	295,58	295,28	301,55	307,20	312,30	317,23	322,66
10–14	304,04	299,13	295,82	294,17	293,86	294,13	293,83
15–19	329,41	326,10	321,36	315,45	309,03	303,00	298,12
20–24	332,59	331,77	331,08	330,39	329,30	327,29	324,00
25–29	332,67	332,12	331,48	330,72	329,90	329,08	328,27
30–34	330,04	330,07	329,94	328,68	329,30	328,84	328,31
35–39	324,69	325,03	325,32	325,63	325,89	326,06	326,10
40–44	323,23	321,19	320,04	319,63	319,76	320,12	320,46
45–49	324,83	325,77	325,11	323,12	320,39	317,75	315,78
50–54	300,93	304,34	307,98	311,70	315,06	317,43	318,39
55–59	270,25	275,43	279,95	283,82	287,26	290,58	293,96
60–64	223,40	230,83	237,79	244,31	250,36	255,90	260,92
65–69	168,74	175,18	182,18	189,57	197,10	204,46	211,43
70–74	119,86	125,08	130,09	134,96	139,91	145,21	151,00
75–79	73,20	76,42	80,20	84,36	88,73	93,12	97,42
80+	60,64	62,91	65,25	67,82	70,69	73,92	77,56
Total	**4.433,26**	**4.461,27**	**4.488,24**	**4.514,16**	**4.538,99**	**4.562,65**	**4.585,11**

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2020–2050 (Hasil Sensus Penduduk 2020)

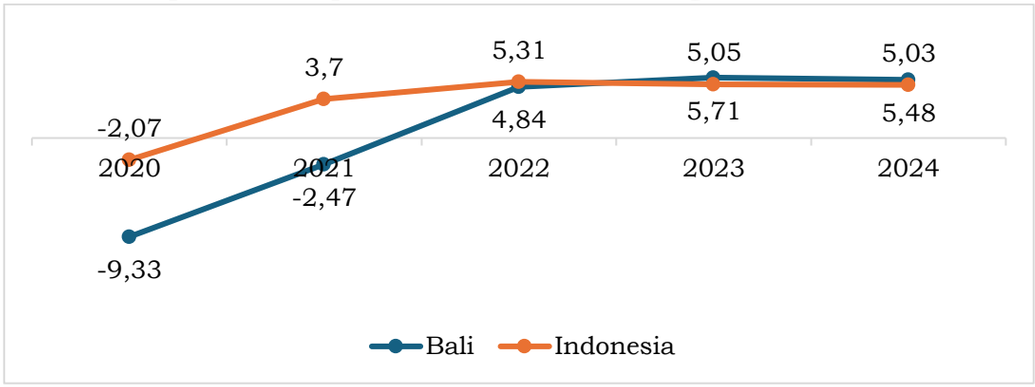
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, teridentifikasi pola divergen-konvergen yang dramatis dalam dinamika pertumbuhan ekonomi Bali nasional selama periode 2020-2024. Provinsi Bali mengalami kontraksi ekonomi yang sangat signifikan pada 2020 (-9,33%) akibat disrupsi pandemi terhadap sektor pariwisata, kontras dengan Indonesia yang mampu mempertahankan pertumbuhan positif (2,07%). Fase pemulihan gradual Bali dimulai pada 2021 (-2,47%), meskipun masih dalam teritori negatif, sebelum mencapai titik infleksi pada 2022 dengan pertumbuhan positif 4,84%. Fenomena *catch-up effect* teridentifikasi pada 2022-2023 ketika ekonomi Bali tumbuh dengan akselerasi lebih tinggi, hingga melampaui rata-rata nasional pada 2023 (5,71% dibandingkan 5,05% nasional). Pergerakan konvergen terjadi pada 2024 dengan stabilisasi pertumbuhan kedua entitas pada kisaran 5%, meskipun Bali tetap mempertahankan margin pertumbuhan yang lebih tinggi (5,48% dibandingkan 5,03% nasional). Volatilitas tinggi pada trajektori ekonomi Bali merefleksikan ketergantungan struktural terhadap sektor pariwisata, dengan implikasi penting terhadap diversifikasi

ekonomi. Penggambaran laju pertumbuhan di Provinsi Bali dan nasional dapat dilihat pada Gambar 2.16 sebagai berikut.



Gambar 2.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan penentu tingkat kesejahteraan, keamanan, serta kemajuan suatu daerah sehingga diperlukan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada setiap daerahnya. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2020–2024 seperti tampak pada Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Kabupaten /Kota	Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	-4,98	-0,65	2,98	3,66	4,98
Tabanan	-6,17	-1,98	2,94	3,56	4,94
Badung	-16,55	-6,74	9,97	11,29	5,94
Gianyar	-8,39	-1,05	4,04	5,06	5,47
Klungkung	-6,38	-0,23	3,12	4,70	5,08
Bangli	-4,10	-0,33	2,79	3,50	4,54
Karangasem	-4,49	-0,56	2,58	3,10	4,33
Buleleng	-5,80	-1,27	3,11	3,64	5,04
Denpasar	-9,44	-0,92	5,06	5,69	5,55
Bali	**-9,34**	**-2,46**	**4,84**	**5,71**	**5,48**

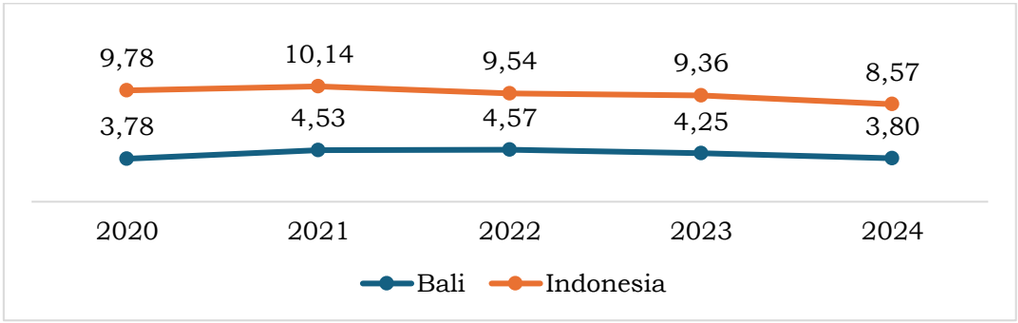
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTExIzI=/pertumbuhan-pdrb-ekonomi-kabupaten-kota-di-provinsi-Bali.html

Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali periode 2020-2024, terlihat pola pemulihan ekonomi pascapandemi yang sangat jelas dengan karakteristik berbeda antarwilayah. Tahun 2020-2021 menunjukkan kontraksi ekonomi di seluruh kabupaten/kota, dengan Kabupaten Badung mengalami penurunan drastis senilai -16,55% dan -6,74%. Hal tersebut mencerminkan ketergantungan tinggi sektor pariwisata yang terdampak pembatasan

mobilitas global. Periode 2022-2023 menandai fase pemulihan spektakuler dengan seluruh wilayah mencatatkan pertumbuhan positif, dimana Badung justru mengalami *rebound* terkuat (9,87% dan 11,29%), mengindikasikan resiliensi sektor pariwisata premium ketika mobilitas internasional kembali normal. Tahun 2024 memperlihatkan normalisasi pertumbuhan ekonomi dengan perlambatan yang wajar berkisar 1,98%-5,94%, menunjukkan stabilisasi menuju pola pertumbuhan berkelanjutan. Disparitas pertumbuhan antarwilayah mencerminkan struktur ekonomi yang beragam, dimana kabupaten dengan basis pariwisata kuat seperti Badung dan Gianyar mengalami volatilitas tinggi namun juga potensi *recovery* yang besar, sementara wilayah dengan ekonomi berbasis pertanian seperti Karangasem menunjukkan stabilitas relatif dengan fluktuasi yang lebih moderat, sehingga diversifikasi ekonomi menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan ekonomi regional di masa depan.

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali periode 2020-2024, teridentifikasi dinamika kemiskinan yang menunjukkan pola fluktuatif dengan tren konvergensi pada akhir periode. Provinsi Bali secara konsisten mempertahankan tingkat kemiskinan yang substansial lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, dengan disparitas sekitar 5-6 poin persentase. Kedua entitas menunjukkan pola serupa dengan peningkatan kemiskinan pada 2021 (Bali: 4,53%; Indonesia: 10,14%) akibat dampak pandemi, dilanjutkan tren penurunan gradual hingga 2024, dengan Bali kembali ke level mendekati pra-pandemi (3,80% versus 3,78% tahun 2020). Analisis *spasial* mengungkapkan disparitas signifikan antar kabupaten/kota dengan polarisasi antara wilayah berbasis pariwisata yang memiliki tingkat kemiskinan rendah (Badung: 2,23%; Denpasar: 2,59% pada 2024) dan wilayah periferal dengan karakteristik agraris yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi (Karangasem: 6,52%; Buleleng: 5,39%). Menariknya, seluruh wilayah menunjukkan pola temporal serupa (peningkatan 2021-2022, penurunan 2023-2024), mengindikasikan sensitivitas homogen terhadap guncangan ekonomi makro. Disparitas *spasial* kemiskinan relatif persisten dengan rentang 4,29 poin persentase pada 2024, merefleksikan ketimpangan struktural dalam distribusi aktivitas ekonomi dan infrastruktur pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali.



Gambar 2.17
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Data persentase penduduk miskin Provinsi Bali periode 2020-2024, terlihat dampak signifikan pandemi *COVID-19* terhadap kemiskinan dengan pola pemulihan bertahap yang menunjukkan disparitas tajam antarwilayah. Tingkat kemiskinan provinsi mengalami lonjakan dari 3,78% pada 2020 menjadi puncaknya 4,57% pada 2022, kemudian berangsur turun menjadi 4,00% pada 2024, mencerminkan resiliensi ekonomi dalam menghadapi krisis dan proses pemulihan yang positif. Disparitas geografis sangat mencolok dengan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung konsisten memiliki tingkat kemiskinan terendah (berkisar 2,02%-2,97%), sementara Kabupaten Karangasem menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi dan persisten (5,91%-6,98%) diikuti Kabupaten Buleleng (5,32%-6,21%). Pola ini mengindikasikan kesenjangan struktural antara wilayah dengan ekonomi berbasis pariwisata dan jasa perkotaan yang memiliki nilai tambah tinggi dengan wilayah perdesaan yang bergantung pada sektor pertanian dan ekonomi tradisional. Meskipun tren penurunan kemiskinan pada 2023-2024 menunjukkan arah positif, kesenjangan antarwilayah yang mencapai hampir tiga kali lipat memerlukan intervensi kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan redistrubusi untuk mengurangi disparitas regional serta memperkuat ekonomi kerakyatan di wilayah tertinggal.

Tabel 2.33
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali

Kabupaten /Kota	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota					
	2020	2021	2022	2023	2024	
					Maret	Sept
Jembrana	4,51	5,06	5,30	4,96	4,51	-
Tabanan	4,27	5,12	5,18	4,70	4,40	-
Badung	2,02	2,62	2,53	2,30	2,23	-
Gianyar	4,08	4,85	4,70	4,47	4,00	-
Klungkung	4,87	5,64	6,07	5,61	5,30	-
Bangli	4,19	5,09	5,28	5,28	5,06	-
Karangasem	5,91	6,78	6,98	6,56	6,52	-
Buleleng	5,32	6,12	6,21	5,85	5,39	-

Kabupaten /Kota	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota					
	2020	2021	2022	2023	2024	
					Maret	Sept
Denpasar	2,14	2,96	2,97	2,68	2,59	-
Bali	**3,78**	**4,53**	**4,57**	**4,25**	**4,00**	**3,80**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/indicator/23/125/1/persentase-penduduk-miskin-provinsi-Bali-menurut-kabupaten-kota.html

Dinamika kemiskinan di Provinsi Bali mencerminkan resiliensi ekonomi daerah yang diuji oleh guncangan eksternal namun menunjukkan kapasitas pemulihan yang kuat. Eskalasi kemiskinan pada periode awal dekade ini mengindikasikan kerentanan struktur ekonomi yang bergantung pada sektor pariwisata, di mana gangguan mobilitas global berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat. Namun, tren penurunan yang konsisten sejak puncak krisis menandakan efektivitas strategi pemulihan ekonomi dan adaptasi masyarakat terhadap realitas ekonomi baru.

Polarisasi tingkat kemiskinan antar-wilayah mengungkapkan dualisme ekonomi yang persisten di Bali. Wilayah dengan basis ekonomi pariwisata yang kuat dan diversifikasi sektor ekonomi menunjukkan ketahanan lebih baik, sementara daerah dengan karakteristik agraris dan keterbatasan akses pasar menghadapi tantangan struktural yang lebih kompleks.

Pencapaian Bali dalam mempertahankan tingkat kemiskinan di bawah lima persen secara agregat merupakan prestasi signifikan dalam konteks nasional. Hal ini menunjukkan bahwa model pembangunan berbasis pariwisata-budaya, ketika dikelola dengan baik, mampu menciptakan kesejahteraan yang relatif merata. Ke depan, tantangannya adalah bagaimana memperkuat fondasi ekonomi lokal di wilayah-wilayah dengan kemiskinan persisten melalui pengembangan ekonomi kreatif, pertanian modern, dan industri pengolahan yang dapat menyerap tenaga kerja lokal secara berkelanjutan.

Tabel 2.34
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	12,60	14,24	15,00	14,12	12,90
Tabanan	19,11	23,11	23,46	21,42	20,16
Badung	13,75	18,52	18,28	17,01	16,87
Gianyar	21,01	25,36	24,74	23,76	21,45
Klungkung	8,76	10,19	10,89	10,22	9,68
Bangli	9,56	11,68	12,17	12,24	11,79
Karangasem	24,69	28,52	29,45	27,83	27,76
Buleleng	35,25	40,92	41,68	39,52	36,55

Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Denpasar	20,48	29,41	30,02	27,69	27,27
Bali	**165,19**	**201,97**	**205,68**	**193,78**	**184,43**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/indicator/23/261/1/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-Bali-menurut-kabupaten-kota.html

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB perkapita menggambarkan seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB perkapita maka dapat dikatakan semakin sejahtera atau makmur. Kendati demikian, PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata-rata) sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk mempunyai akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Adapun PDRB perkapita atas dasar harga berlaku kabupaten/kota di Provinsi Bali (ribu rupiah), seperti pada Tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah)

Kabupaten /Kota	PDRB Perkapita Atas Dasar harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	42.516,29	41.967,00	45.249,00	48.269,00	51.730,04
Tabanan	48.248,65	47.324,00	50.978,00	54.772,00	59.122,83
Badung	89.312,31	81.715,00	99.076,00	121.416,00	132.087,94
Gianyar	50.179,76	49.642,00	53.645,00	58.259,00	62.692,86
Klungkung	40.970,58	40.617,00	44.269,00	48.298,00	52.627,86
Bangli	26.035,78	25.999,00	28.182,00	30.256,00	32.274,88
Karangasem	33.432,29	32.957,00	35.519,00	37.953,00	40.232,93
Buleleng	42.241,48	41.361,00	44.603,00	47.413,00	50.795,67
Denpasar	68.298,89	68.383,00	73.732,00	80.305,00	86.425,33
Bali	**52.015,45**	**50.758,32**	**56.091,82**	**62.293,23**	**67.318,72**

Sumber: SIPD dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/indicator/52/172/1/pdrb-perkapita-kabupaten-kota-di-provinsi-Bali.html

Data PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama 2020-2024 menunjukkan disparitas ekonomi yang signifikan dan pola pertumbuhan yang bervariasi. Kabupaten Badung konsisten memimpin dengan PDRB per kapita tertinggi, mencapai Rp132.087,94

ribu pada 2024, yang berarti 96,2% di atas rata-rata provinsi dan hampir empat kali lipat nilai terendah di Kabupaten Bangli (Rp32.274,88 ribu). Fenomena ini mencerminkan konsentrasi aktivitas pariwisata dan ekonomi di kawasan Badung yang mencakup destinasi utama seperti Kuta dan Seminyak. Tren temporal menunjukkan perlambatan pertumbuhan pada 2021 di sebagian besar kabupaten/kota, mengindikasikan dampak pandemi *COVID*-19 terhadap ekonomi Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Periode pascapandemi (2022-2024) ditandai dengan akselerasi pertumbuhan yang signifikan, dengan rata-rata provinsi meningkat 22,9% dari Rp56.091,82 ribu (2022) menjadi Rp67.318,72 ribu (2024). Kabupaten Denpasar dan Gianyar juga menunjukkan pertumbuhan substansial, sementara daerah dengan karakteristik rural seperti Bangli, Karangasem, dan Jembrana memiliki PDRB per kapita yang relatif rendah. Pola ini menggaris bawahi urgensi diversifikasi ekonomi dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Bali.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Dinamika ketenagakerjaan Provinsi Bali periode 2020-2024 merepresentasikan trajektori pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang mengesankan, dengan penurunan tingkat pengangguran provinsi sebesar 68% dari 5,63% menjadi 1,79%. Fenomena disparitas *spasial* teridentifikasi melalui konsentrasi pengangguran pada wilayah berbasis pariwisata dan perkotaan (Denpasar, Badung, Gianyar) selama fase awal observasi, mengindikasikan kerentanan sektor jasa terhadap disrupsi pandemi. Transformasi struktural pasar kerja tercermin dari akselerasi penurunan pengangguran pada 2022-2024, dengan magnitude penurunan terbesar pada wilayah dengan basis ekonomi pariwisata (Badung: 73,6%; Gianyar: 73,7%). Kontras dengan wilayah tersebut, Bangli menunjukkan resiliensi superior dengan stabilitas tingkat pengangguran pada level rendah (0,74-1,86%), mengonfirmasi hipotesis ketahanan sektor agrikultur terhadap guncangan eksternal. Konvergensi tingkat pengangguran antar wilayah semakin intens pada 2024, dengan range yang menyempit menjadi 1,37 poin persentase (dibandingkan 5,76 poin pada 2020), merefleksikan keberhasilan strategi pemulihan ekonomi inklusif. Penurunan dramatis tingkat pengangguran menjadi di bawah 2% pada 2024 mengindikasikan pencapaian kondisi *full employment*, meskipun perlu dievaluasi kualitas pekerjaan yang tercipta dan kesesuaiannya dengan keterampilan angkatan kerja.

Tabel 2.36
Persentase Pengangguran di Provinsi Bali

Kabupaten /Kota	Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	4,52	4,11	3,94	2,52	1,53
Tabanan	4,21	3,94	3,83	2,64	1,85
Badung	6,92	6,93	6,87	2,72	1,83
Gianyar	7,53	6,90	6,78	2,96	1,98
Klungkung	5,42	5,35	1,96	1,29	1,23
Bangli	1,86	1,80	0,76	0,75	0,74
Karangasem	2,42	2,32	3,09	2,61	1,63
Buleleng	5,19	5,38	5,20	3,60	2,06
Denpasar	7,62	7,02	5,08	2,85	2,11
Bali	**5,63**	**5,37**	**4,80**	**2,69**	**1,79**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg4IzI=/persentase-pengangguran-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html

Ketenagakerjaan Bali periode 2020-2024 menunjukkan transformasi signifikan dengan penurunan jumlah pengangguran sebesar 66,3% dari 144.500 menjadi 48.676 jiwa. Pola penurunan tersebut berkorelasi dengan pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi, yang tercermin dari kontraksi pengangguran paling dramatis pada kabupaten dengan konsentrasi aktivitas pariwisata, yakni Kabupaten Badung (76,8%) dan Gianyar (70,6%). Fenomena divergensi teridentifikasi pada periode 2020-2022 dengan Karangasem mengalami anomali peningkatan pengangguran sebesar 37,3%, kontras dengan tren provinsi yang menunjukkan penurunan 9%. Transmisi pemulihan ekonomi terjadi secara *spasial* asimetris, dimulai dari wilayah perkotaan pada 2021-2022, diikuti wilayah periferal pada 2023-2024, tercermin dari akselerasi penurunan pengangguran di Buleleng dan Tabanan pada periode tersebut. Distribusi *spasial* pengangguran tetap terkonsentrasi pada tiga wilayah utama (Buleleng, Denpasar, Badung) yang secara kolektif menyumbang 52,8% dari total pengangguran provinsi pada 2024, menunjukkan persistensi disekuilibrium pasar tenaga kerja regional. Transformasi struktural mendasar terlihat pada kabupaten berbasis pariwisata (Badung, Gianyar) yang mampu mereduksi pengangguran hingga di bawah level pra-pandemi, mengindikasikan peningkatan kapasitas absorbsi tenaga kerja dalam ekonomi pasca-pandemi.

Tabel 2.37
Banyaknya Pengangguran di Provinsi Bali

Kabupaten /Kota	Banyaknya Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	7.485	7.354	7.074	5.106	3.133
Tabanan	11.663	10.939	11.000	7.520	5.357
Badung	27.324	28.027	28.650	9.080	6.340
Gianyar	22.028	20.064	22.921	9.687	6.466
Klungkung	5.794	5.577	2.262	1.698	1.574
Bangli	2.727	2.659	1.146	1.298	1.261
Karangasem	6.284	6.099	8.629	8.602	5.285
Buleleng	19.861	20.234	20.358	17.051	10.408
Denpasar	41.334	37.716	29.429	12.379	8.852
Bali	**144.500**	**138.669**	**131.469**	**72.421**	**48.676**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

URL: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg1IzI=/banyaknya-pengangguran-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html

Tabel 2.38
Kondisi Umum Ketenagakerjaan Provinsi Bali Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2019-2024

Uraian/*Item*	2019			2020			2021			2022		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Male	*Female*	*Total*	*Male*	*Female*	*Total*	*Male*	*Female*	*Total*	*Male*	*Female*	*Total*
Penduduk Usia Kerja	1.704.962	1.695.246	3.400.208	1.732.365	1.722.762	3.455.127	1.759.253	1.749.837	3.509.090	1.786.173	1.776.969	3.563.142
- Angkatan Kerja:	1.395.043	1.113.251	2.508.294	1.398.823	1.169.096	2.567.919	1.397.487	1.183.036	2.580.523	1.501.373	1.237.166	2.738.539
# Bekerja	1.368.520	1.100.486	2.469.006	1.304.692	1.118.727	2.423.419	1.309.572	1.132.282	2.441.854	1.423.780	1.183.290	2.607.070
#Pengangguran	26.523	12.765	39.288	94.131	50.369	144.500	87.915	50.754	138.669	77.593	53.876	131.469
- Bukan Angkatan Kerja	309.919	581.995	891.914	333.542	553.666	887.208	361.766	566.801	928.567	284.800	539.803	824.603
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	81,82	65,67	73,77	81	68	74,32	79,44	67,61	73,54	84,06	69,62	76,86
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,90	1,15	1,57	7	4	5,63	6,29	4,29	5,37	5,17	4,35	4,80

Lanjutan Tabel 2.38

Uraian/*Item*	2023			2024		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Male	*Female*	*Total*	*Male*	*Female*	*Total*
Penduduk Usia Kerja	1.741.319	1.748.886	3.490.205	1.754.759	1.765.127	3.519.886
- Angkatan Kerja :	1.454.923	1.235.314	2.690.237	1.469.916	1.244.181	2.714.097
# Bekerja	1.409.049	1.208.767	2.617.816	1.441.337	1.224.084	2.665.421
# Pengangguran	45.874	26.547	72.421	28.579	20.097	48.676
- Bukan Angkatan Kerja	286.396	513.572	799.968	284.843	520.946	805.789

Uraian/*Item*	2023			2024		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Male	*Female*	*Total*	*Male*	*Female*	*Total*
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	83,55	70,63	77,08	83,77	70,49	77,11
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,15	2,15	2,69	1,94	1,62	1,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDQjMQ==/kondisi-umum-ketenagakerjaan-provinsi-bali-menurut-jenis-kelamin--1995-2024.html

Berdasarkan data ketenagakerjaan Provinsi Bali periode 2019-2024, terdapat beberapa pola signifikan yang mencerminkan dinamika pasar kerja di daerah tersebut. Populasi usia kerja mengalami pertumbuhan konsisten dari 3,4 juta jiwa pada 2019 menjadi 3,5 juta jiwa pada 2024, dengan komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan di setiap tahunnya.

Angkatan kerja menunjukkan tren peningkatan bertahap, kecuali pada tahun 2020 ketika terjadi penurunan dari 2,5 juta menjadi 2,5 juta jiwa, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi *COVID-19*. Sektor ketenagakerjaan mulai pulih pada 2021 dan terus tumbuh hingga mencapai 2,7 juta jiwa pada 2024. Menariknya, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun menunjukkan peningkatan konsisten sepanjang periode observasi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memperlihatkan pola yang stabil di kisaran 77-83 persen untuk laki-laki dan 67-70 persen untuk perempuan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi dengan puncak tertinggi pada 2020 sebesar 5,63 persen akibat pandemi, kemudian berangsur membaik dan mencapai titik terendah 1,79 persen pada 2024. Data ini mengindikasikan pemulihan ekonomi Bali yang cukup signifikan, terutama sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian daerah, serta efektivitas kebijakan ketenagakerjaan yang diimplementasikan pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan pengangguran pasca-pandemi.

2.2.1.5 Indeks Gini

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan indikator yang umum digunakan sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Adapun *Gini Ratio* Provinsi Bali menurut kabupaten/kota tahun 2020–2024, seperti terperinci pada Tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.39
***Gini Ratio* Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020–2024**

Kabupaten /Kota	*Gini Ratio* Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota					
	2020	2021	2022	2023	2024	
					Maret	Sept
Jembrana	0,3531	0,3170	0,3260	0,3260	0,2884	-
Tabanan	0,3239	0,3110	0,2990	0,3470	0,3007	-
Badung	0,3167	0,3320	0,3160	0,2800	0,2808	-
Gianyar	0,3171	0,3330	0,3070	0,3170	0,2860	-
Klungkung	0,3575	0,3460	0,3510	0,3380	0,3071	-
Bangli	0,2829	0,2850	0,2880	0,2820	0,3021	-
Karangasem	0,3268	0,3180	0,2970	0,3370	0,2833	-
Buleleng	0,2851	0,2820	0,2810	0,3140	0,2785	-
Denpasar	0,3301	0,3750	0,3680	0,3420	0,3413	-
Bali	**0,3690**	**0,3780**	**0,3630**	**0,3620**	**0,3611**	**0,348**

Sumber: SIPD dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/indicator/23/41/1/gini-rasio-provinsi-Bali-menurut-kabupaten-kota.html

Fluktuasi *Gini Ratio* di Provinsi Bali mencerminkan dinamika distribusi pendapatan yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi regional dan guncangan eksternal. Periode awal dekade menunjukkan tendensi peningkatan ketimpangan yang kemungkinan dipicu oleh dampak asimetris krisis terhadap berbagai kelompok masyarakat, di mana kelompok yang bergantung pada sektor informal dan pariwisata mengalami kontraksi pendapatan lebih dalam. Perbaikan signifikan pada periode terakhir mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi mulai dirasakan secara lebih merata, didukung oleh program-program perlindungan sosial dan revitalisasi ekonomi kerakyatan.

Heterogenitas tingkat ketimpangan antar-wilayah mengungkapkan perbedaan struktur ekonomi dan karakteristik sosial yang mendasar. Wilayah dengan ekonomi yang lebih terdiversifikasi cenderung memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata, sementara daerah dengan konsentrasi aktivitas ekonomi pada sektor tertentu atau dominasi kelompok ekonomi tertentu menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi. Fenomena ini menegaskan bahwa ketimpangan bukan semata-mata isu agregat, melainkan memiliki

dimensi *spasial* yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan.

Pencapaian Bali dalam mempertahankan *Gini Ratio* pada level moderat menunjukkan relatif baiknya mekanisme distribusi ekonomi dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. Namun, persistensi ketimpangan pada level tertentu mengisyaratkan adanya hambatan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan lebih mendalam. Strategi ke depan perlu difokuskan pada peningkatan akses terhadap aset produktif, pengembangan keterampilan yang relevan dengan transformasi ekonomi, dan penguatan ekonomi inklusif yang memberikan kesempatan partisipasi lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan kualitas hidup yang konsisten dan merata di seluruh kabupaten/kota. Secara keseluruhan, IPM Bali meningkat dari 76,52 pada tahun 2020 menjadi 78,63 pada tahun 2024, mencerminkan kemajuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Kota Denpasar dan Kabupaten Badung memimpin dengan nilai IPM tertinggi (85,11 dan 83,73 pada tahun 2024), yang menggambarkan keberhasilan pembangunan di pusat perkotaan dan destinasi wisata utama.

Tabel 2.40
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali

Kabupaten /Kota	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	73,18	73,57	74,38	74,80	75,32
Tabanan	76,67	76,95	77,22	77,87	78,83
Badung	81,60	81,84	82,13	83,00	83,73
Gianyar	77,88	78,21	78,87	79,69	80,23
Klungkung	72,97	72,98	73,77	74,18	75,15
Bangli	70,60	70,60	71,47	71,99	72,51
Karangasem	68,50	68,58	69,48	70,09	70,91
Buleleng	73,60	73,60	74,48	74,87	75,35
Denpasar	83,95	84,04	84,39	84,68	85,11
Bali	**76,52**	**76,69**	**77,40**	**78,01**	**78,63**

Sumber: SIPD dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/02/717917/indeks-pembangunan-manusia--ipm--provinsi-bali-2024.html

Meskipun semua wilayah menunjukkan peningkatan, masih terdapat kesenjangan pembangunan yang perlu diperhatikan. Kabupaten Karangasem, meski mengalami kemajuan dari 68,50 menjadi 70,91, tetap memiliki IPM terendah di provinsi. Perbedaan sebesar 14,20 poin antara wilayah tertinggi dan terendah mengindikasikan perlunya pemerataan pembangunan yang lebih

intensif di daerah pedesaan dan wilayah timur Bali. Namun, tren positif di semua kabupaten/kota menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali berjalan pada jalur yang tepat, dengan perbaikan pelayanan publik, akses pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang.

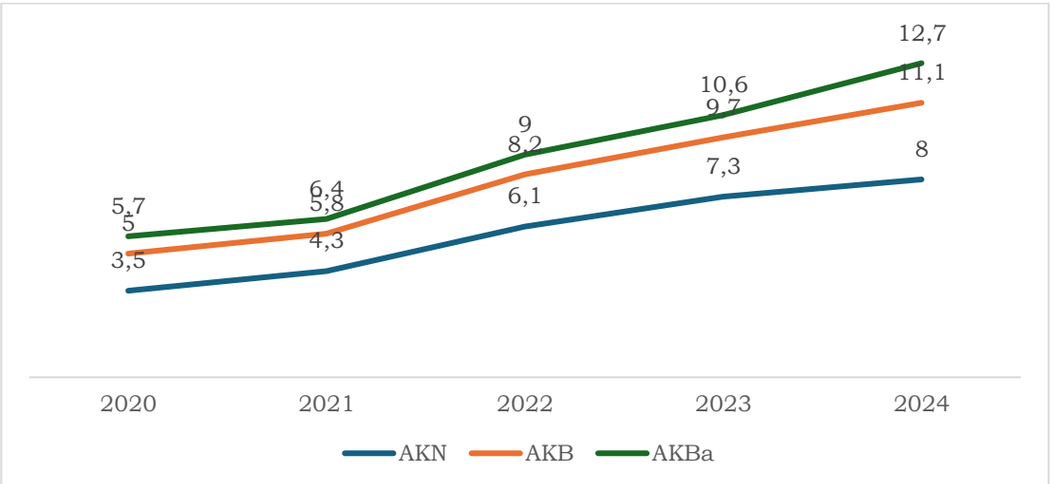
Pada tahun 2025-2030 indeks pembangunan manusia akan dilengkapi dengan penilaian indeks baru yang disebut Indeks Modal Manusia (IMM).

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun alokasi anggaran kesehatan sesuai program kesehatan nasional yang tercantum dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). Sehingga terdapat indikator yang baru dimulai perhitungannya pada Tahun 2025. Saat ini, RIBK 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, yang akan ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

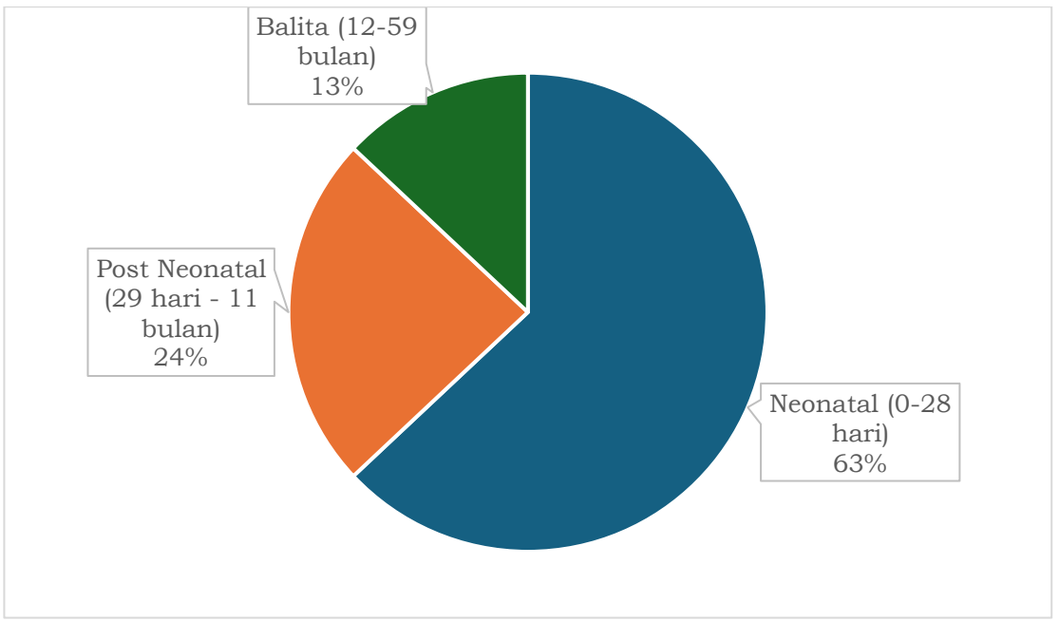
2.2.2.1 Angka Kematian Balita

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita. Secara umum tren AKB dan AKBa mengalami peningkatan, lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.18
Tren AKN, AKB dan Akaba Provinsi Bali Tahun 2020 – 2024
Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa Tahun 2024 terjadi peningkatan Angka kematian neonatus, Bayi dan Balita di Provinsi Bali. Pada AKB terjadi peningkatan dari 9,7 /1000 KH menjadi 11,1 per 1000 KH artinya di antara 1000 kelahiran di Provinsi Bali terdapat 11 bayi yang meninggal sebelum berusia 1 tahun. Sedangkan untuk AKBa meningkat dari 10,6 per 1000 KH menjadi 12,7 per 1000 KH artinya di antara 1000 kelahiran terdapat 12-13 balita yang meninggal sebelum berusia 5 tahun. Angka tersebut mendekati hasil (LF-SP) *Long Form* Sensus Penduduk tahun 2020 dimana AKB Provinsi Bali tercatat sebesar 13,26 per 1000 KH dan AKBa 15,37 per 1000 KH. Gambar berikut menunjukan Distribusi kematian balita sesuai kelompok umur di Provinsi Bali Tahun 2024.



Gambar 2.19
Persentase jumlah kematian Neonatus, Bayi dan Balita Provinsi Bali Tahun 2024
Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024

Dari keseluruhan kematian balita, 62,99% merupakan kematian yang terjadi pada usia neonatus (0-28 hari), 23,95% pada masa post neonatal (29 hari-12 bulan), dan 13,06% pada masa balita (12 bulan-59 bulan). Kematian periode pertama kehidupan 0-7 hari (neonatal dini) mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan. Karena persalinan di Provinsi Bali saat ini mencapai 90,6% di fasilitas kesehatan. Kesiapan dalam tatalaksana awal dan stabilisasi rujukan sangatlah penting, dan dipersiapkan saat ibu merencanakan persalinan di fasilitas kesehatan tersebut, tidak hanya siap menolong ibu tetapi juga harus siap memberikan pelayanan terhadap bayinya termasuk jika terjadi masalah pada bayinya.

Sebab kematian post neonatal (29 hari-11 bulan) tahun 2024 yaitu sebab lainnya sebanyak 44%, Pneumonia 24,1%, Kondisi perinatal 10,8%, Kelainan kongenital 9%, penyakit saraf dan meningitis 1,8%, Diare 1,2%, serta demam berdarah 0,6%. Pneumonia menjadi sebab kematian tertinggi kedua setelah sebab lainnya dan masih ada sebab kematian karena diare walaupun jumlahnya sangat sedikit.

Memasuki usia 12-59 bulan seorang anak masih akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental yang cepat. Adapun upaya Kesehatan bayi dan balita meliputi tata laksana dan rujukan, gizi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, imunisasi, rehabilitasi dan perawatan jangka panjang pada penyakit kronis/langka, pola asuh dan stimulasi perkembangan, serta penyediaan lingkungan yang sehat dan aman. Upaya tersebut harus dilakukan dengan optimal untuk menurunkan angka kematian pada usia tersebut, walaupun di Provinsi Bali kelompok ini hanya menyumbang 13% dari kematian Balita.

Sebab kematian anak balita (12 – 59 balita) yaitu sebab lainnya 60%, pneumonia 17,8%, Kelainan Kongenital Jantung 4,4%, Kelainan Kongenital lainnya 7,8%, Demam Berdarah 5,6%, Penyakit Saraf 2,2%, Tenggelam, Cedera, Kecelakaan dan PD3I 1,1%.

2.2.2.2 Angka Kematian Ibu

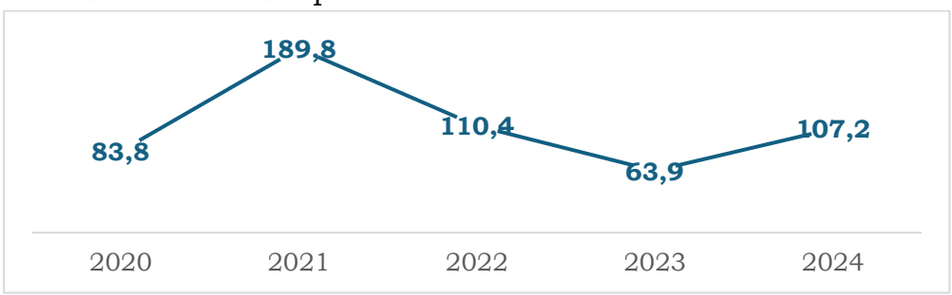
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI diukur dengan membagi jumlah kematian ibu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup kemudian hasilnya dikali dengan 100.000 Kelahiran Hidup. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian perempuan dalam periode kehamilan sampai 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, namun bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Angka Kematian Ibu mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan suatu negara, merefleksikan status kesehatan ibu selama hamil, bersalin dan masa nifas, kualitas pelayanan kesehatan serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi.

Kategori sebab kematian ibu, antara lain; Pertama adalah kematian yang disebabkan oleh penyebab langsung obstetri (*direct*) yaitu kematian yang diakibatkan langsung oleh kehamilan dan persalinannya. Kedua adalah kematian yang disebabkan oleh penyebab tidak langsung (*indirect*) yaitu kematian yang terjadi pada ibu hamil yang disebabkan oleh penyakit dan bukan oleh kehamilan atau persalinan. Penyebab langsung antara lain perdarahan eklampsia dan infeksi, sementara penyebab tidak langsung adalah faktor-faktor yang memperberat kondisi kehamilan seperti penyakit penyerta yang

dialami oleh ibu hamil tersebut. Di sisi lain kehamilan juga akan memperberat penyakit yang diderita.

Kematian ibu merupakan hasil dari interaksi berbagai aspek, baik aspek klinis, aspek sistem pelayanan kesehatan, maupun faktor-faktor non kesehatan yang mempengaruhi pemberian pelayanan kesehatan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi dan pengertian dari semua pihak mengenai pentingnya dan peran berbagai aspek dalam penanganan masalah kematian ibu sehingga strategi untuk mengatasinya harus merupakan integrasi menyeluruh bagi semua pihak.

Secara umum Angka Kematian Ibu di Provinsi Bali dalam 5 tahun terakhir berada di bawah angka Nasional. Berdasarkan *Long Form* Sensus Penduduk (LF-SP) Tahun 2020 yaitu 189 per 100.000 Kelahiran Hidup, sementara target RPJMN Tahun 2024 yaitu 183 per 100.000 Kelahiran Hidup dan target SDGs tahun 2030 yaitu 70 per 100.000 Kelahiran Hidup.



Gambar 2.20
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bali Tahun 2020-2024
Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa angka kematian ibu mulai tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 189,7 per 100.000 KH (Kelahiran Hidup) dari target RPJMD yang ditetapkan 67 per 100.000 KH yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tahun 2022 AKI berhasil diturunkan menjadi 110,4 per 100.000 KH dan tahun 2023 kembali turun menjadi 63,9 per 100.000 KH. Namun Angka Kematian Ibu di tahun 2024 kembali meningkat menjadi 107,2 per 100.000 KH, sementara target RPJMD adalah 64,5 per 100.000 KH.

Adapun jumlah kematian ibu di kabupaten/kota Provinsi Bali Tahun 2020 hingga Tahun 2024, seperti pada Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020–2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jembrana	5	8	7	0	3
2	Tabanan	4	18	6	6	4

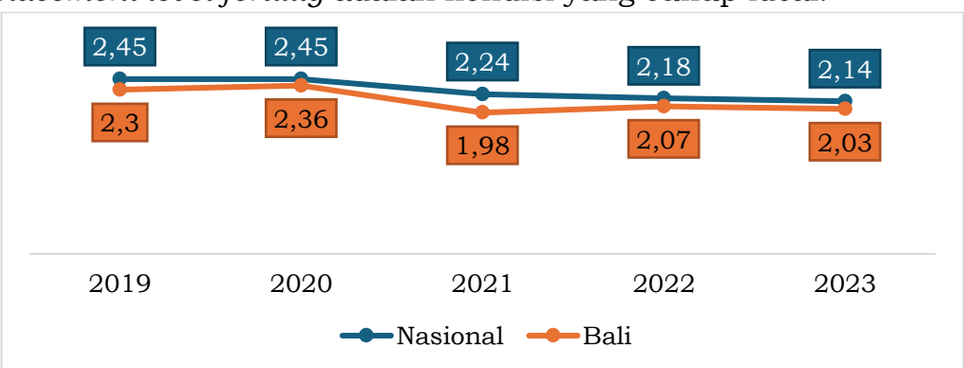
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Badung	12	19	8	8	8
4	Gianyar	4	13	6	5	9
5	Klungkung	2	5	1	1	3
6	Bangli	6	5	2	2	4
7	Karangasem	8	10	10	2	4
8	Buleleng	7	27	10	7	9
9	Denpasar	8	20	18	9	14
Provinsi Bali		**56**	**125**	**68**	**40**	**58**

Sumber: SIPD dan Profil Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024

Kematian ibu di Provinsi Bali pada tahun 2024 secara absolut sebanyak 58 kasus. Kasus tertinggi terdapat di Kota Denpasar yaitu 14 kasus, kabupaten Buleleng dan Gianyar 9 kasus, kemudian Badung 8 kasus. Sementara kabupaten dengan jumlah kematian ibu terendah adalah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Klungkung sebanyak 3 kasus.

2.2.2.3 Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*)

Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu). Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan angka fertilitas menurut kelompok umur 15–19 tahun, 20–24 tahun, 25–29 tahun, 30–34 tahun, 35–39 tahun, 40–44 tahun, dan 45–49 tahun, dikali 5, kemudian dibagi 1000. Penggantian kelahiran atau *Replacement Level Fertility* adalah tingkat kelahiran total seorang wanita melahirkan bayi yang cukup untuk mempertahankan tingkat populasi. Angka TFR kurang atau bahkan melebihi *replacement level fertility* ini akan berdampak pada struktur populasi. Angka TFR yang mendekati *replacement level fertility* adalah kondisi yang cukup ideal.



Gambar 2.21
Capaian Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) Usia 15–49 Tahun
Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
URL: https://keluargaberisikostunting-dashboard.bkkbn.go.id/indikator-program

2.2.2.4 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah usia harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Pada umumnya ketika membicarakan UHH yang dimaksudkan adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Usia harapan hidup di Provinsi Bali, seperti tampak pada Tabel 2.42 berikut.

Tabel 2.42
Usia Harapan Hidup di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Tahun)

Kabupaten /Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Jembrana	71,76	76,68	71,82	76,80	72,02	77,22	72,22	77,60	72,40	77,87
Tabanan	72,13	76,67	72,19	76,80	72,43	76,96	73,17	77,05	73,43	77,63
Badung	73,28	77,02	73,37	77,09	73,64	77,15	73,88	77,24	74,11	78,01
Gianyar	72,16	76,69	72,22	76,81	72,45	76,90	73,23	77,00	73,49	77,65
Klungkung	71,64	76,43	71,73	76,62	71,97	77,12	72,05	77,30	72,26	77,66
Bangli	71,19	75,48	71,24	75,59	71,44	76,01	71,64	76,44	71,81	76,78
Karangasem	71,07	75,23	71,24	75,58	71,42	75,96	71,61	76,37	71,77	76,70
Buleleng	71,73	76,63	71,80	76,77	72,01	77,21	72,08	77,35	72,12	77,43
Denpasar	73,01	76,63	73,10	77,73	73,42	78,18	73,81	75,59	74,08	78,74
Bali	**71,82**	**76,83**	**71,88**	**76,93**	**72,05**	**77,28**	**72,25**	**77,64**	**72,43**	**77,91**

Sumber: SIPD dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDA4IzI=/-metode-baru--umur-harapan-hidup-saat-lahir--uhh--menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-bali-hasil-long-form-sp2020--tahun-.html

Data usia harapan hidup di Provinsi Bali periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten di seluruh kabupaten/kota, mencerminkan perbaikan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, usia harapan hidup provinsi meningkat dari 71,82 tahun pada 2020 menjadi 72,43 tahun pada 2024, dengan pola yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki usia harapan hidup lebih tinggi dibandingkan laki-laki di semua wilayah.

Disparitas gender dalam usia harapan hidup terlihat jelas, di mana perempuan konsisten memiliki angka 4-6 tahun lebih tinggi daripada laki-laki. Pada 2024, perempuan mencapai 77,91 tahun sementara laki-laki 72,43 tahun. Fenomena ini sejalan dengan pola global yang menunjukkan perempuan cenderung memiliki longevitas

lebih baik akibat faktor biologis, gaya hidup, dan perilaku kesehatan yang berbeda.

Dari perspektif regional, Denpasar sebagai ibu kota provinsi mencatat usia harapan hidup tertinggi (78,74 tahun pada 2024), diikuti Badung dan Gianyar yang merupakan daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi relatif maju. Sebaliknya, daerah seperti Bangli, Karangasem, dan Klungkung menunjukkan angka yang lebih rendah, mengindikasikan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah. Meskipun demikian, seluruh kabupaten/kota menunjukkan progres positif, menandakan keberhasilan program kesehatan masyarakat dan peningkatan akses layanan kesehatan di seluruh Provinsi Bali dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

2.2.2.5 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Suatu daerah dikatakan sehat apabila Indeks Keluarga Sehat (IKS) memiliki nilai >0,80, IKS prasehat bernilai 0,5–0,8, sedangkan IKS tidak sehat bernilai <0,5.

Tabel 2.43
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Indeks Keluarga Sehat Inti	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
Badung	0,61	70,27	99,83	99,73
Bangli	0,34	61,99	95,09	97,54
Buleleng	0,3	50,52	97,09	98,32
Gianyar	0,31	66,44	97,96	99,46
Jembrana	0,43	60,95	97,21	99,48
Karangasem	0,33	44,4	97,12	97,91
Klungkung	0,58	67,72	99,74	99,8
Kota Denpasar	0,36	35,21	94,86	98,34
Tabanan	0,47	78,49	99,93	99,77

Lanjutan Tabel 2.43

Kabupaten/Kota	Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
Badung	88,9	97,11	75,54	48,37
Bangli	89,14	95,56	17,3	22,44
Buleleng	87,73	91,58	32,46	35,18

Kabupaten/Kota	Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
Gianyar	86,54	96,61	23,29	34,82
Jembrana	93,49	97,68	29,66	40,91
Karangasem	90,36	94,94	41,43	22,12
Klungkung	89,42	98,71	65,08	53,58
Kota Denpasar	86,17	91,4	31,8	26,52
Tabanan	89,25	97,9	69,58	50,82

Sumber: Sistem Informasi Kesehatan – Krama Bali Sehat
URL: https://sik-kbs.baliprov.go.id/

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2024 menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam pencapaian kesehatan keluarga. Kabupaten Badung memimpin dengan Indeks Keluarga Sehat Inti tertinggi (0,61), sementara Gianyar mencatat nilai terendah (0,31). Data ini mencerminkan kesenjangan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan antar wilayah. Meskipun demikian, beberapa indikator menunjukkan keberhasilan program kesehatan dasar di seluruh Bali, terlihat dari tingginya persentase persalinan di fasilitas kesehatan (>94%) dan imunisasi dasar lengkap (>97%) di semua kabupaten/kota.

Perbedaan paling mencolok terlihat pada penanganan penyakit kronis dan partisipasi program keluarga berencana. Tingkat pengobatan tuberkulosis bervariasi drastis dari hanya 17,3% di Bangli hingga 75,54% di Badung, sementara pengobatan hipertensi berkisar antara 22,12% di Karangasem hingga 50,82% di Tabanan. Partisipasi program KB juga menunjukkan kesenjangan besar, dengan Denpasar terendah (35,21%) dan Tabanan tertinggi (78,49%). Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun program kesehatan dasar ibu dan anak telah berjalan baik, masih diperlukan peningkatan akses dan kesadaran terhadap penanganan penyakit kronis serta keluarga berencana. Upaya pemerataan pelayanan kesehatan perlu diprioritaskan, terutama di kabupaten dengan indeks terendah, untuk mencapai tingkat kesehatan keluarga yang lebih merata di seluruh Bali.

2.2.2.6 Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. TBC masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global dan nasional. TBC bisa menjadi ancaman serius di Indonesia karena penularannya yang mudah yaitu dapat menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi hasil TBC dan berpotensi

menyebar di lingkungan keluarga, tempat kerja, sekolah, dan tempat umum lainnya.

Kuman TBC ini umumnya menyerang organ paru bisa juga di luar paru. Terduga tuberkulosis adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk yang dapat disertai dengan gejala tambahan yaitu demam hilang timbul tanpa sebab yang jelas, berat badan turun/ berat badan tidak naik/nafsu makan turun, berkeringat di malam hari, serta dapat ditandai dengan pembesaran kelenjar getah bening. Khusus pada ODHIV, batuk sering kali bukan merupakan gejala TBC yang khas sehingga ODHIV dinyatakan sebagai terduga TBC jika memiliki salah satu gejala.

Indonesia masih merupakan salah satu dari negara dengan beban TBC tertinggi. Berdasarkan data WHO melalui *Global TB Report* (GTR) 2024, Indonesia merupakan negara peringkat ke-2 dengan kasus TBC terbanyak setelah India, dengan angka estimasi kasus TBC sebesar 1.090.000 kasus dengan angka kematian 125.000 kasus. Di tahun yang sama jumlah penemuan kasus TBC di Indonesia adalah 844.292 kasus atau 77 persen dari estimasi kasus TBC dengan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis 85 persen. Pengendalian TBC nasional terus melakukan intensifikasi, akselerasi, ekstenfikasi dan inovasi program melalui Strategi Nasional Pengendalian TBC.

Untuk dapat segera menangani permasalahan penanggulangan TBC seperti yang dijelaskan di atas, pada saat ini Indonesia telah memiliki strategi Nasional Program Penanggulangan TBC tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk memperkuat manajemen program penanggulangan TBC, meningkatkan kualitas pelayanan TBC, meningkatkan akses layanan TBC, meningkatkan kebutuhan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan TBC dalam upaya mencapai eliminasi pada tahun 2030.

1. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)

Cakupan penemuan kasus tuberculosis (*Treatment Coverage*) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan program dalam menemukan, dan melaporkan kasus Tuberkulosis (TBC) secara berjenjang mulai dari layanan di tingkat dasar sampai dengan pusat (Kementerian Kesehatan). *Treatment Coverage* diartikan sebagai jumlah kasus TBC yang ditemukan di antara perkiraan kasus TBC. Untuk tahun 2024 target yang dibebankan untuk dicapai untuk indikator *Treatment Coverage* kasus TBC ini baik yang dituangkan dalam indikator dan target program TBC 2024 adalah sebesar 90 persen. Pada tahun 2024 di Provinsi Bali sendiri ditemukan 5.435 kasus tuberkulosis, sehingga untuk indikator *Treatment Coverage* ini baru tercapai 83,65 persen namun sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 33,65 persen.

Penyebab belum tercapainya *Treatment Coverage* TBC di Tahun 2024 karena belum optimalnya penemuan kasus TBC secara aktif

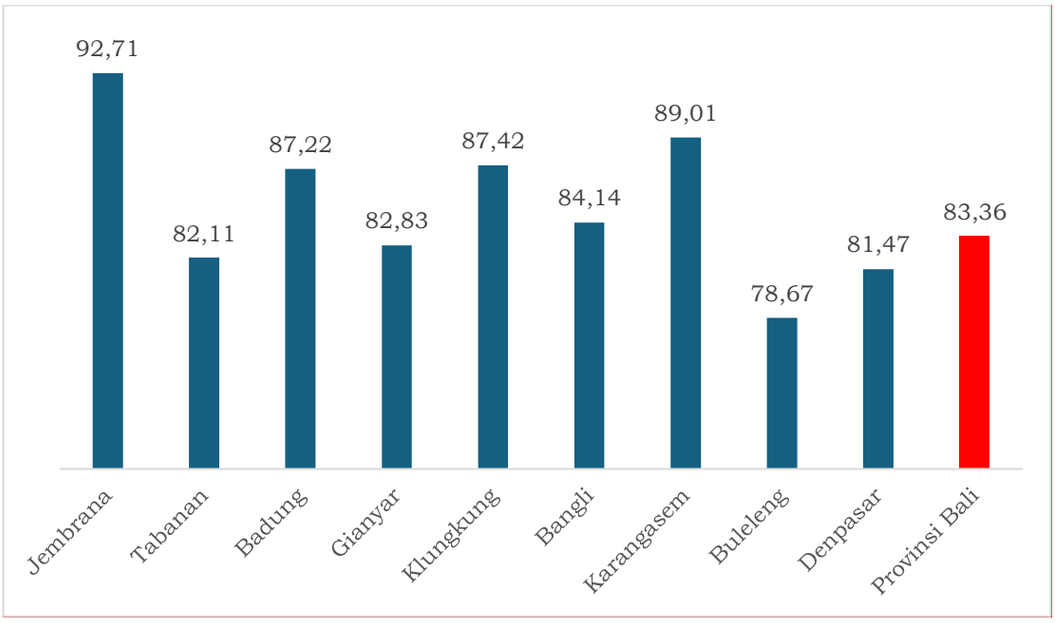
melalui kegiatan skrining pada populasi berisiko, belum optimalnya keterlibatan semua fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) khususnya fasyankes swasta (Rumah sakit, Klinik, dan Praktik Mandiri) dalam penanggulangan TBC. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan penemuan kasus TBC antara lain :

a. Memaksimalkan pelayanan skrining TBC pada ODHIV, DM, dan populasi beresiko lainnya
b. Memaksimalkan pelaksanaan investigasi pada kontak pasien TBC yang terintegrasi dengan pemberian terapi pencegahan TBC (TPT)
c. Peningkatan akses layanan diagnosis TBC
d. Penguatan pelibatan fasyankes swasta dalam wadah *District Public Private Mix* (DPPM)
e. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan TBC pada Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)
f. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam program penanggulangan TBC
g. Penguatan peran komunitas dalam mendukung upaya program penanggulangan TBC.

2. Angka Keberhasilan Pengobatan

Hasil pengobatan tuberkulosis dilaporkan secara pasien kohort berdasarkan penemuan kasus tuberkulosis yang telah dilaporkan satu tahun sebelumnya. Angka keberhasilan pengobatan pasien TBC (*Treatment Success Rate*/TSR) adalah jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan. Target dari Angka Keberhasilan pengobatan TBC adalah 90 persen. Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TBC di Provinsi Bali sebesar 83,36 persen dengan 2.267 kasus sudah mendapat pengobatan lengkap dari 4.939 kasus yang dilaporkan.

Pencapaian keberhasilan mencapai target program pengendalian TBC diperlukan penanganan yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan pada semua komponen mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring evaluasi, sehingga kegiatan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di tingkat pusat dan dilanjutkan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilakukan. Selain itu, hasil pengobatan lainnya tetap perlu diperhatikan, meninggal, gagal, putus berobat (*lost to follow up*), dan tidak dievaluasi.



Gambar 2.22
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*/TSR) menurut Kab/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024
Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024

2.2.2.7 Prevalensi *Stunting*

Pengukuran status gizi didasarkan atas Standar *World Health Organization* (WHO, 2005) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Menurut standar tersebut, status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

Gambaran prevalensi status gizi balita diperoleh dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang menjadi salah satu dasar untuk menetapkan kebijakan berbasis bukti hanya dilakukan 5 tahun sekali. Hasil yang berhasil dipotret adalah prevalensi gizi kurang/kekurangan gizi (*underweight*) pada anak usia di bawah lima tahun (balita) serta prevalensi pendek dan sangat pendek (*stunting*) pada anak usia di bawah dua tahun (baduta).

Untuk pengawalan upaya perbaikan gizi masyarakat sejak tahun 2014 telah dilaksanakan *surveilans* gizi berupa Pemantauan Status Gizi (PSG) di 34 provinsi, sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi kegiatan dan dasar penentuan kebijakan dan perencanaan kegiatan berbasis bukti yang spesifik wilayah. PSG sebagai upaya monitoring dan evaluasi keberhasilan progam perbaikan gizi guna memberikan petunjuk apakah program yang dijalankan sudah berdampak pada penurunan masalah gizi seperti yang diharapkan, yaitu menurunkan *prevalensi stunting, underweight,* dan *wasting*.

Kondisi Prevalensi *Stunting* Provinsi Bali cenderung mengalami penurunan, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi *stunting* Provinsi Bali sebesar 8,0 persen. Pada tahun 2023, berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI), capaian prevalensi *Stunting* Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi 7,2 persen (terendah se-Indonesia), berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi *stunting* Provinsi Bali sebesar 8,7 persen (terendah se-Indonesia). Adapun capaian penurunan *stunting* pada Kabupaten/Kota se-Bali sebagai berikut.

Tabel 2.44
Prevalensi *Stunting* Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2022-2024

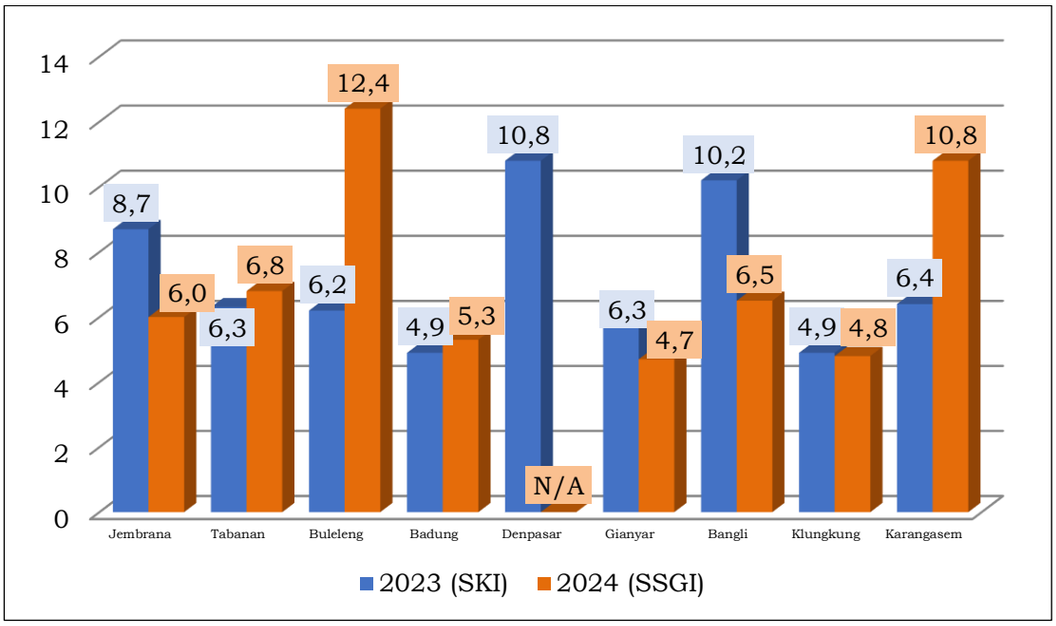
Kabupaten/Kota	Stunting 2022 (SSGI)	Stunting 2023 (SKI)	Stunting 2024 (SSGI)
Badung	6,6	4,9	5,3
Bangli	9,1	10,2	6,5
Buleleng	11,0	6,2	12,4
Denpasar	5,5	10,8	N/A
Gianyar	6,3	6,3	4,7
Jembrana	14,2	8,7	6,0
Karangasem	9,2	6,4	10,8
Klungkung	7,7	4,9	4,8
Tabanan	8,2	6,3	6,8
Bali	**8,0**	**7,2**	**8,7**
Nasional	**21,6**	**21,5**	**19,8**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali

Dinamika prevalensi *stunting* di Provinsi Bali menunjukkan pola yang mengkhawatirkan dengan terjadinya pembalikan tren setelah periode penurunan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan *stunting* menghadapi tantangan struktural yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pembalikan arah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat, perubahan pola konsumsi pangan, atau kendala dalam implementasi program intervensi gizi.

Disparitas antar-wilayah yang semakin melebar mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan, ketersediaan pangan bergizi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Daerah dengan karakteristik geografis yang menantang dan aksesibilitas terbatas cenderung mengalami peningkatan prevalensi yang lebih tajam, sementara wilayah perkotaan dengan infrastruktur kesehatan yang lebih baik mampu mempertahankan atau bahkan menurunkan angka *stunting*. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan spesifik lokasi dalam penanganan masalah gizi.

Posisi Bali yang konsisten di bawah rata-rata nasional memberikan sinyal positif tentang relatif baiknya kondisi gizi masyarakat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Namun, tren peningkatan yang terjadi menuntut kewaspadaan dan respons cepat dari pemangku kepentingan. Diperlukan revitalisasi strategi intervensi yang mencakup perbaikan sistem pangan lokal, penguatan edukasi gizi keluarga, dan optimalisasi program pemberian makanan tambahan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mencapai target penurunan *stunting* yang telah ditetapkan.



Gambar 2.23
Grafik Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2023-2024
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali

Perbedaan metodologi pengukuran antara Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menghasilkan variasi angka prevalensi *stunting* yang cukup signifikan di Provinsi Bali. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas dalam pengukuran status gizi balita, di mana perbedaan teknik *sampling*, waktu pengambilan data, dan kriteria pengukuran dapat menghasilkan gambaran yang berbeda tentang kondisi yang sama. Konsistensi SSGI yang menunjukkan angka lebih rendah dibandingkan SKI mengindikasikan adanya perbedaan sistematis dalam pendekatan kedua survei tersebut.

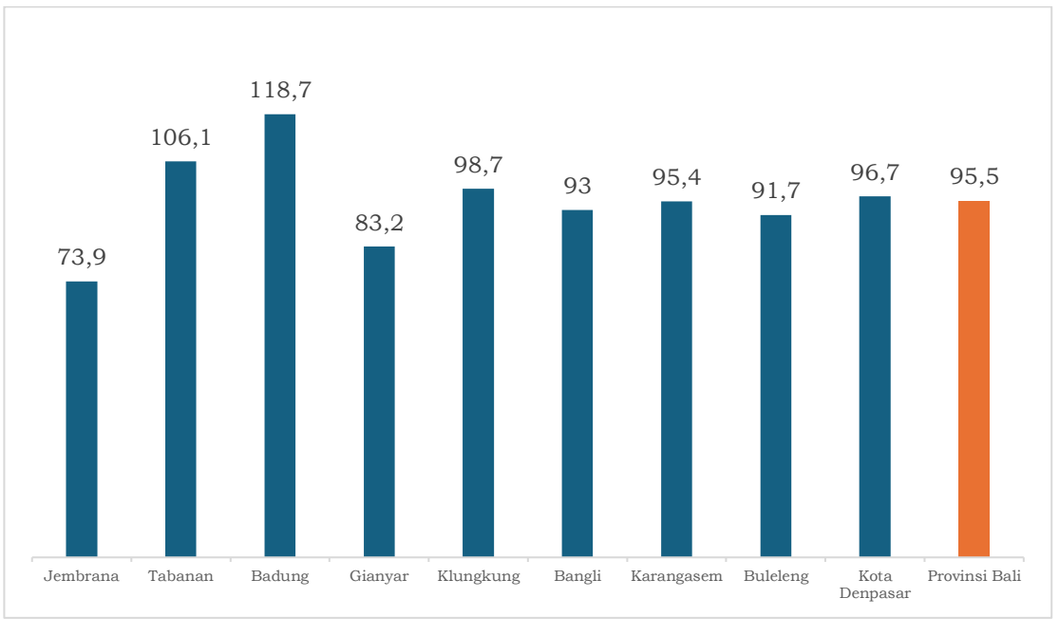
Polarisasi perkembangan *stunting* antar-wilayah menunjukkan bahwa faktor determinan *stunting* bekerja secara berbeda di setiap daerah. Keberhasilan beberapa kabupaten dalam menurunkan prevalensi stunting menandakan efektivitas intervensi lokal yang telah dilakukan, sementara peningkatan di wilayah lain mengisyaratkan adanya hambatan struktural yang belum teratasi. Ketiadaan data

baseline untuk Denpasar pada periode sebelumnya menyulitkan analisis komprehensif untuk ibu kota provinsi, padahal informasi dari wilayah urban ini penting sebagai pembanding dengan daerah rural.

Fluktuasi angka *stunting* yang terjadi menegaskan bahwa penanganan masalah gizi kronis memerlukan pendekatan jangka panjang yang konsisten dan adaptif. Variabilitas hasil pengukuran juga mengingatkan pentingnya harmonisasi metodologi survei gizi untuk menghasilkan data yang dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah. Ke depan, diperlukan sistem monitoring yang terintegrasi dan standar pengukuran yang seragam untuk memastikan akurasi pemantauan progress penurunan *stunting* di tingkat daerah.

2.2.2.8 Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap

Di Indonesia, setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/MR. Penentuan jenis imunisasi didasarkan atas kajian ahli dan analisis epidemiologi atas penyakit-penyakit yang timbul.



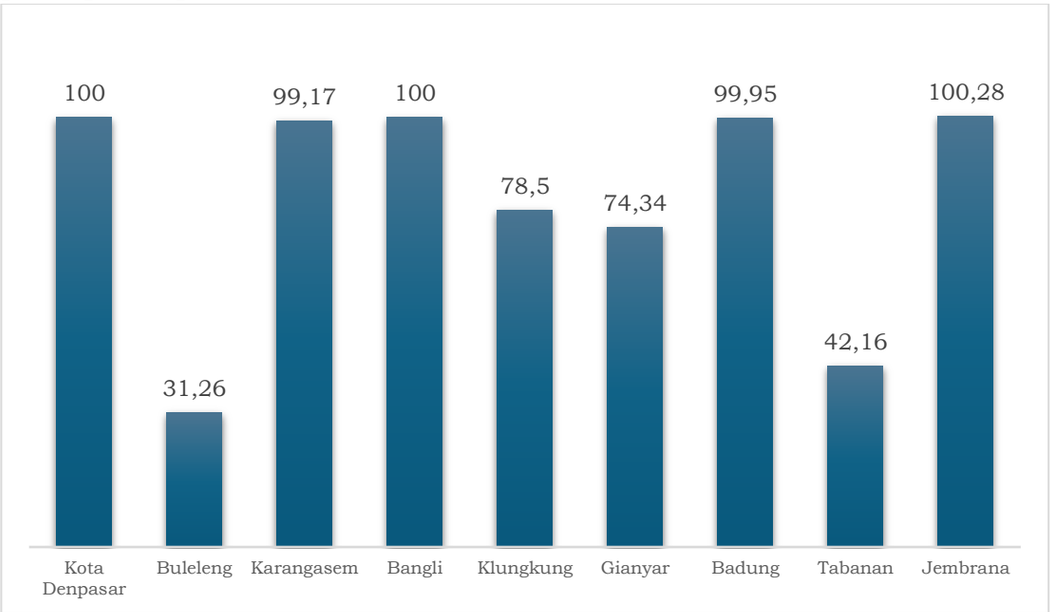
Gambar 2.24 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2024
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Berdasarkan Gambar 2.24 di atas cakupan imunisasi dasar lengkap tertinggi pada Kabupaten Badung sebesar 118,7%, dan terendah kabupaten Jembrana sebesar 73,9%. Cakupan imunisasi dasar lengkap provinsi tahun 2024 sebesar 95,51%.

2.2.2.9 Persentase Hipertensi dalam Pengendalian

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular, masih menjadi tantangan besar bagi masalah Kesehatan masyarakat secara global maupun nasional dan menjadi salah satu penyebab utama kematian *premature* di Dunia. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolic lebih dari 90 mmHg. Hipertensi merupakan kondisi kronis yang dalam jangka waktu lama akan dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), penyakit jantung coroner dan otak, hipertensi juga disebut sebagai pembunuh diam-diam karena tekanan darah yang tidak terkontrol. Faktor resiko seperti umur, riwayat keluarga dan genetik merupakan faktor resiko yang tidak dapat diubah/dikontrol. Hipertensi juga terkait dengan perilaku dan pola hidup Pengendalian hipertensi dilakukan dengan perubahan perilaku antara lain menghindari asap rokok, diet sehat, rajin aktifitas fisik, tidak mengkonsumsi alkohol dan mengendalikan stres.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan saat ini prevalensi hipertensi secara global sebesar 22 persen dari total penduduk dunia. Secara nasional hasil SKI 2023 menunjukkan bahwa prevalensi penduduk dengan tekanan darah tinggi sebesar 8,6 persen. Prevalensi tekanan darah tinggi pada perempuan (11,2 persen) lebih tinggi dibanding dengan laki-laki (4,9 persen). Hal yang sama juga ditemukan pada data penderita hipertensi di Provinsi Bali. Di Provinsi Bali penderita hipertensi pada usia ≥ 15 tahun terjadi 197.629 (49,78 persen) kasus hipertensi pada laki-laki dan 199.367 (50,22 persen) pada perempuan.



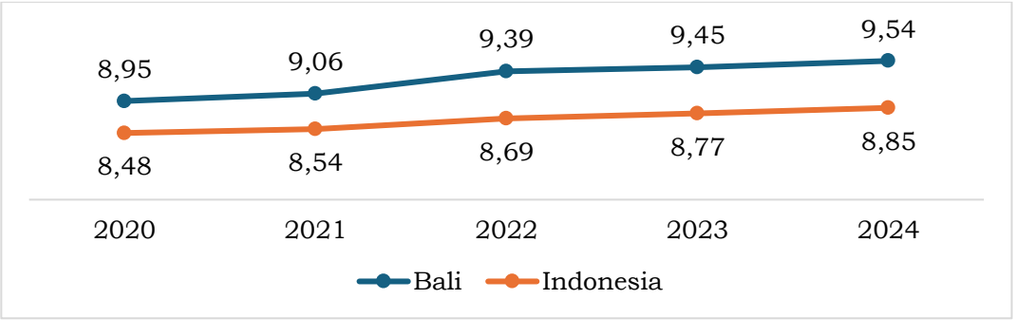
Gambar 2.25 Jumlah Penderita Hipertensi Pada Usia >15 Tahun yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bali Tahun 2024
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Pada data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penderita hipertensi usia >15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan kurang dari 50 persen yakni Kabupaten Tabanan dan kabupaten Buleleng. Kondisi ini disebabkan oleh karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa dirinya menderita hipertensi sehingga tidak mencari pelayanan dan masih banyak penderita hipertensi yang belum terdeteksi. Dalam penanganan dan memberikan pelayanan bagi penderita Hipertensi telah di tempuh dengan berbagai upaya antara lain pendekatan pelayanan melalui pembentukan dan penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) pada 989 pos, Pelayanan Pandu PTM di 120 Puskesmas, pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK).

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu indikator tunggal untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Adapun grafik rata-rata lama sekolah (tahun) di Provinsi Bali terlihat pada Gambar 2.26 berikut.



Gambar 2.26
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzYwIzI=/rata-rata-lama-sekolah-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html

Data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Bali tahun 2020-2024 menunjukkan tren positif yang konsisten dalam pencapaian pendidikan formal masyarakat. RLS Bali meningkat secara signifikan dari 8,95 tahun pada 2020 menjadi 9,54 tahun pada 2024, yang berarti rata-rata penduduk Bali telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9 (SMP) dan memasuki tahun pertama SMA. Peningkatan sebesar 0,59 tahun dalam kurun waktu lima tahun ini mencerminkan keberhasilan kebijakan perluasan akses dan kualitas pendidikan di provinsi tersebut.

Dibandingkan dengan angka nasional, Bali secara konsisten berada di atas rata-rata Indonesia dan kesenjangan tersebut semakin melebar dari 0,47 tahun pada 2020 menjadi 0,69 tahun pada 2024. Lonjakan paling signifikan terjadi antara tahun 2021-2022 (meningkat 0,33 tahun), menandakan adanya upaya intensif dalam bidang pendidikan pada periode tersebut, mungkin sebagai bagian dari pemulihan sektor pendidikan pasca-pandemi. Capaian ini menggambarkan komitmen Bali dalam membangun sumber daya manusia berkualitas, yang penting untuk mendukung transformasi ekonomi dari ketergantungan pada pariwisata menuju struktur ekonomi yang lebih beragam dan tangguh. Meskipun demikian, rata-rata 9,54 tahun masih belum mencapai target pendidikan wajib 12 tahun, menandakan perlunya upaya berkelanjutan untuk mendorong partisipasi dan keberlangsungan pendidikan tingkat menengah atas dan sederajat.

Tabel 2.45
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2020–2024

Kabupaten /Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Jembrana	9,25	7,39	8,26	7,53	9,37	7,90	9,40	7,91	9,41	8,11
Tabanan	9,76	8,24	9,95	8,53	9,96	8,56	10,01	8,78	10,25	8,87
Badung	10,93	9,70	11,08	9,97	11,09	10,07	11,32	10,52	11,45	10,76
Gianyar	9,78	8,34	9,98	8,61	10,28	8,86	10,38	9,19	10,44	9,20
Klungkung	9,22	7,13	9,23	7,14	9,50	7,50	9,51	7,63	9,61	7,89
Bangli	8,10	6,47	8,11	6,48	8,22	6,87	8,23	7,15	8,24	7,16
Karangasem	7,35	5,28	7,36	5,29	7,44	5,65	7,45	5,66	7,47	5,68
Buleleng	8,15	6,43	8,16	6,44	8,40	6,81	8,41	6,82	8,43	7,03
Denpasar	11,87	11,13	11,88	11,14	11,90	11,15	11,91	11,17	11,92	11,20
Bali	**9,68**	**8,21**	**9,76**	**8,36**	**9,99**	**8,71**	**10,04**	**8,80**	**10,13**	**8,94**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc1IzI=/rata-rata-lama-sekolah-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin--tahun-.html

Data rata-rata lama sekolah Provinsi Bali periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan pendidikan yang bervariasi antarwilayah dengan tren peningkatan yang konsisten. Secara umum, capaian pendidikan masyarakat Bali berada pada kisaran 8-12 tahun, yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMP hingga SMA.

Kota Denpasar konsisten menunjukkan capaian tertinggi dengan rata-rata lama sekolah mencapai 11,92 tahun untuk laki-laki dan 11,20 tahun untuk perempuan pada tahun 2024, mendekati penyelesaian pendidikan menengah atas. Posisi ini mencerminkan keunggulan aksesibilitas fasilitas pendidikan dan kondisi sosial ekonomi di wilayah perkotaan. Sebaliknya, Kabupaten Karangasem

mencatat angka terendah dengan 7,47 tahun untuk laki-laki dan 5,68 tahun untuk perempuan, menunjukkan rata-rata penduduk baru menyelesaikan pendidikan dasar hingga awal pendidikan menengah pertama.

Fenomena kesenjangan gender terlihat nyata di seluruh kabupaten/kota, dengan laki-laki secara konsisten memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kesenjangan terbesar terjadi di Kabupaten Karangasem dengan selisih mencapai 1,79 tahun pada tahun 2024, sementara kesenjangan terkecil ada di Kota Denpasar dengan selisih 0,72 tahun. Pola ini mengindikasikan masih adanya hambatan struktural dan kultural yang mempengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan, terutama di wilayah rural.

Selama periode observasi, sebagian besar wilayah menunjukkan tren peningkatan, meskipun dengan laju yang bervariasi. Peningkatan signifikan terjadi di Kabupaten Gianyar dan Badung yang berhasil meningkatkan rata-rata lama sekolah lebih dari 0,5 tahun. Namun, beberapa wilayah seperti Bangli menunjukkan stagnasi relatif, yang memerlukan intervensi kebijakan lebih intensif.

Secara agregat, rata-rata lama sekolah Provinsi Bali meningkat dari 9,68 tahun (2020) menjadi 10,13 tahun (2024) untuk laki-laki, dan dari 8,21 tahun menjadi 8,94 tahun untuk perempuan. Meskipun menunjukkan progres positif, pencapaian ini masih di bawah target nasional 12 tahun pendidikan wajib. Diperlukan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal, program afirmasi untuk kelompok perempuan, serta penguatan sistem pendidikan yang inklusif dan merata untuk mewujudkan kesetaraan akses pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Bali.

2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka harapan lama sekolah di Provinsi Bali dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.46 berikut.

Tabel 2.46
Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2020–2024

Kabupaten /Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Jembrana	12,76	12,50	12,78	12,92	12,86	13,03	12,93	13,04	12,96	13,12
Tabanan	13,28	12,91	13,29	12,94	13,31	12,95	13,33	12,96	13,34	13,24
Badung	14,23	13,98	14,27	13,99	14,31	14,02	14,51	14,03	14,52	14,05
Gianyar	13,95	13,85	14,00	13,97	14,01	14,06	14,06	14,15	14,09	14,16
Klungkung	13,90	12,91	13,91	12,93	13,93	12,94	13,94	13,11	13,95	13,13
Bangli	12,58	12,08	12,59	12,09	12,85	12,11	12,98	12,12	12,99	12,42
Karangasem	12,58	12,40	12,59	12,41	12,61	12,66	12,63	12,67	12,64	13,02
Buleleng	13,07	13,03	13,24	13,04	13,46	13,15	13,47	13,16	13,50	13,19
Denpasar	14,14	13,97	14,17	14,06	14,18	14,09	14,19	14,11	14,21	14,13
Bali	**13,48**	**13,23**	**13,49**	**13,37**	**13,50**	**13,47**	**13,56**	**13,61**	**13,57**	**13,87**

Sumber: SIPD dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc0IzI=/harapan-lama-sekolah-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin--tahun-.html

Data harapan lama sekolah Provinsi Bali periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan konsisten di seluruh kabupaten/kota dengan rata-rata provinsi bertumbuh dari 13,36 tahun menjadi 13,72 tahun. Kabupaten Badung mencatatkan nilai tertinggi (14,23 tahun pada 2024) dengan pertumbuhan stabil sebesar 0,25 tahun selama lima tahun, sementara Kabupaten Bangli berada di posisi terendah (12,53 tahun). Analisis komparatif mengindikasikan pola stratifikasi regional dimana kawasan urban dan pusat ekonomi (Badung, Denpasar, dan Gianyar) memiliki harapan lama sekolah di atas 14 tahun, sedangkan kabupaten dengan karakteristik perdesaan cenderung berada di bawah 13 tahun. Kesenjangan antarwilayah mencapai 1,7 tahun, menggambarkan persistensi disparitas akses dan kualitas pendidikan. Meskipun demikian, peningkatan signifikan di daerah dengan nilai rendah seperti Karangasem (0,5 tahun) mengindikasikan keberhasilan intervensi kebijakan afirmatif. Tren positif ini menggambarkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dan mencerminkan potensi sumber daya manusia yang lebih berkualitas di masa mendatang.

2.2.3.3 Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Tabel 2.47, data penyandang disabilitas usia 4-18 tahun di Provinsi Bali pada Semester I Tahun 2024 menunjukkan total sebanyak 515 orang, yang terdiri dari 287 laki-laki dan 228 perempuan. Data ini tersebar di sembilan kabupaten/kota dengan distribusi yang bervariasi.

Kabupaten Jembrana mencatat jumlah penyandang disabilitas tertinggi dengan 116 orang, diikuti oleh Tabanan (96 orang) dan

Badung (86 orang). Sementara itu, Gianyar tercatat memiliki jumlah penyandang disabilitas terendah dengan 53 orang. Distribusi berdasarkan jenis disabilitas menunjukkan bahwa disabilitas fisik merupakan kategori terbanyak dengan 271 orang (121 laki-laki dan 150 perempuan), diikuti oleh disabilitas mental/jiwa sebanyak 181 orang.

Temuan menarik dari data ini adalah adanya perbedaan gender yang cukup signifikan, di mana jumlah penyandang disabilitas laki-laki (55,7%) lebih tinggi dibandingkan perempuan (44,3%). Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam penyediaan layanan pendidikan inklusif dan fasilitas penunjang bagi anak-anak penyandang disabilitas di Provinsi Bali, terutama di daerah-daerah dengan jumlah penyandang disabilitas yang tinggi seperti Jembrana, Tabanan, dan Badung.

Saat ini, Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sudah terbentuk di delapan Kabupaten/Kota Provinsi Bali, hanya di Kabupaten Bangli yang belum membentuk Unit Layanan Disabilitas ini.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, khususnya data WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan) menyatakan bahwa masyarakat Bali yang mengalami disabilitas bekerja pada sektor formal sebanyak 886 orang laki-laki dan 353 orang perempuan.

Tabel 2.47
Data Penyandang Disabilitas Umur 4-18 Tahun di Provinsi Bali Semester I Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Disabilitas Fisik (LK)	Disabilitas Fisik (PR)	Disabilitas Fisik (JML)	Disabilitas Fisik dan Mental (LK)	Disabilitas Fisik dan Mental (PR)	Disabilitas Fisik dan Mental (JML)	Disabilitas Netra/Buta (LK)	Disabilitas Netra/Buta (PR)	Disabilitas Netra/Buta (JML)
Jembrana	33	23	56	4	4	8	35	20	55
Tabanan	7	2	9	5	7	12	16	22	38
Badung	11	10	21	4	5	9	34	20	54
Gianyar	13	9	22	7	20	27	32	24	56
Klungkung	7	9	26	6	0	6	23	13	36
Bangli	9	8	17	6	3	9	18	16	34
Karangasem	11	10	21	4	4	8	39	30	69
Buleleng	17	15	32	6	3	9	44	40	84
Denpasar	42	35	77	7	3	10	46	43	89
Provinsi Bali	**150**	**121**	**271**	**49**	**49**	**98**	**287**	**228**	**515**

Lanjutan Tabel 2.47

Kabupaten/ Kota	Disabilitas Mental/Jiwa (LK)	Disabilitas Mental/Jiwa (PR)	Disabilitas Mental/Jiwa (JML)	Disabilitas Rungu/Wicara (LK)	Disabilitas Rungu/Wicara (PR)	Disabilitas Rungu/Wicara (JML)	Disabilitas Lainnya (LK)	Disabilitas Lainnya (PR)	Disabilitas Lainnya (JML)	TOTAL
Jembrana	71	45	116	11	1	12	11	3	14	522
Tabanan	117	64	181	1	0	1	3	4	7	496
Badung	110	44	154	1	3	4	1	3	4	492
Gianyar	94	49	143	1	1	2	27	26	53	86
Klungkung	60	29	89	2	0	2	4	4	8	324
Bangli	40	19	59	18	12	30	4	4	8	324
Karangasem	89	48	137	0	1	1	6	2	8	488
Buleleng	107	56	163	3	0	3	7	5	12	606
Denpasar	135	70	205	7	3	10	36	20	56	894
Provinsi Bali	**823**	**424**	**1.247**	**44**	**21**	**65**	**99**	**71**	**170**	**4.732**

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

2.2.3.4 Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sekolah Luar Biasa atau SLB beroperasi dengan mengikuti sistem pendidikan nasional melalui penyesuaian dan modifikasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan potensi peserta didik. SLB dibagi menjadi enam jenis, sesuai dengan jenis kelainan yang dialami oleh peserta didik, yakni:

1. SLB A adalah jenis sekolah yang diperuntukkan bagi anak tunanetra atau anak yang memiliki hambatan dalam indra penglihatan. Strategi pembelajaran yang diberikan di sekolah ini harus mampu mendorong mereka memahami materi yang diberikan oleh para guru. Di SLB A, umumnya guru menggunakan media pembelajaran yang cocok untuk anak-anak dengan gangguan penglihatan, contohnya seperti buku Braille dan *tape recorder*.
2. SLB B diperuntukkan bagi anak yang memiliki hambatan dalam indra pendengaran atau yang disebut juga dengan tunarungu. Media pembelajaran yang diberikan di sekolah ini, yakni membaca ujaran melalui gerakan bibir atau metode *oralism*. Selain itu, siswa di SLB B umumnya dilengkapi dengan alat bantu pendengaran, seperti contohnya implan koklea.
3. SLB C diperuntukkan bagi anak-anak yang dikategorikan sebagai individu dengan tingkat inteligensi di bawah rata-rata atau yang dikenal dengan istilah tunagrahita. Siswa tunagrahita umumnya tidak memiliki kemampuan sosial yang baik dan cenderung menarik diri dari lingkungan dan pergaulan. Oleh karena itu, kurikulum SLB C difokuskan kepada pembelajaran cara membina diri dan bersosialisasi agar kemampuan dan kepekaan sosialnya lebih terasah dan mampu untuk berbaur dengan masyarakat.
4. SLB D adalah jenis sekolah yang untuk mereka yang memiliki disabilitas fisik atau kekurangan dalam anggota tubuh mereka. Dalam Bahasa Indonesia, mereka dikategorikan sebagai tunadaksa. Pendidikan di SLB D bertujuan mengembangkan potensi diri siswa tunadaksa agar mereka bisa hidup mandiri dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki.
5. SLB E ditujukan untuk anak-anak tunalaras, yaitu mereka yang mengalami ketidaksesuaian dengan lingkungan sekitar. Mereka sering kesulitan dalam mengendalikan emosi dan berinteraksi dengan orang lain. Anak tunalaras menghadapi masalah dalam aspek emosional dan sosial atau keduanya dalam perkembangan mereka. Oleh karena itu, di SLB E mereka akan diberikan pendidikan dan layanan khusus yang dapat membantu mereka mengatur emosi dan menjalin hubungan sosial.

6. SLB G merupakan salah satu jenis sekolah luar biasa yang ditujukan untuk tunaganda, yaitu mereka yang mengidap lebih dari satu kelainan. Mereka biasanya sulit untuk berkomunikasi, atau bahkan sama sekali tidak berkomunikasi.
7. SLB Q merupakan jenis SLB yang ditujukan untuk Autis (hambatan dalam interaksi sosial)
8. SLB H merupakan sekolah yang diperuntukan bagi seseorang yang cerdas istimewa bakat istimewa

Data jumlah SLB di Provinsi Bali selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.48 berikut.

Tabel 2.48
Sarana Sekolah Luar Biasa di Provinsi Bali

Wilayah	SLB	Nama Sekolah	Jenis yang Dilayani
Kabupaten Buleleng	2	SLB Negeri 1 Buleleng	A, B, C, D
		SLB Negeri 2 Buleleng	A, B, C, C1, D, D1, H, K, P, Q
Kota Denpasar	3	SLB Negeri 1 Denpasar	A, C1, Q
		SLB Negeri 2 Denpasar	B, C
		SLB Negeri 3 Denpasar	B, C, C1, P, Q
Kabupaten Badung	2	SLB Negeri 1 Badung	A, B, C, C1, D, H, Q
		SLB D YPAC Cabang Bali - TKSDSMP	A, C, C1, D, D1, P, Q
Kabupaten Tabanan	2	SLB Negeri 1 Tabanan	A, B, C, C1, D1
		SLB C Kemala Bhayangkari	C, C1, P, Q
Kabupaten Karangasem	1	SLB Negeri 1 Karangasem	A, B, C, C1, Q
Kabupaten Gianyar	1	SLB Negeri 1 Gianyar	A, B, C, C1, D, D1, Q
Kabupaten Jembrana	1	SLB Negeri 1 Jembrana	A, B, C, C1, D, D1, F, H, P, Q
Kabupaten Bangli	1	SLB Negeri 1 Bangli	A, B, C, C1, D, D1, H, Q
Kabupaten Klungkung	1	SLB Negeri 1 Klungkung	A, B, C, C1, D, D1, Q
Total	**14**		

Sumber: Data Pokok Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
URL: https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/220000

Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali bahwa SLB yang ada baru mampu melayani 60% dari total penderita disabilitas. Kekurangan ini sementara dibantu dengan pelayanan sekolah inklusi pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK sebanyak 406 sekolah.

Jumlah guru pada SLB di Provinsi Bali harus memenuhi sebaran tenaga pengajar sesuai kebutuhan di sejumlah kabupaten/kota. Sebaran guru SLB di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.49 berikut.

Tabel 2.49
Jumlah Guru SMA, SMK, dan SLB Tahun 2024 di Provinsi Bali

No	Wilayah	SMA	SMK	SLB
1	Kota Denpasar	1.101	2.081	109
2	Kabupaten Buleleng	942	1.035	63
3	Kabupaten Badung	978	662	41
4	Kabupaten Gianyar	521	874	40
5	Kabupaten Karangasem	567	422	35
6	Kabupaten Tabanan	514	406	44
7	Kabupaten Bangli	280	453	37
8	Kabupaten Jembrana	370	285	23
9	Kabupaten Klungkung	411	233	29
	Total	**5.684**	**5.451**	**421**

Sumber: Data Pokok Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
URL: https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/220000

2.2.3.5 Angka Literasi/Numerasi

Berdasarkan Tabel 2.50 mengenai Skor Kemampuan Literasi di Provinsi Bali periode 2020-2024, terlihat adanya perkembangan yang bervariasi pada setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang SMA, terjadi peningkatan konsisten dari 59,24 pada tahun 2022 menjadi 80,01 pada tahun 2024, menunjukkan tren positif dalam kemampuan literasi siswa SMA. Sementara itu, jenjang SMK mengalami fluktuasi dengan penurunan dari 64,01 (2022) menjadi 63,56 (2021), namun kembali meningkat signifikan menjadi 75,29 pada tahun 2024. Secara mendetail, skor kemampuan literasi dan numerasi di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Skor Kemampuan Literasi di Provinsi Bali

Skor Kemampuan Literasi																									
SMA					SMK					SDLB					SMPLB					SMALB				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
N/A	66,81	69,24	76,17	80,01	N/A	63,56	64,01	71,33	75,29	N/A	59,23	69,32	66,97	71,23	N/A	56,40	67,58	62,11	85,23	N/A	58,02	72,93	64,09	85,02

Sumber: Lampiran Surat Mendikdasmen Nomor: 1422/MDM.A/PR.07.05/2025
Catatan: Rapor Pendidikan sebagai dokumen evaluasi sistem pendidikan mulai dikeluarkan/dirilis pada tahun 2021, sehingga data capaian Skor Kemampuan Literasi dan Skor Kemampuan Numerasi pada tahun 2020 tidak tersedia.

Untuk pendidikan luar biasa, data menunjukkan bahwa pencatatan skor literasi baru dimulai sejak tahun 2021. SDLB mencatat skor tertinggi di antara sekolah luar biasa dengan nilai 71,23 pada tahun 2024, diikuti oleh SMALB dengan skor 85,02 yang merupakan pencapaian tertinggi di seluruh jenjang pendidikan. Sebaliknya, SMPLB menunjukkan skor yang relatif lebih rendah yaitu 62,11 pada tahun 2023 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 58,02 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan adanya upaya peningkatan kemampuan literasi di berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Bali, meskipun masih terdapat disparitas antarjenjang yang perlu mendapat perhatian khusus.

Tabel 2.51
Skor Kemampuan Numerasi di Provinsi Bali

Skor Kemampuan Numersi																									
SMA					SMK					SDLB					SMPLB					SMALB				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
N/A	52,23	56,71	62,99	66,66	N/A	50,81	53,16	59,00	62,08	N/A	47,26	59,12	63,62	76,17	N/A	56,40	62,29	65,20	80,20	N/A	52,17	64,85	58,25	77,63

Sumber: Lampiran Surat Mendikdasmen Nomor: 1422/MDM.A/PR.07.05/2025
Catatan: Rapor Pendidikan sebagai dokumen evaluasi sistem pendidikan mulai dikeluarkan/dirilis pada tahun 2021, sehingga data capaian Skor Kemampuan Literasi dan Skor Kemampuan Numerasi pada tahun 2020 tidak tersedia.

Berdasarkan Tabel 2.51 tentang Skor Kemampuan Numerasi di Provinsi Bali periode 2020-2024, data menunjukkan perkembangan yang positif di berbagai jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan umum, SMA mengalami peningkatan bertahap dari 52,23 (2021) menjadi 66,66 (2024), sementara SMK juga menunjukkan tren serupa dengan peningkatan dari 50,81 (2021) menjadi 62,08 (2024). Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan sistematis dalam pembelajaran matematika di sekolah menengah.

Pencapaian yang lebih signifikan terlihat pada jenjang pendidikan luar biasa. SDLB mencatat lonjakan drastis dari 47,26 (2021) menjadi 76,17 (2024), menunjukkan keberhasilan pendekatan pembelajaran adaptif. SMPLB mengalami fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2023 (48,20), namun meningkat tajam menjadi 80,20 pada tahun 2024, mencapai skor tertinggi di antara semua jenjang. SMALB juga menunjukkan pemulihan yang baik dari 58,25 (2023) menjadi 77,63 (2024). Secara keseluruhan, data ini mencerminkan komitmen Provinsi Bali dalam meningkatkan kemampuan numerasi siswa.

2.2.3.6 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) ini mencerminkan kemampuan individu dalam membaca, menulis, dan memahami informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari. IPLM mencakup berbagai aspek literasi, seperti literasi tradisional, literasi digital, literasi keuangan, literasi budaya, dan literasi ilmiah. Tujuannya adalah untuk mengukur dan memantau kemajuan dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat serta mengidentifikasi wilayah yang perlu ditingkatkan dalam upaya meningkatkan literasi secara keseluruhan. Dalam konteks pemerintah daerah, IPLM juga mencakup upaya pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilakukan dengan menggunakan tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), yaitu:

1. Pemerataan Layanan Perpustakaan;
2. Ketercukupan Koleksi;
3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan;
4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari;
5. Jumlah Perpustakaan yang dibina sesuai SNP;
6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi;
7. Anggota Perpustakaan.

Tingkatan skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menggunakan skor indeks dalam skala level 1-100 dengan tingkatan skor seperti pada perhitungan sebelumnya. Secara terperinci IPLM kabupaten/kota di Provinsi Bali dan nasional dapat dilihat pada Tabel 2.52 sebagai berikut.

Tabel 2.52
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada Tahun 2024

Kabupaten /Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan
Jembrana	57,54	0,6399	0,2206	0,0696	0,0977	1	1	1
Tabanan	60,14	0,4882	0,3772	0,1877	0,1569	1	1	1
Badung	74,96	0,8406	0,4564	0,8166	0,1338	1	1	1
Gianyar	55,96	0,6563	0,1895	0,3244	0,0455	1	1	0,7018
Klungkung	64,57	0,6022	0,2839	0,5391	0,0946	1	1	1
Bangli	49,92	0,5956	0,3576	0,2104	0,1274	1	0,2031	1
Karang Asem	75,43	1	0,5018	0,568	1	1	0,2102	1
Buleleng	68,46	0,7746	0,1196	0,7078	0,1905	1	1	1
Kota Denpasar	76,11	0,751	0,4143	0,7015	0,4611	1	1	1
Bali	66,05	0,6813	0,298	0,4604	0,1836	1	1	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/3/VEd0V05FTjBaRVJuYzA1bVkwcHlhVk5KUjJGTlVUMDkjMw==/indeks-pembangunan-literasi-masyarakat-dan-unsur-penyusunnya-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali--2023.html?year=2024

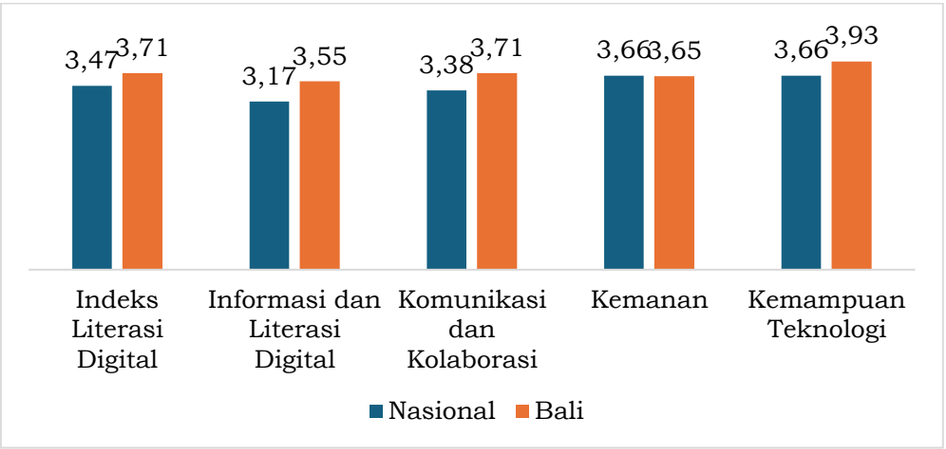
Analisis Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Provinsi Bali tahun 2024 menunjukkan variasi signifikan antarwilayah dengan rata-rata provinsi mencapai 66,03. Denpasar dan Karangasem menduduki posisi tertinggi (masing-masing 76,11 dan 75,43), diikuti Badung (74,96), sementara Bangli berada di posisi terendah (49,92) dengan kesenjangan mencapai 26,19 poin. Pola distribusi komponen indeks menunjukkan: (1) Karangasem unggul dalam pemerataan layanan perpustakaan dan tingkat kunjungan dengan nilai maksimal (1,0); (2) seluruh kabupaten/kota memiliki perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan; (3) keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan optimal di sebagian besar wilayah kecuali Bangli (0,2031) dan Karangasem (0,2102); dan (4) rasio ketercukupan tenaga perpustakaan tertinggi di Karangasem (0,568) dan terendah di Jembrana (0,0696). Fenomena menarik teridentifikasi dimana beberapa kabupaten yang memiliki capaian lebih rendah dalam indikator pendidikan formal (seperti Karangasem) justru menunjukkan performa unggul dalam pengembangan literasi masyarakat, mengindikasikan efektivitas strategi pendidikan nonformal dan kebijakan perpustakaan dalam mendukung ekosistem literasi.Indeks Literasi Digital

Media digital tidak selalu berdampak positif terhadap semua lapisan masyarakat. Beberapa tantangan media digital menjadi tantangan serius, seperti penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, dan aktivitas digital yang merugikan lainnya. Salah satu penyebab fenomena tersebut, yakni kurangnya kesadaran keamanan siber karena rendahnya kemampuan literasi digital (UNESCO, 2018).

Oleh karena itu, guna meningkatkan kebijakan berbasis bukti dan pengaruhnya terhadap penyediaan program-program yang tepat untuk peningkatan tingkat literasi digital penduduk Indonesia, diperlukan satu studi mendalam agar bisa mengukur kemampuan literasi digital Indonesia dari berbagai sudut pandang. Survei ini merupakan salah satu pendekatan untuk menjawab kebutuhan tersebut yang diharapkan menjadi rujukan utama dalam penentuan status literasi digital di Tanah Air.

Pada tahun 2020 perhitungan Indeks Literasi Digital Nasional menggunakan 4 sub indeks yaitu:

1. Informasi dan Literasi Data (Pilar Informasi dan LIterasi data dan Pilar Berpikir Kritis)
2. Komunikasi dan Kolaborasi (Pilar Kemampuan Berkomunikasi, Pilar Etika dalam Teknologi)
3. Keamanan (Pilar Keamanan Pribadi, Pilar Keamanan Perangkat)
4. Kemampuan Teknologi (Pilar Kemampuan Teknologi)



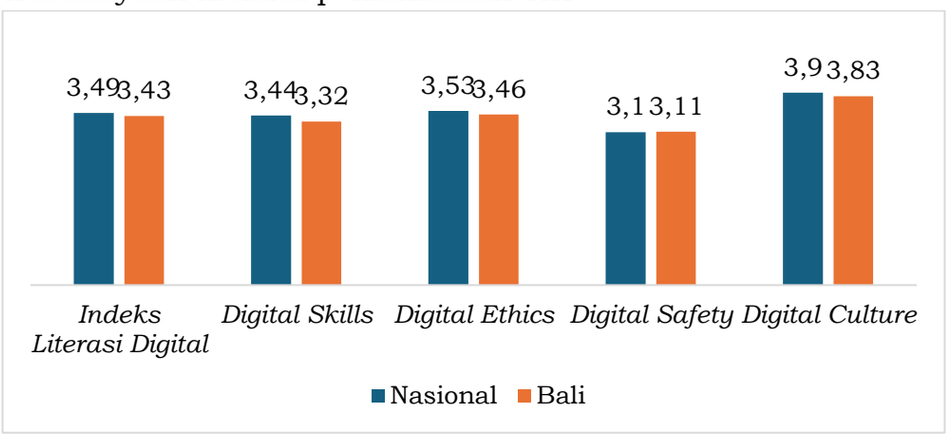
Gambar 2.27
Literasi Digital Secara Nasional dan Bali pada Tahun 2020
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi
URL:https://cdn1.katadata.co.id/media/microsites/litdik/Status_Literasi_Digital_Nasional_2020.pdf

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020, tingkat literasi digital di Provinsi Bali secara konsisten menunjukkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional di hampir seluruh dimensi pengukuran. Indeks literasi digital Bali mencapai 3,71 dari skala 5, melampaui angka nasional sebesar 3,47. Keunggulan Bali terlihat signifikan pada dimensi informasi dan literasi digital (3,55 berbanding 3,17), komunikasi dan kolaborasi (3,71 berbanding 3,38), serta kemampuan teknologi (3,93 berbanding 3,66). Hanya pada dimensi keamanan, Bali menunjukkan nilai yang hampir setara dengan nasional, yaitu 3,65 berbanding 3,66. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Bali memiliki kesiapan yang relatif lebih baik dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital, khususnya dalam hal kemampuan teknologi yang mencapai nilai tertinggi. Kondisi ini dapat menjadi modal penting bagi Bali dalam mengembangkan ekonomi digital dan transformasi digital di berbagai sektor, terutama mengingat posisi Bali sebagai destinasi wisata internasional yang memerlukan infrastruktur dan layanan digital yang mumpuni.

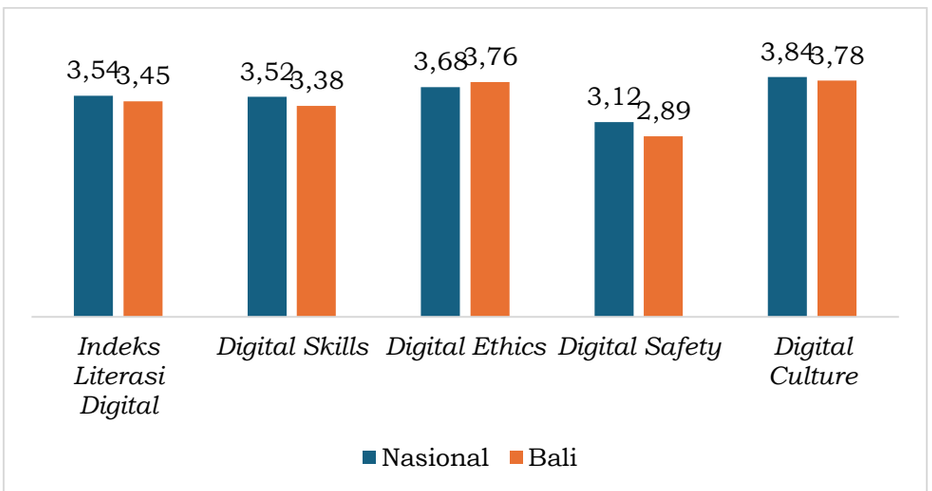
Sedangkan pada Tahun 2021 dan 2022 Tahun 2021 dan 2022 Indeks Literasi Digital diukur dengan menggunakan 4 pilar yaitu:

1. *Digital Skill* atau kecakapan digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.
2. *Digital Ethics* atau etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (*netiquette*) dalam kehidupan sehari-hari.

3. *Digital Safety* atau keamanan digital adalah kemampuan *user* (pengguna) dalam mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
4. *Digital Culture* atau budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.



Gambar 2.28
Literasi Digital Secara Nasional dan Bali pada Tahun 2021
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi
URL: https://survei.literasidigital.id/



Gambar 2.29
Literasi Digital Secara Nasional dan Bali pada Tahun 2022
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi
URL: https://survei.literasidigital.id/

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2021-2022 menunjukkan dinamika perkembangan literasi digital yang berbeda antara tingkat nasional dan Provinsi Bali. Pada tahun 2021, indeks literasi digital Bali tercatat 3,43, sedikit di bawah rata-rata

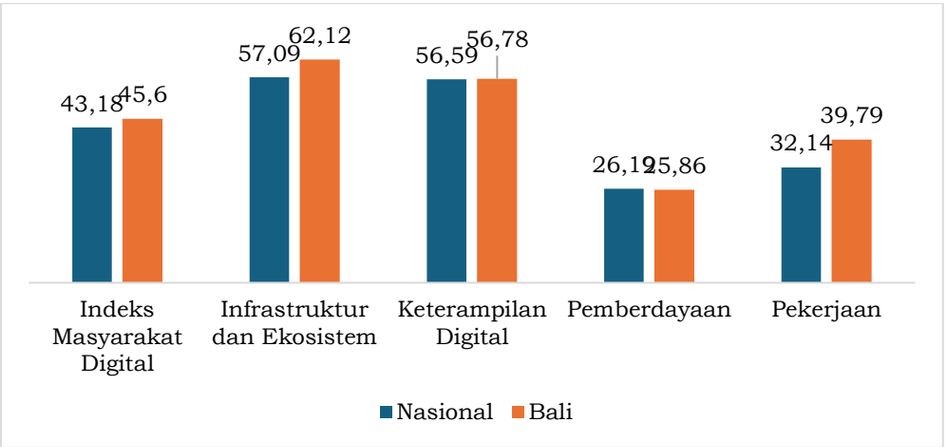
nasional 3,49, dan kondisi ini berlanjut hingga 2022 dengan gap yang semakin melebar (3,45 berbanding 3,54).

Analisis longitudinal mengungkap pergeseran menarik dalam kinerja per dimensi. Pada tahun 2021, Bali tertinggal di hampir semua aspek kecuali keamanan digital yang sedikit unggul (3,11 berbanding 3,10). Namun di tahun 2022, terjadi pembalikan dramatis di mana Bali berhasil mengungguli nasional pada dimensi keterampilan digital (3,38 berbanding 3,32) dan etika digital (3,76 berbanding 3,68). Peningkatan signifikan Bali pada kedua dimensi ini menandakan keberhasilan upaya peningkatan kapasitas digital masyarakat.

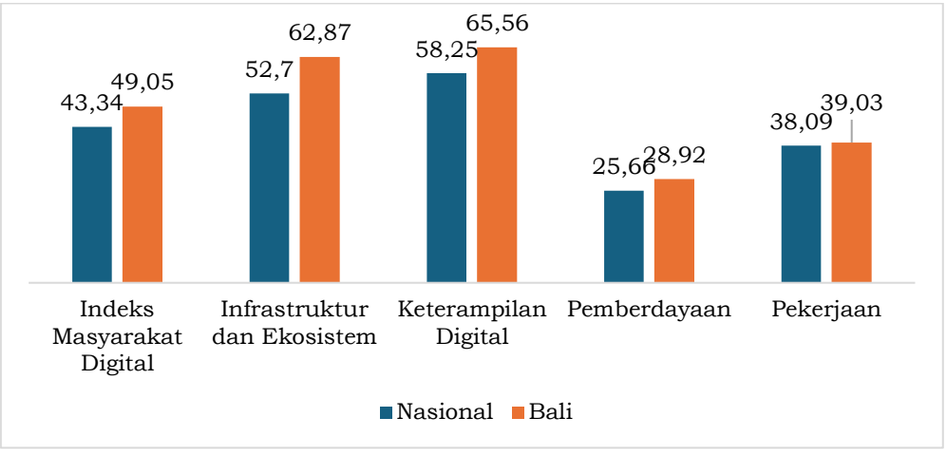
Yang mengkhawatirkan adalah penurunan tajam aspek keamanan digital Bali dari 3,11 (2021) menjadi 2,89 (2022), sementara nasional justru meningkat menjadi 3,12. Penurunan drastis sebesar 0,22 poin ini mengindikasikan meningkatnya kerentanan masyarakat Bali terhadap ancaman siber. Fenomena ini mungkin berkaitan dengan pesatnya adopsi teknologi digital yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran keamanan. Temuan ini menekankan urgensi intervensi kebijakan yang seimbang, tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat literasi keamanan digital untuk memastikan transformasi digital yang aman dan berkelanjutan.

Tahun 2023 dan 2024 tidak ada mengukuran terhadap Indeks Literasi Digital, namun diganti menjadi Indeks Masyarakat Digital dengan pilar:

1. Infrastruktur dan Ekosistem
2. Keterampilan Digital
3. Pemberdayaan
4. Pekerjaan



Gambar 2.30
Indeks Masyarakat Digital Indonesia Secara Nasional dan Bali pada Tahun 2023
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi
URL: https://imdi.sdmdigital.id/publikasi/Final%20IMDI%202023_R1-1.pdf



Gambar 2.31
Indeks Masyarakat Digital Indonesia Secara Nasional dan Bali pada Tahun 2024
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi
URL: https://imdi.sdmdigital.id/publikasi/02122024_Buku%20IMDI_BAB%201-5_V6_compressed.pdf

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai Indeks Masyarakat Digital Indonesia periode 2023-2024 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, khususnya untuk Provinsi Bali. Pada tahun 2023, Bali telah mengungguli rata-rata nasional dengan indeks 45,6 berbanding 43,18, dan keunggulan ini semakin menguat di tahun 2024 dengan pencapaian 49,05 berbanding 43,34. Bali konsisten menunjukkan keunggulan signifikan pada dimensi infrastruktur dan ekosistem digital (62,12 pada 2023 dan 62,87 pada 2024), jauh melampaui rata-rata nasional yang berkisar 52-57.

Perkembangan paling mencolok terjadi pada dimensi keterampilan digital, di mana Bali mengalami lonjakan dari 56,78 (2023) menjadi 65,56 (2024), sementara peningkatan nasional lebih moderat dari 56,56 menjadi 58,2. Meskipun dimensi pemberdayaan masih menjadi tantangan bersama dengan nilai rendah di kisaran 25-28, Bali berhasil meningkatkan pencapaiannya dari 25,86 menjadi 28,92. Pada aspek pekerjaan, baik nasional maupun Bali menunjukkan peningkatan, namun gap keduanya menyempit dari 7,65 poin pada 2023 menjadi hanya 0,94 poin pada 2024.

Temuan ini mengindikasikan bahwa Bali berhasil mempertahankan momentum transformasi digitalnya dengan memanfaatkan keunggulan infrastruktur yang telah terbangun, sekaligus secara agresif meningkatkan kapasitas SDM digitalnya. Keberhasilan Bali dapat menjadi model bagi daerah lain dalam pembangunan masyarakat cakap digital.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan. Menurut Dewan Jaminan Sosial Nasional, JKN adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Sejak tahun 2010 Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah menjalankan program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sebagai upaya mengatasi masalah kesehatan. Pada tahun 2014 sampai 2016, peserta jaminan kesehatan melalui JKBM dan JKN telah mencapai 100%. Sejak 1 Januari 2017 Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota telah berkomitmen mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah, JKBM ke dalam JKN. Kebijakan integrasi ini merupakan perwujudan dukungan Provinsi Bali dalam rangka percepatan pencapaian *Universal Health Coverage* (tahun 2019 di Indonesia sesuai dengan Peta Jalan JKN). Mekanisme integrasi JKBM ke dalam JKN di Provinsi Bali tidak serta merta memindahkan status kepesertaan JKBM ke JKN, tetapi hanya 40% penduduk dengan pendapatan terendah sesuai database Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Tabel 2.53 menyajikan distribusi persentase penduduk berdasarkan kepemilikan jaminan kesehatan menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2024. Analisis data tersebut mengungkapkan dominasi BPJS Kesehatan sebagai instrumen utama jaminan kesehatan di seluruh wilayah dengan cakupan agregat mencapai 83,22% dari total populasi. Distribusi *spasial* cakupan BPJS Kesehatan menunjukkan variabilitas moderat, dengan Kabupaten Klungkung mencatatkan persentase tertinggi sebesar 97,59%, diikuti oleh Kabupaten Karangasem (93,81%) dan Kabupaten Jembrana (91,04%). Sebaliknya, Kabupaten Gianyar mencatatkan persentase terendah sebesar 60,78%, yang secara substansial berada di bawah rata-rata provinsi. Anomali ini berkorelasi dengan tingginya kepemilikan Jamkesda di Kabupaten Gianyar yang mencapai 36,33%, mengindikasikan preferensi atau kebijakan spesifik daerah dalam penyediaan jaminan kesehatan.

Analisis komprehensif terhadap diversifikasi jaminan kesehatan menunjukkan bahwa selain BPJS Kesehatan, terdapat kontribusi minimal dari skema jaminan lainnya pada tingkat provinsi, dengan Jamkesda sebesar 4,67%, asuransi swasta 0,59%, dan jaminan dari perusahaan/kantor sebesar 1,27%. Pola ini mencerminkan

transformasi signifikan dalam ekosistem jaminan kesehatan nasional pasca-implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Menariknya, beberapa kabupaten seperti Bangli dan Karangasem tidak memiliki skema Jamkesda, sementara Klungkung dan Karangasem tidak mencatatkan keberadaan asuransi swasta, yang mengindikasikan dependensi hampir eksklusif pada BPJS Kesehatan.

Meskipun terlihat dominasi BPJS Kesehatan, masih terdapat kesenjangan cakupan yang signifikan, dengan sekitar 10-15% penduduk di beberapa kabupaten seperti Tabanan, Bangli, Buleleng, dan Denpasar belum memiliki jaminan kesehatan formal. Fenomena ini berimplikasi pada risiko proteksi finansial yang tidak merata terhadap beban pembiayaan kesehatan. Selain itu, disparitas dalam diversifikasi jaminan kesehatan, khususnya penetrasi asuransi swasta dan jaminan perusahaan yang lebih tinggi di wilayah urban seperti Badung (3,03%) dan Denpasar (1,62%), mencerminkan ketidaksetaraan akses dalam konteks sosio-ekonomi. Temuan-temuan ini menyoroti urgensi penguatan strategi untuk mencapai universal health coverage melalui akselerasi perluasan cakupan BPJS Kesehatan dan pengembangan mekanisme komplementer yang adaptif terhadap konteks lokal, terutama untuk segmen populasi yang belum terjangkau. Koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi imperatif untuk memastikan harmonisasi skema jaminan dan optimalisasi alokasi sumber daya kesehatan dalam mewujudkan ekuitas akses pelayanan kesehatan di Provinsi Bali.

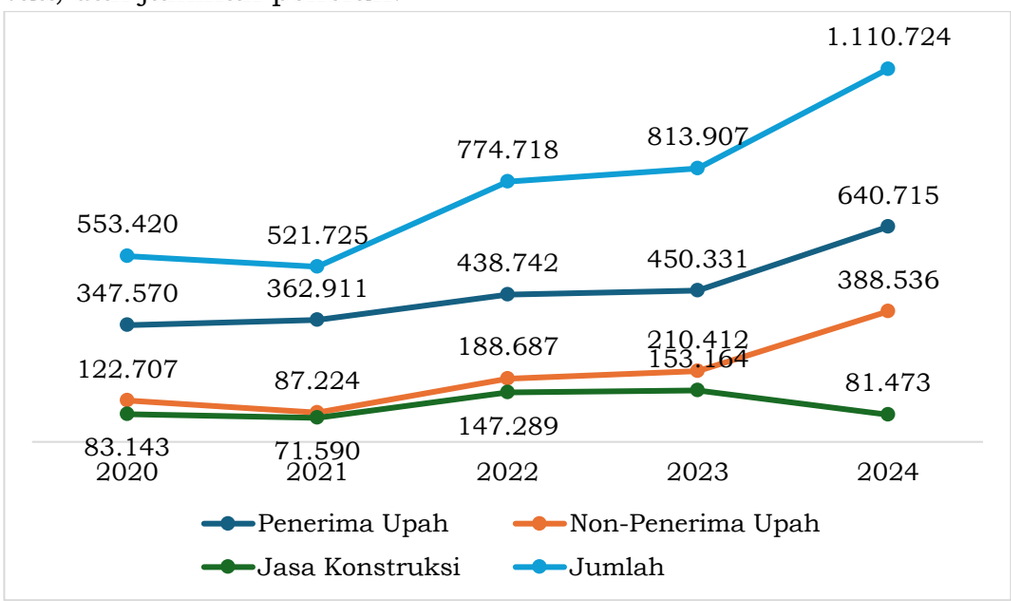
Tabel 2.53
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	BPJS Kesehatan	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/ Kantor
Jembrana	91,04	0,40	0,66	0,73
Tabanan	86,81	NA	0,88	0,75
Badung	90,31	2,48	0,80	3,03
Gianyar	60,78	36,33	0,47	0,68
Klungkung	97,59	0,04	-	0,45
Bangli	85,08	-	0,12	1,14
Karangasem	93,81	-	-	0,14
Buleleng	81,00	NA	0,16	0,75
Denpasar	80,08	0,04	1,09	1,62
Jumlah	**83,22**	**4,67**	**0,59**	**1,27**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTY3IzE=/persentase-penduduk-yang-memiliki-jaminan-kesehatan-menurut-jenis-jaminan-menurut-kabupaten-kota-di-bali--2019-2023.html

2.2.4.2 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial tenaga kerja menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Hal ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Program jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.



Gambar 2.32
Jumlah Peserta Aktif Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Provinsi Bali Tahun 2020-2024
Sumber: Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan
URL: https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2337

Data peserta aktif Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Provinsi Bali tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan dinamis. Secara keseluruhan, jumlah kepesertaan aktif melonjak dari 533.420 orang pada 2020 menjadi 1.110.724 orang pada 2024, menandakan pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun. Pola ini merefleksikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Bali pasca pandemi, serta meningkatnya kesadaran dan akses masyarakat terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kelompok Penerima Upah konsisten menjadi kontributor terbesar dengan 640.715 peserta aktif pada 2024 (57,7% dari total). Pertumbuhan paling dramatis terlihat pada kelompok Bukan Penerima Upah yang meningkat lebih dari tiga kali lipat, dari 122.707 pada 2020

menjadi 388.536 pada 2024, menunjukkan keberhasilan perluasan jangkauan program ke sektor informal. Sebaliknya, sektor Jasa Konstruksi menunjukkan pola fluktuatif dengan peningkatan tajam pada 2022-2023, namun mengalami penurunan signifikan pada 2024 menjadi 81.473 peserta, yang mungkin mencerminkan perlambatan sektor konstruksi.

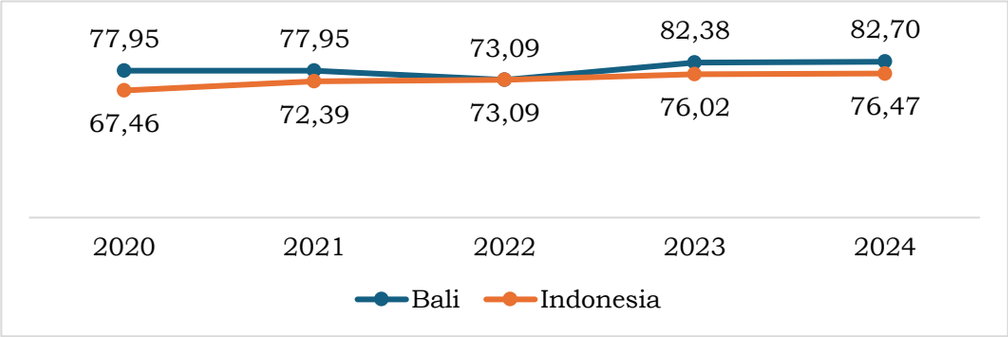
Meskipun terjadi peningkatan mengesankan pada kepesertaan aktif, data tambahan mengungkapkan adanya 309.095 peserta non-aktif pada 2024, dengan mayoritas (281.585) berasal dari kelompok Penerima Upah. Fenomena ini mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan kepesertaan, yang mungkin disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja, perubahan status pekerjaan, atau kendala ekonomi. Keberadaan sekitar 21,8% peserta non-aktif dari total keseluruhan menjadi catatan penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi retensi dan reaktivasi kepesertaan demi memperkuat sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan di Bali.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB) adalah suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta berkerja sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan data Indeks Kerukunan Umat Beragama periode 2020-2024, terlihat dinamika yang mencerminkan resiliensi dan karakteristik unik harmoni sosial-keagamaan di Provinsi Bali dibandingkan dengan rata-rata nasional. Bali secara konsisten mempertahankan indeks yang superior dibandingkan Indonesia, dengan gap yang berkisar antara 6-10 poin sepanjang periode observasi. Provinsi Bali mengalami stagnasi pada periode awal (2020-2021) dengan indeks 77,95, kemudian mengalami kontraksi signifikan pada 2022 menjadi 73,09, yang kemungkinan disebabkan oleh tekanan sosial-ekonomi pasca-pandemi dan dinamika politik lokal yang mempengaruhi relasi antarumat beragama. Periode 2023-2024 menunjukkan pemulihan yang impresif dengan indeks melonjak menjadi 82,38 dan 82,70, mencerminkan efektivitas kebijakan harmonisasi dan kearifan lokal Bali dalam mengelola keberagaman. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang lebih konsisten dan gradual dari 67,46 pada 2020 menjadi 76,47 pada 2024, mengindikasikan proses konsolidasi kerukunan yang berkelanjutan di tingkat nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Bali memiliki tradisi toleransi yang kuat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* dan adat istiadat Hindu-Bali yang inklusif, provinsi ini tetap rentan terhadap gejolak eksternal, namun memiliki kapasitas

pemulihan yang superior dalam menjaga harmoni sosial-keagamaan.



Gambar 2.33
Indeks Kerukunan Umat Beragama
Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Bali; Badan Riset dan Inovasi Daerah

2.2.5.2 Objek Pemajuan Kebudayaan

Pemerintah Provinsi Bali menempatkan kebudayaan sebagai hulu pembangunan dan melalui Dinas Kebudayaan melaksanakan serangkaian kebijakan strategis yang terintegrasi untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan di Bali, upaya tersebut dilaksanakan dengan sinergi lintas tingkat pemerintahan, akademisi, komunitas dan pelaku budaya serta mengacu pada kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam periode lima tahun terakhir tercatat penetapan Warisan Budaya Takbenda dari Bali secara bertahap (11 objek tahun 2020; 19 objek tahun 2021; 9 objek tahun 2022; 19 objek tahun 2023; dan 23 objek tahun 2024), disertai kegiatan pendukung berupa penyusunan kajian dan pembuatan audiovisual untuk berbagai ritus, tradisi lisan, pengetahuan tradisional dan seni; pelaksanaan rangkaian Jantra Tradisi Bali (I–IV) secara *hybrid* yang mencakup *pacentokan*/lomba (kreasi kebaya, topeng, jamu, olahraga tradisional), *murtirupa* (demonstrasi permainan rakyat), serta *temuwirasa* (sarasehan pengetahuan tradisional); dan penguatan agenda Tumpek sebagai implementasi tata-titi kehidupan masyarakat berdasarkan nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*. Peta jalan kebudayaan 2025–2029 yang merinci program dan target tahunan antara lain: usulan penetapan warisan takbenda, penyusunan empat kajian audiovisual per tahun, pelaksanaan *Jantra* Tradisi Bali V, serta target berulang (mis. target 18 usulan per tahun mulai 2026) sekaligus menegaskan peran aspek fasilitasi sarana/prasarana pembinaan lembaga adat dan dukungan untuk pemanfaatan nilai budaya dalam pembangunan kesejahteraan lokal; dengan demikian laporan ini menempatkan capaian administratif (penetapan warisan), kegiatan edukatif-kultural (kajian, audiovisual, sarasehan), dan kegiatan partisipatif (lomba, demonstrasi, perayaan *Tumpek*) sebagai pilar

operasional untuk menjaga kontinuitas, keberdayaan, dan pemajuan kebudayaan Bali.

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Bali memulai sebuah inisiatif strategis untuk mendokumentasikan dan melestarikan kekayaan budaya Bali melalui pengumpulan data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Inisiatif ini bertujuan memastikan warisan budaya Bali tetap terjaga dan dapat diakses secara luas di era modern. Langkah ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, yang menjadi landasan hukum untuk pengembangan sistem pengelolaan data kebudayaan secara terpadu.

Sebagai wujud implementasi, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mengembangkan Ceraken Kebudayaan Bali (CKB), sebuah pangkalan data berbasis teknologi digital. Sistem ini rampung pada tahun 2021 dan resmi disosialisasikan kepada masyarakat pada tahun 2022. Ceraken Kebudayaan Bali dirancang untuk mendokumentasikan 19 Objek Pemajuan Kebudayaan, yaitu kearifan lokal, ritus, benda sakral, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, tradisi lisan, manuskrip, situs, adat istiadat, seni, arsitektur tradisional, bahasa dan aksara, permainan rakyat, olahraga tradisional, kerajinan, desain, busana, dan boga.

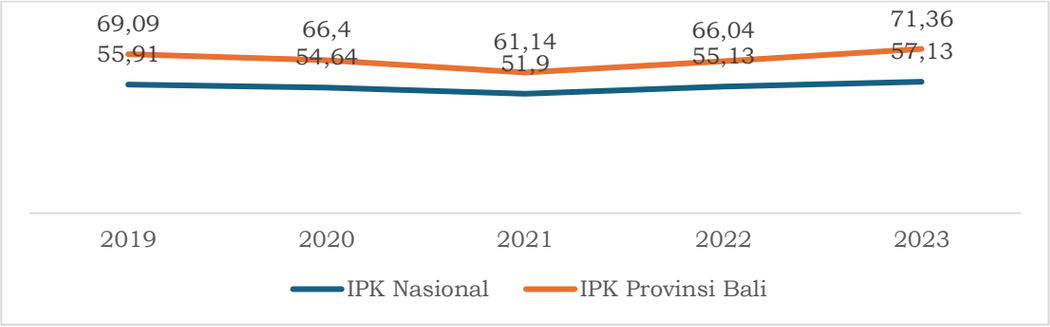
Ceraken Kebudayaan Bali tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga sebagai sumber informasi bagi masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan kebudayaan. Pengelolaan data melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Majelis Kebudayaan Bali, desa adat, serta lembaga kebudayaan lainnya di seluruh Bali. Kolaborasi ini memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang terkumpul.

Untuk mendukung efektivitas pengelolaan, peran Penyuluh Bahasa Bali dioptimalkan dalam proses pendataan dan dokumentasi. Selain itu, penugasan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Pamong Budaya sebagai koordinator menjadi langkah penting untuk memastikan validasi, pemutakhiran data, dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, data dalam Ceraken senantiasa terbarui dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebijakan kebudayaan.

Melalui pemanfaatan teknologi digital, Ceraken Kebudayaan Bali menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya. Sistem ini tidak hanya mempermudah pengarsipan dan publikasi, tetapi juga memperluas akses terhadap kekayaan budaya Bali, sehingga dapat terus dikenal, dipelajari, dan diapresiasi oleh generasi masa kini dan mendatang.

2.2.5.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks pembangunan kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, indeks pembangunan kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, tetapi untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Adapun pembangunan kebudayaan tingkat Provinsi Bali menurut dimensi tahun 2019–2024, seperti pada Gambar 2.34 dan Tabel 2.54 berikut.



Gambar 2.34 Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional dan Provinsi Bali
Sumber: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Tabel 2.54
Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi Menurut Dimensi
Tahun 2019–2024

Nama Dimensi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ekonomi Budaya	58,95	42,50	29,41	43,15	67,90	N/A
Pendidikan	79,76	79,83	72,85	78,04	81,64	N/A
Ketahanan Sosial Budaya	83,77	85,68	76,75	77,53	78,52	N/A
Warisan Budaya	54,54	50,91	54,67	60,92	65,33	N/A
Ekspresi Budaya	73,25	61,94	52,99	59,58	65,80	N/A
Budaya Literasi	67,91	71,26	62,99	63,75	65,48	N/A
Gender	54,85	60,03	60,33	61,02	61,46	N/A
IPK Provinsi Bali	**69,09**	**66,40**	**61,14**	**66,04**	**71,36**	N/A

Sumber: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
URL: https://ipk.kemdikbud.go.id/provinsi/51

Tabel 2.54 atas menggambarkan dinamika pembangunan kebudayaan di Provinsi Bali selama periode 2019-2024 berdasarkan tujuh dimensi pengukuran. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Bali mengalami fluktuasi signifikan, dari 69,09 pada 2019, menurun menjadi 66,40 (2020) dan 61,14 (2021), kemudian pulih

menjadi 66,04 (2022) dan mencapai puncaknya pada 71,36 (2023). Penurunan tajam terjadi pada dimensi Ekonomi Budaya yang anjlok dari 58,95 (2019) menjadi hanya 29,41 (2021), mencerminkan dampak dramatis pandemi *COVID-19* terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Bali, namun kemudian menunjukkan pemulihan mengesankan hingga 67,90 pada 2023. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya konsisten menjadi aspek tertinggi meskipun mengalami penurunan dari 83,77 (2019) menjadi 78,52 (2023). Sementara dimensi Pendidikan, setelah mengalami penurunan moderat, berhasil pulih dan mencapai nilai tertinggi 81,64 pada 2023. Fluktuasi tersebut diakibatkan oleh beberapa kegiatan budaya (seperti Pesta Kesenian Bali, Festival Seni Bali Jani, Bulan Bahasa Bali) tidak berjalan dikarenakan *COVID-19*. Pada tahun 2021, kegiatan budaya tersebut telah kembali berjalan, namun belum bisa optimal seperti sebelum pandemi. Hingga tahun 2024, nilai IPK belum dirilis sehingga IPK tahun 2024 pada tabel berstatus N/A.

Saat ini di Provinsi Bali telah terbentuk Majelis Kebudayaan Bali (MKB) dan pada Tahun 2024 diselenggarakan Kongres Kebudayaan Bali IV, yang menghasilkan 23 rumusan dan 14 poin rekomendasi. Rekomendasi tersebut merupakan jembatan untuk menginisiasi program-program kebudayaan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali terkait dengan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Dalam kongres ini juga membahas 10 objek pemajuan kebudayaan serta menghasilkan Pola Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Bali (PKPKB), sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kebudayaan 2025-2030.

Kebijakan bidang kebudayaan di Provinsi Bali memaparkan ringkasan capaian 2020–2025 serta peta jalan strategis 2025–2030 yang dirancang untuk menjamin keberlanjutan, adaptasi, dan pemanfaatan budaya lokal melalui empat unsur pemajuan kebudayaan, mencakup pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 sebagai landasan regulatif dan menetapkan sepuluh objek prioritas (tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, kesenian, bahasa, permainan rakyat & olahraga tradisional, serta cagar budaya), dan mencatat inisiatif kelembagaan seperti pembentukan Majelis Kebudayaan Bali, peluncuran Ceraken Budaya, serta revitalisasi arena pertunjukan publik (Pesta Kesenian Bali dan Festival Seni Bali Jani) sebagai instrumen konsolidasi sumber daya budaya.

Peta jalan 2025–2030 merumuskan strategi operasional yang konkret di tiap unsur: (1) pelindungan melalui registrasi kekayaan intelektual, audit dan legalisasi kawasan cagar budaya, digitalisasi artefak, serta revitalisasi hukum adat (*awig-awig*); (2) pengembangan

melalui kurikulum muatan lokal, inkubasi seniman muda, adopsi teknologi budaya, seperti VR, animasi, NFT, dan kolaborasi riset; (3) pemanfaatan melalui ekonomi kreatif berbasis budaya, pariwisata berbasis komunitas, galeri/pertunjukan digital, dan pendidikan lintas-sektor; serta (4) pembinaan melalui pelatihan prajuru adat, sertifikasi kompetensi budaya, penguatan organisasi seni, dan pemberdayaan duta pemuda.

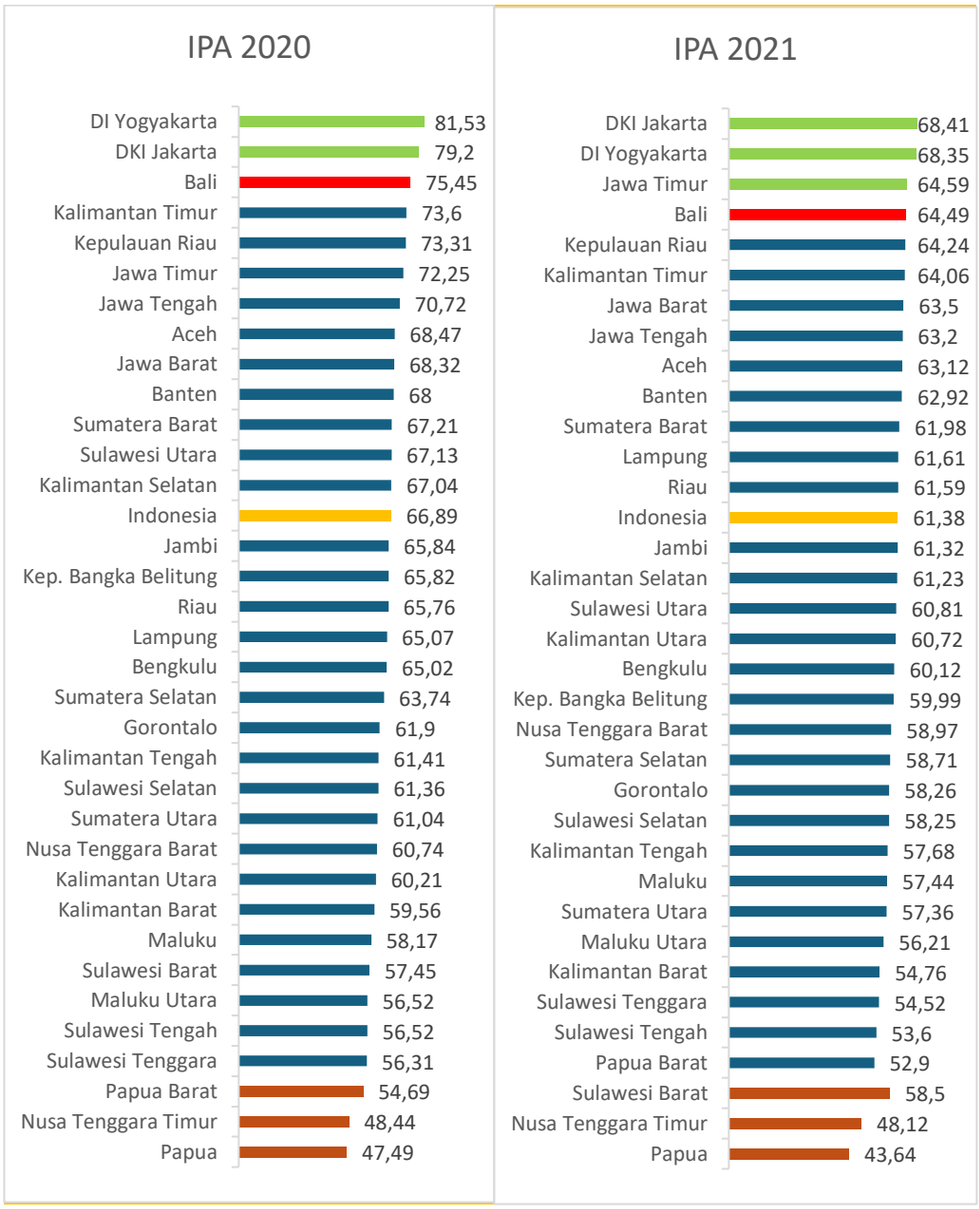
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyrakat Inklusif

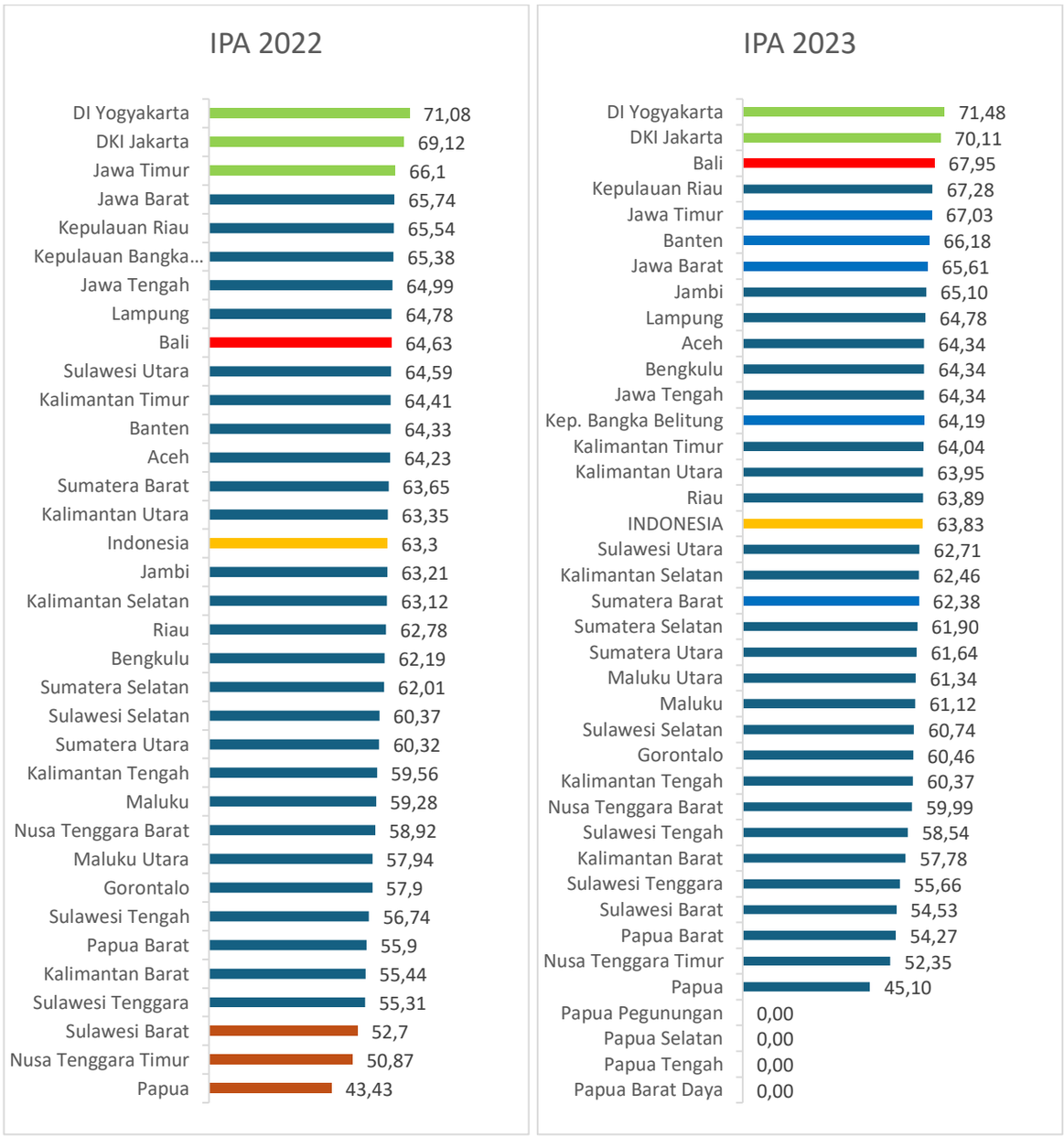
2.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak

Sejak tahun 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Badan Pusat Statistik telah menggagas pengembangan indeks yang menjadi ukuran bagi pencapaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia. Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Sementara itu, ukuran pemenuhan hak anak dapat dilihat melalui Indeks Permenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar. IPA-IPHA-IPKA menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat ataupun daerah. IPA disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, ataupun perlindungan khusus anak.

Hasil capaian IPA secara nasional mengalami penurunan dari 66,89 tahun 2020 menjadi 61,38 di tahun 2021. Namun, IPA nasional kembali mengalami tren peningkatan di tahun 2022 sebesar 63,3 serta di tahun 2023 sebesar 63,83.

Tiga provinsi dengan capaian IPA tertinggi juga mengalami perubahan urutan pada setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2020 Provinsi D.I. Yogyakarta (81,53), DKI Jakarta (79,20), dan Bali (75,45). Sementara itu, pada tahun 2021, yaitu DKI Jakarta (68,41), DI Yogyakarta (68,35), dan Bali (64,59). Tahun 2022, yakni Provinsi DI Yogyakarta (71,08), Provinsi DKI Jakarta (69,12), dan Provinsi Bali (66,1). Pada tahun 2023, provinsi tiga besar dalam raihan IPA terbaik adalah Provinsi DI Yogyakarta (71,48), Provinsi DKI Jakarta (70,11) dan posisi ketiga adalah Provinsi Bali (67,95). Secara detailnya mengenai IPA atau Indeks Perlindungan Anak di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.35 sebagai berikut.


IPA 2020
DI Yogyakarta 81,53
DKI Jakarta 79,2
Bali 75,45
Kalimantan Timur 73,6
Kepulauan Riau 73,31
Jawa Timur 72,25
Jawa Tengah 70,72
Aceh 68,47
Jawa Barat 68,32
Banten 68
Sumatera Barat 67,21
Sulawesi Utara 67,13
Kalimantan Selatan 67,04
Indonesia 66,89
Jambi 65,84
Kep. Bangka Belitung 65,82
Riau 65,76
Lampung 65,07
Bengkulu 65,02
Sumatera Selatan 63,74
Gorontalo 61,9
Kalimantan Tengah 61,41
Sulawesi Selatan 61,36
Sumatera Utara 61,04
Nusa Tenggara Barat 60,74
Kalimantan Utara 60,21
Kalimantan Barat 59,56
Maluku 58,17
Sulawesi Barat 57,45
Maluku Utara 56,52
Sulawesi Tengah 56,52
Sulawesi Tenggara 56,31
Papua Barat 54,69
Nusa Tenggara Timur 48,44
Papua 47,49
IPA 2021
DKI Jakarta 68,41
DI Yogyakarta 68,35
Jawa Timur 64,59
Bali 64,49
Kepulauan Riau 64,24
Kalimantan Timur 64,06
Jawa Barat 63,5
Jawa Tengah 63,2
Aceh 63,12
Banten 62,92
Sumatera Barat 61,98
Lampung 61,61
Riau 61,59
Indonesia 61,38
Jambi 61,32
Kalimantan Selatan 61,23
Sulawesi Utara 60,81
Kalimantan Utara 60,72
Bengkulu 60,12
Kep. Bangka Belitung 59,99
Nusa Tenggara Barat 58,97
Sumatera Selatan 58,71
Gorontalo 58,26
Sulawesi Selatan 58,25
Kalimantan Tengah 57,68
Maluku 57,44
Sumatera Utara 57,36
Maluku Utara 56,21
Kalimantan Barat 54,76
Sulawesi Tenggara 54,52
Sulawesi Tengah 53,6
Papua Barat 52,9
Sulawesi Barat 58,5
Nusa Tenggara Timur 48,12
Papua 43,64



Gambar 2.35
Indeks Perlindungan Anak Tahun 2020-2023 se-Indonesia
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URL: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/38/3034/indeks-perlindungan-

Analisis data Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Bali periode 2020-2023 menunjukkan fluktuasi signifikan dengan pola penurunan awal diikuti pemulihan bertahap. Pada tahun 2020, Bali menduduki posisi ketiga secara nasional dengan nilai 75,45, namun mengalami penurunan substansial sebesar 10,96 poin menjadi 64,49 pada tahun 2021 yang menggeser posisinya ke peringkat keempat. Tren penurunan ini sejalan dengan kecenderungan nasional pasca pandemi *COVID-19* yang berdampak pada berbagai aspek perlindungan anak. Selanjutnya, periode 2022 menunjukkan

stabilisasi dengan peningkatan marginal menjadi 64,63, meskipun terjadi penurunan peringkat ke posisi kesembilan yang mengindikasikan bahwa provinsi lain mengalami pemulihan lebih cepat. Tahun 2023 menandai kebangkitan signifikan dengan nilai meningkat menjadi 67,95 yang mengembalikan Bali ke posisi ketiga nasional. Meskipun belum mencapai level pra-pandemi, tren pemulihan ini mencerminkan efektivitas kebijakan intervensi serta komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan kesejahteraan dan perlindungan anak, sekaligus mengindikasikan resiliensi sistem perlindungan anak di Bali dalam menghadapi disrupsi sosio-ekonomi.

Tabel 2.55
Indeks Perlindungan Anak Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2019-2023

Tahun	Cakupan	Hak Sipil dan Kebebasan	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
2019	Bali	64,92	79,42	86,63
	Nasional	54,81	74,24	73,22
2020	Bali	68,00	80,43	87,32
	Nasional	57,75	74,74	74,51
2021	Bali	51,19	81,41	88,22
	Nasional	46,74	76,68	76,47
2022	Bali	50,62	90,09	88,52
	Nasional	49,04	78,64	77,15
2023	Bali			
	Nasional	47,68	80,32	77,90

Lanjutan Tabel 2.55

Tahun	Cakupan	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan	Perlindungan Khusus	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
2019	Bali	70,68	69,20	**73,99**
	Nasional	51,28	75,24	**66,26**
2020	Bali	75,12	67,80	**75,45**
	Nasional	54,27	71,44	**66,89**
2021	Bali	34,54	64,77	**64,49**
	Nasional	30,99	71,89	**61,38**
2022	Bali	37,55	64,50	**64,63**
	Nasional	33,96	73,61	**63,30**
2023	Bali			**67,95**
	Nasional	34,56	74,45	**63,83**

Sumber: SIGA KEMENPPPA
URL:https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=aW5kaWthdG9yfHwzN3x8QU5BS3x8MTY3fHxJUEEsSVBIQSxJUEtB

Data Indeks Perlindungan Anak (IPA) periode 2019-2023 menunjukkan dinamika perlindungan anak di Bali yang konsisten berada di atas rata-rata nasional, meskipun mengalami fluktuasi signifikan. IPA Bali mencapai puncaknya pada 2020 (75,45), lalu mengalami penurunan tajam menjadi 64,49 pada 2021, dan mulai pulih hingga 67,95 pada 2023. Tren serupa terjadi pada rata-rata

nasional, namun dengan ketahanan lebih rendah (66,89 pada 2020 menjadi 61,38 pada 2021). Analisis per dimensi mengungkapkan keprihatinan serius pada aspek "Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan" yang anjlok drastis dari 70,68 (2019) menjadi hanya 34,56 (2023), mencerminkan dampak signifikan disrupsi pendidikan akibat pandemi. Dimensi "Hak Sipil dan Kebebasan" juga menunjukkan tren menurun yang konsisten hingga 47,68 pada 2023. Sebaliknya, Bali mempertahankan keunggulan signifikan pada dimensi "Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan" (88,32) dan "Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif" (80,32). Menariknya, dimensi "Perlindungan Khusus" adalah satu-satunya aspek di mana rata-rata nasional sempat mengungguli Bali, namun keduanya konvergen pada nilai 74,45 di 2023. Data ini mengindikasikan perlunya intervensi strategis pada sektor pendidikan dan penguatan hak sipil anak, sekaligus mempertahankan pencapaian positif di bidang kesehatan dan pengasuhan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan anak di Provinsi Bali.

2.2.6.2 Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga atau IKK merupakan indikator dalam mengukur peningkatan kualitas keluarga yang dapat digunakan sebagai tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Hasil capaian IKK juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan kualitas keluarga dan mengarahkan pada intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun indeks kualitas keluarga di Provinsi Bali seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2020-2023

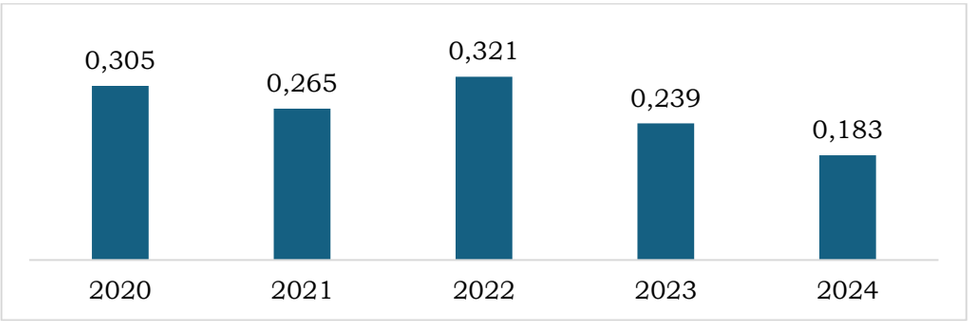
Tahun	Cakupan	Komponen Kualitas Legalitas-Struktur	Komponen Kualitas Ketahanan Fisik	Komponen Kualitas Ketahanan Ekonomi	Komponen Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	Komponen Kualitas Ketahanan Sosial - Budaya	Nilai IKK Total
2020	Bali	82,40	75,67	78,74	64,11	65,65	74,48
	Nasional	82,13	69,72	71,40	65,32	60,62	70,93
2021	Bali	83,93	81,52	79,40	62,43	70,33	76,80
	Nasional	81,86	78,77	71,58	62,38	65,39	73,43
2022	Bali	91,93	83,77	83,38	77,25	74,18	83,17
	Nasional	87,45	78,66	73,08	70,00	67,17	76,53
2023	Bali	86,79	81,98	83,70	76,56	71,17	81,23
	Nasional	86,39	78,78	75,46	71,07	66,23	77,00

Sumber: SIGA KEMENPPPA
URL:https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=aW5kaWthdG9yfHwzOHx8UEVSRU1QVUFOfHwxODR8fElOREVLUyBLVUFMSVRBUyBLRUxVQVJHQSAoSUtLKQ==

Tabel 2.56 mengungkapkan perkembangan signifikan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Bali selama periode 2020-2023, yang konsisten melampaui rata-rata nasional. IKK Bali mengalami peningkatan substansial dari 74,48 (2020) menjadi 81,23 (2023), dengan pencapaian tertinggi 83,17 pada 2022. Komponen Kualitas Legalitas-Struktur menjadi dimensi terkuat Bali dengan nilai tertinggi 91,93 pada 2022, mencerminkan penguatan aspek formal dan struktural keluarga. Perbaikan paling dramatis terlihat pada Komponen Ketahanan Sosial-Psikologi yang meningkat dari 64,11 (2020) menjadi 76,56 (2023), mengindikasikan penguatan signifikan pada aspek psikososial keluarga pasca-pandemi. Ketahanan Ekonomi juga menunjukkan tren positif konsisten, mencapai 83,70 pada 2023, jauh di atas rata-rata nasional 75,46. Menariknya, meskipun IKK Bali mengalami sedikit penurunan pada 2023 dibandingkan 2022, selisihnya dengan rata-rata nasional justru melebar (81,23 dibanding 77,00). Pola ini menunjukkan bahwa keluarga-keluarga di Bali memiliki fondasi ketahanan yang lebih kuat dibandingkan rata-rata nasional di semua komponen, dengan keunggulan terbesar pada aspek fisik dan ekonomi, mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pembangunan keluarga di Provinsi Bali.

2.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender

Analisis Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Bali periode 2020-2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari 0,305 menjadi 0,183, mengindikasikan kemajuan substantif dalam kesetaraan gender meskipun terjadi fluktuasi pada tahun 2022 (0,321).



Gambar 2.36
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Bali
Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/717960/indeks-ketimpangan-gender--ikg--provinsi-bali-2024.html

Secara *spasial*, terdapat disparitas antarwilayah yang konsisten dengan pola pembangunan sosial-ekonomi; kawasan urban seperti Denpasar (0,200), Badung (0,186), dan Gianyar (0,175) menunjukkan ketimpangan gender yang lebih rendah dibandingkan wilayah perdesaan seperti Buleleng (0,353) dan Karangasem (0,246), dengan selisih mencapai 0,178 poin. Dilihat dari tren temporal, seluruh kabupaten/kota mengalami perbaikan dengan persentase penurunan tertinggi di Denpasar (42,5%) dan terendah di Buleleng (12,4%), sementara anomali terjadi pada beberapa daerah dengan peningkatan sementara pada tahun 2022 yang mengindikasikan dampak ketidaksetaraan pascapandemi. Pola ini mencerminkan efektivitas kebijakan responsif gender yang terintegrasi dengan strategi pembangunan wilayah, meskipun masih dibutuhkan intervensi yang lebih targetif pada kawasan perdesaan dan pesisir yang masih tertinggal, khususnya dalam dimensi akses pendidikan, kesehatan reproduksi, dan partisipasi ekonomi yang menjadi determinan utama kesenjangan gender.

Tabel 2.57
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	0,365	0,320	0,206	0,211	0,211
Tabanan	0,236	0,148	0,180	0,170	0,178
Badung	0,142	0,130	0,118	0,126	0,186
Gianyar	0,216	0,204	0,193	0,193	0,175
Klungkung	0,149	0,193	0,198	0,186	0,210
Bangli	0,362	0,261	0,257	0,249	0,233
Karangasem	0,401	0,297	0,358	0,284	0,246
Buleleng	0,405	0,421	0,462	0,389	0,353
Denpasar	0,348	0,212	0,303	0,288	0,200
Provinsi Bali	**0,305**	**0,265**	**0,321**	**0,239**	**0,183**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/717960/indeks-ketimpangan-gender--ikg--provinsi-bali-2024.html

2.2.6.4 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator penting yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Data IDG Provinsi Bali periode 2020-2024 menunjukkan tren positif dengan peningkatan konsisten dari 72,16 pada tahun 2020 menjadi 74,38 pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	74,39	74,55	72,40	72,44	72,94
Tabanan	77,95	78,27	78,51	78,07	75,48
Badung	75,49	76,99	76,33	76,08	64,20

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Gianyar	66,14	65,64	68,58	68,82	73,38
Klungkung	78,36	75,50	75,75	76,07	69,98
Bangli	65,16	65,36	65,69	65,57	69,06
Karangasem	63,61	65,09	64,59	65,79	72,31
Buleleng	72,89	72,91	73,73	72,57	66,71
Denpasar	67,26	67,02	67,21	69,22	67,40
Provinsi Bali	**72,16**	**72,17**	**72,29**	**73,77**	**74,38**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:http://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM0IzI=/indeks-pemberdayaan-gender--idg--provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html

Kabupaten Tabanan secara konsisten mencatat IDG tertinggi di Provinsi Bali, meningkat dari 77,95 (2020) menjadi 75,48 (2024), meskipun mengalami sedikit penurunan. Sementara itu, Kabupaten Badung menunjukkan penurunan signifikan dari 75,49 (2020) menjadi 64,20 (2024), yang perlu menjadi perhatian khusus. Di sisi lain, Kabupaten Gianyar mencatat peningkatan yang cukup baik dari 66,14 (2020) menjadi 73,38 (2024).

Disparitas antarwilayah masih terlihat jelas, dengan rentang nilai IDG yang cukup lebar. Karangasem tercatat sebagai kabupaten dengan IDG terendah meskipun menunjukkan peningkatan dari 63,61 (2020) menjadi 72,31 (2024). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan gender belum merata di seluruh wilayah Bali, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendorong kesetaraan gender, khususnya di daerah-daerah dengan IDG rendah seperti Karangasem, Bangli, dan Denpasar.

2.2.6.5 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis gender melalui komponen kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Data IPG Provinsi Bali periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan peningkatan dari 93,79 pada tahun 2020 menjadi 95,10 pada tahun 2024, yang mengindikasikan semakin mengecilnya kesenjangan gender dalam pembangunan. Berikut perkembangan IPG di Provinsi Bali.

Tabel 2.59
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	93,38	93,86	94,43	94,52	94,90
Tabanan	95,36	95,42	95,45	95,72	95,95
Badung	95,51	95,53	95,65	95,94	96,16
Gianyar	94,63	94,70	94,72	95,09	95,14
Klungkung	91,12	91,18	91,37	91,79	92,18
Bangli	91,54	91,58	91,86	92,23	92,58
Karangasem	88,93	88,96	89,90	90,17	90,67
Buleleng	91,59	91,65	91,85	91,99	92,24

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Denpasar	96,77	96,88	96,92	96,68	96,77
Provinsi Bali	**93,79**	**94,01**	**94,36**	**94,59**	**95,10**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMyIzI=/indeks-pembangunan-gender--ipg--provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html

Kota Denpasar konsisten mempertahankan posisi teratas dengan IPG tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Bali, meskipun mengalami fluktuasi minor dari 96,77 (2020) menjadi 96,77 (2024). Kabupaten Badung dan Tabanan juga menunjukkan pencapaian yang baik dengan nilai IPG di atas 95. Prestasi ini mencerminkan keberhasilan daerah perkotaan dan kabupaten yang lebih maju dalam menyediakan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi.

Meskipun demikian, disparitas antarwilayah masih menjadi tantangan. Kabupaten Karangasem tercatat memiliki IPG terendah, walaupun mengalami peningkatan dari 88,93 (2020) menjadi 90,67 (2024). Kabupaten Bangli dan Klungkung juga masih berada di bawah rata-rata provinsi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan disparitas gender belum merata di seluruh wilayah Bali, sehingga diperlukan intervensi kebijakan afirmatif yang lebih intensif di daerah-daerah tertinggal untuk memastikan kesetaraan akses dan kesempatan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang gender.

2.2.6.6 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Kualitas pemuda terutama dapat dilihat dari capaian pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan deskriminasi. Lima domain dasar di atas merupakan alat ukur pembangunan pemuda sebagai indeks pembangunan pemuda (IPP). Adapun indeks pembangunan pemuda di Provinsi Bali seperti terlihat pada Tabel 2.60 berikut.

Tabel 2.60
Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Bali
Tahun 2019-2023

Domain	Indeks Pembangunan Pemuda					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	N/A
Kesehatan dan Kesejahteraan	65,00	60,00	75,00	80,00	75,00	N/A
Lapangan Kerja dan Kesempatan Kerja	60,00	65,00	55,00	50,00	55,00	N/A

Domain	Indeks Pembangunan Pemuda					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Partisipasi dan Kepemimpinan	50,00	50,00	43,33	43,33	46,67	N/A
Gender dan Diskriminasi	60,00	56,67	60,00	63,33	63,33	N/A
Indeks Pembangunan Pemuda	**61,67**	**61,00**	**61,33**	**62,00**	**62,67**	N/A

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga
URL: https://ipp.sarikata.com/?t=2023

Analisis Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Bali periode 2019-2023 menunjukkan tren positif meskipun inkremental, dengan peningkatan dari 61,67 (2019) menjadi 62,67 (2023). Evaluasi berbasis domain mengungkapkan dinamika yang kontradiktif: domain Pendidikan menunjukkan stabilitas absolut pada angka 73,33 sepanjang periode observasi, mengindikasikan konsistensi kebijakan pendidikan; sementara domain Kesehatan dan Kesejahteraan mengalami fluktuasi signifikan dengan penurunan di masa awal pandemi (60,00 pada 2020) sebelum mencapai puncak pada 2022 (80,00). Kontras dengan tren positif tersebut, domain Lapangan Kerja dan Kesempatan Kerja mengalami deteriorasi substansial dari 65,00 (2020) menjadi 50,00 (2022) yang mencerminkan dampak disruptif pandemi terhadap sektor ketenagakerjaan, meskipun mulai menunjukkan pemulihan moderat pada 2023 (55,00). Domain Partisipasi dan Kepemimpinan konsisten menjadi komponen terendah (46,67 pada 2023) meskipun menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara domain Gender dan Diskriminasi memperlihatkan kemajuan bertahap dari 56,67 (2020) menjadi 63,33 (2023). Pola tersebut mengindikasikan resiliensi sistem pembangunan pemuda di Bali dalam menghadapi guncangan eksternal, namun sekaligus menyoroti kebutuhan akan intervensi kebijakan yang lebih holistik, terutama dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan dan partisipasi pemuda dalam proses pengambilan keputusan.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1 Angka Ketergantungan

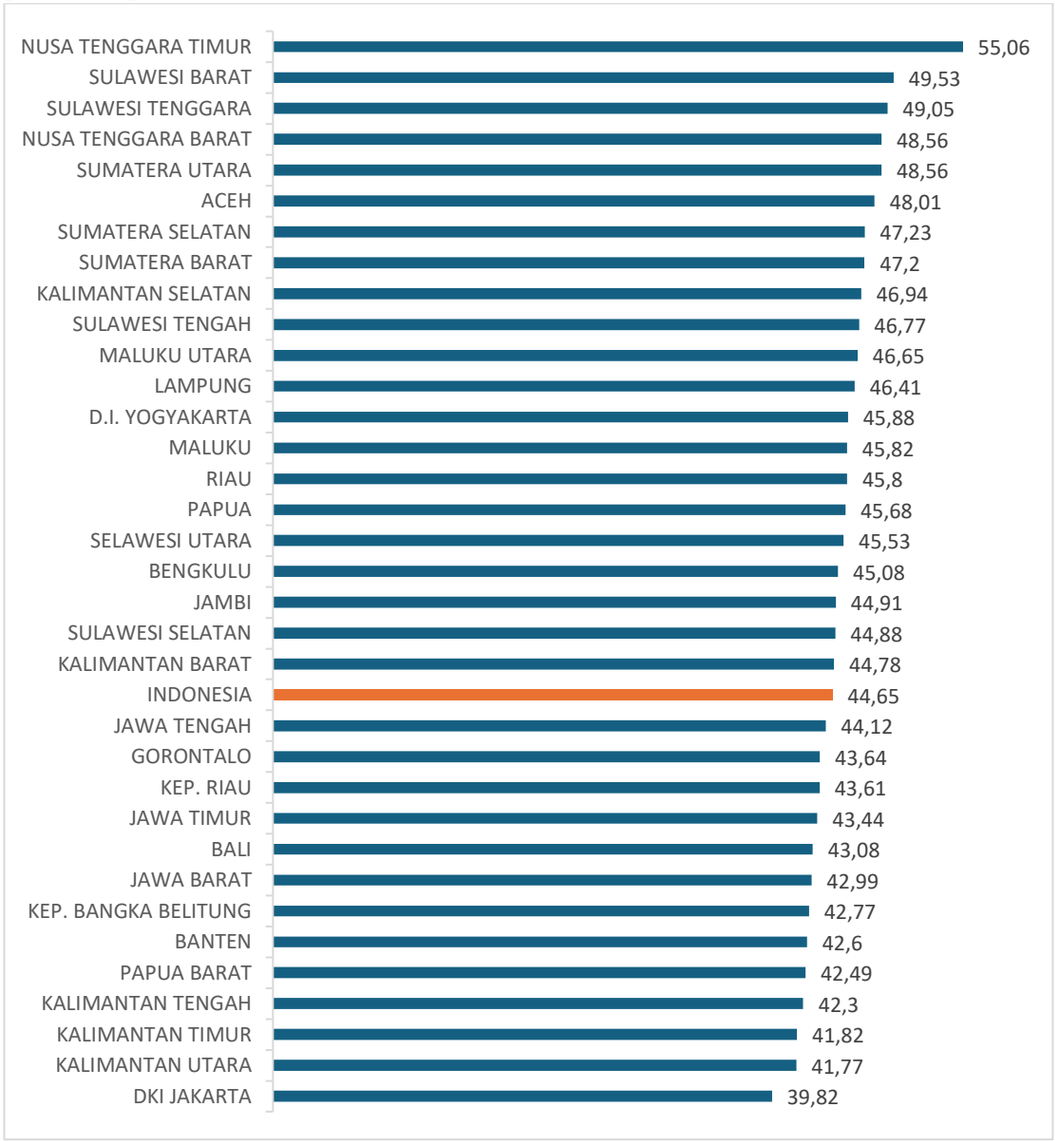
Berdasarkan data yang disajikan dalam grafik, terlihat bahwa Provinsi Bali memiliki angka ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 43,08, yang menempatkannya di bawah rata-rata nasional Indonesia (44,65) dan berada pada peringkat relatif rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Angka ketergantungan merupakan indikator demografis yang mencerminkan beban ekonomi yang ditanggung oleh populasi produktif, yakni perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun), dinyatakan per 100 penduduk usia kerja.

Posisi Bali ini mengindikasikan struktur demografis yang relatif menguntungkan dalam konteks pembangunan ekonomi, dengan proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif.

Dalam perspektif teori transisi demografis, kondisi ini mencerminkan fase di mana Bali sedang mengalami bonus demografi, suatu periode ketika rasio ketergantungan rendah dan potensi pertumbuhan ekonomi tinggi karena melimpahnya tenaga kerja produktif. Fenomena ini berimplikasi pada beberapa aspek penting: pertama, dari sisi ekonomi makro, Bali memiliki potensi tabungan dan investasi yang lebih tinggi karena beban ekonomi untuk menanggung penduduk non-produktif relatif lebih rendah; kedua, dari perspektif pasar tenaga kerja, terdapat ketersediaan angkatan kerja yang cukup besar yang dapat mendorong produktivitas ekonomi jika dioptimalkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas; ketiga, secara sosiologis, struktur demografis ini mencerminkan perubahan pola fertilitas dan mortalitas yang berkaitan dengan perubahan sosial-ekonomi masyarakat Bali, termasuk urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, dan partisipasi perempuan dalam pasar kerja. Jika dibandingkan dengan provinsi yang memiliki angka ketergantungan tertinggi, Nusa Tenggara Timur (55,06), dan terendah, DKI Jakarta (39,82), posisi Bali menunjukkan tahap transisi demografis yang relatif maju namun masih memiliki ruang untuk optimalisasi bonus demografi, terutama mengingat karakteristik ekonomi Bali yang didominasi oleh sektor pariwisata. Sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali kemungkinan berkontribusi pada strukturisasi demografis tersebut melalui migrasi masuk penduduk usia kerja dari daerah lain untuk bekerja di industri pariwisata dan turunannya.

Dari perspektif kebijakan publik, kondisi ini memberikan peluang strategis bagi pemerintah Provinsi Bali untuk merumuskan kebijakan yang dapat memaksimalkan bonus demografi tersebut, seperti investasi di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pariwisata, serta perencanaan jangka panjang untuk mengantisipasi perubahan struktur demografi di masa depan ketika rasio ketergantungan meningkat akibat penuaan penduduk. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa angka ketergantungan memiliki keterbatasan sebagai indikator tunggal karena tidak memperhitungkan variasi produktivitas dalam kelompok usia kerja dan tidak mencerminkan secara spesifik kontribusi ekonomi dari populasi lansia yang masih aktif secara ekonomi atau beban tambahan dari pengangguran dalam kelompok usia produktif. Oleh karena itu, analisis komprehensif perlu mempertimbangkan indikator sosial-ekonomi lainnya, seperti tingkat

partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran, dan distribusi pendapatan, untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika demografis dan implikasinya terhadap pembangunan Provinsi Bali.



Gambar 2.37
Rasio Ketergantungan Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2023
Sumber: Laporan Kependudukan Indonesia 2024
URL:http://siperindu.online/2023/pb/unduh_file/Laporan%20Kependudukan%20Indonesia%20-%20IND.pdf

2.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1 PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha merupakan indikator ekonomi makro yang menggambarkan nilai tambah bruto dari seluruh aktivitas ekonomi di wilayah Provinsi Bali yang diukur menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan.

Indikator ini mencakup 17 kategori lapangan usaha utama yang berkontribusi terhadap perekonomian Bali. Berdasarkan data tahun 2022-2024, total PDRB Provinsi Bali menunjukkan peningkatan dari Rp 245,36 triliun menjadi Rp 298,441 triliun, mencerminkan pertumbuhan ekonomi nominal sebesar 21,63%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.61 berikut.

Tabel 2.61
PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Tahun 2022-2024

PDRB Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36013,89	37709,95	40059,24
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	24376,64	25582,23	27303,95
a. Tanaman Pangan	4055,12	4230,71	4240,07
b. Tanaman Hortikultura	4422,23	4623,44	4875,68
c. Perkebunan	3616,22	3734,89	4001,07
d. Peternakan	11769,44	12465,15	13645,57
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	513,62	528,03	541,57
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	9,34	9,47	9,47
3. Perikanan	11627,91	12118,25	12745,82
B. Pertambangan dan Penggalian	2312,14	2436,62	2549,77
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-
3. Pertambangan Bijih Logam	-	-	-
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2312,14	2436,62	2549,77
C. Industri Pengolahan	16142,99	17102,94	18637,07
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-
2. Industri Makanan dan Minuman	7573,05	8250,93	9709,08
3. Pengolahan Tembakau	68,53	65,02	66,43
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1012,8	988,12	1012,5
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	356,38	375,44	394,56
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	4316,33	4489,93	4419,47
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	64,35	70,04	72,81
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	158,24	170,81	175,9
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	268,55	271,87	273,06
10. Industri Barang Galian bukan Logam	831,21	888,44	925,16

PDRB Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
11. Industri Logam Dasar	-	-	-
12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	163,19	166,19	172,31
13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	8,2	8,51	8,27
14. Industri Alat Angkutan	4,73	4,84	4,73
15. Industri Furnitur	967,81	984,1	991,11
16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	349,64	368,7	411,67
D. Pengadaan Listrik dan Gas	553,54	640,75	717,47
1. Ketenagalistrikan	547,61	634,12	710,2
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	5,93	6,63	7,27
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	421,65	446,94	459
F. Konstruksi	26128,7	26805,93	27567,3
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22550,76	24591,4	25933,89
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	4545,58	4784,81	4993,48
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	18005,18	19806,59	20940,41
H. Transportasi dan Pergudangan	18896,61	27656,96	30615,66
1. Angkutan Rel	-	-	-
2. Angkutan Darat	2227,21	2567,6	2920,47
3. Angkutan Laut	224,48	237,57	242,35
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	4275,1	4691,07	5123,39
5. Angkutan Udara	10459,38	17774,74	19745,26
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1710,44	2385,97	2584,2
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	44112,1	54680,18	63912,74
1. Penyediaan Akomodasi	21901,3	29900,19	36302,9
2. Penyediaan Makan Minum	22210,8	24780	27609,84
J. Informasi dan Komunikasi	15028,83	15517,17	16101,49
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	11486,41	13277,2	15457,62
1. Jasa Perantara Keuangan	9883,13	11492,35	13500,46
2. Asuransi dan Dana Pensiun	621,48	700,31	769,68
3. Jasa Keuangan Lainnya	977,41	1079,67	1182,11
4. Jasa Penunjang Keuangan	4,38	4,88	5,38
L. Real Estate	10683,39	11055,53	11449,02
M, N. Jasa Perusahaan	2866,67	3164,35	3455,35
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13646,46	13888,8	14933,54
P. Jasa Pendidikan	13614,5	13669,13	14228,76

PDRB Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6485,86	6805,15	7066,96
R, S, T, U. Jasa lainnya	4423,39	4909,17	5296,62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	245367,9	274358,2	298441,5

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzYzIzI=/pdrb-tahunan-provinsi-bali-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html

Tabel 2.61 menyajikan data komprehensif mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha periode 2022-2024. Analisis struktural perekonomian Bali menunjukkan trajektori pertumbuhan yang konsisten dengan PDRB meningkat dari Rp245.367,9 miliar pada 2022 menjadi Rp274.358,2 miliar pada 2023 (pertumbuhan 11,82%), dan selanjutnya mencapai Rp298.441,5 miliar pada 2024 (pertumbuhan 8,78%). Secara kumulatif, ekonomi Bali mengalami ekspansi sebesar 21,63% selama periode observasi, yang mengindikasikan pemulihan signifikan pasca-pandemi *COVID-19*.

Dari perspektif sektoral, data mengungkapkan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pariwisata dan turunannya. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatatkan kontribusi terbesar dengan nilai Rp44.112,1 miliar (17,98% dari total PDRB) pada 2022, meningkat signifikan menjadi Rp63.912,74 miliar (21,42%) pada 2024, dengan pertumbuhan kumulatif mencapai 44,89%. Dinamika ini mencerminkan revitalisasi sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian Bali. Sektor Transportasi dan Pergudangan juga menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang mencolok dari Rp18.896,61 miliar pada 2022 menjadi Rp30.615,66 miliar pada 2024 (pertumbuhan 62,02%), dengan sub-sektor Angkutan Udara sebagai kontributor dominan yang meningkat dari Rp10.459,38 miliar menjadi Rp19.745,26 miliar (88,78%).

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sebagai basis tradisional ekonomi Bali, tetap menunjukkan resiliensi dengan peningkatan moderat dari Rp36.013,89 miliar pada 2022 menjadi Rp40.059,24 miliar pada 2024 (pertumbuhan 11,23%). Namun, secara proporsional, kontribusinya terhadap PDRB mengalami penurunan relatif dari 14,68% menjadi 13,42%, yang mengindikasikan transformasi struktural menuju ekonomi berbasis jasa. Sektor industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan dari Rp16.142,99 miliar menjadi Rp18.637,07 miliar (15,45%), dengan industri makanan dan minuman sebagai sub-sektor dominan, sejalan dengan interkonektivitasnya dengan sektor pariwisata.

Fenomena yang menarik terlihat pada distribusi pertumbuhan antar sektor, dimana sektor-sektor yang terintegrasi dengan ekosistem pariwisata seperti Transportasi, Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Keuangan menunjukkan akselerasi pertumbuhan di atas rata-rata. Sementara itu, sektor-sektor tradisional seperti Pertanian dan Industri Pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat. Pola ini mengkonfirmasi hipotesis restrukturisasi ekonomi Bali yang semakin berorientasi pada jasa pariwisata dan aktivitas penunjangnya, dengan implikasi penting terhadap strategi diversifikasi ekonomi dan resiliensi terhadap guncangan eksternal. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan, urgensi peningkatan produktivitas sektor-sektor tradisional dan diversifikasi basis ekonomi menjadi imperatif strategis dalam kerangka pembangunan ekonomi regional Bali yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.3.2.2 Rasio Kewirausahaan

Dalam upaya memajukan perekonomian suatu negara atau daerah, meningkatkan kuantitas dan kualitas wirausahawan menjadi variabel penting. Upaya-upaya meningkatkan kualitas wirausahawan berdasarkan teori manajemen global telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Indikator yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas wirausahawan adalah kesediaan untuk mengambil risiko, inovatif, kreatif, berintegritas, dan komunikatif serta percaya diri. Semua indikator ini secara tradisional sebetulnya dari dulu melekat pada SDM Bali. Bahkan, wirausahawan Bali memiliki indikator yang lebih banyak.

Adapun jumlah UMKM dan rasio kewirausahaan di Provinsi Bali dapat dilihat seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2.62
Jumlah UMKM dan Rasio Kewirausahaan di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

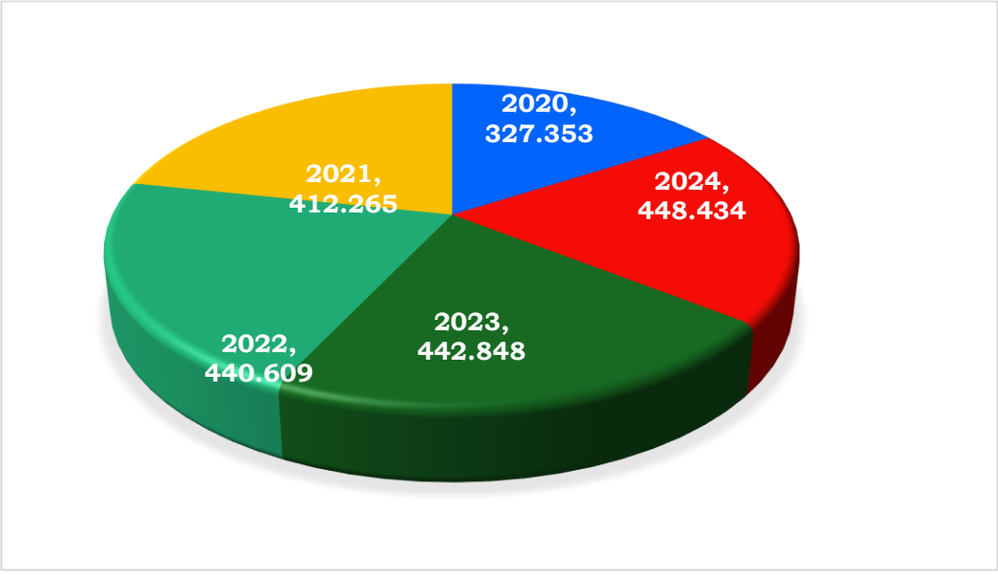
Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Buleleng	34.374	54.489	57.216	66.368	66.065
Jembrana	24.346	46.277	66.537	67.183	64.703
Tabanan	42.744	43.715	47.160	47.957	43.575
Badung	19.261	22.647	40.989	21.699	36.136
Denpasar	32.026	32.224	32.226	29.749	89.403
Gianyar	75.482	75.542	75.620	75.666	52.797
Bangli	44.068	44.123	44.693	44.251	34.729
Klungkung	14.584	35.792	36.072	35.792	19.383
Karangasem	40.468	57.456	40.614	50.717	39.870
Provinsi Bali	**327.353**	**412.265**	**440.609**	**439.382**	**448.434**
Rasio Kewirausahaan	**7,74%**	**9,45%**	**9,99%**	**3,50%**	**3,66%**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
URL:https://balisatudata.baliprov.go.id/dokumen/data-keragaan-ukm-2023?year=2023

Berdasarkan data Tabel 2.62, perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Bali selama periode 2020-2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan signifikan. Total jumlah UMKM di Bali meningkat dari 327.333 unit pada tahun 2020 menjadi 448.434 unit pada tahun 2024, yang menandakan pertumbuhan sebesar 37,01% dalam kurun waktu lima tahun. Peningkatan ini juga tercermin pada rasio kewirausahaan yang naik dari 7,74% menjadi 9,99%, atau tumbuh sebesar 3,66% secara absolut.

Distribusi UMKM antar kabupaten/kota menunjukkan ketimpangan yang cukup kentara. Denpasar sebagai ibu kota provinsi mendominasi dengan 89.403 unit UMKM pada tahun 2024, diikuti oleh Kabupaten Gianyar (52.797 unit) dan Tabanan (43.575 unit). Sementara itu, Kabupaten Klungkung tercatat memiliki jumlah UMKM paling sedikit dengan hanya 19.383 unit. Pola distribusi ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi dan kewirausahaan cenderung terkonsentrasi di daerah-daerah dengan infrastruktur yang lebih berkembang dan akses pasar yang lebih baik.

Pertumbuhan UMKM yang pesat ini mencerminkan resiliensi dan adaptasi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Bali, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi pasca-pandemi *COVID-19*. Peningkatan rasio kewirausahaan yang mendekati 10% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk Bali yang terlibat dalam kegiatan wirausaha, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan penciptaan lapangan kerja.

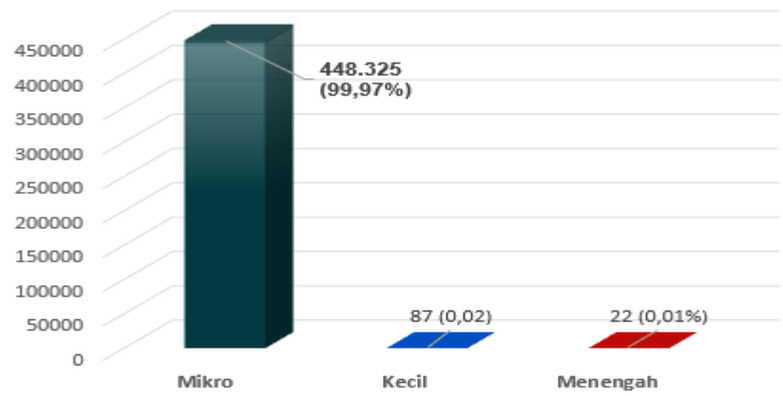


Gambar 2.38
Perkembangan UMKM di Provinsi Bali Berdasarkan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Perkembangan jumlah UMKM di Provinsi Bali menunjukkan dinamika yang menarik untuk dicermati. Lonjakan signifikan pada periode awal menandakan adanya transformasi struktural dalam perekonomian daerah, yang kemungkinan dipicu oleh perubahan pola konsumsi masyarakat dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi baru. Fenomena ini mencerminkan resiliensi dan kreativitas masyarakat Bali dalam menciptakan peluang usaha di tengah tantangan ekonomi.

Melambatnya laju pertumbuhan pada periode selanjutnya mengindikasikan terjadinya konsolidasi pasar dan maturitas sektor UMKM. Kondisi ini wajar terjadi ketika pasar mulai jenuh dan kompetisi semakin ketat. Pola pertumbuhan yang cenderung stabil ini justru menunjukkan bahwa ekosistem UMKM di Bali telah memasuki fase kematangan, di mana pertumbuhan kuantitas mulai bergeser menjadi peningkatan kualitas dan keberlanjutan usaha.

Konsistensi pertumbuhan positif selama lima tahun berturut-turut mencerminkan daya tarik Bali sebagai destinasi ekonomi yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini didukung oleh karakteristik unik Bali sebagai pusat pariwisata yang memberikan peluang pasar yang luas, serta budaya kewirausahaan yang kuat dalam masyarakat lokal. Keberlanjutan tren ini menjadi indikator positif bagi ketahanan ekonomi regional dan pemerataan kesempatan berusaha di provinsi tersebut.



Gambar 2.39
Perkembangan UMKM di Provinsi Bali Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2024
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Dominasi usaha mikro yang sangat masif dalam struktur UMKM di Provinsi Bali mencerminkan karakteristik fundamental perekonomian daerah yang masih bertumpu pada usaha-usaha berskala sangat kecil. Fenomena ini mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku usaha di Bali beroperasi dengan modal terbatas, cakupan pasar lokal, dan kapasitas produksi yang minimal. Kondisi ini umum terjadi di daerah-daerah yang ekonominya berbasis pariwisata, di mana masyarakat cenderung menjalankan usaha-usaha pendukung sektor wisata dalam skala rumah tangga.

Minimnya representasi usaha kecil dan menengah mengungkapkan adanya kesenjangan struktural dalam ekosistem bisnis Bali. Hal ini menunjukkan tantangan sistemik dalam proses *scaling up* atau peningkatan skala usaha, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas manajerial, atau kurangnya insentif untuk melakukan ekspansi usaha. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Implikasi dari struktur yang sangat timpang ini adalah kerentanan ekonomi regional terhadap guncangan eksternal. Usaha mikro umumnya memiliki daya tahan yang terbatas terhadap krisis ekonomi dan perubahan pasar. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang komprehensif untuk mendorong transformasi bertahap dari usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah, sehingga tercipta struktur ekonomi yang lebih seimbang dan resilient di masa depan.

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk umur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sebagai penduduk usia kerja termasuk dalam kelompok bekerja dan kelompok pengangguran, sedangkan penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga, maupun kegiatan lainnya. Penduduk usia kerja di Provinsi Bali tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.63 sebagai berikut.

Tabel 2.63
Penduduk Usia Kerja di Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Kabupaten/ Kota	Penduduk Usia Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	218.241	220.422	222.517	253.521	255.614
Tabanan	367.178	370.528	373.825	383.831	385.367
Badung	543.301	557.972	572.909	451.921	457.414
Gianyar	410.576	415.831	420.949	423.131	426.078
Klungkung	141.950	143.172	144.389	164.697	165.490
Bangli	178.071	179.739	181.363	207.608	208.513
Karangasem	320.931	323.773	326.632	383.824	386.393
Buleleng	509.835	514.726	519.615	627.160	632.699
Denpasar	765.044	782.927	800.943	594.512	602.318
Provinsi Bali	**3.455.127**	**3.509.090**	**3.563.142**	**3.490.205**	**3.518.886**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/indicator/6/283/1/penduduk-usia-kerja-provinsi-Bali-menurut-kabupaten-kota.html

Analisis data penduduk usia kerja di Provinsi Bali periode 2020-2024 menunjukkan dinamika demografis yang kompleks dengan tren pertumbuhan moderat di tingkat provinsi sebesar 1,85%, dari 3.455.127 jiwa menjadi 3.518.886 jiwa. Fenomena menarik teridentifikasi pada transisi 2022-2023 yang mengindikasikan adanya perubahan metodologis atau reklasifikasi administratif signifikan, terlihat dari fluktuasi tajam di beberapa kabupaten/kota. Denpasar dan Badung mengalami kontraksi substansial masing-masing sebesar 24,8% dan 21,1%, sementara Buleleng dan Karangasem mencatatkan ekspansi dramatis sebesar 20,7% dan 17,5%. Pola redistribusi *spasial* ini mengubah komposisi demografis regional dimana Buleleng menggeser posisi Badung sebagai wilayah dengan konsentrasi penduduk usia kerja tertinggi kedua setelah Denpasar. Secara keseluruhan, distribusi tenaga kerja potensial menunjukkan konsentrasi di lima wilayah utama (Denpasar, Buleleng, Badung, Gianyar, dan Karangasem) yang mencakup 71,4% dari total penduduk usia kerja provinsi. Fenomena ini berimplikasi pada kebutuhan reformulasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan distribusi demografis, termasuk penyesuaian infrastruktur ekonomi dan layanan publik sesuai dengan dinamika mobilitas tenaga kerja antar wilayah.

Tabel 2.64
Angkatan Kerja di Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Kabupaten /Kota	Penduduk Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten /Kota (Orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	165.688	179.114	179.356	202.938	204.741
Tabanan	277.098	277.828	287.569	284.632	290.128
Badung	394.943	404.664	417.078	333.483	345.770
Gianyar	292.619	290.574	337.855	326.918	325.970
Klungkung	106.852	104.268	115.235	131.562	127.801
Bangli	146.377	147.556	151.191	172.395	171.536
Karangasem	259.153	262.729	278.920	330.108	323.579
Buleleng	382.712	376.174	391.692	473.440	504.678
Denpasar	542.477	537.616	579.643	434.761	419.894
Provinsi Bali	**2.567.919**	**2.580.523**	**2.738.539**	**2.690.237**	**2.714.097**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/indicator/6/123/1/penduduk-angkatan-kerja-provinsi-Bali-menurut-kabupaten-kota.html

Analisis data penduduk angkatan kerja Provinsi Bali periode 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan moderat sebesar 5,7% dari 2.567.919 menjadi 2.714.097 jiwa, dengan pola fluktuatif yang mencakup ekspansi signifikan pada 2021-2022 (6,1%) diikuti kontraksi pada 2022-2023 (-1,8%). Transformasi struktur ketenagakerjaan regional teridentifikasi melalui pergeseran konsentrasi dari kawasan urban-metropolitan menuju semi-urban dan perdesaan. Denpasar mengalami penurunan substansial sebesar

22,6% (dari 542.477 menjadi 419.894), demikian pula Badung dengan kontraksi 12,5% (dari 394.943 menjadi 345.770). Sebaliknya, Buleleng mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 31,9% (dari 382.712 menjadi 504.678), diikuti Karangasem (24,9%) dan Klungkung (19,6%). Transisi 2022-2023 menunjukkan anomali statistik yang mengindikasikan kemungkinan restrukturisasi metodologis, reklasifikasi administratif, atau dinamika mobilitas tenaga kerja pascapandemi. Pada 2024, distribusi angkatan kerja menunjukkan konsentrasi tertinggi di Buleleng (18,6%), diikuti Denpasar (15,5%), dan Badung (12,7%). Data mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.65 berikut.

Tabel 2.65
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Bali
Tahun 2020–2024

Kabupaten /Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	75,92	81,26	80,60	80,05	80,10
Tabanan	75,47	74,98	76,93	74,16	75,29
Badung	72,69	72,52	72,80	73,79	75,59
Gianyar	71,27	69,88	80,26	77,26	76,50
Klungkung	75,27	72,83	79,81	79,88	77,23
Bangli	82,20	82,09	83,36	83,04	82,27
Karangasem	80,75	81,15	85,39	86,01	83,74
Buleleng	75,07	73,08	75,38	75,49	79,77
Denpasar	70,91	68,67	72,37	73,13	69,71
Bali	**74,32**	**73,54**	**76,86**	**77,08**	**77,11**

Sumber: SIPD dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/indicator/6/287/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-provinsi-Bali-menurut-kabupaten-kota.html

Analisis data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Bali periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan moderat dari 74,32% menjadi 77,11%, dengan pola fluktuatif di tengah pandemi dan fase pemulihan ekonomi. Secara spasial, teridentifikasi disparitas regional yang signifikan dimana wilayah perdesaan secara konsisten mencatatkan partisipasi lebih tinggi dibandingkan kawasan urban: Bangli (82,27%) dan Karangasem (83,74%) memimpin, sementara Denpasar stabil di posisi terendah (69,71%). Fenomena menarik terlihat pada fase transisi pandemi 2020-2021 dengan delapan dari sepuluh kabupaten/kota mengalami kontraksi partisipasi, namun berlanjut dengan pemulihan signifikan pada 2022 mencapai 76,86% di tingkat provinsi. Variabilitas antarwilayah juga tercermin dari amplitudo fluktuasi, dimana Gianyar menunjukkan volatilitas tertinggi (10,38 poin persentase) dan Badung terendah (3,07 poin persentase). Pola partisipasi yang divergen ini mencerminkan karakteristik

struktural ekonomi regional, dimana wilayah dengan basis ekonomi agraris dan diversifikasi sektor menunjukkan resiliensi lebih tinggi dibandingkan kawasan dengan ketergantungan pada pariwisata. Implikasinya, strategi pemulihan dan pengembangan ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan heterogenitas struktural ini melalui pendekatan kebijakan yang terdiferensiasi sesuai karakteristik wilayah.

Tabel 2.66
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Persen) Tahun 2020-2024

Kabupaten /Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Persen)									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Jembrana	83,12	68,94	90,38	72,42	85,91	75,46	85,49	74,67	86,78	73,49
Tabanan	81,26	69,84	81,43	68,72	83,15	70,89	81,28	67,17	83,17	67,59
Badung	81,25	63,82	77,65	67,21	80,15	65,19	81,42	66,21	83,16	68,07
Gianyar	78,11	64,36	76,13	63,55	85,10	75,38	82,08	72,53	83,70	69,46
Klungkung	78,69	72,01	75,38	70,39	85,10	74,76	84,97	74,82	82,89	71,58
Bangli	86,22	78,11	84,98	79,16	87,24	79,42	86,50	79,56	88,02	76,49
Karangasem	83,23	78,31	84,65	77,70	88,69	82,15	89,50	82,52	87,41	80,11
Buleleng	80,87	69,40	80,35	66,00	85,85	68,18	83,82	67,18	84,77	74,78
Denpasar	78,91	62,55	75,33	61,71	82,36	61,94	81,31	64,84	78,80	60,50
Bali	**80,75**	**67,86**	**79,44**	**67,61**	**84,06**	**69,62**	**83,55**	**70,63**	**83,77**	**70,49**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzk5IzI=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin--persen-.html

Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Bali periode 2020-2024, terlihat fluktuasi yang signifikan yang mencerminkan dampak krisis ekonomi dan proses pemulihan ketenagakerjaan. Secara keseluruhan, TPAK Provinsi Bali mengalami penurunan drastis dari 80,75% pada tahun 2020 menjadi 67,86% pada tahun 2021, kemudian berfluktuasi sebelum mencapai pemulihan pada tahun 2024 dengan angka 83,77%.

Disparitas gender dalam partisipasi angkatan kerja menunjukkan pola yang konsisten sepanjang periode observasi. TPAK laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan selisih berkisar 10-15 poin persentase. Peada tahun 2024, TPAK laki-laki mencapai 83,77% sementara perempuan 70,49%, menunjukkan kesenjangan yang masih cukup signifikan dalam partisipasi ekonomi berdasarkan gender.

Penurunan tajam TPAK pada tahun 2021 dan 2023 dapat dikaitkan dengan dampak pandemi *COVID-19* yang sangat mempengaruhi sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali. Pembatasan mobilitas dan penutupan berbagai sektor usaha berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja, sehingga banyak penduduk usia produktif yang keluar dari angkatan kerja.

Dari perspektif regional, terdapat variasi TPAK antar kabupaten/kota yang menggambarkan heterogenitas struktur ekonomi lokal. Kabupaten dengan basis ekonomi yang lebih beragam cenderung memiliki ketahanan TPAK yang lebih baik selama periode krisis. Pemulihan TPAK pada tahun 2024 mengindikasikan resiliensi ekonomi Bali dan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi pascapandemi dalam mengembalikan daya serap tenaga kerja.

2.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah. Berikut indeks

pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.67 berikut.

Tabel 2.67
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Indeks Inovasi Daerah	Predikat
Klungkung	67,75	Sangat Inovatif
Badung	61,90	Sangat Inovatif
Buleleng	60,89	Sangat Inovatif
Jembrana	59,93	Inovatif
Tabanan	57,45	Inovatif
Gianyar	50,96	Inovatif
Karangasem	58,30	Inovatif
Bangli	63,33	Sangat Inovatif
Denpasar	71,17	Sangat Inovatif
Provinsi Bali	**69,92**	**Sangat Inovatif**

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupten, dan Kota Tahun 2024
URL:https://dasibangsida.lhokseumawekota.go.id/assets/upload/docs/_SK_Indeks_Inovasi_Daerah_2024_resize.pdf

Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel 2.67 mengenai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024, dapat dianalisis bahwa secara keseluruhan Provinsi Bali mencatatkan indeks inovasi yang sangat baik dengan nilai 69,92 dan memperoleh predikat "Sangat Inovatif". Hal ini merupakan akumulasi dari capaian seluruh kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Bali.

Dalam persebaran nilai indeks, Kota Denpasar memimpin dengan nilai tertinggi sebesar 71,17, diikuti oleh Kabupaten Klungkung dengan nilai 67,75, dan Kabupaten Bangli dengan nilai 63,33. Ketiga daerah tersebut, bersama dengan Kabupaten Badung (61,90) dan Kabupaten Buleleng (60,89), berhasil mencapai predikat "Sangat Inovatif". Sementara itu, empat kabupaten lainnya yakni Jembrana (59,93), Karangasem (58,30), Tabanan (57,45), dan Gianyar (50,96) memperoleh predikat "Inovatif".

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara nilai tertinggi dan terendah, dengan rentang sebesar 20,21 poin antara Kota Denpasar (71,17) dan Kabupaten Gianyar (50,96). Meskipun demikian, fakta bahwa seluruh kabupaten/kota minimal mencapai predikat "Inovatif" mengindikasikan adanya upaya yang sistematis dan terstruktur dalam pengembangan inovasi daerah di seluruh wilayah Provinsi Bali. Data ini bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024, yang menunjukkan adanya mekanisme evaluasi formal terhadap kapasitas inovasi daerah di tingkat nasional.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau

Transformasi ekonomi hijau di Provinsi Bali ditargetkan dapat menurunkan intensitas emisi Bali hingga 80% pada tahun 2045. Di samping itu, transformasi hijau di Bali juga ditargetkan dapat mempercepat tercapainya sasaran penciptaan *green jobs* sebanyak 50–100 ribu lapangan pekerjaan tetap. Dari sisi kebijakan bauran energi, proporsi listrik yang diproduksi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) ditargetkan mencapai lebih dari 50% pada tahun 2045. Peningkatan pengelolaan sampah dengan target 100% terkelola pada tahun 2045. Indeks ekonomi hijau di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.68 berikut.

Tabel 2.68
Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Bali

Indikator	2020	2028	2045
PDRB Hijau (Triliun Rupiah)	149,0	204,12	885,87
Emisi Karbon (Ton CO_2)	2.930.755	2.881.888	1.722.490
Bauran Energi Terbarukan (%)	0,125	22,961	52,678
Kendaraan Listrik (%)	0% motor dan mobil	-	100 % motor, 40% mobil

Sumber: Bappenas (2021)

Tujuan Pembangunan Ekonomi Hijau Bali dalam jangka panjang adalah menurunkan intensitas emisi di Bali serta mendorong pengembangan pertanian, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan agar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang melestarikan lingkungan dan tahan terhadap krisis. Kondisi tersebut akan tercapai apabila ada komitmen yang kuat antara pemerintah dan swasta dalam menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dukungan pemerintah dalam percepatan proyek pembangkit yang ramah lingkungan di seluruh Bali dan pemberian insentif kepada pihak swasta yang menerapkan prinsip *sustainable tourism* dapat membantu mempercepat tercapainya pembangunan ekonomi hijau di Bali.

Sementara itu, sasaran pembangunan ekonomi hijau dalam jangka menengah adalah pembangunan dan revitalisasi PLT EBT, melaksanakan revitalisasi dan optimalisasi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, membangun infrastruktur penunjang untuk penggunaan transportasi bersih yang ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sektor pertanian, industri, dan pariwisata terhadap kelestarian lingkungan serta mendorong pelaku usaha untuk menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan menjaga kualitas ekonomi dan ekosistem laut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan usahanya (*blue economy*).

2.3.3.2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Rencana proyek strategis pelabuhan pariwisata sebagai akses di sepuluh lokasi Bali adalah rencana proyek strategis yang berorientasi pada pembangunan pelabuhan dengan tujuan utama melayani transportasi laut untuk pariwisata, termasuk kapal pesiar ukuran besar (lebih panjang dari 250 meter). Proyek strategis ini merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan kapasitas pelabuhan agar dapat menampung dan melayani pertumbuhan industri pariwisata yang berkaitan dengan transportasi laut. Proyek strategis ini akan melibatkan pembangunan infrastruktur yang luas dan canggih, termasuk dermaga yang mampu menampung kapal pesiar berukuran besar. Pelabuhan yang direncanakan akan memiliki fasilitas yang lengkap dan modern untuk menunjang aktivitas pariwisata. Fasilitas tersebut termasuk terminal penumpang yang memadai dengan area lapor masuk (*check-in*) yang luas, fasilitas keamanan yang diperbarui, dan area parkir yang memadai untuk kendaraan. Selain itu, akan ada juga fasilitas penunjang seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan area hiburan di sekitar pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang dengan kapal pesiar. Rencana ini juga mencakup pengembangan aksesibilitas dan konektivitas ke pelabuhan, termasuk pengembangan jalan raya dan sistem transportasi umum yang efisien. Hal ini akan memudahkan para wisatawan untuk mencapai pelabuhan dengan nyaman dan efisien, serta meningkatkan keterhubungan dengan destinasi wisata lainnya di sekitarnya.

Ini merupakan proyek strategis baru di bidang pariwisata, salah satu contoh proyek strategis pelabuhan transportasi laut untuk pariwisata adalah Proyek Pelabuhan Dubai adalah salah satu proyek strategis yang menonjol di dunia dalam hal pelabuhan transportasi laut untuk pariwisata. Dubai telah menjadi tujuan populer bagi kapal pesiar mewah dari berbagai negara, dan pelabuhan ini telah mengalami transformasi besar dalam beberapa dekade terakhir untuk memenuhi permintaan yang berkembang pesat dalam industri pariwisata di kota tersebut. Pelabuhan Dubai, yang juga dikenal sebagai *Jebel Ali Port*, telah mengalami perluasan dan peningkatan kapasitas yang signifikan. Dermaga yang luas dan modern telah dibangun untuk menampung kapal pesiar ukuran besar, termasuk kapal dengan panjang lebih dari 250 meter. Terminal penumpang yang modern dan nyaman juga telah dibangun, dengan fasilitas check-in yang luas dan efisien serta fasilitas keamanan yang diperbarui. Selain itu, di sekitar pelabuhan juga dibangun fasilitas penunjang seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan area hiburan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang dengan kapal pesiar sebesar 155,156,157 Pelabuhan Barcelona di Spanyol juga merupakan contoh proyek strategis pelabuhan transportasi laut yang sukses

dalam melayani industri pariwisata dan kapal pesiar. Pelabuhan ini telah mengalami transformasi yang signifikan untuk menjadi salah satu pelabuhan utama untuk kapal pesiar di kawasan Mediterania. Proyek pengembangan Pelabuhan Barcelona melibatkan pembangunan infrastruktur yang luas dan peningkatan kapasitas pelabuhan. Dermaga dan terminal penumpang yang modern dibangun untuk melayani kapal pesiar ukuran besar, dengan fasilitas yang memadai dan nyaman bagi para wisatawan. Selain itu, pelabuhan ini juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan yang datang dengan kapal pesiar.

Kondisi saat ini, setidaknya sudah terbangun beberapa pelabuhan wisata di Indonesia, sebagai contoh salah satu contoh pelabuhan wisata untuk kapal pesiar di Indonesia adalah Pelabuhan Benoa di Bali. Pelabuhan Benoa merupakan pelabuhan utama di Bali yang menjadi gerbang utama untuk kapal pesiar yang mengunjungi pulau ini. Pelabuhan Benoa telah mengalami pengembangan dan peningkatan infrastruktur untuk melayani kapal pesiar dan industri pariwisata yang berkaitan. Pelabuhan ini dilengkapi dengan dermaga yang dapat menampung kapal pesiar berukuran besar, termasuk kapal dengan panjang lebih dari 250 meter. Terminal penumpang yang modern dan nyaman juga telah dibangun, dengan fasilitas lapor masuk (*check-in*), keamanan, dan imigrasi yang memadai. Bali merupakan salah satu destinasi wisata populer di Indonesia, dan pelabuhan. Pelabuhan Benoa di Bali menjadi salah satu contoh pelabuhan wisata untuk kapal pesiar di Indonesia yang penting dan berperan dalam menghubungkan wisatawan dengan keindahan pulau Bali dan atraksi wisata yang menarik di sekitarnya.

Diperkirakan nilai investasi pemerintah sebesar Rp5,3 triliun untuk membangun pelabuhan wisata di Benoa Bali, namun baru dikucurkan sebesar Rp1,7 triliun. Pembangunan pelabuhan sejenis setidaknya masih membutuhkan total investasi yang dikeluarkan sebesar Rp10,2 triliun dan akan memberikan kontribusi ekonomi sebesar 3,7 persen terhadap PDB dan memberikan dampak serapan tenaga kerja sekitar 1.300 orang atau 0,009 persen dari total tenaga kerja yang ada saat ini. Proyek strategis pelabuhan wisata memiliki beberapa prioritas utama yang secara langsung terkait dengan konsep ekonomi biru. Dalam konteks proyek strategis pelabuhan wisata, salah satu prioritas utama adalah menjaga keberlanjutan lingkungan dan memerhatikan dampak ekologis proyek tersebut. Dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan, perlu dilakukan pengelolaan limbah yang baik, penggunaan energi terbarukan, serta pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem laut dan pesisir. Dengan demikian, proyek tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang sambil melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati laut.

Selain itu, dalam proyek strategis pelabuhan wisata, penting untuk melibatkan komunitas lokal dalam pengembangan dan operasional pelabuhan. Dengan melibatkan masyarakat setempat, proyek tersebut dapat menciptakan peluang ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalnya, melibatkan nelayan lokal dalam sektor pariwisata laut, mempromosikan produk dan jasa lokal, serta memberdayakan komunitas dalam mengelola dan merawat sumber daya laut secara berkelanjutan. Selanjutnya, proyek pelabuhan wisata juga dapat memanfaatkan potensi sumber daya laut yang ada untuk mengembangkan sektor ekonomi biru. Contohnya, pelabuhan dapat menjadi pusat kegiatan seperti budidaya ikan, pengembangan pariwisata menyelam atau selam permukaan (*snorkeling*), serta peningkatan ekspor produk perikanan dan kelautan. Dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya laut secara berkelanjutan, proyek strategis pelabuhan wisata dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat sekitar (Proyek Strategis Ekonomi Biru Menuju Negara Maju 2045).

2.3.3.3 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Sumber energi primer merupakan sumber energi yang masih harus ditransformasikan menjadi sumber energi final. Energi primer ini dapat bersumber dari fosil maupun dari sumber energi terbarukan. Sumber energi fosil dikelompokkan menjadi batubara, gas dan minyak. Bauran energi primer untuk tahun 2025 dan 2050 ditunjukkan pada Tabel 2.69 sebagai pembanding digunakan bauran energi primer pada tahun dasar (2015).

Tabel 2.69
Bauran Sumber Energi Primer

Sumber Energi Primer	2015	2025	2050
Batubara	19,63 %	3,32%	0,00%
Gas	4,39%	56,23%	34,85%
Minyak	75,71%	29,30%	45,05%
Energi Baru Terbarukan	0.27%	11,15%	20,10%
Total	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050
URL: https://peraturan.bpk.go.id/Download/252206/Lampiran%201-perda-9-2020.pdf

Porsi energi baru terbarukan (EBT) pada tahun dasar sebesar 0,27 %, yang meningkat pada tahun 2025 menjadi 11,15%. Pada tahun 2050 diharapkan porsi EBT menjadi 20,10 %. Peningkatan EBT diprioritaskan pada pemanfaatan dan pengembangan PLTS Atap. Porsi sumber energi batubara dirancang menjadi zero atau no! pada tahun 2050, diperkirakan akan menurun dari 19,63 % pada tahun 2015, menjadi 3,32 % pada tahun 2025. Batubara saat ini digunakan sebagai bahan bakar pada PLTU Celukan Bawang dan Saluran Kabel Laut dari PLTU Paiton Jawa Timur. Minyak bumi dimana porsinya akan turun menjadi 45,05 % pada tahun 2050 dari 75,71 % pada tahun 2015. Untuk menutupi kebutuhan permintaan energi, maka penggunaan sumber energi gas akan diperbesar dari 4,39 % pada tahun 2015 menjadi 34,85 % pada tahun 2050. Keterbatasan daya dukung terhadap pembangkit fosil (gas, minyak bumi dan batubara) serta keterbatasan dalam pengembangan sumber energi baru terbarukan (EBT), maka Provinsi Bali akan mengupayakan dengan cermat pasokan listriknya tidak hanya dipenuhi dari pembangkit yang ada di Bali melalui pemanfaatan Energi Bersih, juga melalui pasokan listrik dari Pulau Jawa melalui grid Jamali atau Jawa Bali *Connection* (JBC) yang berfungsi sebagai cadangan bersama (*reserve sharing*) untuk menjaga kehandalan sistem kelistrikan di Jawa dan sistem di Bali.

2.3.4 Transformasi Digital

2.3.4.1 Indeks Keamanan Informasi

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah.

Evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009, yaitu: Tata Kelola Keamanan Informasi, Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, Kerangka Kerja Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset informasi, Teknologi dan Keamanan Informasi, dan Peran TIK.

Tabel 2.70
Indeks Keamanan Informasi Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian					Target	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	n/a	n/a	546	571	596	550	551

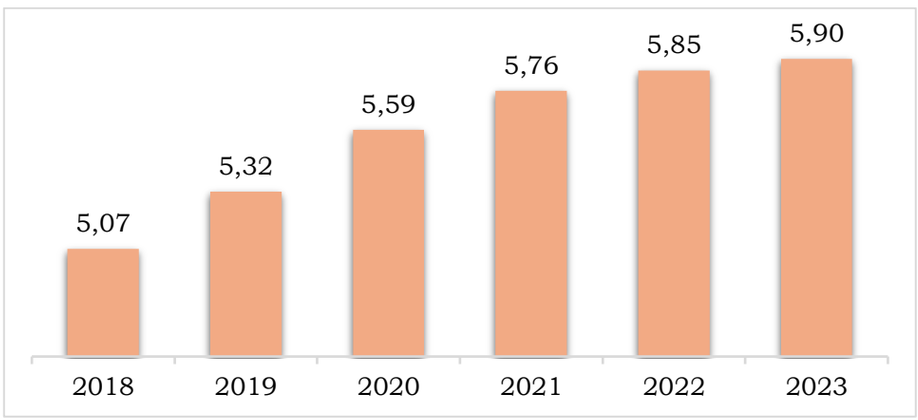
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Provinsi Bali menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2022. Pola peningkatan ini mengindikasikan adanya komitmen berkelanjutan dalam penguatan sistem keamanan informasi. Meskipun kenaikan yang terjadi relatif moderat dengan rata-rata peningkatan sekitar 1-25 poin per periode, hal ini mencerminkan pendekatan yang realistis dan terukur dalam pengembangan infrastruktur keamanan informasi. Target tahun 2025 lebih kecil dari capaian tahun 2024 dikarenakan adanya penambahan indikator (aspek penilaian) yaitu indikator Pelindungan Data Pribadi (PDP) mulai penilaian tahun 2025. Selain penambahan indikator, terdapat perubahan versi penilaian dari Indeks KAMI v4.1 pada tahun 2022, kemudian Indeks KAMI v4.2 pada tahun 2023 dan masih digunakan pada tahun 2024, kemudian berubah menjadi Indeks KAMI v5.0 termasuk penambahan indikator PDP tersebut.

2.3.4.2 Indeks Pembangunan TIK

Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membantu pesatnya pertumbuhan industri, mendorong efisiensi dalam pemerintahan, dan operasional bisnis serta mengembangkan landasan penting menuju perekonomian berbasis teknologi. TIK memiliki kemampuan untuk mengubah cara masyarakat melakukan sesuatu, seperti akses yang lebih cepat terhadap informasi yang relevan, sarana komunikasi yang efisien, peningkatan kemampuan untuk berkomunikasi, dan membuat keputusan berdasarkan informasi.

Mengacu pada metodologi yang digunakan oleh *International Telecommunication Union* (ITU), BPS menyusun indeks yang menggambarkan perkembangan TIK Indonesia dengan nama Indeks Pembangunan TIK. Indeks ini berskala 0–10 bahwa semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang semakin baik di suatu daerah.

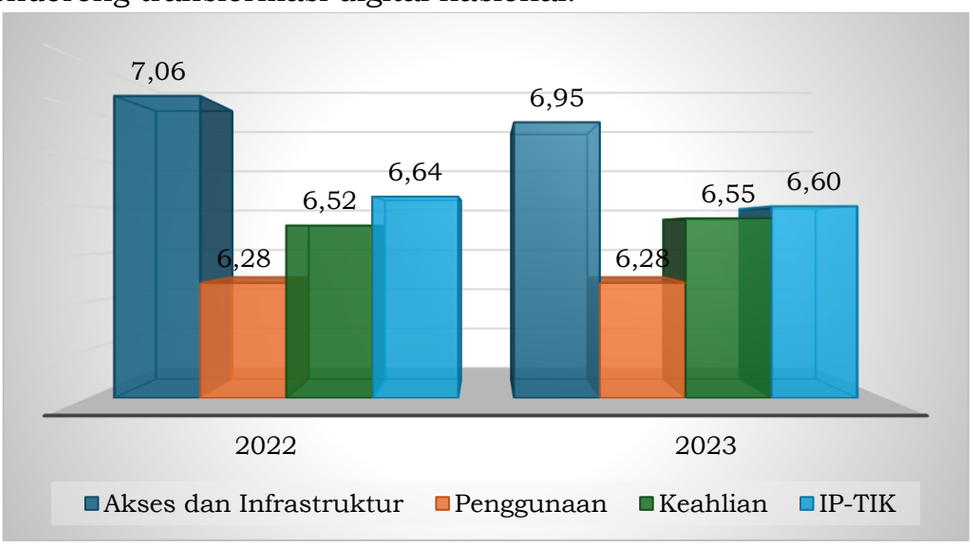


Gambar 2.40
Perkembangan Indeks Pembangunan TIK di Indonesia Tahun 2018-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional
URL:https://www.bps.go.id/id/publication/2024/09/30/b50f00b8615fc8716c8e02d4/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-2023.html

Berdasarkan Gambar 2.40 yang menampilkan data Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia periode 2018-2023, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dan signifikan. Analisis data menunjukkan bahwa indeks pembangunan TIK Indonesia mengalami pertumbuhan positif dengan pola yang relatif stabil dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2018, indeks pembangunan TIK Indonesia berada pada angka 5,07, yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 5,32 pada tahun 2019, menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,25 poin. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2020 dengan pencapaian indeks sebesar 5,59, mengindikasikan kenaikan yang lebih signifikan sebesar 0,27 poin. Momentum pertumbuhan terus berlanjut pada tahun 2021 dengan indeks mencapai 5,76, diikuti dengan peningkatan ke angka 5,85 pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai 5,90.

Analisis lebih mendalam mengungkapkan bahwa dalam rentang waktu enam tahun (2018-2023), indeks pembangunan TIK Indonesia mengalami peningkatan total sebesar 0,83 poin atau setara dengan pertumbuhan sekitar 16,37%. Meskipun laju pertumbuhan cenderung melambat pada tahun-tahun terakhir, yang ditunjukkan oleh selisih peningkatan yang lebih kecil antara tahun 2022-2023 (0,05 poin) dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, namun tetap menunjukkan tren positif yang konsisten. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Nasional ini mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur dan ekosistem TIK di Indonesia, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi digital nasional.



Gambar 2.41
Indeks Pembangunan TIK di Provinsi Bali Tahun 2022-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional
URL:https://www.bps.go.id/id/publication/2024/09/30/b50f00b8615fc8716c8e02d4/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-2023.html

Gambar 2.41 menyajikan data komparatif Indeks Pembangunan TIK di Provinsi Bali untuk periode 2022-2023 yang terbagi dalam empat dimensi pengukuran utama. Berdasarkan visualisasi data tersebut, dapat dilakukan analisis komprehensif mengenai dinamika perkembangan masing-masing dimensi dalam kurun waktu tersebut.

Dimensi Akses dan Infrastruktur mencatatkan nilai tertinggi di antara keempat dimensi yang diukur, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 7,06 pada tahun 2022 menjadi 6,95 pada tahun 2023 (turun 0,11 poin). Sementara itu, dimensi Penggunaan menunjukkan stabilitas dengan mempertahankan nilai 6,28 selama dua tahun berturut-turut, mengindikasikan konsistensi dalam pola pemanfaatan TIK di masyarakat Bali.

Dalam aspek Keahlian, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 6,52 pada tahun 2022 menjadi 6,55 pada tahun 2023 (naik 0,03 poin), menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK. Namun, indikator IP-TIK secara keseluruhan mengalami penurunan dari 6,64 pada tahun 2022 menjadi 6,60 pada tahun 2023 (turun 0,04 poin).

Analisis tren ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi fluktuasi dalam beberapa dimensi, Provinsi Bali tetap mempertahankan kinerja yang relatif stabil dalam pembangunan TIK. Penurunan pada dimensi Akses dan Infrastruktur serta IP-TIK secara keseluruhan perlu mendapat perhatian khusus untuk perbaikan di masa mendatang, sementara peningkatan pada dimensi Keahlian menunjukkan hasil positif dari upaya pengembangan kompetensi digital masyarakat. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Nasional ini memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi pembangunan TIK di Provinsi Bali dan dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pengembangan TIK selanjutnya.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, infrastruktur (seperti jalan, bandara, pelabuhan, waduk), mesin dan perlengkapan, alat transportasi, peralatan telekomunikasi, dan aset tetap lainnya seperti produk kekayaan intelektual.

Tabel 2.71
Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Tahunan Provinsi Bali Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020-2024

PDRB Menurut Pengeluaran	Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Tahunan Provinsi Bali Menurut Pengeluaran (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-3,65	0,15	4,04	5,57	4,62
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-3,94	3	11,06	13,77	27,04
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,09	-3,02	-1,6	1,09	6,37
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-11,67	-4,4	2,62	3,01	5,56
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor Luar Negeri	-76,14	-69,27	554,6	103,15	15,99
Impor Luar Negeri	-78,18	-82,42	635,18	98,85	12,93
Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB	-9,34	-2,46	4,84	5,71	5,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5IzI=/pertumbuhan-pdrb-ekonomi-tahunan-provinsi-bali-menurut-pengeluaran.html

Tabel 2.71 menyajikan data pertumbuhan PDRB Provinsi Bali menurut pengeluaran selama periode 2019-2024, mengungkapkan dinamika ekonomi regional yang kompleks dengan pola siklus kontraksi-pemulihan-ekspansi. Analisis secara longitudinal menunjukkan bahwa perekonomian Bali mengalami pertumbuhan sebesar 5,6% pada tahun 2019, kemudian mengalami kontraksi signifikan sebesar 9,34% pada 2020 akibat pandemi *COVID*-19 yang berdampak masif pada destinasi pariwisata premier ini. Tren negatif berlanjut pada 2021 dengan kontraksi sebesar 2,46%, meskipun dengan magnitud yang lebih moderat, mengindikasikan proses stabilisasi gradual. Tahun 2022 menandai titik balik dengan pertumbuhan positif sebesar 4,84%, dilanjutkan dengan akselerasi pertumbuhan menjadi 5,71% pada 2023 dan stabilisasi pada 5,48% di tahun 2024.

Dari perspektif struktur pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukkan resiliensi relatif dengan kontraksi terbatas sebesar 3,65% pada 2020 dan pemulihan cepat menjadi 0,15% pada 2021, diikuti pertumbuhan yang semakin menguat pada periode 2022-2024. Kontras dengan hal tersebut, pengeluaran konsumsi LNPRT (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga) mencatatkan volatilitas tinggi dengan kontraksi 3,94% pada 2020 dan pertumbuhan eksponensial mencapai 27,04% pada 2024, mencerminkan dinamika peran sektor non-pemerintah dalam

pemulihan ekonomi. Komponen pembentukan modal tetap bruto yang merepresentasikan aktivitas investasi mengalami kontraksi terdalam sebesar 11,67% pada 2020, namun menunjukkan tren pemulihan yang konsisten hingga mencapai 5,56% pada 2024.

Fenomena paling dramatis terlihat pada komponen perdagangan internasional, dengan ekspor luar negeri mengalami kontraksi katastrofik sebesar 76,14% pada 2020 dan 69,27% pada 2021, diikuti oleh pertumbuhan eksplosif sebesar 554,6% pada 2022. Pola serupa terlihat pada impor luar negeri dengan kontraksi 78,18% pada 2020 dan pertumbuhan 635,18% pada 2022. Volatilitas ekstrem ini mengindikasikan disrupsi total pada arus perdagangan internasional selama fase akut pandemi dan normalisasi cepat pasca-pelonggaran pembatasan mobilitas global. Menariknya, net ekspor antar daerah tidak tersedia datanya, menunjukkan potensi area untuk penguatan sistem statistik regional.

Implikasi dari analisis ini mengungkapkan beberapa fenomena krusial:

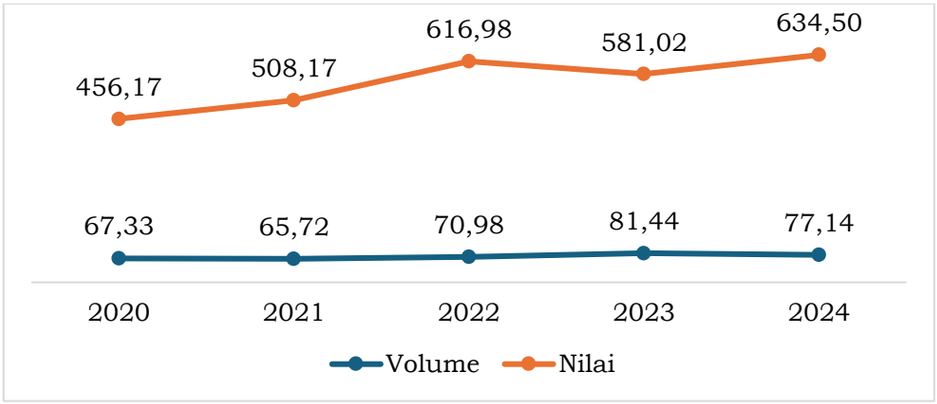
1. transformasi struktural dalam pola pengeluaran dengan penguatan peran konsumsi domestik sebagai *buffer* terhadap guncangan eksternal;
2. resiliensi bertahap sektor investasi yang esensial untuk keberlanjutan pertumbuhan jangka panjang; dan
3. vulnerabilitas ekstrem terhadap disrupsi perdagangan internasional yang merefleksikan ketergantungan tinggi pada sektor pariwisata dan aktivitas terkait.

Temuan ini menyoroti urgensi diversifikasi basis ekonomi Bali untuk meningkatkan resiliensi terhadap guncangan eksternal, penguatan kapasitas produksi domestik untuk mengurangi ketergantungan impor, dan pengembangan strategi pengembangan ekspor yang lebih berkelanjutan. Kebijakan ekonomi regional yang berfokus pada penguatan ketahanan struktural menjadi imperatif untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang telah tercapai pasca-pandemi.

2.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Kinerja ekspor Bali mulai mengalami tren peningkatan setelah pandemi *COVID-19* pada tahun 2020. Pada tahun 2020, nilai ekspor Bali turun 22,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, mulai tahun 2021, kinerja ekspor Bali mulai mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 kinerja ekspor Bali meningkat 11,40% dari tahun sebelumnya, dengan nilai sebesar US$508,17 juta. Kemudian, pada tahun 2022, kinerja ekspor Bali juga mengalami peningkatan dengan persentase peningkatan sebesar 21,41% dari tahun 2021, dengan nilai sebesar US$616,98 Juta. Pada tahun 2023 juga mengalami persentase volume eskpor Provinsi Bali yang mencapai 81,44 juta ton, namun

nilainya mengalami penurunan sebesar US$581,02 juta. Secara mendetail dapat dilihat pada Gambar 2.42 berikut.



Gambar 2.42
Tren Nilai (Juta US$) dan Volume (Juta Ton) Ekspor Provinsi Bali
Tahun 2020–2024
Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Bali (BPS Provinsi Bali)
URL:https://bali.bps.go.id/publication/2024/06/28/eefeccd0e286d645dc748044/tinjauan-perekonomian-provinsi-bali-2023.html

Volume ekspor Bali dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Volume barang ekspor tahun 2018 tercatat 93,46 juta ton, kemudian terus menurun hingga pada tahun 2021 mencapai 65,72 ton, sedangkan pada tahun 2023 volume ekspor mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan volume ekspor tercatat sebesar 81,44 juta ton.

Kumulatif ekspor barang asal Provinsi Bali pada periode Januari–Desember 2023 mencapai US$581.022.972, atau mengalami penurunan sedalam 5,83 % dibandingkan dengan keadaan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat US$616.975.629. Menurut pangsa pasar, ekspor barang asal Provinsi Bali pada tahun 2023, sebagian besar dikirim ke Amerika Serikat, Australia dan Tiongkok dengan proporsi masing–masing 29,57%, 9,90% dan 5,08%.

Hampir seperempat dari total ekspor Bali tahun 2023 merupakan komoditas ikan dan udang. Kelompok komoditas lain dengan kontribusi besar terhadap ekspor Bali pada tahun 2023 antara lain pakaian jadi bukan rajutan sebesar 14,4%, perhiasan/permata yang kontribusinya mencapai 12,55%. Komoditas selanjutnya adalah kayu, barang dari kayu yang mampu memasuki pasar ekspor sebanyak 7,70%. Berikut secara mendetail kelompok komoditas utama ekspor Provinsi Bali dari Tahun 2021 hingga tahun 2024 pada Tabel 2.72 hingga Tabel 2.75.

Tabel 2.72
Kelompok Komoditas Utama Ekspor Provinsi Bali Tahun 2021

Kelompok Komoditas		Volume (kg)	Nilai (US$)	Pangsa *(%)*
1.	Ikan, krustasea, dan moluska (03)	21.651.954	136.572.269	26,87
2.	Logam mulia dan perhiasan/permata (71)	248.107	62.631.536	12,32
3.	Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) (62)	1.903.797	59.367.858	11,68
4.	Kayu dan barang dari kayu (44)	8.698.676	37.647.176	7,41
5.	Pakaian dan aksesorinya (rajutan) (61)	734.338	29.412.358	5,79
6.	Perabotan, lampu, dan alat penerangan (94)	7.473.282	29.084.035	5,72
7.	Kertas, karton, dan barang daripadanya (48)	699.045	24.629.177	4,84
8.	Barang anyaman (46)	3.049.866	16.317.401	3,21
9.	Barang dari kulit samak (42)	343.942	10.177.037	2,00
10.	Barang tekstil jadi lainnya (63)	480.619	9.421.471	1,85
11.	Kapas (52)	544.710	8.408.961	1,65
12.	Berbagai barang logam tidak mulia (83)	1.088.124	7.776.218	1,53
13.	Barang dari batu, semen, asbes, atau mika (68)	7.369.171	7.552.543	1,49
14.	Kopi, Teh, Rempah-rempah (09)	541.663	6.850.188	1,35
15.	Plastik dan Barang dari Plastik (39)	840.807	6.650.992	1,31
16.	Produk Keramik (69)	1.259.577	4.342.815	0,85
17.	Kaca dan barang dari kaca (70)	1.136.094	3.910.739	0,77
18.	Produk Hewani (05)	312.870	3.670.906	0,72
19.	Instrumen musik dan bagiannya (92)	446.708	3.626.568	0,71
20.	Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (84)	59.611	3.328.422	0,65
21.	Komoditas Lainnya / *Other Commodities*	6.832.528	36.983.014	7,27
Jumlah		**65.715.488**	**508.361.687**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/27/41/-ekspor-provinsi-Bali-menurut-kelompok-komoditas-utama-2017-2022.html

Tabel 2.73
Kelompok Komoditas Utama Ekspor Provinsi Bali Tahun 2022

Kelompok Komoditas		Volume (kg)	Nilai (US$)	Pangsa *(%)*
1.	Ikan, krustasea, dan moluska (03)	21.624.958	147.967.445	23,98
2.	Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) (62)	2.913.776	102.859.558	16,67
3.	Logam mulia dan perhiasan/permata (71)	373.467	73.721.929	11,95
4.	Kayu dan barang dari kayu (44)	12.205.872	43.167.717	7,00
5.	Kertas, karton, dan barang daripadanya (48)	1.236.249	42.115.249	6,83
6.	Perabotan, lampu, dan alat penerangan (94)	7.446.598	32.012.081	5,19
7.	Pakaian dan aksesorinya (rajutan) (61)	597.689	29.245.752	4,74
8.	Barang anyaman (46)	3.317.334	17.270.295	2,80
9.	Barang dari kulit samak (42)	440.474	10.343.834	1,68
10.	Berbagai barang logam tidak mulia (83)	1.010.478	8.812.058	1,43
11.	Plastik dan Barang dari Plastik (39)	1.137.051	8.716.283	1,41
12.	Barang dari batu, semen, asbes, atau mika (68)	7.675.290	8.003.997	1,30
13.	Kapas (52)	419.001	6.856.950	1,11
14.	Barang tekstil jadi lainnya (63)	407.611	5.732.732	0,93
15.	Alas kaki (64)	121.211	5.600.654	0,91
16.	Instrumen musik dan bagiannya (92)	606.313	5.162.161	0,84
17.	Kopi, Teh, Rempah-rempah (09)	430.715	4.931.250	0,80
18.	Produk Hewani (05)	283.565	4.732.389	0,77
19.	Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (85)	90.097	4.622.545	0,75
20.	Kaca dan barang dari kaca (70)	1.095.649	4.170.707	0,68
21.	Komoditas Lainnya / *Other Commodities*	7.544.266	50.930.042	8,25
Jumlah		**70.977.664**	**616.975.629**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/27/41/-ekspor-provinsi-Bali-menurut-kelompok-komoditas-utama-2017-2022.html

Tabel 2.74
Kelompok Komoditas Utama Ekspor Provinsi Bali Tahun 2023

Kelompok Komoditas		Volume (kg)	Nilai (US$)	Pangsa *(%)*
1.	Ikan, krustasea, dan moluska (03)	18.734.797	140.486.726	24,18
2.	Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) (62)	2.816.822	83.662.261	14,40
3.	Logam mulia dan perhiasan/permata (71)	407.539	72.898.919	12,55
4.	Kayu dan barang dari kayu (44)	15.517.349	44.764.810	7,70
5.	Perabotan, lampu, dan alat penerangan (94)	8.109.158	34.918.941	6,01
6.	Kertas, karton, dan barang daripadanya (48)	848.768	28.119.169	4,84
7.	Pakaian dan aksesorinya (rajutan) (61)	493.330	27.782.407	4,78
8.	Barang anyaman (46)	3.182.053	15.527.611	2,67
9.	Barang dari batu, semen, asbes, atau mika (68)	14.995.916	10.143.499	1,75
10.	Barang dari kulit samak (42)	403.723	9.323.771	1,60
11.	Piranti lunak, barang digital dan barang kiriman (99)	130.728	8.752.909	1,51
12.	Plastik dan Barang dari Plastik (39)	1.288.732	8.693.282	1,50
13.	Berbagai barang logam tidak mulia (83)	931.880	6.835.229	1,18
14.	Barang tekstil jadi lainnya (63)	511.440	6.372.619	1,10
15.	Kapas (52)	406.827	6.253.329	1,08
16.	Produk Keramik (69)	2.781.278	5.256.204	0,90
17.	Produk Hewani (05)	437.710	5.163.707	0,89
18.	Buah-buahan (08)	1.756.255	4.767.403	0,82
19.	Minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik (33)	214.430	4.749.318	0,82
20.	Minuman, alkohol, dan cuka (22)	902.069	4.523.549	0,78
21.	Komoditas Lainnya / Other Commodities	6.564.992	52.027.310	8,95
Jumlah		**81.435.798**	**581.022.972**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

URL: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDEjMQ==/-ekspor-provinsi-Bali-menurut-kelompok-komoditas-utama-2017-2022.html

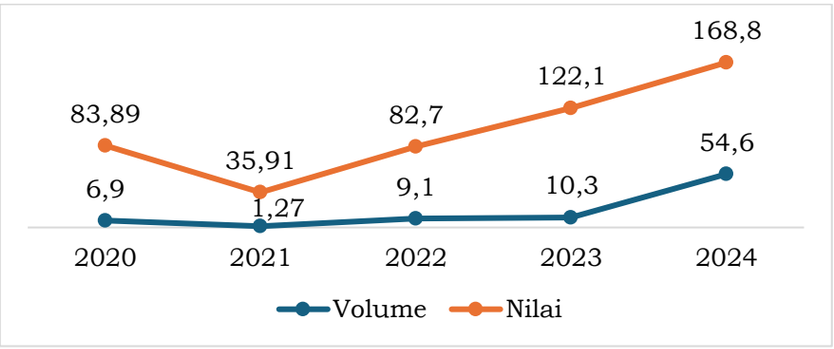
Tabel 2.75
Kelompok Komoditas Utama Ekspor Provinsi Bali Tahun 2024

Kelompok Komoditas		Volume (kg)	Nilai (US$)	Pangsa *(%)*
1.	Ikan, krustasea, dan moluska (03)	24.632.966	168.389.881	26,54
2.	Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) (62)	2.615.787	85.657.796	13,50
3.	Logam mulia dan perhiasan/permata (71)	724.701	79.866.390	12,59
4.	Kayu dan barang dari kayu (44)	10.456.561	37.938.763	5,98
5.	Perabotan, lampu, dan alat penerangan (94)	8.669.693	37.669.951	5,94
6.	Kertas, karton, dan barang daripadanya (48)	1.046.556	33.313.227	5,25
7.	Pakaian dan aksesorinya (rajutan) (61)	586.427	27.177.648	4,28
8.	Barang anyaman (46)	2.951.543	13.978.494	2,20
9.	Barang dari batu, semen, asbes, atau mika (68)	9.040.673	9.731.890	1,53
10.	Barang dari kulit samak (42)	393.231	9.498.555	1,50
11.	Plastik dan Barang dari Plastik (39)	1.208.317	9.494.854	1,50
12.	Mesin dan peralatan mekanis serta bag	98.809	8.852.703	1,40
13.	Minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik (33)	357.847	7.548.711	1,19
14.	Minuman, alkohol, dan cuka (22)	2.849.958	7.404.680	1,17
15.	Berbagai barang logam tidak mulia (83)	884.461	6.413.083	1,01
16.	Kapas (52)	393.877	6.323.552	1,00
17.	Produk Keramik (69)	1.389.647	5.636.125	0,89
18.	Barang tekstil jadi lainnya (63)	343.577	5.278.922	0,83
19.	Kopi, The, Rempah-rempah (09)	412.944	5.126.909	0,81
20.	Alas kaki (64)	118.735	5.075.957	0,80
21.	Komoditas Lainnya / Other Commodities	7.965.743	64.118.824	10,11
	Jumlah / Total :	**77.142.052**	**634.496.917**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

URL: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDEjMQ==/-ekspor-provinsi-Bali-menurut-kelompok-komoditas-utama-2017-2022.html

Data impor Provinsi Bali periode 2020-2024, terdapat dinamika perdagangan luar negeri yang menunjukkan pola fluktuatif dengan tren peningkatan signifikan pada akhir periode. Volume impor mengalami kontraksi tajam dari 6,9 juta ton pada 2020 menjadi 1,27 juta ton pada 2021, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi *COVID*-19 terhadap aktivitas ekonomi dan perdagangan. Setelah periode pemulihan bertahap pada 2022-2023 dengan volume mencapai 9,1 juta ton dan 10,3 juta ton, terjadi lonjakan dramatis pada 2024 hingga 54,6 juta ton atau meningkat hampir lima kali lipat dari tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai impor menunjukkan pola yang relatif lebih stabil dengan penurunan dari US$ 83,89 juta pada 2020 menjadi US$ 35,91 juta pada 2021, kemudian mengalami pemulihan konsisten hingga mencapai US$ 168,8 juta pada 2024. Disparitas antara pertumbuhan volume yang sangat tinggi dibandingkan nilai impor pada 2024 mengindikasikan adanya perubahan komposisi komoditas impor menuju barang-barang dengan nilai per unit yang lebih rendah, yang mencerminkan dinamika kebutuhan ekonomi Bali yang sedang dalam fase ekspansi pasca-pandemi. Secara mendetail dapat dilihat pada Gambar 2.43 berikut.



Gambar 2.43
Tren Nilai (Juta US$) dan Volume (Juta Ton) Impor Provinsi Bali
Tahun 2020–2024
Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Bali (BPS Provinsi Bali)
URL:https://bali.bps.go.id/id/publication/2024/12/31/ea1a04f89be5c267555e0007/statistik-perdagangan-luar-negeri-provinsi-bali-2023.html

Secara kumulatif, impor barang Provinsi Bali periode Januari–Desember 2023 mencapai US$122.068.302. Angka ini mengalami peningkatan hingga 47,61% dari nilai impor tahun 2022 yang tercatat US$82.697.940. Menurut pangsa pasarnya, impor barang Provinsi Bali selama tahun 2023 sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, Tiongkok dan Australia dengan persentase masing–masing sebesar 23,24%, 13,26% dan 10,40%.

Nilai impor Provinsi Bali selama empat tahun terakhir didominasi oleh impor mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84) dan juga mesin dan peralatan elektrik (HS 85), sedangkan pada tahun 2018 didominasi oleh impor minyak atsiri, kosmetik wangi-

wangian (HS 33). Selama tahun 2019 hingga tahun 2021 kelima komoditas impor cenderung mengalami tren penurunan. Mulai tahun 2022, kelima komoditas impor mengalami peningkatan hingga tahun 2023.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan kontribusi dari lima komoditas di atas terhadap total nilai impor Bali tercatat meningkat hingga tahun 2021, tetapi menurun pada tahun 2022. Kontribusi komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannnya (HS 84) terhadap impor Bali terus meningkat hingga tahun 2021. Tercatat pada tahun 2018, komoditas tersebut berkontribusi sebesar 7,07%. Puncaknya pada tahun 2021, kontribusi komoditas tersebut terhadap impor Bali sebesar 28,68%.

Berikut secara mendetail kelompok komoditas utama impor Provinsi Bali dari Tahun 2021 hingga tahun 2024 pada Tabel 2.76 hingga Tabel 2.79 sebagai berikut.

Tabel 2.76
Kelompok Komoditas Utama Impor Provinsi Bali Tahun 2021

Kelompok Komoditas		Volume (kg)	Nilai (US$)	Pangsa *(%)*
1.	Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (84)	265.641	10.299.214	28,68
2.	Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (85)	150.823	5.433.492	15,13
3.	Logam mulia dan perhiasan/permata (71)	19.655	5.281.657	14,71
4.	Barang dari kulit samak (42)	269.174	3.999.349	11,14
5.	Jam dan arloji serta bagiannya (91)	135.633	2.155.339	6,00
6.	Instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis (90)	25.599	1.494.197	4,16
7.	Kain rajutan (60)	66.329	1.435.117	4,00
8.	Berbagai barang logam tidak mulia (83)	47.977	765.201	2,13
9.	Karet dan barang dari karet (40)	34.721	688.701	1,92
10.	Barang dari besi dan baja (73)	13.521	684.766	1,91
11.	Berbagai produk kimia (38)	3.408	639.653	1,78
12.	Plastik dan barang dari plastik (39)	36.453	577.626	1,61
13.	Ikan, krustasea, dan moluska (03)	5.109	307.823	0,86
14.	Barang dari batu, semen, asbes, atau mika (68)	3.398	264.031	0,74
15.	Kendaraan udara dan bagiannya (88)	1.302	260.375	0,73
16.	Perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia (82)	3.069	217.810	0,61
17.	Kendaraan dan bagiannya (87)	2.250	142.406	0,40
18.	Kaca dan barang dari kaca (70)	60.616	127.185	0,35
19.	Serat stapel buatan (55)	5.155	123.668	0,34
20.	Berbagai barang buatan pabrik (96)	4.280	122.404	0,34
21.	Komoditas Lainnya / *Other Commodities*	116.474	893.612	2,49
Jumlah		**1.270.587**	**35.913.626**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/27/42/impor-provinsi-bali-menurut-kelompok-komoditas-utama-2017-2022.html

Tabel 2.77
Kelompok Komoditas Utama Impor Provinsi Bali Tahun 2022

Kelompok Komoditas		Volume (kg)	Nilai (US$)	Pangsa *(%)*
1.	Mesin dan peralatan listrik (85)	559.397	17.479.805	21,14
2.	Mesin dan perlengkapan mekanik (84)	586.758	14.886.177	18,00
3.	Barang-barang dari Kulit (42)	87.143	9.940.035	12,02
4.	Perhiasan / Permata (71)	53.870	5.051.183	6,11
5.	Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangian (33)	181.533	3.417.742	4,13
6.	Lonceng, Arloji dan Bagiannya (91)	128.380	3.159.414	3,82
7.	Perangkat Optik (90)	43.143	2.752.094	3,33
8.	Plastik dan Barang dari Plastik (39)	4.927.200	2.578.306	3,12
9.	Tembakau (24)	531.584	2.489.916	3,01
10.	Berbagai Produk Kimia (38)	3.892	2.436.050	2,95
11.	Berbagai Barang Logam Dasar (83)	54.647	1.770.527	2,14
12.	Kapal Terbang dan Bagiannya (88)	31.176	1.581.514	1,91
13.	Kendaraan dan Bagiannya (87)	85621	1.516.831	1,83
14.	Kain Rajutan (60)	51.328	1.474.913	1,78
15.	Mainan (95)	27.937	1.374.015	1,66
16.	Bahan Bakar Mineral (27)	51.101	889.454	1,08
17.	Karet dan Barang dari Karet (40)	16.104	838.630	1,01
18.	Barang-barang Rajutan (61)	33.848	737.703	0,89
19.	Benda-benda dari Besi dan Baja (73)	16.370	651.978	0,79
20.	Kaca & Barang dari Kaca (70)	10.394	546.149	0,66
21.	Komoditas Lainnya / *Other Commodities*	1.617.885	7.125.504	8,62
Jumlah		**9.099.311**	**82.697.940**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/27/42/impor-provinsi-bali-menurut-kelompok-komoditas-utama-2017-2022.html

Tabel 2.78
Kelompok Komoditas Utama Impor Provinsi Bali Tahun 2023

Kelompok Komoditas		Volume (kg)	Nilai (US$)	Pangsa *(%)*
1.	Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (85)	702.254	18.899.573	15,48
2.	Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (84)	315.379	18.237.366	14,94
3.	Logam mulia dan perhiasan/permata (71)	100.737	11.890.392	9,74
4.	Minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik (33)	82.594	8.598.224	7,04
5.	Barang dari kulit samak (42)	267.333	7.296.535	5,98
6.	Instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis (90)	105.335	5.880.313	4,82
7.	Kendaraan dan bagiannya (87)	111.900	5.511.998	4,52
8.	Jam dan arloji serta bagiannya (91)	42.110	4.187.623	3,43
9.	Tembakau dan rokok (24)	1.092.592	3.484.235	2,85
10.	Bahan bakar mineral (27)	6.075.066	3.373.041	2,76
11.	Kendaraan udara dan bagiannya (88)	9.039	3.318.553	2,72
12.	Barang dari besi dan baja (73)	49.659	2.834.596	2,32
13.	Ikan, krustasea, dan moluska (03)	1.830	2.803.934	2,30
14.	Plastik dan barang dari plastik (39)	183.961	2.544.314	2,08
15.	Karet dan barang dari karet (40)	66.098	2.152.304	1,76
16.	Berbagai barang logam tidak mulia (83)	94.420	1.713.611	1,40
17.	Kakao dan olahannya (18)	79.832	1.674.542	1,37
18.	Pakaian dan aksesorinya (rajutan) (61)	38.848	1.597.722	1,31
19.	Kain rajutan (60)	66.723	1.475.385	1,21
20.	Daging hewan (02)	56.978	1.228.732	1,01
21.	Komoditas Lainnya / *Other Commodities*	745.709	13.365.309	10,95
Jumlah		**10.288.397**	**122.068.302**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/27/42/impor-provinsi-bali-menurut-kelompok-komoditas-utama-2017-2022.html

Tabel 2.79
Kelompok Komoditas Utama Impor Provinsi Bali Tahun 2024

Kelompok Komoditas		Volume (kg)	Nilai (US$)	Pangsa *(%)*
1.	Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (84)	590.465	25.500.790	15,11
2.	Serealia (10)	41.092.649	24.371.740	14,44
3.	Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (85)	682.437	23.494.353	13,92
4.	Logam mulia dan perhiasan/permata (71)	116.989	13.089.686	7,76
5.	Barang dari kulit samak (42)	351.771	9.240.993	5,48
6.	Instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis (90)	252.817	7.755.766	4,60
7.	Bahan bakar mineral (27)	9.322.101	7.459.312	4,42
8.	Minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik (33)	70.273	7.165.315	4,25
9.	Kendaraan dan bagiannya (87)	127.158	6.058.827	3,59
10.	Karet dan barang dari karet (40)	233.023	4.626.193	2,74
11.	Tembakau dan rokok (24)	70.355	4.581.540	2,72
12.	Kendaraan udara dan bagiannya (88)	12.906	3.596.264	2,13
13.	Berbagai barang logam tidak mulia (83)	120.650	2.305.501	1,37
14.	Tutup kepala dan bagiannya (65)	179.903	2.268.438	1,34
15.	Barang dari besi dan baja (73)	75.891	2.234.131	1,32
16.	Ikan, krustasea, dan moluska (03)	1.827	2.218.341	1,31
17.	Pakaian dan aksesorinya (rajutan) (61)	61.131	2.208.171	1,31
18.	Berbagai barang buatan pabrik (96)	79.005	1.657.202	0,98
19.	Plastik dan barang dari plastik (39)	140.171	1.546.363	0,92
20.	Daging hewan (02)	6.912	1.349.486	0,80
21.	Komoditas Lainnya / Other Commodities	899.240	16.016.371	9,49
	Jumlah / Total:	**54.549.674**	**168.744.783**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/27/42/impor-provinsi-bali-menurut-kelompok-komoditas-utama-2017-2022.html

Berdasarkan data perdagangan luar negeri Provinsi Bali periode 2020-2024, terlihat dinamika yang mencerminkan resiliensi ekonomi daerah dengan karakteristik surplus perdagangan yang konsisten. Nilai ekspor menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan dari US$ 456,38 juta pada 2020 menjadi US$ 634,50 juta pada 2024, meskipun mengalami fluktuasi minor pada 2023. Sebaliknya, impor mengalami volatilitas signifikan, terutama kontraksi drastis pada 2021 menjadi US$ 35,91 juta dari US$ 83,89 juta pada 2020, yang mengindikasikan dampak pandemi *COVID*-19 terhadap daya beli dan aktivitas ekonomi domestik. Periode pemulihan impor dimulai pada 2022 dan berlanjut hingga 2024 dengan nilai tertinggi US$ 168,74 juta, menunjukkan normalisasi aktivitas ekonomi dan peningkatan konsumsi. Neraca perdagangan Bali tetap surplus sepanjang periode observasi dengan puncak tertinggi pada 2022 sebesar US$ 534,28 juta, kemudian mengalami penyesuaian pada 2023-2024 menjadi sekitar US$ 465 juta akibat peningkatan impor yang lebih cepat dibandingkan ekspor. Kondisi ini mencerminkan struktur ekonomi Bali yang berorientasi ekspor dengan daya saing yang solid, namun juga menunjukkan peningkatan kebutuhan impor seiring dengan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi.

Tabel 2.80
Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Tahunan Provinsi Bali
Tahun 2020-2024

Indikator Perdagangan Luar Negeri	Ekspor Impor Tahunan Provinsi Bali (US$)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor	456.379.063	508.167.138	616.975.629	581.022.971	634.496.917
Impor	83.888.833	35.913.626	82.697.940	122.068.302	168.744.783
Neraca Perdagangan	372.490.230	472.253.512	534.277.689	458.954.669	465.752.134

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/indicator/8/235/1/ekspor-impor-tahunan-provinsi-Bali.html

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.6.1 Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sebuah negara. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran kualitas infrastruktur menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Salah satu metode pengukuran yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan Indeks Infrastruktur atau Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur.

Indeks Infrastruktur atau Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan sebuah ukuran komposit yang menggabungkan berbagai indikator untuk menilai kualitas dan kinerja infrastruktur di suatu wilayah. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi infrastruktur, baik dari segi ketersediaan, aksesibilitas, maupun kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya indeks ini, para pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan infrastruktur di wilayahnya, serta merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas infrastruktur secara keseluruhan. Berikut adalah data indeks infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Bali.

Tabel 2.81
Data Indeks Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Indikator Sasaran OPD	Meta Indikator	Tahun	BM	SDA	PAM	PBL
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase capaian kondisi infrastruktur ke-PU-an dalam kondisi baik	**2019**	82,66%	57,46%	88,00%	56,84%
		2020	78,25%	62,47%	78,80%	56,31%
		2021	77,98%	58,06%	75,00%	68,00%
		2022	79,95%	49,00%	92,00%	71,47%
		2023	74,64%	48,50 %	91,44%	74,00%
		2024	81,16%	64,91%	91,50%	75,00%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

2.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Hunian layak terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum. Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian atau rumah layak huni, apabila memenuhi empat kriteria, yaitu:

1. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m^2 per kapita (*sufficient living space*);
2. Memiliki akses terhadap air minum layak;
3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak;
4. Ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton, genteng, seng, kayu, sirap; dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu, kawat, kayu, papan, batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer, granit, keramik, parket, vinil, karpet, ubin, tegel, teraso, kayu, papan, semen, bata merah.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.82 berikut.

Tabel 2.82
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi (Persen)

Provinsi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi (Persen)				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bali	77,05	78,47	81,65	84,26	85,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia
URL: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI0MSMy/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-menurut-provinsi--persen-.html

Analisis data persentase rumah tangga di Provinsi Bali yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan. Capaian aksesibilitas hunian meningkat sebesar 8,94 poin persentase,

dari 77,05% pada tahun 2020 menjadi 85,99% pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 2,24 poin persentase. Akselerasi tertinggi terjadi pada periode 2021-2022 (meningkat 3,18 poin persentase) dan 2022-2023 (meningkat 2,61 poin persentase), yang mengindikasikan intensifikasi program perumahan pada masa pemulihan pascapandemi. Peningkatan berkelanjutan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penyediaan hunian layak melalui berbagai skema pembiayaan dan pembangunan perumahan, termasuk program subsidi perumahan dan pengembangan infrastruktur pendukung pemukiman. Capaian 85,99% pada 2024 mengindikasikan bahwa Provinsi Bali semakin mendekati target *universal access to adequate housing*, meskipun masih terdapat sekitar 14% rumah tangga yang memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut untuk menjamin pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau.

Tabel 2.83 Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bali

Data/Proyeksi	Jumlah	Data /Proyeksi	Jumlah
Jumlah Penduduk 2024	4.375.263		https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/
Jumlah KK (asumsi 1 KK 4 org)	1.093.816	100	SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Asumsi Jumlah Rumah	1.093.816		diasumsikan jumlah rumah sama dengan jumlah KK
Jumlah RTLH	33.086	3,02	Sumber Kabupaten/Kota (data bersifat dinamis)
Jumlah Rumah Layak	1.060.730	96,98	Jumlah Rumah dikurangi jumlah RTLH
Rata Penanganan RTLH	1.539	0,14	Rataan Jumlah penanganan BSPS (APBN), Barusami (APBD Provinsi), APBD Kab/Kota dan TJSL dari tahun 2023 dan 2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Berdasarkan Tabel 2.83 mengenai kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Bali tahun 2024, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 4.375.263 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sekitar 1.093.816, berdasarkan asumsi satu KK terdiri atas empat orang. Dari jumlah tersebut, asumsi jumlah rumah yang ada juga sama dengan jumlah KK, yaitu 1.093.816 unit. Data menunjukkan masih terdapat 33.086 unit rumah tidak layak huni atau sekitar 3,02 persen dari total rumah di Bali. Upaya penanganan RTLH selama periode 2023 hingga 2024 telah mencapai 1.539 unit atau 0,14 persen dari total kebutuhan. Dengan demikian, masih tersisa 31.060 unit rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan, setara dengan 96,98 persen dari total kebutuhan. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun sudah ada intervensi melalui program pemerintah pusat maupun daerah, kebutuhan perbaikan RTLH di Bali masih sangat besar dan memerlukan strategi serta kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar kualitas hunian masyarakat dapat meningkat secara merata.

2.3.6.3 Persentase Desa Mandiri

Provinsi Bali sebagai destinasi pariwisata global memiliki karakteristik unik dalam konteks pembangunan perdesaan, menjadikan analisis terhadap Persentase Desa Mandiri di wilayah ini memerlukan perspektif yang mempertimbangkan kompleksitas interaksi antara modernitas dan nilai-nilai tradisional. Fenomena desa mandiri di Bali tidak dapat dipisahkan dari konsep filosofis *Tri Hita Karana* yang melandasi struktur sosio-kultural masyarakat Bali, dimana keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), dengan sesama manusia (*pawongan*), dan dengan lingkungan (*palemahan*) menjadi fondasi epistemologis dalam konstruksi kemandirian desa.

Persentase Desa Mandiri di Provinsi Bali merepresentasikan manifestasi kuantitatif dari kapasitas desa-desa dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan tuntutan pembangunan kontemporer, menciptakan model kemandirian yang bersifat kontekstual namun tetap relevan dengan parameter nasional. Berdasarkan data persentase dan jumlah desa mandiri di Provinsi Bali periode 2020-2024, terlihat akselerasi transformasi pembangunan desa yang mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa secara sistematis. Persentase desa mandiri mengalami peningkatan eksponensial dan konsisten dari 33,18% (211 desa) pada 2020 menjadi 87,42% (556 desa) pada 2024, menunjukkan pertumbuhan rata-rata sekitar 13-14% per tahun. Dinamika ini mengindikasikan efektivitas program Dana Desa, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi lokal yang berhasil meningkatkan kapasitas produktif dan kemandirian desa-desa di Bali. Peningkatan paling signifikan terjadi pada periode 2022-2023 dengan lonjakan dari 60,69% menjadi 78,93%, yang mencerminkan momentum percepatan pembangunan pasca-pandemi *COVID*-19 dan optimalisasi alokasi anggaran desa. Total pertambahan 345 desa mandiri dalam empat tahun menunjukkan bahwa hampir 9 dari 10 desa di Bali telah mencapai status kemandirian, yang mengindikasikan keberhasilan strategi pembangunan bottom-up, penguatan ekonomi berbasis kearifan lokal, serta sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2.84
Persentase dan Jumlah Desa Mandiri Provinsi Bali
Tahun 2020-2024

Provinsi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bali	33,18% (211 Desa)	46,54% (296 Desa)	60,69% (386 Desa)	78,93% (502 Desa)	87,42% (556 Desa)

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Dalam kerangka otonomi daerah, kemampuan fiskal menjadi penentu utama kemandirian suatu wilayah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator kuantitatif yang mengukur proporsi kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai ekonomi yang dihasilkan wilayah tersebut dalam satu periode. Rasio ini tidak hanya merefleksikan kapasitas fiskal daerah dalam memobilisasi sumber daya domestik, tetapi juga mengungkap sejauh mana struktur perekonomian lokal mampu mendukung basis pajak yang berkelanjutan.

Secara teoritis, rasio yang ideal mencerminkan keseimbangan antara optimalisasi potensi pajak dan pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan PDRB seharusnya diiringi oleh peningkatan penerimaan pajak yang proporsional. Namun, dalam praktiknya, variasi rasio antarwilayah menunjukkan disparitas yang signifikan, dipengaruhi oleh faktor struktural seperti dominasi sektor ekonomi informal, keterbatasan basis industri yang *taxable*, dan heterogenitas karakteristik demografis, serta faktor kebijakan seperti desain tarif pajak, efisiensi administrasi perpajakan, dan tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Studi empiris mengidentifikasi bahwa daerah dengan rasio rendah cenderung bergantung pada transfer pusat, berpotensi menghambat fleksibilitas fiskal dan inisiatif pembangunan berbasis lokal. Sebaliknya, rasio tinggi yang tidak diimbangi pertumbuhan ekonomi justru dapat menimbulkan risiko *overtaxation* yang berdampak negatif terhadap iklim investasi.

Dengan demikian, analisis terhadap rasio ini menjadi landasan kritis untuk mengevaluasi efektivitas sistem desentralisasi fiskal, mengidentifikasi celah kebijakan, dan merumuskan strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selaras dengan prinsip keadilan dan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB melalui pendekatan multidimensi, mengintegrasikan perspektif ekonomi makro, kelembagaan, dan kebijakan, guna memberikan kontribusi teoretis

dan rekomendasi praktis bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan.

Tabel 2.85
Distribusi PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)

PDRB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Distribusi PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,68	13,74	13,42
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	9,93	9,32	9,15
a. Tanaman Pangan	1,65	1,54	1,42
b. Tanaman Hortikultura	1,8	1,69	1,63
c. Perkebunan	1,47	1,36	1,34
d. Peternakan	4,8	4,54	4,57
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,21	0,19	0,18
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	-	-
3. Perikanan	4,74	4,42	4,27
B. Pertambangan dan Penggalian	0,94	0,89	0,85
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-
3. Pertambangan Bijih Logam	-	-	-
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,94	0,89	0,85
C. Industri Pengolahan	6,58	6,23	6,24
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-
2. Industri Makanan dan Minuman	3,09	3,01	3,25
3. Pengolahan Tembakau	0,03	0,02	0,02
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,41	0,36	0,34
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,15	0,14	0,13
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1,76	1,64	1,48
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,03	0,03	0,02
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,06	0,06	0,06
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,11	0,1	0,09
10. Industri Barang Galian bukan Logam	0,34	0,32	0,31
11. Industri Logam Dasar	-	-	-
12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	0,07	0,06	0,06
13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	-	-	-
14. Industri Alat Angkutan	-	-	-
15. Industri Furnitur	0,39	0,36	0,33
16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,14	0,13	0,14

PDRB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Distribusi PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2022	2023	2024
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,23	0,23	0,24
1. Ketenagalistrikan	0,22	0,23	0,24
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	-	-	-
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,16	0,15
F. Konstruksi	10,65	9,77	9,24
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,19	8,96	8,69
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1,85	1,74	1,67
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	7,34	7,22	7,02
H. Transportasi dan Pergudangan	7,7	10,08	10,26
1. Angkutan Rel	-	-	-
2. Angkutan Darat	0,91	0,94	0,98
3. Angkutan Laut	0,09	0,09	0,08
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	1,74	1,71	1,72
5. Angkutan Udara	4,26	6,48	6,62
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	0,7	0,87	0,87
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,98	19,93	21,42
1. Penyediaan Akomodasi	8,93	10,9	12,16
2. Penyediaan Makan Minum	9,05	9,03	9,25
J. Informasi dan Komunikasi	6,13	5,66	5,4
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,68	4,84	5,18
1. Jasa Perantara Keuangan	4,03	4,19	4,52
2. Asuransi dan Dana Pensiun	0,25	0,26	0,26
3. Jasa Keuangan Lainnya	0,4	0,39	0,4
4. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
L. Real Estate	4,35	4,03	3,84
M,N. Jasa Perusahaan	1,17	1,15	1,16
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,56	5,06	5
P. Jasa Pendidikan	5,55	4,98	4,77
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,64	2,48	2,37
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,8	1,79	1,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzY4IzI=/distribusi-pdrb-tahunan-provinsi-bali-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html

Analisis distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali periode 2022-2024 menunjukkan transformasi struktural ekonomi yang signifikan dengan penguatan dominasi sektor pariwisata dan jasa. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum konsisten menjadi kontributor utama dengan peningkatan substansial dari 17,98% menjadi 21,42%, diikuti oleh subsektor Penyediaan Akomodasi

yang bertumbuh dari 8,93% menjadi 12,16%. Secara paralel, sektor Transportasi dan Pergudangan mencatatkan ekspansi signifikan dari 7,7% menjadi 10,26% yang mengindikasikan pemulihan aktivitas mobilitas dan pariwisata. Kontras dengan tren tersebut, sektor primer mengalami kontraksi berkelanjutan dengan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menurun dari 14,68% menjadi 13,42%, sementara sektor Konstruksi juga mengalami penurunan dari 10,65% menjadi 9,24%. Struktur ekonomi Bali semakin terkonsentrasi pada lima sektor utama (Akomodasi dan Makan Minum, Pertanian, Transportasi, Perdagangan, dan Konstruksi) yang secara kolektif menyumbang 64,03% dari total PDRB. Pola distribusi sektoral ini mengonfirmasi ketergantungan tinggi ekonomi Bali pada industri pariwisata dan menggambarkan akselerasi transformasi struktural dari ekonomi berbasis primer menuju ekonomi jasa, dengan implikasi pada kebutuhan diversifikasi ekonomi untuk meningkatkan resiliensi terhadap guncangan eksternal.

2.3.7.2 Tingkat Inflasi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Bulan Desember 2024 secara *year on year (y-on-y)*, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 2,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2022=100) sebesar 107,87. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 2,69 persen dengan IHK sebesar 108,16 dan inflasi terendah tercatat di Singaraja sebesar 1,93 persen dengan IHK sebesar 107,70.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2024 di Provinsi Bali yang diwakili Kota Denpasar, Singaraja, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan secara tahunan menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Bali di 4 kabupaten/kota tersebut, pada Desember 2024 terjadi inflasi *y-on-y* sebesar 2,34 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,40 pada Desember 2023 menjadi 107,87 pada Desember 2024. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (*year to date/ ytd*) Desember 2024 tercatat inflasi sebesar 2,34 persen, sedangkan inflasi bulanan (*m-to-m*) tercatat inflasi sebesar 0,31 persen

Inflasi tahunan (*y-on-y*) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sepuluh kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 3,87 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,41 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,78 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,81 persen; kelompok transportasi sebesar 0,53 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,83 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,99 persen; kelompok

penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,18 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,41 persen. Sementara itu, satu kelompok tercatat mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,55 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi *y-on-y* pada bulan Desember 2024 antara lain daging babi, beras, kopi bubuk, daging ayam ras, minyak goreng, bawang merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), tarif parkir, nasi dengan lauk, tomat, Sigaret Putih Mesin (SPM), canang sari, bawang putih, emas perhiasan, biaya akademi/perguruan tinggi, biaya Sekolah Dasar, biaya Sekolah Menengah Pertama, kue kering berminyak, Sigaret Kretek Tangan (SKT), dan kangkung. Sementara itu, komoditas yang menahan laju inflasi dengan memberikan sumbangan negatif, antara lain cabai rawit, cabai merah, bensin, telepon seluler, vitamin, pepaya, wortel, tongkol diawetkan, labu siam/jipang, kentang, tarif angkutan udara, sabun cair/cuci piring, garam, kol putih/kubis, apel, susu bubuk, buncis, *hand body lotion*, wafer, dan sawi putih/pecay/pitsai.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil inflasi *m-to-m* pada bulan Desember 2024 antara lain bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, sawi hijau, kopi bubuk, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, minyak goreng, kacang panjang, bayam, canang sari, bawang putih, jagung manis, kol putih/kubis, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, telur ayam ras, dan ikan teri. Sementara itu, komoditas yang menahan laju inflasi dengan memberikan sumbangan negatif, antara lain daging babi, tarif angkutan udara, daging ayam ras, kangkung, beras, bahan bakar rumah tangga, pisang, jeruk, pasta gigi, dan apel.

Pada Desember 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,20 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,06 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,20 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,40 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,32 persen. Sedangkan kelompok yang menahan laju inflasi dengan memberikan sumbangan negatif, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,03 persen.

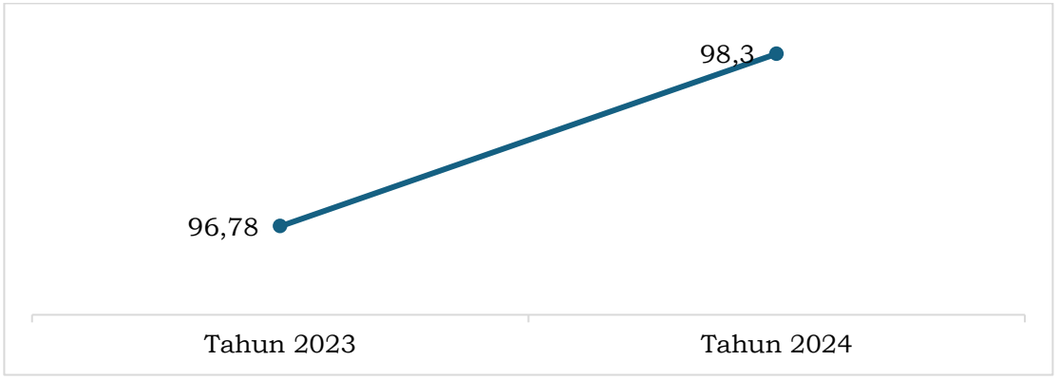
2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) Provinsi Bali merupakan instrumen evaluasi komprehensif yang dirancang untuk mengukur progres dan efektivitas implementasi kebijakan reformasi hukum di tingkat regional. Sebagai bagian integral dari agenda nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, IRH berfungsi sebagai alat diagnostik untuk menilai kinerja sektor hukum melalui indikator multidimensi, meliputi aspek penegakan hukum, transparansi institusi peradilan, kualitas regulasi, akses masyarakat terhadap keadilan, serta keselarasan kebijakan lokal dengan prinsip hukum universal. Dalam konteks Bali, IRH tidak hanya merefleksikan upaya sistematis pemerintah daerah dalam menyelaraskan kerangka regulasi dengan dinamika sosio-kultural unik, juga menjadi tolok ukur responsivitas hukum terhadap tantangan global, termasuk tekanan lingkungan, investasi asing, dan kebutuhan perlindungan hak masyarakat adat. Analisis IRH Bali mengungkap sinergi antara modernitas hukum formal dan nilai-nilai kultural yang menjadi fondasi tata kehidupan masyarakat, sekaligus menyoroti celah struktural yang perlu diperbaiki guna memastikan konsistensi penegakan hukum, peningkatan akuntabilitas birokrasi, dan penguatan partisipasi publik dalam proses legislasi. Dengan demikian, IRH tidak sekadar menjadi indikator statis, melainkan peta jalan strategis bagi pemangku kepentingan dalam memperkuat pondasi hukum yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil Indeks Reformasi Hukum di Provinsi Bali pada tahun 2023-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.44
Indeks Reformasi Hukum Provinsi Bali Tahun 2023-2024
Sumber: Kementerian Hukum Republik Indonesia Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar-instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau

SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memerhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018–2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005–2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025. Berikut hasil SPBE pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.86 berikut.

Tabel 2.86
Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Provinsi Bali
Tahun 2022 - 2024

Nama Instansi	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat
Pemerintah Kabupaten Buleleng	2	Cukup	3,45	Baik	3,69	Sangat Baik
Pemerintah Kabupaten Jembrana	3	Baik	3,14	Baik	3,77	Sangat Baik
Pemerintah Kabupaten Karangasem	2	Cukup	2,30	Cukup	2,57	Cukup
Pemerintah Kabupaten Bangli	2	Cukup	2,48	Cukup	2,71	Baik
Pemerintah Kabupaten Badung	2	Kurang	3,66	Sangat Baik	3,87	Sangat Baik
Pemerintah Kabupaten Tabanan	2	Cukup	3,77	Sangat Baik	3,54	Sangat Baik
Pemerintah Kabupaten Klungkung	3	Baik	3,02	Baik	3,14	Baik
Pemerintah Kabupaten Gianyar	3	Baik	3,14	Baik	3,49	Baik
Pemerintah Kota Denpasar	3	Baik	3,80	Sangat Baik	3,96	Sangat Baik
Pemerintah Provinsi Bali	3,68	Sangat Baik	4,07	Sangat Baik	4,30	Memuaskan

Sumber: Satu Data Indonesia Provinsi Bali;_MenpanRB
URL:https://www.baliprov.go.id/web/pemerintah-provinsi-bali-kembali-raih-predikat-sangat-baik-dalam-evaluasi-spbe-tahun-2023/; https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/KEPMEN/jenis/1972?KEPUTUSAN%20MENTERI

Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Bali periode 2022-2024 menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif dalam implementasi tata kelola pemerintahan digital. Pemerintah Provinsi Bali mencatatkan prestasi tertinggi dengan indeks 4,30 pada tahun 2024 dan meraih predikat "Memuaskan", meningkat dari 4,07 pada dua tahun sebelumnya. Pencapaian ini menempatkan Bali sebagai salah satu provinsi dengan implementasi SPBE terbaik di Indonesia.

Transformasi digital paling dramatis terjadi di Kabupaten Badung dan Buleleng yang berhasil meningkatkan indeks SPBE mereka hampir dua kali lipat. Badung melonjak dari 2,00 (Kurang) menjadi 3,87 (Sangat Baik), sementara Buleleng naik dari 2,00 menjadi 3,69 (Sangat Baik). Peningkatan serupa juga dicapai Kabupaten Jembrana yang naik dari 3,00 menjadi 3,77 dengan predikat Sangat Baik.

Pada tahun 2024, dari 11 instansi yang dipantau, enam instansi berhasil meraih predikat "Sangat Baik" (Provinsi Bali, Buleleng, Badung, Tabanan, Gianyar, dan Denpasar), empat instansi berpredikat "Baik" (Jembrana, Bangli, Klungkung, dan Gianyar), dan hanya Kabupaten Karangasem yang masih berpredikat "Cukup" dengan indeks 2,57. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah di Bali dalam mewujudkan transformasi digital yang merata, mendukung pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan visi Indonesia Digital.

2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Tingkat kepatuhan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik dengan cara mengetahui hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, seperti ada atau tidaknya persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah dan nyaman, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data Ombudsman RI, Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2022 memperoleh nilai kepatuhan pelayanan publik sebesar 94,01, termasuk kategori “zona hijau” dengan opini kualitas tertinggi kedua dari 34 provinsi tingkat Pemerintah Provinsi se-Indonesia. Peringkat pertama diraih Pemerintah Sulawesi Selatan dengan nilai 98,15. Semua kabupaten/kota di Bali juga meraih predikat “zona hijau” dengan opini kualitas tertinggi. Adapun raihan kepatuhan pelayanan publik menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Denpasar dengan nilai 93,27 masuk zonasi hijau dengan opini kualitas tertinggi (rangking 5 dari 98 kota se-Indonesia).

2. Pemerintah Kabupaten Badung dengan nilai 97,53 masuk zonasi hijau dengan opini kualitas tertinggi (rangking 2 dari 415 kabupaten se-Indonesia).
3. Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan nilai 94,00 masuk zonasi hijau dengan opini kualitas tertinggi (rangking 4 dari 415 kabupaten se-Indonesia).
4. Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan nilai 93,80 masuk zonasi hijau dengan opini kualitas tertinggi (rangking 5 dari 415 kabupaten se-Indonesia).
5. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan nilai 93,55 masuk zonasi hijau dengan opini kualitas tertinggi (rangking 6 dari 415 kabupaten se-Indonesia).
6. Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan nilai 93,23 masuk zonasi hijau dengan opini kualitas tertinggi (rangking 8 dari 415 kabupaten se-Indonesia).
7. Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan nilai 91,70 masuk zonasi hijau dengan opini kualitas tertinggi (rangking 16 dari 415 kabupaten se-Indonesia).
8. Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan nilai 90,47 masuk zonasi hijau dengan opini kualitas tertinggi (rangking 27 dari 415 kabupaten se-Indonesia).
9. Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan nilai 89,77 masuk zonasi hijau dengan opini kualitas tertinggi (rangking 35 dari 415 kabupaten se-Indonesia).

Indeks pelayanan publik merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan transformasi tata kelola yang berintegritas dan koordinatif. Berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Pemerintah Provinsi Bali yang terdiri atas sembilan kabupaten/kota memperoleh nilai kepatuhan pelayanan publik yang baik dan termasuk kategori “zona hijau”. Namun demikian, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya agar senantiasa meningkatkan kembali kualitas pengawasan pelayanan publik, kepatuhan tinggi provinsi/kabupaten/kota atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta terlaksananya pengembangan jaringan pengawasan pelayanan publik yang semakin baik.

2.4.1.4 Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) sebagai instrumen pengukuran komprehensif merepresentasikan manifestasi empiris dari upaya sistematis pemerintah dalam mengevaluasi dan memetakan dimensi integritas dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks Provinsi Bali yang memiliki karakteristik sosio-kultural distingtif dengan filosofi *Tri Hita Karana* sebagai landasan epistemologis, implementasi dan perkembangan IIN memerlukan perspektif analisis yang mengintegrasikan parameter nasional dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Provinsi Bali, dengan posisinya sebagai destinasi pariwisata global dan pusat kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai harmoni, menghadapi tantangan unik dalam menjaga integritas institusional di tengah kompleksitas interaksi antara dinamika global dan struktur tradisional. Diskursus akademis tentang IIN di Bali tidak dapat dipisahkan dari konteks historis perkembangan tata kelola pemerintahan di provinsi ini, di mana konsep integritas telah mengalami rekontekstualisasi melalui interaksi dialektis antara modernitas administratif dan nilai-nilai tradisional seperti konsep *'dharma'* dan *'rwa bhineda'*. Signifikansi analisis terhadap IIN di Bali semakin relevan mengingat provinsi ini menunjukkan trajektori perkembangan yang distingtif dalam parameter integritas dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, mengindikasikan adanya faktor determinan yang bersifat *spasial* dan kontekstual.

Studi komprehensif terhadap IIN di Bali memfasilitasi pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi determinan struktural dan kultural yang mempengaruhi capaian integritas, memetakan disparitas *spasial* antarkabupaten/kota, serta merumuskan intervensi kebijakan yang responsive terhadap karakteristik lokal namun tetap koheren dengan agenda reformasi birokrasi nasional. Analisis ini tidak hanya berkontribusi pada korpus pengetahuan tentang implementasi nilai integritas dalam konteks pluralisme kultural, tetapi juga menyediakan basis empiris untuk pengembangan model tata kelola yang adaptif, transformatif, dan berkelanjutan di Provinsi Bali. Secara manajerial, SPI menunjukkan bahwa skor Indeks Integritas Nasional berada pada angka 71,53 poin, sedangkan skor Indeks Integritas Provinsi serta Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali mencapai 77,09 poin.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

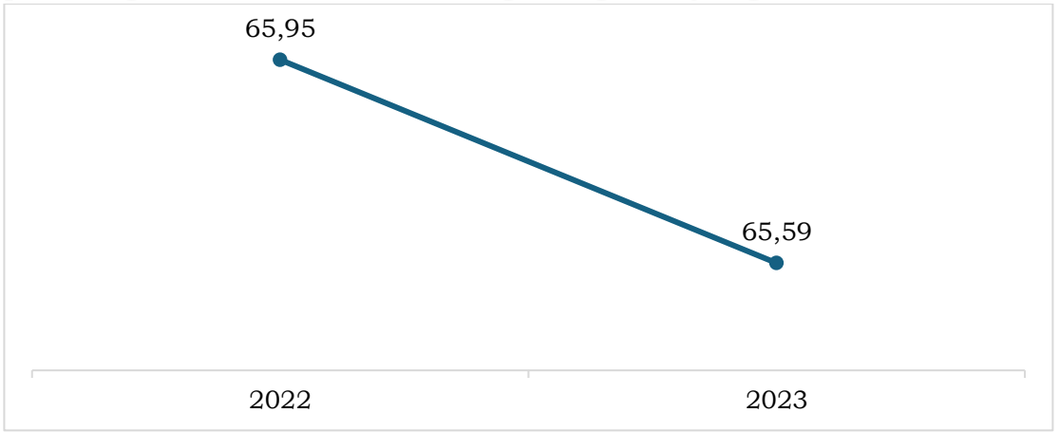
2.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan serangkaian tindakan dan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan implementasi dan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, penegakan Perda melibatkan berbagai aspek kelembagaan yang dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai institusi utama, bekerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian dan kejaksaan melalui pembentukan tim terpadu penegakan Perda.

Secara operasional, penegakan Perda dilaksanakan melalui pengawasan rutin, tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi, serta penindakan terhadap pelanggaran yang meliputi pemberian sanksi administratif dan pidana sesuai ketentuan. Proses ini

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari mekanisme peringatan dan teguran, proses penyidikan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), hingga penyelesaian pelanggaran melalui jalur hukum dan eksekusi sanksi atau denda.

Aspek pembinaan menjadi komponen penting dalam penegakan Perda, mencakup sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan pelaku usaha, peningkatan kesadaran hukum, serta pendampingan dalam penyesuaian terhadap Perda. Seluruh proses penegakan ini kemudian dievaluasi secara berkala melalui monitoring pelaksanaan, evaluasi efektivitas, penilaian tingkat kepatuhan masyarakat, serta pelaporan dan dokumentasi hasil penegakan. Melalui pendekatan komprehensif ini, penegakan Perda menjadi instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku.



Gambar 2.45
Persentase Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Sumber: Satu Data Indonesia Provinsi Bali
URL: https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/persentase-penegakan-perda?year=2022&month=&date=

Gambar 2.45 menyajikan data perbandingan Persentase Penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Bali antara tahun 2022 dan 2023, yang menunjukkan adanya tren penurunan dalam efektivitas penegakan regulasi daerah. Berdasarkan visualisasi data tersebut, dapat diobservasi bahwa pada tahun 2022, persentase penegakan Perda mencapai 65,95%, sementara pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 65,59%, menunjukkan penurunan sebesar 0,36 poin persentase.

Analisis terhadap tren penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Bali. Meskipun penurunan yang terjadi relatif kecil (kurang dari 1%), hal ini tetap memerlukan perhatian serius dari pemangku kepentingan terkait. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas dalam proses penegakan, keterbatasan sumber daya, atau mungkin adanya perubahan dalam pendekatan penegakan Perda yang diterapkan.

Data yang bersumber dari Bali Satu Data ini memberikan gambaran penting tentang dinamika penegakan Perda di Provinsi Bali. Meskipun angka penegakan masih berada di level yang cukup baik (di atas 65%), tren penurunan ini dapat menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap strategi penegakan Perda yang ada, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan penguatan atau penyesuaian dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan Perda di masa mendatang.

2.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) merupakan indikator fundamental dalam menilai kemajuan suatu negara atau wilayah dalam menerapkan prinsip keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan inklusif. Persentase Capaian Aksi HAM menjadi parameter kuantitatif yang merefleksikan sejauh mana komitmen pemerintah dalam merealisasikan agenda-agenda HAM yang tertuang dalam kebijakan, program, atau rencana aksi nasional/daerah. Rasio ini tidak hanya mengukur tingkat implementasi kebijakan, tetapi juga mengungkap efektivitas mekanisme koordinasi antarlembaga, partisipasi masyarakat sipil, serta ketersediaan sumber daya dalam mendorong transformasi sosial yang berorientasi pada hak dasar. Secara teoretis, capaian tinggi menunjukkan harmonisasi antara norma HAM internasional dengan praktik lokal, sementara capaian rendah mengindikasikan adanya *gap* struktural seperti ketimpangan regulasi, lemahnya akuntabilitas institusi, atau resistensi budaya terhadap prinsip HAM universal.

Studi empiris menunjukkan bahwa disparitas persentase capaian antarwilayah atau antarnegara seringkali dipengaruhi oleh kompleksitas faktor seperti tingkat kesadaran hukum masyarakat, kapasitas kelembagaan penegak HAM, dinamika politik, serta keberadaan mekanisme pemantauan yang independen. Di sisi lain, capaian yang bersifat simbolis tanpa disertai dampak nyata pada kelompok rentan dapat menimbulkan distorsi dalam menilai keseriusan negara dalam memenuhi kewajiban HAM-nya. Analisis mendalam terhadap persentase ini menjadi krusial tidak hanya untuk memetakan progresivitas kebijakan publik, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan sistemik yang menghambat optimalisasi perlindungan HAM, seperti korupsi, bias implementasi, atau minimnya alokasi anggaran berbasis hak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tren, determinan, dan implikasi Persentase Capaian Aksi HAM melalui pendekatan multidisiplin yang memadukan perspektif hukum, *governance*, dan sosiologis, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat konvergensi antara kebijakan HAM teoritis dengan praktik di lapangan.

2.4.2.3 Indeks Demokrasi Provinsi

Indeks Demokrasi Provinsi Bali dari tahun 2013 sampai dengan 2020 (dengan metode lama) mengalami peningkatan dari 72,22 menjadi 82,37 di tahun 2018 dan selanjutnya terus menurun hingga menjadi 77,59 di tahun 2020. Tingkat demokrasi di Bali pada tahun 2013–2017 termasuk kategori "sedang" dan tahun 2018–2019 meningkat menjadi kategori "baik", tetapi pada tahun 2020 menurun kembali menjadi "sedang". Secara nasional, IDI Bali dalam periode 2013–2020 selalu lebih tinggi daripada IDI nasional.

Jika dilihat per aspek dari IDI, Indeks Kebebasan Sipil dalam periode 2013–2022 berkisar antara 90,6–96,94. Sementara itu, Indeks Hak-Hak Politik berkisar antara 52,87–77,42 dengan kecenderungan yang meningkat. Sementara itu, Indeks Lembaga Demokrasi berfluktuasi dengan angka berkisar 65,31–90,42. Jadi, penurunan IDI Bali dari 2018 sampai 2020 disebabkan oleh terjadi besarnya pengaruh penurunan Indeks Kebebasan Sipil.

Indeks Kebebasan Sipil (IKS) adalah indeks yang mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nilai IKS meliputi variabel, yaitu kekebasan berkumpul dan berserikat, kekebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Jika ditelusuri lebih lanjut, penurunan IKS disebabkan oleh penurunan nilai variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, variabel kebebasan, dan variabel kebebasan berkeyakinan.

Indeks Lembaga Demokrasi adalah indeks yang mengukur kinerja lembaga demokrasi yang termasuk di dalamnya, yakni penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independent, sedangkan Indeks Hak-hak Politik adalah indeks yang mengukur hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bali dengan metode baru pada tahun 2021 sebesar 75,35, berada di bawah IDI nasional sebesar 78,12. Namun, IDI Bali tahun 2022 meningkat menjadi 83,21 dan peningkatan ini melampaui IDI nasional sebesar 80,41. Indeks Demokrasi Provinsi Bali terus mengalami peningkatan di Tahun 2023, yakni sebesar 85,13.

Tabel 2.87
Indeks Demokrasi Provinsi Bali Tahun 2019–2024

Aspek Indeks Demokrasi	Indeks Demokrasi Provinsi Bali					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Metode Lama						
Aspek Kebebasan Sipil	90,60	96,86				
Hak-hak Politik	68,38	69,07				
Lembaga Demokrasi	90,42	66,90				
Metode Baru						
Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi			63,92	79,83	84,28	N/A
Indeks Kebebasan			84,62	85,78	85,23	N/A
Indeks Kesetaraan			77,25	83,90	85,75	N/A
Skor Indeks Demokrasi Bali	**81,38**	**77,59**	**75,35**	**83,21**	**85,13**	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/indicator/34/377/1/indeks-demokrasi-provinsi-Bali-menurut-aspek.html

Metode baru pengukuran IDI menggunakan tiga indikator, yaitu Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan, dan Indeks Kesetaraan. Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi adalah indeks yang terdapat dalam IDI pada metode baru penghitungan IDI. Dalam riset IDI dengan metode baru tersebut digunakan konsep dasar *demonopolisasi* yang mencakup tiga ranah, yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Untuk mengukur perkembangan demokrasi, demonopolisasi dioperasionalkan ke dalam tiga aspek, yaitu kebebasan (*liberalization*), kesetaraan (*equalization*), dan kapasitas lembaga demokrasi dengan jumlah indikator sebanyak 22 indikator yang berisi 7 indikator aspek kebebasan, 7 indikator aspek kesetaraan, dan 8 indikator kapasitas lembaga demokrasi. Pada metode lama, IDI terdiri atas 3 aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi Provinsi Bali pada tahun 2021 adalah 63,92, tahun 2022 meningkat menjadi 79,83, dan di tahun 2023 kembali meningkat menjadi 84,28.

Indeks Kebebasan adalah indeks yang terdapat dalam IDI pada metode baru penghitungan IDI. Dalam riset IDI dengan metode baru tersebut digunakan konsep dasar *demonopolisasi* yang mencakup tiga ranah, yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Untuk mengukur perkembangan demokrasi, *demonopolisasi* dioperasionalkan ke dalam tiga aspek, yaitu kebebasan (*liberalization*), kesetaraan (*equalization*), dan kapasitas lembaga demokrasi dengan jumlah indikator sebanyak 22 indikator yang berisi 7 indikator aspek kebebasan, 7 indikator aspek kesetaraan, dan 8 indikator kapasitas lembaga demokrasi. Pada metode lama, IDI terdiri dari 3 aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak

politik, dan lembaga demokrasi. Indeks Kebebasan Provinsi Bali pada tahun 2021 adalah 84,61, tahun 2022 meningkat menjadi 85,78, dan di tahun 2023 terjadi penurunan sedikit sebesar 85,23.

Indeks Kesetaraan adalah indeks yang terdapat dalam IDI pada metode baru penghitungan IDI. Dalam riset IDI dengan metode baru tersebut digunakan konsep dasar *demonopolisasi* yang mencakup tiga ranah, yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Untuk mengukur perkembangan demokrasi, *demonopolisasi* dioperasionalkan ke dalam tiga aspek, yaitu kebebasan (*liberalization*), kesetaraan (*equalization*), dan kapasitas lembaga demokrasi dengan jumlah indikator sebanyak 22 indikator yang berisi 7 indikator aspek kebebasan, 7 indikator aspek kesetaraan, dan 8 indikator kapasitas lembaga demokrasi. Pada metode lama, IDI terdiri atas 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Indeks Kesetaraan Provinsi Bali pada tahun 2021 adalah 77,25 dan tahun 2022 meningkat menjadi 83,90, serta di tahun 2023 meningkat sebesar 85,75.

2.4.2.4 Indeks Rasa Aman

Rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28G, ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Berjalan kaki sendirian di siang hari, yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, komplek perumahan, dan sebagainya) pada waktu siang hari (hari masih terang). Sementara itu, berjalan kaki sendirian di malam hari adalah berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, komplek perumahan, dan sebagainya) pada waktu malam hari (hari telah gelap).

Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya sebesar 62,80% pada level nasional. Dengan demikian, bisa dikatakan, lebih dari separuh masyarakat merasa tidak khawatir ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Dilihat lebih rinci pada level provinsi, terdapat variasi dalam persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya. Selama periode 2020, Provinsi Bali merupakan provinsi dengan persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya terbesar, yaitu mencapai 81,32%, diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat (75,98%), dan Provinsi DI Yogyakarta (75,60%). Provinsi dengan persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya terkecil adalah Provinsi DKI Jakarta (41,17%), dikuti oleh Provinsi

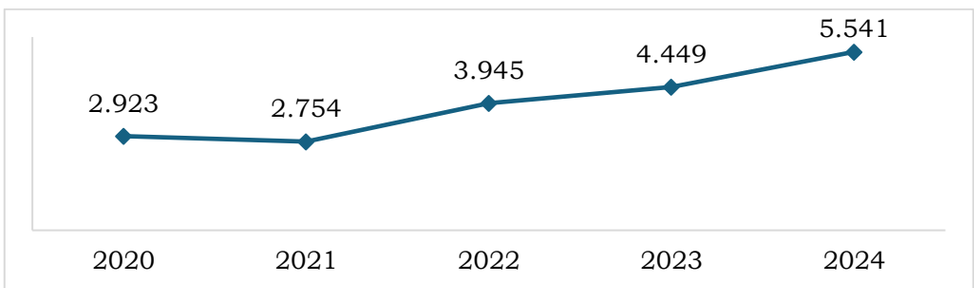
Jawa Barat, dan Provinsi Gorontalo dengan persentese masing-masing adalah 52,01% dan 53,36%.

Rasa aman penduduk berjalan sendirian di area tempat tinggalnya di Bali mengalami peningkatan dibandingkan hasil survei tahun 2017. Pada tahun ini persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya sebesar 73,43%, sedangkan di tingkat nasional sebesar 53,32%.

Berdasarkan data yang disajikan, Provinsi Bali memiliki tingkat rasa aman tertinggi di Indonesia, dengan 81,32% rumah tangga merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya pada tahun 2020.

2.4.2.5 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Analisis data jumlah tindak pidana di Provinsi Bali periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dengan pola pertumbuhan eksponensial. Setelah mengalami kontraksi marginal sebesar 5,8% pada 2020-2021 (dari 2.923 menjadi 2.754 kasus) yang kemungkinan dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas selama pandemi, insiden kriminalitas mencatatkan eskalasi dramatis pada periode berikutnya. Akselerasi tertinggi terjadi pada transisi 2021-2022 dengan peningkatan 43,2% menjadi 3.945 kasus, diikuti dengan pertumbuhan berkelanjutan sebesar 12,8% pada 2023 dan 24,5% pada 2024, hingga mencapai puncak 5.541 kasus. Secara keseluruhan, dalam rentang lima tahun terjadi peningkatan kumulatif sebesar 89,6% yang mengindikasikan kemungkinan transformasi substansial dalam dinamika sosial-ekonomi pascapandemi, efektivitas sistem penegakan hukum, dan potensial peningkatan aktivitas pelaporan. Tren ini memiliki implikasi krusial bagi formulasi kebijakan keamanan dan sistem peradilan pidana, serta memerlukan investigasi komprehensif terhadap determinan struktural yang mendorong eskalasi kriminalitas di tengah pemulihan sektor pariwisata.



Gambar 2.46
Jumlah Tindak Pidana di Provinsi Bali
Sumber: SIPD dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL: https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzk0IzI=/banyaknya-tindak-pidana-menonjol-menurut-jenisnya-di-provinsi-bali.html

Jumlah tindak pidana yang dilaporkan atau *crime total* menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.88 sebagai berikut.

Tabel 2.88
Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Kabupaten /Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	124	132	226	691	258
Tabanan	157	158	211	1.057	180
Badung	429	364	733	1.340	590
Gianyar	210	204	281	1.331	322
Klungkung	86	102	185	421	113
Bangli	89	130	143	260	111
Karangasem	118	105	125	802	159
Buleleng	257	273	339	1.168	585
Denpasar	1.019	896	1.117	3.372	2.208
Polda	434	390	585	447	978
Jumlah	**2.923**	**2.754**	**3.945**	**10.889**	**5.504**

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka 2025
URL:https://bali.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/c1546258bf024478ec028d7f/provinsi-bali-dalam-angka-2025.html

Fluktuasi tingkat kriminalitas di Provinsi Bali selama periode 2020-2024 mencerminkan dinamika sosial yang kompleks dan multidimensional. Penurunan tajam pada awal periode kemungkinan berkaitan dengan pembatasan mobilitas yang membatasi ruang gerak pelaku kriminal, namun pemulihan aktivitas sosial-ekonomi tampaknya diikuti oleh eskalasi tindak pidana hingga mencapai puncaknya. Tren penurunan pada akhir periode mengindikasikan adanya adaptasi sistem keamanan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Disparitas signifikan antar wilayah menunjukkan bahwa faktor kriminalitas tidak terdistribusi merata dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik lokal masing-masing daerah. Wilayah dengan aktivitas pariwisata tinggi cenderung mencatat angka kriminalitas yang lebih besar, mengingat padatnya interaksi sosial, heterogenitas populasi, dan intensitas transaksi ekonomi. Sebaliknya, daerah dengan karakteristik rural dan homogenitas sosial yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kriminalitas yang relatif terkendali.

Pola temporal yang teramati mengisyaratkan pentingnya pendekatan preventif dan responsif yang disesuaikan dengan konteks lokal. Keberhasilan penurunan angka kriminalitas pada tahun terakhir dapat menjadi momentum untuk memperkuat strategi pencegahan berbasis komunitas, peningkatan teknologi pengawasan, dan penguatan koordinasi antar-instansi penegak hukum. Pemahaman mendalam terhadap dinamika kriminalitas regional ini

menjadi kunci dalam merancang kebijakan keamanan yang efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tabel 2.89
Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan (*Crime Clearance*)
Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten /Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	162	129	183	541	199
Tabanan	150	149	188	844	143
Badung	341	318	352	992	403
Gianyar	195	166	221	1.040	263
Klungkung	95	113	131	366	85
Bangli	94	112	121	201	58
Karangasem	122	115	93	702	144
Buleleng	231	248	268	686	321
Denpasar	837	797	867	686	1.087
Polda	375	371	346	178	395
Jumlah	**2.602**	**2.518**	**2.770**	**6.236**	**3.098**

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka 2025
URL:https://bali.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/c1546258bf024478ec028d7f/provinsi-bali-dalam-angka-2025.html

Efektivitas penyelesaian tindak pidana di Provinsi Bali menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dengan tren peningkatan yang konsisten di hampir seluruh wilayah. Fenomena ini mencerminkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kriminal, didukung oleh modernisasi sistem investigasi dan koordinasi antar-instansi yang semakin baik. Peningkatan signifikan pada periode akhir mengindikasikan bahwa investasi dalam pengembangan sumber daya kepolisian mulai menunjukkan hasil yang konkret.

Variasi tingkat penyelesaian antar-wilayah mengungkapkan dinamika yang menarik dalam konteks penegakan hukum regional. Daerah perkotaan dengan kompleksitas kasus yang lebih tinggi justru menunjukkan angka penyelesaian yang impresif, menandakan ketersediaan infrastruktur investigasi yang memadai dan personel yang terlatih. Sementara itu, wilayah dengan karakteristik rural mempertahankan tingkat penyelesaian yang stabil, mencerminkan efektivitas pendekatan berbasis komunitas dalam penanganan kasus.

Korelasi antara jumlah kasus yang dilaporkan dengan tingkat penyelesaian mengisyaratkan adanya keseimbangan dinamis dalam sistem peradilan pidana di Bali. Meskipun terjadi fluktuasi dalam jumlah tindak pidana, kemampuan aparat untuk menyelesaikan kasus tetap terjaga bahkan cenderung meningkat. Hal ini memberikan sinyal positif bagi masyarakat bahwa sistem penegakan hukum berfungsi dengan baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan kejahatan.

Data jenis tindak pidana yang menonjol di Provinsi Bali berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.90 berikut.

Tabel 2.90
Jenis Tindak Pidana Menonjol Provinsi Bali
Tahun 2020–2024

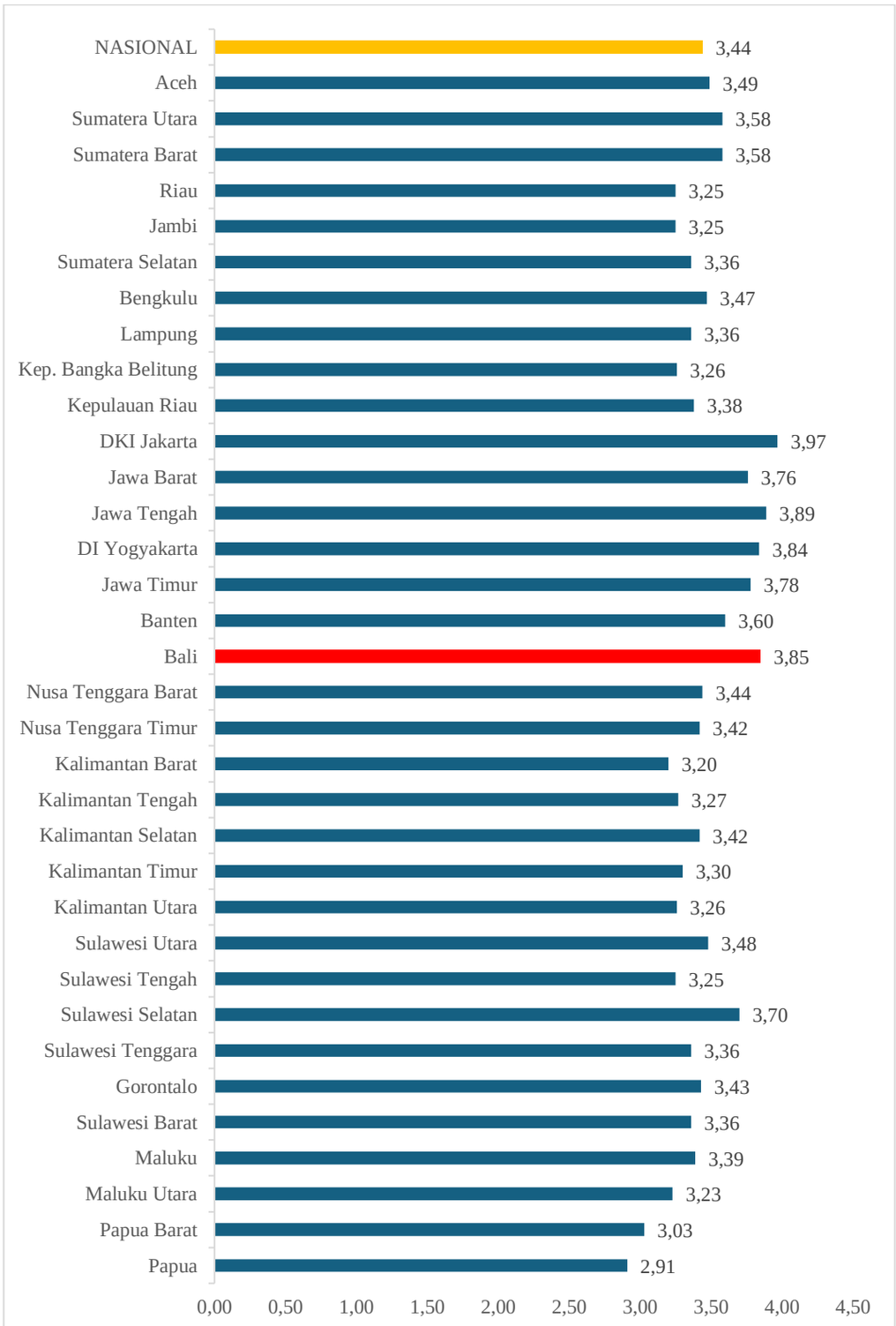
Jenis Tindak Pidana	2020	2021	2022	2023	2024
Pencurian dengan Pemberatan	265	240	344	371	448
Penipuan	83	88	220	381	378
Pencurian Biasa	289	355	577	739	946
Penggelapan	131	142	244	375	458
Penganiayaan Ringan	275	255	368	503	590
Penganiayaan Berat	12	7	5	9	47
Narkotika	**770**	**718**	**718**	**811**	**997**
Perjudian	55	75	80	39	39
Pencurian dengan Kekerasan	53	27	68	31	34
Lain-lain	990	847	1.321	1.490	1.604
Jumlah	**2.923**	**2.754**	**3.945**	**4.449**	**5.541**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
URL:https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzk0IzI=/banyaknya-tindak-pidana-menonjol-menurut-jenisnya-di-provinsi-bali.html

Berdasarkan data statistik keamanan di Bali, menunjukkan tren fluktuatif dalam hal jumlah dan jenis tindak pidana. Narkotika menjadi jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi di Bali. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga keamanan dan memberantas tindak pidana di Bali, terutama dalam hal narkotika dan pencurian

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.



Gambar 2.47
Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2023
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Republik Indonesia
URL: https://penerbit.brin.go.id/others/catalog/book/1036

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Bali Tahun 2023 berada diatas rata-rata nasional sebesar 3,85. IDSD berperan penting dalam membentuk kebijakan dan strategi pembangunan daerah dengan menyediakan gambaran objektif mengenai kekuatan dan kelemahan setiap wilayah. Pemerintah daerah menggunakan IDSD sebagai panduan untuk memprioritaskan investasi dan program pembangunan, fokus pada area yang membutuhkan perbaikan, serta memanfaatkan keunggulan kompetitif daerah. Bagi investor, IDSD menjadi referensi berharga dalam menilai potensi investasi di suatu daerah, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan arus modal dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, IDSD juga memicu persaingan positif antar daerah, mendorong inovasi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Secara keseluruhan, IDSD berperan sebagai katalis untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, membantu mengurangi kesenjangan antar daerah, dan mendorong pemerataan pembangunan.

Tabel 2.91
Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Bali Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Pilar 1 (Institusi)	Pilar 2 (Infrastruktur)	Pilar 3 (Adopsi TIK)	Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro)	Pilar 5 (Kesehatan)	Pilar 6 (Keterampilan)	Pilar 7 (Pasar Produk)	Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja)	Pilar 9 (Sistem Keuangan)	Pilar 10 (Ukuran Pasar)	Pilar 11 (Dinamika Bisnis)	Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi)	IDSD
Jembrana	4,79	3,81	4,45	3,54	4,02	4,29	3,20	3,77	3,03	4,08	3,60	2,23	3,73
Tabanan	4,77	3,85	4,68	3,07	4,13	4,30	3,13	3,37	3,00	4,30	3,44	2,42	3,70
Badung	4,85	3,73	4,90	3,36	4,24	4,27	4,21	4,01	3,52	4,67	3,66	4,30	4,14
Gianyar	4,73	3,45	4,68	3,75	4,13	4,30	3,21	3,50	3,22	4,39	4,36	2,53	3,85
Klungkung	4,82	3,70	4,36	3,67	3,94	4,47	2,88	2,74	3,63	3,88	3,57	2,08	3,65
Bangli	4,77	3,53	4,44	3,69	3,87	4,24	2,78	2,41	2,85	3,76	2,97	2,32	3,47
Karangasem	4,81	3,77	4,31	3,27	3,86	4,12	3,08	2,46	2,47	4,15	5,00	1,79	3,59
Buleleng	4,82	3,81	4,45	3,25	3,98	3,96	3,24	2,87	2,27	4,48	4,04	3,61	3,73
Denpasar	4,57	3,78	4,98	3,28	4,23	4,24	3,89	4,16	4,60	4,68	3,35	4,18	4,16
Bali	**4,74**	**3,39**	**4,63**	**3,48**	**4,00**	**4,23**	**3,22**	**3,82**	**3,28**	**4,38**	**3,68**	**4,06**	**3,91**

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional
URL: https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah

2.4.4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. IKD disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

IKD ini menjadi pedoman dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja Pemerintahan Provinsi Bali pada masing-masing aspek akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.92
Capaian Berdasarkan Aspek atau Indikator Kinerja Provinsi Bali Tahun 2020-2024

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Aspek Kesejahteraan Rakyat																	
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,6 (6.40-6.80)	3,00 (2.50-3.50)	3,10 (2.70-3.50)	5	5,75 (5,25-6,25)	-9,33	-2,47	4,48	5,71	5,48	-141,364	-82,33	144,52	114,2	95,3
2	Laju Inflasi	Persen	3.00±1%	3.00±1%	3.00±1%	3	3	0,55	2.01	6,44	2,54	2,34			214,67		78
3	PDRB per kapita	Juta Rp	56 juta- 61 juta	59 juta- 64 juta	62 juta- 67 juta	66	56 - 61 juta	51,94 juta	50,38 juta	55,54	62,29	N/A	92,75	85,38	89,58	94,38	Tidak dapat dihitung
4	Indeks Gini	Persen	0,3264	0,369	0,357	0,374	0,366	0,369	0,375	0,362	0,362	0,348	113,05	101,63	101,4	96,79	95,08
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	3,59	3,75 (3.50-4.00)	4,25 (4.00-4.50)	3,75	4,07	4,45	4,72	4,53	4,25	3,8	123,96	125,87	106,59	113,33	93,37
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,31 (75.21-75.41)	75,51 (75.41-75.61)	76,93 (75.61-78.25)	77,78	76,5	75,5	75,69	76,93	78,01	78,63	100,25	100,24	100	100,3	102,78
7	Angka Melek Huruf	Persen	92,77	92,82	92,9	92,9	95,8	94,8	95	95,53	95,61	N/A	102,19	102,35	102,83	102,91	Tidak dapat dihitung
8	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,28	10,56	10,84	11,4	9,8	8,95	9,06	9,39	9,45	9,54	87,06	85,8	86,62	82,89	97,35
9	Angka usia harapan hidup	Tahun	72	72,3	72,5	72,5	72,6	72,13	72,24	72,6	74,88	75,1	100,18	99,92	100,14	103,28	103,44
10	Persentase balita gizi buruk	Persen	2	1	1	1	1,8	0,6	0,2	0,2	0,13	0,1	30	20	20	13	5,56
11	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	12,5	10,1	8,5	5,6	2,7	8,5	1,7	1,6	1,62	1,4	68	16,83	18,82	28,93	51,85
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Jumlah Angkatan kerja	Orang	2.588.567	2.653.567	2.723.567	2.793.567	2.709.549	2.567.919	2.580.523	2.738.539	2.690.237	2.714.097	99	97	101	96	100
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	76,03	76,3	76,55	76,8	77,22	74,32	73,54	76,86	77,08	77,11	98	96	100	100,36	99,86
15	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	1,17	5.63 (5.21-6.05)	3.19 (2.77-3.61)	2,32	2,57	5,63	5,37	4,8	2,69	1,79	481	95	150	116	70
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79	80	81	82	88,5	N/A	N/A	N/A	N/A	85,56	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	97

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
17	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	96,14	96,38	96,62	96,86	92,9	95,7	93	88,3	92,2	92,03	100	96	91	95	99
19	Penguatan cadangan pangan	Persen	20	20	20	20	2,3	20	20	20	20	166.252	100	100	100	100	7.228.348
20	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	Persen	15,15	14,57	14,57	14,57	1,59	15,11	15,71	14,68	13,73	N/A	100	108	101	94	Tidak dapat dihitung
21	Kontribusi subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	Persen	2,2	2,1	1,93	1,93	1,74	1,67	1,73	1,65	1,54	N/A	76	82	85	79,79	Tidak dapat dihitung
22	Kontribusi subsektor perkebunanterhadap PDRB	Persen	1,46	1,47	1,43	1,43	2,14	1,54	1,58	1,48	1,36	N/A	105	107	103	95	Tidak dapat dihitung
23	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	15,11	14,73	14,38	14,38	4,95	N/A	N/A	N/A	N/A	13,42	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	271
Aspek Daya Saing Daerah																	
1	Distribusi Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% terbawah	Persen	16,83	16,52	16,21	15,9	N/A	17,55	17,85	N/A	18,7	N/A	104,28	108,05	Tidak dapat dihitung	117,61	Tidak dapat dihitung
2	Nilai Tukar Petani	Persen	104,5	105	105,5	106	98	94,27	92,84	N/A	99,5	101,51	90,21	88,42	Tidak dapat dihitung	93,87	103,58
3	Angka kriminalitas	Kasus	3.669	3.200	2.731	2.262	1.850	2.083	1.937	N/A	89	2.019	56,77	60,53	Tidak dapat dihitung	3,93	109,14
4	Indeks Kebahagiaan	Indeks	73,98	73,98	73,98	74,98	N/A	N/A	71,44	N/A	N/A	N/A	Tidak dapat dihitung	96,57	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung
5	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	45	18,34	20,86	25,93	18,56	18,76	16,66	17,64	20,37	N/A	41,69	90,84	84,56	78,56	Tidak dapat dihitung
7	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	17	20	22	N/A	10,62	15,11	15,71	14,85	N/A	N/A	88,88	78,55	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Aspek Pelayanan Umum																	
Layanan Urusan Wajib Dasar																	
1	**Pendidikan**																
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	81,1	82,1	83,1	84,1	N/A	82,3	31,07	31,07	30,53	N/A	101,48	37,84	37,39	36,3	Tidak dapat dihitung
1.2	**Angka Partisipasi Kasar**																
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Persen	107,48	108,26	109,05	109,84	N/A	100,56	101,02	101,02	103,05	N/A	93,56	93,31	92,635	93,82	Tidak dapat dihitung
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	Persen	109,67	111,03	112,39	113,75	N/A	96,4	96,52	96,52	109,28	N/A	87,9	86,93	85,88	96,07	Tidak dapat dihitung
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	Persen	102,01	102,81	103,62	104,42	104,68	100,3	91,08	91,08	98,57	94,16	98,32	88,59	87,901	94,4	89,95
1.3	**Angka Pendidikan yang Ditamatkan**																
1.3.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A	Persen	25,14	25,43	25,73	26,02	N/A	24,8	24,84	24,84	20,54	N/A	98,65	97,68	96,54	78,94	Tidak dapat dihitung
1.3.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS/Paket B	Persen	12,32	21,61	12,91	13,2	N/A	21,78	22,39	22,39	40,4	N/A	176,79	103,61	173,43	306,06	Tidak dapat dihitung
1.3.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	24	24,29	24,59	24,88	100	38,59	3,84	31,84	31,13	100	160,79	15,81	129,48	125,12	100
1.4	**Angka Partisipasi Murni**																
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	100	100	100	100	N/A	92,06	95,99	95,99	95,37	N/A	92,06	95,99	95,99	95,37	Tidak dapat dihitung
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	100	100	100	100	N/A	79,22	79,05	79,05	96,55	N/A	79,22	79,05	79,05	96,55	Tidak dapat dihitung
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	100	100	100	100	85,00	82,51	75,8	75,8	81,8	79,09	82,51	75,8	75,8	81,8	Tidak dapat dihitung

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.5	Angka Partisipasi Sekolah																
1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,56	99,56	99,56	99,56	N/A	99,21	95,99	95,99	95,37	N/A	99,65	96,41	96,41	95,79	Tidak dapat dihitung
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	97,92	97,92	97,92	97,92	N/A	95,52	79,05	79,05	96,55	N/A	97,55	80,73	80,73	98,6	Tidak dapat dihitung
1.5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	82,35	82,35	82,35	82,35	100	71,44	75	75,8	81,8	85,17	86,75	91,07	92,05	99,33	85,17
1.6	**Angka Putus Sekolah**																
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,03	0,02	0,01	0	N/A	0,08	0,01	0,01	0,05	N/A	266,67	50	100	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,08	0,07	0,06	0,05	N/A	0,08	0,06	0,06	0,04	N/A	100	85,71	100	80	Tidak dapat dihitung
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen	0,23	0,22	0,21	0,2	0,18	0,06	0,2	0,2	0,12	0,04	26,09	90,91	95,24	60	22,22
1.7	**Angka Kelulusan**																
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	Tidak dapat dihitung
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	N/A	100	100	100	99,99	N/A	100	100	100	99,99	Tidak dapat dihitung
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	100	100	100	100	99,82	99,98	99,98	99,98	99,98	100	99,98	99,98	99,98	99,98	100
1.8	**Angka Transisi (AT)**																
1.8.1	Angka Transisi (AT) SMP/MTs	Persen	98,36	99,42	100	101,53	N/A	98,74	91,56	91,56	91,59	N/A	100,39	92,09	91,13	90,21	Tidak dapat dihitung
1.8.2	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	Persen	97,97	99,03	100	101,53	99,5	97,89	93,77	93,77	88,25	95,37	99,92	94,69	93,33	86,92	95,85
1.9	**Fasilitas Pendidikan**																
1.9.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	94,77	95,52	96,26	97,01	N/A	95,34	43,21	44,76	73,06	N/A	101	45,24	46,5	75,31	Tidak dapat dihitung
1.9.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	93,56	94,31	95,05	95,8	N/A	94,31	51,21	58,86	77,77	N/A	101	54,3	61,93	81,18	Tidak dapat dihitung

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.9.3	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	96,93	97,4	97,87	98,33	98,35	97,06	66,89	64,44	97,48	80,46	100	68,68	65,84	99,14	81,81
1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Persen	63,87	63,92	63,97	64,03	N/A	7,32	42,83	44,47	48,68	N/A	11,46	67,01	69,52	76,03	Tidak dapat dihitung
1.11	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persen	22,73	24,09	23,95	23,95	23,98	23,08	17,67	19,5	18,96	19,02	101,54	73,35	81,42	79,16	79,32
1.12	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Persen	64,99	65,57	66,09	66,09	N/A	63,84	62	60,75	61,67	N/A	98,23	94,56	91,92	93,31	Tidak dapat dihitung
1.13	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	Persen	67,17	66,83	65,37	65,37	67	65,83	77,79	64,23	69,63	68,15	98,01	116,4	98,26	106,52	102
	- SMA/MA (per 1000 murid)	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	67	72,38	80.11	66,16	66,68	68,15	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	102
	- SMK (per 1000 murid)	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	67,08	63,78	75.47	62,19	72,94	66,18	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	98,66
1.14	**Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata**																
1.14.1	SD/MI	Persen	0,03	0,03	0,03	0,03	N/A	0,03	0,01	0,01	0,03	N/A	100	33,33	33,33	100	Tidak dapat dihitung
1.14.2	SMP/MTS	Persen	0,09	0,09	0,09	0,09	N/A	0,09	0,06	0,06	0,09	N/A	100	66,67	66,67	100	Tidak dapat dihitung
1.14.3	SMA/SMK/MA	Persen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,09	0,1	0,11	0,1	100	90	100	110	100
1.15	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	106,94	107,83	108,72	109,61	N/A	99,98	99,89	99,89	123,14	N/A	93,49	92,64	91,9	112,34	Tidak dapat dihitung
1.16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,88	99,89	99,9	99,91	99,92	99,91	95	95	99,92	99,92	100	95,1	95,1	100	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	93,06	93,14	93,22	93,3	93,35	98,34	95	95	95,61	95,61	106	102	101,9	102,48	102
1.18	**Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV**																
1.18.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD)	Persen	75,88	7,57	77,26	77,95	N/A	76,85	77,5	77,5	60,15	N/A	101,28	1.024	100	77,16	Tidak dapat dihitung
1.18.2	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI)	Persen	95	95,92	96,84	97,76	N/A	94,86	98,47	97,4	95,76	N/A	99,85	102,66	101	97,95	Tidak dapat dihitung
1.18.3	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS)	Persen	96,93	97,44	97,95	98,46	N/A	96,78	98,35	98,35	96,99	N/A	99,85	100,93	100	98,51	Tidak dapat dihitung
1.18.4	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	Persen	96,97	97,26	97,55	97,84	97,92	97,08	97,63	97,63	95,37	95,36	100	100,38	100	97,48	97,39
2	**Kesehatan**																
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	10	10	10	10	9,5	5,51	5,69	4,82	9,6	11,2	55,1	56,9	48,2	96	118
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	6,35	6,99	6,5	5,5	6,5	0,59	6,33	5,28	10,5	12,74	9,29	90,56	81,23	190,91	196
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	4,41	4,41	4,41	4,41	4,4	3,66	4,22	3,61	7,2	8,16	82,99	95,69	81,86	163,27	185
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	68	67	66	65	65	83,84	189,79	88	63,89	109,38	123,29	283,27	133,33	98,29	168
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Persen	1,47	1,47	1,52	1,52	1,61	22,81	1,52	1,61	2,27	2,55	1.551,70	103,4	105,92	149,34	158
2.6	**Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk**																
2.6.1	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	Persen	0,029	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	93,1	100	100	100	100
2.6.2	Rasio klinik	Persen	0,021	0,032	0,032	0,032	0,056	0,025	0,033	0,048	0,06	0,0822	119,05	103,13	150	187,5	147
2.6.3	Rasio Puskesmas Pembantu	Persen	0,12	0,12	0,12	0,12	0,113	0,12	0,12	0,12	0,11	0,116	100	100	100	91,67	103

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Persen	0,0016	0,0018	0,0018	0,0018	0,0166	0,018	0,0019	0,0019	0,0021	0,012	1.125	105,56	106	116,67	72,29
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	Persen	0,382	0,95	0,97	0,97	0,98	0,62	0,97	0,98	0,98	0,96	162,3	102,11	101	101,03	97,96
2.9	**Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk**																
2.9.1	Rasio Tenaga Perawat per Penduduk	Persen	2,04	2,5	2,6	2,6	2,67	2,63	2,66	2,76	2,77	2,92	128,92	106,4	106,15	106,54	109
2.9.2	Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	Persen	1,18	1,2	1,25	1,25	1,25	1,46	1,23	1,28	1,27	1,28	123,73	102,5	102,4	101,6	102
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	87,5	88	88,5	88,5	88,5	80,95	90,48	37,87	100	100	92,51	102,82	42,79	112,99	113
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	96,5	96,6	96,7	96,8	96,8	91,78	94,25	39,64	89,46	88,86	95,11	97,57	40,99	92,42	91,8
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	Persen	100	100	100	100	100	90	95,67	68	100	96,93	90	95,67	68	100	96,93
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	90	100	100	100	100	97,89	100	100	100	100	108,77
2.14	Case Detection Rate TBC	Persen	34	35	36	37	40	19	24,48	14,73	50	81	55,88	69,94	41	135,14	202,5
2.15	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	Persen	90	90	90	90	90	88	83,21	83,15	84	82	97,78	92,46	92	93,33	91,11
2.16	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.17	*Incidence Rate* DBD	/100.000 penduduk	108	106	104	102	70	269,94	59,84	70,7	152,28	319	249,94	56,45	67,98	149,29	455,71
2.18	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.19	Angka kematian Malaria	Persen	<1	<1	<1	<1	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.20	*Annual Parasite Incidence* (API)	/1000 penduduk	< 1	< 1	< 1	< 1	<1	0,01	0.01	0	0	0,02	100	100	100	100	2
2.21	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS	Persen	75	80	85	90	85	72	84	84	94	82	96	105	98,82	104,44	96,47
2.22	Persentase Kasus HIV yang diobati	Persen	55	55	55	55	N/A	57	55	54	55	N/A	103,64	100	98,18	100	Tidak dapat dihitung
2.23	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	21,5	22	22,2	22,2	N/A	21	22	22,2	22,2	N/A	97,67	100	100	100	Tidak dapat dihitung
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	Tidak dapat dihitung
2.25	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	100	100	100	97,7	99,92	96,81	39,09	93,96	92,33	99,92	96,81	39,09	93,96	94,5
2.26	Cakupan Kunjungan Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.27	Cakupan puskesmas pembantu	Persen	0,12	0,12	0,12	0,12	0,808	0,12	0,12	0,12	0,12	80	100	100	100	100	9.901
2.28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	95	95,5	96	96,5	96	86,91	90,42	40,34	86,56	87,33	91,48	94,68	42,02	89,7	90,97
2.29	Cakupan Pelayanan nifas	Persen	97,5	98	98,5	99	98	89,94	95,39	41,9	86,88	87,33	92,25	97,34	42,54	87,76	89,11
2.30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	72,88	75,56	32,5	100	69,7	72,88	75,56	32,5	100	69,7
2.31	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100	100	100	100	97,7	99,9	74,44	61,78	88,57	92,66	99,9	74,44	61,78	88,57	94,84
2.32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.33	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100	100	100	100	100	100	86,49	0	93,85	99,62	100	86,49	0	93,85	99,62
2.34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	Tidak dapat dihitung

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	Tidak dapat dihitung
2.36	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**																
3.1	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Persen	74,26	76,8	77,96	80,27	81,18	75,55	76,84	76,84	100	N/A	102	100	98,56	125	0
3.2	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	Persen	69,4	58,06	48,33	0,49	48,63	62,47	70,5	48,19	49	N/A	90	121,43	99,71	10.000	Tidak dapat dihitung
3.4	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	77,71	77,98	76,89	78,67	79,27	78,25	79,01	79,01	96,53	81,16	101	101,32	102,76	123	102
3.5	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	Persen	64	68	72	74	75	56,31	64,6	65,6	74	N/A	88	95	91,11	100	Tidak dapat dihitung
3.6	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi yang bersertifikat	Persen	72	20	16,51	19,64	14,78	20	13,8	16,51	19,64	22,77	28	69	100	100	154
3.7	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	Tidak dapat dihitung
3.8	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan pengujian Jasa Konstruksi	Persen	100	100	100	95	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	105	Tidak dapat dihitung
3.9	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola	Persen	100	100	41	0,43	44	89,81	50,31	50,31	100	N/A	90	50,31	122,71	23256	Tidak dapat dihitung

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Provinsi oleh kabupaten/kota																
3.10.1	Persentase cakupan layanan Air Minum Aman	Persen	89	90	92	93	93,05	70,33	90	92	93	91,5	79	100	100	100	98
3.10.2	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Persen	88,5	89	89,79	89,95	95,1	87,26	-	93,42	89,95	91,89	99	Tidak dapat dihitung	104,04	100	97
3.11	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai Rencana Tata Ruang	Persen	92	93	94	95	96	100	93	93,5	95	N/A	109	100	99,47	100	Tidak dapat dihitung
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**																
4.1	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah	Persen	36	48	70	71	100	28,44	N/A	70	71	N/A	79	Tidak dapat dihitung	100	100	Tidak dapat dihitung
4.2	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persen	7,7	8	8	6,6	5,94	7,7	N/A	0	6,4	N/A	100	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	97	Tidak dapat dihitung
5	**Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat**																
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	30,11	30,32	30,39	30,59	31	29,83	30,26	30,26	33,2	33,2	99	99,8	99,57	109	107
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	35,56	35,57	35,58	35,59	36	39,77	51,44	60	36	35,58	112	144,62	168,63	101	99
5.4	Tingkat waktu tanggap (*response time rate)* daerah	Persen	44,64	44,65	44,66	44,67	44,68	57,13	65,81	73,2	73,25	44,66	128	147,39	163,91	164	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)																
5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	**Sosial**																
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	0,27	0,29	0,31	0,00	0,43	0,06	0	0	0,47	2,61%	22	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	6
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	0,99	1,02	1,05	1,08	1,87	0,67	0,76	0,28	0,72	1,08%	68	74,51	26,67	67	1
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	0,65	0,67	0,7	0,72	25,9	0,43	0,43	0,09	0,54	15,08%	66	64,18	12,86	75	1
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	60	60	60	60	18,08	100	60	60	60	100	167	100	100	100	553
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	20	20	20	20	5	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	60	60	60	60	0,92	52,63	4,8	2,75	9,06	1,11%	88	8	4,58	15	1
Layanan Urusan Wajib Non Dasar																	
1	**Tenaga Kerja**																
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per 1000 perusahaan	0,003: 1000 perusahaan	0,004:1000 perusahaan	0,004:1000 perusahaan	0,003: 1000 perusahaan	0,009: 1000 Perusahaan	0,003:1000 perusahaan	0,003:1000 perusahaan	0,002:1000 perusahaan	0,002:1000 Perusahaan	0,012:1000 perusahaan	100	75	50	67	133
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	26	100	100	100	100	100	50	22,5	36,26	33,33	385	50	23	36	33
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	99,77	100	100	100	66,23	100	63,54	71,29	21,34	100	100	64	71	21	151
1.4	Keselamatan dan perlindungan	Persen	183	4,71	6,28	6,91	20,53	4,28	5,66	3,7	77,45	2,51	2	120	59	1121	12
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	96,05	33,26	36,39	39,53	43,37	33,12	42,77	52,53	57,46	53,37	34	129	144	145	123
1.6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persen	690	6,84	7,4	8,17	21,04	6,02	5,97	3,9	0,88	2,74	0,87	87,28	52,7	10,77	13
1.7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Persen	226	21,79	19,37	19,37	20,24	17,89	100	11,38	78,4	72,14	7,92	458,93	58,75	404,75	356
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	32	17,6	18,01	18,01	19,39	39,27	18,86	12,34	49,61	35,6	122,72	107,16	68,52	275,46	184
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	111,11	100	12,34	100	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	261	_	_	_	_	80	_	_	_	_	30,65	_	_	_	_
1.11	Rasio lulusan S1/S2/S3	Per 10.000 Penduduk	7,73	0.069:10.000 penduduk	0.069:10.000 penduduk	0,069 : 10.000 Penduduk	0,076	0.069:10.000 penduduk	0.070:10.000 penduduk	0.075:10.00 penduduk	0,073: 10.000 Penduduk	0,075: 10.000	0,89	101,45	108,7	105,8	99
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**																
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	46,43	46,63	46,83	46,95	46,5	47,53	48,1	49,21	50,13	51,72	102,37	103,15	105,08	106,77	111
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	11,9	13,9	15,9	17,9	17,45	16	16,36	16,36	16,36	18,18	134,45	117,7	102,89	91,4	104
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	47,6	48,1	48,6	49,1	48,15	37,71	36,38	50,59	51,25	50,36	79,22	75,63	104,09	104,38	105
2.4	Rasio KDRT	Persen	0,048	0,047	0,046	0,045	0,011	0,021	0,013	0,44	0,00013	0,004	43,75	27,66	956,52	0,29	36
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	72,75	72,85	72,95	73	68,25	70,75	67,86	100	69,62	77,11	97,25	93,15	137,08	95,37	113
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0,44	100	100
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100	100	100	48	100	100	100	100	48	100	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kkerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	48	100	100	100	100	48	100	100
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	48	100	100	100	100	48	100	100
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	88,5	88,5	88,5	88,5	100	100	100	48	100	100	112,99	112,99	54,24	112,99	100
2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	1	1	1	1	97,3	1	0,97	0,97	0,99	99,04	100	97	97	99	102
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	0,99	1	1	1	87,18	1,03	0,89	0,89	0,99	104,09	104,04	89	89	99	119
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	0,96	0,97	0,97	1	74,94	0,98	0,72	0,72	0,99	100,6	102,08	74,23	74,23	99	134
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persen	0,95	0,96	0,97	1	26,79	0,96	1,05	1,05	1,06	105,54	101,05	109,38	108,25	106	394

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.17	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	0,95	0,96	0,97	0,98	95,1	0,99	1	1	1	96,63	104,21	104,17	103,09	102,04	102
2.18	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung
3	**Pangan**																
3.1	Ketersediaan Pangan Utama																
3.1.1	Padi	Ton	851.523	853.523	855.523	857.523	684.887	783.989	786.101	782.126	749.990	749,7	92	92	91	87	0,11
3.1.2	Jagung	Ton	44.500	45.000	45.500	46.000	68.400	68.415	61.086	62.999	56.664	76,5	154	136	138	123	0,11
3.1.3	Kedelai	Ton	2.601	2.653	2.706	2.760	3.298	1.857	2.757	2.435	4.558	1,8	71	104	90	165	0,05
3.1.4	Kacang Tanah	Ton	4.686	4.778	4.871	4.967	5.446	7.099	6.554	5.071	5.067	4,2	151	137	104	102	0,08
3.1.5	Ubi Kayu	Ton	54.500	55.000	55.502	56.000	194.201	70.038	77.846	102.826	70.071	33,3	129	142	185	125	0,02
3.1.6	Kacang Hijau	Ton	175	177	179	181	214	300	386	180	52	51	171	218	101	29	23,8
3.1.7	Ubi Jalar	Ton	26.054	26.575	27.106	27.648	13.875	27.774	15.886	16.951	16.564	17	107	60	63	60	0,12
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/Kap/Hari	2.648	2.649	2.650	2.650	2.675	2.650	2.654	N/A	3.247	3	100	100	Tidak dapat dihitung	123	0,13
		Gram/Kap/Hari	63	63	63	63	57	64,31	63	N/A	119	159	102	100	Tidak dapat dihitung	190	278,95
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	85	90	95	95	95,8	85	90	95	83	78,4	100	100	100	87	81,84
4	**Pertanahan**																
4.1	Persentase data informasi pertanahan yang handal	Persen	15	30	40	50	60	15	30,32	N/A	100	N/A	100	101	Tidak dapat dihitung	200	Tidak dapat dihitung
5	**Lingkungan Hidup**																
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1	0	2 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1	Tidak dapat dihitung	66,67	100	100	100
5.5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ya/Tidak	ya	ya	ya	ya	Ya	ya	ya	ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,89	87,27	87.38	87,48	88,59	88,34	N/A	N/A	88,99	92,12	95,101733	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	102	104
5.7	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	66,17	67,93	68.03	68,13	63,05	64,33	N/A	N/A	55,17	61,12	97,219284	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	80,98	97
5.8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	40,57	41,03	41.49	41,95	41,66	40,58	N/A	N/A	45,22	46,87	100,02465	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	108	113
5.9	Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut	Jumlah	N/A	61,72	62.24	62,76	69,9	N/A	N/A	N/A	86,05	86,68	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	137	124
5.10	Laporan Inventarisasi GRK	Jumlah	2	2	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	100	100
5.11	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	N/A	N/A	1	100	100	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	100
5.12	Jumlah limbah B3 yang dikelola		N/A	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 kab/kota	9	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 kab/kota	9	Tidak dapat dihitung	100	100	100	100
5.13	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Persen	100	100	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	Tidak dapat dihitung	100	100
5.14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Perusahaan	18 Kawasan & 50 Dokumen	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10	25 Perusahaan	10 Perusahaan	5 Perusahaan	10 Perusahaan	15	Tidak dapat dihitung	100	100	100	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																
5.15	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	Orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	100	100	100	100	Tidak dapat dihitung
5.16	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persen	100	100	100	100	0,067	N/A	0,067	N/A	100	0,8	Tidak dapat dihitung	0,067	Tidak dapat dihitung	100	1194
5.17	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Persen	100	100	100	100	0,067	N/A	0,067	N/A	100	0,8	Tidak dapat dihitung	0,067	Tidak dapat dihitung	100	1194
5.18	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Persen	100	100	100	100	0,067	N/A	0,067	N/A	100	0,8	Tidak dapat dihitung	0,067	Tidak dapat dihitung	100	1194
5.19	Penetapan hak MHA	Persen	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	Tidak dapat dihitung	100	100	100	100
5.20	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah (Orang)	30	30	30	30	30	731	60	48	30	90	2.437	200	160	100	300
5.21	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persen	100	100	100	100		N/A	N/A	N/A	100		Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	100	
5.22	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	40	30	30	30	30	731	60	48	36	90	1.828	200	160	120	300
5.23	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata	45	1 kalpataru	7 Adiwiyata	-	35 Adiwiyata	35 Adiwiyata	Tidak dapat dihitung	23,33	Tidak dapat dihitung	116,67	77,78
5.24	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Jumlah (Kasus)	20 kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 kasus	2	3 kasus	2 Kasus	1 Kasus	2 kasus	4	15	100	50	100	200

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani																
5.25	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Ton/tahun	961.841.563	975.583.128	991,573,370	1.008.414.118	727.477,03	894.951,05	402.344	-	707.392,30	707.886,11	0,093	0,041	Tidak dapat dihitung	0,07	97
5.26	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Persen	75	74	73	72	71	44,96	44,96	-	59,71	53,49	59,95	60,76	Tidak dapat dihitung	82,93	75,34
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**																
6.1	Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk	Persen	0,97	0,99	0,99	1	1	0,48	0,99	0,99	0,99	1	49,48	100	100	99	100
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	89,17	91,67	94,17	96,67	98,96	92,08	98,46	94,12	99,45	99,58	103,26	107,41	99,95	102,88	101
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	50,38	55,38	60,38	65,38	67,38	42,76	47,94	51,2	56,38	58,96	84,87	86,57	84,8	86,23	88
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah	sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	sudah
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	98,5	99	99,5	100	100	99,1	99,6	99,6	99,6	99,56	101	101	100	99,6	99,56
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	45,5	49,5	54	58	60	43,91	46,98	48,53	50,85	52,61	96,51	94,91	89,87	87,67	87,68

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**																
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	58,02	66,98	75,94	84,9	88,05	59,59	65,09	67,92	82,39	94,81	102,71	97,18	89,44	97,04	107,68
7.2	Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina	Persen	12,29	12,29	12,29	12,29	31,84	12,29	12,29	6,28	12,29	31,84	100	100	51,1	100	100
7.3	Persentase LPM Berprestasi	Persen	16,33	18,56	20,79	23,02	25,25	15,56	16,97	18,93	20,89	22,85	95,28	91,43	91,05	90,75	90,5
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.5	Persentase Posyandu aktif	Persen	73,8	75,8	75,8	79,8	79	78,6	75,8	78,3	81,2	97,94	106,5	100	103,3	101,75	124
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	250	275	300	325	330	250	275	290	325	330	100	100	96,67	100	100
7.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	76,92	76,92	76,92	76,92	98,43	91,67	76,92	98,11	99,21	99,68	119,18	100	128	128,98	101
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**																
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	2,15	2,15	2,15	2,15	-0,02	2,15	N/A	-0,02	1,29	0,71	100	Tidak dapat dihitung	-0,93	60	-3550
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,2	2,3	2,3	2,3	2,1	2,2	2,3	1,98	2,07	2,03	100	100	86,09	90	96,67
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	35	40	40	40	100	35	40	100	100	100	100	100	250	250	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	17	20	25	30	50	17	20	25	25	100	100	100	100	83,33	200
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	100	100	50	50	100
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	3	3	6	6	6	3	3	5	6	6	100	100	83,33	100	100
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	6	8	10	12	18	6	11	14	14	14	100	137,5	140	116,67	77,78
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	2,3	2,3	2,3	2,3	2	2,3	2,4	1,42	N/A	N/A	100	104,35	61,74	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung
8.9	Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	57,5	57,3	57	56,5	54	82,35	82,06	54,18	63,54	68,87	143,22	143,21	95,05	112,46	127,54
8.10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persen	29	28,4	28,02	27,66	28	29	18	15,5	17,7	17,4	100	63,38	55,32	63,99	62,14

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
8.11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	36,42	37,1	38,2	39,75		36,42	N/A	N/A	N/A		100	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	
8.12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	12,18	10,96	9,86	8,88	9,86	12,18	5,45	17,9	15,5	8,46	100	49,73	181,54	174,55	85,8
8.13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	42,45	42	41,5	41	50	42,25	48,03	44,03	37,14	36,51	99,53	114,36	106,1	90,59	73,02
8.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	24	23,5	23	22,5	23	24	15,1	N/A	15,1	9,68	100	64,26	Tidak dapat dihitung	67,11	42,09
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	91,16	91,42	99,9	88,9	60,62	24	88,01	60,62	50,33	61,33	26,33	96,27	60,68	56,61	101,17
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	87	88	89	90	62	91,16	84,4	59,9	22,87	41,8	104,78	95,91	67,3	25,41	67,42
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	71,5	72	73	73	26,2	87	83,16	26,03	7,07	12,27	121,68	115,5	35,66	9,68	46,83
8.18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	80	85	90	100	42	84,3	36,8	40,35	71,92	91,23	105,38	43,29	44,83	71,92	217,21
8.19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	500	510	520	530	68	80	342	N/A	311	79	16	67,06	Tidak dapat dihitung	58,68	116,18
8.20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	100	100	100	500	98,29	100	100	100	500	98,29	100	100	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
8.21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	91	92	93	94	93	100	86,17	49,5	27,66	8,82	109,89	93,66	53,23	29,43	9
8.22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1	1	1	1	1	91	1	1	1,03	1.003	9100	100	100	103	100.300
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	10	12	14	16	100	100	12	N/A	14	14	1000	100	Tidak dapat dihitung	87,5	14
8.25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	22,7	22,7	21,64	21,64	21,7	10	21,7	N/A	N/A	N/A	44,05	95,59	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung
8.26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	15,03	15,5	15.5	15,5		22,7	99	N/A	N/A		151,03	638,71	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	
9	**Perhubungan**																
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum																
9.1.1	Angkutan Darat	Jumlah	422.085	457.258	492.431	527.604	1.720.202	435.525	1.323.232	1.540.981	N/A	1.737.882	103,18	289,38	312,93	Tidak dapat dihitung	101,03
9.1.2	Angkutan Laut	Jumlah	13.958.286	13.958.286	13.958.286	13.958.286	1.976.817	4.945.965	1.797.106	12.215.521	N/A	16.984.090	35,43	12,87	87,51	Tidak dapat dihitung	859,16

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
9.1.3	Angkutan Udara	Jumlah	23.900.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000	3.814.357	5.806.270	3.776.591	4.297.577	N/A	12.671.884	24,29	15,74	18	Tidak dapat dihitung	332,22
9.2	Jumlah ijin trayek	Jumlah	150	155	160	165	197	96	382	387	N/A	197	64	246,45	241,88	Tidak dapat dihitung	100
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	150.728	153.742	156,817	158.386	110.200	114.498	92.237	36,318	N/A	111	76	60	23	Tidak dapat dihitung	0,1
9,4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Termina l Bus																
9.4.1	Jumlah Pelabuhan	Jumlah	8	8	9	9	40	11	34	42	N/A	37	137,5	425	466,67	Tidak dapat dihitung	92,5
9.4.2	Jumlah Bandara	Jumlah	2	2	2	2	1	1	1	1	N/A	1	50	50	50	Tidak dapat dihitung	100
9.4.3	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	20	20	20	20	20	20	20	20	N/A	20	100	100	100	Tidak dapat dihitung	100
9.5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	3	3	3	3	3	3	3	3	N/A	3	100	100	100	Tidak dapat dihitung	100
9.7	Pemasangan Rambu-rambu	Persen	35	45	55	60	38,58	27,01	28,89	29,24	N/A	38,58	77,17	64,2	53,16	Tidak dapat dihitung	100
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,319444444	0,284722222	0,284722222	0,25	23	07:19,0	0,0002349	0,0002388	N/A	2.542,19	1,59	0,08	0,08	Tidak dapat dihitung	11.053
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum																
9.9.1	Angkutan Darat																
	- Orang	Jumlah	422.085	457.258	492,431	527.604	1.720.202,00	435.525	1.323.232	1.540.981	N/A	1.737.882	103,18	289,38	312933,39	Tidak dapat dihitung	101,03
	- Barang	Jumlah	134.303	141.018	148.068	155.471	166.240,00	70.612	147.124	33.828	N/A	182.387	52,58	104,33	22,85	Tidak dapat dihitung	109,71

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
9.9.2	Angkutan Laut																
	- Orang	Jumlah	15.354.115	16.052.029	16.749.943	17.447.858	1.976.817	4.945.965	1.797.106	4.297.577	N/A	16.984.090	32,21	11,2	25,66	Tidak dapat dihitung	859,16
	- Barang	Jumlah	597.475.434	624.633.408	651.791.382	678.949.356	100.722.259	1.539.540	83.935.216	58.508.718	N/A	1.784.220	0,26	13,44	8,98	Tidak dapat dihitung	1,77
9.9.3	Angkutan Udara																
	- Orang	Jumlah	23.900.000	24.000.000	16.749.943	25.000.000	3.814.357	5.806.270	3.776.591	12.215.521	N/A	12.671.884	24,29	15,74	72,93	Tidak dapat dihitung	332,22
	- Barang	Jumlah	351.597.443	353.113.417	651.791.382	356.190.996	63.716.394	47.276.383	63.085.539	53.177.317	N/A	142.257.712	13,45	17,87	8,16	Tidak dapat dihitung	223,27
9.10	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun																
9.10.1	Dermaga																
	- Orang	Jumlah	15.354.115	16.052.029	16.749.943	17.447.858	1.976.816,60	4.945.965	1.797.106	12.215.521	N/A	16.984.090	32,21	11,2	72,93	Tidak dapat dihitung	859,16
	- Barang	Jumlah	597.475.434	624.633.408	651.791.382	678.949.356	100.722.259	2.425.410	83.935.216	53.177.317	N/A	1.784.220	0,41	13,44	8,16	Tidak dapat dihitung	1,77
9.10.2	Bandara																
	- Orang	Jumlah	23.900.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000	3.814.357	5.806.270	3.776.591	4.297.577	N/A	12.671.884	24,29	15,74	17,54	Tidak dapat dihitung	332,22
	- Barang	Jumlah	361.597.443	353.113.417	354.644.551	356.190.996	63.716.394	47.276.383	63.085.539	58.508.718	N/A	142.257.712	13,07	17,87	16,5	Tidak dapat dihitung	223,27
9.10.3	Terminal																
	- Orang / Barang	Jumlah	3,14	3,24	3,33	3,39	1720202 / 166240	4,63	8,99	45,55	N/A	1737882 / 182387	147,22	277,37	1369,74	Tidak dapat dihitung	92,08

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
10	**Komunikasi dan Informatika**																
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kim	-	-	-	90	120	120	120	120	120	109	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	133,33	0,91
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	65	75	80	-	100	64,97	100	N/A	100	100	99,95	133,33	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	1
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon																
10.3.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan HP	Persen	93,9	94,07	94,2	95	96,95	94,93	83,62	N/A	83,98	84,28	101,1	88,89	Tidak dapat dihitung	88,4	86,93
10.3.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	Persen	4,34	3,84	3,44	3,01	1,89	3,65	2,08	N/A	1,96	1,64	84,1	54,17	Tidak dapat dihitung	65,12	86,77
10.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	Persen	57,72	62,5	68,41	74,85	94,09	85,67	67,75	N/A	73,34	77,56	148,42	108,4	Tidak dapat dihitung	97,98	82,43
10.5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	45,23	47,12	50	52,15	26,14	25,82	25	N/A	24,34	26,63	57,09	53,06	Tidak dapat dihitung	46,67	101,87
11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**																
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	88,42	88,92	89,42	89,92	70,45	88,42	68,94	70,07	68,69	69,14	100	77,53	78,36	76,39	98,14
11.2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah	327.353	412.265	440.609	441.309	4	313.967	412.265	440,609	439.382	15,8	95,91	100	0,1	99,56	395
11.3	Persentase peningkatan produktifitas koperasi yang berbasis produk lokal	Persen	5,7	6,27	6,85	7,5	8	8,35	8,35	8,35	10	64,99	146,49	133,17	121,9	133,33	812,375

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
12	**Penanaman Modal**																
12.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	170	172	174	176	5.500	3.958	5.128	2.602	18.773	NA	2.328,20	2.981,4	1.495,40	10.666, 50	Tidak dapat dihitung
12.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah (Triliun)	4,8	4,98	5,16	5,33	13	5,33	12,95	2,53	14,6	NA	111,04	260,04	49,03	273,92	Tidak dapat dihitung
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	29,39	29,1	28,81	28,53	5	2,47	4,43	2,47	1,48	NA	8,4	15,22	8,57	5,19	Tidak dapat dihitung
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Persen	0,16	0,16	0,16	0,16	17	-22,41	16,98	-3,83	-7,25	NA	-14006,2	10612,5	-2393,75	-4531,2	Tidak dapat dihitung
12.5	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks	86	86	86	86	88,5	92,99	93	93,056	92,128	93,594	108,13	107,62	108,2	107,13	105,76
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**																
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	78	79	80	81	81,5	78	65	30	60	81	100	82,28	37,5	74,07	99,39
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persen	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88	0	0	0	0,5	28	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	57,47	3181,82
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	54	56	58	60	60,25	0	56	N/A	64	63,25	Tidak dapat dihitung	100	Tidak dapat dihitung	106,67	104,98
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	42	44	46	48	49	40	40	N/A	65	50,83	95,24	90,91	Tidak dapat dihitung	135,42	103,73
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persen	7,5	10	12,5	15	16	0	23	12.5	18	17	Tidak dapat dihitung	230	Tidak dapat dihitung	120	106,25
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	186 Orang	192 Orang	199 orang	205 Orang	215	0	173 Orang	31 Orang	199 orang	824	Tidak dapat dihitung	90,1	103,65	97,07	383,26
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah	24 cabor	26 cabor	28 cabor	30 cabor	30	0	26 cabor	13 Cabor	31 cabor	37	Tidak dapat dihitung	100	107,69	103,33	123,33
14	**Statistik**																
14.1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Jumlah	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
14.2	Buku "PDRB"	Jumlah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1	100	100	100	100	100
15	**Persandian**																
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	93,48	95,65	95,65	100	100	100	100	97,82	100	100	106,97	104,55	102,27	100	100
16	**Kebudayaan**																
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	3	3	3	6	2	3	3	3	6	66,67	100	100	100	100
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan																
16.2.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	19.336	19.336	19.336	19.336	20	22.809	22.809	165	789	73	117,96	117,96	0,85	4,08	365
16.2.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	97	97	97	97	5	493	533	5	9	0	508,25	549,48	5,15	9,28	Tidak dapat dihitung
16.2.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	651	671	671	711	5	673	680	3	30	5	103,38	101,34	0,45	4,22	100
16.2.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	5	5	5	5	5	16	5	0	0	0	320	100	0	0	0
16.2.5	Struktur Cagar Budaya	Jumlah	328	328	328	328	533	532	532	5	14	10	162,2	162,2	1,52	4,27	1,88
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu																
16.3.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	N/A	N/A	N/A	19.336	N/A	2.879	N/A	N/A	0	N/A	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	0	Tidak dapat dihitung
16.3.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	N/A	N/A	N/A	97	N/A	47	N/A	N/A	0	N/A	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	0	Tidak dapat dihitung
16.3.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	N/A	N/A	N/A	691	122	115	122	N/A	0	0	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	0	Tidak dapat dihitung
16.3.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	N/A	N/A	N/A	5	4	4	4	N/A	0	0	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	0	Tidak dapat dihitung

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
16.4	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	287	314	314	368	220	361	220	0	431	36	125,78	70,06	0	117,12	16,36
17	**Perpustakaan**																
17.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	8,5	8,5	8,5	9	5	8,039	6	6	6	5	94,58	70,59	70,59	66,67	100
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	1500	2000	2.500	3.000	300	130,61	2.869	1,985	130.610	474	9	143	0	4.354	158
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	Jumlah	32000	35000	38000	42.000	120	14.220	48	117	4.512	411	44,44	0,14	0,31	10,74	342,5
17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	750	1000	1250	1.500	300	39790	42.659	1.453	67.738	474	5.305	4.266	116	4.516	158
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	30	30	35	35	27	30	34	43	35	18	100	113,33	122,86	100	66,67
18	**Kearsipan**																
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	20	20	20	20	50	20	20	N/A	75	94	100	100	Tidak dapat dihitung	375	188
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	30	30	30	30	50	2	100	30	100	100	6,67	333,33	100	333,33	200
Layanan Urusan Pilihan																	
1	**Pariwisata**																
1.1	Kunjungan Wisatawan																
1.1.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	8.395.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000	7.500.000	4.213.316	4.301.592	2.926.295	9.877.911	5.131.402	50,19	107,54	58,53	141,11	68,42
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	8.000.000	0	500	1.000.000	1.500.000	1.050.366	51	189.879	5.273.258	3.420.126	13,13	Tidak dapat dihitung	37.976	527,33	228,01

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.2	**Lama Tinggal Wisatawan**																
1.2.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	3,75	2,3	2,45	2,55	2,65	2,01	2,09	1,64	1,85	1,6	53,6	90,87	66,94	72,55	60,38
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	10,15	3,5	3,55	3,6	3,65	2,68	2,87	2,68	2,48	2,71	26,4	82	75,49	68,89	74,25
1.3	PAD Sektor Pariwisata	Persen	18,76	16,19	20,86	25,93	26,33	18,74	16,14	18,28	19,72	N/A	99,89	99,69	87,63	76,05	Tidak dapat dihitung
2	**Pertanian**																
2.1	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	Persen	15,15	14,57	14,75	14,57	1,59	15,11	15,71	14,85	13,73	N/A	99,74	107,82	100,68	94,23	Tidak dapat dihitung
2.2	Kontribusi **s**ubsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	Persen	2,2	2,1	1,93	1,93	1,74	1,67	1,73	1,73	1,54	N/A	75,91	82,38	89,64	79,79	Tidak dapat dihitung
2.3	Kontribusi **sub**sektor perkebunan terhadap PDRB	Persen	1,46	1,47	1,43	1,43	2,14	1,54	1,58	1,58	1,36	N/A	105,48	107,48	110,49	95,1	Tidak dapat dihitung
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB	Persen	15,11	14,73	14,38	14,38	4,96	N/A	N/A	N/A	N/A	13,42	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	270,62
2.5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar																
2.5.1	Padi	Jumlah	62,14	60,6	58,8	58,8	60,95	60,47	58,91	57,74	60,63	60,99	97,31	97,21	98,2	103,11	100
2.5.2	Jagung	Jumlah	26,46	33,17	31,22	31,22	43,47	46,36	32,18	29,41	42,05	49,08	175,21	97,02	94,2	134,69	112,91
2.5.3	Kedelai	Jumlah	14,11	13,09	12,92	12,92	15,88	13,68	13,78	13,32	16,51	17,78	96,95	105,27	103,1	127,79	111,93
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	9,011	9,011	9,011	9,011	1	9,011	9,011	0	9,011	100	100	100	0	100	10000
3	**Kehutanan**																
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Persen	2,63	2,57	1,48	1,48%	6,61	7,72	16,24	2,02	3,41	8,58	294	632	136	23.041	129,8
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah (Ha)	580	835	835	835	31.658,84	797	835	835	1.783,91	186,81	137,41	100	100	213,64	0,59

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3.3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persen	60	60	60	60	70	73,15	71,19	70,46	71,19	73,71	121,92	118,65	117,43	118,65	105,3
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**																
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	99,67	100	100	100	100	100	100	100	3,41	100	100,33	100	100	3,41	100
4.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persen	80	100	100	100	1,52	100	100	100	1.783,91	1,4	125	100	100	1783,91	92,26
4.3	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	Persen	60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71,19	N/A	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung
5	**Perdagangan**																
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Persen	2,6	2,75	2,85	3	96	21,55	1,25	92,67	87,31	74,88	828,85	45,45	3251,58	2910,33	78
5.2	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	Persen	22,64	26,41	30,19	33,96	19,41	15,09	17,25	17,25	17,25	17,79	66,65	65,32	57,14	50,8	91,65
6	**Perindustrian**																
6.1	Cakupan Bina Perajin	Persen	3,64	3,78	3,91	4,04	1	14,28	-	2,34	4,04	1,84	392,31	Tidak dapat dihitung	59,846547	100	184
7	**Transmigrasi**																
7.1	Persentase Transmigran Swakarsa	Persen	40	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung
8	**Kelautan dan Perikanan**																
8.1	Produksi Perikanan	Jumlah	228.873,48	121.713,44	124.147,71	144.834,01	156,667.96	127.835,47	141.580,89	57.997,58	139.595,58	N/A	55,85	116,32	46,72	96,38	Tidak dapat dihitung
8.2	Konsumsi Ikan	Jumlah	32,2	34,87	35,57	34,86	49,29	38,83	44,81	0	47,09	N/A	120,59	128,51	0	135,08	Tidak dapat dihitung
8.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	70	80	90	100	100	100	100	N/A	0	N/A	142,86	125	Tidak dapat dihitung	0	Tidak dapat dihitung
8.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persen	70	80	97	100	82.24	118,23	78,33	71	75	N/A	168,9	97,91	73,2	75	Tidak dapat dihitung

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
8.5	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	101.082,77	103.104,42	105.166,51	107.269,84	104,897.51	95.973,24	99.902,39	47.942,48	107.375,08	N/A	94,95	96,89	45,59	100,1	Tidak dapat dihitung
8.6	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Persen	80	80	80	80	84%	80	80	80	4,9	N/A	100	100	100	6,125	Tidak dapat dihitung
8.7	Nilai Tukar Nelayan	Persen	104,6	117,9	118,5	106,19	100,22	100,12	100,19	100,93	100,52	91,65	95,72	84,98	85,17	94,66	91,45
Penunjang Urusan																	
1	**Perencanaan Pembangunan**																
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Persen	100	100	100	100	Ada	100	100	100	100	Ada	100	100	100	100	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Persen	100	100	100	100	Ada	100	100	100	100	Ada	100	100	100	100	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Persen	100	100	100	100	Ada	100	100	100	100	Ada	100	100	100	100	Ada
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	95,27	100	100	100	100	95,27	100	100	100	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100
2	**Keuangan**																
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		N/A	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.2	Persentase SiLPA	Persen	6	6	6	6	6	2,79	6	73,44	2,1	7,64	46,5	100	1.224	35	127,33
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	6	6	6	6	6	2,79	10,76	13,69	2,1	7,64	46,5	179,33	228,17	35	127,33
2.4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persen	0	0	0	0	0	1 kegiatan	N/A	0		0	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	20	20	20	20	20	29,63	20	25,56	19,86	N/A	148,15	100	127,8	99,3	Tidak dapat dihitung
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	10	10	10	10	10	12,95	10	10,81	9,24	N/A	129,5	100	108,1	92,4	Tidak dapat dihitung
2.7	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Rasio	0,36356198	0,388942909	0,414085702	0,439740821	N/A	0,465845793	N/A	N/A	N/A	N/A	128,13	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	N/A
2.8	Bagi Hasil Kabupaten /Kota dan Desa	Jumlah	1.702.672.669.256	1.797.918.066.903	1.900.172.786.199	2.010.028.403.889	1.192.689.709.947	1.054.748.783.172	1.084.845.438.642	467.995.630.798	1.444.364.532.966	1.800.971.992.343	61,95	60,34	24,63	71,86	151
2.9	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tepat Waktu
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**																
3.1	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persen	20	20	20	20	30	20	20	30	0,054	5,077	100	100	150	0,27	16,92
3.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	48	43	3	3	2,04	47,23	28,02	26,47	0,022	6,048	98,4	65,16	882,33	0,73	296,47
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	32	34	36	38	10	43,49	25,07	34,44	89	74,06	135,91	73,74	95,67	234,21	740,6
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	49	49	52	52	42	42	37	39	38	38	85,71	75,51	75	73,08	90,48
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	4.441	4.389	3,981	3.981	3.489	4.654	4.277	4.039	3	2741	104,8	97,45	101456,9	0,08	78,56

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Jumlah	1.057	1.079	6.869	7	5.636	5.932	5.861	7.142	8,933	10317	561,21	543,19	103,97	127,61	183,06
4	**Penelitian dan Pengembangan**																
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penerapan SIDa:										-						
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	13,6 6/44	13,6 6/44	14%7/50	14% 7/50	80	16,6 6/36	16,66/36	90,9 27/33	100	100	122,06	122,06	649,29	714,29	125
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persen	66,6% 6/8	66,6% 6/8	70%7/8	70% 7/10	80	77,8% 7/9	77,8%7/9	96,6 30/36	100	100	115,62	115,62	137,14	142,86	125
5	**Pengawasan**																
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	16	27	27	27	85	95,13	99,1	98,57	100	99,86	594,56	367,04	365,07	370,37	117,48
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen	5	5	5	5	85	0,01	2	2	0,022	N/A	0,2	40	40	0,44	Tidak dapat dihitung
5.3	Jumlah Temuan BPK	Persen	55	30	10	10	85	100	47	15	100	N/A	181,82	156,67	150	1000	Tidak dapat dihitung
6	**Sekretariat Dewan**																
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Ada

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun Perencanaan					Realisasi					Capaian Kerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Ada
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Ada

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023; Data Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Semester II Tahun 2024

2.5 Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memerhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan dalam dimensi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dimana Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pada Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, bahwa di dalam Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Tabel 2.93
Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan
Tahun 2024

No	Indikator SPM	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Jenjang SMA				
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100	94,16	94,16
2.	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	100	85,17	85,17
3.	Kemampuan Literasi	76,25	76,17	99,90
4.	Kemampuan Numerasi	63,83	62,99	98,68
5.	Indeks iklim Keamanan	84,99	74,78	87,99
6.	Indeks Iklim Kebinekaan	79,07	76,87	97,22
7.	Indeks Iklim Inklusivitas	64,13	61,06	95,21
Jenjang SMK				
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100	94,16	94,16
2.	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	100	85,17	85,17
3.	Kemampuan Literasi	72,34	71,33	98,60
4.	Kemampuan Numerasi	59,58	59	99,03
5.	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	91,71	91,67	99,96
6.	Kepuasan Dunia Kerja terhadap Budaya Kerja lulusan SMK	79	78,64	99,54
7.	Indeks Iklim Keamanan	82,77	73,13	88,35
8.	Indeks Iklim Kebinekaan	76,48	74,82	97,83
9.	Indeks Iklim Inklusivitas	60,64	58,99	97,28
Jenjang Pendidikan Khusus				
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	100	49,01	49,01
2.	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Disabilitas Usia 4- 18 Tahun	100	59,73	59,73

No	Indikator SPM	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
3.	Kemampuan Literasi SDLB	70,92	66,97	94,43
4.	Kemampuan Literasi SMPLB	71,21	62,11	87,22
5.	Kemampuan Literasi SMALB	64,59	64,09	99,23
6.	Kemampuan Numerasi SDLB	72,09	63,62	88,25
7.	Kemampuan Numerasi SMPLB	67,27	65,2	96,92
8.	Kemampuan Numerasi SMALB	67,44	58,25	86,37
9.	Indeks Iklim Keamanan SDLB	85,78	78,74	91,79
10.	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	80,3	71,4	88,92
11.	Indeks Iklim Keamanan SMALB	80,81	72,28	89,44
12.	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	76,6	66,98	87,44
13.	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	72,91	66,31	90,95
14.	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	74,56	69,09	92,66
15.	Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	70,74	64,05	90,54
16.	Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	66,63	60,42	90,68
17.	Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	72,86	62,25	85,41

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024

Tabel 2.94
Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan
Tahun 2024

No	Indikator SPM	Sasaran (%)	Capaian (%)	Persentase (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	1.640.559 Penduduk	1.640.559 Penduduk	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	64.576 orang	0	0

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024

Tabel 2.95
Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2024

No	Indikator SPM	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	88,23
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100	100

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024

Tabel 2.96
Capaian Penerapan SPM Perumahan Rakyat Provinsi Bali
Tahun 2024

No	Indikator SPM	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	100	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	100	100

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024

Tabel 2.97
Realisasi SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Layanan Dasar	Jumlah Penegakan Perda/Perkada Sesuai Mutu			Pelayanan Ganti Rugi			Capaian SPM
		Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda/ Perkada	Jumlah Penegakan Perda/Perkada yang Sesuai Mutu Layanan Dasar	Capaian (%)	Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Dampak Penegakan Perda Dan Perkada Yang Terlayani	Capaian (%)	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	190	190	100%	0	0	100%	100%

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024

Tabel 2.98
Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output	Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM	Tuntas Utama	92,30%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti		100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti		100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti		100%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi		62,54%

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024

2.6 Kerjasama Daerah

Pelaksanaan kerja sama daerah di Provinsi Bali merepresentasikan implementasi dari paradigma *governance* melalui pendekatan kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana terimplementasi dalam dokumen pelaporan semester I dan II tahun 2024. Berdasarkan analisis terhadap dokumen tersebut, teridentifikasi pola kerja sama yang bersifat multidimensional, mencakup Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), dan Sinergi dengan Pemerintah Pusat, yang secara teoretis merefleksikan konsep multilevel *governance* dalam pembangunan daerah. Dimensi KSDD di Provinsi Bali menunjukkan karakteristik yang berorientasi pada penguatan kapasitas sektoral dan lintas wilayah, dengan dominasi kerja sama di bidang kesehatan (khususnya pengendalian tuberkulosis), infrastruktur (sistem penyediaan air minum), pertanian, dan teknologi informasi. Pola ini mengindikasikan pendekatan *problem-based collaboration* yang mengutamakan penyelesaian isu-isu strategis dan berbasis kebutuhan spesifik daerah. Sementara itu, dimensi KSDPK menampilkan kecenderungan kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi, BUMN, dan sektor swasta, yang secara

konseptual sejalan dengan *triple helix model* dalam pengembangan inovasi daerah. Perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencerminkan upaya penguatan basis pengetahuan dalam pembangunan daerah yang berlandaskan pada *knowledge-based development*. Analisis terhadap mekanisme kerja sama mengungkapkan adanya proses yang terstruktur mulai dari persiapan, penawaran, hingga implementasi, sesuai dengan prinsip tata kelola kolaboratif yang menekankan aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Namun demikian, dokumentasi pelaporan mengindikasikan adanya beberapa kendala implementatif, antara lain keterbatasan tindak lanjut dari kesepakatan bersama ke perjanjian kerja sama, yang mengisyaratkan adanya *gap* antara komitmen formal dan aktualisasi program.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori kolaborasi antar-institusi yang mengidentifikasi faktor-faktor seperti keterbatasan koordinasi, perbedaan prioritas, dan keterbatasan sumber daya sebagai determinan efektivitas kerja sama. Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 22/01-A/HK/2024 menunjukkan upaya institusionalisasi dan formalisasi mekanisme koordinasi, yang secara teoritis merupakan strategi untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan dalam pelaksanaan kerja sama daerah. Keberadaan tim dengan struktur lintas-sektor ini berpotensi memperkuat pendekatan *whole-of-government* dalam pengelolaan kerja sama daerah, namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada kapasitas koordinasi dan artikulasi kepentingan antar pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, kerja sama daerah di Provinsi Bali mencerminkan transformasi dari model penyelenggaraan pemerintahan yang hierarkis-sentralistik menuju pola yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada efisiensi serta efektivitas pelayanan publik, meskipun masih dihadapkan pada tantangan operasional dan koordinatif dalam implementasinya.

Saat ini pula telah adanya kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota. Salah satunya adalah kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar, dan Pemerintah Kota Denpasar tentang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan Proyek Strategis Daerah di Bali dan kepada Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan. Pembangunan Proyek Strategis Provinsi Bali meliputi:

1. Restorasi *Parahyangan* Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem,
2. Pembangunan Pusat Olahraga Provinsi Bali di Kabupaten Bangli,

3. Pembangunan Kawasan Gedung Parkir Pura Ulun Danu Batur di Kabupaten Bangli,
4. Pembangunan/Pengembangan Kawasan Danau Beratan di Kabupaten Tabanan,
5. Pembangunan Pusat Penyosohan Gabah dan Pabrik Pakan Ternak di Kabupaten Tabanan,
6. Pembangunan Gedung Parkir Sanur, Kota Denpasar,
7. Pembangunan Jalan *Shuttle* dari Gedung Parkir Sanur Menuju Pelabuhan Sanur,
8. Pembangunan Jalan Baru *Underpass* Jimbaran, Kabupaten Badung,
9. Pembangunan Jalan Baru Gatot Subroto Barat-Canggu, Denpasar-Badung,
10. Pembangunan Jalan Baru *Underpass* Tohpati, Kota Denpasar,
11. Pembangunan Jalan Baru *Sunset Road*-Mahendradatta di Kota Denpasar,
12. Pembangunan Jembatan Baru Payangan, Gianyar – Bongkasa, Badung,
13. Pembangunan Jalan Baru Konektivitas Pura Batur-Pura Agung Besakih,
14. Pembangunan Jalan Baru Sang Hyang Ambu Konektivitas Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem sebagai bagian dari Ruas Jalan Lingkar Bali,
15. Pembangunan Jalan Baru Berina Konektivitas Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari Ruas Jalan Lingkar Bali,
16. Penanganan Sampah di Provinsi Bali.

Tabel 2.99
Data Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain

No	KSDD	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Tanggal Penetapan	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan	Jangka Waktu Pelaksanaan	Manfaat dan Tindak Lanjut
1.	Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	120.23/140/PKS/011.3/2024 B.15.100.3.7/10105/SEKRET/ DISTANPANGAN	25 Juni 2024	Pertanian dan Ketahanan Pangan	2 tahun	Terlaksananya fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya perkebunan di wilayah Para Pihak
2.	Kerja Sama Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	120.23/142/PKS/011.3/2024 B.15.100.3.7/9762/SEKRET /DISTANPANGAN	25 Juni 2024	Pertanian dan Ketahanan Pangan	2 tahun	Mendukung peningkatan perekonomian Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali melalui fasilitasi pengembangan pertanian sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan
3.	Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	120.23/141/PKS/011.3/2024 B.15.100.3.7/9777/SEKRET/ DISTANPANGAN	25 Juni 2024	Pertanian dan Ketahanan Pangan	2 tahun	Terciptanya pengembangan peternakan dan kesehatan hewan di wilayah kerja Para Pihak
4.	Kerja Sama Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	120.23/145/PKS/011.3/2024 B.14.000.4.7.2/6515/SEKRET/ D.KOMINFOS	25 Juni 2024	Komunikasi dan Informatika; Persandian	2 tahun	Meningkatkan kualitas layanan publik, literasi digital dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali
5.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	120.23/144/PKS/011.3/2024 B.12.000.4.7.2/4676/II/DPMD DUKCAPIL	25 Juni 2024	Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 tahun	Mendapatkan fasilitasi dan informasi terkait peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Peningkatan Ekonomi Desa, Pengembangan Inovasi

No	KSDD	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Tanggal Penetapan	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan	Jangka Waktu Pelaksanaan	Manfaat dan Tindak Lanjut
							melalui Teknologi Tepat Guna (TTG), Kegiatan Sistem Administrasi Desa (SIMANIS Desa), Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dan BUM Desa/BUMDesMa, Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Desa
6.	Perubahan/*Addendum* Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Telagawaja	Pemerintah Kabupaten Karangasem	075/11/PKS/B.Pem.Kesra/V/2021 075/60/PKS-DPUPR/PEM/2021 sebagaimana telah diaddedum dengan: B.25.500.18.5.3/7833/UPTD.PAM/DISPUPR. PERKIM 075/46/ PKS-DPUPR/PEMKESRA/2024	Perjanjian Induk ditandatangan 11 Mei 2021 dan *Addendum* PKS ditandatangan 1 Juli 2024	Pekerjaan Umum	5 tahun sesuai Perjanjian Induk	Tersedianya kebutuhan air minum masyarakat di Kabupaten Karangasem
7.	Kerja Sama Pembangunan Daerah Bidang Perindustrian	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	100.3.7.1/57/PKS-PEMOTDA/2024 18.500.18.5.3/PKS-DISDAG/2024	22-Nov-24	Perindustrian	5 tahun	Pengembangan dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) dan pengembangan serta promosi sumber daya alam/ produk industri

Tabel 2.100
Data Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

No	Mitra Kerja Sama	Judul Dokumen Perjanjian	Nomor Dokumen Perjanjian	Tanggal Penetapan	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan	Jangka Waktu Pelaksanaan	Manfaat dan Tindak Lanjut
1.	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah	B.00.415.4/4834/Setda 0088/SPK/DIR/KRK/2024	24 Januari 2024	-	5 tahun	Pelaksanaan pembayaran dan penggunaan dengan Fasilitas KKPD dalam rangka penggunaan Uang Persediaan dapat berjalan efektif
2.	Universitas Dwijendra	Pelaksanaan *Tridharma* Perguruan Tinggi dan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Provinsi Bali	B.00.415.4/4891/Setda 077/UD.I/MoU/I/2024	25 Januari 2024	Pendidikan	5 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali
3.	Universitas Dwijendra	Pelaksanaan *Tridharma* Perguruan Tinggi dan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Provinsi Bali	B.00.415.4/4892/Setda 113/UD.I/PKS/I/2024	26 Januari 2024	Pendidikan	5 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali
4.	PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Bank Central Asia Tbk	Pengalihan Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 075/29/PKS/B.PEM.KESRA/X/2022 dan 015/PKS-BPG-ECM/DST/2022 tentang Pemberian Fasilitas BCA *E-Commerce Payment Gateway* Untuk Mendukung 5.Pelaksanaan Penerimaan Kontribusi Wisatawan	B.00.415.4/4778/Setda 0103/SPK/DIR/DJA/2024 010/PKS-ECM/DST/2024	26 Januari 2024	-	18 Oktober 2027	Akan dilaksanakan rilis fitur multipayment untuk wisatawan mancanegara dalam rangka meningkatkan kenyamanan wisatawan dalam membayar pungutan
5.	Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali	Teknis Pelaksanaan Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali	B.00.415.4/7056/Setda 006/GIPI Bali/BTB/KB/II/2024	7 Februari 2024	-	5 tahun	Untuk efektivitas pelaksanaan Pungutan Bagi Wisatawan Asing yang lancar, aman, efisien dan handal

No	Mitra Kerja Sama	Judul Dokumen Perjanjian	Nomor Dokumen Perjanjian	Tanggal Penetapan	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan	Jangka Waktu Pelaksanaan	Manfaat dan Tindak Lanjut
6.	Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali	Teknis Pelaksanaan Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali	B.20.000.4.7.2/622/PEMAS/ DISPAR 007/GIPI-Bali/BTB/PKS/II/2024	7 Februari 2024	-	5 tahun	Telah dilaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan Pungutan bagi Wisatawan Asing dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali kepada anggota Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali; Telah dilaksanakan monitoring bersama ke daya tarik wisata yang banyak dikunjungi wisatawan asing untuk pengecekan pembayaran pungutan seperti: Uluwatu, Goa Gajah, Desa Penglipuran, Kawasan Pura Besakih, dan DTW Tanah Lot; Terus dilaksanakan koordinasi antar PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pungutan bagi Wisatawan Asing

No	Mitra Kerja Sama	Judul Dokumen Perjanjian	Nomor Dokumen Perjanjian	Tanggal Penetapan	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan	Jangka Waktu Pelaksanaan	Manfaat dan Tindak Lanjut
7.	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Penyediaan Sistem Layanan Perbankan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali	B.00.415.4/7057/Setda 0158/SPK/DIR/DJA/2024	7 Februari 2024	-	5 tahun	Untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali serta memberikan kemudahan dalam peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar
8.	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Penyediaan Sistem Layanan Perbankan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali	B.00.415.4/7058/Setda 0159/SPK/DIR/DJA/2024	7 Februari 2024	-	5 tahun	Untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali serta memberikan kemudahan dalam peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar
9.	PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai	Pungutan Bagi Wisatawan Asing	B.00.415.4/7735/Setda SP.GM.DPS.7/HK.04/2024	12 Februari 2024	-	2 tahun	Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi Pungutan Bagi Wisatawan Asing di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai
10.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan PT Dirgantara Indonesia	Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Provinsi Bali Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi *Kerthi* Bali	NK.04/D.1/02/2024 B.00.415.4/6966/Setda 100.3.7.1/5/KB/PEM/2024 MOU/004/PTD/ UT0000/02/2024	16 Februari 2024	Perhubungan	5 tahun	Mendukung pengembangan ekosisten Industri Kedirgantaraan di Provinsi Bali termasuk di Bandara Letkol Wisnu, Kabupaten Buleleng

No	Mitra Kerja Sama	Judul Dokumen Perjanjian	Nomor Dokumen Perjanjian	Tanggal Penetapan	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan	Jangka Waktu Pelaksanaan	Manfaat dan Tindak Lanjut
11.	Yayasan Plan International Indonesia	Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Perempuan dan Pemuda di Wilayah Provinsi Bali	B.00.100.3.7/8855/Setda 154/Partnership/FY24/YPII /CO/II/2024	21 Februari 2024	Sosial; Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	3 tahun	Meningkatkan kualitas hidup anak, perempuan dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang berperan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bali
12.	Universitas Tabanan	Pelaksanaan *Tridharma* Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	B.00.100.3.7/10488/Setda 064/Untab/III/30/2024	4 Maret 2024	Pendidikan	5 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali
13.	PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai	Pungutan Bagi Wisatawan Asing	B.20.000.4.7.2/1026/PEMAS/ DISPAR SP.GM.DPS.34/HK.04/2024	22 Maret 2024	-	2 tahun	Telah dibangun counter layanan Pungutan bagi Wisatawan Asing di area kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai; Telah dipasang papan informasi terkait pelaksanaan Pungutan bagi Wisatawan Asing di area Bandara I Gusti Ngurah Rai
14.	Universitas Hindu Indonesia	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bal	B.00.100.3.7/18800/Setda 05/KH-MOU/UNHI/IV/2024	23 April 2024	Pendidikan	5 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali
15.	Universitas Hindu Indonesia	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	B.00.100.3.7/18801/Setda 08/KH-PKS/UNHI/IV/2024	26 April 2024	Pendidikan	5 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali

No	Mitra Kerja Sama	Judul Dokumen Perjanjian	Nomor Dokumen Perjanjian	Tanggal Penetapan	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan	Jangka Waktu Pelaksanaan	Manfaat dan Tindak Lanjut
16.	Universitas Ngurah Rai, Denpasar Bali	Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Provinsi Bali	B.00.100.3.7/20745/Setda 460/01.02.3/1.08/2024	15 Mei 2024	Pendidikan	4 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali
17.	Universitas Udayana	Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Provinsi Bali	B.00.100.3.7/20746/Setda B/7/UN14/HK.07.00/2024	15 Mei 2024	Pendidikan	4 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali
18.	Universitas Warmadewa	Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Provinsi Bali	B.00.100.3.7/20747/Setda 1328/Unwar/PD 15/2024	15 Mei 2024	Pendidikan	4 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali
19.	Universitas Mahasaraswati Denpasar	Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Provinsi Bali	B.00.100.3.7/20748/Setda K.871/C.06.01/Unmas/V/2024	15 Mei 2024	Pendidikan	4 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali
20.	Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti	Pelaksanaan *Tridharma* Perguruan Tinggi di Provinsi Bali	B.11.400.3/5858/SDK/Diskes 2390/Usakti/FK/PKS/04/VI/2024	5 Juni 2024	Kesehatan	4 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali
21.	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah	B.31.000/3852/PAPKD/ BPKAD 0010/SPK/RNO/HAK/2024	21 Juni 2024	-	5 tahun	KKPD Dengan SoF Fasilitas Kredit KKPD melalui Kanal Mobile Banking khusus transaksi QRIS Sudah dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja Barang dan jasa dan perjalanan Dinas dan dilanjutkan ke fase kedua dengan mengunakan kartu Kredit Fisik

No	Mitra Kerja Sama	Judul Dokumen Perjanjian	Nomor Dokumen Perjanjian	Tanggal Penetapan	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan	Jangka Waktu Pelaksanaan	Manfaat dan Tindak Lanjut
22.	Institut Desain dan Bisnis Bali (IDB Bali)	Pelaksanaan *Tridharma* Perguruan Tinggi dan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Provinsi Bali	B.00.100.3.7/31976/Setda 200/IDBBALI/KSI/IA/ VII/2024	15 Juli 2024	Pendidikan	5 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali
23.	Institut Desain dan Bisnis Bali (IDB Bali)	Pelaksanaan *Tridharma* Perguruan Tinggi dan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Provinsi Bali	B.00.100.3.7/32492/Setda 199/IDBBALI/KSI/IA/ VII/2024	18 Juli 2024	Pendidikan	5 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali
24.	Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah Bali	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali	B.00.100.3.7/35717/Setda Mou-105/22000/LR.02/08/2024	2 Agustus 2024	Pangan	5 tahun	Mewujudkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali mulai dari kegiatan Pengadaan, Pengelolaan dan Pendistribusian Cadangan Pangan Daerah
25.	Yayasan Plan International Indonesia	Pelaksanaan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana dan Penguatan Kapasitas Kecerdasan Artifisial di Lingkungan Satuan Pendidikan di Provinsi Bali	B.10.000.4.7.2/38529/PLK/DIKPORA 011/Partnership/FY25/YPII/CO/X/2024	23 Agustus 2024	Pendidikan	18 Bulan	Terlaksananya provinsi percontohan program pengembangan satuan pendidikan aman bencana di Provinsi Bali
26.	Primakara University	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Provinsi Bali	B.17.000.4.7.2/4101/UPTD/DISKOP.UKM 011/PKS/PSSU/IX/2024	11 September 2024	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali
27.	Universitas Brawijaya	Pelaksanaan *Tridharma* Perguruan Tinggi, Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Bali	B.00.100.3.7/40914/Setda 79.1/UN10.A0406/ HK.07.00.2/2024	02 September 2024	Pendidikan	5 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali

No	Mitra Kerja Sama	Judul Dokumen Perjanjian	Nomor Dokumen Perjanjian	Tanggal Penetapan	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan	Jangka Waktu Pelaksanaan	Manfaat dan Tindak Lanjut
28.	Universitas Brawijaya	Pelaksanaan *Tridharma* Perguruan Tinggi, Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Bali	B.00.100.3.7/40915/Setda 34/UN10.A0406/HK.07.00.4/ 2024	5 September 2024	Pendidikan	5 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali
29.	Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali	Pelaksanaan *Tridharma* Perguruan Tinggi, Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Bali	B.00.100.3.7/51288/Setda HK.201/5/3/Poltrada Bali/2024	6 November 2024	Pendidikan	5 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali
30.	Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali	Pelaksanaan *Tridharma* Perguruan Tinggi, Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Bali	B.01.100.3.7/51291/Setda HK.201/5/4/Poltrada Bali/2024	11 November 2024	Pendidikan	5 tahun	Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan di Provinsi Bali

Tabel 2.101
Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

No	Mitra Kerja Sama	Judul Dokumen Perjanjian	Nomor Dokumen Perjanjian	Tanggal Penetapan	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan	Jangka Waktu Pelaksanaan	Manfaat dan Tindak Lanjut
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik	Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Bidang Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi	01.HM.310/NK.PUSDIKLAT BPS/21-II/2024 B.00.415.4/8912/Setda	21 Februari 2024	-	5 tahun	Terselenggaranya Pengembangan SDM bidang Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dan Pemerintah Daerah lainnya
2.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	Sinergi Pengembangan dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Bali	B.00.100.3.7/10869/Setda B458/HK.220/H.12.16/03/2024	6 Maret 2024	Pertanian	5 tahun	Menyinergikan sumber daya dan kompetensi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing Pihak untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan
3.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Provinsi Bali	MoU/004/KB/DN/III/2024 B.00.100.3.7/7736/Setda	7 Maret 2024	Kesehatan	5 tahun	Meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Bali melalui sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika
4.	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Pengembangan Kompetensi Bagi Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Perdagangan Melalui Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Bidang Perdagangan	HK.02.00/1/M-DAG/MoU/0602024 B.00.100.3.7/27375/Setda	20 Juni 2024	-	5 tahun	Terselenggaranya Pelatihan Aparatur di Bidang Perdagangan dalam rangka Pengembangan Kompetensi bagi SDM Aparatur Bidang Perdagangan

2.7 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Bali

2.7.1 Sasaran Pembangunan Provinsi Bali

Sasaran Pembangunan Provinsi Bali telah tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang bersifat imperatif atau mutlak untuk digunakan sebagai sumber sasaran utama pembangunan. Sasaran Pembangunan Provinsi Bali dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 2.102
Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029

No	Sasaran Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	7,5	8,5
2	PDRB per Kapita	Rp Juta	72,7	110,9
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	1,4	1,4
4	Tingkat Kemiskinan	%	3,57-3,93	1,79-2,79
5	Rasio Gini	Angka	0,355-0,359	0,331-0,335
6	Indeks Modal Manusia	Angka	0,61	0,64
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	5,36	26,88
8	IKLH Daerah	Angka	76,19	76,89
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,87-2,35	1,63-2,17

Sumber: *Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029*

Pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Bali tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari kontribusi kabupaten/kota sebagai entitas pelaksana pembangunan di tingkat lokal meskipun dalam RPJMN telah diamanatkan indikasi intervensi pembangunan yang dapat membantu Provinsi Bali mencapai sasaran pembangunan tersebut. Oleh karena itu, sasaran pembangunan Provinsi Bali tersebut perlu dipetakan dan dijabarkan ke dalam target masing-masing kabupaten/kota dengan menyesuaikan pada karakteristik wilayah, dan kontribusinya terhadap Provinsi Bali.

Pemetaan ini penting dilakukan untuk beberapa alasan strategis:

1. Mendorong sinergi pembangunan pusat-daerah, agar perencanaan pembangunan kabupaten/kota berjalan selaras dengan arah dan target pembangunan provinsi maupun nasional.
2. Menjamin distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif, terutama untuk wilayah-wilayah dengan ketimpangan struktural yang masih tinggi.
3. Meningkatkan efektivitas intervensi pembangunan, melalui identifikasi kontribusi sektoral dan *spasial* masing-masing kabupaten/kota terhadap agregat sasaran pembangunan Provinsi Bali.

4. Menjadi dasar perumusan strategi kewilayahan dan pengembangan proyek prioritas pada level daerah, sehingga program yang disusun memiliki orientasi hasil (*outcome-based*).
5. Mendukung penguatan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan berbasis wilayah, agar dapat mengukur capaian pembangunan secara lebih objektif dan terukur hingga level tapak.

Penetapan target sasaran pembangunan Kabupaten/Kota didasarkan pada kontribusi kabupaten/kota kepada Provinsi Bali. Semakin tinggi kontribusinya bagi Provinsi Bali, maka target yang diarahkan turut semakin tinggi. Seperti misalnya Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sebagai kontributor tertinggi bagi PDRB Provinsi Bali sehingga kedua wilayah ini mengemban amanat target Laju Pertumbuhan Ekonomi paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya.

Adapun sasaran pembangunan Kabupaten/Kota yang dapat mendukung terwujudnya sasaran pembangunan Provinsi Bali sesuai dengan amanat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 2.103. Pada Tabel 2.103 tersebut, sasaran pembangunan ditetapkan untuk tahun 2026-2030 sesuai tahun implementasi dari RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 serta RPJMD Kabupaten/Kota.

Tabel 2.103
Sasaran Pembangunan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan 2030

Tahun	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Kemiskinan	Gini Rasio	Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Pengangguran Terbuka
2026	**Bali**	**5,60-6,30**	**3,00-3,50**	**0,340-0,345**	**78,94**	**1,77-2,30**
	Jembrana	5,20-5,90	4,09-4,34	0,288	76,26	2,28
	Tabanan	5,10-5,70	3,65-3,85	0,299	78,58	1,93
	Badung	6,00-6,80	2,10-2,45	0,270	84,11	1,62
	Gianyar	5,60-6,40	3,09-3,60	0,200	81,62	1,79
	Klungkung	5,30-6,00	4,22-4,47	0,290	76,26	1,17
	Bangli	4,90-5,50	3,98-4,23	0,301	74,11	0,72
	Karangasem	4,70-5,30	4,95-5,20	0,281	71,75	1,55
	Buleleng	5,20-5,90	4,84-5,09	0,296	75,53	2,03
	Denpasar	5,90-6,60	2,52-2,94	0,340	85,69	1,49
2030	**Bali**	**8,25-8,75**	**1,50-2,50**	**0,330-0,334**	**79,56**	**1,50-2,00**
	Jembrana	6,90-7,40	3,70-3,95	0,285	78,14	1,80
	Tabanan	6,00-6,50	2,50-2,75	0,295	79,93	1,63
	Badung	8,75-9,00	1,05-1,75	0,257	84,43	1,39
	Gianyar	8,35-8,85	1,54-2,57	0,160	84,78	1,47
	Klungkung	7,00-7,50	2,56-2,81	0,240	78,54	1,01
	Bangli	7,50-8,00	3,20-3,45	0,298	77,10	0,58
	Karangasem	6,05-6,55	3,75-4,00	0,277	71,87	1,51
	Buleleng	6,10-6,60	3,98-4,23	0,292	77,52	1,97
	Denpasar	8,75-9,00	1,26-2,10	0,330	86,31	0,94

Sebagai catatan, seluruh sasaran pembangunan Provinsi Bali serta Kabupaten/Kota tersebut di atas dapat tercapai dengan syarat kondisi:

1. Seluruh *highlight* indikasi intervensi pembangunan Provinsi Bali serta Kabupaten/Kota yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dapat terlaksana/terealisasi.
2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali dapat dilaksanakan
3. Sasaran pembangunan tersebut dapat disesuaikan atau dilakukan perubahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan berdasarkan evaluasi atas capaian tahun sebelumnya, perubahan sasaran pembangunan lebih lanjut dapat diakomodir dalam perubahan RPJMD untuk tahun-tahun perencanaan selanjutnya.

2.7.2 *Highlight* Indikasi Intervensi dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Provinsi Bali sebagai bagian dari wilayah Bali-Nusa Tenggara telah mengembangkan konsep pembagian kawasan strategis yang komprehensif untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan menjaga keseimbangan lingkungan. Pembagian ini mencerminkan pendekatan terpadu dalam perencanaan pembangunan regional yang mempertimbangkan karakteristik geografis, potensi ekonomi, dan kerentanan lingkungan di masing-masing wilayah.

Adapun *highlight* indikasi intervensi dan lokasi prioritas berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.104
***Highlight* Indikasi Intervensi di Provinsi Bali**

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
A1	WM Denpasar • Kota Denpasar • Kab. Badung • Kab. Tabanan • Kab. Gianyar	• Peningkatan kualitas dan penataan WM Denpasar, antara lain melalui: o Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Denpasar o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Penyusunan *metropolitan statistical area* • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan WM Denpasar, antara lain pengembangan BRT dean sistem transit • Pembangunan TPST Regional Sarbagita • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Denpasar • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25–50 tahunan di WM Denpasar • Bali *Beach Conservation Project II* • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Denpasar (PHTC) • Pembangunan SPAM Regional Sarbagita • Pengembangan *World Class Research University* berbasis potensi wilayah pada Universitas Udayana, Institut Seni Indonesia Denpasar, dan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa • Pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH *Development Area* 2) • Pengembangan KEK Sanur • Pengembangan KEK Kura-Kura Bali • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi Singapadu–Sanur–Benoa • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi–Canggu
A2	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bali (Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali) • Kota Denpasar • Kab. Jembrana • Kab. Tabanan • Kab. Badung • Kab. Buleleng • Kab. Gianyar • Kab. Bangli • Kab. Klungkung • Kab. Karangasem	• Peningkatan 6A Pariwisata pada hotspot pariwisata Bali, antara lain: o Ubud–Tegallalang–Payangan (Ulapan) o Kintamani–Danau Batur o Besakih–Gunung Agung o Singaraja–Lovina (termasuk *urban renewal* kawasan perkotaan Singaraja menuju kota pariwisata pusaka) o Bedugul–Kuta–Canggu–Sanur–Nusadua o TNBB-Menjangan-Pemuteran o Amuk-Candidasa o Nusapenida • Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Singapadu-Ubud-Gianyar-Bangli-Kintamani-Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara-Singaraja • Pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Baru/Bali Utara • Pengembangan kawasan pariwisata Ulapan, termasuk perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Lingkar Ulapan • Pengembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung • Pengembangan Pelabuhan Gunaksa

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan • Pengurangan risik bencana gunung api di Gunung Agung
A3	Rintisan Kawasan Pengembangan Industri Candikusuma-Pengambengan • Kab. Jembrana	• Pengembangan KI Candikusuma (sektor industri prioritas: industri makanan dan minuman dan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai) • Pengembangan SPAM pada kawasan Negara-Pengambengan-Candikusuma • Pengembangan SPAL dan TPST pendukung aktivitas industri • Penyiapan pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja (PHTC) • Penguatan dan integrasi pendidikan/pelatihan dengan kebutuhan industri pada SMKN 2 Negara dan BLK Jembrana
C1	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bali-Nusapenida • Kab. Badung • Kab. Buleleng • Kab. Bangli • Kab. Jembrana • Kab. Tabanan • Kab. Gianyar • Kab. Karangasem • Kab. Klungkung	• Rehabilitasi dan Peningkatan D.I. Tukad Ayung, D.I. Tukad Penet, D.I. Tukad Unda, D.I. Tukad Saba, D.I. Tukad Oos, D.I. Tukad Pakerisan, D.I. Tukad Petanu, D.I. Tukad Yeh Hoo • Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi kewenangan pemerintah daerah • Pelestarian kearifan budaya *Subak* dalam mendukung terwujudnya Swasembada Pangan • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tangan pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada DAS Badung, DAS Ayung, DAS Yeh Penet-Yeh Empas, DAS Oos-Petanu-Pakerisan, DAS Loloan, DAS Unda, DAS Daya, DAS Saba • Peningkatan pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Badung, DAS Ayung, DAS Yeh Penet-Yeh Empas, DAS Oos-Petanu-Pakerisan, DAS Loloan, DAS Unda, DAS Daya, DAS Saba, Danau Buyan, Danau Beratan, Danau Tamblingan, Danau Batur • Pembangunan infrastruktur PLTP Bedugul • Pembangunan PLTS Bali Barat dan Bali Timur • Pembangunan PLTS Nusa Penida dan BESS (*Battery Energy Storage System*)

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV *Java-Bali Interconnection*. • Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan dan pengembangan *broodstock center* udang di Kab. Karangasem • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen mlelui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gundang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
B1	Kawasan Komoditas Unggulan ekonomi Biru Jembrana • Kab. Jembrana	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Pengambengan • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Jembrana • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
B2 B3	Kawasan Komoditas Unggulan Kopi Bangli-Buleleng (B2) • Kab. Bangli • Kab. Buleleng Kawasan Komoditas Unggulan Anggur Buleleng (B3) • Kab. Buleleng	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (kopi, anggur) • Pengembangan dan perlindungan akwasan pertanian komoditas prioritas industri (kopi, anggur) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (kopi, dan anggur) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (kopi, anggur) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian kopi dan anggur • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
D1	Kawasan Afirmasi Nusa Penida (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan) • Kab. Klungkung	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Pembangunan/preservasi jalan lingkar dan Trans Nusa Penida • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan • Pembangunan rumah sakit berkualitas di Nusapenida (PHTC) • Penguatan Pulai Nusa Penida sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di sekitar ALKI-2 • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM, TIK, dan digitaliasasi masyrakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pemanfaatan sumber daya biota laut dan ekosistem pesisir secara berkelanjutan • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan • Kawasan Perdesaan Pariwisata Gema Santi Nusa Penida
E1	Kawasan Konservasi TN Bali Barat (E1) • Kab. Jembrana • Kab. Buleleng	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
E2	Kawasan Konservasi TWA Gunung Batur-Bukit Payang (E2) • Kab. Bangli	• Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Penguatan pengelolaan hutan lestari
E3	Kawasan Konverasi TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan • Kab. Tabanan • Kab. Buleleng	• Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan • Perlindungan pengamanan hutan
	Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Bali	• Penerapan *Nature-Based Solution* dan *Gray Infrastructure* untuk mitigasi ancaman *megathrust* dan tsunami di Kawasan Perkotaan WM Denpasar
	• Kab. Bangli • Kab. Karangasem • Kab. Buleleng	• Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
	Provinsi Bali	• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah o Revitaslisasi pendidikan nonformal o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak o Pencegahan dan Penurunan *stunting* o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro o Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: o Penuntasan TBC o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		• Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: o Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan o Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi o Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik o Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* o Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: o Perluasan infrastruktur digital o Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital o Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintah digital, antara lain melalui: o Penguatan tata kelola dan infrastuktur pemerintahan digital o Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN o Digitalisasi layanan publik prioritas o Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Bali, antara lain melalui: o Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) o Penanggulangan judi dan penyelundupan

No	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) ○ Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ○ Penguatan dan pengawasan dan penindakan imigrasi • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Bali, antara lain melalui: ○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya ○ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan ○ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

2.7.3 Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali

Pembangunan Bali dengan Visi: "*NANGUN SAT KERTHI LOKA* BALI" *melalui* Pola Pembangunan Semesta Berencana *menuju* Bali Era Baru yang tertuang pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, telah mewujudkan pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama: Alam, *Krama*, dan Kebudayaan, yang ditandai dengan pencapaian pembangunan, meliputi:

1. Bali Era Baru: Pelindungan Kawasan Suci Besakih
2. Bali Era Baru: Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan Terlindungi
3. Bali Era Baru: Memuliakan Keluhuran Warisan Budaya Bali
4. Bali Era Baru: Memuliakan Aksara Bali
5. Bali Era Baru: Bulan Bahasa Bali
6. Bali Era Baru: Hari Penggunaan Busana Adat Bali
7. Bali Era Baru: Penguatan Desa Adat
8. Bali Era Baru: Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali
9. Bali Era Baru: *Tata-Titi* Kehidupan berbasis Kearifan Lokal *Sad Kerthi*
10. Bali Era Baru: SDM Bali Unggul
11. Bali Era Baru: Bulan Bung Karno
12. Bali Era Baru: Kawasan Pusat Kebudayaan Bali
13. Bali Era Baru: *Jantra* Tradisi Bali
14. Bali Era Baru: Festival Seni Bali Jani
15. Bali Era Baru: Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut Terlindungi
16. Bali Era Baru: Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai

17. Bali Era Baru: Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan
18. Bali Era Baru: Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih
19. Bali Era Baru: Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai
20. Bali Era Baru: Ekonomi *Kerthi* Bali
21. Bali Era Baru: Perekonomian Adat Bali
22. Bali Era Baru: Bali Pulau Organik
23. Bali Era Baru: Pelestarian Tanaman Endemik Bali
24. Bali Era Baru: *Gumitir* Bali *Sudamala*
25. Bali Era Baru: Berpihak Produk Lokal Bali
26. Bali Era Baru: Pengakuan Karya Cipta Bali
27. Bali Era Baru: Harkat Arak Bali
28. Bali Era Baru: Cita Rasa Garam Bali
29. Bali Era Baru: Pesona Endek Bali
30. Bali Era Baru: Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali
31. Bali Era Baru: Kartu Bali Sejahtera
32. Bali Era Baru: Pariwisata Budaya, Berkualitas, dan Bermartabat
33. Bali Era Baru: Bali Pulau Digital/Bali *Smart Island*
34. Bali Era Baru: Bali Digital Festival
35. Bali Era Baru: *Keyboard* Aksara Bali
36. Bali Era Baru: Turyapada Tower KBS 6.0 *Kerthi* Bali
37. Bali Era Baru: Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *Krama* Bali
38. Bali Era Baru: SIPANDU BERADAT
39. Bali Era Baru: *Shortcut* Singaraja-Mengwitani
40. Bali Era Baru: Pelabuhan Segitiga Sanur-Sampalan-Bias Munjul
41. Bali Era Baru: Bali *Maritime Tourism* Hub
42. Bali Era Baru: Tol Jagat *Kerthi* Bali
43. Bali Era Baru: Keseimbangan Pembangunan antar Wilayah Bali
44. Bali Era Baru: Bali *Good Governance*

Ke-44 Tonggak penanda peradaban Bali Era Baru tersebut, beberapa diantaranya berupa pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Bali yang sudah bisa dirasakan manfaat dan dampaknya, namun ada pula yang belum selesai pengerjaannya dan perlu untuk dilanjutkan.

Pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Bali pada periode RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, berorientasi pada melanjutkan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pada capaian RPJMD sebelumnya, pembangunan baru, dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur Provinsi Bali secara keseluruhan. Untuk itu pemerintah Provinsi Bali menetapkan indikasi rencana pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Bali, dengan lokasi di kabupaten/kota se-Bali dengan indikasi pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali, APBD Kabupaten/Kota

serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku, yang disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.105
Daftar Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali Tahun 2025-2030

No	Lokasi	Kegiatan	
1.	**Kabupaten Badung**	1	Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi
		2	Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi–Singapadu–Sanur–Benoa
		3	Pembangunan Jalan Tol Mengwi-Canggu
		4	Pembangunan Kawasan TOD dan pengembangan Angkutan Massal
		5	Pembangunan dan Penataan Transportasi Kuta: Pembangunan Kuta *Circulator*, Pembangunan Sarana Prasarana *Water Taxi*
		6	Pembangunan *Subway* Bali
		7	Pembangunan Jalan Baru Gatot Subroto Barat-Canggu, Denpasar-Badung
		8	Pembangunan Jalan Baru *Underpass* Jimbaran
		9	Pembangunan Jembatan Baru, Bongkasa-Payangan (Badung-Gianyar)
		10	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Luhur Uluwatu
		11	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Pucak Mangu
		12	Perlindungan Tukad Ayung
		13	SPAM Ayung
2.	**Kabupaten Bangli**	1	Pembangunan Pusat Olahraga Provinsi Bali
		2	Penataan Kawasan Kintamani Batur
		3	Perlindungan Danau Batur
		4	Pembangunan/Penataan Jalan Batur-Besakih
		5	Pembangunan Gedung Parkir di Kawasan Pura Batur
		6	Pembangunan Akses Jalan Buleleng-Besakih (tanpa melewati Kawasan Batur)
		7	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Batur
3.	**Kabupaten Buleleng**	1	Pembangunan konektivitas Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem (Pembangunan Jalan Berina, Karangasem-Buleleng)
		2	Pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Sangsit
		3	Pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Celukan Bawang
		4	Pembangunan *Shortcut* Mengwitani-Singaraja
		5	Pembangunan Kawasan Industri Maritim dan Perkapalan Brombong
		6	Pembangunan dan Penataan Kawasan Lovina
		7	Pembangunan dan Penataan Kawasan Pelabuhan Buleleng
		8	Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Letkol Wisnu
		9	Pembangunan Bandara Baru

No	Lokasi	Kegiatan	
		10	Perlindungan Danau Tamblingan dan Danau Buyan
4.	**Kabupaten Gianyar**	1	Pembangunan dan Penataan Kawasan Ubud-Tegallalang-Payangan (ULAPAN): b. Pembangunan Parkir, Penataan Akses Jalan, c. Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Intra-Ulapan, d. Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Ubud *Circulator*
		2	Pembangunan Kawasan TOD dan pengembangan Angkutan Massal
		3	Pembangunan Jembatan Baru Payangan, Gianyar-Bongkasa, Badung
		4	Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi–Singapadu–Sanur–Benoa
		5	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Pusering Jagat
		6	SPAM Ayung
		7	SPAM Unda
5.	**Kabupaten Jembrana**	1	Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi
		2	Penataan Kawasan Rambut Siwi
		3	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
		4	Hilirisasi Kelapa
6.	**Kabupaten Karangasem**	1	Pembangunan Jalan Sang Hyang Ambu-konektivitas Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem
		2	Pembangunan Jalan Berina, konektivitas Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng
		3	Pembangunan/Penataan Jalan Batur-Besakih
		4	Penataan Kawasan Suci Pura Agung Besakih
		5	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Lempuyang Luhur
		6	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Andakasa
		7	Pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Amed
7.	**Kabupaten Klungkung**	1	Pembangunan konektivitas Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem (Pembangunan Jalan Sang Hyang Ambu, Karangasem-Klungkung)
		2	Pembangunan Pelabuhan Kusamba
		3	Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB)
		4	Pembangunan Pelabuhan Gunaksa sebagai Kawasan Terpadu Pelabuhan di Pusat Kebudayaan Bali (PKB)
		5	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Kentel Gumi
		6	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Goa Lawah
		7	Pembangunan dan Penataan Kawasan Nusa Penida: a. Pembangunan Jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan, b. Pembangunan Jalan Lingkar Nusa Penida, c. Pembangunan Pengaman Pantai,

No	Lokasi	Kegiatan	
			d. Hilirisasi Rumput Laut, Penataan Kawasan, e. Pembangunan Infrastruktur Energi, f. Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi, g. Peningkatan Layanan Air Minum/Air Bersih, h. Peningkatan Layanan Limbah dan Drainase
		8	SPAM Unda
8.	**Kabupaten Tabanan**	1	Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi
		2	Penataan Kawasan Jatiluwih
		3	Perlindungan Danau Beratan
		4	Penataan Kawasan Bedugul dan sekitarnya
		5	Pembangunan Pusat Penyosohan Gabah
		6	Pembangunan Pabrik Pakan Ternak
		7	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Batukaru
9.	**Kota Denpasar**	1	Pembangunan dan Penataan Akses Jalan dan Parkir di Sanur
		2	Pembangunan Gedung Parkir di Sanur
		3	Pembangunan dan Penataan Akses Jalan Matahari Terbit-Padanggalak-Kawasan KEK
		4	Pembangunan Kawasan TOD dan pengembangan Angkutan Massal Perkotaan
		5	Pembangunan Jalan Baru Gatot Subroto Barat-Canggu, Denpasar-Badung
		6	Perlindungan Tukad Ayung
		7	Pembangunan Jalan Baru *Sunset Road*-Mahedradatta
		8	Pembangunan *Underpass* Ahmad Yani
		9	Pembangunan *Underpass* Tohpati
		10	Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi–Singapadu–Sanur–Benoa
		11	Hilirisasi Rumput Laut
		12	SPAM Ayung
		13	SPAM Unda
		14	Program pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan
		15	Proyek Infrastruktur Terminal LNG

Daftar rencana pembangunan infrastruktur strategis daerah di atas merupakan daftar indikatif yang dapat diubah berdasarkan evaluasi atau ketentuan perundang-undangan.

Di samping rencana pembangunan infrastruktur dimaksud, juga direncanakan Pembangunan infrastruktur umum yang berlokasi di kabupaten/kota se-Bali antara lain:

1. Peningkatan dan Pemeliharaan Kualitas Jalan serta Pemenuhan Faskes dan Alat Kelengkapan Jalan.
2. Penanganan Sampah.
3. Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas TPS3R, TPST, dan TPA.
4. Peningkatan Layanan Air Minum dan Limbah.
5. Peningkatan Ketangguhan Bencana.
6. Penanganan Terpadu Bencana Banjir.
7. Perlindungan Laut, Sungai dan Mata Air.

8. Penanganan Kualitas Rumah dan Kawasan Kumuh.
9. Penataan Kawasan, Destinasi/Objek Wisata.

2.8 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan menghadirkan pelayanan publik yang bernilai tambah, Pemerintah Provinsi Bali saat ini memiliki sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD ini tidak hanya menjadi instrumen bisnis daerah, tetapi juga wahana menjalankan misi pembangunan berbasis budaya, pariwisata, serta ekonomi kerakyatan.

BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali saat ini adalah:

1. PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank BPD Bali). BUMD ini merupakan BUMD tertua milik Pemerintah Provinsi Bali, mengalami transformasi bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002. Bank ini bergerak di bidang usaha perbankan, dan menjadi motor penggerak keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Bali menyertakan modal sebesar Rp839,9 miliar, dengan kepemilikan saham 33,24**%**. Sisanya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
2. PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). Perusahaan yang didirikan berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 ini berfokus pada penjaminan kredit, khususnya bagi pelaku UMKM dan sektor produktif lainnya. Dengan penyertaan modal Rp 212,8 miliar, Pemerintah Provinsi Bali menguasai 92,09% saham perusahaan, menjadikannya sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendorong inklusi keuangan daerah. Sisanya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
3. Perumda *Kerta* Bali *Saguna*. Perusahaan ini dibentuk melalui Perda Nomor 6 Tahun 2022, yang mengubah bentuk badan hukum dari PD menjadi Perusahaan Umum Daerah. Bergerak di bidang *aneka usaha*, sehingga menjadikan Perumda ini ruang eksplorasi bisnis daerah yang fleksibel dan adaptif. Modal yang ditanamkan sebesar Rp 5,28 miliar, dengan kepemilikan saham 100%.
4. Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Inilah BUMD dengan visi kebudayaan dan ekonomi yang menyatu. Dibentuk berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022, perusahaan ini dirancang untuk menjadi penggerak pengembangan kawasan, pusat bisnis, dan pelestarian budaya Bali secara simultan. Dengan penyertaan modal lebih dari Rp 5 triliun dan kepemilikan saham 100%, perusahaan ini diharapkan menjadi ikon ekonomi budaya Bali di masa depan.

5. Perumda *Kerthi* Bali *Santhi.* Didirikan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2022, mengusung misi membangun *pariwisata digital* yang inklusif dan berbasis teknologi. Dengan modal awal Rp10 miliar dan kepemilikan saham penuh (100**%**), perusahaan ini sebelumnya diharapkan menjadi terobosan baru. Namun karena minat pasar yang rendah, operasionalnya dihentikan sementara sejak Maret 2025, untuk dievaluasi dan pengembangan lebih lanjut.

Seluruh BUMD ini dibentuk tidak hanya mengacu pada Peraturan Daerah masing-masing, namun juga mengacu pada PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD serta Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang tata kelola BUMD. Keberadaan BUMD Provinsi Bali merupakan langkah nyata untuk menciptakan *pembangunan ekonomi yang berkelanjutan*, inklusif, dan berbasis potensi lokal. Dengan pengelolaan yang profesional dan berorientasi pelayanan publik, BUMD diharapkan mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah sekaligus wadah pelestarian nilai-nilai kearifan lokal Bali.

Untuk memastikan BUMD benar-benar menjadi lokomotif pembangunan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Bali tidak hanya membentuk, tetapi secara aktif melakukan pembinaan dan pengawasan berkala terhadap seluruh BUMD. Langkah-langkah pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai strategi terarah, antara lain:

1. Evaluasi kinerja BUMD setiap tiga bulan sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan,
2. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) guna memastikan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,
3. Fasilitasi pengembangan usaha, agar BUMD bisa terus adaptif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat,
4. Penugasan khusus kepada BPD Bali sebagai Bank Persepsi untuk menampung Pungutan Wisatawan Asing (*Tourist Levy*), dan
5. Penugasan kepada PT Jamkrida Bali Mandara untuk membentuk lembaga pembiayaan pembangunan daerah yang dinamakan *Bali-Kerthi Development Fund* (BDF).

Sebagai bagian dari upaya tata kelola yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Bali secara rutin melakukan penilaian tingkat kesehatan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penilaian ini mencakup aspek keuangan, operasional, kepatuhan, serta tata kelola perusahaan yang menghasilkan skor dan kategori tingkat kesehatan yang menjadi tolok ukur kinerja masing-masing BUMD. Hasil penilaian tingkat kesehatan BUMD Provinsi Bali terbaru:

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mendapat status sehat (AA) dengan skor 95**.** Bank milik daerah ini menunjukkan performa keuangan dan operasional yang sangat baik, serta tata kelola perusahaan yang memenuhi standar tinggi.

2. PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) mendapat status sehat (AA) dengan skor 83. Perusahaan penjaminan kredit ini dinilai sangat sehat dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal, termasuk inovasi dalam pembentukan *Bali-Kerthi Development Fund* (BDF).
3. Perumda Kerta Bali Saguna mendapat status sehat (A) dengan skor 71,33**.** Perumda ini dinilai sehat dan masih memiliki ruang untuk peningkatan dalam beberapa aspek tata kelola dan pengembangan bisnis.
4. Perumda *Kerthi* Bali Santhi mendapat status kurang sehat (BBB) dengan skor 52,25. Perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata digital ini dinilai kurang sehat dan saat ini dihentikan operasionalnya sementara sejak Maret 2025 karena sepi peminat.
5. Perseroda Pusat Kebudayaan Bali karena status belum beroperasi dengan skor 0. Sebagai BUMD yang baru terbentuk, perusahaan ini masih dalam tahap pengembangan awal dan belum menjalankan operasional secara penuh.

Penilaian ini menjadi dasar penting bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun strategi pembinaan, restrukturisasi usaha, maupun pengambilan keputusan pengembangan ke depan**.** Dengan melakukan evaluasi secara objektif dan terukur, diharapkan seluruh BUMD Bali mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bali.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Bali berencana untuk membentuk 4 (empat) BUMD baru yaitu BUMD Air, BUMD Pangan, BUMD Energi Bersih dan BUMD Transportasi Provinsi. Namun demikian, sejalan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui pemberdayaan potensi daerah, serta optimalisasi pelayanan publik tetap terbuka kemungkinan dibentuk institusi atau Badan Khusus Pengelola suatu layanan publik yang belum ditentukan bentuknya, BUMD atau bentuk lainnya.

1. BUMD Air

Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen strategis dalam membangun kemandirian ekonomi, meningkatkan kualitas layanan dasar publik, dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya penguatan layanan dasar dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, Pemprov Bali saat ini tengah menyiapkan satu langkah penting yaitu pembentukan BUMD Air Provinsi Bali.

Langkah ini dilatarbelakangi oleh belum meratanya layanan air minum di Bali akibat keterbatasan pasokan air baku di sejumlah kabupaten/kota. Selama ini, layanan air minum sebagian besar dikelola oleh PDAM masing-masing kabupaten/kota atau penyedia

non-PDAM, namun belum mampu menjawab kebutuhan air bersih secara menyeluruh. Sejumlah persoalan yang dihadapi meliputi lemahnya koordinasi lintas sektoral, kewenangan penanaman lahan kritis yang terbatas, tidak optimalnya reboisasi di daerah tangkapan air, minimnya insentif perawatan infrastruktur air, serta pengelolaan SPAM yang belum didukung rencana bisnis jangka panjang.

Di sisi distribusi, tantangan muncul seperti tingginya tingkat kehilangan air (*non-revenue water*), rendahnya kontinuitas layanan PDAM, belum optimalnya jaringan pipa di kawasan pariwisata, hingga masih banyaknya penggunaan sumur bor sebagai sumber air utama. Kondisi ini tidak hanya menghambat pelayanan publik yang merata dan adil, tetapi juga berpotensi melemahkan daya lenting ekosistem air Bali di masa depan. Dalam menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan pembentukan BUMD Air yang mampu menjadi pengelola SPAM regional dengan pendekatan satu pulau, satu perencanaan, dan satu manajemen (*one island, one plan, one management*). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), khususnya Pasal 36, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi membentuk BUMD dalam rangka menjembatani kerja sama lintas kabupaten/kota.

Tujuan pembentukan BUMD Air ini antara lain adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih lintas wilayah, meningkatkan kualitas layanan dasar, mengelola sumber daya air secara transparan dan berkelanjutan, membangun tata kelola birokrasi yang akuntabel, serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ruang lingkup kegiatan BUMD Air mencakup produksi air bersih dari air curah, distribusi ke pelanggan, pembangunan infrastruktur pengolahan dan jaringan, kerja sama bisnis dengan badan usaha swasta, serta berbagai kegiatan usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. BUMD Pangan

Di tengah dinamika global yang berdampak pada krisis pangan, volatilitas harga, dan ketimpangan distribusi, Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan langkah strategis untuk membentuk BUMD Pangan. Kehadiran BUMD ini diharapkan menjadi wujud nyata visi pembangunan ekonomi Bali yang berdaulat atas pangannya, berdaulat atas petaninya, dan berdaulat atas pasarnya.

Pembentukan BUMD Pangan didorong oleh beragam persoalan mendasar di sektor pangan, mulai dari fluktuasi pasokan akibat musim dan hari raya, harga jual petani yang ditekan tengkulak, hingga kelangkaan distribusi di periode-periode tertentu. Belum maksimalnya hilirisasi, rendahnya penggunaan teknologi, serta ekosistem pangan yang tidak adil bagi petani, peternak, nelayan, dan produsen kecil

semakin menegaskan pentingnya kehadiran lembaga yang mampu melakukan intervensi strategis secara terstruktur dan berkelanjutan.

Visi yang melandasi pembentukan BUMD Pangan bukan sekadar entitas bisnis, tetapi sebagai penopang sistem pangan Bali yang tangguh dan berkeadilan, yang sejalan dengan agenda RPJMN 2025–2029 yaitu: ketahanan pangan nasional, penguatan sistem pertanian dan hilirisasi, serta pengendalian inflasi melalui stabilisasi pasokan dan harga. Pembentukan BUMD Pangan Provinsi Bali bertujuan untuk:

1. Menjamin penyerapan hasil produksi petani, peternak, dan nelayan secara adil dan bermartabat,
2. Mendorong peningkatan kualitas, kuantitas, dan nilai tambah produk pangan lokal,
3. Menumbuhkan sentra industri pangan dan memperluas akses pasar hingga ke sektor Horeka (Hotel, Restoran, Katering),
4. Menjadi bagian dari mekanisme pengendalian inflasi pangan dan menjaga stabilitas harga di pasar,
5. Mendorong lahirnya branding produk pangan Bali yang unggul dan bernilai ekonomi tinggi,
6. Meningkatkan pendapatan petani dan menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD),
7. Memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Bali sebagai bagian dari pelayanan publik.

Konsep BUMD Pangan ini menyatu dengan filosofi Bali yang menempatkan pangan sebagai bagian dari harmoni hidup. Pangan adalah persembahan, bukan sekadar komoditas. Dalam spirit *menyama braya*, BUMD ini akan berperan sebagai penghubung yang adil antara produsen dan konsumen, sekaligus menjamin keadilan distribusi antarwilayah. Dengan memperkuat sinergi antara petani dan pemerintah daerah, serta melibatkan koperasi, Bumdes, dan UMKM, maka pengelolaan pangan Bali bisa berjalan sesuai nilai-nilai lokal namun tetap kompetitif secara global.

Tugas, peran, dan kegiatan strategis BUMD Pangan Provinsi Bali akan menjalankan dua jenis peran utama, yaitu:

1. Peran Penugasan Publik, seperti:
    a. Terlibat aktif dalam pengendalian inflasi daerah.
    b. Menjamin ketersediaan dan kelancaran produksi pangan lokal.
    c. Berkolaborasi dengan masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi untuk inovasi, pelatihan, pengembangan varietas unggul, *urban farming*, dan pertanian cerdas (*smart agriculture*).
    d. Bersinergi dengan BUMD Pangan tingkat kabupaten/kota untuk mendistribusikan produk pangan lokal unggulan secara merata.

2. Peran Bisnis dan Ekonomi:
    a. Menyelenggarakan pasar murah dan program stabilisasi harga.
    b. Menyalurkan produk pangan lokal ke hotel, restoran, komunitas, dan lembaga.
    c. Menyerap produksi petani termasuk menjaga distribusi gabah ke luar Bali.
    d. Mengembangkan unit pengolahan produk turunan (hilirisasi) untuk meningkatkan nilai tambah.
    e. Terlibat dalam studi dan pengelolaan Pasar Induk dan *Rice Milling Unit* (RMU).
    f. Mengembangkan model bisnis pangan yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Dengan fleksibilitas dan ruang bisnis yang terbuka, BUMD Pangan diarahkan tidak hanya sebagai penyerap surplus produksi, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi ekosistem pangan Bali, dari hulu hingga hilir.

Kehadiran BUMD Pangan Provinsi Bali ini diharapkan menjadi motor strategis dalam kerangka pembangunan Bali yang berkelanjutan dan berkarakter budaya. Ia akan menjadi pengawal keadilan pangan, penggerak ekonomi kerakyatan, sekaligus pilar pengendali inflasi di daerah. Dengan dukungan kolaboratif berbagai pihak, BUMD ini diharapkan mampu menjembatani ketimpangan sistem pangan hari ini menuju kemandirian pangan Bali esok hari. BUMD Pangan bukan sekadar mengatur logistik dan pasar, ia adalah laku budaya, sistem nilai, dan fondasi masa depan ekonomi Bali yang lestari.

3. BUMD Energi Bersih

Sebagai provinsi kepulauan yang menjadi etalase pariwisata dunia, Bali menghadapi tantangan ganda yaitu kebutuhan energi yang tinggi di satu sisi, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur energi di sisi lain. Ketergantungan pada energi fosil dan pasokan luar pulau menjadi risiko serius terhadap ketahanan energi, keberlanjutan lingkungan, dan citra Bali sebagai pulau hijau dan spiritual.

Meskipun Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki Perumda Kerta Bali Saguna yang memiliki mandat bidang energi berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2022, saat ini belum tersedia kelembagaan khusus yang fokus, operasional, dan profesional dalam mengelola proyek-proyek strategis energi bersih. Padahal, berbagai permasalahan yang mencerminkan kebutuhan pembentukan BUMD Energi telah muncul di Bali seperti:

1. Fragmentasi pengelolaan sektor energi, di mana proyek-proyek seperti PLTS atap, infrastruktur LNG, kendaraan listrik, dan penyediaan SPKLU masih tersebar dan belum dikelola secara korporatif dan fokus.
2. Keterbatasan kelembagaan eksisting (Perumda) dalam menjalin kerja sama investasi dengan mitra swasta nasional maupun global, terutama pada sektor energi yang sangat kompetitif dan dinamis.
3. Kebutuhan percepatan realisasi proyek-proyek strategis energi bersih seperti pembangunan *On-shore Power Supply* di Benoa, pengelolaan gas Bali Utara, hingga distribusi LNG yang saat ini menghadapi risiko ketidaksiapan kelembagaan permanen.
4. Kebutuhan bentuk badan hukum yang adaptif dan responsif dalam menghadapi dinamika pasar, seperti Perseroan Terbatas (PT), agar lebih cepat dalam pengambilan keputusan dan lebih diterima oleh calon mitra kerja (*B to B*).
5. Mandat pengembangan infrastruktur LNG melalui Pergub 18 Tahun 2019 belum dapat dieksekusi secara optimal tanpa adanya entitas usaha yang khusus dan siap secara hukum, teknis, dan kelembagaan.

Meskipun pembentukan anak perusahaan (anak usaha energi berbentuk PT) di bawah Perumda Kerta Bali Saguna merupakan langkah awal, namun dinamika dan kompleksitas sektor energi mengharuskan pembentukan BUMD baru yang khusus mengelola sektor energi, yaitu BUMD Energi Provinsi Bali. Alasan utama perlunya pembentukan BUMD Energi, bukan sekadar anak perusahaan, meliputi:

1. Menguatkan kewenangan kelembagaan untuk menjadi *counterpart* utama dalam kerja sama investasi lintas sektor dan lintas negara.
2. Memfasilitasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Daerah terkait energi, seperti KPBU bidang energi bersih, yang membutuhkan badan usaha definitif.
3. Mendukung tujuan strategis RPJMN dan RPJMD terkait bauran EBT, dekarbonisasi, dan pengembangan ekosistem energi berkelanjutan.
4. Menjamin tata kelola dan akuntabilitas yang lebih kuat dengan struktur BUMD yang diawasi langsung oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Pengawas.

Pembentukan BUMD Energi Bali ini akan memberikan kontribusi kepada pembanguan nasional karena:

1. Sejalan dengan RPJMN 2025–2029 khususnya fokus pada bauran energi baru dan terbarukan, efisiensi energi, dan desentralisasi pembangunan energi ke daerah.
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), terutama *Goals* 7: *Energi Bersih dan Terjangkau* dan *Goals* 13: *Penanganan Perubahan Iklim*.

3. Konsep *Tri Hita Karana* sebagai filosofi hidup masyarakat Bali yang menekankan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Energi bersih adalah cerminan nyata dari implementasi nilai-nilai ini dalam kehidupan modern.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis, kesenjangan kelembagaan, peluang investasi energi bersih, serta arah kebijakan nasional, pembentukan BUMD Energi Provinsi Bali merupakan keharusan.

4. BUMD Transportasi

Provinsi Bali menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sistem transportasi, khususnya moda darat. Pertumbuhan kendaraan bermotor rata-rata 5,38% per tahun tidak diimbangi dengan pertumbuhan jalan yang hanya 0,08%. Akibatnya, kemacetan, peningkatan angka kecelakaan (15,68% per tahun), dan kontribusi emisi kendaraan terhadap polusi udara (42,67% dari total emisi) menjadi isu utama yang menghambat mobilitas dan kualitas hidup masyarakat Bali.

Transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan merupakan solusi strategis untuk memperbaiki sistem mobilitas, menekan ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta mendukung pelestarian lingkungan dan warisan budaya Bali. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain:

1. Belum adanya infrastruktur dan layanan transportasi umum yang komprehensif, aman, nyaman, dan terjangkau.
2. Fragmentasi kebijakan dan otoritas antar wilayah (terutama kawasan Sarbagita).
3. Ketiadaan lembaga profesional yang memiliki otoritas pengelolaan dan pendanaan transportasi secara mandiri dan adaptif.
4. Belum adanya dasar hukum formal terhadap program transportasi publik terpadu.
5. Terbatasnya alokasi anggaran dan skema pembiayaan operasional (PSO) yang berkelanjutan.

Solusi kelembagaan yang diperlukan adalah pembentukan BUMD Transportasi sebagai entitas korporasi daerah yang profesional, adaptif, dan mampu mengelola layanan transportasi lintas kabupaten/kota secara terintegrasi. Hal ini menunjukkan pentingnya kelembagaan yang fleksibel dan profesional untuk menjawab kompleksitas mobilitas perkotaan. Tujuan pembentukan BUMD Transportasi Bali

1. Mewujudkan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan.
2. Menyediakan kelembagaan yang dapat mengelola sistem transportasi secara efisien dan profesional, sesuai prinsip *Good Corporate Governance*.

3. Menjawab kebutuhan integrasi transportasi wilayah metropolitan Bali (terutama Sarbagita) dalam satu perencanaan dan satu manajemen.
4. Mendorong skema pendanaan transportasi yang mandiri melalui PSO, pendapatan non-APBD, KPBU, dan bisnis pendukung.
5. Memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjaga kualitas lingkungan sesuai prinsip *Tri Hita Karana*.

Pembentukan BUMD Transportasi Provinsi Bali bukan sekadar solusi teknokratis, namun bagian dari gerakan budaya menuju peradaban mobilitas yang lebih manusiawi, selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan kearifan lokal Bali. Dengan lembaga yang kuat dan profesional, sistem transportasi Bali dapat berkembang menuju pelayanan publik yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi sehingga memperkuat citra Bali sebagai pulau yang maju tanpa kehilangan jiwanya.

5.Pembentukan BUMD dan Badan Baru Lainnya

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah serta memperkuat kemandirian ekonomi Bali, Pemerintah Provinsi Bali melihat masih banyak peluang strategis untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru di luar empat sektor yang telah direncanakan (air, pangan, energi bersih, dan transportasi).

Potensi Bali yang kaya di bidang pariwisata berbasis budaya, ekonomi kreatif, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menghadirkan peluang besar untuk pendirian BUMD yang bergerak dalam bidang pariwisata budaya berkelanjutan, pengelolaan kekayaan intelektual tradisional, produk *wellness* lokal (herbal, spa, yoga), bahkan layanan publik digital berbasis kearifan lokal Bali. Ini selaras dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* yang menempatkan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya sebagai landasan pembangunan. Dengan mengintegrasikan ajaran dan nilai-nilai *Sad Kerthi*, pembentukan BUMD baru dirancang tidak hanya menjadi mesin ekonomi, tetapi juga instrumen pelestarian budaya, spiritualitas, dan lingkungan hidup Bali.

Ini sejalan dengan filosofi pembangunan Bali yang menekankan bahwa pembangunan tidak boleh tercerabut dari akar budaya dan identitas lokal. Oleh karena itu, pembentukan BUMD baru diarahkan agar mampu memperkuat struktur ekonomi kerakyatan berkarakter kearifan lokal Bali, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta menjawab tantangan transformasi digital dan ekonomi hijau. Payung hukum yang mendukung hal ini di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang memberikan ruang bagi daerah untuk membentuk BUMD sesuai

kebutuhan dan potensi daerahnya. Dengan dasar regulatif dan filosofis yang kuat ini, ke depan, Pemerintah Provinsi Bali kemungkinan bia membentuk BUMD baru lainnya.

Selain BUMD, Pemerintah Provinsi Bali juga merencanakan pembentukan institusi atau badan khusus yang bertugas mengelola layanan publik tertentu, yang saat ini masih dalam tahap penentuan bentuk kelembagaannya, sebagai BUMD atau bentuk kelembagaan lainnya. Beberapa badan yang dirancang antara lain meliputi Badan Pengelola Pariwisata Bali, Badan Ekonomi Kreatif dan Digital, serta lembaga-lembaga lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sektor pelayanan publik strategis di Bali. Pembentukan badan-badan tersebut bertujuan untuk memperkuat tata kelola, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sektor-sektor unggulan Bali dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis budaya

2.9 Gambaran Keuangan Daerah

Sesuai dengan arahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus melakukan analisis mendalam terhadap pengelolaan keuangan serta mencakup rencana pengelolaan keuangan ke depannya. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kinerja keuangan dalam pendapatan, belanja, dan neraca keuangan daerah.

Gambaran keuangan daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029 sangat penting, karena pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien akan menjadi dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada periode Tahun 2026-2030. Analisis ini memberikan gambaran mengenai kemampuan fiskal daerah, yang sangat krusial dalam menentukan prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Bali dapat merencanakan program dan kegiatan pembangunan yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

.

Tabel 2.106
Realisasi APBD Provinsi Bali Tahun 2020-2024

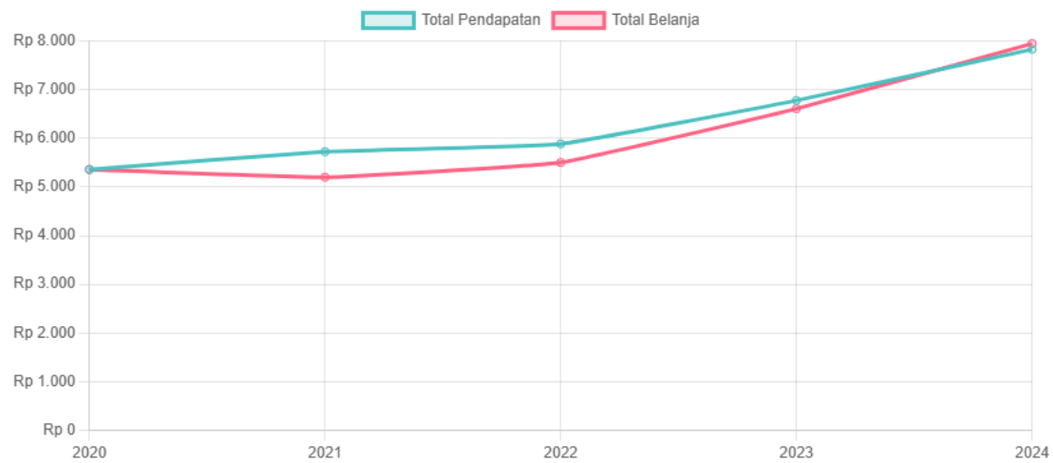
NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	**3.069.474.217.923,49**	**3.117.070.008.673,76**	**3.863.191.406.848,23**	**4.627.741.217.667,29**	**5.535.429.679.670,83**
	Pajak Daerah	2.607.990.396.693,00	2.458.530.858.700,00	3.230.839.407.191,00	4.052.904.860.269,00	4.520.332.643.486,00
	Retribusi Daerah	18.966.859.393,00	14.298.569.091,00	14.348.341.509,00	15.312.465.038,00	338.039.879.379,28
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	177.395.020.194,90	160.711.862.041,73	220.323.008.247,47	158.120.019.322,32	197.369.947.623,03
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	265.121.941.642,59	483.528.718.841,03	397.680.649.900,76	401.403.873.037,97	479.687.209.182,52
	B. Pendapatan Transfer	**2.643.157.481.688,00**	**2.801.186.284.925,00**	**2.017.662.417.846,00**	**2.141.120.289.130,00**	**2.283.418.060.237,00**
	Transfer Pemerintah Pusat:	2.643.157.481.688,00	2.801.186.284.925,00	2.017.662.417.846,00	2.141.120.289.130,00	2.283.418.060.237,00
	- Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Non Pajak	206.614.864.352,00	217.120.439.637,00	160.646.015.977,00	156.236.087.531,00	190.545.491.110,00
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.204.700.789.000,00	1.201.511.839.000,00	1.194.632.100.845,00	1.244.560.318.195,00	1.367.677.271.075,00
	- Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.153.039.546.336,00	1.344.969.743.288,00	67.884.679.735,00	672.430.907.404,00	87.240.500.926,00
	- Dana Insentif Daerah (DID)	78.802.282.000,00	37.584.263.000,00	50.359.663.000,00	67.892.976.000,00	0,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**5.708.000.004,00**	**4.896.999.996,00**	**4.924.776.772,11**	**5.199.977.500,00**	**5.750.844.000,00**
	Hibah	5.708.000.004,00	4.896.999.996,00	4.924.776.772,11	5.199.977.500,00	5.750.844.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**5.718.339.699.615,49**	**5.923.153.293.594,76**	**5.885.778.601.466,34**	**6.774.061.484.297,29**	**7.824.598.583.907,83**
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	**4.123.413.143.305,30**	**4.218.534.725.647,08**	**3.791.897.703.325,73**	**3.948.314.115.028,57**	**4.461.088.682.470,66**
	Belanja Pegawai	1.597.686.826.900,68	1.653.001.007.665,15	1.740.899.431.377,08	1.810.511.643.506,00	2.088.693.065.509,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.553.627.778.078,12	1.580.080.272.891,30	1.690.049.421.497,65	1.228.357.329.714,16	1.200.096.660.415,66
	Belanja Bunga	0,00	2.775.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	4.936.000.000,00	0,00	4.372.945.000,00	10.018.140.000,00	2.525.000.000,00
	Belanja Hibah	963.383.053.326,50	982.678.445.090,63	356.436.889.451,00	899.427.001.808,41	1.169.523.956.546,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.779.485.000,00	0,00	139.016.000,00	0,00	250.000.000,00
	B. Belanja Modal	**458.448.887.065,83**	**839.010.470.016,72**	**1.452.064.568.386,86**	**920.073.340.444,99**	**667.689.607.145,41**
	Belanja Modal Tanah	265.771.890.897,00	439.080.181.058,00	623.975.476.572,00	154.513.167.813,00	3.464.184.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.121.074.839,69	105.838.658.813,20	109.213.603.835,00	140.375.288.069,62	130.063.180.613,50
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.374.343.153,60	170.812.068.572,52	340.651.767.017,86	361.028.180.271,00	407.489.294.374,22
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.984.051.037,54	92.544.410.552,00	354.881.755.251,00	232.361.545.288,00	94.451.449.090,69
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.197.527.138,00	30.735.151.021,00	23.276.736.561,00	30.899.659.003,37	31.382.599.067,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	65.229.150,00	895.500.000,00	838.900.000,00

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	C. Belanja Tak Terduga	**334.861.356.708,30**	**13.503.458.494,00**	**4.759.779.107,00**	**9.184.700.000,54**	**7.441.134.041,00**
	D. Belanja Transfer	**1.441.398.088.184,18**	**1.199.618.559.688,41**	**1.500.721.131.290,00**	**1.729.526.529.224,00**	**2.156.832.426.341,00**
	Belanja Bagi Hasil	1.054.748.783.171,60	845.466.055.345,93	1.231.251.353.817,00	1.444.364.532.966,00	1.800.971.992.343,00
	Belanja Bantuan Keuangan	386.649.305.012,58	354.152.504.342,48	269.469.777.473,00	285.161.996.258,00	355.860.433.998,00
	JUMLAH BELANJA	**6.358.121.475.263,61**	**6.270.667.213.846,21**	**6.749.443.182.109,59**	**6.607.098.684.698,10**	**7.293.051.849.998,07**
	SURPLUS/DEFISIT	**-639.781.775.648,12**	**-347.513.920.251,45**	**-863.664.580.643,25**	**166.962.799.599,19**	**531.546.733.909,76**
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	**832.637.635.863,48**	**1.242.855.592.021,05**	**1.293.798.304.068,62**	**408.963.390.625,37**	**342.650.523.381,56**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	831.863.603.723,48	192.855.592.021,05	850.296.343.468,62	330.133.723.425,37	171.480.190.581,56
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	1.050.000.000.000,00	443.501.960.600,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya (Pencairan Dana Cadangan)	0,00	0,00	0,00	78.829.667.200,00	171.170.332.800,00
	Pengembalian Dana Bergulir	774.032.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**45.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**404.445.999.643,00**	**250.464.798.088,00**
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00
	Penyertaan Modal pada:	0,00	45.000.000.000,00	0,00	100.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	- PT Bank BPD Bali	0,00	30.000.000.000,00	0,00	75.000.000.000,00	
	- PT JAMKRIDA	0,00	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	
	- Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perseroda Pariwisata Digital	0,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	
	- Perumda *Kerthi* Bali Santhi	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	154.445.999.643,00	243.464.798.088,00
	PEMBIAYAAN *NETTO*	**832.637.635.863,48**	**1.197.855.592.021,05**	**1.193.798.304.068,62**	**4.517.390.982,37**	**92.185.725.293,56**
	SILPA TAHUN BERKENAAN	**192.855.592.021,05**	**850.296.343.468,62**	**330.133.723.425,37**	**171.480.190.581,56**	**623.732.459.203,32**

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2020-2024, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menunjukkan fluktuasi yang signifikan dengan pola yang mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Lonjakan tajam SiLPA pada tahun 2021 yang mencapai Rp850,3 miliar dari sebelumnya Rp192,9 miliar mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan fiskal akibat pandemi *COVID-19*, di mana terjadi penundaan pelaksanaan program dan *refocusing* anggaran.

Penurunan drastis SiLPA pada tahun 2022 dan 2023 menjadi Rp330,1 miliar dan Rp171,5 miliar menandakan upaya percepatan pemulihan ekonomi melalui optimalisasi belanja daerah. Namun, peningkatan kembali SiLPA tahun 2024 menjadi Rp623,7 miliar memerlukan evaluasi mendalam terkait efektivitas penyerapan anggaran, mengingat besaran ini dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam implementasi program pembangunan atau kehati-hatian berlebihan dalam pengelolaan anggaran.

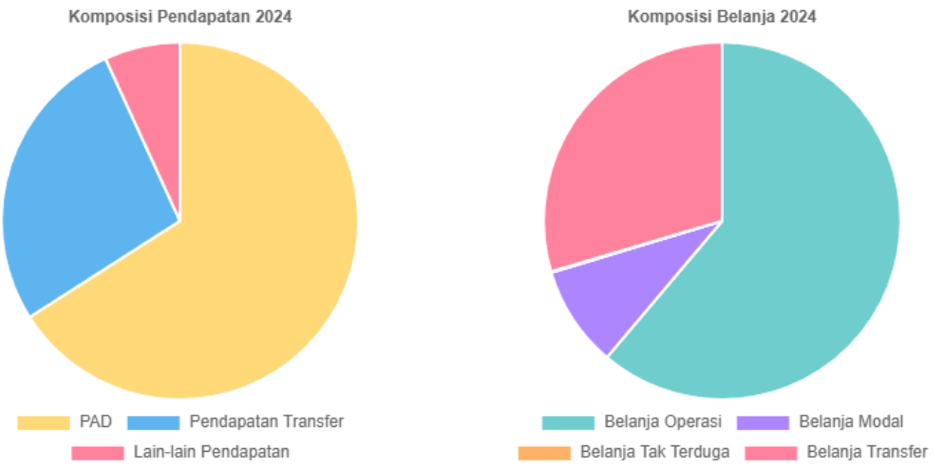
Fenomena ini merefleksikan tantangan klasik pengelolaan keuangan daerah dalam menyeimbangkan prinsip kehati-hatian fiskal dengan kebutuhan akselerasi pembangunan. Besaran SiLPA yang ideal seharusnya mencerminkan efisiensi tanpa mengorbankan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.



Gambar 2.48
Perbandingan Total Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali (dalam Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Analisa (2025)

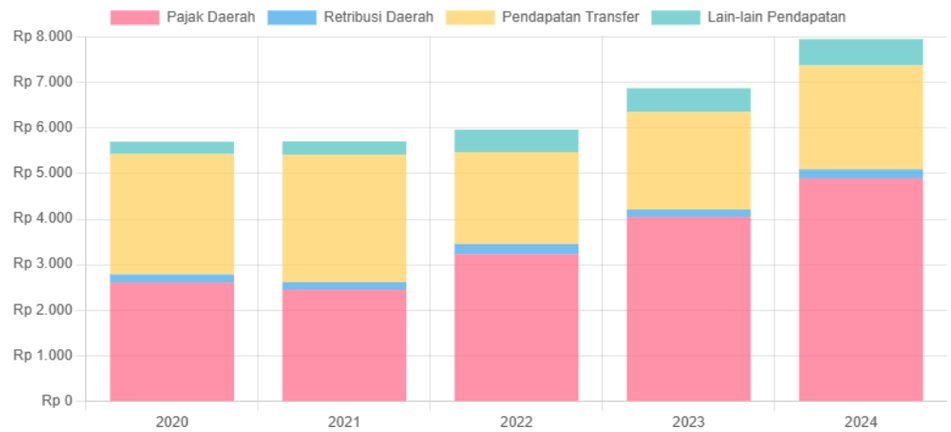
Gambar 2.48 menampilkan pergerakan total pendapatan dan belanja daerah selama periode 2020-2024. Pendapatan daerah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari Rp5.358,1 miliar (2020) hingga mencapai Rp7.824,6 miliar (2024), dengan pertumbuhan rata-rata 9,9% per tahun. Sementara itu, belanja daerah juga mengalami peningkatan dari Rp5.358,1 miliar (2020) menjadi Rp7.943,0 miliar (2024). Menariknya, terjadi penurunan belanja pada tahun 2021 menjadi Rp5.199,6 miliar yang menciptakan surplus

anggaran. Kondisi surplus berlanjut hingga tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali terjadi defisit karena belanja (Rp7.943,0 miliar) melampaui pendapatan (Rp7.824,6 miliar). Pola ini mengindikasikan adanya kebijakan fiskal ekspansif pada tahun 2024 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.



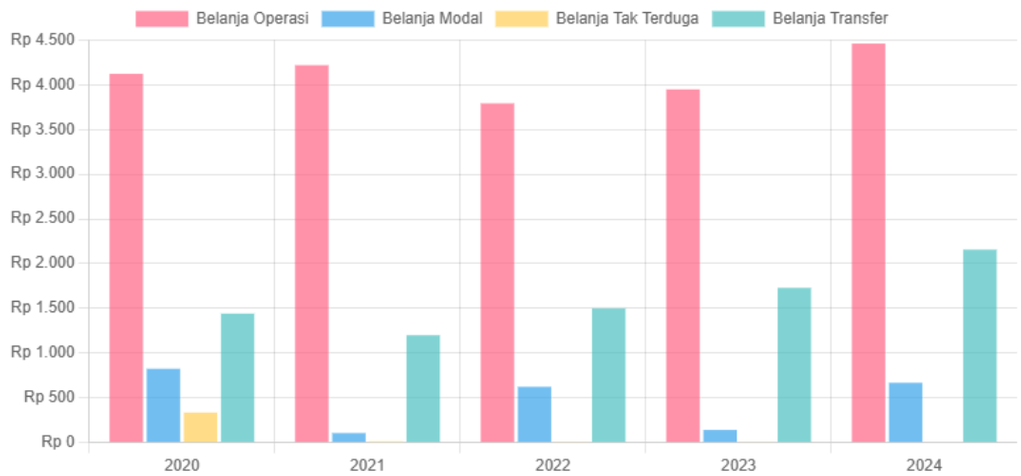
Gambar 2.49
Komposisi Pendapatan ABPD Provinsi Bali Tahun 2024
Sumber: Hasil Analisa (2025)

Gambar 2.49 menunjukkan dominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 70,7% atau Rp5.535,4 miliar dari total pendapatan. Pendapatan transfer menyumbang 29,2% (Rp2.283,4 miliar), sedangkan lain-lain pendapatan hanya 7,3% (Rp575,0 miliar). Tingginya proporsi PAD mencerminkan kemandirian fiskal yang baik. Pada diagram belanja, terlihat belanja operasi mendominasi dengan 61,1% (Rp4.461,1 miliar), diikuti belanja transfer 29,6% (Rp2.156,8 miliar), belanja modal 9,1% (Rp667,7 miliar), dan belanja tak terduga 0,1% (Rp7,4 miliar). Komposisi ini menunjukkan prioritas pada pembiayaan operasional rutin pemerintahan, sementara alokasi untuk investasi infrastruktur (belanja modal) masih relatif rendah.



Gambar 2.50
Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Bali (dalam Miliar Rupiah)
Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Analisa (2025)

Gambar 2.50 menunjukkan evolusi komponen pendapatan daerah. Pajak daerah sebagai komponen utama PAD meningkat signifikan dari Rp2.607,2 miliar (2020) menjadi Rp4.893,3 miliar (2024), atau tumbuh 87,7%. Retribusi daerah berfluktuasi dengan nilai tertinggi Rp220,3 miliar pada tahun 2022. Pendapatan transfer mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi Rp2.017,7 miliar dari sebelumnya Rp2.801,2 miliar (2021), kemudian stabil di kisaran Rp2,1-2,3 triliun. Lain-lain pendapatan yang sah menunjukkan peningkatan bertahap dari Rp270,8 miliar (2020) menjadi Rp575,0 miliar (2024). Pola ini mengonfirmasi keberhasilan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah sebagai tulang punggung pendapatan.



Gambar 2.51
Komponen Belanja Daerah Provinsi Bali (dalam Miliar Rupiah)
Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Analisa (2025)

Gambar 2.51 menampilkan dinamika komponen belanja daerah yang cukup fluktuatif. Belanja operasi relatif stabil di kisaran Rp3,8-4,5 triliun dengan puncak pada tahun 2024 (Rp4.461,1 miliar). Belanja modal menunjukkan volatilitas tinggi, penurunan drastis dari Rp824,7 miliar (2020) menjadi hanya Rp105,8 miliar (2021), kemudian naik ke Rp623,0 miliar (2022), turun lagi ke Rp140,4 miliar (2023), dan meningkat menjadi Rp667,7 miliar (2024). Belanja tak terduga menurun drastis dari Rp334,9 miliar (2020) menjadi di bawah Rp15 miliar pada tahun-tahun berikutnya. Belanja transfer cenderung meningkat dari Rp1.441,4 miliar (2020) menjadi Rp2.156,8 miliar (2024). Fluktuasi belanja modal yang ekstrem menunjukkan inkonsistensi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur daerah.

Tabel 2.107
Neraca Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2024

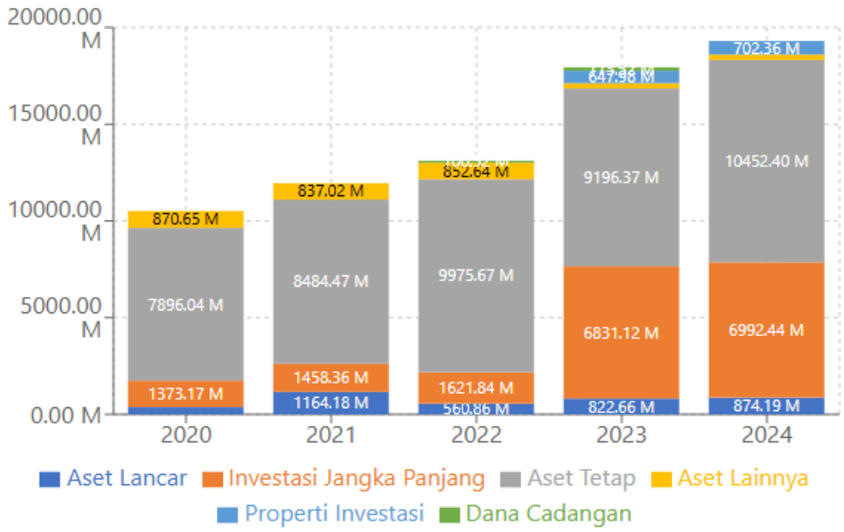
NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
	A. Aset Lancar	375.703.308.559,43	1.164.177.177.523,84	560.861.122.073,85	822.663.146.998,27	874.192.213.440,21
	B. Investasi Jangka Panjang	1.373.168.127.148,48	1.458.361.164.962,99	1.621.888.174.723,26	6.851.124.152.537,51	6.992.437.676.029,01
	C. Aset Tetap	7.896.043.889.759,65	8.484.467.077.349,47	9.973.672.644.716,35	9.196.574.447.919,61	10.425.059.303.097,53
	D. Aset Lainnya	870.646.649.009,62	837.015.113.000,29	852.639.945.658,01	272.722.880.246,43	285.596.936.208,02
	E. Properti Investasi	-	-	-	647.976.208.448,03	702.355.598.035,03
	F. Dana Cadangan	-	-	100.517.945.205,54	173.517.943.404,98	-
	JUMLAH ASET	**10.515.561.974.477,20**	**11.944.020.532.836,59**	**13.109.579.832.377,00**	**17.964.578.779.554,80**	**19.252.641.726.809,81**
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	156.210.280.074,13	372.661.992.667,12	566.202.341.952,92	1.217.203.360.639,22	705.067.966.248,41
	B. Kewajiban Jangka Panjang	3.805.346.236,66	1.053.905.625.391,61	1.352.247.744.892,63	1.099.191.683.906,51	855.640.130.142,49
	JUMLAH KEWAJIBAN	**160.012.626.310,79**	**1.426.567.618.058,73**	**1.918.450.086.845,55**	**2.316.395.044.545,73**	**1.560.708.096.390,90**
3	EKUITAS					
	A. Ekuitas	10.355.546.348.166,38	10.517.452.914.777,86	11.191.129.745.531,45	15.648.183.735.008,50	17.691.933.630.418,91
	JUMLAH EKUITAS	**10.355.546.348.166,38**	**10.517.452.914.777,86**	**11.191.129.745.531,45**	**15.648.183.735.008,50**	**17.691.933.630.418,91**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**10.515.561.974.477,18**	**11.944.020.532.836,59**	**13.109.579.832.377,00**	**17.964.578.779.554,20**	**19.252.641.726.809,81**

Sumber: Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2024;



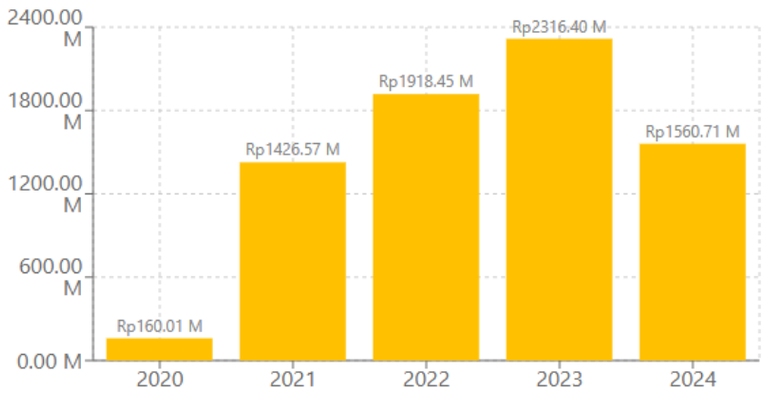
Gambar 2.52
Pertumbuhan Total Aset Provinsi Bali Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Analisa (2025)

Neraca daerah periode 2020-2024 menunjukkan tren pertumbuhan total aset yang signifikan dan berkelanjutan. Pada tahun 2020, total aset tercatat sebesar Rp10.515,56 triliun, yang kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp11.944,02 triliun pada tahun 2021, merepresentasikan pertumbuhan sebesar 13,58%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan total aset mencapai Rp13.109,58 triliun, mengindikasikan kenaikan 9,76% dari tahun sebelumnya. Akselerasi pertumbuhan aset sangat terlihat pada tahun 2023, di mana total aset melonjak hingga Rp17.964,58 triliun, menunjukkan peningkatan substansial sebesar 37,03% dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan ini terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan total aset mencapai Rp19.252,64 triliun, mewakili kenaikan 7,17% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, selama periode lima tahun ini, total aset mengalami pertumbuhan kumulatif sebesar 83,09%, mencerminkan penguatan posisi keuangan daerah yang konsisten.



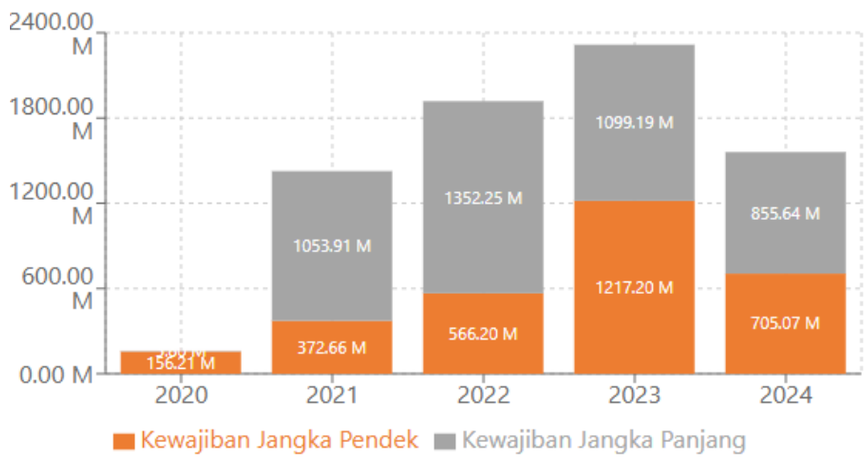
Gambar 2.53
Komposisi Aset Per Tahun Provinsi Bali Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Analisa (2025)

Komposisi aset menunjukkan dinamika struktur kepemilikan yang bervariasi selama periode 2020-2024. Aset tetap secara konsisten mendominasi komposisi aset dengan proporsi berkisar antara 51,19% hingga 75,09% dari total aset. Pada tahun 2020, aset tetap mencapai Rp7.896,04 triliun (75,09% dari total aset), sementara pada tahun 2024 mencapai Rp10.452,40 triliun (54,29% dari total aset). Terjadi perubahan signifikan pada investasi jangka panjang, yang mengalami peningkatan substansial mulai tahun 2023, dari Rp1.621,84 triliun (12,37%) pada tahun 2022 menjadi Rp6.831,12 triliun (38,03%) pada tahun 2023, dan selanjutnya mencapai Rp6.992,44 triliun (36,32%) pada tahun 2024. Adapun aset lancar menunjukkan fluktuasi dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp874,19 triliun. Kemunculan properti investasi sebagai komponen baru dalam neraca mulai tahun 2023 dengan nilai Rp647,98 triliun (3,61%), yang kemudian meningkat menjadi Rp702,36 triliun (3,65%) pada tahun 2024, menandakan diversifikasi strategi investasi daerah. Dana cadangan muncul pada tahun 2022 senilai Rp100,52 triliun dan meningkat menjadi Rp173,52 triliun pada tahun 2023, namun tidak tercatat pada tahun 2024, menunjukkan realokasi sumber daya keuangan daerah.



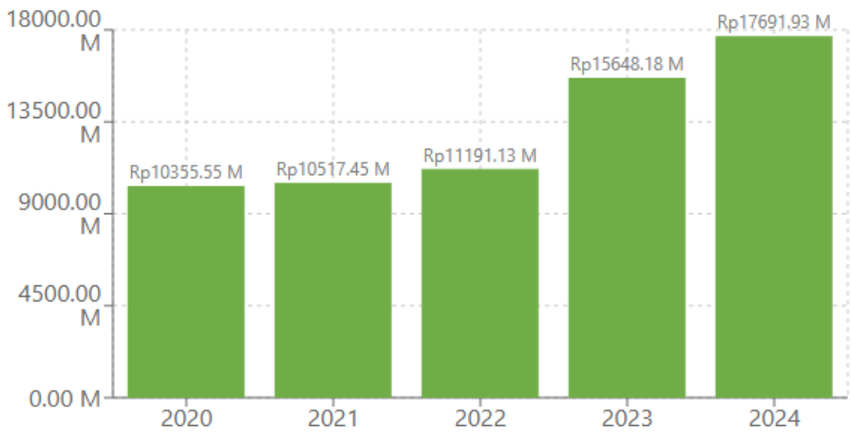
Gambar 2.54
Pertumbuhan Total Kewajiban Provinsi Bali Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Analisa (2025)

Perkembangan total kewajiban memperlihatkan tren yang fluktuatif dengan puncak pada tahun 2023. Pada tahun 2020, total kewajiban tercatat sebesar Rp160,01 triliun, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp1.426,57 triliun pada tahun 2021, merepresentasikan kenaikan drastis sebesar 791,55%. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2022 dengan total kewajiban mencapai Rp1.918,45 triliun, mengindikasikan pertumbuhan 34,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak kewajiban tercapai pada tahun 2023 dengan nilai Rp2.316,40 triliun, menunjukkan kenaikan 20,74% dari tahun 2022. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan menjadi Rp1.560,71 triliun, mengindikasikan penurunan sebesar 32,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan pada tahun terakhir, secara keseluruhan selama periode lima tahun, total kewajiban mengalami peningkatan kumulatif sebesar 875,36%, yang mengindikasikan ekspansi signifikan dalam struktur pendanaan daerah melalui instrumen utang.



Gambar 2.55
Komposisi Kewajiban Provinsi Bali per Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Analisa (2025)

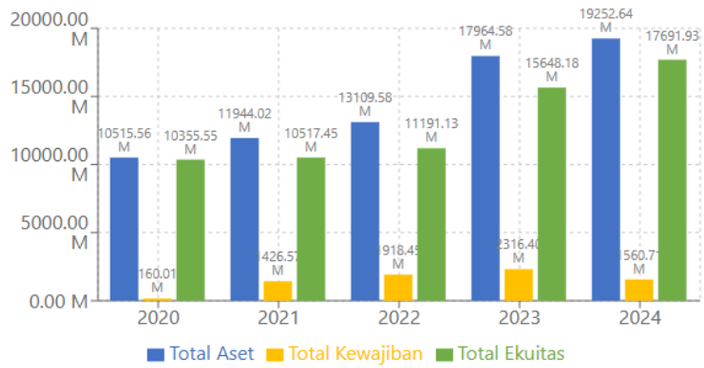
Komposisi kewajiban menunjukkan perubahan struktur yang dinamis selama periode observasi. Pada tahun 2020, kewajiban jangka pendek mendominasi dengan nilai Rp156,21 triliun (97,62% dari total kewajiban), sedangkan kewajiban jangka panjang hanya sebesar Rp3,80 triliun (2,38%). Komposisi ini mengalami perubahan signifikan pada tahun 2021, di mana kewajiban jangka panjang meningkat drastis menjadi Rp1.053,91 triliun (73,88%), sementara kewajiban jangka pendek mencapai Rp372,66 triliun (26,12%). Pada tahun 2022, distribusi relatif stabil dengan kewajiban jangka pendek sebesar Rp566,20 triliun (29,51%) dan jangka panjang sebesar Rp1.352,25 triliun (70,49%). Tahun 2023 menunjukkan keseimbangan lebih merata dengan kewajiban jangka pendek sebesar Rp1.217,20 triliun (52,55%) dan jangka panjang Rp1.099,19 triliun (47,45%). Pada tahun 2024, terjadi restrukturisasi kewajiban dengan penurunan kewajiban jangka pendek menjadi Rp705,07 triliun (45,18%) dan jangka panjang menjadi Rp855,64 triliun (54,82%). Perubahan komposisi ini mengindikasikan strategi pengelolaan utang yang beradaptasi dengan kebutuhan pendanaan dan ketersediaan instrumen pembiayaan.



Gambar 2.56
Perkembangan Ekuitas Provinsi Bali Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Analisa (2025)

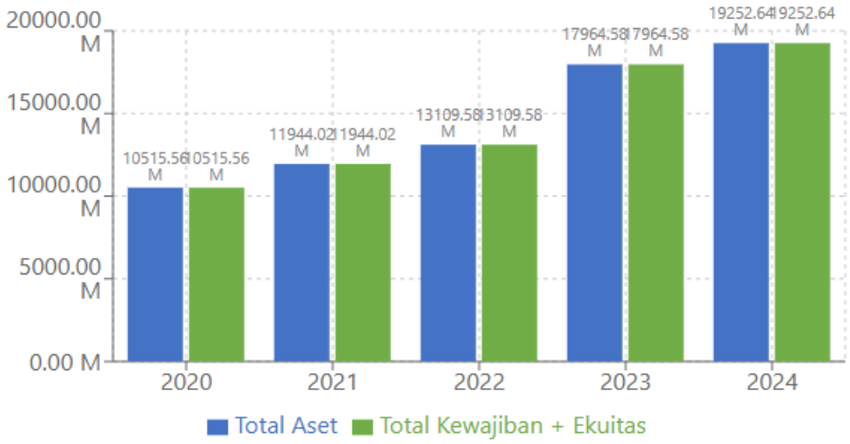
Perkembangan ekuitas menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan substansial selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, ekuitas tercatat sebesar Rp10.355,55 triliun, yang kemudian mengalami peningkatan moderat menjadi Rp10.517,45 triliun pada tahun 2021, menunjukkan pertumbuhan 1,56%. Tren pertumbuhan berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai ekuitas mencapai Rp11.191,13 triliun, merepresentasikan kenaikan 6,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana ekuitas mencapai Rp15.648,18 triliun, menandakan pertumbuhan substansial sebesar 39,83% dari tahun 2022. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan ekuitas mencapai Rp17.691,93 triliun, mengindikasikan pertumbuhan 13,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, selama

periode lima tahun, ekuitas mengalami pertumbuhan kumulatif sebesar 70,84%, mencerminkan penguatan berkelanjutan dalam kekayaan bersih daerah dan peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung pembangunan di masa mendatang.



Gambar 2.57
Perbandingan Komponen Neraca Provinsi Bali Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Analisa (2025)

Perbandingan komponen neraca selama periode 2020-2024 mengungkapkan dinamika hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Pada tahun 2020, proporsi kewajiban terhadap total aset relatif kecil yakni 1,52%, sementara ekuitas mendominasi dengan proporsi 98,48%. Seiring waktu, proporsi kewajiban mengalami peningkatan, mencapai 11,94% pada tahun 2021, 14,63% pada tahun 2022, dan puncaknya 12,89% pada tahun 2023, sebelum menurun menjadi 8,11% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan variasi dalam strategi pendanaan dan pengelolaan aset daerah. Selama periode ini, ekuitas secara konsisten menjadi komponen dominan dalam struktur neraca, walaupun proporsinya berfluktuasi, dari 98,48% pada tahun 2020 menjadi 88,06% pada tahun 2021, 85,37% pada tahun 2022, 87,11% pada tahun 2023, dan 91,89% pada tahun 2024. Pertumbuhan absolut terbesar untuk total aset dan ekuitas terjadi antara tahun 2022 dan 2023, sedangkan total kewajiban mengalami pertumbuhan tertinggi antara tahun 2020 dan 2021. Dinamika ini mengindikasikan evolusi kebijakan fiskal daerah dan adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi.



Gambar 2.58
Keseimbangan Neraca Provinsi Bali Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Analisa (2025)

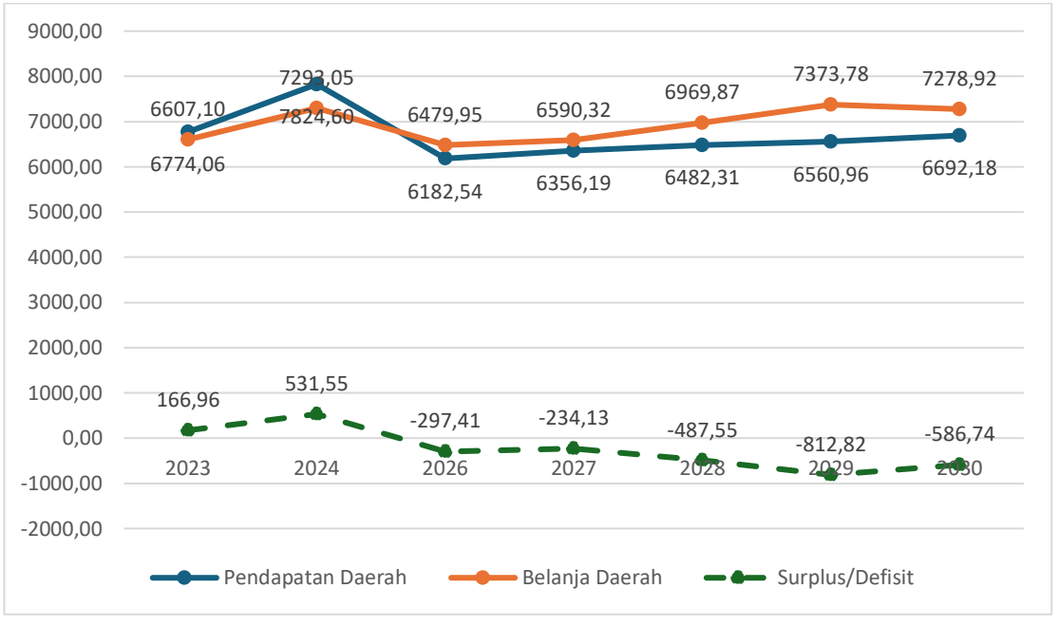
Keseimbangan neraca mengkonfirmasi prinsip dasar akuntansi bahwa total aset harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Selama periode 2020-2024, neraca daerah secara konsisten memenuhi prinsip keseimbangan ini, dengan perbedaan minimal yang dapat diatribusikan pada pembulatan. Pada tahun 2020, total aset sebesar Rp10.515,56 triliun berbanding dengan total kewajiban dan ekuitas sebesar Rp10.515,56 triliun. Begitu pula pada tahun 2021, total aset (Rp11.944,02 triliun) seimbang dengan total kewajiban dan ekuitas (Rp11.944,02 triliun). Keseimbangan ini terjaga pada tahun-tahun berikutnya: tahun 2022 (Rp13.109,58 triliun), tahun 2023 (Rp17.964,58 triliun), dan tahun 2024 (Rp19.252,64 triliun). Konsistensi keseimbangan ini mengindikasikan integritas pencatatan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah yang akurat, serta menjadi indikator penting dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Neraca daerah periode 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan kekayaan daerah yang substansial dan berkelanjutan, tercermin dari peningkatan signifikan pada total aset (83,09%) dan ekuitas (70,84%). Komposisi aset mengalami diversifikasi dengan peningkatan proporsi investasi jangka panjang dan kemunculan properti investasi, mengindikasikan strategi pengelolaan aset yang lebih berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Dinamika kewajiban menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan hingga tahun 2023, diikuti penurunan pada tahun 2024, mencerminkan upaya konsolidasi fiskal. Perubahan komposisi kewajiban dari dominasi jangka pendek menjadi lebih seimbang dengan jangka panjang mengindikasikan pengelolaan utang yang lebih strategis. Secara keseluruhan, neraca daerah menunjukkan penguatan posisi keuangan yang konsisten dengan keseimbangan neraca yang terjaga, memberikan landasan kuat bagi keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di masa mendatang.

Tabel 2.108
Proyeksi Kerangka Pendanaan Provinsi Bali Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	*BASELINE* TAHUN		PROYEKSI TAHUN				
		2023	2024	2026	2027	2028	2029	2030
A	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.774.061.484.297,29**	**7.824.598.583.907,83**	**6.182.539.357.652,00**	**6.356.190.144.806,00**	**6.482.313.947.703,00**	**6.560.960.226.655,00**	**6.692.179.431.187,00**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**4.627.741.217.667,29**	**5.535.429.679.670,83**	**3.736.150.404.652,00**	**3.810.873.412.746,00**	**3.887.090.881.001,00**	**3.964.832.698.620,00**	**4.044.129.352.592,00**
1.1	Pajak Daerah	4.052.904.860.269,00	4.520.332.643.486,00	2.746.561.950.691,00	2.801.493.189.705,00	2.857.523.053.499,00	2.914.673.514.569,00	2.972.966.984.860,00
1.2	Retribusi Daerah	15.312.465.038,00	338.039.879.379,28	346.510.703.471,00	353.440.917.541,00	360.509.735.892,00	367.719.930.609,00	375.074.329.222,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	158.120.019.322,32	197.369.947.623,03	196.002.639.326,00	199.922.692.113,00	203.921.145.955,00	207.999.568.874,00	212.159.560.251,00
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	401.403.873.037,97	479.687.209.182,52	447.075.111.164,00	456.016.613.387,00	465.136.945.655,00	474.439.684.568,00	483.928.478.259,00
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.141.120.289.130**	**2.283.418.060.237**	**2.440.644.709.000,00**	**2.539.457.603.180,00**	**2.589.246.755.244,00**	**2.590.031.690.348,00**	**2.641.832.324.155,00**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.141.120.289.130	2.283.418.060.237	2.440.644.709.000,00	2.539.457.603.180,00	2.589.246.755.244,00	2.590.031.690.348,00	2.641.832.324.155,00
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.199.977.500**	**5.750.844.000**	**5.744.244.000,00**	**5.859.128.880,00**	**5.976.311.458,00**	**6.095.837.687,00**	**6.217.754.440,00**
3.1	Hibah	5.199.977.500	5.750.844.000	5.744.244.000,00	5.859.128.880,00	5.976.311.458,00	6.095.837.687,00	6.217.754.440,00
B	**BELANJA DAERAH**	**6.607.098.684.698**	**7.293.051.849.998**	**6.479.953.596.979,32**	**6.590.319.004.050,40**	**6.969.866.310.309,47**	**7.373.777.708.038,30**	**7.278.916.327.922,24**
1	**BELANJA OPERASI**	**3.948.314.115.028,57**	**4.461.088.682.470,66**	**4.540.028.146.270,44**	**4.575.930.625.139,41**	**4.877.468.143.347,84**	**5.169.621.637.882,38**	**4.972.539.699.322,11**
1.1	Belanja Pegawai	1.810.511.643.506,00	2.088.693.065.509,00	2.525.390.977.284,84	2.480.644.887.057,69	2.597.884.223.502,26	2.651.912.849.287,55	2.657.931.977.780,43
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.228.357.329.714,16	1.200.096.660.415,66	1.329.094.190.546,88	1.395.548.900.074,22	1.565.326.345.077,94	1.688.592.662.331,83	1.440.522.295.448,42
1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Subsidi	10.018.140.000,00	2.525.000.000,00	5.500.000.000,00	6.050.000.000,00	6.655.000.000,00	7.320.500.000,00	8.052.550.000,00
1.5	Belanja Hibah	899.427.001.808,41	1.169.523.956.546,00	679.692.978.438,72	693.286.838.007,49	707.152.574.767,64	821.295.626.263,00	865.532.876.093,26
1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	250.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2	**BELANJA MODAL**	**920.073.340.444,99**	**667.689.607.145,41**	**1.019.488.837.277,02**	**1.071.143.033.210,37**	**1.125.447.914.347,34**	**1.212.542.812.488,80**	**1.294.074.705.779,74**
2.1	Belanja Modal Tanah	154.513.167.813,00	3.464.184.000,00	11.016.500.000,00	12.118.150.000,00	13.329.965.000,00	14.662.961.500,00	16.129.257.650,00
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin *data 2022	140.375.288.069,62	130.063.180.613,50	146.920.037.215,19	154.266.039.075,95	161.979.341.029,75	170.078.308.081,24	178.582.223.485,30

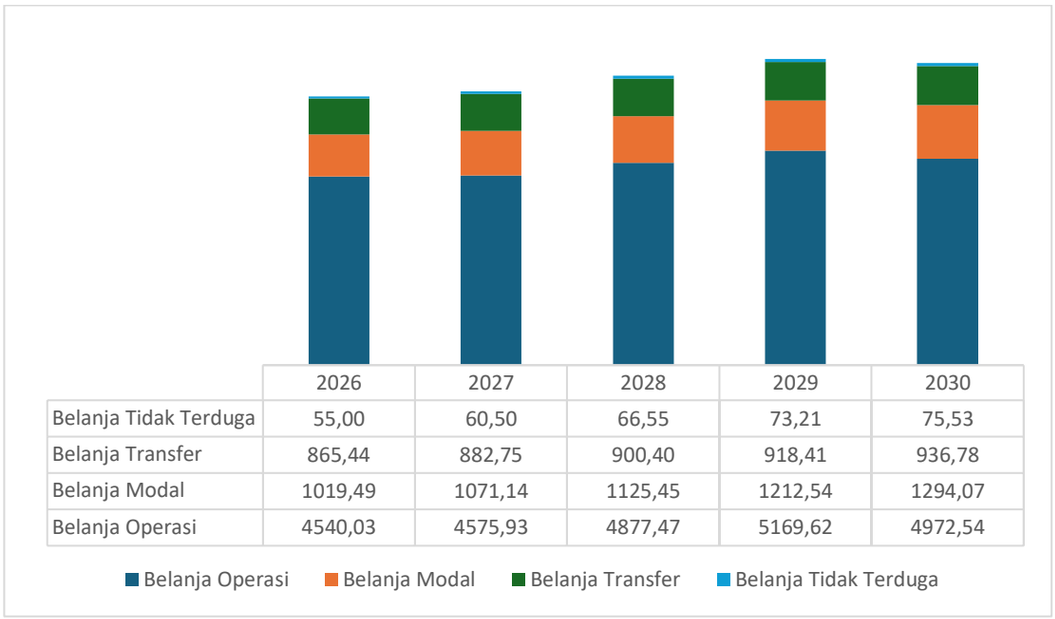
NO	URAIAN	*BASELINE* TAHUN		PROYEKSI TAHUN				
		2023	2024	2026	2027	2028	2029	2030
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	361.028.180.271,00	407.489.294.374,22	658.534.804.471,75	691.461.544.695,34	726.034.621.930,11	762.336.353.026,61	800.453.170.677,94
2.3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	232.361.545.288,00	94.451.449.090,69	200.438.914.200,07	210.460.859.910,08	220.983.902.905,58	262.033.098.050,86	295.134.752.953,40
2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.899.659.003,37	31.382.599.067,00	2.384.266.830,00	2.622.693.513,00	2.884.962.864,30	3.173.459.150,73	3.490.805.065,80
2.5	Belanja Modal Aset Lainnya	895.500.000,00	838.900.000,00	194.314.560,00	213.746.016,00	235.120.617,60	258.632.679,36	284.495.947,30
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**9.184.700.001**	**7.441.134.041**	**55.000.000.000,00**	**60.500.000.000,00**	**66.550.000.000,00**	**73.205.000.000,00**	**75.525.500.000,00**
3.1	Belanja Tidak Terduga	9.184.700.000,54	7.441.134.041	55.000.000.000,00	60.500.000.000,00	66.550.000.000,00	73.205.000.000,00	75.525.500.000,00
4	**BELANJA TRANSFER**	**1.729.526.529.224,00**	**2.156.832.426.341,00**	**865.436.613.431,87**	**882.745.345.700,63**	**900.400.252.614,29**	**918.408.257.667,13**	**936.776.422.820,39**
4.1	Belanja Bagi Hasil	1.444.364.532.966	1.800.971.992.343	657.228.016.683,70	670.372.577.017,50	683.780.028.557,50	697.455.629.129,20	711.404.741.711,70
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	285.161.996.258	355.860.433.998	208.208.596.748,17	212.372.768.683,13	216.620.224.056,79	220.952.628.537,93	225.371.681.108,69
	defisit	166.962.799.599,19	531.546.733.909,76	-297.414.239.327,32	-234.128.859.244,40	-487.552.362.606,47	-812.817.481.383,30	-586.736.896.735,24
C	**PEMBIAYAAN**	**4.517.390.982**	**92.185.725.294**	**297.414.239.327,32**	**234.128.859.244,41**	**487.552.362.606,47**	**812.817.481.383,30**	**586.736.896.735,24**
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**408.963.390.625,37**	**342.650.523.381,56**	**630.879.047.416,32**	**647.593.667.334,41**	**759.284.283.123,47**	**812.817.481.383,30**	**686.736.896.735,24**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	330.133.723.425,37	171.480.190.581,56	630.879.047.416,32	647.593.667.334,41	659.284.283.123,47	662.817.481.383,30	686.736.896.735,24
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-					
1.3	Pencairan Dana Cadangan	78.829.667.200,00	171.170.332.800,00	-	-	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00	
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**404.445.999.643**	**250.464.798.088**	**333.464.808.089,00**	**413.464.808.090,00**	**271.731.920.517,00**	**-**	**100.000.000.000,00**
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000	-	-	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00		-
2.2	Penyertaan Modal	100.000.000.000	7.000.000.000	90.000.000.000,00	70.000.000.000,00	-	-	100.000.000.000,00
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	154.445.999.643	243.464.798.088	243.464.808.089,00	243.464.808.090,00	121.731.920.517,00	-	-



Gambar 2.59 Tren Pendapatan, Belanja, dan Surplus/Defisit (dalam Miliar Rupiah)
Sumber: Hasil Analisa (2025)

Analisis tren fiskal Provinsi Bali periode 2026-2030 menunjukkan pola pertumbuhan yang dinamis namun menghadapi tantangan keseimbangan anggaran. Pendapatan daerah diproyeksikan tumbuh dari Rp 6,18 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp 6,69 triliun pada tahun 2030, mencerminkan pertumbuhan kumulatif sebesar 8,3% atau rata-rata 2,0% per tahun. Pertumbuhan ini didorong oleh optimisme pemulihan ekonomi pasca pandemi dan penguatan sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian Bali.

Di sisi lain, belanja daerah menunjukkan tren peningkatan yang lebih agresif, naik dari Rp 6,48 triliun (2026) menjadi Rp 7,28 triliun (2030), atau tumbuh 12,3% secara kumulatif. Akselerasi belanja ini mencerminkan komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, disparitas pertumbuhan antara pendapatan dan belanja mengindikasikan tekanan fiskal yang memerlukan strategi pembiayaan yang prudent dan inovatif.

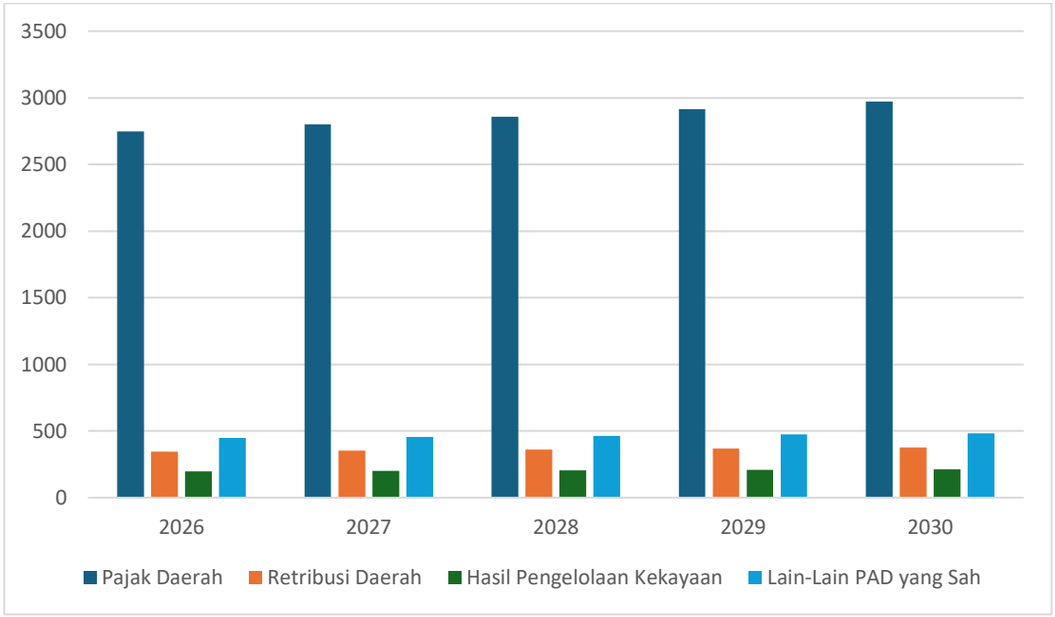


	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Tidak Terduga	55,00	60,50	66,55	73,21	75,53
Belanja Transfer	865,44	882,75	900,40	918,41	936,78
Belanja Modal	1019,49	1071,14	1125,45	1212,54	1294,07
Belanja Operasi	4540,03	4575,93	4877,47	5169,62	4972,54

Gambar 2.60 Struktur Belanja Daerah per Kategori (Miliar Rupiah)
Sumber: Hasil Analisa (2025)

Alokasi belanja daerah mencerminkan prioritas pembangunan yang seimbang antara belanja operasional dan investasi modal. Belanja operasi yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah, mendominasi dengan proporsi rata-rata 68% dari total belanja. Belanja pegawai sebagai komponen terbesar mencapai Rp 2,66 triliun pada tahun 2030, naik dari Rp 2,53 triliun (2026), menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dan kualitas sumber daya manusia pemerintahan.

Tren peningkatan belanja modal yang signifikan, tumbuh dari Rp 1,02 triliun (2026) menjadi Rp 1,29 triliun (2030), atau meningkat 27% selama periode proyeksi. Eskalasi belanja modal ini mengindikasikan fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur strategis, khususnya gedung dan bangunan (62% dari belanja modal) serta jalan, irigasi dan jaringan (23%). Investasi infrastruktur ini krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan daya saing daerah.



Gambar 2.61 Komponen Pendapat Asli Daerah (Miliar Rupiah)
Sumber: Hasil Analisa (2025)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kemandirian fiskal menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten namun moderat. Pajak daerah sebagai lokomotif PAD diproyeksikan tumbuh dari Rp 2,75 triliun (2026) menjadi Rp 2,97 triliun (2030), dengan rata-rata pertumbuhan 2% per tahun. Pertumbuhan ini sejalan dengan proyeksi pemulihan sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi, namun masih di bawah potensi optimal mengingat Bali sebagai destinasi wisata internasional.

Komponen PAD lainnya seperti retribusi daerah menunjukkan pertumbuhan yang lebih dinamis dengan rata-rata 2,1% per tahun, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tumbuh rata-rata 2,0% per tahun. Diversifikasi sumber PAD ini penting untuk mengurangi risiko volatilitas pendapatan yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Lain-lain PAD yang sah dengan nilai Rp 484 miliar pada tahun 2030 memberikan fleksibilitas tambahan dalam struktur pendapatan.

2.10 Permasalahan dan Isu Strategis

2.10.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan Bali secara umum telah berlangsung dengan mencapai sejumlah kemajuan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Dalam perkembangan pembangunan Bali hingga saat ini, masih terdapat permasalahan yang perlu dicermati dan memerhatikan segala aspek. Permasalahan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025–2029 merupakan pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Dinamika pembangunan Bali dalam berbagai bidang dapat menimbulkan permasalahan dan tantangan yang berdampak pada seluruh aspek-aspek pembangunan Bali, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Munculnya permasalahan tersebut tidak saja bersumber dari masalah lokal di Bali, tetapi juga bersumber dari interaksi kehidupan masyarakat dan dampak pembangunan pada tataran nasional dan global. Adapun Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Bali tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.109 berikut.

Tabel 2.109
Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Bali

Aspek Pembangunan	Permasalahan Daerah
Aspek Geografi dan Demografi	**Geografi dan Peran Strategis Daerah:** 1. Kondisi lahan kritis di daerah tangkapan danau masih tinggi khususnya Danau Batur 2. Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) belum memprioritaskan penyediaan dukungan kebijakan dan regulasi daerah tentang penanggulangan bencana yang selaras dengan strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risik bencana nasional 3. Kesucian Alam Bali berpotensi semakin menurun yang berimplikasi pada ancaman menurunnya Taksu Bali, seperti: penodaan tempat suci; wisata pendakian gunung; pencurian pratima; serta polusi danau, sungai, dan laut. 4. Luas lahan pertanian semakin berkurang karena kebutuhan semakin bertambah untuk permukiman, fasilitas infrastruktur dan sarana-prasarana, industri, pariwisata, serta pengurangan secara alamiah akibat abrasi atau bencana Alam 5. Lahan untuk pertanian khususnya sawah semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan pangan **Sumber Daya Alam dan Lingkungan:** 1. Luas kawasan hutan cenderung menurun sehingga berpotensi mengancam ketersediaan udara bersih, air berkualitas dan keanekaragaman hayati menurun

Aspek Pembangunan	Permasalahan Daerah
	2. Masih tingginya penggunaan energi primer terutama di sektor energi dan transportasi. 3. Kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) masih rendah 4. Kebijakan penggunaan energi listrik dari PLTS secara mandiri oleh masyarakat dan industri masih dibatasi 5. Sumber EBT dari energi kelautan (seperti OTEC, gelombang dan arus) belum dimanfaatkan 6. Meningkatnya beban pencemaran danau yang berasal dari kegiatan domestik, industri, dan pertanian 7. Pemanfaatan sampah dan daur ulang sampah secara produktif belum terbangun secara optimal termasuk fasilitas TPS-3R belum merata 8. Kesadaran masyarakat dan kalangan pelaku usaha tentang pentingnya penggunaan produk ramah lingkungan yang terregister masih rendah **Demografi** 1. Karakteristik Manusia Bali yang dahulu dikenal jemet/rajin, ulet/tekun, jujur, tragia/perencana yang baik, lascarya/tulus ikhlas, dabdab (teratur, sopan, dan matang), loyal, dan berdedikasi, mengalami degradasi, yang berimplikasi pada menurunnya identitas ke-Bali-an sebagai Nak Bali. 2. Jumlah penduduk yang semakin meningkat terutama karena migrasi dari luar Bali berimplikasi pada ancaman ketersediaan kebutuhan hidup, seperti: pangan, sandang, dan papan serta layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan sarana-prasarana kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, jumlah penduduk yang semakin bertambah berimplikasi pada meningkatnya tingkat kepadatan penduduk terutama pada wilayah perkotaan. 3. Migrasi penduduk yang tinggi berimplikasi pada perubahan demografi, semakin masifnya alih fungsi dan kepemilikan lahan, meningkatnya kriminalitas, meningkatnya kesenjangan sosial, dan semakin terdesaknya penduduk lokal. 4. Tingkat fertilitas total penduduk lokal Bali relatif rendah (kurang dari dua) dan cenderung menurun, yang berimplikasi pada ancaman punahnya identitas nama Manusia Bali terutama Nyoman/Komang (anak ketiga) dan Ketut (anak keempat), serta menurunnya populasi Manusia Bali sebagai pelaku utama Kebudayaan Bali. 5. Urbanisasi yang cepat 6. Kurangnya pekerjaan berkualitas yaitu pekerjaan yang produktivitas tenaga kerjanya dari yang

Aspek Pembangunan	Permasalahan Daerah
	menengah sampai tinggi yang disebabkan karena sektor jasa yang lebih mendominasi 7. Rata-rata tingkat pendidikan angkatan kerja masih rendah
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	**Kesejahteraan Ekonomi** 1. Ketaatan perusahaan untuk mengikutkan pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan masih rendah 2. Belum terintegrasinya bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi 3. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal belum optimal dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif 4. Kesenjangan pembangunan antar wilayah 5. Ketidakseimbangan struktur ekonomi antarsektor (ketergantungan ekonomi terhadap pariwisata sangat dominan) 6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih terbatas, tidak merata, kurang terpadu, dan kurang akselerasi. 7. Usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dan ekonomi kreatif belum berkembang secara optimal 8. Pengembangan industri dan hilirisasi produk-produk pertanian dalam arti luas dan perikanan belum optimal 9. Penerapan teknologi tepat guna dan inovasi untuk mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah belum optimal 10. Pengembangan kawasan berbasis potensi lokal pada pusat-pusat perkotaan yang berfungsi sebagai PKW dan PKL, serta PPK dan PPL yang jauh dari PKN kurang optimal 11. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ketidakstabilan ekonomi sehingga perusahaan cenderung mengurangi mengurangi jam kerja. Akibatnya, pekerja yang masih bekerja di perusahaan tersebut akan mengalami setengah menganggur 12. Terbatasnya lapangan pekerjaan bagi penduduk usia muda yang tidak sekolah atau baru menamatkan pendidikan menengah dan perguruan tinggi **Kesehatan** 1. Masalah kesehatan yang mempengaruhi proses kehamilan, persalinan maupun masa nifas (penyebab non obstetric) masih dominan, disamping karena perdarahan, hipertensi, dan infeksi 2. Kesadaran masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS belum merata 3. Belum optimalnya pelibatan dan kontribusi

Aspek Pembangunan	Permasalahan Daerah
	fasyankes dalam jejaring layanan tuberkulosis dan pelaporan tuberculosis 4. Kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba bagi kesehatan belum merata 5. Pertumbuhan perokok aktif di Indonesia tersebut tidak terlepas dari industri produk tembakau yang gencar memasarkan produknya di masyarakat, terutama anak dan remaja, melalui media sosial 6. Jumlah tenaga kesehatan cenderung meningkat, tetapi distribusinya masih terkendala karena belum merata di seluruh kabupaten/kota, salah satu penyebabnya adalah ketimpangan tingkat kesejahteraan **Pendidikan** 1. Belum tertibnya batas usia anak minimal 16 tahun memasuki SMA/MA/sederajat sehingga jumlah siswa umur 16-18 tahun di SMA/MA/sederajat lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan bahkan lebih kecil dari jumlah siswa SMA/MA/sederajat 2. Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis kompetensi belum optimal 3. Belum optimalnya pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun 4. Pemahaman orang tua tentang pentingnya PAUD sejak umur 3 sampai 6 tahun belum merata **Perlindungan Sosial** 1. Akurasi penargetan, fragmentasi program, dan alokasi pengeluaran untuk perlindungan sosial yang rendah atau kurang memadai 2. Struktur tata kelola terdesentralisasi menimbulkan tantangan dalam mengkoordinasikan dan memberikan layanan perlindungan sosial secara seragam di berbagai wilayah. **Pariwisata dan Kebudayaan** 1. Bali sebagai destinasi pariwisata internasional tergolong rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba 2. Meningkatnya pergaulan bebas 3. Menurunnya populasi penduduk lokal Bali, berimplikasi pada menurunnya fundamental pelaku budaya Bali. 4. Bali memiliki kekayaan manuskrip kearifan lokal Bali yang unggul, namun belum digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan dan kebahagiaan Masyarakat Bali
Aspek Daya Saing Daerah	**Daya Saing Sumber Daya Manusia** 1. Kurangnya keselarasan antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri

Aspek Pembangunan	Permasalahan Daerah
	2. Era digital juga membawa tantangan tersendiri, banyak pekerjaan formal yang digantikan oleh otomatisasi dan teknologi. Sementara itu, pekerjaan baru yang muncul lebih bersifat sementara dan informal 3. Kurangnya keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan yang relevan atau tidak memiliki pendidikan yang memadai, mereka dapat mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Akibatnya, mereka hanya mendapatkan pekerjaan dengan kapasitas yang lebih rendah dari yang sebenarnya 4. Kurangnya pendidikan sehingga seseorang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai atau layak yang dapat menyebabkan frustrasi dan keputusasaan yang pada akhirnya mendorong individu untuk terlibat dalam tindak kriminalitas. 5. Rata-rata tingkat pendidikan angkatan kerja masih rendah 6. Masih rendahnya tingkat keterampilan, penguasaan iptek, dan inovasi **IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi** 1. Pengaruh media yang kuat dalam membentuk pandangan dan perilaku masyarakat. Konten-konten yang mengandung kekerasan, pornografi, atau kejahatan dapat mempengaruhi perilaku individu, terutama remaja yang rentan terhadap pengaruh luar 2. Penerapkan usaha pertanian konvensional, sebagian besar bersifat subsisten dan kurang inovatif seperti kecenderungan untuk menggunakan input pupuk kimia secara terus menerus, jangan menggunakan rotasi tanaman, kehilangan pasca panen masih tinggi dan menggunakan air irigasi yang tidak efisien **Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru** 1. Penggunaan moda transportasi umum di perkotaan masih rendah 2. Intensitas energi primer masih tinggi dan cenderung meningkat 3. Emisi gas rumah kaca masih tinggi dan intensitas emisi gas rumah kaca cenderung meningkat sehingga dapat melemahkan pencapaian target Net Zero Emission Provinsi Bali tahun 2050 **Transformasi Digital** 1. Penerapan teknologi tepat guna dan inovasi untuk mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah belum optimal

Aspek Pembangunan	Permasalahan Daerah
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 1. Investasi swasta masih rendah dan tersebar tidak merata di semua wilayah kabupaten/kota **Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi** 1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih terbatas, tidak merata, kurang terpadu, dan kurang akselerasi 2. Arus migrasi desa-kota yang cukup besar tidak semuanya terserap di sektor formal, mengakibatkan sektor informal lebih dipilih oleh para migran yang tidak dapat masuk ke sektor formal 3. Desa dan pedesaan ditinggalkan oleh SDM terdidik karena urbanisasi **Stabilitas Ekonomi Makro** 1. Menurunnya pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah sebagai dukungan permodalan dan infrastruktur ekonomi 2. Melambatnya kinerja ekonomi negara mitra dagang utama 3. Menurunnya pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah sebagai dukungan permodalan dan infrastruktur ekonomi
Aspek Pelayanan Umum	1. Masih rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan 2. Partai politik masih kurang aktif mendorong calon legislatif dari kalangan perempuan di anggotanya 3. Kapasitas penyediaan air bersih melalui perpipaan masih terbatas dan belum merata 4. Keberadaan IPLT di kabupaten/kota hanya terpusat di wilayah kota sedangkan penduduk tersebar dengan kondisi geografis yang sulit mengakses layanan IPLT

2.10.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah diidentifikasi berdasarkan permasalahan di bagian sebelumnya. Selain itu, isu strategis daerah perlu memerhatikan isu strategis pada konteks yang lebih luas (global, nasional, dan regional) yang dapat memengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis selanjutnya mendasari penyusunan program prioritas.

A. Isu Global

1. Perubahan Iklim

Perubahan iklim mengancam kestabilan ekosistem. Selain itu, perubahan iklim pun turut berdampak pada kehidupan manusia. Kelangkaan dan persaingan terhadap kebutuhan dasar (pangan, air, dan energi) menjadi tantangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, perubahan iklim meningkatkan potensi kejadian bencana, cuaca ekstrem, dan *biodiversity loss*.

Hingga tahun 2030, Indonesia dalam Perjanjian Paris telah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% (mandiri) dan 41% (didukung negara lain). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan potensi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 43% pada tahun 2030. Sejalan dengan hal ini, Provinsi Bali menargetkan pencapaian emisi nol bersih lebih cepat selama 15 tahun dibanding target Indonesia pada dokumen *Bali Net Zero Emission*.

2. Demografi Global dan Bonus Demografi

Dinamika demografi global membawa dampak terhadap perkembangan ekonomi serta persaingan dan perebutan sumber daya alam, terutama dengan meningkatnya kebutuhan dan standar hidup manusia. Di tingkat nasional, dinamika demografi membawa ke arah bonus demografi. Artinya, ke depan (hingga tahun 2035), Indonesia akan memiliki persentase angkatan kerja yang lebih tinggi. Seiring dengan itu, persentase penduduk tidak produktif (lanjut usia) turut bertambah. Hal ini berpengaruh terhadap kebutuhan lapangan pekerjaan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, Kabupaten Jembrana perlu mengoptimalkan pembukaan lapangan kerja, pemberantasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas riset, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi

Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan masih tetap kuat pada kisaran 3,00% per tahun. Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja perekonomian dunia, pemulihan ekonomi pascapandemi, permintaan domestik yang kuat, dan peningkatan aktivitas bisnis. Sejalan dengan itu, inflasi global diproyeksikan menurun berangsur-angsur akibat pengetatan kebijakan moneter, pelonggaran pasar tenaga kerja, dan penurunan harga energi. Meskipun demikian, konfrontasi geoekonomi, krisis utang, dan gelembung aset (*asset bubble burst*) perlu diwaspadai. Selain itu, menurunnya ketidakpastian iklim global berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian.

Sejalan dengan kondisi global, ekonomi Indonesia terus tumbuh dengan kecepatan stabil dan inflasi terkendali. Hal ini ditopang oleh peningkatan konsumsi swasta dan daya beli masyarakat, dukungan kebijakan fiskal dan moneter, percepatan digitalisasi, hilirisasi berbagai produk/komoditas, peningkatan standar kualitas produk, dan keberlanjutan proyek strategis nasional. Meskipun

demikian, perlu mewaspadai ketidakpastian beberapa aspek ekonomi global.

4. Perkembangan Teknologi

Dua dekade terakhir ditandai dengan percepatan perkembangan teknologi. Berbagai inovasi muncul mewarnai kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut, pada dasarnya, membawa hal baik, yaitu memudahkan pekerjaan serta meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi pembangunan. Meskipun menjadi peluang pembangunan, perkembangan teknologi juga dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama apabila sumber daya manusia yang dimiliki belum mampu mengoperasikan dan beradaptasi dengan perangkat dan teknologi tersebut. Selain itu, ancaman terhadap keamanan data dan risiko kegagalan keamanan siber perlu diwaspadai.

Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, terdapat komitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Percepatan transisi EBT didukung dengan iklim riset dan perkembangan teknologi yang baik dan cepat. Selain itu, transisi EBT diiringi dengan pemerataan distribusi energi melalui *national grid*.

B. Isu Nasional

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD ini mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sehingga terdapat keterpaduan antara kebijakan nasional, regional, dan daerah.

RPJMN 2025-2029 menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan, mencakup berbagai isu strategis yang berskala nasional dan menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam konteks Provinsi Bali, kebijakan pembangunan tidak hanya mempertimbangkan arah pembangunan nasional, tetapi juga memerhatikan strategi pembangunan yang telah ditetapkan untuk Provinsi Bali sebagai bagian dari kebijakan regional. Oleh karena itu, RPJMD Provinsi Bali 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan sinergi kebijakan dari tingkat nasional hingga daerah guna memastikan pencapaian pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Melalui dokumen ini, berbagai program dan strategi pembangunan yang diusulkan akan berfokus pada upaya pencapaian visi daerah dengan tetap mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Jembrana dapat

berjalan secara efektif, efisien, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan daerah secara simultan. Arah kebijakan yang dimaksud dijelaskan dalam penjabaran di bawah ini.

Pembangunan wilayah dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan wilayah dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi masing-masing daerah, baik di tingkat nasional maupun regional. Dalam konteks ini, intervensi pembangunan dilakukan melalui pendekatan kewilayahan yang mencakup penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah, pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar, serta pengelolaan pusat pertumbuhan guna mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah. Selain itu, kebijakan ini juga berperan dalam mengatasi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, serta memperkuat sinergi antara pembangunan perdesaan, daerah afirmasi, dan pusat pertumbuhan dalam mendukung target pembangunan nasional.

Pembangunan wilayah memiliki peran sebagai wadah pelaksanaan visi-misi dan berbagai program prioritas yang ditekankan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengurangan kemiskinan menuju 0 persen, dan peningkatan kualitas SDM menuju unggul. Dalam mendukung pencapaian target pembangunan tersebut, dilakukan pembangunan melalui pendekatan kewilayahan di mana terdapat wilayah afirmasi dan perdesaan serta pusat pertumbuhan. Sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan, berbagai kebijakan kewilayahan tersebut juga berperan dalam upaya mengurangi kesenjangan Kawasan Barat Indonesia–Kawasan Timur Indonesia.

Sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di seluruh wilayah, ditetapkan tantangan pembangunan yakni dijelaskan sebagai berikut:

1. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari *Total Factor Productivity* (TFP) selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang

rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selarna tahun 2015-2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023. Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan *Asian Productivity Organization* (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan *Association of Southeast Asian Nations* sebesar US$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessmen,* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Cooperation and Developmen*t sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenega kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan

kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. HaI ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

5. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan *(Triple Planetary Crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diprakirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama l0 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (*lntergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi *particulate matter* 2,5 (*World Heatth Organization*, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi *Business-As-Usual, Report Food and Waste in Indonesia*, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga. secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun, Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (*United Nations Environment Programme*, 2023), turut

berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

6. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas, Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak

pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (*International Monetary Fund*, 2024). Sementara itu, inflasi global diprakirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (*Intemational Monetary Fund*, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tercermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh *The Federal Reserve*. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti *Bank of England* dan *The Federal Reserve*. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara negara anggota G2O, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tercermin dari penurunan *Baltic Dry Index level* menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022.

Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah

kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ *Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

C. Isu Regional

Isu regional disusun berdasarkan isu strategis Provinsi Bali. Terdapat tujuh isu strategis dalam RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025–2045. Ketujuh isu tersebut sebagai berikut.

1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bali dikarenakan kurangnya kualitas dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, kondisi geografis, sebaran sekolah yang belum merata, dan jarak sekolah yang relatif jauh turut memengaruhi hal ini. Akibatnya, akselerasi pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun terhambat. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap penurunan tingkat partisipasi kerja dan peningkatan jumlah pengangguran terbuka. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap literasi kesehatan.

2. Rendahnya Ketahanan Perekonomian Bali

Rendahnya ketahanan perekonomian Provinsi Bali berkaitan erat dengan kesejahteraan dan daya saing ekonomi. Aspek kesejahteraan memiliki tiga isu utama. Ketiga isu tersebut dan penjelasannya, yaitu pemerataan pembangunan ekonomi (belum optimalnya tata kelola pengembangan pariwisata dan kesenjangan pembangunan antarwilayah), diversifikasi ekonomi (belum optimalnya pendayagunaan potensi ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal, tingginya ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata, terbatasnya pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, dan investasi swasta yang masih rendah), dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (belum optimalnya perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan ekonomi kreatif).

Aspek daya saing ekonomi memiliki lima isu utama. Kelima isu tersebut dan penjelasannya, yaitu infrastruktur (infrastruktur kurang memadai dalam mendukung aktivitas ekonomi yang efisien), stabilitas ekonomi makro (kepercayaan investor lokal dan mancanegara yang dapat ditingkatkan dan sistem keuangan yang belum kuat), pasar kerja (rendahnya pasar tenaga kerja), modernisasi pertanian (minimnya penggunaan teknologi, mekanisasi, dan infrastruktur sektor pertanian), dan diversifikasi ekonomi (belum terkaitnya rantai pasok dan hilirisasi produk yang berdampak pada rendahnya nilai tambah, tidak kompetitifnya produk pertanian, rendahnya produktivitas di sektor pengolahan, dan belum optimalnya sektor pertanian dalam rangka mendukung upaya diversifikasi dan transformasi ekonomi).

3. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Terdapat tiga isu utama terkait belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Ketiga isu tersebut, yaitu belum optimalnya reformasi birokrasi, rendahnya kerja sama antardaerah dan internasional, serta lemahnya sinergi dan koordinasi stakeholders di pusat dan daerah. Ke depan, hal ini harus menjadi perhatian utama karena pemerintah berperan sebagai penggerak pelaksanaan program.

4. Ancaman Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

Ancaman stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat dapat terjadi karena berbagai indikasi masalah di Provinsi Bali, seperti banyaknya terjadi pelanggaran hukum, masih rendahnya pendataan dan pengendalian penduduk mendatang, masih adanya praktik bisnis ilegal, dan ancaman nonmiliter (siber, ujaran kebencian, berita bohong, kejahatan melalui media online, narkoba dan obat-obatan terlarang, radikalisme, dan kasus HIV/AIDS).

5. Tergerusnya Tradisi, Seni, Adat, dan Budaya

Permasalahan dan tantangan terkait isu tradisi, seni, adat, dan budaya di Provinsi Bali tidak terlepas dari menurunnya budaya sebagai sumber nilai kehidupan. Terdapat delapan isu terkait hal ini. Kedelapan isu tersebut, yaitu menurunnya penduduk dan produk budaya lokal, belum optimalnya pengembangan kekayaan manuskrip kearifan lokal, menurunnya nilai-nilai kesakralan dan orisinalitas produk budaya, rentannya akulturasi budaya yang mengancam eksistensinya, penurunan ragam budaya agraris dan bahari tradisional, menurunnya kelembagaan subak, tidak optimalnya keberadaan pura, serta ancaman terhadap kuliner tradisional dan kekhasan arsitektur Bali.

6. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Penurunan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana di Provinsi Bali sangat berkaitan dengan berbagai permasalahan terkait penurunan luas lahan pertanian, sawah, dan hutan, termasuk potensi berkurangnya sumber air aktif dan potensi kerusakan ekosistem air. Selain itu, terdapat ancaman terhadap ketersediaan udara, air, dan tanah berkualitas; peningkatan suhu, kekeringan, bencana alam; dan ketersediaan energi berbasis fosil yang harus diperhatikan untuk mendukung upaya keberlanjutan. Keterbatasan dan persaingan dalam mengakses serta memanfaatkan sumber daya alam (energi, air, dan pangan) merupakan tantangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang.

7. Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur

Belum optimalnya penyediaan infrastruktur berkaitan dengan permasalahan di berbagai aspek lainnya. Permasalahan tersebut, meliputi belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pembangunan (kemacetan, terbatasnya lahan parkir, belum optimalnya penanganan banjir, sarana persampahan, dan pengolahan limbah, belum optimalnya penyediaan air bersih, serta penyediaan perumahan, permukiman, dan sarana sosial ekonomi sesuai kewenangan), infrastruktur konektivitas (khususnya konektivitas darat dan laut yang berada di Nusa Tenggara), dan infrastruktur logistik (ketersediaan infrastruktur penunjang logistik yang belum memadai). Selain itu, terdapat permasalahan di berbagai aspek lainnya mencakup aspek penunjang infrastruktur (ketersediaan lahan pembangunan infrastruktur yang masih terbatas) dan infrastruktur digital (infrastruktur dan layanan digital belum optimal, seperti jaringan internet di Provinsi Bali yang belum mencakup 100% dan kualitas koneksi jaringan internet yang masih rendah).

D. Isu Lokal

Isu strategis jangka panjang dirumuskan berdasarkan kondisi internal, pengaruh eksternal, serta kebijakan nasional dan regional pada dekade terakhir. Darinya, dirumuskan lima isu strategis jangka panjang. Berikut penjelasannya.

1. Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan. Kualitas sumber daya manusia tercermin dari kualitas pendidikan, budaya literasi, derajat kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan jaminan sosial, pemuda dan olahraga, dan pembangunan berbasis kearifan lokal. Dengan sumber daya manusia yang berdaya saing, kesejahteraan lebih mudah tercapai.

2. Produktivitas dan Pembangunan Ekonomi

Isu strategis yang mendominasi produktivitas dan pembangunan ekonomi adalah tingkat produktivitas serta pertumbuhan ekonomi yang perlu ditingkatkan. Perekonomian yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan bagian dari transformasi ekonomi. Hal ini diwujudkan melalui pertumbuhan sektor unggulan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (pengelolaan sumber daya lokal), tenaga kerja yang berdaya saing, investasi yang prospektif, dan ketahanan pangan daerah.

3. Pemenuhan Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang

Infrastruktur menjadi dasar perkembangan kegiatan dalam ruang. Pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan layanan infrastruktur yang dimaksud, yaitu kelayak-hunian kawasan permukiman, layanan dan integrasi transportasi, layanan komunikasi dan informasi, dan fungsi infrastruktur lingkungan perkotaan.

4. Ketahanan dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Ketahanan dan keberlanjutan lingkungan hidup merupakan fondasi pembangunan wilayah. Kabupaten Jembrana telah memegang prinsip keberlanjutan lingkungan hidup, yaitu *Tri Hita Karana* sebagai pedoman dalam pembangunan. Meskipun demikian, prinsip keberlanjutan belum terlaksana. Terdapat beberapa aspek yang harus difokuskan dalam mendukung ketahanan dan keberlanjutan lingkungan hidup, mencakup aspek risiko bencana, kualitas lingkungan hidup, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

5. Penyelenggaraan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah

Birokrasi dan tata kelola pemerintah berperan penting dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya. Birokrasi dan tata kelola pemerintah yang akuntabel tercermin dari kualitas pelayanan publik, stabilitas keamanan dan ketertiban, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan kondisi dan proyeksi pencapaian indikator TPB maka dapat diidentfikasi daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan. Adapun hasil identifikasi isu strategis PB menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai berikut:

Tabel 2.110
Isu Strategis Dalam Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun	• Tingkat kemiskinan di kabupaten/kota telah mencapai target nasional akan tetapi penurunannya mengalami perlambatan pasca pandemi *COVID*-19 • Kepesertaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan masih rendah sehingga perlindungan tenaga kerja kurang optimal • Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial masih rendah sehingga dapat mengurangi kecepatan pengentasan kemiskinan • Cakupan penggunaan metode kontrasepsi semua cara pada pasangan usia subur masih rendah • Persentase rumah tangga kumuh perkotaan masih tinggi yang mengindikasikan masih kurangnya pilihan perumahan yang terjangkau bagi rumah tangga berpendapatan rendah • Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat masih rendah • Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana masih tinggi dan cenderung meningkat

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis
		• Indeks risiko bencana kabupaten/kota masih tinggi, berada pada kategori sedang sampai tinggi • Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana masih tinggi • Strategi pengurangan risiko bencana belum sistematis dan terpadu karena tidak didukung oleh ketersediaan dokumen strategi pengurangan risiko bencana di tingkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	• Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan masih tinggi dan cenderung meningkat serta tidak merata di kabupaten/kota • Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan masih rendah • Nilai Tambah Pertanian terhadap jumlah tenaga kerja masih rendah yang menunjukkan produktivitas sektor pertanian masih rendah • Sebagian besar kabupaten/kota belum menetapkan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai instrumen pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	• Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Bayi cenderung meningkat • Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih cenderung menurun dan tidak merata di kabupaten/kota • Prevalensi HIV pada populasi dewasa cenderung meningkat • Insiden Tuberkulosis cenderung meningkat • Prevalensi tekanan darah tinggi masih tinggi dan cenderung meningkat • Prevalensi obesitas pada penduduk umur 18 tahun keatas masih tinggi dan cenderung meningkat

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis
		● Prevalensi penyalahgunaan narkoba masih tinggi dan cenderung meningkat ● Penggunaan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur masih rendah dan cenderung menurun, baik cara tradisional dan modern maupun metode modern jangka panjang ● Kepadatan dan distribusi beberapa tenaga kesehatan tidak merata di kabupaten/kota
4	Menjamin kualitas pendidikan yang insklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	● Pencapaian standar minimum membaca dan matematika pada siswa SD/sederajat dan SMP/sederajat masih rendah ● Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat masih rendah ● Angka Partisipasi Kasar PAUD masih rendah dan cenderung menurun ● Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi masih rendah dan menurun
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan	● Korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif masih rendah ● Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD masih rendah
6	Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua	● Infrastruktur jaringan gas untuk rumah tangga belum terbangun ● Bauran energi terbarukan masih rendah ● Intensitas energi primer masih tinggi dan cenderung meningkat
7	Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua	● Laju pertumbuhan PDRB masih rendah ● Laju pertumbuhan PDRB per kapita masih rendah ● PDRB per kapita masih rendah dan terdapat ketimpangan yang lebar antar kabupaten/kota ● Produktivitas tenaga kerja dan laju pertumbuhannya masih rendah ● Proporsi tenaga kerja formal masih rendah dan cenderung menurun

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis
		● Tingkat setengah pengangguran masih tinggi dan cenderung meningkat ● Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) masih tinggi dan cenderung meningkat
8	Membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	● Jaringan dan kualitas infrastruktur transportasi masih kurang memadai, meliputi tingkat kemantapan jalan provinsi dan kabupaten/kota masih rendah, jaringan jalan tol masih terbatas, jalur kereta api belum terbangun, bandara dan pelabuhan penyeberangan dalam provinsi yang melayani pulau-pulau kecil masih kurang jumlahnya ● Kinerja sektor industri pengolahan masih rendah ditinjau dari kontribusinya terhadap perekonomian
9	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	● Rasio pendapatan daerah terhadap PDRB masih rendah dan cenderung menurun ● Rasio penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB masih rendah dan cenderung menurun ● Pertumbuhan ekspor produk non migas masih rendah dan menurun
10	Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi berkelanjutan untuk semua	● Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum perpipaan masih rendah dan tidak merata ● Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri masih rendah dan fluktuatif ● Sebagian besar kabupaten dan kawasan strategis ekonomi belum terbangun infrastruktur air limbah terpusat/komunal sehingga proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat masih rendah ● Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis
		Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) belum merata ● Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja masih rendah ● Kualitas air danau tidak memenuhi baku mutu air Kelas II ● Kualitas air permukaan sebagai sumber air baku tidak memenuhi baku mutu air Kelas II ● Upaya penghematan air pertanian dan industri belum dilaksanakan dengan skema insentif oleh pemerintah ● Tingkat erosi daerah tangkapan danau masih tinggi sehingga menyebabkan tingginya sedimentasi danau ● Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi masih kecil
11	Mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	● Pengguna moda transportasi umum di perkotaan masih rendah ● Belum semua kota-kota di kabupaten terbentuk kota tangguh bencana ● Persentase sampah daerah yang terkelola masih rendah ● Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana daerah untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana daerah
12	Menjamin konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	● Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang masih kecil ● Belum ada perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 ● Belum ada produk ramah lingkungan yang teregister ● Belum ada fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	● Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi masih tinggi ● Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki kebijakan dan regulasi daerah

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis
		tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana
14	Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya maritim, laut, dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan	● Produksi Perikanan Tangkap di laut masih rendah dan cenderung menurun ● Jumlah luas kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan belum optimal ● Upaya perlindungan nelayan masih lemah termasuk kurangnya dukungan kerangka hukum/kebijakan/regulasi/ kelembagaan berupa Perda Pelindungan Nelayan
15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	● Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan belum optimal ● Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi masih rendah ● Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan belum mengarusutamakan pelestarian keanekaragaman hayati melalui penyediaan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati ● Peningkatan populasi satwa terancam punah prioritas, khsusunya jalak bali masih kecil
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	● Tingkat kriminalitas masih tinggi dan cenderung meningkat ● Penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan masih tinggi dan cenderung meningkat ● Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh cenderung meningkat ● Kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan cenderung meningkat ● Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) masih rendah ● Indeks Kebebasan masih rendah dan cenderung menurun ● Kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah masih rendah

Berdasarkan pemetaan permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu regional, yang disinergiskan dengan isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut di atas, maka dapat dipetakan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut.

Tabel 2.111
Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelestarian Lingkungan yang Berkelanjutan dengan Konsep *Tri Hita Karana*	Kondisi lahan kritis di daerah tangkapan danau masih tinggi khususnya Danau Batur	Pengarusutamaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati belum optimal	Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Lingkungan Hidup, dan Bencana
	Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) belum memprioritaskan penyediaan dukungan kebijakan dan regulasi daerah tentang penanggulangan bencana yang selaras dengan strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana nasional	Pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim belum optimal			Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	
	Kesucian Alam Bali berpotensi semakin menurun yang berimplikasi pada ancaman menurunnya Taksu Bali, seperti: penodaan tempat suci; wisata pendakian gunung; pencurian pratima; serta polusi danau, sungai, dan laut	Pengarusutamaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati belum optimal				

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Luas lahan pertanian semakin berkurang karena kebutuhan semakin bertambah untuk permukiman, fasilitas infrastruktur dan sarana-prasarana, industri, pariwisata, serta pengurangan secara alamiah akibat abrasi atau bencana Alam	Pengarusutamaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati belum optimal	Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Kualitas dan konservasi lingkungan, dan Kesucian Alam Bali
	Lahan untuk pertanian khususnya sawah semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan pangan					
	Luas kawasan hutan cenderung menurun sehingga berpotensi mengancam ketersediaan udara bersih, air berkualitas dan keanekaragaman hayati menurun					

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Masih tingginya penggunaan energi primer terutama di sektor energi dan transportasi	Kualitas lingkungan hidup masih rendah				
	Kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) masih rendah					
	Kebijakan penggunaan energi listrik dari PLTS secara mandiri oleh masyarakat dan industri masih dibatasi					
	Sumber EBT dari energi kelautan (seperti OTEC, gelombang dan arus) belum dimanfaatkan					
	Meningkatnya beban pencemaran danau yang berasal dari kegiatan domestik, industri, dan pertanian					
	Pemanfaatan sampah dan daur ulang sampah secara produktif belum terbangun secara optimal termasuk fasilitas TPS-3R belum merata					

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kesadaran masyarakat dan kalangan pelaku usaha tentang pentingnya penggunaan produk ramah lingkungan yang terregister masih rendah					
Pemberdayaan SDM Bali	Karakteristik Manusia Bali yang dahulu dikenal jemet/rajin, ulet/tekun, jujur, tragia/perencana yang baik, lascarya/tulus ikhlas, dabdab (teratur, sopan, dan matang), loyal, dan berdedikasi, mengalami degradasi, yang berimplikasi pada menurunnya identitas ke-Bali-an sebagai Nak Bali	Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial belum optimal	Demografi Global dan Bonus Demografi	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas Sumber Daya Manusia
	Jumlah penduduk yang semakin meningkat terutama karena migrasi dari luar Bali berimplikasi pada ancaman ketersediaan kebutuhan hidup, seperti: pangan, sandang, dan papan serta layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan sarana-prasarana kebutuhan					

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	hidup lainnya. Selain itu, jumlah penduduk yang semakin bertambah berimplikasi pada meningkatnya tingkat kepadatan penduduk terutama pada wilayah perkotaan					
	Migrasi penduduk yang tinggi berimplikasi pada perubahan demografi, semakin masifnya alih fungsi dan kepemilikan lahan, meningkatnya kriminalitas, meningkatnya kesenjangan sosial, dan semakin terdesaknya penduduk local					
	Tingkat fertilitas total penduduk lokal Bali relatif rendah (kurang dari dua) dan cenderung menurun, yang berimplikasi pada ancaman punahnya identitas nama Manusia Bali terutama Nyoman/Komang (anak ketiga) dan Ketut (anak keempat), serta menurunnya populasi Manusia Bali sebagai					

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pelaku utama Kebudayaan Bali					
	Urbanisasi yang cepat					
	Kurangnya pekerjaan berkualitas yaitu pekerjaan yang produktivitas tenaga kerjanya dari yang menengah sampai tinggi yang disebabkan karena sektor jasa yang lebih mendominasi					
	Rata-rata tingkat pendidikan angkatan kerja masih rendah	Pemerataan dan mutu pendidikan belum optimal				
SDM Bali yang berkualitas dan cakap teknologi	Ketaatan perusahaan untuk mengikutkan pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan masih rendah	Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial belum optimal	Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi	Geopolitik dan Geoekonomi	Rendahnya Ketahanan Perekonomian Bali	Kesenjangan Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi, serta Kualitas SDM
	Belum terintegrasinya bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi					
	Pendayagunaan potensi ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal belum optimal dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif					

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kesenjangan pembangunan antar wilayah	Prasarana dan sarana wilayah kurang memadai	Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi	Geopolitik dan Geoekonomi	Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur	Belum Optimalnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan
	Ketidakseimbangan struktur ekonomi antarsektor (ketergantungan ekonomi terhadap pariwisata sangat dominan)	Perekonomian daerah masih rendah	Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi	Geopolitik dan Geoekonomi	Rendahnya Ketahanan Perekonomian Bali	Kesenjangan Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi, serta Tata Kelola Pemerintahan
	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih terbatas, tidak merata, kurang terpadu, dan kurang akselerasi					
Pengembangan ekonomi kreatif	Usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dan ekonomi kreatif belum berkembang secara optimal					
	Pengembangan industri dan hilirisasi produk-produk pertanian dalam arti luas dan perikanan belum optimal					
	Penerapan teknologi tepat guna dan inovasi untuk mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah belum optimal	Perekonomian daerah masih rendah	Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi	Geopolitik dan Geoekonomi	Rendahnya Ketahanan Perekonomian Bali	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perencanaan pembangunan yang terencana dan terintegrasi	Pengembangan kawasan berbasis potensi lokal pada pusat-pusat perkotaan yang berfungsi sebagai PKW dan PKL, serta PPK dan PPL yang jauh dari PKN kurang optimal					
	Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ketidakstabilan ekonomi sehingga perusahaan cenderung mengurangi mengurangi jam kerja. Akibatnya, pekerja yang masih bekerja di perusahaan tersebut akan mengalami setengah menganggur					
	Terbatasnya lapangan pekerjaan bagi penduduk usia muda yang tidak sekolah atau baru menamatkan pendidikan menengah dan perguruan tinggi	Pemerataan dan mutu pendidikan belum optimal	Demografi Global dan Bonus Demografi	Demografi Global dan Bonus Demografi	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemberdayaan SDM Bali	Masalah kesehatan yang mempengaruhi proses kehamilan, persalinan maupun masa nifas (penyebab non obstetric) masih dominan, disamping karena perdarahan, hipertensi, dan infeksi	Kualitas kesehatan belum optimal				Kualitas SDM, Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, dan Bencana.
	Kesadaran masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS belum merata		Demografi Global dan Bonus Demografi	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	
	Belum optimalnya pelibatan dan kontribusi fasyankes dalam jejaring layanan tuberkulosis dan pelaporan tuberculosis					
	Kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba bagi kesehatan belum merata					
	Pertumbuhan perokok aktif di Indonesia tersebut tidak terlepas dari industri produk tembakau yang gencar memasarkan produknya di masyarakat, terutama anak dan remaja, melalui media sosial					
	Jumlah tenaga kesehatan cenderung meningkat, tetapi distribusinya masih					

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	terkendala karena belum merata di seluruh kabupaten/kota, salah satu penyebabnya adalah ketimpangan tingkat kesejahteraan					
	Belum tertibnya batas usia anak minimal 16 tahun memasuki SMA/MA/sederajat sehingga jumlah siswa umur 16-18 tahun di SMA/MA/sederajat lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan bahkan lebih kecil dari jumlah siswa SMA/MA/sederajat	Pemerataan dan mutu pendidikan belum optimal				
	Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis kompetensi belum optimal		Demografi Global dan Bonus Demografi	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	
	Belum optimalnya pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun					
	Pemahaman orang tua tentang pentingnya PAUD sejak umur 3 sampai 6 tahun belum merata					

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Akurasi penargetan, fragmentasi program, dan alokasi pengeluaran untuk perlindungan sosial yang rendah atau kurang memadai	Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial belum optimal				
	Struktur tata kelola terdesentralisasi menimbulkan tantangan dalam mengkoordinasikan dan memberikan layanan perlindungan sosial secara seragam di berbagai wilayah	Pembangunan hukum dan tata kelola belum optimal	Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	
	Bali sebagai destinasi pariwisata internasional tergolong rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba					
	Meningkatnya pergaulan bebas		Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Ancaman Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Menurunnya populasi penduduk lokal Bali, berimplikasi pada menurunnya fundamental pelaku budaya Bali		Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Ancaman Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	
	Bali memiliki kekayaan manuskrip kearifan lokal Bali yang unggul, namun belum digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan dan kebahagiaan Masyarakat Bali		Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Tergerusnya Tradisi, Seni, Adat, dan Budaya	
	Masih rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan terhadap Perempuan			Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Ancaman Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	
	Partai politik masih kurang aktif mendorong calon legislatif dari kalangan perempuan di anggotanya			Geopolitik dan Geoekonomi	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kapasitas penyediaan air bersih melalui perpipaan masih terbatas dan belum merata			Krisis Lingkungan	Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur	Belum Optimalnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan
	Keberadaan IPLT di kabupaten/kota hanya terpusat di wilayah kota sedangkan penduduk tersebar dengan kondisi geografis yang sulit mengakses layanan IPLT			Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur	

Sumber: Hasil Analisa (2025)

Berdasarkan matriks isu strategis daerah tersebut di atas maka dapat ditetapkan isu-isu strategis Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemeliharaan kesucian alam Bali yang berimplikasi pada ancaman menurunnya *Taksu* Bali
2. Menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia meliputi degradasi karakteristik tradisional masyarakat Bali, rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja, dan ancaman punahnya identitas lokal akibat rendahnya tingkat fertilitas dan tingginya migrasi penduduk
3. Kesenjangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan mencerminkan ketimpangan distribusi infrastruktur pariwisata, sementara pemerataan pembangunan ekonomi terhambat oleh dominasi sektor pariwisata dan belum optimalnya pemberdayaan
4. Keterbatasan sarana dan prasarana dasar, infrastruktur pendukung ekonomi, dan pengembangan teknologi digital yang menghambat percepatan pembangunan daerah.
5. Menurunnya kualitas lingkungan akibat belum optimalnya pelestarian keanekaragaman hayati, penanganan lahan kritis, dan pengembangan energi baru serta terbarukan.
6. Ancaman stabilitas keamanan dan tergerusnya tradisi-budaya Bali menjadi tantangan dalam mempertahankan identitas kultural di tengah dinamika globalisasi, risiko bencana dan dampak perubahan iklim.
7. Aspek tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan dalam koordinasi antarwilayah dan penyediaan layanan publik

Seluruh isu di atas membutuhkan pendekatan terintegrasi berbasis konsep *Tri Hita Karana* untuk mencapai pembangunan jangka menengah.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi dan Misi

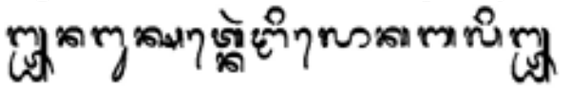
Visi dan misi pembangunan Bali 5 (lima) tahun ke depan merupakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk selanjutnya menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Visi dan misi ini turut menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah. Visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih yang disampaikan dalam masa kampanye sebelumnya.

Visi merupakan rumusan umum yang berkaitan dengan keadaan yang hendak dicapai atau diinginkan dalam periode perencanaan tertentu. Visi merupakan hal yang fundamental dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah. Visi ini juga mencerminkan aspirasi dan harapan masyarakat yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan arah pembangunan yang strategis dan berkelanjutan.

Visi Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang ingin diwujudkan pada akhir periode sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Bidang Prioritas Pembangunan Bali 5 Tahun ke depan (2025-2029) merupakan momentum 5 tahun pertama yang menjadi awal pelaksanaan pembangunan Bali sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

Visi pembangunan Bali 5 Tahun ke depan, yaitu:



Nangun Sat *Kerthi* Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru

Yang bermakna; “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan *Krama* Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, *Niskala-Sakala* Menuju Kehidupan Krama dan *Gumi* Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh,

Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945."

Visi ini juga mengandung makna; "Membangun Kehidupan *Krama* Bali yang Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban Berlandaskan Nilai–Nilai Luhur Kearifan Bali".

Memantapkan dan mempercepat pewujudan Visi *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali, dilaksanakan melalui 22 (dua puluh dua) Misi Pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan Pembangunan Bali sebagai strategi untuk menjaga, memperkuat, dan memajukan Alam, Manusia, serta Kebudayaan Bali. Adapun misi pembangunan jangka menengah Provinsi Bali adalah:

Misi 1. Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara *Niskala-Sakala* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad *Kerthi*, yaitu: Atma *Kerthi*, Segara *Kerthi*, Danu *Kerthi*, Wana *Kerthi*, Jana *Kerthi*, dan Jagat *Kerthi*.

Misi 2. Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelengarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

Misi 3. Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta membentuk keadaban kehidupan Krama Bali.

Misi 4. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.

Misi 5. Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.

Misi 6. Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

Misi 7. Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

Misi 8. Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Widyalaya dan Pasraman di Desa Adat.

Misi 9. Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali

Misi 10. Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional

Misi 11. Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali

Misi 12. Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang- papan bagi kehidupan Krama Bali.

Misi 13. Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi *Kerthi* Bali.

Misi 14. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.

Misi 15. Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.

Misi 16. Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital.

Misi 17. Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.

Misi 18. Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta trasportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan

Misi 19. Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.

Misi 20. Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih

Misi 21. Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.

Misi 22. Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah.

Misi pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025–2029 dirumuskan tidak hanya sebagai penjabaran visi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengelola isu-isu strategis yang telah teridentifikasi. Setiap misi memiliki relevansi dan kontribusi langsung terhadap isu-isu utama pembangunan daerah, sehingga implementasi misi dapat memberikan arah yang jelas dalam mengatasi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan. Adapun keselarasan antara misi dengan isu strategis dijelaskan sebagai berikut.

1. **Misi 1:** Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara *Niskala-Sakala* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad *Kerthi*, yaitu: Atma *Kerthi*, Segara *Kerthi*, Danu *Kerthi*, Wana *Kerthi*, Jana *Kerthi*, dan Jagat *Kerthi*; **Misi 2:** Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelengarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan; dan **Misi 3:** Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui

penguatan, pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta membentuk keadaban kehidupan Krama Bali diarahkan untuk menjawab isu strategis **Belum optimalnya pemeliharaan kesucian alam Bali yang berimplikasi pada ancaman menurunnya Taksu Bali.**

2. **Misi 4:** Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas; **Misi 5**: Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali; **Misi 6:** Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi; **Misi 7**: Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi; **Misi 8:** Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Widyalaya dan Pasraman di Desa Adat; **Misi 9:** Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali; **Misi 10:** Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional; **Misi 11:** Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali diarahkan untuk menjawab isu strategis: **Menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia meliputi degradasi karakteristik tradisional masyarakat Bali, rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja, dan ancaman punahnya identitas lokal akibat rendahnya tingkat fertilitas dan tingginya migrasi penduduk**.
3. **Misi 12:** Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan Krama Bali; **Misi 13:** Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi *Kerthi* Bali; **Misi 14:** Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur; **Misi 15:** Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi; dan **Misi 17:** Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat diarahkan untuk menjawab isu strategis:

Kesenjangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan mencerminkan ketimpangan distribusi infrastruktur pariwisata, sementara pemerataan pembangunan ekonomi terhambat oleh dominasi sektor pariwisata dan belum optimalnya pemberdayaan.

4. **Misi 16:** Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital dan **Misi 18:** Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta trasportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan diarahkan untuk menjawab isu strategis: **Keterbatasan sarana dan prasarana dasar, infrastruktur pendukung ekonomi, dan pengembangan teknologi digital yang menghambat percepatan pembangunan daerah**.
5. **Misi 19**: Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah; dan **Misi 20:** Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih diarahkan untuk menjawab isu strategis: **Menurunnya kualitas lingkungan akibat belum optimalnya pelestarian keanekaragaman hayati, penanganan lahan kritis, dan pengembangan energi baru serta terbarukan.**
6. **Misi 21:** Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu; dan **Misi 22:** Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah diarahkan untuk menjawab isu strategis: **Ancaman stabilitas keamanan dan tergerusnya tradisi-budaya Bali menjadi tantangan dalam mempertahankan identitas kultural di tengah dinamika globalisasi, risiko bencana dan dampak perubahan iklim**, dan **Aspek tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan dalam koordinasi antarwilayah dan penyediaan layanan publik**.

Seluruh 22 misi tersebut dipetakan ke dalam 6 (enam) bidang prioritas pembangunan, sebagai berikut:

Bidang 1. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.
Bidang 2. Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan.
Bidang 3. Ekonomi *Kerthi* Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata.
Bidang 4. Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi.
Bidang 5. Lingkungan, Kehutanan, dan Energi.
Bidang 6. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.

Visi dan 22 misi pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025–2029 telah dirancang secara menyeluruh dan dijabarkan dalam 6 bidang prioritas yang mencerminkan upaya terpadu dalam menjaga dan meningkatkan kualitas alam, manusia, dan kebudayaan Bali.

Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga melindungi warisan budaya, memberdayakan masyarakat, dan memulihkan harmoni ekologi sebagai dasar peradaban Bali Era Baru. Tabel berikut ini menggambarkan keterkaitan 22 misi dengan 6 bidang prioritas.

Tabel 3.1 Keterkaitan 22 Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali dengan 6 Bidang Prioritas Pembangunan

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029		**Bidang Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029**
Misi 1	Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara *Niskala-Sakala* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu: *Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi*, dan *Jagat Kerthi*.	**Bidang 1.** Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.
Misi 2	Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan*, dan *Palemahan*.	
Misi 3	Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, membentuk keadaban kehidupan Krama Bali.	
Misi 4	Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.	**Bidang 2.** Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan.

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029		Bidang Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029
Misi 5	Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.	
Misi 6	Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.	
Misi 7	Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.	
Misi 8	Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk *Widyalaya* dan *Pasraman* di Desa Adat.	
Misi 9	Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali	
Misi 10	Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional	
Misi 11	Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali	

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029		Bidang Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029
Misi 12	Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang- papan bagi kehidupan Krama Bali.	**Bidang 3.** Ekonomi *Kerthi* Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata. **Bidang 4.** Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi.
Misi 13	Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi *Kerthi* Bali.	
Misi 14	Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.	
Misi 15	Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi	
Misi 17	Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat	
Misi 18	Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan	
Misi 19	Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.	**Bidang 5.** Lingkungan, Kehutanan, dan Energi.
Misi 20	Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih	

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029		Bidang Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029
Misi 16	Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital.	**Bidang 6.** Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.
Misi 21	Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.	
Misi 22	Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah.	

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 dilaksanakan dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional disusun secara terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up)*, serta memerhatikan potensi dan kondisi daerah.

Sebagai bagian dari sistem tersebut, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun, yang disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, serta harus mengacu dan memerhatikan dokumen perencanaan di tingkat nasional, yakni RPJMN.

Kesesuaian ini dipertegas dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 41 ayat (2), yang menyebutkan bahwa penyusunan RPJMD Provinsi wajib memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta arah kebijakan pembangunan nasional lainnya. Oleh karena itu, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen penjabaran visi dan misi kepala daerah, namun juga menjadi sarana harmonisasi dan integrasi pembangunan pusat dan daerah.

Harmonisasi dan keselarasan antara dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 terlihat dari keselarasan antara prioritas pembangunan

nasional dengan bidang prioritas pembangunan Provinsi Bali. Keselarasan prioritas pembangunan ini mencerminkan kesamaan arah dan tujuan pembangunan sehingga pembangunan level nasional dapat diterjemahkan secara langsung dalam kebijakan-kebijakan pembangunan daerah. Mengingat peran Pemerintah Provinsi merupakan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah sehingga sangat penting untuk memastikan terwujudnya kepentingan pemerintah pusat di daerah demi mewujudkan kepentingan bangsa.

Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 tercermin dalam 8 prioritas nasional yang dikenal dengan *Asta Cita*. *Asta Cita* sebagai pengejawantahan prioritas pembangunan nasional terdiri dari:

Prioritas 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Prioritas 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Prioritas 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Prioritas 4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Prioritas 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Prioritas 6. Membangun dari desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Prioritas 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Prioritas 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun keselarasan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029
Prioritas 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	▪ **Bidang Prioritas 6** Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.	▪ **Misi 21** Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.
Prioritas 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	▪ **Bidang Prioritas 3** Ekonomi *Kerthi* Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	▪ **Misi 12** Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang- papan bagi kehidupan Krama Bali. ▪ **Misi 13** Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi *Kerthi* Bali.
	▪ **Bidang Prioritas 5** Lingkungan, Kehutanan, dan Energi.	▪ **Misi 20** Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih
	▪ **Bidang Prioritas 6** Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.	▪ **Misi 21** Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029
		▪ **Misi 16** Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital.
Prioritas 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	▪ **Bidang Prioritas 4** Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi	▪ **Misi 8** Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan
	▪ **Bidang Prioritas 2** Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	▪ **Misi 6** Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.
Prioritas 4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas.	▪ **Bidang Prioritas 2** Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	▪ **Misi 4** Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. ▪ **Misi 5** Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029
		berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali. ▪ **Misi 7** Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. ▪ **Misi 8** Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk *Widyalaya* dan *Pasraman* di Desa Adat. ▪ **Misi 9** Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali ▪ **Misi 10** Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029
Prioritas 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	▪ **Bidang Prioritas 3** Ekonomi *Kerthi* Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	▪ **Misi 15** Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi
Prioritas 6. Membangun dari desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	▪ **Bidang Prioritas 2** Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	▪ **Misi 11** Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali ▪
	▪ **Bidang Prioritas 3** Ekonomi *Kerthi* Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	▪ **Misi 14** Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur. ▪ **Misi 17** Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029
Prioritas 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	▪ **Bidang Prioritas 6** Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.	▪ **Misi 21** Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu. ▪ **Misi 22** Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah
Prioritas 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	▪ **Bidang Prioritas 5** Lingkungan, Kehutanan, dan Energi.	▪ **Misi 19** Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.
	▪ **Bidang Prioritas 1** Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.	▪ **Misi 1** Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara *Niskala-Sakala* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi, yaitu: Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi,* dan *Jagat Kerthi.*

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029
		▪ **Misi 2** Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan*, dan *Palemahan*. ▪ **Misi 3** Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, membentuk keadaban kehidupan Krama Bali.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan pembangunan memberikan arah yang jelas terhadap pencapaian visi pembangunan daerah, sedangkan sasaran pembangunan menetapkan hasil yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang secara lebih terukur dan spesifik.

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan capaian pembangunan sebelumnya, tantangan dan permasalahan daerah, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan. Tujuan dan sasaran ini juga selaras dengan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045, serta kebijakan strategis lainnya yang relevan.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali untuk implementasi selama 5 tahun ke depan diuraikan dalam tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
***Nangun Sat Kerthi Loka* Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru**												
Misi 1: Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan *Krama* Bali secara *Niskala-Sakala* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu: *Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi*, dan *Jagat Kerthi.*	**Tujuan 1:** Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional		**Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**Angka**	**73,00**	**73,73**	**74,43**	**75,15**	**75,88**	**76,60**	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan	**Bidang Prioritas 1:** Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Serta Kearifan Lokal
Misi 2: Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelengarakan tata kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan,* dan *Palemahan.*		**Sasaran 1:** Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali	Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali	Angka	18,96	24,25	28,30	33,13	37,23	43,11	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan	
Misi 3: Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, membentuk keadaban kehidupan *Krama* Bali.		**Sasaran 2**: Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Angka	0,8020	0,8100	0,8200	0,8300	0,8400	0,8500	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Misi 4: Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.	**Tujuan 2**: Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Angka**	**78,78**	**78,94**	**79,1**	**79,25**	**79,41**	**79,56**	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)	**Bidang Prioritas 2:** Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
			Tingkat Kemiskinan	**Persen**	**3,57-3,93**	**3,00 – 3,50**	**2,50 – 3,00**	**2,00 – 2,50**	**1,79 – 2,79**	**1,50 – 2,50**	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)	
Misi 5: Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.		**Sasaran 1**: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,32	75,54	75,76	75,98	76,2	76,42	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan	
Misi 6: Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.		**Sasaran 2**: Meningkatnya Kualitas Pendidikan serta Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Indeks Pendidikan	Angka	0,714	0,721	0,728	0,735	0,742	0,790	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Misi 7: Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.			Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	63,29	63,61	63,93	64,25	64,57	64,89	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaaan dan olahraga	
Misi 8: Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk *Widyalaya* dan *Pasraman* di Desa Adat.			Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	0,336	0,337	0,339	0,341	0,342	0,344	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaaan dan olahraga	
Misi 9: Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali		**Sasaran 3:** Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Angka	95,31	95,52	95,73	95,94	96,15	96,36	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
Misi 10: Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional		**Sasaran 4:** Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,78-2,35	1,77-2,30	1,75-2,25	1,70-2,20	1,63-2,17	1,50-2,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja	
Misi 11: Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan *Krama* Bali			Persentase Keselamatan dan Pelindungan Tenaga Kerja	Persen	2,79	2,80	2,83	2,87	2,91	2,94		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	58,76	59,03	59,3	59,57	59,84	60,11	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial	
Misi 12: Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan *Krama* Bali.	**Tujuan 3**: Meningkatnya Laju dan Ketahanan Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi *Kerthi* Bali.		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**5,50-6,00**	**5,60-6,30**	**6,50 – 7,50**	**7,50 – 8,00**	**8,00 – 8,50**	**8,25 – 8,75**	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)	**Bidang Prioritas 3:** Ekonomi *Kerthi* Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata
Misi 13: Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi *Kerthi* Bali			**Rasio Gini**	**Angka**	**0,343-0,347**	**0,340-0,345**	**0,335-0,340**	**0,333-0,337**	**0,331-0,335**	**0,330-0,334**	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)	**Bidang Prioritas 4:** Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi
Misi 14: Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.		**Sasaran 1**: Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	79,47	80,84	82,24	83,66	85,10	85,67	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Misi 15: Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.			Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	Angka	25,47	27,50	29,70	32,08	34,65	37,42	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan	
Misi 17: Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.		**Sasaran 2:** Meningkatnya produktivitas masyarakat melalui pemerataan ekonomi kerakyatan	Persentase Peningkatan Perekonomian Desa	Persen	99,68	99,70	99,75	99,80	99,90	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah desa	
Misi 18: Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan			Rasio Kewirausahaan di Bali	Persen	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	
			Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Bali	Persen	21,50	22,00	22,50	23,00	23,50	24,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	
			Persentase Peningkatan Ekspor Produk Industri Lokal Bali	Persen	5,0	5,2	5,5	5,7	6,0	6,1	Perangkat Daerah yang menangani urusan perindustrian atau urusan perdagangan	
			Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Persen	6,96	1,89	3,70	3,93	4,81	4,92	Perangkat Daerah yang menangani urusan penanaman modal	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sasaran 3: Terwujudnya Pariwisata Bali yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	21,8	22,1	22,3	22,5	22,7	22,8	Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata	
		Sasaran 4: Meningkatnya Inklusifitas Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi (Aman, Nyaman, Lancar, Selamat, dan Terjangkau)	Angka	N/A	77,50	78,00	78,50	79,00	80,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan	
			Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	76,00	76,47	76,88	77,32	77,80	78,27	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
Misi 16: Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital	**Tujuan 4**: Terwujudnya Bali Sebagai Pulau Digital yang Inovatif dan Terintegrasi		**Persentase Wilayah yang Terjangkau Jaringan Telekomunikasi**	**Persen**	**91,25**	**92,50**	**92,63**	**92,75**	**92,88**	**93,00**	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi	**Bidang Prioritas 6:** Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
		Sasaran 1: Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Inovasi Digital	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	68,00	68,40	69,42	70,46	71,50	72,54	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Misi 19: Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.	**Tujuan 5**: Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan dengan Bali Mandiri Energi Bersih		**Indeks Provinsi Hijau**	**Angka**	**65,67**	**68,13**	**70,59**	**73,05**	**75,51**	**77,97**	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral	**Bidang Prioritas 5:** Lingkungan, Kehutanan, dan Energi
Misi 20: Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih			**Persentase Penurunan Emisi GRK**	**Persen**	**7,77**	**20,63**	**28,37**	**31,07**	**32,65**	**36,49**	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup	
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya mineral	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Angka	76,19	76,37	76,54	76,71	76,89	77,06	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup	
			Persentase Sumber Daya Mineral yang Terkelola	Persen	40	50	60	70	80	90	Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral	
		Sasaran 2: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Berkelanjutan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Daerah	Persen	3,36	3,40	3,50	3,60	3,80	4,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral	
Misi 21: Memperkuat Penyelenggaraan Keamanan Bali Oleh Negara dan Masyarakat Dengan Sistem Keamanan Terpadu.	**Tujuan 6**: Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Keharmonisan Sosial di Masyarakat		**Indeks Harmoni Indonesia**	**Angka**	**6,92**	**6,93**	**6,94**	**6,96**	**6,98**	**7,00**	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum	**Bidang Prioritas 6:** Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Misi 22: Memantapkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, dan Bersih, serta Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Cepat, Pasti, dan Murah.		**Sasaran 1**: Terjaganya Ketenteraman dan Ketertiban dalam Masyarakat	Indeks Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat	Angka	36	41	45	50	55	60	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum dan urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat	
		Sasaran 2: Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Angka	132,43	130,84	129,27	127,72	126,19	124,67	Perangkat Daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	
		Sasaran 3: Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat	Indeks Demokrasi Provinsi	Angka	84,55	85,15	85,90	86,30	86,80	87,11	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Umum	
	Tujuan 7: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Angka**	**92,80**	**93,40**	**93,80**	**94,40**	**94,80**	**95,40**	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)	
		Sasaran 1 : Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan	Indeks Sistem Merit	Angka	0,95	0,95	0,98	0,98	0,99	0,99	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	Nilai	79,40	79,80	80,20	80,60	81,00	81,40	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)	
			Opini BPK	Status/ Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pengawasan urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan	
			Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Nilai	3,52	3,54	3,56	3,58	3,60	3,62	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)	
			Indeks Pelayanan Publik	Angka	89	91	93	95	97	99	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)	
			Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Untuk Provinsi Bali	Angka	85,1	85,3	85,5	85,7	85,9	86	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Indeks Inovasi Daerah	Angka	69,95	70,00	70,05	70,10	70,15	70,20	Perangkat Daerah yang menangani urusan penelitian dan pengembangan	
			Indeks Reformasi Hukum	Angka	98,31	98,32	98,33	98,34	98,35	98,36	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)	

3.3 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan membutuhkan strategi yang jelas, kebijakan yang tepat, serta program prioritas yang dapat memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 disusun untuk memastikan bahwa visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah dapat diwujudkan secara sistematis dan efektif.

Strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah komprehensif yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Strategi ini berfungsi sebagai panduan dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan, mengoptimalkan potensi daerah, serta meningkatkan daya saing Provinsi Bali dalam konteks pembangunan nasional dan global.

Untuk mengoperasionalisasikan strategi pembangunan, diperlukan arah kebijakan yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan. Arah kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini juga ditetapkan program prioritas pembangunan daerah yang mencerminkan upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam menjawab kebutuhan pembangunan serta mengatasi berbagai isu strategis yang dihadapi. Program prioritas ini mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, pariwisata, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan, yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi pembangunan jangka menengah merupakan pendekatan sistematis yang dirancang untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dalam periode lima tahun. Strategi ini mencerminkan langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali guna memastikan bahwa kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.

Strategi pembangunan jangka menengah harus mampu menjawab berbagai isu strategis daerah, mengoptimalkan potensi lokal, serta memastikan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Dalam konteks RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, strategi pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan daya saing, penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan berbasis kearifan lokal, serta percepatan transformasi digital dan ekonomi hijau. Dengan strategi yang tepat, Provinsi Bali dapat terus berkembang sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Dalam perumusannya, strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Bali berlandaskan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Berorientasi pada Hasil (*Outcome-Based Development*)
   Strategi pembangunan harus mampu menghasilkan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.
2. Berbasis Keunggulan Lokal dan Kearifan Budaya
   Pembangunan di Bali harus tetap menjaga nilai-nilai budaya, adat, dan kearifan lokal sebagai identitas utama dalam membangun ekonomi, pariwisata, dan sektor lainnya.
3. Berdaya Saing dan Berbasis Inovasi
   Strategi pembangunan harus mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk teknologi digital, ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi.
4. Berkeadilan dan Inklusif
   Pembangunan harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Bali, termasuk daerah perkotaan dan perdesaan, serta kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
5. Berbasis Keberlanjutan dan Ketahanan Lingkungan
   Pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan ekologi dengan menerapkan prinsip *green economy*, energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
6. Adaptif terhadap Perubahan dan Tantangan Global
   Strategi pembangunan harus mampu menjawab tantangan perubahan iklim, digitalisasi, disrupsi ekonomi, serta dinamika sosial-politik yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pembangunan di Provinsi Bali dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang luas bagi seluruh masyarakat.

Adapun strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
Tujuan 1: Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional	**Sasaran 1**: Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali	Penguatan Identitas Budaya dan Kearifan Lokal	Pelestarian dan pengembangan seni, tradisi, dan adat istiadat	Digitalisasi dan modernisasi dalam pengelolaan kebudayaan	Pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis budaya	Penguatan tata kelola kebudayaan yang berkelanjutan
	Sasaran 2: Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat	Mendata Kelembagaan Desa Adat dan Tata Kelola Desa Adat	Sosialisasi Tata Kelola Desa Adat	Bimbingan Teknis Tata Kelola Desa Adat	Pengawasan dan Evaluasi Tata Kelola Desa Adat	Pengembangan Sistem Tata Kelola Desa Adat
Tujuan 2: Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	**Sasaran 1**: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Penguatan pelaksanaan regulasi pelayanan dasar	Pemetaan dan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar.	Ekspansi Akses dan Pemerataan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Peningkatan Mutu dan SDM kesehatan	Pengawasan Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi
		Peningkatan sarana dan prasarana di semua fasilitas kesehatan	Peningkatan Mutu dan SDM kesehatan	Standarisasi dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan paripurna	Peningkatan manajemen layanan berbasis teknologi informasi	Pengawasan Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi
		Meningkatkan *event*/festival dan pameran produk/layanan kesehatan herbal tradisional Bali.	Kolaborasi dengan tokoh adat/masyarakat lokal melalui peningkatan peran *gotra pangusada* se-Bali	Program edukasi berbasis komunitas dan sekolah.	Penguatan kelembagaan dan kader pendidik masyarakat.	Pengawasan Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi
		Percepatan pengembangan industri herbal tradisional Bali.	Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali melalui produk herbal tradisional Bali	Memperluas layanan pengobatan tradisional Bali pada fasilitas layanan kesehatan	Integrasi layanan tradisional dan modern secara legal dan terstandar	Pengawasan Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kompetensi serta Partisipasi Generasi Muda Bali	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA/SMK 2. Penambahan Ruang Kelas Baru 3. Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu 4. Penyediaan dana pendamping BOS	1. Penambahan Ruang Kelas Baru 2. Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu 3. Penyediaan dana pendamping BOS 4. Pengawasan dan Evaluasi	1. Penambahan Ruang Kelas Baru 2. Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu 3. Penyediaan dana pendamping BOS 4. Pengawasan dan Evaluasi	1. Penambahan Ruang Kelas Baru 2. Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu 3. Penyediaan dana pendamping BOS 4. Pengawasan dan Evaluasi	1. Penambahan Ruang Kelas Baru 2. Pemberian beasiswa PIP bagi siswa yang kurang mampu 3. Penyediaan dana pendamping BOS 4. Pengawasan dan Evaluasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		5. Pengawasan dan Evaluasi				
		1. Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional 2. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier 3. Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman 4. Pengembangan pendidikan vokasi SMK *link and match* Dunia usaha dan dunia industri 5. Pengawasan dan evaluasi	1. Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional 2. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier 3. Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman 4. Pengembangan pendidikan vokasi SMK *link and match* Dunia usaha dan dunia industri 5. Pengawasan dan evaluasi	1. Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional 2. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier 3. Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman 4. Pengembangan pendidikan vokasi SMK *link and match* Dunia usaha dan dunia industri 5. Pengawasan dan evaluasi	1. Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional 2. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan serta pengembangan karier 3. Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman 4. Pengembangan pendidikan vokasi SMK *link and match* Dunia usaha dan dunia industri 5. Pengawasan dan evaluasi	1. Pembinaan minat , bakat dan kreativitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba tingkat provinsi dan nasional 2. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan melalui kegiatan bimtek dan pelatihan serta pengembangan karier 3. Peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan jaman 4. Pengembangan pendidikan vokasi SMK *link and match* Dunia usaha dan dunia industri 5. Pengawasan dan evaluasi
		1. Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal 2. Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun	1. Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal 2. Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun	1. Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal 2. Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun	1. Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal 2. Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan	1. Mengembangkan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal 2. Melaksanakan pesraman kilat pada saat libur akhir tahun ajaran di satuan pendidikan 3. Meningkatkan penggunaan keyboard

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		ajaran di satuan pendidikan 3. Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada satuan pendidikan 4. Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan 5. Pengawasan dan evaluasi	ajaran di satuan pendidikan 3. Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada satuan pendidikan 4. Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan 5. Pengawasan dan evaluasi	ajaran di satuan pendidikan 3. Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada satuan pendidikan 4. Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan 5. Pengawasan dan evaluasi	3. Meningkatkan penggunaan keyboard aksara Bali pada satuan pendidikan 4. Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidikan 5. Pengawasan dan evaluasi	aksara Bali pada satuan pendidikan 4. Mengimplementasi mata pelajaran keraifan lokal Bali pada satuan pendidika 5. Pengawasan dan evaluasi
		1. Pendataan kuantitas generasi muda yang aktif 2. Pendataan Sarana, Prasarana, dan organisasi kepemudaan 3. Pendataan potensi peluang kerja bagi pemuda	Sosialisasi pengembangan SDM pada generasi muda	1. Pengembangan kompetensi pemuda 2. Memberikan layanan kepemudaan terkait pengembangan potensi generasi muda 3. Melaksanakan bursa kerja melalui kerja sama dengan *stakeholder* terkait 4. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan wirausaha muda	1. Pemberdayaan generasi muda sebagai pelaku utama penentu peradaban masa depan Bali 2. Pengawasan dan evaluasi pengembangan potensi generasi muda 3. Pengawasan dan evaluasi kesempatan kerja yang inklusif bagi generasi muda	1. Pengawasan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan pemuda 2. Pengembangan terhadap hasil Pengawasan dan evaluasi dalam pelayanan kepemudaan 3. Pengawasan dan evaluasi kesempatan kerja yang inklusif bagi generasi muda
		1. Penyusunan regulasi tentang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Perda tentang keolahragaan) 2. Penyusunan pedoman sistem pembinaan	1. Penyusunan regulasi tentang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Gubernur tentang keolahragaan)	1. Sosialisasi dan implementasi peraturan dan perundang-undangan tentang keolahragaan 2. Melaksanakan pembinaan 3. penyelenggaraan kejuaraan 4. keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga	1. Pembinaan organisasi keolahragaan 2. Melaksanakan pembinaan 3. penyelenggaraan kejuaraan 4. keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga 5. Pengawasan dan evaluasi	1. Pengawasan dan evaluasi implementasi Perda dan pergub Keolahragaan 2. Melaksanakan pembinaan 3. penyelenggaraan kejuaraan 4. keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga 5. Pengawasan dan evaluasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		olahraga jangka panjang (Desain Besar Olahraga Daerah) 4. Penyusunan regulasi tentang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Perda tentang keolahragaan)	2. Pembentukan sentra pembinaan olahragawan di daerah (SPOBDA tingkat provinsi dan PPLP di tingkat kab/kota) 3. Pendataan tenaga keolahragaan yang potensial dan memenuhi standar *4.* Pendataan kejuaraan olahraga yang dapat dijadikan *sport tourism* 5. Mendata potensi kerja sama dengan *stakeholder* terkait	5. Pengawasan dan evaluasi 6. Melaksanakan dan mengembangkan kejuaraan /*event* olahraga berbasis *sport tourism* 7. Pengawasan dan evaluasi	*6.* melaksanakan dan mengembangkan kejuaraan /*event* olahraga berbasis *sport tourism* 7. Pengawasan dan evaluasi	6. melaksanakan dan mengembangkan kejuaraan /*event* olahraga berbasis *sport tourism* 7. Pengawasan dan evaluasi
	Sasaran 3: Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	Penguatan pemahaman dan kompetensi melalui Bimbingan Teknis penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)	Pemantauan pelaksanaan PPRG di setiap perangkat daerah	Evaluasi dan penguatan terhadap penyusunan dokumen PPRG daerah	Mengakomodasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam dokumen perencanaan daerah	Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam perencanaan kinerja daerah dan seluruh perangkat daerah
		Sosialisasi SK Pokja dan *Focal Point* ˆserta Perda PUG di provinsi dan kabupaten/kota	Bimbingan teknis penguatan peran Pokja dan *Focal Point* ˆserta Perda PUG di provinsi dan kabupaten/kota	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tahunan dan Lima Tahunan Pokja PUG	Mengakomodasi Rencana Aksi Daerah Pokja dan *Focal Point* PUG pada Peraturan Gubernur terkait Pelaksanaan Perda PUG	Laporan pelaksanaan penguatan peran Pokja PUG dan *Focal Point* PUG

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		Pendataan kelompok perempuan dan kelompok rentan	Sinergi bersama jejaring dan instansi terkait untuk analisis kebutuhan fasilitasi dan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan	Penyusunan kegiatan dan program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan	Sosialisasi dan *workshop* peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok rentan di lingkungan provinsi dan kabupaten/ kota	Fasilitasi sarana dan prasarana untuk peningkatan akses perempuan dan kelompok rentan
		Pemetaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terdapat di lembaga adat dan desa	Sosialisasi terkait regulasi dan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada lembaga adat dan masyarakat sipil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Pemetaan terhadap desa dinas dan desa adat terkait Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta Ruang Bersama Indonesia (RBI)	Peningkatan peran Forum PUSPA Provinsi dan kabupaten/kota dan sinergi bersama lembaga adat	Terwujudnya DRPPA dan RBI di setiap desa di seluruh kabupaten/kota
	Sasaran 4: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global) 2. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja 3. Pelatihan pemagangan dalam negeri 4. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 5. Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global) 2. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja 3. Pelatihan pemagangan dalam negeri 4. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 5. Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global) 2. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja 3. Pelatihan pemagangan dalam negeri 4. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 5. Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global) 2. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja 3. Pelatihan pemagangan dalam negeri 4. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 5. Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Penyiapan tenaga kerja lokal maupun global) 2. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja 3. Pelatihan pemagangan dalam negeri 4. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 5. Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
		1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		2. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja 3. Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman 4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan 5. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	2. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja 3. Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman 4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan 5. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	2. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja 3. Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman 4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan 5. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	2. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja 3. Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman 4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan 5. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	2. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, melalui pengujian hiperkes dan keselamatan kerja 3. Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman 4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rohaniwan 5. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi
		1. *Job Fair*/Bursa Kerja 2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 3. Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal 4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1. *Job Fair*/Bursa Kerja 2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 3. Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal 4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1. *Job Fair*/Bursa Kerja 2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 3. Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal 4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1. *Job Fair*/Bursa Kerja 2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 3. Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal 4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1. *Job Fair*/Bursa Kerja 2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 3. Perluasan Kesempatan Kerja, melalui Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal 4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 6. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA	5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 6. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA	5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 6. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA	5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 6. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA	5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 6. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA
		Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi	Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi	Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi	Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi	Mendata fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan; Mendata anak terlantar dan difabel di dalam panti sesuai kewenangan; Memfasilitasi penyaluran bantuan bagi fakir miskin; Memberikan pelayanan sosial sesuai standar SPM kepada anak terlantar dan difabel di dalam panti; Pengawasan dan evaluasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
Tujuan 3: Meningkatnya Laju dan Ketahanan Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi *Kerthi* Bali.	**Sasaran 1**: Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali	Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha): - Pupuk (10.000 Ton) - Pendampingan (10 Kelompok) - Sertifikat (5 Buah)	Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha): - Pupuk (10.000 Ton) - Pendampingan (10 Kelompok) - Sertifikat (5 Buah)	Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha): - Pupuk (10.000 Ton) - Pendampingan (10 Kelompok) - Sertifikat (5 Buah)	Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha): - Pupuk (10.000 Ton) - Pendampingan (10 Kelompok) - Sertifikat (5 Buah)	Fasilitasi percepatan pertanian organik (10.000 Ha): - Pupuk (10.000 Ton) - Pendampingan (10 Kelompok) - Sertifikat (5 Buah)
		Identifikasi potensi produksi kelautan dan perikanan	Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan	Optimalisasi produksi kelautan dan perikanan	Pengawasan dan Evaluasi Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan	Intensifikasi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan
		Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha)	Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha)	Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasaran to a, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha)	Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha)	Penyediaan benih bersertifikat dan berlabel, Sarana dan prasarana, GAP, PHT, Registrasi kebun (10.000 Ha)
		- Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll	- Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll	- Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll	- Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll	- Fasilitasi mendukung penetapan LP2B Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan alsintan, pupuk, asuransi gagal panen, dll
		Penanaman komoditas pertanian (50 Ha) - *Smart Farming* - *Urban Farming* - Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)	Penanaman komoditas pertanian (50 Ha) - *Smart Farming* - *Urban Farming* - Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)	Penanaman komoditas pertanian (50 Ha) - *Smart Farming* - *Urban Farming* - Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)	Penanaman komoditas pertanian (50 Ha) - *Smart Farming* - *Urban Farming* - Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)	Penanaman komoditas pertanian (50 Ha) - *Smart Farming* - *Urban Farming* - Pemanfaatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)
		Akselerasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	1. Penyediaan Personil, Prasarana dan Sarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) KKP	1. Optimalisasi tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan 2. Fasilitasi Penetapan Indikasi Geografis (IG) Petambak Garam	1. Pengawasan dan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan konservasi Perairan	1. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang Berkelanjutan (EVIKA kategori Emas) 2. Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Pergaraman

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
			2. Optimalisasi Pemberdayaan Petambak Garam		2. Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Garam	
		Inventarisasi Produk Kelautan dan Perikanan	Sosialisasi Penerapan standar produk kelautan dan perikanan bagi produsen dan konsumen	Penerapan Standarisasi Produk Kelautan dan Perikanan	Optimalisasi Akses Pasar Domestik dan Ekspor	Pengawasan dan Evaluasi Produk Kelautan dan Perikanan
		Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok)	Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok)	Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok)	Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok)	Fasilitasi GHP, pengolahan dan pemasaran (50 kelompok)
	Sasaran 2: Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemerataan Ekonomi Kerakyatan	Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah	Pengawasan dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah
		Pengawasan dan pemetaan jumlah aset yang potensial	Memperkuat sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan sumber pendapatan baru	Optimalisasi pemasaran aset potensial melalui Sistem Informasi berbasis digital	Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemasaran aset potensial melalui Sistem Informasi berbasis digital	Pengawasan, evaluasi, dan pengembangan Sistem Informasi
		Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Bali	Mendata Potensi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Pembinaan dan fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa terkait Kerja Sama Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pengawasan dan Evaluasi kerja sama Desa yang sudah dilaksanakan
		Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk Ekonomi Kreatif dan Digital	Mendata Potensi Desa, Melakukan Sosialisasi TTG, Melaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna	Mendata dan Pengawasan Evaluasi Potensi Desa, Melaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna	Mendata dan Pengawasan Evaluasi Potensi Desa, Melaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna	Mendata dan Pengawasan Evaluasi Potensi Desa, Melaksanakan Lomba Teknologi Tepat Guna
		Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu	Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu	Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu	Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar	Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital Melalui mekanisme online yaitu market place, online shop,dan social media maupun offline yaitu pameran usaha, pasar

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya	pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya	pameran usaha, pasar murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya	murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya	murah/pasar rakyat, festival, serta event-event lainnya yang disinergikan dengan program PD lainnya
		▪ Pemetaan potensi ekonomi kreatif desa berbasis unggulan lokal (kerajinan, kuliner, fashion, seni pertunjukan, dll). ▪ Penguatan kelembagaan komunitas kreatif desa. ▪ Peningkatan literasi digital dan kewirausahaan untuk pelaku ekonomi kreatif desa. ▪ Penyusunan standar kualitas dan kemasan produk agar memenuhi kriteria pasar global. ▪ Revitalisasi balai ekonomi desa/inkubator desa kreatif.	▪ Pengembangan platform digital desa kreatif untuk promosi dan penjualan (marketplace lokal). ▪ Penguatan branding produk ekonomi kreatif desa dengan narasi budaya Bali. ▪ Fasilitasi riset dan desain produk berbasis kebutuhan pasar internasional. ▪ Peningkatan akses permodalan (KUR kreatif, dana bergulir BUMDes). ▪ Pelatihan pemasaran digital dan e-commerce untuk UMKM desa kreatif.	▪ Kemitraan strategis dengan pelaku industri kreatif nasional/internasional (desainer, platform digital, buyer). ▪ Promosi produk desa kreatif melalui pameran nasional & festival budaya (offline & virtual). ▪ Pembentukan klaster ekonomi kreatif desa antar kabupaten/kawasan (klaster anyaman, kopi, fesyen etnik, dsb). ▪ Mendorong sertifikasi produk dan merek dagang untuk perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI).	▪ Pendampingan ekspor melalui kurasi produk ekspor dan pelatihan logistik ekspor. ▪ Kampanye promosi internasional melalui kedutaan besar, diaspora Bali, dan forum global (mis. Ubud sebagai "kota kreatif UNESCO"). ▪ Integrasi produk desa kreatif ke ekosistem pariwisata berbasis budaya. ▪ Monitoring dan evaluasi kinerja daya saing global desa kreatif secara berkala.	▪ Penetapan desa kreatif global percontohan di setiap kabupaten/kota. ▪ Penguatan sistem insentif dan penghargaan untuk pelaku ekonomi kreatif berdaya saing global. ▪ Replikasi dan scale-up model desa ekonomi kreatif ke desa adat lain. ▪ Penerapan sistem data terintegrasi untuk pemantauan daya saing produk dan pelaku usaha desa kreatif. ▪ Konsolidasi regulasi daerah untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif desa yang berkelanjutan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		Penelitian dan Pengembangan Produk (Identifikasi tren pasar, dan penentuan fokus produk)	Peningkatan Kualitas Produksi (pelatihan pegawai, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi)	Pemasaran dan *Branding*	Penguatan keuangan, pelatihan manajerial, dan pembangunan kepemimpinan	Sertifikasi dan standarisasi
		Identifikasi Target Potensial Pasar	Peningkatan Kualitas Produk dan Kemasan	Digitalisasi dan Literasi Digital	Penguatan Branding Produk UMKM dan Perluasan Pangsa Pasar	Penguatan Branding Produk UMKM dan Perluasan Pangsa Pasar
		Pemetaan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan kapasitas pelaku usaha	Integrasi UMKM/Koperasi ke ekosistem pariwisata dan pasar domestik	Meningkatkan kontribusi UMKM/Koperasi terhadap PDRB dan ekspor	Meningkatkan kontribusi UMKM/Koperasi terhadap PDRB dan ekspor	Meningkatkan kontribusi UMKM/Koperasi terhadap PDRB dan ekspor
		- Pelatihan/Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Industri Lokal Bali (Kerajinan dan Olahan Pangan) - Pendampingan *Branding* terhadap IKM berpedoman *Branding* Bali ; - pendampingan desain kemasan/desain digital - Penyediaan alat cetak kemasan yang mendukung pendampingan desain kemasan	- Pembentukan Kelembagaan Sentra Industri - Pendampingan dokumen pendaftaran sertifikasi merek/hak cipta/desain industri bagi IKM - Fasilitasi cetak kemasan bagi IKM	Pemberian Bantuan Alat	Sertifikasi Produk (Izin Edar dan SNI)	Pengawasan dan Evaluasi
		Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha	Penjaringan dan Kurasi Pelaku Usaha	Pelaksanaan Pameran Dalam dan Luar Negeri	Pelaksanaan Pameran Dalam dan Luar Negeri	Pengawasan dan Evaluasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		Identifikasi Produk Unggulan Melalui Evaluasi Perda 8 Tahun 2020 tentang RPIP	Penguatan Kapasitas Produksi Melalui Modernisasi Alat Produk , Fasilitasi Akses Bahan Baku dan Teknologi	Pengembangan Infrastruktur Pendukung pada Kawasan Peruntukan Industri	Akselerasi Pasar dan Kerja sama dengan Sektor Pariwisata	Pengawasan dan Evaluasi
	Sasaran 3: Terwujudnya Pariwisata Bali yang Berkualitas dan Berkelanjutan	▪ Evaluasi regulasi dan kebijakan pariwisata yang ada, dengan penekanan pada prinsip berkelanjutan (lingkungan, sosial, budaya). ▪ Penyusunan dan revisi peraturan daerah/turunan regulasi yang mendukung prinsip *green tourism*, *community-based tourism*, dan pariwisata spiritual. ▪ Penyusunan standar minimum layanan pariwisata berbasis lokal, termasuk homestay, pemandu wisata desa, kuliner, dan destinasi non-*mainstream*. ▪ Identifikasi dan klasifikasi zona/zona wisata prioritas untuk	▪ Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata: hospitality, pemandu wisata, manajemen homestay, pelestarian budaya lokal. ▪ Audit dan sertifikasi usaha pariwisata (akomodasi, agen perjalanan, restoran) berbasis *sustainability rating*. ▪ Pengembangan modul pelatihan digital dan onsite untuk peningkatan standar layanan. ▪ Penguatan kapasitas desa wisata dan komunitas lokal sebagai pelaku utama layanan wisata yang otentik dan ramah lingkungan. ▪ Implementasi sistem pengaduan dan evaluasi layanan	▪ Digitalisasi sistem pengawasan dan pemantauan standar layanan wisata melalui dashboard terpadu lintas OPD dan kabupaten/kota. ▪ Penguatan fungsi pengawasan terpadu melalui Satgas Pariwisata Berkelanjutan. ▪ Penerapan penilaian berkala kepatuhan regulasi pariwisata bagi pelaku usaha. ▪ Integrasi pelayanan perizinan, pelaporan, dan sertifikasi ke dalam sistem OSS (*Online Single Submission*). ▪ Pemberian insentif dan disinsentif terhadap pelaku usaha berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi dan	▪ Penetapan zona/zona pariwisata model berstandar global dengan dukungan infrastruktur, SDM, dan regulasi yang terpadu. ▪ Kampanye Bali Berstandar Dunia untuk menarik wisatawan berkualitas (*high value, low impact*). ▪ Kemitraan dengan lembaga internasional (UNWTO, GSTC) dalam benchmarking dan pengakuan standar layanan berkelanjutan. ▪ Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan regulasi dan peningkatan standar. ▪ Monitoring dan evaluasi efektivitas regulasi dan layanan terhadap indeks kepuasan wisatawan	▪ Review menyeluruh dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem regulasi dan layanan. ▪ Pelembagaan lembaga penjamin mutu layanan wisata tingkat provinsi dan kabupaten/kota. ▪ Implementasi penuh eco-standard dan circular economy pada usaha pariwisata di kawasan prioritas. ▪ Penetapan Skema Pariwisata Regeneratif sebagai standar lanjutan bagi pengelolaan destinasi. ▪ Konsolidasi kebijakan dan regulasi sebagai warisan tata kelola pariwisata Bali yang berkelanjutan untuk jangka panjang.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		intervensi layanan dan regulasi. ▪ Pelatihan peningkatan kesadaran pelaku wisata terhadap standar berkelanjutan (ekolabel, emisi karbon, pengelolaan sampah).	pariwisata berbasis masyarakat dan wisatawan.	pencapaian standar layanan.	dan indeks keberlanjutan.	
		▪ Penyusunan ulang narasi tunggal (Bali *Branding*) berbasis budaya, spiritualitas, dan *sustainability*. ▪ Pemetaan segmen pasar utama dan pasar potensial domestik dan internasional (misalnya: wellness, *spiritual tourism, digital nomad*s). ▪ Evaluasi dan harmonisasi program promosi antar-OPD, kabupaten/kota, dan stakeholder pariwisata. ▪ Digitalisasi basis data destinasi dan pelaku pariwisata melalui portal promosi terintegrasi berbasis bahasa multinasional. ▪ Pelatihan digital marketing, *story telling* budaya, dan promosi berbasis video untuk SDM pariwisata.	▪ Kampanye intensif "Visit Bali 2027" melalui media sosial, portal pariwisata nasional, dan kolaborasi dengan *travel platform* digital. ▪ Kemitraan promosi dengan *influencer*, *content creator*, dan diaspora Bali. ▪ Penguatan promosi di 10 kota besar Indonesia dan wilayah perbatasan untuk menarik wisatawan domestik. ▪ Penyelenggaraan event budaya digital seperti konser, virtual festival desa adat, dan *live-stream* upacara keagamaan. ▪ Penguatan kemitraan dengan maskapai, perhotelan, dan pelaku industri kreatif untuk promosi lintas sektor.	▪ Promosi aktif di pasar internasional melalui pameran wisata global, *trade mission*, dan diplomasi budaya (*soft power* Bali). ▪ Penunjukan Bali *Tourism Ambassador* untuk wilayah pasar utama (Asia, Eropa, Australia, dan Amerika). ▪ Peluncuran kampanye "*Bali: World's Spiritual & Cultural Destination*" secara internasional. ▪ Kerja sama dengan lembaga internasional dan operator tur global untuk paket wisata tematik (*heritage, eco-tourism, wellness).* ▪ Kolaborasi dengan KBRI dan ITPC (*Indonesian Trade Promotion Center*) untuk menjadikan Bali sebagai ikon promosi Indonesia.	▪ Penguatan dan promosi produk wisata unggulan seperti desa wisata, pariwisata regeneratif, dan ekowisata. ▪ Pemanfaatan teknologi AI dan *big data analytics* untuk menyusun strategi promosi berbasis perilaku wisatawan. ▪ Peluncuran aplikasi mobile promosi wisata Bali dengan fitur *augmented reality* (AR) dan *itinerary* otomatis. ▪ Promosi berbasis testimoni wisatawan global dan penguatan citra Bali melalui *review* traveler. ▪ Integrasi promosi dengan produk ekspor budaya dan ekonomi kreatif Bali (tari, arsitektur, kuliner, *fashion*).	▪ Penetapan Bali sebagai Zona Wisata Berkelanjutan Bertaraf Global, sebagai daya tarik utama promosi. ▪ Inisiasi *platform* diplomasi wisata Bali dengan negara-negara mitra dan asosiasi pariwisata dunia. ▪ Penyusunan strategi jangka panjang pariwisata sebagai backbone ekonomi Bali berbasis data dan transformasi struktural. ▪ Evaluasi menyeluruh dampak promosi terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian budaya. ▪ Pelembagaan *Bali Tourism Board* independen sebagai lembaga promosi resmi lintas sektor.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		Memperkuat Penegakan, dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Berkaitan Langsung Terhadap Investasi	Mendata Peta Potensi Investasi di Kabupaten/Kota	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang RUPM	Implementasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang RUPM	Pengawasan dan Evaluasi
	Sasaran 4: Meningkatnya Inklusivitas Wilayah	1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran 2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan	1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran 2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan	1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran 2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan	1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran 2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan	1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran 2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan
		1. Studi Kelayakan dan Penetapan Trase 2. Penyiapan Dokumen Teknis berupa *Detail Engineering Design* (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan 3. Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan	1. Studi Kelayakan dan Penetapan Trase 2. Penyiapan Dokumen Teknis berupa *Detail Engineering Design* (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan 3. Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan	1. Studi Kelayakan dan Penetapan Trase 2. Penyiapan Dokumen Teknis berupa *Detail Engineering Design* (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan 3. Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan	1. Studi Kelayakan dan Penetapan Trase 2. Penyiapan Dokumen Teknis berupa *Detail Engineering Design* (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan 3. Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan	1. Studi Kelayakan dan Penetapan Trase 2. Penyiapan Dokumen Teknis berupa *Detail Engineering Design* (DED), Dokumen Lingkungan dan Kebutuhan Lahan 3. Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan
		Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Pelabuhan Sangsit	Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sangsit (diinisiasi melalui mekanisme KPBU)	Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sangsit (diinisiasi melalui mekanisme KPBU)	Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sangsit (diinisiasi melalui mekanisme KPBU)	Pembangunan Dermaga Pelabuhan Sangsit (diinisiasi melalui mekanisme KPBU)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		1. Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi 2. Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan	1. Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi 2. Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan	1. Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi 2. Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan	1. Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi 2. Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan	1. Pemrograman Kebutuhan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan untuk Mendukung Konektivitas antar Simpul Transportasi 2. Penanganan dan/atau Pembangunan Infrastruktur Transportasi berupa Jalan
		▪ Penyusunan Rencana Induk Transportasi Rendah Emisi Provinsi Bali**.** ▪ Pemetaan jalur dan kawasan prioritas untuk transportasi hijau (kawasan pariwisata, perkotaan, dan pusat keramaian). ▪ Uji coba bus listrik dan kendaraan listrik (EV) untuk layanan transportasi publik di kota/kabupaten prioritas. ▪ Penerapan kawasan bebas emisi terbatas di wilayah heritage atau pusat kota (*low emission zone pilot*). ▪ Edukasi dan kampanye publik tentang transportasi ramah lingkungan dan	▪ Pengembangan dan penataan jalur sepeda dan pejalan kaki yang aman dan ramah difabel di kawasan perkotaan dan destinasi wisata. ▪ Penyusunan Peraturan Gubernur tentang transportasi berkelanjutan dan insentif kendaraan listrik. ▪ Pembangunan infrastruktur pengisian daya (EV *charging station*) di titik strategis (SPBU, terminal, kawasan wisata, dan kantor pemerintah). ▪ Integrasi sistem manajemen transportasi berbasis digital (aplikasi	▪ Integrasi moda transportasi hijau (bus listrik, sepeda, angkutan sungai, kendaraan kecil listrik) dalam sistem transportasi publik terjadwal. ▪ Pengembangan hub transportasi terintegrasi (park-and-ride, intermoda) di kawasan urban dan pariwisata. ▪ Perluasan zona kendaraan rendah emisi (*Low Emission Zones*) di kota-kota dan desa wisata. ▪ Pelibatan sektor swasta dan BUMDes dalam pengoperasian kendaraan listrik skala desa/kampung	▪ Penerapan jaringan transportasi hijau lintas kabupaten/kota di Bali. ▪ Replikasi dan perluasan penggunaan kendaraan listrik untuk ASN, sekolah, dan layanan publik. ▪ Insentif untuk sektor logistik/ekspedisi yang menggunakan kendaraan rendah emisi. ▪ Integrasi sistem pembayaran non-tunai dan tiket digital untuk semua moda transportasi publik. ▪ Pengembangan dashboard digital provinsi untuk pengawasan kualitas udara dan performa sistem transportasi hijau.	▪ Penetapan Provinsi Bali sebagai Zona Transportasi Hijau dan Berkelanjutan berbasis regulasi nasional dan lokal. ▪ Penerapan skema carbon credit dan offset emisi untuk sektor transportasi. ▪ Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Transportasi Hijau Provinsi Bali. ▪ Promosi Bali sebagai model nasional/internasional sistem transportasi pariwisata hijau. ▪ Evaluasi jangka panjang dampak transportasi hijau terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan lingkungan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		gaya hidup rendah karbon.	informasi rute, waktu, dan moda ramah lingkungan). ▪ Fasilitasi subsidi dan insentif pajak/retribusi bagi operator transportasi publik yang menggunakan armada listrik atau hibrida.	(misalnya *shuttle* pariwisata lokal). ▪ Evaluasi dan pemantauan emisi sektor transportasi secara sistematis dan berkala		
		Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan Provinsi Bali.	Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan Provinsi Bali.	Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan Provinsi Bali.	Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan Provinsi Bali.	Melaksanakan Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di ruas jalan Provinsi Bali.
		1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran 2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan	1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran 2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan	1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran 2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan	1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran 2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan	1. Survei dan Perencanaan Teknis serta Identifikasi Penentuan Prioritas Penganggaran 2. Penanganan Jalan berupa Pemeliharaan Jalan dan/atau Peningkatan Jalan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan
		1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		1. Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman 2. Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembangunan SPALD. 3. Penguatan kebijakan dan regulasi	1. Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman 2. Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembangunan SPALD.	1. Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman 2. Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembangunan SPALD.	1. Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman 2. Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembangunan SPALD.	1. Pendataan cakupan layanan air minum, pendataan cakupan layanan sistem penyehatan lingkungan dan permukiman 2. Perencanaan dan Optimalisasi/ pembangunan SPAM, Perencanaan dan optimalisasi/pembangunan SPALD.
		1. Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana 2. Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana. 3. Penetapan Skala Prioritas Penanganan 4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan	1. Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana 2. Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana. 3. Penetapan Skala Prioritas Penanganan 4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan	1. Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana 2. Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana. 3. Penetapan Skala Prioritas Penanganan 4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan	1. Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana 2. Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana. 3. Penetapan Skala Prioritas Penanganan 4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan	1. Pendataan infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana 2. Penetapan baseline infrastruktur pada wilayah perdesaan dan berisiko tinggi bencana. 3. Penetapan Skala Prioritas Penanganan 4. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanganan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		Penguatan Fondasi Sistem 1. Audit dan integrasi awal sistem informasi eksisting. 2. Penyusunan road map transformasi digital infrastruktur PU. 3. Pengembangan standar data, meta data, dan interoperabilitas.	Pembangunan dan Pengujian Sistem Terintegrasi 1. Pembangunan platform sistem informasi terpadu berbasis *cloud* dan AI. 2. Uji coba terbatas pada beberapa proyek infrastruktur strategis. 3. Pelatihan teknis dan literasi digital bagi SDM terkait.	Implementasi Skala Nasional Tahap I 1. Implementasi sistem di seluruh instansi pusat dan sebagian daerah. 2. Integrasi dengan sistem perencanaan dan Pengawasan nasional (mis. *e-Planning, e-Monev*). 3. Optimalisasi dashboard analitik dan *early warning sysem*	Implementasi Skala Nasional Tahap II 1. Perluasan cakupan ke seluruh daerah dan proyek PU. 2. Evaluasi dan penyempurnaan fitur sistem berdasarkan masukan pengguna. 3. Penegakan regulasi dan kebijakan berbasis data digital.	Konsolidasi dan Optimalisasi Berkelanjutan 1. Pemantapan sistem informasi terintegrasi sebagai alat utama perencanaan dan pemeliharaan. 2. Integrasi dengan sistem smart city dan konektivitas antar sektor (transportasi, energi, dll). 3. Pengawasan capaian kinerja dan dampak terhadap efisiensi pembangunan infrastruktur
		Penataan Struktur dan Regulasi 1. Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan bidang infrastruktur. 2. Revisi atau penyusunan regulasi tata kelola yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas. 3. Penetapan indikator kinerja kelembagaan dan mekanisme pengawasan berbasis data	Penguatan Kapasitas SDM dan Sistem Pengelolaan 1. Pelatihan manajerial dan teknis bagi aparatur pelaksana infrastruktur. 2. Implementasi sistem manajemen proyek dan pengadaan berbasis digital. 3. Penyusunan pedoman operasional standar (SOP) yang adaptif dan responsif	Integrasi dan Harmonisasi Tata Kelola 1. Integrasi kebijakan dan program antar level pemerintahan (pusat-daerah). 2. Penyelarasan sistem pengendalian dan pelaporan berbasis akuntabilitas kinerja. 3. Pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan pelibatan pemangku kepentingan	Evaluasi dan Penguatan Mekanisme Adaptif 1. Review efektivitas kelembagaan dan tata kelola terhadap dinamika pembangunan. 2. Penyesuaian struktur kelembagaan untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan infrastruktur. 3. Pembentukan unit khusus inovasi dan respon cepat	Konsolidasi Tata Kelola Modern dan Berkelanjutan 1. Penguatan kelembagaan sebagai pusat keunggulan pembangunan infrastruktur. 2. Pengembangan kebijakan berbasis evidence (data dan hasil evaluasi). 3. Penetapan sistem insentif dan reward bagi kelembagaan berkinerja tinggi.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
Tujuan 4 : Terwujudnya Bali Sebagai Pulau Digital yang Inovatif dan Terintegrasi	**Sasaran 1 :** Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital Berbasis Inovasi	Penyusunan dan penetapan Masterplan *Smart Province*	Penyusunan dan penetapan *Roadmap* Inovasi *Smart Province* Perangkat Daerah	Penyususnan *Roadmap* Inovasi *Smart City* Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Penguatan *Smart Province*	Sosilasisasi dan Penguatan *Smart Province*
		Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi	Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi	Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi	Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi	Pengembangan wifi gratis pada fasilitas umum kewenangan provinsi
		Perluasan cakupan Transmisi digital	Perluasan cakupan Transmisi digital	Perluasan cakupan Transmisi digital	Perluasan cakupan Transmisi digital	Perluasan cakupan Transmisi digital
		Penguatan keamanan Sistem Elektronik	Penguatan keamanan Sistem Elektronik	Penguatan keamanan Sistem Elektronik	Penguatan keamanan Sistem Elektronik	Penguatan keamanan Sistem Elektronik
		Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital)	Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital)	Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital)	Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital)	Literasi Digital (sosialisasi 4 Pilar untuk masyarakat Bali Cakap Digital)
		1. Penyelenggaraan Bali Digital Festival 2. Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali 3. Penyelenggaraan statistik sektoral daerah 4. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi dan Pengaduan Publik 5. Penguatan KIM (Komunitas Informasi Masyarakat) 6. Monitoring Isu Publik	1. Penyelenggaraan Bali Digital Festival 2. Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali 3. Penyelenggaraan statistik sektoral daerah 4. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi dan Pengaduan Publik 5. Penguatan KIM (Komunitas Informasi Masyarakat) 6. Monitoring Isu Publik	1. Penyelenggaraan Bali Digital Festival 2. Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali 3. Penyelenggaraan statistik sektoral daerah 4. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi dan Pengaduan Publik 5. Penguatan KIM (Komunitas Informasi Masyarakat) 6. Monitoring Isu Publik	1. Penyelenggaraan Bali Digital Festival 2. Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali 3. Penyelenggaraan statistik sektoral daerah 4. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi dan Pengaduan Publik 5. Penguatan KIM (Komunitas Informasi Masyarakat) 6. Monitoring Isu Publik	1. Penyelenggaraan Bali Digital Festival 2. Pengembangan sistem terkait adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali 3. Penyelenggaraan statistik sektoral daerah 4. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi dan Pengaduan Publik 5. Penguatan KIM (Komunitas Informasi Masyarakat) 6. Monitoring Isu Publik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
Tujuan 5: Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan dengan Bali Mandiri Energi Bersih	**Sasaran 1**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya mineral	Melaksanakan pemantauan perlindungan pengamanan hutan	Menyelesaikan konflik tata batas kawasan hutan	Pengembangan kerja sama pemanfaatan kawasan hutan	Pengelolaan berkelanjutan dengan skema Hutan Desa	Pengelolaan berkelanjutan dengan skema Hutan Desa
		Melaksanakan koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan bersama tim terpadu penanganan kerusakan ekosistem Danau, Mata Air, Sungai dan Laut serta Gunung	Identifikasi hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi	Memperluas implementasi rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan stakeholder	Melaksanakan Pengawasan evaluasi pelaksanaan RHL	Melaksanakan Pengawasan evaluasi pelaksanaan RHL
		Melaksanakan pemetaan berbagai potensi pengembangan kawasan hutan	Pembinaan pendampingan masyarakat lokal	Pengembangan objek wisata baru pada kawasan hutan	Melaksanakan promosi	Melaksanakan promosi
		Implementasi Surat Edaran Sekretaris Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2028 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan melaksanakan Tim Percepatan Penggunaan Plastik Sekali Pakai	Kampanye dan edukasi Gerakan Bali Bersih Sampah oleh seluruh elemen masyarakat	Pengembangan alternatif penggunaan tas dan wadah dari bahan lokal dan pengembangan bahan kemasan yang ramah lingkungan	Pengawasan dan evaluasi seluruh kantor, instansi, horeka dan pusat perbelanjaan	Penerapan sanksi di seluruh kantor, instansi, horeka dan pusat perbelanjaan
		Implementasi Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah dengan melaksanakan tugas Tim Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang telah dibentuk	Melaksanakan sosialisasi, edukasi, workshop, pelatihan, pendampingan dan peraturan desa dalam pengelolaan sampah di Desa/Desa Adat/Kelurahan dan komunitas	Melengkapi sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah	Pemanfaatan sampah yang telah terpilah secara berkelanjutan	Evaluasi pelaksanaan kegiatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali	Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali	Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Badung Provinsi Bali	Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Jembrana dan Tabanan Provinsi Bali	Melakukan eksplorasi dan pemetaan geologi terkait Neraca Sumber Daya Mineral di Kabupaten Gianyar, Klungkung dan Bangli Provinsi Bali
		Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB).	Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB).	Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB).	Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB).	Bersinergi dengan KESDM, OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan mendorong kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan (berizin dan membayar pajak MBLB).
	Sasaran 2: Meningkatnya Pemanfaatan Energi dan Berkelanjutan	▪ Mengkoordinasikan sekaligus mendorong pembangunan pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar ramah lingkungan ▪ Berkoordinasi dengan PLN terhadap pembangunan PLTB 10 MW + BESS 7,5 MW ▪ Berkoordinasi dengan PLN terkait dengan pembangunan PLTS Nusa Penida 4,5 MW + BESS 4,5 MW ▪ Mendorong PLN untuk PLTS Bali tersebar 197,73 MW	▪ Terus mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap), untuk perkantoran, perumahan, hotel, pasar swalayan, dan penerangan jalan umum serta fasilitas umum ▪ Mendorong pemanfaatan PLTS Tersebar 25 MW ▪ Mendorong pemanfaatan PLTS oleh Kepco 3,5 MW ▪ Mendorong PLTS Bali tersebar 193,66 MW	▪ Menjadikan pasokan energi (Kabel Laut/SKLT) sebagai cadangan (*reserve sharing*) ▪ Mendorong pemanfaatan PLTS tersebar 25 MW ▪ Berkoordinasi dengan PLN terkait pembangunan PLTMH Tamblang 1,4 MW	▪ Mengembangkan program transportasi berbasis energi bersih, seperti penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan infrastruktur serta pengelolaan limbah baterainya ▪ Mendorong pemanfaatan PLTS Tersebar 25 MW ▪ Berkoordinasi dengan PLN terkait penambahan pembangkit 200 MW ▪ *PLTMH Sidan 0,7 MW	▪ Mengkoordinasikan konversi pembangkit listrik berbahan bakar fosil menjadi pembangkit listrik ramah lingkungan ▪ Mendorong pemanfaatan PLTS Tersebar 25 MW ▪ Berkoordinasi dengan PLN terkait penambahan pembangkit 200 MW

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		▪ Berkoordinasi dengan PLN terkait pemanfaatan POC *Smart* PVR 9 MW ▪ Melakukan kaji ulang terhadap RUED dan RUKD	▪ Menyusun RUED dan RUKD			
		▪ Melaksanakan strategi untuk mendorong adopsi solar atap yang masif ▪ Mendorong penggunaan PLTS Atap sebagai salah satu persyaratan dalam PBG baru ▪ Pemasangan PLTS Atap sebesar 14.443 kWP ▪ Berkoordinasi dengan PLN terkait pemanfaatan POC *Smart* PVR 9 MW	▪ Mendorong investasi pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Energi Baru Terbarukan ▪ Sosialisasi dalam rangka peningkatan pemanfaatan PLTS Atap di Bali	▪ Mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap), untuk perkantoran, perumahan, hotel, pasar swalayan, dan penerangan jalan umum serta fasilitas umum	Sosialisasi dalam rangka peningkatan pemanfaatan PLTS Atap di Bali	Mendorong masyarakat dalam penggunaan energi listrik secara efisien untuk berbagai kebutuhan rumah tangga dan industri guna mendukung penurunan emisi karbon
		▪ Mendorong penggunaan PLTS Atap sebagai salah satu persyaratan dalam PBG baru ▪ Mendorong peningkatan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU penggunaan sepeda motor listrik	Mengembangkan program transportasi berbasis energi bersih, seperti penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan infrastruktur serta pengelolaan limbah baterainya	*Sertifikasi Desa Wisata Hijau, **Expo - Touring - Event - Festival* dalam rangka Transisi Energi	Mendorong pemanfaatan lahan krisis di Bali untuk investasi pembangunan PLTS dan danau di Bali untuk PLTS Terapung	Mendorong pemanfaatan lahan krisis di Bali untuk investasi pembangunan PLTS dan danau di Bali untuk PLTS Terapung

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		▪ Melaksanakan strategi untuk mendorong adopsi solar atap yang masif untuk segmen yang berbeda ▪ Mendorong Rasio EBT 18,32%	▪ Optimalisasi PLTS skala utilitas dan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) yang sudah ada ▪ Mendorong Rasio EBT 25,33%	▪ Pengembangan kawasan untuk tanaman biomassa untuk pembangkit listrik biomassa ▪ Mendorong Rasio EBT 23,29%	▪ Pengakhiran Masa Kerja PLTD, Implementasi ET 100% dengan *load shifting* dan integrasi sistem penyimpanan energi (*Energy Storage System* - ESS) ▪ Mendorong Rasio EBT 18,32%	▪ Pengakhiran Masa Kerja PLTD, Implementasi ET 100% dengan *load shifting* dan integrasi sistem penyimpanan energi (*Energy Storage System* - ESS) ▪ Mendorong Rasio EBT 18,32%
Tujuan 6: Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Keharmonisan Sosial di Masyarakat	**Sasaran 1**: Terjaganya Ketenteraman dan Ketertiban dalam Masyarakat	Menyusun dan menetapkan Regulasi Sistem Layanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat Berbasis Digital	Membangun sistem Layanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat Berbasis Digital	Pengembangan Sistem Layanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat berbasis digital	Mengintegrasikan sistem Layanan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat Berbasis Digital	Terselenggaranya Bali *Trepti* (Tertib, Tenteram, Aman dan Nyaman)
		1. Menyusun dan menetapkan PKS (perjanjian kerja sama) lintas sektor dan antar daerah 2. Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan *stakeholder* terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah	1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mendukung pemantapan pengamanan pada lokasi strategis, Pura *Kahyangan Jagat*, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian. 2. Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan *stakeholder* terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah	1. mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan pada lokasi strategis, Pura *Kahyangan Jagat*, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian. 2. Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan *stakeholder* terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah	1. Mengembangkan pelaksanaan pengamanan pada lokasi strategis, Pura *Kahyangan Jagat*, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian. 2. Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan *stakeholder* terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah	1. Terselenggaranya pengamanan pada lokasi strategis, Pura *Kahyangan Jagat*, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian. 2. Mengintensifkan informasi intelijen dengan meningkatkan sinergi dengan *stakeholder* terkait melalui pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini di daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		1. membangun sinergi dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat 2. Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat.	1. Peningkatan kapasitas satuan pelindungan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat 2. Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat.	1. Mengoptimalkan kapasitas Satuan pelindungan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat 2. Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat.	1. Kolaborasi satuan pelindungan masyarakat dengan Pihak Terkait untuk meningkatkan keaman an oleh Negara dan Sipandu Beradat 2. Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat.	1. Terselenggaranya keamanan oleh Negara dan satuan pelindungan masyarakat sebagai unsur Sipandu Beradat 2. Mengintensifkan pelaksanaan tugas Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Fasilitasi pemantauan orang asing untuk meningkatkan keamanan di yang bersinergi dengan Sipandu Beradat
		1. Membangun sarana dan prasarana serta Menyiapkan SDM untuk mendukung penyelenggaraan keamanan berbasis digital (bidang 3) 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini	1. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung penyelenggaraan keamanan berbasis digital 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini	1. Mengintegrasikan serta mengkoneksikan seluruh perangkat dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan berbasis digital 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini	1. Mengoptimalkan operasional layanan penyelenggaraan keamanan berbasis digital 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini	1. Terselenggaranya sistem layanan Keamanan berbasis digital. 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Intelijen Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		Melaksanakan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali 1. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah. 2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda. 3. Penyusunan Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali 4. Pemutakhiran data Ormas yang sudah tercatat 5. Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali	Kolaborasi dengan pihak terkait dalam optimalisasi menumbuh kan kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali 1. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah. 2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda. 3. Sosialisasi Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali 4. Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Ormas yang sudah tercatat. 5. Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali	Optimalisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali 1. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah. 2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda. 3. Pelaksanaan Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali 4. Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Ormas yang sudah tercatat. 5. Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali	Mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan berbagai media untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali 1. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah. 2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda. 3. Pelaksanaan Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali dengan melibatkan berbagai Stakeholder terkait. 4. Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Ormas yang sudah tercatat 5. Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali	Terbangunnya kesadaran Masyarakat dan wisatawan dalam menjaga keamanan Bali 1. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini di daerah. 2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di daerah melalui pelaksanaan Bulan Bung Karno dan kegiatan Sosialisasi ke generasi muda. 3. Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah P4GN di Provinsi Bali 4. Pembinaan, Pengawasan dan pelaporan Ormas yang sudah tercatat 5. Peningkatan Peran FKUB di Tingkat Provinsi dalam moderasi beragama serta mendukung program Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Tempat Ibadah di Provinsi Bali

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		Menyediakan layanan pengaduan masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan 1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem. 2. Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota	Mengintegrasikan layanan pengaduan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah bali melalui *Command Centre* Bali *Trepti* 1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem. 2. Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota	Membangun sinergitas Melalui perjanjian kerja sama lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan keamanan diseluruh wilayah bali 1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem. 2. Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota	Mengembangkan dan mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat terintegrasi dalam rangka penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah bali 1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem. 2. Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan 1. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Pengintegrasian Sistem. 2. Pelaksanaan Forkopimda Provinsi Bali dan bersinergi dengan Forkopimda Kabupaten/Kota
	Sasaran 2: Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	1. Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana 2. Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor, 3. Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana	1. Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana, 2. Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor, 3. Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana	1. Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana, 2. Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor, 3. Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana	1. Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana, 2. Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor, 3. Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana	1. Penyusunan dan Peninjauan kembali dokumen perencanaan penanggulangan bencana, 2. Kolaborasi penanggulangan bencana multi sektor, 3. Pengembangan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
	Sasaran 3: Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat	1. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak untuk perbaikan pelaksanaan PILKADA di masa depan 2. Melaksanakan pendidikan politik yang lebih masif dengan menyasar daerah dengan partisipasi rendah. 3. Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader	1. Merencanakan pengembangan sistem informasi pendidikan politik yang mandiri dan bermanfaat 2. Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader	1. Pengembangan sistem informasi pendidikan politik yang terkait Substansi dan materi. 2. Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader	1. Pelaksanaan sistem informasi pendidikan politik yang mandiri, kredibel dan bermanfaat 2. Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader	1. Evaluasi penerapan sistem informasi pendidikan politik yang mandiri, kredibel dan bermanfaat 2. Meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi kader
Tujuan 7: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	**Sasaran 1**: Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kewajiban Pengembangan Kompetensi untuk seluruh ASN	Pemenuhan Kewajiban Pengembangan Kompetensi untuk seluruh ASN	Pemenuhan Kewajiban Pengembangan Kompetensi untuk seluruh ASN	Pemenuhan Kewajiban Pengembangan Kompetensi untuk seluruh ASN	Pemenuhan Kewajiban Pengembangan Kompetensi untuk seluruh ASN
		Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN
		Penyempurnaan konseptual, meliputi evaluasi sistem eksisting	Pengembangan dan Integrasi antar aplikasi terkait dengan sistem eksisting	Pemantauan, evaluasi dan pengembangan lanjutan	*Coaching clinic*, monitoring dan evaluasi serta penguatan helpdesk system evaluasi kinerja Coaching clinic, monitoring dan evaluasi serta penguatan helpdesk sistem evaluasi	*Coaching clinic*, monitoring dan evaluasi serta Penguatan helpdesk system evaluasi kinerja Coaching clinic, monitoring dan evaluasi serta penguatan helpdesk sistem evaluasi
		Pengolahan data penganggaran dan pelaksanaan sinkronisasi antara perencanaan dan evaluasi	Pengembangan dan integrasi dengan sistem eksisting	Pemantauan dan Pengawasan evaluasi pelaksanaan	Pengembangan dan Pengawasan serta Evaluasi lanjutan	Pengembangan dan Pengawasan serta Evaluasi lanjutan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Pengumpulan dan Pengolahan Data yang akurat	Fokus pada Hasil Kinerja (berorientasi hasil)	Peninjauan Kembali dan Evaluasi	Transparansi dan Akuntabilitas	Transparansi dan Akuntabilitas
		1. Memperkuat basis data potensi PAD melalui integrasi sistem informasi pajak dan retribusi daerah. 2. Melakukan intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang sudah ada secara optimal. 3. Menyusun roadmap pengembangan sumber-sumber PAD baru berbasis ekonomi hijau, ekonomi kreatif, dan pariwisata berkelanjutan. 4. Melakukan penguatan tata kelola BUMD dan membentuk BUMD baru untuk meningkatkan PAD.	1. Implementasi tahap awal pengembangan sumber PAD baru, seperti pajak daerah berbasis aktivitas ekonomi digital, pariwisata minat khusus, dan green tax. 2. Memperkuat sistem pengawasan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi digital. 3. Memulai reformasi pengelolaan BUMD: restrukturisasi model bisnis dan peningkatan kompetensi SDM BUMD dan membentuk BUMD baru untuk meningkatkan PAD. 4. Meningkatkan sinergi pemungutan pajak provinsi dan kabupaten/kota untuk mengurangi kebocoran.	1. Melakukan ekspansi ekstensifikasi sumber-sumber PAD baru berbasis ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan *green economy* secara lebih luas. 2. Memperkuat pengembangan pendapatan melalui pengelolaan aset daerah yang lebih produktif. 3. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD melalui penguatan bisnis baru yang adaptif terhadap pasar dan membentuk BUMD baru. 4. Mendorong efisiensi belanja daerah agar kemandirian fiskal semakin berkualitas, bukan hanya kuantitatif.	1. Melakukan optimalisasi semua sumber PAD dengan mendorong inovasi model pemungutan yang ramah layanan publik. 2. Memperkuat kemitraan strategis BUMD dengan sektor swasta dan UMKM untuk penguatan kinerja BUMD dan membentuk BUMD baru. 3. Memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan transfer pusat berbasis kinerja daerah. 4. Mendorong penguatan tata kelola fiskal daerah berorientasi *value for money*.	1. Mencapai optimalisasi kemandirian fiskal dengan struktur PAD yang semakin seimbang antara pajak tradisional dan sumber-sumber PAD baru. 2. Mewujudkan BUMD sebagai kontributor utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal provinsi. 3. Menyempurnakan sistem tata kelola fiskal daerah yang adaptif, transparan, akuntabel, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. 4. Menyusun kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang untuk menjaga kemandirian fiskal yang berkesinambungan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		▪ Pemetaan dan integrasi seluruh layanan publik provinsi dan kabupaten/kota dalam satu peta jalan digitalisasi pelayanan publik. ▪ Audit dan konsolidasi sistem informasi OPD yang tumpang tindih atau belum terintegrasi. ▪ Penyusunan arsitektur sistem layanan digital terpadu (GovTech Bali). ▪ Penguatan infrastruktur jaringan, pusat data, dan keamanan siber. ▪ Pengembangan regulasi perlindungan data pribadi dan interoperabilitas layanan publik digital. ▪ Inisiasi basis data induk pelayanan publik (terhubung dengan NIK dan OSS daerah).	▪ Pengembangan dashboard layanan publik terpadu berbasis *big data*: pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kependudukan, izin, dan pajak. ▪ Penguatan data *analytic unit* di masing-masing OPD dengan pelatihan data science dasar. ▪ Uji coba penerapan AI sederhana untuk pemetaan kebutuhan layanan publik (misal prediksi lonjakan permintaan layanan). ▪ Penerapan *single sign-on* (SSO) untuk akses seluruh layanan publik daring daerah. ▪ Pelatihan ASN dalam bidang big data governance, pengambilan keputusan berbasis data, dan AI publik.	▪ Penerapan layanan publik otomatis berbasis AI dan *machine learning* (misalnya chatbot izin usaha, notifikasi layanan, klasifikasi aduan publik). ▪ Integrasi sistem pengambilan keputusan berbasis AI untuk sektor tertentu (misal prediksi kemiskinan, penyaluran bantuan, beban layanan rumah sakit). ▪ Pengembangan sistem AI deteksi kebutuhan darurat atau respons cepat (misal analisis banjir, penyakit, kemacetan). ▪ Interoperabilitas sistem lintas sektor melalui API layanan publik daerah. ▪ Monitoring *real-time* layanan publik berbasis sistem sensor dan data *spasial*.	▪ Implementasi model layanan publik presisi (*precision public service*) berdasarkan profil warga (umur, domisili, pekerjaan, kebutuhan layanan). ▪ Penguatan algoritma AI untuk pengambilan keputusan dalam sistem pelayanan adaptif (misal pengalokasian bantuan, pendidikan vokasi). ▪ Evaluasi berkala sistem berbasis feedback otomatis dari pengguna untuk peningkatan layanan secara agile. ▪ Kolaborasi dengan startup dan universitas dalam inkubasi inovasi layanan publik digital dan AI.	▪ Pelembagaan *Smart Province* Bali dengan standar keamanan, transparansi, dan etika AI. ▪ Pengembangan AI etis dan akuntabel dalam kebijakan publik melalui regulasi lokal dan sistem evaluasi risiko teknologi. ▪ Penetapan indeks layanan publik digital berbasis kepuasan pengguna dan efisiensi waktu-biaya. ▪ Transformasi layanan publik menjadi platform digital terbuka dengan ekosistem partisipatif (masyarakat, desa adat, swasta). ▪ Integrasi sistem dengan *smart city/ smart regency* di seluruh kabupaten/kota di Bali.
		▪ Pemetaan kapasitas ASN secara menyeluruh melalui assessment kompetensi dan indeks kinerja layanan publik.	▪ Penyesuaian kurikulum pelatihan teknis ASN berbasis kompetensi layanan dan inovasi publik. ▪ Penilaian kinerja ASN berdasarkan output	▪ Penguatan sistem merit dalam rekrutmen, rotasi, dan promosi ASN secara transparan dan berbasis kinerja nyata.	▪ Penerapan Indeks Profesionalisme ASN yang mengukur kinerja layanan berbasis data dan feedback masyarakat.	▪ Pelembagaan "Pusat Kompetensi dan Etika ASN Bali" sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		▪ Penyusunan dan pelaksanaan kode etik pelayanan publik berbasis budaya kerja Bali (*Sad Kerthi*). ▪ Pelatihan dasar dan lanjutan tentang etika pelayanan publik, komunikasi empatik, dan anti-korupsi. ▪ Penerapan sistem absensi dan evaluasi kinerja berbasis integritas dan akuntabilitas. ▪ Peluncuran program internal "ASN Melayani dengan Hati" sebagai gerakan budaya kerja pelayanan prima.	layanan dan kepuasan masyarakat, bukan sekadar kehadiran. ▪ Implementasi pelatihan *blended learning* (daring-luring) berbasis kebutuhan aktual tiap OPD. ▪ Pembentukan fasilitator internal/mentor ASN teladan di tiap instansi untuk berbagi praktik baik layanan publik. ▪ Pelatihan manajemen keluhan dan penanganan cepat aduan masyarakat secara profesional	▪ Penetapan standar kompetensi jabatan layanan publik berbasis digital dan *customer experience*. ▪ Peluncuran platform karier ASN Bali yang terbuka, informatif, dan akuntabel. ▪ Pengembangan talent pool ASN unggulan untuk kebutuhan pimpinan masa depan. ▪ Pelatihan kepemimpinan strategis bagi ASN muda untuk mendorong inovasi di lini pelayanan.	▪ Audit mutu layanan publik secara berkala (*mystery shopper*, survei kepuasan). ▪ Penyempurnaan digital dashboard monitoring kinerja layanan ASN lintas sektor dan instansi. ▪ Penguatan Sistem Penghargaan dan Disinsentif ASN berbasis kinerja layanan dan pengaduan masyarakat. ▪ Penegakan disiplin dan kode etik ASN secara tegas namun berkeadilan.	▪ Adopsi standar global layanan publik prima (ISO, CAF) dalam manajemen ASN dan organisasi. ▪ Integrasi budaya kerja ASN ke dalam pembangunan karakter Bali era digital (*Sad Kerthi* Digital ASN). ▪ Penetapan Bali sebagai Provinsi Teladan Reformasi ASN Berbasis Pelayanan di tingkat nasional. ▪ Konsolidasi regulasi dan sistem untuk menjaga keberlanjutan profesionalisme aparatur dalam jangka panjang.
		▪ Audit dan konsolidasi data sektoral dan *spasial* dari seluruh PD, termasuk integrasi dengan data BPS dan desa adat. ▪ Penguatan SDM perencana melalui pelatihan statistik pembangunan, analisis *spasial*, dan manajemen data. ▪ Pengembangan Forum Koordinasi Data Perencanaan Daerah lintas PD dan kabupaten/kota.	▪ Pelibatan aktif akademisi, komunitas, dan pelaku usaha dalam penilaian isu strategis pembangunan. ▪ Penguatan peran desa adat dan kecamatan dalam menyampaikan isu lokal dan aspirasi dalam RKPD. ▪ Penetapan protokol koordinasi lintas sektor dan antar level pemerintahan dalam penyusunan dokumen perencanaan.	▪ Pengembangan model perencanaan tematik-*spasial* (misal: perencanaan kawasan agrowisata atau wilayah rawan bencana). ▪ Penyusunan template standar dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan data dan indikator kinerja.	▪ Pelaksanaan perencanaan terpadu lintas sektor berbasis dokumen tematik (pangan, stunting, infrastruktur hijau). ▪ Evaluasi pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui. ▪ Implementasi rapat koordinasi tahunan perencanaan terintegrasi Provinsi–Kabupaten/Kota berbasis kinerja.	▪ Pelembagaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah Bali Terintegrasi (SIPD-Bali) berbasis *spasial*-statistik dan partisipatif. ▪ Revisi total kerangka perencanaan ke dalam format berbasis hasil, risiko, dan keberlanjutan. ▪ Penetapan standar nasional/percontohan Bali sebagai provinsi dengan praktik terbaik perencanaan inklusif dan berbasis data.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
				▪ Penilaian kualitas dokumen RKPD berdasarkan indikator komprehensifitas data, partisipasi, dan akurasi kebijakan.	▪ Integrasi evaluasi kinerja dokumen perencanaan dengan insentif fiskal berbasis capaian RPJMD.	▪ Penyusunan dokumen perencanaan berbasis data, *foresight*, dan partisipasi lintas generasi. ▪ Konsolidasi regulasi dan kelembagaan perencanaan untuk kesinambungan sistem lintas periode pemerintahan.
		▪ Identifikasi dan evaluasi regulasi daerah yang tumpang tindih, tidak implementatif, atau bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. ▪ Pembentukan Tim Harmonisasi dan Evaluasi Regulasi Daerah lintas perangkat daerah dan lembaga pendukung DPRD. ▪ Pelatihan teknis bagi perancang peraturan perundang-undangan tentang penyusunan naskah akademik, RIA, dan pemetaan regulasi. ▪ Penguatan mekanisme konsultasi publik dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah	▪ Penerapan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) secara pilot pada Raperda strategis (misalnya perda tata ruang, investasi, pariwisata). ▪ Pengembangan Sistem Informasi Regulasi Daerah untuk menyimpan, meninjau, dan mengintegrasikan regulasi lintas sektor. ▪ Penguatan peran akademisi dan ahli hukum tata negara dalam penyusunan naskah akademik dan justifikasi regulasi. ▪ Penataan perencanaan program legislasi daerah (Prolegda) secara terbuka, berbasis urgensi dan keterhubungan dengan RPJMD/RKP. ▪ Penandatanganan pakta kerja sama	▪ Digitalisasi seluruh proses legislasi daerah mulai dari penyusunan, konsultasi publik, pembahasan hingga evaluasi efektivitas. ▪ Pengembangan indeks harmonisasi dan efektivitas regulasi daerah untuk mengukur kualitas implementasi. ▪ Pelibatan pelaku usaha, komunitas adat, dan organisasi masyarakat sipil dalam RIA untuk memastikan keterhubungan dengan kebutuhan riil. ▪ Implementasi mekanisme evaluasi pasca-regulasi (*post legislative scrutiny*) terhadap Perda eksisting. ▪ Penyesuaian regulasi daerah terhadap	▪ Integrasi proses legislasi dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJMD-RKPD-Prolegda). ▪ Evaluasi regulasi berdasarkan dampaknya terhadap investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan sosial. ▪ Pengembangan dashboard pemantauan pelaksanaan Perda dan outputnya terhadap masyarakat dan dunia usaha. ▪ Penetapan mekanisme perencanaan regulasi berbasis hasil (*outcome-based legal planning*). ▪ Replikasi praktik baik dari kabupaten/kota lain terkait perencanaan regulasi dan koordinasi legislatif-eksekutif.	▪ Pelembagaan Unit Regulasi Adaptif Daerah di bawah Biro Hukum atau Bagian Hukum Provinsi/Kabupaten. ▪ Revisi menyeluruh terhadap regulasi prioritas berbasis evaluasi 5 tahunan dan foresight isu-isu masa depan. ▪ Konsolidasi regulasi tematik untuk menciptakan regulasi yang ramping, efisien, dan tidak saling bertentangan. ▪ Penetapan standar penyusunan dan harmonisasi regulasi daerah Provinsi Bali sebagai model nasional. ▪ Penyusunan dokumen Strategi Legislasi Daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
			eksekutif–legislatif untuk perencanaan regulasi berbasis sinergi dan *evidence-based*.	kebijakan nasional prioritas seperti digitalisasi, lingkungan hidup, dan pelayanan publik.		
		▪ Penyusunan Pedoman Audit Regulasi Daerah (ARD) sesuai kaidah evaluasi peraturan perundang-undangan. ▪ Identifikasi awal regulasi daerah yang berdampak signifikan terhadap: 1. Investasi 2. Pelayanan publik 3. Lingkungan hidup 4. Ketahanan sosial-budaya ▪ Pembentukan Tim Audit Regulasi Daerah lintas sektor melibatkan Biro Hukum, Bappeda, DPMPTSP, dan PD teknis. ▪ Pelatihan SDM audit regulasi: analisis regulasi, harmonisasi, dan *regulatory simplification*. ▪ Penetapan prioritas evaluasi Perda/Perkada berdasarkan urgensi dan dampaknya.	▪ Pelaksanaan Audit Regulasi Tahap I untuk bidang strategis seperti perizinan, investasi, dan tata ruang. ▪ Pemetaan regulasi tumpang tindih secara horizontal dan vertikal (antar PD dan dengan kebijakan nasional). ▪ Pembuatan Matriks Deregulasi yang berisi rekomendasi: 1. Dicabut 2. Direvisi 3. Diharmonisasi 4. Digabung ▪ Pengembangan dashboard digital pemetaan regulasi (live map regulasi daerah). ▪ Konsultasi publik awal dengan dunia usaha, desa adat, dan masyarakat sipil terkait hasil audit.	▪ Pencabutan atau revisi regulasi daerah hasil audit dengan dampak tinggi terhadap dunia usaha dan layanan dasar. ▪ Integrasi hasil audit ke dalam penyusunan Prolegda berbasis harmonisasi dan simpilifikasi. ▪ Evaluasi ulang regulasi teknis (Perkada/Perbup) yang menjadi hambatan administratif pelayanan. ▪ Penyusunan Laporan Kinerja Deregulasi Daerah secara publik dan transparan.	▪ Pelaksanaan audit lanjutan (Tahap II) untuk sektor layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur). ▪ Evaluasi dampak deregulasi terhadap: 1. Waktu dan biaya layanan publik 2. Jumlah investasi yang masuk 3. Kepuasan masyarakat dan pelaku usaha ▪ Penguatan peran Biro Hukum dan DPMPTSP sebagai simpul deregulasi berkelanjutan. ▪ Integrasi indikator kualitas regulasi daerah ke dalam sistem evaluasi kinerja pembangunan. ▪ Pemberian penghargaan bagi PD dan kabupaten/kota yang berhasil melakukan deregulasi berdampak tinggi.	▪ Pelembagaan Sistem Deregulasi Daerah Berbasis Risiko dan Dampak (*risk & impact-based deregulation*). ▪ Penetapan Prosedur Evaluasi Reguler Perda/Perkada setiap 3–5 tahun berbasis siklus pembangunan daerah. ▪ Integrasi regulasi daerah ke dalam sistem OSS dan *smart regulation* platform. ▪ Penerbitan Laporan Deregulasi Provinsi Bali sebagai dokumen strategis tahunan yang terbuka untuk publik.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		▪ Pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM perancang peraturan perundang-undangan dan analis kebijakan di daerah. ▪ Penyusunan kurikulum pelatihan perancang regulasi dan analisis dampak regulasi (RIA) berbasis hukum tata negara dan prinsip *good governance*. ▪ Pelatihan teknis dasar: 1. Penyusunan naskah akademik dan Raperda 2. Prinsip konsistensi norma hukum dan asas pembentukan peraturan ▪ Penguatan etika legislasi dan nilai-nilai pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, partisipasi). ▪ Pembentukan jejaring perancang regulasi daerah antar provinsi dan kabupaten/kota.	▪ Pelaksanaan sertifikasi teknis legislasi dan RIA bagi ASN di Biro Hukum, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat DPRD. ▪ Pembentukan Tim Teknis Legislasi dan Evaluasi Peraturan lintas PD (legal drafter, analis kebijakan, ekonom, akademisi). ▪ Peningkatan kapasitas penyusunan regulasi berbasis hasil evaluasi pembangunan (*evidence-based legal drafting*). ▪ Penguatan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari regulasi tidak sinkron atau tidak implementatif. ▪ Pengembangan modul daring dan aplikasi pelatihan legislasi interaktif berbasis kasus-kasus lokal.	▪ Pelatihan lanjutan tentang: 1. Simulasi penyusunan Raperda lengkap dengan RIA dan public hearing 2. Kajian harmonisasi vertikal dan horizontal 3. Penilaian kelayakan regulasi dari sisi biaya-manfaat sosial ▪ Penguatan peran SDM hukum dalam evaluasi dan deregulasi regulasi eksisting. ▪ Kemitraan dengan fakultas hukum, lembaga riset, dan pusat studi kebijakan publik. ▪ Penyusunan prototipe kebijakan daerah inklusif dan partisipatif sebagai model praktik legislasi adaptif.	▪ Penilaian berkala atas kompetensi legislasi ASN, termasuk pembaruan kompetensi legal drafting dan RIA. ▪ Implementasi evaluasi kinerja individu dan tim dalam proses legislasi berbasis output dan kualitas dokumen. ▪ Integrasi sistem pembinaan, promosi, dan rotasi jabatan hukum berdasarkan spesialisasi legislasi. ▪ Penguatan forum diskusi lintas OPD dan DPRD untuk penguatan sinergi perumusan peraturan daerah. ▪ Penerbitan laporan kinerja kelembagaan legislasi daerah, termasuk capaian pelatihan dan kualitas regulasi.	▪ Pelembagaan Pusat Pembelajaran Legislasi dan Kebijakan Daerah berbasis kemitraan antara pemerintah dan perguruan tinggi. ▪ Penetapan standar kompetensi SDM legislasi dan RIA sebagai acuan pengembangan karier fungsional.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PEMBANGUNAN				
		STRATEGI I (2026)	**STRATEGI II (2027)**	**STRATEGI III (2028)**	**STRATEGI IV (2029)**	**STRATEGI V (2030)**
		1. Pendataan Hasil Riset dan Inovasi yang akan dikerjasamakan dengan akademisi, industri dan pemerintah dalam pengembangan ekosistem inovasi 2. Fasilitasi Pendaftaran KI baik komunal maupun personal	1. Penyiapan Kerja Sama dengan akademisi, industri dan pemerintah dalam pengembangan ekosistem inovasi 2. Fasilitasi Pendaftaran KI baik komunal maupun personal	1. Implementasi kerja sama pengembangan inovasi dengan akademisi, industri, dan pemerintah 2. Fasilitasi Pendaftaran KI baik komunal maupun personal	1. Pengawasan dan Evaluasi kerja sama pengembangan inovasi dengan akademisi, industri, dan pemerintah 2. Fasilitasi dan Pengawasan serta Evaluasi Pendaftaran KI baik komunal maupun personal	1. Pengawasan dan Evaluasi serta Pengembangan kerja sama inovasi dengan akademisi, industri, dan pemerintah 2. Fasilitasi serta Pengawasan dan Evaluasi Dampak KI bagi masyarakat
		Pendataan Kerja sama dengan PT dalam pengembangan riset dan inovasi	Penyempurnaan Pedoman Kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pengembangan riset dan inovasi	Implementasi Pelaksanaan Kerja sama dalam pengembangan riset dan inovasi	Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama dalam Pengembangan riset dan inovasi	Pengawasan dan Evaluasi dan Pengembangan Pelaksanaan Kerja sama dalam Pengembangan riset dan inovasi

Arah kebijakan pembangunan merupakan pedoman strategis yang digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan program pembangunan agar sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat memiliki panduan yang jelas dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, arah kebijakan pembangunan harus mencerminkan prioritas pembangunan daerah, sejalan dengan kebijakan nasional dan regional, serta memerhatikan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, tata kelola pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup.

Dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman, yaitu:

1. Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat
   Kebijakan pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta akses terhadap layanan dasar yang lebih baik.
2. Berbasis pada Keunggulan Lokal dan Daya Saing Global
   Pengembangan sektor ekonomi unggulan Bali, seperti pariwisata, pertanian, industri kreatif, dan ekonomi hijau, harus didorong agar memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional dan global.
3. Berkeadilan dan Inklusif
   Arah kebijakan pembangunan harus memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan daerah tertinggal.
4. Berlandaskan Keberlanjutan dan Ketahanan Lingkungan
   Pembangunan harus menerapkan konsep *green economy*, mengedepankan konservasi lingkungan, serta memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
5. Berbasis Inovasi dan Transformasi Digital
   Kebijakan pembangunan harus mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk digitalisasi layanan publik, ekonomi berbasis teknologi, serta penguatan SDM yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha
   Pembangunan harus melibatkan peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan akademisi, guna menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bali.

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bali

No	Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
1	**Misi 1**: Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara *Niskala-Sakala* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu: *Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi,* dan *Jagat Kerthi*.	▪ Menggali dan melestarikan warisan adiluhung budaya Bali. ▪ Memperkuat dan memajukan Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal. ▪ Mengembangkan tata kehidupan yang harmonis bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi.* ▪ Memperkuat Kelembagaan dan Tata Kelola Desa Adat ▪ Melestarikan pelaku kebudayaan Bali.
2	**Misi 2**: Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan,* dan *Palemahan*	
3	**Misi 3:** Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, membentuk keadaban kehidupan *Krama* Bali.	
4	**Misi 4:** Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.	▪ Meningkatkan akses, jangkauan, pemerataan, dan keadilan layanan kesehatan ▪ Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ▪ Meningkatkan edukasi kesehatan tradisional kepada masyarakat ▪ Mempercepat layanan kesehatan tradisional ▪ Meningkatkan akses, perluasan, pemerataan, dan keadilan layanan pendidikan formal dan nonformal ▪ Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan ▪ Mengembangkan pendidikan karakter, jati diri, dan budi pekerti siswa sesuai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bali. ▪ Keberpihakan secara nyata dengan menyiapkan wahana/ekosistem untuk mengembangkan potensi generasi muda/milenial dan Gen-Z
5	**Misi 5**: Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.	
6	**Misi 6**: Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif,berkualitas, dan berdaya saing tinggi.	
7	**Misi 7**: Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.	
8	**Misi 8**: Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk *Widyalaya* dan *Pasraman* di Desa Adat.	

No	Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
9	**Misi 9**: Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali	▪ Menciptakan harapan dan kesempatan kerja bagi generasi muda/milenial dan Gen-Z ▪ Menyiapkan generasi muda/milenial dan Gen-Z untuk berperan aktif sebagai pelaku utama penentu peradaban masa depan Bali ▪ Memajukan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. ▪ Meningkatkan pencapaian olahraga prestasi dalam event nasional dan internasional ▪ Mengembangkan olahraga sebagai bagian dari strategi pariwisata/pariwisata berbasis olahraga (*sport tourism*) ▪ Membantu fakir miskin, anak terlantar, dan kelompok difabel ▪ Memberi perlindungan tenaga kerja Krama Bali ▪ Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme tenaga kerja Krama Bali ▪ Meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan tenaga kerja Krama Bali ▪ Menurunkan tingkat kemiskinan dengan target angka kemiskinan ekstrem menjadi 0%
10	**Misi 10**: Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional	
11	**Misi 11**: Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan *Krama* Bali	
12	**Misi 12**: Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan *Krama* Bali.	▪ Menuntaskan sistem pertanian organik ▪ Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian ▪ Mengendalikan alih fungsi lahan produktif dan menekan alih fungsi lahan sawah bukan peruntukannya ▪ Memberdayakan lahan tidak produktif/lahan tidur menjadi lahan produktif sesuai potensi alam dengan menerapkan teknologi tepat guna ▪ Melindungi dan memberdayakan wilayah kelautan dan perikanan ▪ Mempercepat hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan perikanan ▪ Meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk pendirian beberapa BUMD seperti BUMD Air, Pangan, Energi, dan Transportasi, serta BUMD lainnya sesuai dengan kajian dan kebutuhan daerah. ▪ Mengidentifikasi dan mengoptimalkan aset daerah yang belum produktif menjadi sumber pendapatan baru ▪ Memberikan kepastian dan keamanan investasi melalui konsistensi penegakan regulasi ▪ Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk UMKM dan Koperasi
13	**Misi 13**: Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi *Kerthi* Bali	
14	**Misi 14**: Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.	
15	**Misi 15**: Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.	
16	**Misi 17:** Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.	

No	Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
		▪ Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk UMKM dan Koperasi ▪ Menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai penopang utama perekonomian Bali ▪ Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Bali ▪ Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk Ekonomi Kreatif dan Digital ▪ Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digital ▪ Menjadikan Ekonomi Kreatif dan Digital sebagai penopang utama perekonomian Bali ▪ Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk industri lokal Bali ▪ Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk industri lokal Bali ▪ Menjadikan produk industri lokal Bali sebagai penopang utama perekonomian Bali ▪ Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing pariwisata Bali ▪ Meningkatkan dan perluasan promosi pariwisata Bali ditingkat nasional dan internasional ▪ Menjadikan Pariwisata sebagai penopang perekonomian Bali
17	**Misi 16**: Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital	▪ Membangun kebijakan Bali Pulau Digital dari hulu sampai hilir ▪ Mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan jangkauan wilayah dan kecepatan internet ▪ Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari ▪ Meningkatkan keterampilan digital masyarakat agar lebih siap mengadopsi teknologi digital untuk kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari ▪ Memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali
18	**Misi 18:** Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan	▪ Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan antar Kota/Kabupaten se-Bali ▪ Membangun infrastruktur jalan baru yang menghubungkan antar Kota/Kabupaten se-Bali ▪ Membangun/mengembangkan pelabuhan/dermaga Bali timur, Bali utara, Bali barat, dan Bali selatan ▪ Mengembangkan kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai

No	Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
		▪ Mengintegrasikan infrastruktur darat, laut, dan udara ▪ Membangun sarana transportasi ramah lingkungan yang menghubungkan wilayah padat penduduk dan pariwisata Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan ▪ Menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas wilayah padat penduduk, jalur pariwisata, dan Pusat perekonomian
19	**Misi 19**: Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.	▪ Menjadikan Bali sebagai Pulau bebas sampah plastik sekali pakai ▪ Membudayakan pengelolaan sampah berbasis Desa/Desa Adat/Kelurahan dan komunitas ▪ Membudayakan pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut secara *Niskala – Sakala* ▪ Meningkatkan luasan hutan melalui penghijauan untuk meningkatkan kualitas udara Bali ▪ Mempercepat penurunan emisi karbon dalam rangka pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) ▪ Melindungi dan merawat hutan di seluruh wilayah Bali ▪ Memberdayakan kawasan hutan sebagai destinasi ekowisata ▪ Mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih ▪ Menjadikan Bali bebas dari polusi untuk mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon/*Net Zero Emission* (NZE) ▪ Menjadikan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) ▪ Melakukan upaya promosi investasi dan promosi dan promosi potensi investasi daerah ▪ Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi investor daerah
20	**Misi 20**: Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih	
21	**Misi 21**: Memperkuat Penyelenggaraan Keamanan Bali Oleh Negara dan Masyarakat Dengan Sistem Keamanan Terpadu.	▪ Mewujudkan rasa aman untuk kehidupan masyarakat Bali dan wisatawan di seluruh wilayah Bali ▪ Memantapkan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian ▪ Memantapkan penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat ▪ Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk

No	Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
22	**Misi 22**: Memantapkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif,Efisien, Transparan, Akuntabel, dan Bersih, serta Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Cepat, Pasti, dan Murah.	mendukung penyelenggaraan keamanan ▪ Membangun kesadaran masyarakat bertanggungjawab bersama menjaga keamanan Bali ▪ Mengintegrasikan penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah Bali ▪ Meningkatkan kesadaran politik generasi muda melalui program diskusi publik, seminar, dan simulasi pemilu di sekolah dan kampus. ▪ Meningkatkan manajemen pengurangan risiko bencana melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi multi sektor ▪ Memastikan sistem pengembangan karier ASN berbasis meritokrasi dan *talent pool*. ▪ Meningkatkan sistem evaluasi kinerja ASN berbasis *outcome* dan teknologi digital. ▪ Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis kinerja. ▪ Menerapkan e-Pengawasan dan e-Evaluasi untuk mengawasi efektivitas program pembangunan daerah. ▪ Meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ▪ Mendorong inovasi teknologi AI dan *big data* dalam analisis serta pengelolaan layanan publik. ▪ Memastikan budaya kerja ASN yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. ▪ Penguatan kualitas dokumen perencanaan dengan memanfaatkan data sektoral, *spasial*, dan statistik daerah secara komprehensif ▪ Peningkatan partisipasi masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan desa adat dalam proses perencanaan pembangunan ▪ Penguatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota) dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan. ▪ Penyusunan regulasi daerah yang berbasis data, kajian akademik, dan analisis dampak regulasi (*regulatory impact assessment*/RIA). ▪ Peningkatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembentukan peraturan daerah.

No	Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
		▪ Pelaksanaan audit regulasi secara berkala untuk mengidentifikasi regulasi yang tumpang tindih, tidak efektif, atau tidak efisien. ▪ Peningkatan kapasitas aparatur dan perangkat hukum daerah dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik berbasis norma hukum dan prinsip *good governance*. ▪ Mengembangkan ekosistem inovasi yang mendukung kerja sama akademisi, industri, dan pemerintah ▪ Meningkatkan kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi dalam pengembangan riset dan inovasi

3.3.2 Program Prioritas Daerah

Program prioritas daerah adalah serangkaian program pembangunan yang memiliki dampak strategis dan menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Bali dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan utama pembangunan daerah, mendorong percepatan pencapaian sasaran strategis, serta mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara lebih efektif dan terarah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, program prioritas daerah disusun berdasarkan isu strategis daerah, potensi unggulan, serta kebutuhan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan sinkronisasi dengan kebijakan nasional, seperti RPJMN 2025-2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali 2025-2045.

Program prioritas daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan, guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bali.

Penetapan program prioritas daerah bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pembangunan yang terarah dan berdampak luas dengan mengutamakan sektor-sektor yang memiliki nilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah, dengan mengalokasikan sumber daya pada program yang memiliki daya ungkit tinggi bagi pembangunan daerah.

3. Meningkatkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.
4. Menjamin kesinambungan pembangunan yang selaras dengan kearifan lokal dan mempertahankan identitas budaya Bali dalam menghadapi perubahan zaman.
5. Mempercepat pencapaian target pembangunan daerah dengan mengedepankan pendekatan berbasis data dan inovasi.

Dengan adanya program prioritas yang jelas dan terarah, pembangunan daerah dapat lebih fokus dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Bali.

Adapun Program Prioritas Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 3.6 serta Pemetaan Program *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali Berdasarkan Bidang Prioritas Dalam Nomenklatur Program Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.6 Program Prioritas Daerah Provinsi Bali

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
***Nangun Sat Kerthi Loka* Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru**								
Misi 1: Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan *Krama* Bali secara *Niskala-Sakala* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi,* yaitu: *Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi,* dan *Jagat Kerthi.*	**Tujuan 1:** Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional			**Indeks Pembangunan Kebudayaan**		**Angka**	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan	**Bidang Prioritas 1:** Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Serta Kearifan Lokal
Misi 2: Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan,* dan *Palemahan.*		**Sasaran 1:** Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali		Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan	
Misi 3: Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, membentuk keadaban kehidupan Krama Bali.			Meningkatnya Pelestarian Tradisi Budaya	Persentase Tradisi dan Warisan Budaya yang terfasilitasi dan berkembang secara berkelanjutan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan	
			Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kesenian Bali yang terfasilitasi, dilestarikan, dan ditampilkan secara aktif	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan	
			Lestarinya Bangunan Cagar Budaya dan Museum	Persentase Cagar Budaya dan Permuseuman yang teregistrasi, terkelola, dan difungsikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual yang Ditindaklanjuti	Program Kesejahteraan Rakyat	Persen	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)	
		Sasaran 2: Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat		Indeks Membangun Desa Adat		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan	
			Meningkatnya Desa Adat yang mandiri Dalam Penyelenggaraan Kehidupan *Krama* Bali	Persentase Desa Adat yang Mandiri Dalam Penyelenggaraan Kehidupan *Krama* Bali	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan	
Misi 4: Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.	**Tujuan 2**: Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		**Angka**	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)	**Bidang Prioritas 2:** Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
				Tingkat Kemiskinan		**Persen**	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 5: Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas, bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.		**Sasaran 1**: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)		Tahun	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
Misi 6: Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Per 1000 Kelahiran Hidup	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
Misi 7: Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.				Angka keberhasilan pengobatan TBC		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
Misi 8: Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk *Widyalaya* dan *Pasraman* di Desa Adat.				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 9 : Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
Misi 10 : Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional				Tingkat Kelulusan peserta pelatihan sumber daya kesehatan		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
Misi 11: Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan *Krama* Bali			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi standar	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 15% penduduknya menerapkan perilaku hidup sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kab/Kota	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
			Meningkatnya persentase cakupan layanan Air Minum Aman	Persentase cakupan layanan Air Minum Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
			Meningkatnya Persentase Cakupan Layanan Air Minum Aman	Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
			Meningkatnya Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah			Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan serta Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga		Indeks Pendidikan		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
				Indeks Pembangunan Pemuda		Angka	
				Indeks Pembangunan Olahraga		Angka	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang Tersertifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Indeks SPM Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Pemahaman Peserta Didik terhadap Nilai-nilai Kearifan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaaan dan olahraga
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaaan dan olahraga

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sasaran 3: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan		Indeks Pembangunan Gender		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Sasaran 4: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
				Persentase Keselamatan dan Pelindungan Tenaga Kerja		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
				Indeks Kesejahteraan Sosial		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
			Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/Orang	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
			Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase pencari kerja yang kompeten		Persen	
			Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
			Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan K3	Persentase pengujian hiperkes dan keselamatan kerja di perusahaan		Persen	
			Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Program Hubungan Industrial	Per 1000 Penduduk	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase PPKS dalam panti yang mendapatkan pelayanan dasar	Program Rehabilitasi Sosial	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Program Penanganan Bencana	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
			Meningkatnya Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Kawasan Permukiman	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Misi 12: Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan *Krama* Bali.	**Tujuan 3**: Meningkatnya Laju dan Ketahanan Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi *Kerthi* Bali.			**Laju Pertumbuhan Ekonomi**		**Persen**	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)	**Bidang Prioritas 3:** Ekonomi *Kerthi* Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata
Misi 13: Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi *Kerthi* Bali				**Gini Ratio**		**Angka**	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)	**Bidang Prioritas 4:** Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi
Misi 14: Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan *Krama* Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.		**Sasaran 1**: Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali		Indeks Ketahanan Pangan		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan	
Misi 15: Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.				Indeks Ekonomi Biru (IBEI)		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 17: Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Infrastruktur Pendukung Cadangan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
Misi 18: Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Pola Pangan Harapan (PPH)		Angka	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Pengembangan Kelompok Pangan Lokal	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
				Persentase Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan		Persen	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
				Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura		Persen	
				Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan		Persen	
				Persentase Peningkatan Populasi Ternak		Persen	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan *Zoonosis*	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
				Persentase Pengujian Penyakit Hewan dan Pangan Asal Hewan		Persen	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
			Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan
				Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan)		Persen	
			Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan
			Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan produksi olahan hasil perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan mutu dan keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan		Persen	
			Meningkatnya Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
			Meningkatnya Persentase Cakupan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
			Meningkatnya Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni, bagi korban bencana Provinsi atau dampak program Pemerintah Daerah Provinsi	Program Pengembangan Perumahan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
			Meningkatnya Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Program Kawasan Permukiman	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sasaran 2: Meningkatnya produktivitas masyarakat melalui pemerataan ekonomi kerakyatan		Persentase Peningkatan Perekonomian Desa		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah desa
				Rasio Kewirausahaan di Bali		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
				Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Bali		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
				Persentase Peningkatan Ekspor Produk Industri Lokal Bali		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan perindustrian atau urusan perdagangan
				Persentase Peningkatan Investasi Daerah		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan penanaman modal
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Desa dalam Pembangunan Desa	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah desa
			Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi yang difasilitasi izin usaha	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase pertumbuhan kewirausahaan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
			Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)
			Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi	Persentase koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Industri Pengolahan	Program Pengembangan Ekspor	Nilai	Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan
			Meningkatnya potensi dan peluang penanaman modal dan kemudahan berusaha	Jumlah Peta Potensi Investasi Jumlah UMKM yang difasilitasi Bekerja sama dengan Usaha Besar	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dokumen	Perangkat Daerah yang menangani urusan penanaman modal
			Meningkatnya pemasaran penanaman modal di Provinsi Bali	Persentase Peningkatan Investor yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali	Program Promosi Penanaman Modal	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan penanaman modal
			Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Realisasi Investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rupiah	Perangkat Daerah yang menangani urusan penanaman modal

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sasaran 3: Terwujudnya Pariwisata Bali yang Berkualitas dan Berkelanjutan		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Program Pemasaran Pariwisata	Orang	Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata
		Sasaran 4: Meningkatnya Inklusifitas Wilayah		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi (Aman, Nyaman, Lancar, Selamat, dan Terjangkau)		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
				Indeks Layanan Infrastruktur		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
			Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi laut	Persentase Pembangunan/Lanjutan/ Penyelesaian dan Pengembangan Pelabuhan Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
			Meningkatknya pengawasan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang sudah Menerapkan SPM		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
			Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas	Persentase Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang ditindak Lanjuti	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
			Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Tingkat pelayanan simpang (tundaan) pada simpang ATCS		Kategori/ Ordinal	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Cakupan Layanan Angkutan Umum	Persentase Jaringan Transportasi Darat yang Terlayani		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Angkutan Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan angkutan umum		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
			Meningkatnya Perlengkapan Keselamatan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang dan terpelihara terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
			Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
			Meningkatnya Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung dan Lingkungannya dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
			Meningkatnya Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur yang Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Misi 16: Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital	**Tujuan 4**: Terwujudnya Bali Sebagai Pulau Digital yang Inovatif dan Terintegrasi			**Persentase Wilayah yang Terjangkau Jaringan Telekomunikasi**		**Persen**	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi	**Bidang Prioritas 6:** Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
		Sasaran 1: Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Inovasi Digital		Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi	
			Meningkatnya Informasi Publik yang disebarluaskan	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi	
			Meningkatnya pengelolaan layanan teknologi informatika	Nilai Pilar Pemerintah Indeks Transformasi Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi	
			Meningkatnya Pengembangan, Inovasi dan Interoperabilitas Layanan Digital	Persentase Implementasi Atas Pengembangan, Inovasi dan Interoperabilitas Layanan digital		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi	
			Meningkatnya kualitas keamanan Informasi Pemerintah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Misi 19: Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.	**Tujuan 5**: Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan dengan Bali Mandiri Energi Bersih			**Indeks Provinsi Hijau**		**Angka**	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral	**Bidang Prioritas 5:** Lingkungan, Kehutanan, dan Energi
Misi 20: Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih				**Persentase Penurunan Emisi GRK**		**Persen**	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup	
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya mineral		IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup	
				Persentase Sumber Daya Mineral yang Terkelola		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah	Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup	
			Meningkatnya perlindungan hutan dan produktivitas hasil hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Program Pengelolaan Hutan	Rupiah	Perangkat Daerah yang menangani urusan kehutanan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			Meningkatnya kelestarian dan kualitas lahan di sepanjang aliran sungai	Indeks Kualitas Lahan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan kehutanan	
			Meningkatnya usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan	Persentase usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral	
		Sasaran 2: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Berkelanjutan		Porsi EBT dalam Bauran Energi Daerah		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral	
			Meningkatnya Kapasitas EBT (Energi Baru Terbarukan)	Jumlah Pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan)	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Mega Watt	Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral	
			Meningkatnya Pengusahaan Ketenagalistrikan	Persentase Pengusahaan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral	
Misi 21: Memperkuat Penyelenggaraan Keamanan Bali Oleh Negara dan Masyarakat Dengan Sistem Keamanan Terpadu.	**Tujuan 6**: Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Keharmonisan Sosial di Masyarakat			**Indeks Harmoni Indonesia**		**Angka**	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum	**Bidang Prioritas 6 :** Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 22: Memantapkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, dan Bersih, serta Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Cepat, Pasti, dan Murah.		**Sasaran 1**: Terjaganya Ketenteraman dan Ketertiban dalam Masyarakat		Indeks Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum dan urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum dan urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan terhadap masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum dan urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat
		Sasaran 2: Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana		Indeks Risiko Bencana		Angka	Perangkat Daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya pengetahuan, mitigasi dan kesiapsiagaan Sumber Daya dalam Pengurangan Risiko Bencana	Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persen	Perangkat Daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
			Meningkatnya kapasitas respons tanggap bencana	Persentase penanganan darurat bencana terhadap setiap kejadian		Persen	Perangkat Daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
			Meningkatnya Pemulihan Pasca Bencana	Persentase penanganan pasca bencana terhadap setiap kejadian		Persen	Perangkat Daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Sasaran 3: Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat		Indeks Demokrasi Provinsi		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Indeks Pemahaman Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum
			Meningkatnya etika dan budaya politik masyarakat di daerah	Persentase terlaksananya kebijakan fasilitasi politik dalam negeri	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya ketertiban organisasi masyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum
	Tujuan 7: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			**Indeks Reformasi Birokrasi**		**Angka**	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)
		Sasaran 1: Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Indeks Sistem Merit		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian
				Nilai AKIP		Nilai	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)
				Opini BPK		Status/ Opini	Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pengawasan urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Keuangan
				Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)		Nilai	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Indeks Pelayanan Publik		Angka	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)
				Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Untuk Provinsi Bali		Angka	
				Indeks Inovasi Daerah		Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan penelitian dan pengembangan
				Indeks Reformasi Hukum		Angka	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)
			Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karier ASN	Indeks NSPK	Program Kepegawaian Daerah	Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	Program Penataan Organisasi	Persen	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran disusun Tepat Waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah disusun Tepat Waktu		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran Provinsi disusun Tepat Waktu		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Angka	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
				Persentase pendapatan pemanfaatan BMD terhadap total PAD		Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
				Jumlah terbit buku sertifikat tanah dan bangunan milik atau dikuasai Pemerintah Provinsi Bali		dokumen	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pengawasan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pembinaan dan pengawasan
			Meningkatnya kualitas pendampingan asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Telah dilaksanakan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan pembinaan dan pengawasan
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persen	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		Persen	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persen	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)
			Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan terkait riset dan inovasi daerah	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Terkait Riset dan Inovasi Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persen	Perangkat Daerah yang menangani urusan penelitian dan pengembangan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	SATUAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persen	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)	

Tabel 3.7 Pemetaan Program *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* Berdasarkan Bidang Prioritas dalam Nomenklatur Program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*								PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)			(6)	(7)	(8)
1	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.**	Bali Berkepribadian dalam Kebudayaan	1	Menggali dan melestarikan warisan adiluhung budaya Bali.	1	Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi:				
			2	Memperkuat dan memajukan Adat, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.		a	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA	Diskominfos, Satpol PP, Inspektorat, Disbud
			3	Mengembangkan tata kehidupan yang harmonis bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.		b	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;	Program Pengembangan Kebudayaan	Disbud	D.PMA
			4	Melestarikan pelaku kebudayaan Bali.		c	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Masyarakat Adat (BUPDA)	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA	Inspektorat, Disbud
						d	Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali;	Program Pengembangan Kebudayaan	Disbud	Disperindag, Satpol PP, Inspektorat
						e	Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;	Program Pengembangan Kebudayaan	Disbud	Disdikpora, Satpol PP
						f	Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan;	1. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 2. Program Pembinaan Sejarah	Disbud	D.PUPR, D.PMA, Dispar
						g	Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kesbangpol	Satpol PP,

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
					Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT); dan	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA	Kesbangpol, Satpol PP
					h Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru	Program Pengembangan Kebudayaan	Disbud	D.PMA, Satpol PP
				2	Memantapkan dan menguatkan kedudukan, fungsi, dan pemberdayaan Desa Adat.	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA	Disbud
				3	Memantapkan penyelenggaraan dan tata kelola Desa Adat.	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA	Disbud
				4	Mempercepat pemanfaatan sistem dan teknologi informasi untuk meningkatkan penyelenggaraan dan tata kelola Desa Adat serta mengintegrasikan sistem Desa Adat se-Bali.	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA	Diskominfos, Disbud
				5	Meningkatkan peran aktif Desa Adat dalam pelaksanaan program sebagai implementasi nilai nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* secara Niskala - Sakala.	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA	Disbud
				6	Meningkatkan peran aktif Desa Adat dalam mendukung/memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten.	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA	Disbud
				7	Meningkatkan peran aktif Desa Adat dalam pelaksanaan tatanan kehidupan masyarakat sesuai dengan Dresta Bali.	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA	Disbud
				8	Menyelenggarakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan Desa Adat se-Bali.	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA	Diskominfos, Disbud
				9	Meningkatkan upaya menggali untuk menemukan kembali warisan adiluhung berkaitan dengan tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal yang telah punah/ditinggal masyarakat di Desa Adat.	Program Pengembangan Kebudayaan	Disbud	Dispar, Satpol PP, D.PMA
				10	Meningkatkan kreativitas, inovasi, dan atraksi/apresiasi penciptaan karya seni dan budaya di Desa Adat.	Program Pengembangan Kebudayaan	Disbud	Dispar, Brida, D.PMA

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				11	Meningkatkan fasilitas milik Desa Adat seperti wantilan/balai banjar sebagai wahana pengembangan seni dan budaya, menjadi *Balinese Culture Meeting Point*.	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA	D.PUPR, Disbud
				12	Memperkuat dan memajukan tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali.			
					a Meningkatkan sarana prasarana seni dan budaya.	Program Pengembangan Kebudayaan	Disbud	D.PUPR, D.PMA, Dispar
					b Meningkatkan sumber daya manusia dibidang kebudayaan.	Program Pengembangan Kebudayaan	Disbud	D.PMA, Dispar
					c Menyelenggarakan standarisasi dan sertifikasi lembaga seni dan budaya.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Disbud	D.PMA, Dispar
					d Meningkatkan wahana apresiasi seni dan budaya.	Program Pengembangan Kebudayaan	Disbud	D.PMA, Dispar
				13	Mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal ke dalam kurikulum sekolah.	Program Pengembangan Kurikulum	Disdikpora	Disbud, D.PMA
				14	Mengembangkan tatanan kehidupan berdasarkan nilai-nilai seni, budaya, dan kearifan lokal Bali serta *Sad Kerthi*.	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Pem Kesra	Disbud, D.PMD Dukcapil
						Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D. PMA	Disbud, D.PMD Dukcapil
				15	Menyelenggarakan program pelestarian nama anak sesuai kearifan lokal Bali yang menjadi pelaku kebudayaan Bali dengan mempromosikan Keluarga Berencana 4 Anak; anak ke-1 (Wayan, Gede, putu), anak ke-2 (Made, Kadek, Nengah), anak ke-3 (Nyoman, Komang), dan anak ke-4 (Ketut). Memberi insentif untuk anak ke-3 dengan nama depan Nyoman/Komang dan anak ke-4 dengan nama depan Ketut.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	Sinergi Dinkes, Disdikpora, Dinsos, D.PMD Dukcapil
						Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos P3A	
						Program Pencatatan Sipil	D.PMD Dukcapil	
				16	Menyelesaikan pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	D.PUPR	BPKAD, Disbud, DPMPTSP, Biro PBJEK, Bapenda, Dishub, Diskanlaut, Dispar

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
					17	Membangun Institut Adat Bali			
2	**Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**								
	Bidang Kesehatan	Mengembangkan kehidupan masyarakt Bali yang sehat	1	Meningkatkan akses, jangkauan, pemerataan, dan keadilan layanan kesehatan	1	Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi:			
			2	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan		a Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes	
							Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinkes	
							Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes	
			3	Meningkatkan edukasi kesehatan tradisional kepada masyarakat		b Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS);	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
			4	Mempercepat layanan kesehatan tradisional		c Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 tahun 2018 tentang Sistem Rujukan Terintegrasi Pelayanan Kesehatan; dan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
						d Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
					2	Memantapkan pelaksanaan kebijakan standar penyelenggaraan kesehatan secara komprehensif sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, meliputi:			
						a Meningkatkan kualitas layanan di semua Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten sampai Puskesmas dan D.Puskesmas Pembantu (Pustu) serta Rumah Sakit milik swasta.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	D.PMD Dukcapil

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
					b Meningkatkan akreditasi minimum B untuk semua Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
					c Per 1000 Penduduk • Tenaga medis dan non medis sesuai kebutuhan • 1 dokter spesialis Kandungan dan Anak • Alat kesehatan dan fasilitas perawatan pasien	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
					d Memastikan tersedia layanan kesehatan 1 Desa 1 Puskesmas Pembantu (Pustu)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	Sinergi Dinkes dengan Dinkes Kabupaten/kota
					e Menyediakan 1 dokter umum, 1 bidan, 1 tenaga perawat untuk 1 Pustu	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
				3	Memfasilitasi pengangkatan dokter, bidan, dan perawat menjadi ASN.	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Dinkes memfasilitasi proses pengangkatan dokter, bidan, dan perawat menjadi ASN bersinergi dengan BKPSDM
				4	Meningkatkan kesejahteraan dokter, bidan, dan perawat.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinkes	BKPSDM
				5	Memantapkan pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan secara terintegrasi se-Bali berbasis aplikasi.			
					a Data riwayat kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	D.PMD Dukcapil, Dinsos P3A
					b Data Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
					c Data jenis layanan kesehatan di Rumah Sakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
					d Data dokter umum dan dokter spesialis dengan jadwal dan tempat praktek di RS	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
					e Unit layanan reaksi cepat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
					f Tata cara (SOP) jasa layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
				6	Memantapkan kualitas pelaksanaan Program JKN-KBS	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
				7	Memantapkan pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 tahun 2018 tentang Sistem Rujukan Terintegrasi Pelayanan Kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
				8	Menurunkan angka Stunting dengan target di bawah 5%, diantaranya:		Dinkes, Dinsos P3A, D.PUPR	Bappeda
					a Meningkatkan pelayanan medis ibu hamil dan melahirkan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
					b Memenuhi kebutuhan pangan yang cukup dan bergizi	Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos P3A	
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
					c Penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan untuk setiap rumah tangga	1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	D.PUPR	
						2. Program Kawasan Permukiman	D.PUPR	
				9	Memantapkan pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	Distanpangan, Disbud, Brida
					a Di semua Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
						b Standarisasi dan sertifikasi Pangusada Bali	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						c Memperluas layanan pengobatan tradisional Bali pada fasilitas layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
					10	Mempercepat pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk dengan Branding Bali untuk produk herbal.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag	Disbud, Biro Hukum, Dinkes
					11	Mempercepat pengembangan industri herbal tradisional Bali.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	Disperindag, Disbud, Distanpangan
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
					12	Mengembangkan pola hidup sehat secara Niskala - Sakala untuk meningkatkan kesehatan masyarakat guna mengurangi jumlah masyarakat yang sakit.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	Semua Perangkat Daerah
							Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes	
					13	Meningkatkan event/festival dan pameran produk/layanan kesehatan herbal tradisional Bali.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	Diskominfos
	Bidang Pendidikan	SDM Bali Unggul	1	Meningkatkan akses, perluasan, pemerataan, dan keadilan layanan pendidikan formal dan nonformal.	1	Meningkatkan kualitas jati diri dan integritas siswa berdasarkan nilai – nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.	n/a	Disdikpora	Bappeda
			2	Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan.	2	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK/SLB dan Pendidikan Tinggi			D.PUPR, Dishub, Diskominfos, D.PMD Dukcapil, (BKK),
			3	Mengembangkan pendidikan karakter, jati diri,		a Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD minimum mencapai 50%.	n/a	Disdikpora	Disdikpora berkoordinasi dengan

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
			dan budi pekerti siswa sesuai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bali.					Disdikpora Kabupaten/Kota
					b Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi minimum mencapai 40%.	n/a	Disdikpora	Disdikpora berkoordinasi dengan perguruan tinggi
				3	Meningkatkan kualitas pendidikan sains dan teknologi pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK/SLB.	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	
				4	Memantapkan pemenuhan akses layanan pendidikan SMA/SMK dalam rangka wajib belajar 12 tahun			
					a Memastikan pendidikan gratis bagi Siswa SMA/SMK Negeri dan Swasta.	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	
					b Melanjutkan pembangunan SMA/SMK baru agar semua Kecamatan se-Bali minimum memiliki 1 unit SMA dan 1 unit SMK	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	D.PUPR, Biro PBJEK, BPKAD
					c Meningkatkan laboratorium dan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMA/SMK.	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	D.PUPR, Biro PBJEK, BPKAD
					d Menambah Ruang Kelas Baru pada SMA/SMK	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	D.PUPR, Biro PBJEK, BPKAD
					e Memberikan subsidi bagi SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam bentuk dana BOS.	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	
					f Memfasilitasi program magang/praktik kerja lapangan bagi Siswa SMA/SMK dan Mahasiswa.	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	
				5	Menyelenggarakan Program Satu Keluarga Satu Sarjana melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Bali dan perusahaan lokal/nasional.	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	
				6	Mengembangkan SMK Unggulan berbasis sumber daya lokal bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang lulusannya siap bekerja atau menjadi wirausaha.	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				7	Meningkatkan jumlah dan kualitas guru secara memadai sesuai kebutuhan SMA/SMK dengan melibatkan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	
						Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
				8	Meningkatkan kesejahteraan guru termasuk guru honorer SMA/SMK.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Disdikpora	
				9	Mengupayakan pengangkatan tenaga guru kontrak menjadi tenaga P3K/PNS.	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Disdikpora memfasilitasi proses pengangkatan tenaga guru kontrak menjadi tenaga guru P3K/PNS bersinergi dengan BKPSDM
				10	Mempercepat sistem pendidikan PAUD/TK-Hindu berbahasa Bali dalam bentuk *Pasraman* di Desa Adat.	n/a	Disdikpora	Disdikpora memfasilitasi untuk mendukung percepatan sistem pendidikan PAUD/TK-Hindu berbahasa Bali dalam bentuk Pasraman di Desa Adat melalui sinergi dengan Kanwil Agama Provinsi Bali dan DPMA
				11	Menyiapkan buku pelengkap untuk mempercepat dan memperluas jangkauan pelaksanaan program pendidikan penanaman nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* sesuai Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi*.	Program Pengembangan Kurikulum	Disdikpora	Disbud, D.PMA

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				12	Mempercepat dan memperluas penggunaan Keyboard Aksara Bali di SD, SMP, SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi.	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	Disbud, D.PMA, Diskominfos
				13	Menyiapkan Laboratorium Keyboard Aksara Bali di SD, SMP, dan SMA/SMK.	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	Disbud, D.PMA, Diskominfos
				14	Menyiapkan buku pelengkap Agama Hindu Dresta Bali di SD, SMP, dan SMA/SMK.	n/a	Disdikpora	Disdikpora memfasilitasi untuk mendukung penyiapan buku pelengkap Agama Hindu Dresta Bali di SD, SMP, dan SMA/SMK. melalui sinergi dengan Kanwil Agama Provinsi Bali
				15	Fasilitasi beasiswa bagi lulusan terbaik SMA untuk melanjutkan Pendidikan Sarjana (S1) di luar negeri.	n/a	Disdikpora	Disdikpora memfasilitasi untuk mendukung penyiapan beasiswa bagi lulusan terbaik SMA untuk melanjutkan Pendidikan Sarjana (S1) di luar negeri melalui koordinasi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
				16	Memberikan beasiswa untuk siswa dan mahasiswa diploma/sarjana/sarjana terapan dari keluarga miskin.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disdikpora	Dinsos P3A
						Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos P3A	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
					17	Meningkatkan kemampuan siswa SMA/SMK di bidang ilmu-ilmu dasar bekerja sama dengan ITB	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	
					18	Mengembangkan kerja sama dengan Perguruan Tinggi di Bali dalam meningkatkan akses lulusan SMA/SMK masuk Perguruan Tinggi	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Pem Kesra	Biro Pem Kesra bersinergi dengan Disdikpora dan Brida
					19	Mengembangkan SDM Bali Unggul di Bidang Pariwisata, terutama ditingkat Manajerial untuk bekerja di Bali atau di luar Bali.	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	Disnaker ESDM
					20	Membentuk Komunitas Belajar Swadaya (KBS) untuk Pelajar Muda Milenial	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	
	Bidang Pemuda	Generasi Muda/Milenial dan Gen-Z penentu peradaban masa depan Bali	1	Keberpihakan secara nyata dengan menyiapkan wahana/ekosistem untuk mengembangkan potensi generasi muda/milenial dan Gen-Z	1	Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol	Disdikpora
			2	Menciptakan harapan dan kesempatan kerja bagi generasi muda/milenial dan Gen-Z	2	Memfasilitasi ruang aktivitas untuk mengembangkan potensi generasi muda/milenial dan Gen-Z, dibidang ekonomi kreatif dan digital, UMKM, kuliner lokal, lingkungan hidup, e-sport, dan otomotif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disdikpora	Diskominfos, Diskop, Dispar, Disperindag, DKLH, Disnaker
			3	Menyiapkan generasi muda/milenial dan Gen-Z untuk berperan aktif sebagai pelaku utama penentu	3	Memfasilitasi akses pengembangan usaha dan permodalan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disdikpora	Disperindag, Diskop
					4	Memfasilitasi lapangan kerja	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disdikpora	Disnaker ESDM
							Program Penempatan Tenaga Kerja	DisnakerESDM	Disdikpora
					5	Mengedepankan generasi muda/milenial dan Gen-Z sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan kegiatan budaya	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disdikpora	Disbud

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
				peradaban masa depan Bali	6	Memfasilitasi peningkatan keterampilan teknologi digital	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disdikpora	Diskominfos, Disnaker
					7	Memfasilitasi kebutuhan konsultasi dan *healing*	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disdikpora	Dinkes
	Bidang Olahraga	Memajukan keolahragaan Bali	1	Memajukan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.	1	Pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Disdikpora	
			2	Meningkatkan pencapaian olahraga prestasi dalam event nasional dan internasional	2	Memfasilitasi pengembangan olah raga masyarakat di kantor Pemerintahan, kantor swasta, dan lembaga masyarakat sekaligus untuk mendukung pola hidup sehat.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
			3	Mengembangkan olahraga sebagai bagian dari strategi pariwisata/pariwisata berbasis olahraga (sport tourism)	3	Memfasilitasi/membantu Sekolah Sepak Bola (SSB) sebagai sumber pembibitan pemain sepak bola yang berkualitas.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Disdikpora	
					4	Mengembangkan olahraga prestasi sesuai potensi/bakat *Krama* Bali untuk meningkatkan prestasi dan kebanggaan di bidang olahraga.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Disdikpora	
					5	Meningkatkan pembinaan atlet untuk olahraga unggulan Bali.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Disdikpora	
					6	Menyelenggarakan kegiatan olah raga/permainan tradisional Bali sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Disdikpora	Disbud
					7	Menyelenggarakan PORSENIJAR Tingkat Provinsi.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Disdikpora	
					8	Meningkatkan *event* olahraga bertaraf nasional dan internasional sekaligus mendukung pariwisata berbasis olahraga (*sport tourism*).	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Disdikpora	Dispar
	Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan	1	Membantu fakir miskin, anak terlantar, dan kelompok difabel	1	Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi:			

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	BIDANG	TEMA	ARAH KEBIJAKAN		NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
		ketenagakerjaan Krama Bali	2	Memberi perlindungan tenaga kerja Krama Bali	a Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; dan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DisnakerESDM	
			3	Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme tenaga kerja Krama Bali				
			4	Meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan tenaga kerja Krama Bali				
			5	Menurunkan tingkat kemiskinan dengan target angka kemiskinan ekstrem menjadi 0%		Program Hubungan Industrial	DisnakerESDM	
						Program Pengawasan Ketenagakerjaan	DisnakerESDM	
						Program Penempatan Tenaga Kerja	DisnakerESDM	
					b Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan	n/a	DisnakerESDM mengoptimalisasi tugas mandatori dibidang pengawasan ketenagakerjaan sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah (lampiran huruf G), khususnya pelaksanaan program Jamsos bagi tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
								dan BPJS Kesehatan).	
						c Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali.	Program Penempatan Tenaga Kerja	DisnakerESDM	
					2	Membantu perumahan layak huni dan bantuan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos P3A	D.PUPR
							Program Kawasan Permukiman	D.PUPR	
					3	Memfasilitasi kehidupan dan kuota tenaga kerja bagi anak terlantar dan difabel di lembaga Pemerintahan Daerah dan Swasta	Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos P3A	Disnaker, Dinkes
							Program Penempatan Tenaga Kerja	DisnakerESDM	
					4	Membantu Panti Asuhan yang melayani anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, dan orang tua terlantar.	Rehabilitasi Sosial	Dinsos P3A	
					5	Peningkatan produktivitas tenaga kerja di semua sektor terutama pertanian, jasa, penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta industri sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan di masa depan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DisnakerESDM	
					6	Peningkatan keterampilan/keahlian Calon Tenaga Kerja Lokal Bali secara gratis melalui penguatan dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) bersama lembaga vokasi formal dan nonformal.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DisnakerESDM	
					7	Program sertifikasi keahlian Calon Tenaga Kerja Lokal Bali/SDM Bali secara gratis bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DisnakerESDM	
					8	Memantapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi para calon tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia kerja bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dan dunia usaha/industri.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DisnakerESDM	Disdikpora, Disperindag, Diskop
					9	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan SDM Bali bekerja sama dengan Inkubator Bisnis/INBIS Perguruan Tinggi di Bali.	n/a	DisnakerESDM memfasilitasi untuk mendukung	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
								peningkatan kewirausahaan SDM/Inbis melalui pelatihan.	
					10	Meningkatkan akses kesempatan kerja pada dunia usaha dan industri di dalam maupun di luar negeri.	Program Penempatan Tenaga Kerja	DisnakerESDM	
					11	Meningkatkan wahana bursa tenaga kerja bagi calon tenaga kerja lokal Bali/SDM Bali bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta Perguruan Tinggi.	Program Penempatan Tenaga Kerja	DisnakerESDM	
					12	Memperluas penerapan aplikasi sistem informasi dan ketenagakerjaan di dalam negeri.	Program Penempatan Tenaga Kerja	DisnakerESDM	Diskominfos
					13	Mendata dan menertibkan Pelaku Usaha Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri.	Program Penempatan Tenaga Kerja	DisnakerESDM	
					14	Memproteksi tenaga kerja lokal Bali, dengan mengharuskan badan usaha di Bali untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal Bali yang kompeten sebagai tenaga teknis/staf dan pimpinan manajemen sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019.	Program Penempatan Tenaga Kerja	DisnakerESDM memfasilitasi melalui koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota, serta menginformasikan kepada perusahaan untuk dapat memberikan prioritas kesempatan kerja bagi warga sekitar yang memiliki kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
						Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DisnakerESDM	
				15	Menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan kesejahteraan tenaga kerja melalui: penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP), BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan (jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian).	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	DisnakerESDM	
				16	Menertibkan dengan tindakan tegas bagi orang asing yang bekerja secara ilegal di Bali, seperti: a Menyalahgunakan visa turis b Melakukan usaha tanpa ijin	n/a	Warga negara asing pemegang visa turis/kunjungan yang menyalahgunakan izin tersebut merupakan kewenangan Kantor Imigrasi.	
				17	Menyiapkan lapangan kerja baru dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti pembangunan Obyek Wisata Turyapada Tower, Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, Obyek Wisata Terpadu Amed Karangasem, Obyek Wisata Terpadu Sangsit Buleleng, dan Taman Wisata KBS Park berkelas dunia di Pekutatan Jembrana.	n/a	DisnakerESDM memfasilitasi untuk memberikan informasi lowongan kerja dalam Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja.	
				18	Memperluas kesempatan kerja di luar sektor pariwisata dengan menyediakan pelatihan keterampilan digital berbasis teknologi terkini seperti: *programming*, kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI), animasi, *games*, data analisis, digital marketing, dan e-commerce.	n/a	Bekerja sama/sinergi kolaborasi dengan Perangkat Daerah/Stakeholder/Lembaga terkait	
				19	Program untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali, antara lain:			

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*					PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				a Memantapkan pelaksanaan aplikasi PMI Krama Bali;	Program Penempatan Tenaga Kerja	DisnakerESDM	
				b Pelatihan keterampilan;	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DisnakerESDM	Bekerja sama/ sinergi kolaborasi dengan Perangkat Daerah/ Stakeholder/Lembaga terkait
				c Memberi bantuan modal untuk keberangkatan PMI Krama Bali;	n/a	Akan dikoordinasikan dengan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kab./kota, mendorong agar dapat memfasilitasi program bantuan modal untuk keberangkatan PMI Krama Bali melalui kerja sama/sinergi kolaborasi dengan Lembaga terkait	
				d Menindak dengan tegas Perusahaan Penyalur PMI Krama Bali yang melanggar aturan.	n/a	Pembinaan perusahaan penempatan dilakukan oleh Pengantar Kerja, sedangkan laporan pelanggaran dari tenaga kerja atau masyarakat atas pelanggaran ijin usaha akan ditindaklanjut oleh	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
								Pengawas Ketenagakerjaan	
					20	Membentuk Komunitas Berkarya Swadaya (KBS) Pekerja Muda Milenial.	Program Penempatan Tenaga Kerja	DisnakerESDM	
							Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DisnakerESDM	
3	**Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata**								
	Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Kedaulatan Pangan	1	Menuntaskan sistem pertanian organik	**Program Bidang Pertanian:**				
			2	Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian	1	Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi:			
			3	Mengendalikan alih fungsi lahan produktif dan melarang alih fungsi lahan sawah		a Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
							Program Pengawasan Keamanan Pangan	Distanpangan	
			4	Memberdayakan lahan tidak produktif/lahan tidur menjadi lahan produktif sesuai potensi alam dengan menerapkan teknologi tepat guna		b Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindag	Distanpangan , Diskanlaut, Dishub, D.PUPR, Diskominfos
							Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	
							Program Pengawasan Keamanan Pangan	Distanpangan	
			5	Melindungi dan memberdayakan wilayah kelautan dan perikanan		c Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag	Satpol PP, Distanpangan, Diskop
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
			6	Mempercepat hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan perikanan		d Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dana Penguatan Modal (Bermanfaat bagi Koperasi dan UMKM Bidang Pertanian)	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Diskop	Distanpangan
							Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	
					2	Mempercepat pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali, Sektor Pertanian:			
						a Program Peningkatan Produksi Pertanian,	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	Brida, D.PUPR, Diskop, Diskanlaut
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
							Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Distanpangan	
						b Program Sistem Pertanian Organik,	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	D.PUPR
							Program Pengawasan Keamanan Pangan	Distanpangan	
							Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Distanpangan	D.PUPR
						c Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian,	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	Brida
						d Program Pengembangan Kelembagaan Bersama Satupintu (KBS) Terintegrasi hulu-hilir Berbasis Kawasan.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	D.PUPR, Disperindag, Diskop, Diskanlaut
					3	Mempercepat penyelesaian kebijakan dan pelaksanaan program pertanian dari hulu sampai hilir fokus pada komoditas unggulan sesuai potensi masing-masing wilayah Kota/Kabupaten.			
						a Menuju kedaulatan pangan; kebutuhan dasar (tanpa impor)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Distanpangan	D.PUPR Disperindag, Diskop, Diskanlaut
							Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	D.PUPR	Disperindag, Diskop, Diskanlaut
						b Pemenuhan pasar domestik/lokal Bali, termasuk hotel dan restoran.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindag	Distanpangan, D.PUPR, Diskop,

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*					PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Diskanlaut, Satpol PP, Dispar
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	D.PUPR	
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	
				c Pemenuhan perdagangan/pasar dalam negeri.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindag	Distanpangan, Diskop, Diskanlaut
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	
				d Pemenuhan kebutuhan ekspor ke luar negeri.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Disperindag	Distanpangan, Diskop, Diskanlaut
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	
				4 Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk unggulan pangan lokal yang berorientasi ekspor.			
				a Peningkatan cita rasa	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	Dinkes, Brida
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
				b Kualitas tampilan (ukuran lebih besar, tanpa biji, tanpa duri)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	Brida
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
				5 Mempercepat perluasan penanaman bawang Putih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali, kebutuhan industri hotel dan restoran, dan ekspor (menghentikan impor bawang putih)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	Disperindag
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	
				6 Mempercepat pengembangan kapas sebagai bahan baku tekstil.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	Brida, Diskop, Disperindag
				7 Menuntaskan pembentukan sentra pangan dan Kelompok Bersama Satupintu (KBS)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
				8	Memantapkan penggunaan produk lokal sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	Distanpangan, Diskop, Diskanlaut, Satpol PP, Dispar
				9	Memantapkan program pelaksanaan dan rencana aksi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	D.PUPR,
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		D.PUPR,
				10	Memantapkan pengembangan pertanian organik di masing-masing Kota/Kabupaten dan di wilayah sekitar danau, Sungai, dan Mata Air.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	Distanpangan	
						Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Distanpangan	D.PUPR, DKLH
				11	Memantapkan pelaksanaan dan rencana aksi implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman *Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada,* dan Penghijauan.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Distanpangan	Disbud, D.PMA, Dinkes, DKLH, Brida
				12	Menyelenggarakan percepatan program budidaya pohon kelapa, pohon enau, dan pohon lontar sebagai sumber sarana upakara dan produksi tuak sebagai bahan baku gula dan Arak Tradisional Bali	*Indikasi Menggunakan Program Di Bidang Taru Dan Sda	Distanpangan	Disbud, D.PMA, Brida, Satpol PP
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
				13	Menyelenggarakan pameran dan pemasaran produk pangan bertaraf lokal, nasional, internasional, dan festival pangan.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Disperindag	Diskominfos, Distanpangan, Diskanlaut
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
				14	Memantapkan pengembangan desain produk dan kemasan.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindag	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	
				15	Meningkatkan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) dan Indikasi Geografis (IG) produk pertanian.	Program Riset dan Inovasi Daerah	Brida	Distanpangan,, Diskanlaut
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	
						Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
				16	Membangun Aplikasi Neraca Pangan (sistem distribusi pangan dan peta produksi)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	Diskominfos
				17	Memantapkan diversifikasi pangan selain beras sesuai potensi masing-masing wilayah Kota/Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Distanpangan	D.PMD Dukcapil, DPMPTSP
				18	Mengembangkan Sistem Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Distanpangan	D.PUPR, Bappeda
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	D.PUPR, Bappeda
				19	Mengembangkan pertanian *Smart Agriculture/Smart Farming,* melalui	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	D.PUPR
					a Fasilitasi akses terhadap perangkat teknologi *Smart Agriculture*, seperti: sensor, *drone*, perangkat *Internet of Thing* (IoT), *big data*, dan kecerdasan buatan.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
					b Fasilitas ini bermanfaat untuk pemantauan dan pengelolaan tanaman	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
					c Dilaksanakan bekerjasam a dengan perusahaan teknologi/*start up*, menyediakan alat dan solusi teknologi dengan harga terjangkau, atau skema kredit bagi petani.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
					d	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
					Pemprov/Pemkab/Pemkot bersinergi dalam mensubsidi anggaran penyediaan dan pengaplikasian teknologi pertanian.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
				e	Pelatihan tentang penggunaan teknologi digital dan data analitik agar petani memahami cara kerja *Smart Agriculture*.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
				f	Membentuk kelompok atau komunitas *Smart Agriculture* untuk berbagi informasi, pengalaman, dan keberhasilan seperti Petani Muda Keren.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
				g	Memberikan insentif kepada petani yang mulai menerapkan *Smart Agriculture*, misalnya subsidi untuk peralatan teknologi atau potongan pajak.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
				h	Menciptakan *branding* untuk produk pertanian yang dihasilkan dari metode *Smart Agriculture* agar memiliki daya tarik di pasar lokal dan internasional.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
				i	Memberi beasiswa khusus kepada generasi muda Gen-Z dan millenial untuk mengikuti pendidikan *Smart Agriculture* di luar negeri.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
				j	Mendorong pelaku usaha jasa pariwisata untuk memanfaatkan dan memasarkan produk *Smart Agriculture*, sesuai Pergub Nomor 99 Tahun 2019.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
				k	Bekerja sama dengan lembaga riset, perguruan tinggi, atau pusat penelitian lokal untuk mengembangkan dan menguji teknologi *Smart Agriculture* yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah di Bali.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
				l	Mendorong investasi dari sektor swasta dan dukungan dari pemerintah daerah untuk pendanaan awal.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
					m Mendorong hilirisasi dengan mengembangkan industri olahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan pendapatan petani.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
					n Pengembangan infrastruktur teknologi di daerah pertanian, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi dan konektivitas yang stabil.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
				20	Memberdayakan lahan tidak produktif/lahan tidur sebagai lahan produktif penghasil pangan.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
				21	Memperbanyak Komunitas Bertani Swadaya (KBS) Muda Milenial, seperti Komunitas Petani Muda Keren.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
				22	Membentuk Badan Pengelola Pangan Bali sebagai Wadah Kolaborasi *Pentahelix* Pangan untuk mewujudkan Bali berdaulat di bidang pangan.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanpangan	
				Program Bidang Kelautan dan Perikanan:				
				1	Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi:			
					a Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	Satpol PP, Disperindag, Dispar, Diskanlaut
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Diskanlaut	
					b Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diskanlaut	Diskop, Disperindag
				2	Mempercepat pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali sektor Kelautan dan Perikanan.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diskanlaut	Distanpangan, Diskop, Disperindag, Dispar

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
							Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Diskanlaut	
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Diskanlaut	
							Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Diskanlaut	
							Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Diskanlaut	
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpangan	
					3	Membudidayakan ikan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan untuk ekspor melalui pembangunan Kelompok Bersama Satupintu (KBS) Perikanan Budidaya sesuai potensi wilayah Kota/Kabupaten.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Diskanlaut	Disperindag
					4	Mempercepat pembangunan Kelompok Bersama Satupintu (KBS) Garam Tradisional Lokal Bali di Buleleng, Karangasem, Klungkung, dan Jembrana.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diskanlaut	Bappeda, Inspektorat
					5	Mempercepat pelaksanaan pembangunan Kelompok Bersama Satupintu (KBS) Perikanan Tangkap (Sentra Perikanan) dan memfasilitasi pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Diskanlaut	Bappeda, Inspektorat
					6	Memantapkan penggunaan produk lokal sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	Satpol PP, Disperindag, Dispar, Diskanlaut
					7	Meningkatkan pelaksanaan *event* festival dan pameran produk Kelautan dan Perikanan secara lebih masif.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindag	Diskominfos, Distanpangan, Diskanlaut
							Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	
					8	Mempercepat penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi secara efektif, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.		D.PUPR (Pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air)	Diskanlaut, DKLH, DPMPTSP
							Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diskanlaut	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
					9	Mempercepat pembentukan Komunitas Bahari Swadaya (KBS) Nelayan Muda Milenial	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Diskanlaut	
					10	Melarang kawasan pengolahan garam tradisional Bali dimanfaatkan sebagai fasilitas pariwisata.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diskanlaut	Satpol PP dan Dispar
							Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Diskanlaut	
					11	Melindungi kawasan sempadan pantai dan laut sebagai tempat upacara keagamaan adat Bali serta akses menuju kawasan, dari ancaman pelarangan/pembatasan penggunaan kawasan sempadan pantai dan laut oleh pelaku usaha pariwisata.		D.PUPR (rehabilitasi prasarana pengaman pantai)	D.PMA, Disbud, Dispar, diskanlaut, Satpol PP
							Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diskanlaut	
							Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Diskanlaut	
					12	Meningkatkan perolehan Sertifikat Indikasi Geografis Produk Kelautan dan Perikanan, antara lain: garam, rumput laut, dan ikan hias.	Program Riset dan Inovasi Daerah	Brida	Diskanlaut
					13	Mempercepat peningkatan pendapatan yang bersumber dari retribusi konservasi kelautan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diskanlaut,	Bapenda, D.PUPR
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Bangga Produk Industri Lokal Bali	1	Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk industri lokal Bali	1	Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi:			
			2	Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk industri lokal Bali		a Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali Tahun 2020-2040;	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag	
			3	Menjadikan produk industri lokal Bali sebagai penopang utama perekonomian Bali		b Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk dengan *Branding* Bali;	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag	
						c Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali;	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindag	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
					d Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali; dan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindag	Satpol PP
					e Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun *Endek* Bali/Kain Tenun Tradisional Bali.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindag	
				2	Mempercepat pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali Sektor Industri dan IKM, serta Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag	Bappeda, Diskominfos, Dispar, Diskop
				3	Mempercepat program hilirilisasi produk pangan dan sandang dalam Kelompok Bersama Satupintu (KBS)	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindag	
				4	Memantapkan pembangunan sentra sandang dan industri kerajinan rakyat	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag	
				5	Mempercepat pembangunan industri pemintalan benang dan bahan baku tekstil	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag	
				6	Memantapkan pembangunan industri olahan pangan berbasis budaya *branding* Bali (arak, brem, wine, jus, kopi, kakao, garam, dll) untuk:	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag	
					a Kebutuhan domestik	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindag	
					b Pemenuhan pasar dalam negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindag	
					c Pemenuhan pasar ekspor	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Disperindag	
				7	Memantapkan pembangunan industri sandang berbasis budaya *branding* Bali (songket, *endek*, sepatu, jam tangan, tas, pakaian jadi, dll) untuk kebutuhan domestik dan ekspor.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag	
				8	Memperluas akses pasar dalam negeri dan ekspor produk industri lokal Bali.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindag	
				9	Meningkatkan penggunaan teknologi digital untuk memperkuat industri lokal Bali	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag	Diskominfos
				10	Meningkatkan *event* festival dan pameran produk industri lokal Bali bertaraf lokal, nasional, dan internasional secara virtual /	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindag	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
						konvensional, seperti: festival dan pameran produk arak, produk kopi, *wine*, dan produk pangan lainnya serta produk sandang dan kerajinan rakyat Bali.			
					11	Mempercepat pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan desain produk dan kemasan produk industri lokal Bali	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindag	
						a Mengoptimalkan fungsi UPT Rumah Desain Produk dan Kemasan.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag	
						b Mempercepat terwujudnya desain produk berbasis budaya *branding* Bali sebagai penciri/ikon masing-masing wilayah Destinasi Pariwisata (Besakih, Tanah Lot, Uluwatu, Ubud, Sanur, Kuta, Kintamani) sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag	
					12	Mendorong dan memfasilitasi IKM untuk bersinergi dengan UMKM dan Koperasi dalam memproduksi berbagai Jenis Piala untuk berbagai cabang olahraga dan memproduksi berbagai jenis *Souvenir*/Cinderamata berbasis Budaya *Branding* Bali	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag	Diskop
					13	Memantapkan penjualan Arak Bali di pasar lokal (hotel dan restoran), nasional, dan global sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindag	Satpol PP
					14	Memfasilitasi pembangunan toko bebas bea (*Duty Free*) untuk produk lokal Bali di wilayah dekat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Disperindag	DPMPTSP
					15	Menertibkan Pelaku Usaha Arak Sintetis, Arak Hasil Fermentasi dan sejenisnya, yang produknya tidak berbasis tradisional dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag	Satpol PP

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
					16	Mempercepat implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020 – 2040.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag	
					17	Membentuk Komunitas Bisnis Swadaya (KBS) Pengusaha Muda Milenial untuk Bidang IKM	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Disperindag	
	Bidang UMKM dan Koperasi	Produk UMKM dan Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing	1	Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk UMKM dan Koperasi	1	Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi:			
			2	Meningkatkan dan perluasan pasar penggunaan produk UMKM dan Koperasi		a Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk dengan *Branding* Bali	Program Pengembangan UMKM	Diskop	Disperindag
			3	Menjadikan UMKM dan Koperasi sebagai penopang utama perekonomian Bali		b Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali;	Program Pengembangan UMKM	Diskop	Disperindag, Diskanlaut, Distanpangan
							Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	
					2	Mempercepat pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi *Kerthi* Bali sektor UMKM dan Koperasi	Program Pengembangan UMKM	Diskop	
					3	Mempercepat program penguatan kelembagaan (koperasi) dan permodalan usaha dalam Kelompok Bersama Satupintu (KBS).	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Diskop	
					4	Meningkatkan terbentuknya Koperasi Produksi.			
						a Koperasi bagi Petani dari hulu sampai hilir:	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Diskop	Distanpangan
							Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	
						b Koperasi Petani (Arak, Kopi, Jeruk, Salak, Manggis, Anggur, Pisang,dll.)	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Diskop	Distanpangan
							Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	
						c Koperasi Pengrajin (Tenun, Emas, Perak, Kayu, dll.)	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Diskop	Disperindag

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
					d Koperasi Nelayan, Petani Garam dan Pembudidaya Ikan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Diskop	Diskanlaut
					e Koperasi Peternak	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Diskop	Distanpangan
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	
				5	Memfasilitasi kemudahan memperoleh modal usaha bagi UMKM dan Koperasi dari berbagai sumber	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Diskop	
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskop	
				6	Memfasilitasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia/SDM UMKM dan Koperasi bersinergi dengan inkubator bisnis Perguruan Tinggi dan lembaga lain.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Diskop	Disnaker, Disdikpora
				7	Memperluas akses pasar produk UMKM dan Koperasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Diskop	Disperindag
						Program Pengembangan UMKM	Diskop	
				8	Memberdayakan BUMDES dan BUPDA untuk menyelenggarakan perdagangan produk lokal Bali			
				9	Memfasilitasi kemitraan antara Korporasi (BUMN, Swasta) dengan IKM, UMKM, dan Koperasi dalam membina, mengembangkan, memberdayakan, mendistribusikan, memasarkan, dan memanfaatkan produk lokal Bali.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Diskop	
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskop	
				10	Meningkatkan penggunaan teknologi digital untuk memperkuat UMKM dan Koperasi	Program Pengembangan UMKM	Diskop	Diskominfos
				11	Memantapkan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.	Program Pengembangan UMKM	Diskop	Distanpangan, Diskanlaut, Disperindag
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distanpangan	
				12	Meningkatkan event festival dan pameran produk UMKM dan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Diskop	Diskominfos, Disperindag
						Program Pengembangan UMKM	Diskop	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
					13	Mempercepat pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk dengan Branding Bali	Program Pengembangan UMKM	Diskop	Disperindag
					14	Membentuk Komunitas Bisnis Swadaya (KBS) Pengusaha Muda Milenial untuk Bidang UMKM dan Koperasi	Program Pengembangan UMKM	Diskop	Disdikpora, Disnaker
	Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital	Bali Pusat Kreatif dan Inovasi Digital	1	Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Bali	1	Menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital Bali yang kuat	n/a	Dispar (Membentuk Badan Ekonomi Kreatif dan Digital)	Biro Organisasi, Diskominfos
			2	Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing produk Ekonomi Kreatif dan Digital	2	Meningkatkan pemberdayaan sumber daya Krama Bali yang kreatif, profesional, dan kompetitif sebagai pelaku usaha ekonomi kreatif dan digital	n/a	(Dispar memfasilitasi pembentukan Badan Ekonomi Kreatif dan Digital)	Biro Organisasi, Diskominfos
			3	Meningkatkan dan memperluas pasar produk Ekonomi Kreatif dan Digita	3	Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan, dan pelindungan sumber daya lokal Bali sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif dan digital	n/a	(Dispar memfasilitasi pembentukan Badan Ekonomi Kreatif dan Digital)	Biro Organisasi, Diskominfos
			4	Menjadikan Ekonomi Kreatif dan Digital sebagai penopang utama perekonomian Bali	4	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan mudah diakses oleh pelaku usaha ekonomi kreatif dan digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfos	
					5	Mengembangkan wirausaha digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disdikpora	Kominfo, Disnaker
							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfos	
					6	Meningkatkan usaha IKM, UMKM, dan Koperasi dengan pemanfaatan teknologi digital	n/a	(Dispar memfasilitasi pembentukan Badan Ekonomi Kreatif dan Digital)	Diskop, Disperindag, Diskominfos
					7	Mengembangkan ekosistem startup dan inovasi teknologi informasi untuk mendorong muncul perusahaan-perusahaan teknologi baru dan	n/a	(Dispar memfasilitasi pembentukan	Disnaker (DisnakerESDM memfasilitasi

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
					menciptakan lapangan kerja dalam industri digital		Badan Ekonomi Kreatif dan Digital)	masyarakat dan/atau komunitas digital dalam membangun sinergi dengan para stakeholder terkait), Disperindag, Diskop UMKM, Diskominfos
				8	Memfasilitasi pengembangan industri kreatif digital berbasis seni-budaya Bali, termasuk meningkatkan akses pembiayaan yang sesuai, kompetitif, dan terjangkau	Program Pembinaan Sejarah	Disbud	Disbud merancang pengembangan seni budaya (kunjungan museum, pergelaran seni budaya, dll)secara digital melalui sinergi dengan dinas kominfo dan stakeholder lainnya
				9	Memantapkan fasilitasi perluasan pasar bagi usaha ekonomi kreatif dan digital di tingkat lokal, nasional, dan global	n/a	Dispar (memfasilitasi pembentukan Badan Ekonomi Kreatif dan Digital)	Disperindag, Diskominfos
				10	Membentuk Badan Ekonomi Kreatif dan Digital sebagai Wadah Kolaborasi Pentahelix yang mengatur kewenangan pengembangan ekonomi kreatif dan digital.	n/a	Dispar (Berkoordinasi dengan Tim Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif dan Digital)	Biro Organisasi, Diskominfos

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
	Bidang Pariwisata	Pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat	1	Meningkatkan ragam, kualitas, dan daya saing pariwisata Bali	1	Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi:			
			2	Meningkatkan dan perluasan promosi pariwisata Bali ditingkat nasional dan internasional		a Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali;	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dispar	
			3	Menjadikan Pariwisata sebagai penopang perekonomian Bali		b Mempercepat pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk dengan *Branding* Bali di sektor pariwisata;	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dispar	
						c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali;	Program Pemasaran Pariwisata	Dispar	Bapenda, DKLH, Disbud
						d Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali; dan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dispar	
						e Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tatanan Baru Bagi Wisatawan Mancanegara Selama Berada di Bali.	Program Pemasaran Pariwisata	Dispar	Satpol PP
					2	Mempercepat pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Sektor Pariwisata Berbasis Budaya dan Berorientasi Kualitas.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dispar	
					3	Mendorong masuknya Wisata Mancanegara yang cinta dan bertanggungjawab terhadap Bali.	Program Pemasaran Pariwisata	Dispar	
					4	Meningkatkan keterlibatan Masyarakat dan Komunitas lokal Bali sebagai pelaku usaha jasa pariwisata.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dispar	
					5	Membangun destinasi pariwisata baru berkelas dunia, berkualitas dan berdaya saing.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dispar	
					6	Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dispar	Disbud, (Dukungan

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
					kepada rakyat yang terintegrasi antar Kota/Kabupaten se-Bali.			Dispar Kab/Kota)
				7	Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar Kota/Kabupaten se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.	Program Pemasaran Pariwisata	Dispar	Brida, (Dukungan Dispar Kab/Kota)
				8	Memperkuat tata kelola kepariwisataan Bali dengan meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dispar	
				9	Bekerjasama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten menertibkan usaha pariwisata yang melanggar Peraturan Daerah.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dispar	Satpol PP, (Dukungan Dispar Kab/Kota)
				10	Melakukan tindakan tegas kepada wisatawan yang perilakunya tidak menghormati budaya Bali, melakukan tindakan kriminal, dan tindakan yang merusak citra pariwisata.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Disbud, D.PMA
				11	Memantapkan pelaksanaan program pembangunan pariwisata berbasis Desa melalui Desa Budaya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dispar	Disbud , D.PMD Dukcapil
				12	Pengembangan dan penataan Daerah Tujuan Wisata			
					a Jalur Luwus – Bedugul - danau Beratan – Pancasari - Wanagiri – Kawasan Turyapada Tower	Program Penyelenggaraan Jalan	D.PUPR	Dishub, Dispar Tabanan
					b Jalur Denpasar – Gilimanuk;	Program Penyelenggaraan Jalan	D.PUPR	Dishub (Dukungan Dispar Kab/Kota)
					c Jalur di Kawasan Kintamani;	Program Penyelenggaraan Jalan	D.PUPR	Dishub, Dispar Bangli
					d Jalur di Kawasan Jati Luwih; dan	Program Penyelenggaraan Jalan	D.PUPR	Dishub, Dispar Tabanan
					e Jalur di Kawasan Lovina	Program Penyelenggaraan Jalan	D.PUPR	Dishub, Dispar Buleleng
				13	Meningkatkan penyelenggaraan event festival dan promosi pariwisata berbasis budaya dan	Program Pemasaran Pariwisata	Dispar	Disbud, Disperindag

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
						berorientasi kualitas tingkat lokal, nasional, dan internasional.			
					14	Mengembangkan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Bali Berbasis Digital	Program Pemasaran Pariwisata	Dispar	Diskominfos
					15	Mempercepat pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk dengan Branding Bali di sektor pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dispar	Disperindag
					16	Mempercepat program dan rencana aksi Pariwisata Digital Budaya Bali dan Portal Satu Pintu Pariwisata Bali	Program Pemasaran Pariwisata	Dispar	Diskominfos
					17	Memantapkan implementasi kebijakan/regulasi di kalangan pelaku usaha jasa pariwisata:			
						a Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali.	n/a	Dispar (sosialisasi ke usaha pariwisata)	Satpol PP
						b Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.	n/a	Dispar (sosialisasi ke usaha pariwisata)	Satpol PP
						c Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.	n/a	Dispar (sosialisasi ke usaha pariwisata)	Satpol PP
						d Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.	n/a	Dispar (sosialisasi ke usaha pariwisata)	Satpol PP
						e Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.	n/a	Dispar (sosialisasi ke usaha pariwisata)	Satpol PP
						f Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.	n/a	Dispar (sosialisasi ke usaha pariwisata)	Satpol PP

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
					g	Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan	n/a	Dispar (sosialisasi ke usaha pariwisata)	Satpol PP
					h	Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dispar	Satpol PP
					i	Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru.	n/a	Dispar	Satpol PP
					18	Merancang dan mempromosikan produk dan paket Wisata Bahari Keliling Bali	n/a	Dispar	Diskanlaut
					19	Menyusun paket-paket wisata yang melingkupi kunjungan ke Desa Budaya, Pasar Tradisional, Sentra Industri Rakyat, dan Pameran IKM Bali Bangkit.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dispar	Disperindag, Diskop
					20	Memberi penghargaan kepada hotel dan restoran yang taat melaksanakan Ikrar Pelaku Usaha Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dispar	
					21	Membangun database wisatawan mancanegara untuk meningkatkan keramahtamahan, pelayanan, dan apresiasi kepada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali.	Program Pemasaran Pariwisata	Dispar	Diskominfos
					22	Membentuk Badan Pengelola Pariwisata Bali, sebagai Wadah Kolaborasi Pentahelix Pariwisata untuk mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat.	n/a	Dispar (Berkoordinasi dengan Tim Pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Bali)	
4	**Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara, serta Transportasi**	Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta trasportasi secara terkoneksi,	1	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan antar Kota/Kabupaten se-Bali	1	Memantapkan kualitas infrastruktur jalan Provinsi dan Kota/Kabupaten se-Bali	Program Penyelenggaraan Jalan	D.PUPR	Dishub

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
		terintegrasi, dan ramah lingkungan	2	Membangun infrastruktur jalan baru yang menghubungkan antar Kota/Kabupaten se-Bali	2	Menuntaskan pembangunan jalan pintas/shortcut Singaraja-Mengwi	Program Penyelenggaraan Jalan	D.PUPR	Dishub
			3	Membangun/mengembangkan pelabuhan/dermaga Bali timur, Bali utara, Bali barat, dan Bali selatan	3	Membangun jalan lingkar Bali dan jalan baru antar Kota/Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	D.PUPR	Dishub
			4	Mengembangkan kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai	4	Membangun jalan silang yang menghubungkan wilayah tengah Bali	Program Penyelenggaraan Jalan	D.PUPR	Dishub
			5	Membangun sarana transportasi ramah lingkungan yang menghubungkan wilayah padat penduduk dan pariwisata Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan	5	Membangun jalan alternatif baru dari arah Klungkung dan arah Bangli menuju Kawasan Besakih	Program Penyelenggaraan Jalan	D.PUPR	Dishub
			6	Mengintegrasikan infrastruktur darat, laut, dan udara	6	Membangun jalan alternatif baru dari arah Buleleng menuju Kawasan Besakih tanpa melewati jalur Kawasan Batur	Program Penyelenggaraan Jalan	D.PUPR	Dishub
			7	Menyelesaikan masalah kemacetan lalu	7	Mengkoordinasikan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali: Gilimanuk - Mengwi	Program Penyelenggaraan Jalan	D.PUPR	Dishub

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
			lintas wilayah padat penduduk, jalur pariwisata, dan pusat perekonomian	8	Mengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan Kereta Api / Urban Subway Rail: Fase 1, menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Sentral Parkir, Seminyak, Berawa, dan Cemagi; Fase 2, menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jimbaran, Unud, dan Nusa Dua; Fase 3, menghubungkan Sentral Parkir, Sesetan, Renon, dan Sanur; Fase 4, menghubungkan Renon, Sukawati, dan Ubud.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dishub	D.PUPR
				9	Melakukan studi kelayakan pembangunan kereta api keliling Bali	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dishub	D.PUPR
				10	Membangun Pelabuhan Gunaksa Kabupaten Klungkung, Pelabuhan Amed Kabupaten Karangasem, Pelabuhan Sangsit Kabupaten Buleleng	Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub	D.PUPR
				11	Meningkatkan kapasitas dan kualitas Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng.	Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub	D.PUPR
				12	Mempercepat pengembangan kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai		Dishub (Bekerja sama/koordinasi /sinergi kolaborasi dengan Perangkat Daerah/Stakeholder/Lembaga terkait)	D.PUPR
				13	Mengembangkan Bali sebagai hub logistik udara		Dishub (Bekerja sama/koordinasi/ sinergi kolaborasi dengan Perangkat Daerah/Stakeholder/Lembaga terkait)	
				14	Mempercepat pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub	DKLH, Disperindag, Diskop, Diskominfos

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
					15	Mengintegrasikan infrastruktur darat, laut, dan udara, serta transportasi ke destinasi pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi	Program Penyelenggaraan Jalan	D.PUPR	Dishub, Dispar
							Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dishub	D.PUPR
							Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub	
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub	
					16	Pengaturan jalur lalu lintas dan transportasi di wilayah padat penduduk, jalur pariwisata, dan pusat perekonomian untuk mengurai kemacetan di Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub	DPMPTSP, Satpol PP, D.PUPR, Kepolisian
5	**Lingkungan, Kehutanan, dan Energi: Program di bidang lingkungan, kehutanan, dan energi adalah untuk mewujudkan Alam Bali yang harmoni, memiliki ekosistem yang baik, dan mengembalikan hilangnya serta terpeliharanya kembali keanekaragaman hayati.**								
	Bidang Lingkungan	Mewujudkan Bali bersih, sehat, dan ramah lingkungan	1	Menjadikan Bali sebagai pulau bebas sampah plastik sekali pakai	1	Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi:			
			2	Membudayakan pengelolaan sampah berbasis Desa/Desa Adat/Kelurahan dan komunitas		a Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;	Program Pengelolaan Persampahan	DKLH	Satpol PP
			3	Membudayakan pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut secara Niskala – Sakala		b Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber; dan	Program Pengelolaan Persampahan	DKLH	Satpol PP
						c Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DKLH	Satpol PP
					2	Menuntaskan pembangunan dan pengelolaan TPS3R serta TPST di Kota/Kabupaten se-Bali	Program Pengelolaan Persampahan	DKLH	
					3	Memperluas jangkauan penerapan program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sampai di Desa/Desa Adat, pasar, sekolah, dan komunitas lainnya.	Program Pengelolaan Persampahan	DKLH	D.PMA, Disperindag, Disdikpora, D.PMD Dukcapil

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				4	Menerapkan insentif bagi masyarakat (seperti jaminan kesehatan dan layanan publik lainnya) yang memilah sampah rumah tangga secara mandiri.	Program Pengelolaan Persampahan	DKLH	Dinkes, D.PMD Dukcapil
				5	Mengkoordinasikan pembangunan instalasi pengolahan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	DKLH	D.PUPR, Dinkes
				6	Memantapkan pelaksanaan Program GOTONG-ROYONG *SAD KERTHI* membersihkan danau, mata air, sungai, dan laut serta penghijauan.			
					a Kegiatan dilaksanakan secara rutin 1 kali dalam sebulan.	Program Pengelolaan Persampahan	DKLH	Perangkat Daerah terkait
					b Kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan OPD terkait, Balai Air, TNI dan Polri, Pemda Kota/Kabupaten, Lembaga Pendidikan, dan LSM.	Program Pengelolaan Persampahan	DKLH	Stalkholder Terkait
				7	Memantapkan budaya hidup bersih pada seluruh elemen masyarakat:			
					a Desa Adat, Desa, Kelurahan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DKLH	D.PMD Dukcapil (Bukan leading sektor terkait urusan Lingkungan Hidup, hanya sebagai OPD Pendukung)
					b Perguruan Tinggi, Sekolah	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DKLH	Disdikpora (sosialisasi/him bauan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sampai di

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
									sekolah (SMA/SMK/SLB)
						c Instansi Pemerintah dan Swasta	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DKLH	Dinkes
						d Komunitas Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DKLH	Dinkes
	Bidang Kehutanan	Mewujudkan Bali hijau, sejuk, dan indah	1	Meningkatkan luasan hutan melalui penghijauan untuk meningkatkan kualitas udara Bali	1	Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi:			
			2	Mempercepat penurunan emisi karbon dalam rangka pencapaian Net Zero Emission (NZE)		a Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada, dan Penghijauan; dan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	DKLH	Distan, Diskes, D.PMA, Disbud
			3	Melindungi dan merawat hutan di seluruh wilayah Bali		b Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelindungan Tumbuhan dan Satwa Liar.	Program Pengelolaan Hutan	DKLH	Distan
			4	Memberdayakan kawasan hutan sebagai destinasi ekowisata	2	Mengkoordinasikan pelaksanaan program perluasan hutan, tutupan lahan, dan penghijauan:			
						a Kawasan Hutan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	DKLH	D.PUPR
						b Kawasan Sempadan danau, Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, dan Sekitar Mata Air	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	DKLH	D.PUPR
						c Kawasan tertentu (Pelabuhan, Bandara Udara, Pusat Kebudayaan Bali)	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	DKLH	Dishub, D.PUPR
						d Koridor jalan utama	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	DKLH	D.PUPR

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
						e Kawasan Hutan *Mangrove*	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	DKLH	D.PUPR
					3	Memanfaatkan lahan tidur di Desa, di Kota, di perkantoran, di pinggir jalan, dan kawasan lain untuk penghijauan seperti pohon cempaka, bunga jepun, pucuk arjuna, dan tanaman lain; tanaman produktif seperti buah-buahan, obat-obatan, dan sejenisnya; dan taman tematik.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	DKLH	Distan, Dinkes, D.PUPR
					4	Mengkoordinasikan pelaksanaan program penanaman *mangrove* dan cemara udang untuk pencegahan abrasi/longsor	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	DKLH	BPBD
					5	Menyelenggarakan program penanaman bambu untuk menjaga sumber air dan mencegah longsor	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	DKLH	BPBD
					6	Mengkoordinasikan dan menyelesaikan Peta Jalan Penghijauan untuk memastikan capaian tutupan lahan dan hutan sebesar minimal 30% dari luas wilayah daratan Bali.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	DKLH	D.PUPR
					7	Mengintensifkan pengawasan dan penegakan terhadap regulasi bidang kehutanan	Program Pengelolaan Hutan	DKLH	D.PUPR, Satpol PP
					8	Memfasilitasi dan membina pengelolaan Hutan oleh Desa/Desa Adat di seluruh Bali	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	DKLH	D.PMA, D.PMD Dukcapil
					9	Mengembangkan kawasan hutan tematik/kebun raya sebagai destinasi ekowisata	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	DKLH	Dispar
					10	Mengembangkan kawasan hutan dengan tanaman endemik Bali yang produktif	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	DKLH	Distan
	Bidang Energi	Bali mandiri energi dengan energi bersih	1	Mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih	1	Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi:			
			2	Menjadikan Bali bebas dari polusi untuk mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon/Net		a Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050;	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Disnaker ESDM	Bappeda, Dishub, DKLH, DISPUPR, DPMA, Dispar, Biro PBJEK

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
				Zero Emission (NZE)					
			3	Menjadikan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT)		b Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih;	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Disnaker ESDM	Bappeda, Dishub, DKLH, DISPUPR, DPMA, Dispar, Biro PBJEK
			4	Melakukan upaya promosi investasi dan promosi dan promosi potensi investasi daerah		c Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; dan	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Disnaker ESDM	Bappeda, Dishub, DKLH, DISPUPR, DPMA, Dispar, Biro PBJEK
			5	Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi investor daerah		d Surat Edaran Gubernur Bali 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Provinsi Bali.	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Disnaker ESDM	
					2	Mempercepat pelaksanaan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan untuk mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon/Net Zero Emission (NZE)	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Disnaker ESDM	Bappeda, Dishub, DKLH, DISPUPR, DPMA, Dispar, Biro PBJEK
					3	Mengkoordinasikan program pembangunan Pembangkit Listrik berbasis Tenaga Gas (PLTG), Energi Baru Terbarukan, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).	n/a	DisnakerESDM (Telah terlaksana pemindahan Ex PLTG Grati 2 x 100 MW ke Pesanggaran Th 2022)	Bappeda, Dishub, DKLH, DISPUPR, DPMA, Dispar, Biro PBJEK
					4	Mendorong penggunaan PLTS Atap dengan kapasitas 18 MWp tersebar di semua Kota/Kabupaten.	n/a	DisnakerESDM (Memberikan Pemahaman SE 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi Bali)	Bappeda, Dishub, DKLH, DISPUPR, DPMA, Dispar, Biro PBJEK

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				5	Menjadikan penyaluran energi dengan kabel bawah laut Jawa – Bali sebagai cadangan (reserve sharing)	n/a	DisnakerESDM (Berkoordinasi dan bersurat ke Pemerintah Pusat/PLN Pusat)	DKLH
				6	Menuntaskan konversi pembangkit listrik berbahan bakar fosil menjadi energi bersih (Gas dan Energi Baru Terbarukan) agar Bali bebas dari polusi	n/a	DisnakerESDM (Berkoordinasi dan bersurat ke Pemerintah Pusat/PLN Pusat)	
				7	Percepatan implementasi dan pelaksanaan Kebijakan dan Program Energi Baru Terbarukan:	n/a	DisnakerESDM (Memberikan Pemahaman SE 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi Bali)	
					a Memperluas penggunaan PLTS Atap untuk perkantoran pemerintah dan Swasta, Hotel, Mall/Pasar Swalayan, Pasar Rakyat, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, dan Perumahan.	n/a	DisnakerESDM (Memberikan Pemahaman SE 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi Bali)	Disdikpora, Dinkes, D.PUPR, Disperindag
					b Memperluas penggunaan PLTS untuk penerangan jalan, taman, Pura Sad Kahyangan, dan Kawasan	n/a	DisnakerESDM (Memberikan Pemahaman SE 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi Bali)	D.PUPR, Dishub, Biro Pem Kesra

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*					PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				c Mempercepat penerapan zonasi penggunaan PLTS Atap:	n/a	DisnakerESDM (Memberikan Pemahaman SE 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi Bali)	D.PUPR mendukung penetapan zonasi dalam rencana detail tata ruang kab/kota dan melakukan monev percepatan penetapan RDTR
				- Jembrana: Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Pengambengan, Pura Rambut Siwi, dan Pura Jagatnatha	n/a		D.PUPR, Dishub, Biro Pem Kesra
				- Tabanan: Kawasan Tanah Lot, Pura Watukaru, DTW Bedugul - danau Beratan	n/a		D.PUPR, Dishub, Biro Pem Kesra, Dispar
				- Badung: Nusa Dua, Kuta, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Pura Uluwatu, dan Pura Peti Tenget	n/a	DisnakerESDM (telah terpasang di Bandara Ngurah Rai)	D.PUPR, Dishub, Biro Pem Kesra
				- Denpasar: Sanur, Pelabuhan Benoa, BTID Serangan, dan Pura Jagatnatha	n/a	-	D.PUPR, Dishub, Biro Pem Kesra
				- Gianyar: Ubud, Desa Taro, Tampak Siring, dan Pura Taman Pule	n/a	DisnakerESDM (telah terpasang di Istana Tampak Siring)	D.PUPR, Dishub, Biro Pem Kesra
				- Klungkung: Kertha Gosa, Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, dan Pura Gowa Lawah	n/a	-	D.PUPR, Dishub, Biro Pem Kesra
				- Bangli: Penglipuran, Batur Global Geopark, dan Pura Kehen	n/a	DisnakerESDM (telah terpasang di Perseroda BMB Bangli)	D.PUPR, Dishub, Biro Pem Kesra

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
					- Karangasem: Kawasan Pura Besakih dan Taman Ujung	n/a	DisnakerESDM (telah terpasang di parkir Pura Besakih, Karangasem	D.PUPR, Dishub, Biro Pem Kesra
					- Buleleng: Pura Ponjok Batu, Pura Pulaki, Pura Melanting, Pura Segara Rupak, dan Pelabuhan Celukan Bawang	n/a	-	D.PUPR, Dishub, Biro Pem Kesra
				8	Mempercepat implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub	
					a Penggunaan di kalangan ASN dan pegawai BUMN/BUMD	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub	BKPSDM, Biro PBJEK
					b Penggunaan di Lembaga Pendidikan, Kesehatan, dan Perangkat Daerah Provinsi Bali	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub	Disdikpora, Dinkes, dan Perangkat Daerah
					c Penerapan zonasi/percontohan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai:	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub	Dispar, D.PMD Dukcapil, Bappeda, D. PUPR, D.PMA
					- Jembrana: Desa Budaya Belimbing Sari			
					- Tabanan: Kawasan Tanah Lot			
					- Badung: Nusa Dua, Kuta, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai			
					- Denpasar: Sanur, Pelabuhan Benoa, BTID Serangan			
					- Gianyar: Ubud, Desa Taro, Tampak Siring			
					- Klungkung: Nusa Penida dan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali			
					- Bangli: Desa Penglipuran			
					- Karangsem: Amed dan Tulamben			
					- Buleleng: Lovina			
				9	Mengkoordinasikan / fasilitasi rencana pembangunan industri rakitan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.	-	-	DPMPTSP (melakukan upaya promosi investasi dan informasi potensi investasi

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	BIDANG	TEMA	ARAH KEBIJAKAN		NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
									daerah), Dishub, Disperindag
					10	Mengkoordinasikan / fasilitasi rencana pembangunan industri panel surya	n/a	-	DPMPTSP (melakukan upaya promosi investasi dan informasi potensi investasi daerah), Disperindag
					11	Menyelenggarakan EXPO Penggunaan Energi Bersih dari Hulu sampai Hilir	n/a	DisnakerESDM (Telah dilaksanakan Expo/Festival/Event/Seminar/Workshop pada 3 tahun terakhir)	Disperindag
					12	Mendorong Pemerintah Daerah mensyaratkan penggunaan Energi Baru Terbarukan untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau perizinan lainnya	n/a	DisnakerESDM (Untuk memasukkan persyaratan PLTS Atap pada Persetujuan Bangunan Gedung berada pada kewenangan Dinas PMPTSP Kab/Kota)	DPMPTSP (menciptakan regulasi untuk membangun iklim investasi yang kondusif)
					13	Mendorong investasi pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Energi Baru Terbarukan	n/a	DisnakerESDM (Telah ada beberapa EPC terkait pembangunan dan pemasangan PLTS Atap di Provinsi Bali)	DPMPTSP (memberikan n insetif dan kemudahan berusa bagi investor daerah)

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
					14	Membentuk Badan Pengembangan Energi Baru Terbarukan, sebagai Wadah Kolaborasi Pentahelix Energi Bersih untuk mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih	n/a	BUMD - Perumda Kertha Bali Saguna (KBS) Provinsi Bali	
6	**Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali Bidang Bali Pulau Digital**								
	Bidang Pulau Digital	Bali Samasta Digital	1	Membangun kebijakan Bali Pulau Digital dari hulu sampai hilir	1	Membentuk regulasi dan kebijakan yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital untuk pemajuan ekonomi kreatif dan digital Bali	n/a	Dispar	Dispar sebagai leading bersinergi dengan Biro Hukum dan Diskominfos
							Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum	
			2	Mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan jangkauan wilayah dan kecepatan internet	2	Membentuk Badan Ekonomi Kreatif dan Digital	n/a	Dinas Pariwisata (Berkoordinasi dengan Tim Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif dan Digital)	Biro Organisasi, Diskominfos
			3	Meningkatkan akses dan penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari	3	Membangun Kawasan Bali Samasta Digital (KBS-Digital)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfos	D.PUPR
			4	Meningkatkan keterampilan digital masyarakat agar lebih siap mengadopsi teknologi digital untuk kegiatan ekonomi dan	4	Mengembangkan infrastruktur jaringan internet berkecepatan tinggi guna memastikan akses yang luas dan terjangkau di seluruh wilayah Bali untuk mewujudkan satu kesatuan wilayah Bali dalam 1 pulau, 1 pola, dan 1 tata kelola	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfos	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
				kehidupan sehari-hari					
			5	Memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat adat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali	5	Membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Digital / Talenta Digital	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Disbud	Disbud merancang Pembentukan SDM Digital/Talenta Digital melalui sinergi dengan Diskominfos dan stakeholder lainnya
					6	Membangun SMK Teknologi dan Digital di Kawasan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	Diskominfos
					7	Meningkatkan literasi digital masyarakat, pelatihan penggunaan teknologi, keterampilan komputer untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi perkembangan teknologi digital	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfos	Disdikpora
							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfos	
							Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Diskominfos	D.PMD Dukcapil
					8	Memberdayakan satuan pendidikan formal dan non-formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai pusat literasi digital	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	Diskominfos
							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfos	
					9	Meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik, dan sektor swasta	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi	Sinergi Biro Organisasi dengan Dinas Kominfo
							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfos	
					10	Mengembangkan WEB di semua Desa/Desa Adat sesuai potensinya	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA	Diskominfos
									Tugas DPMD Dukcapil: - Pendataan web desa - Fasilitator permohonan desa ke Diskominfos, jika ada desa yang

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
									membutuhkan bantuan pembuatan web desa/potensi desa
					11	Meningkatkan keterampilan komputer dan digital bagi Perangkat Desa dan Prajuru Desa Adat	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA	Diskominfos
							Program Administrasi Pemerintahan Desa	D.PMD Dukcapil,	Diskominfos
					12	Membangun dan memfasilitasi Yowana Desa Adat menuju komunitas digital	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA	Diskominfos
					13	Memfasilitasi dan menghubungkan komunitas digital Desa/Desa adat dengan penyelenggara marketplace dan platform digital untuk memberikan akses dan peluang usaha	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA	Diskominfos
							Program Peningkatan Kerja Sama Desa	D.PMD Dukcapil,	Diskominfos
					14	Memberdayakan wantilan/balai banjar sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point, pusat pertemuan (Hub), dan ruang kerja bersama (co-working space) komunitas digital Desa/Desa Adat	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA	Diskominfos
					15	Pelestarian budaya benda (tangible) dan tak benda (intangible) dalam aset digital sehingga memberi dampak pada penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali	Program Pengembangan Kebudayaan	Disbud (Ceraken Kebudayaan Bali)	Diskominfos
					16	Menyelenggarakan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang menghubungkan dan mengintegrasikan pemanfaatan teknologi digital se-Bali	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfos	
							Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kominfos	D.PMD Dukcapil
	Bidang Keamanan Bali	Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat	1	Mewujudkan rasa aman untuk kehidupan masyarakat Bali dan wisatawan di seluruh wilayah Bali	1	Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengaman Lingkungan terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat).	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	D.PMA, Satpol PP
			2	Memantapkan pengamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan	2	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama terpadu dengan seluruh lembaga penyelenggara keamanan Negara dan Masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	Satpol PP

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
				Jagat, destinasi pariwisata, pusat perekonomian, dan pusat keramaian					
			3	Memantapkan penyelenggaraan keamanan oleh Negara dan Sipandu Beradat	3	Membangun dan memperkuat peran pos keamanan terpadu pada lokasi strategis, pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, pusat perekonomian, dan pusat keramaian	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	Biro Pem Kesra, Disbud, Dispar dan Disperindag
			4	Meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan	4	Memperluas sistem pengamanan digital dalam pemantauan real time, pelaporan insiden, dan mitigasi tanggap darurat pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan pusat keramaian	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	Biro Pem Kesra, Disbud, Dispar, Diskominfos, dan Disperindag
			5	Membangun kesadaran masyarakat bertanggungjawab bersama menjaga keamanan Bali	5	Meningkatkan kapasitas dan kehandalan Sipandu Beradat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	Diskominfos
							Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA (Membangun aplikasi Trepti Bali)	Diskominfos
			6	Mengintegrasikan penyelenggaraan keamanan di seluruh wilayah Bali	6	Memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan pelatihan keterampilan pengamanan untuk Pacalang Desa Adat dan Linmas	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	D.PMA
							Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	D.PMA (Mendorong percepatan peningkatan kapasitas pecalang untuk memperoleh sertifikat garda pratama)	Kesbangpol

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				7	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana keamanan pada lokasi strategis, Pura Kahyangan Jagat, destinasi pariwisata, Pusat perekonomian, dan Pusat keramaian	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	Biro Pem Kesra, Disbud, Dispar, dan Disperindag
				8	Meningkatkan kampanye kesadaran masyarakat untuk bertanggungjawab bersama dalam menjaga keamanan Bali	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	Satpol PP,
				9	Memberikan pembelajaran penunjang terkait kesadaran membangun keamanan Bali pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	Satpol PP, Disdikpora
				10	Membangun sistem Keamanan Bali Semesta terintegrasi	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	
				G. Perempuan, Anak dan Kaum Marginal				
				1	Pemerintah Provinsi Bali telah memberlakukan kebijakan yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengarusutamaan Gender.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinsos P3A	
				2	Mempertahankan Pemerintah Provinsi Bali sebagai Provinsi Layak Anak.	Pemenuhan Hak Anak	Dinsos P3A	
				3	Mendorong pelaksanaan edukasi /sosialisasi tentang perlunya pelindungan kaum perempuan, anak, dan marginal berbasis Desa/Desa Adat.	Perlindungan Perempuan	Dinsos P3A	
						Pemenuhan Hak Anak	Dinsos P3A	
						Perlindungan Khusus Anak	Dinsos P3A	
				4	Percepatan program upaya pengentasan kemiskinan dengan target, tingkat kemiskinan mencapai dibawah 1%.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos P3A	
						Rehabilitasi Sosial	Dinsos P3A	
				5	Mengembangkan program khusus Akademi Perempuan Bali, untuk mempercepat peningkatan kapasitas kaum perempuan Bali dalam politik, kepemimpinan, kewirausahaan, parenting, kesehatan mental, dan keahlian lainnya.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinsos P3A	
				6	Memberlakukan kebijakan untuk memberi ruang lebih besar kepada kaum difabel direkrut sebagai pegawai honorer, swasta, dan pelaku usaha jasa pariwisata.	Rehabilitasi Sosial	Dinsos P3A	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*						PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**	**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
				7	Menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan kaum perempuan dan anak di Provinsi dan Kota/Kabupaten se-Bali.	Perlindungan Perempuan Perlindungan Khusus Anak	Dinsos P3A Dinsos P3A	
				8	Memberi tunjangan/insentif, termasuk bedah rumah yang disiapkan bagi kaum perempuan lansia oleh Pemprov Bali dan Pemkot/Pemkab se-Bali.	n/a	Dinsos P3A bersinergi dengan Dinsos Kabupaten/Kota	
				9	Meningkatkan prosentase perempuan dalam rekrutmen pegawai, pengisian, dan promosi jabatan di Pemprov Bali.	n/a	Dinsos P3A bersinergi dengan BKPSDM	
				H. Kesehatan Fisik dan Mental				
				1	Meningkatkan program pengembangan kehidupan masyarakat untuk memperkuat karakter, jati diri, dan integritas mulai dari Pendidikan Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.	n/a	Disdikpora bersinergi denganm Disdikpora Kabupaten/Kota	
				2	Menggalakkan aktivitas masyarakat terutama anak muda Gen-Z dan Millenial dalam kegiatan tradisi, seni, dan budaya, serta olah raga, berbasis Desa/Desa Adat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan spirit kolektif dan kebersamaan; gilik-saguluk, salunglung-sabayantaka, para-sparo sarpana-ya.	n/a	Disdikpora bersinergi dengan Disdikpora Kabupaten/Kota	D. PMA
				3	Mendorong Desa/Desa Adat agar aktif melaksanakan kegiatan kesenian, olahraga bersama, dan kegiatan sejenisnya.	n/a	D.PMA dan DPMD Dukcapil	
				4	Mendorong Desa/Desa Adat sering mengajak Krama-nya mengikuti kegiatan spiritual / Metirta Yatra untuk mewujudkan kehidupan yang tenang, damai, dan bahagia *niskala-sakala*, dengan bantuan dana dari Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot.	n/a	D. PMA bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				5	Memanfaatkan Pasraman untuk melaksanakan kegiatan guna memberi pencerahan kehidupan.	n/a	D. PMA bersinergi dengan MDA Kabupaten/Kota	

PROGRAM *NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*							PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	**BIDANG**	**TEMA**	**ARAH KEBIJAKAN**		**NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL**				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
					6	Menyediakan fasilitas konsultasi kesehatan mental di Puskesmas, Sekolah, dan Perguruan Tinggi.	n/a	Dinkes Provinsi bersinergi dg Dinkes/RSUD Kabupaten/Kota /Puskesmas	
					7	Mendorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk menyediakan Pusat Layanan Kesehatan Mental Terpadu.	n/a	Dinkes Provinsi bersinergi dg Dinkes/RSUD Kabupaten/Kota	
					8	Fasilitasi konsultasi psikologis bekerjasama dengan perguruan tinggi	n/a	Dinkes Provinsi bersinergi dg Perguruan TInggi	
					9	Meningkatkan kapasitas dan layanan Rumah Sakit Jiwa milik Pemprov Bali di Bangli.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjabarkan arah pelaksanaan pembangunan Provinsi Bali dalam jangka menengah melalui penyusunan program perangkat daerah yang terencana, terukur, dan terintegrasi, guna mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2025–2029. Penyusunan program pembangunan daerah ini diarahkan untuk:

- Mewujudkan enam bidang prioritas pembangunan Bali yang berfokus pada pelestarian alam, peningkatan kualitas manusia, pemajuan kebudayaan, penguatan tata pemerintahan, pengembangan ekonomi *Kerthi* Bali, serta pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkelanjutan,
- Menjamin konsistensi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan program**,**
- Memastikan keterpaduan antara RPJMD Semesta Berencana Provinsi Provinsi Bali Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**.**

Selain itu, bab ini juga memuat uraian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dalam:

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Bali yang bersifat lintas sektor dan strategis,
- Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang mencerminkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah,
- Keterhubungan antara kinerja perangkat daerah dengan upaya pencapaian indikator makro pembangunan Provinsi Bali.

Penekanan pembangunan lima tahun ke depan adalah pada penguatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, pelayanan publik prima, dan transformasi digital berbasis nilai-nilai kearifan lokal Bali.

Melalui perencanaan dan pelaksanaan program prioritas perangkat daerah secara sistematis dan terpadu, diharapkan pembangunan Bali tidak hanya terarah dan terukur, tetapi juga berkelanjutan, berkeadilan, dan selaras dengan filosofi kehidupan Bali yang harmonis: *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi*

4.1 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dikelola oleh Perangkat Daerah (PD) dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Program ini dirancang untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, dengan berpedoman pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta berorientasi pada hasil (*outcome-based approach*).

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, program perangkat daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang harus selaras dengan dokumen perencanaan strategis lainnya, seperti Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP). Dengan demikian, program perangkat daerah menjadi instrumen utama dalam implementasi kebijakan pembangunan yang efektif dan berbasis kinerja.

Program perangkat daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan tujuan untuk:

1. Mewujudkan Sinergi dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan.
   Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan kebijakan lebih terarah dan berdampak nyata.
2. Memastikan Penggunaan Anggaran yang Efektif dan Berbasis Kinerja.
   Mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan dan prinsip *value for money*, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah.
3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
   Memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, sehingga pencapaian program dapat dievaluasi secara berkala.
4. Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
   Mengembangkan program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan hidup.
5. Mendukung Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik.
   Mendorong program perangkat daerah yang mengintegrasikan teknologi digital dan *smart governance*, guna mempercepat reformasi birokrasi dan efisiensi layanan.

6. Menjaga Keberlanjutan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal.
   Menyelenggarakan program yang mendukung pelestarian adat, budaya, dan lingkungan hidup sebagai bagian dari konsep *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*.

Dengan adanya program perangkat daerah yang terstruktur dan berbasis kinerja, diharapkan pembangunan Provinsi Bali dalam lima tahun ke depan dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Adapun Program Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2026-2030

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,72	83,55	1.318.991.738.243	83,97	1.356.358.335.976	84,39	1.354.440.840.457	84,81	1.427.788.975.223	85,23	1.455.766.807.757	Pendidikan
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Indeks SPM Pendidikan	76,87	80,00	493.240.474.028	81,20	494.886.098.033	82,42	502.489.292.438	83,65	507.563.273.595	84,90	511.431.731.431	Pendidikan
			Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	79,45	82,50	1.006.925.949	83,33	1.011.765.000	84,16	1.027.309.277	85,00	1.037.682.728	85,85	1.045.591.558	Pendidikan
3	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	62,50	65,00	94.950.563	66,33	105.550.674	67,65	110.324.416	69,00	115.590.352	70,39	118.090.030	Pendidikan
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang tersertifikasi	52,21	53,26	92.237.694	53,79	99.605.385	54,33	101.135.675	54,87	102.156.905	55,42	102.935.514	Pendidikan
5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	72,40	73,86	61.848.772	74,59	66.789.081	75,34	67.815.197	76,10	68.499.975	76,85	69.022.056	Pendidikan
	TOTAL					1.813.488.175.249		1.852.528.144.149		1.858.236.717.460		1.936.676.178.778		1.968.534.178.346	

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	83,4	715.877.147.088	83,6	745.645.443.915	83,8	750.070.999.357	84	787.768.626.157	84,2	816.502.734.247	Kesehatan
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Balita	12.7 Per 1000 Kelahiran Hidup	11.46 Per 1000 Kelahiran Hidup	207.897.386.273	10.84 Per 1000 Kelahiran Hidup	231.803.082.017	10.22 Per 1000 Kelahiran Hidup	247.053.066.840	9.6 Per 1000 Kelahiran Hidup	269.005.924.514	8.98 Per 1000 Kelahiran Hidup	251.324.968.382	Kesehatan
			Angka keberhasilan pengobatan TBC	85%	86%		87%		88%		89%		90%		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	85	86		86,5		87		87,5		88		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	84,17%	84,25%	304.444.442	84,50%	354.547.925	84,75%	388.229.935	85,00%	426.130.276	85,00%	456.076.215	Kesehatan
			Tingkat Kelulusan peserta pelatihan sumber daya kesehatan	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi standar	75%	78%	215.706.089	81%	251.205.592	84%	275.070.093	87%	301.923.381	90%	323.140.788	Kesehatan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 15% penduduknya menerapkan perilaku hidup sehat	N/A (Indikator baru)	2 kab/kota	518.356.486	3 kab/kota	603.664.220	4 kab/kota	661.012.247	5 kab/kota	725.542.534	6 kab/kota	776.529.414	Kesehatan
	TOTAL					924.813.040.378		978.657.943.669		998.448.378.472		1.058.228.146.862		1.069.383.449.046	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	85	62.457.341.084	85	64.430.758.201	85	64.724.139.677	85	67.223.212.515	85	69.128.070.595	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	48,63%	48,87%	59.527.596.687	48,88%	35.618.170.703	48,89%	35.681.808.734	48,90%	35.379.662.311	48,91%	34.771.257.921	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Persentase Cakupan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	81,18%	83,13%	38.322.491.199	83,73%	24.281.875.053	84,33%	24.415.632.369	84,93%	24.608.947.210	85,53%	24.185.760.821	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya persentase cakupan layanan Air Minum Aman	Persentase cakupan layanan Air Minum Aman	34,80%	36,00%%	39.727.646.053	37,00%	5.856.902.580	38,00%	6.413.307.615	39,00%	7.039.396.745	40,00%	7.534.084.315	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Persentase Cakupan Layanan Air Minum Aman	Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman	34,80%	36,00%	29.820.845.339	37,00%	31.571.423.445	38,00%	31.427.913.494	39,00%	31.360.013.109	40,00%	30.512.555.580	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	90,90%	92,50%	3.827.204.879	93,00%	4.165.160.249	94,50%	4.560.849.967	95,50%	5.006.095.815	96,00%	5.357.894.906	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	100,00%	100%	11.011.772.985	100%	12.413.441.061	100%	12.974.865.708	100%	13.594.175.022	100%	13.888.153.378	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Pengembangan Permukiman	Meningkatnya Persentase cakupan pelayanan air minum layak	Persentase cakupan pelayanan air minum layak	N/A (Indikator baru)	N/A (Indikator baru)		77%	1.510.484.224	78%	1.653.980.042	79%	1.800.443.562	80%	1.897.771.702	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	75,00%	77%	157.231.323.296	78%	101.738.070.496	79%	137.146.426.138	80%	149.070.780.044	81%	133.492.489.144	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Persentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	81,16%	84,10%	276.156.302.676	85,38%	197.564.771.129	87,04%	236.916.751.082	88,90%	240.352.364.543	90,72	219.167.942.479	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi di Provinsi Bali	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	22,77%	9,53%	1.051.511.148	11,85%	1.165.510.165	14,16%	1.116.259.095	16,48%	1.169.539.774	18,79%	1.194.831.443	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	100%	100%	5.363.915.538	100%	6.246.673.812	100%	6.840.107.066	100%	7.507.861.826	100%	8.035.470.378	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Nilai kinerja penyelenggaraan Penataan Ruang	93,62%	78,04	1.741.325.836	78,57	2.027.825.071	79,10	2.220.468.207	79,63	2.437.237.945	80,16	2.608.512.751	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	TOTAL					686.239.276.720		488.591.066.189		566.092.509.194		586.549.730.421		551.774.795.413	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	100,00%	100%	948.670.296	100%	1.104.796.273	100%	1.209.751.785	100%	1.327.851.912	100%	1.421.165.566	Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	5,94%	6,96%	2.702.748.545	6,76%	3.147.549.292	6,57%	3.446.566.094	6,37%	3.783.031.721	6,13%	4.048.881.031	Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU	Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU	70,00%	72,00%	1.868.624.229	73%	2.176.150.231	74%	2.382.884.239	75%	2.615.509.588	76%	2.799.312.282	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	TOTAL					5.520.043.070		6.428.495.796		7.039.202.118		7.726.393.221		8.269.358.879	

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,3	84	28.006.524.229	84,2	29.171.118.642	84,4	29.344.255.089	84,7	30.819.060.512	85	31.943.195.424	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kapasitas SDM Pol PP	Persentase SDA/M Pol PP yang ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensinya	100%	100%	856.038.370	100%	1.057.338.957	100%	1.202.894.576	100%	1.350.332.672	100%	1.459.824.386	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	1.426.730.617	100%	1.661.532.647	100%	1.879.522.776	100%	2.100.517.489	100%	2.189.736.579	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan terhadap masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100%	100%	20.687.593.942	100%	24.167.747.590	100%	26.313.318.858	100%	28.507.023.068	100%	29.196.487.722	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	N/A (Indikator baru)	100%	178.341.327	100%	207.691.581	100%	225.542.733	100%	243.810.066	100%	255.469.268	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	84,98 Persen	85,25 Persen	24.896.177.448	85,50 Persen	25.931.434.410	85,75 Persen	26.085.342.680	86 Persen	27.396.359.256	86,25 Persen	28.395.650.066	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
5	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya pengetahuan, mitigasi dan kesiapsiagaan Sumber Daya dalam Pengurangan Risiko Bencana	Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana	100 Persen	100 Persen	5.284.247.112	100 Persen	6.279.763.934	100 Persen	6.751.732.081	100 Persen	7.015.594.965	100 Persen	7.025.797.599	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Meningkatnya kapasitas respons tanggap bencana	Persentase penanganan darurat bencana terhadap setiap kejadian	100 Persen	100 Persen	2.249.205.149	100 Persen	2.789.937.998	100 Persen	3.109.709.808	100 Persen	3.518.079.844	100 Persen	3.769.338.365	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Meningkatnya Pemulihan Pasca Bencana	Persentase penanganan pasca bencana terhadap setiap kejadian	100 Persen	100 Persen	355.790.948	100 Persen	453.145.267	100 Persen	484.916.876	100 Persen	517.627.524	100 Persen	510.938.535	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
	TOTAL					83.940.649.142		91.719.711.026		95.397.235.477		101.468.405.396		104.746.437.944	

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai	A Nilai	26.496.312.832	A Nilai	27.377.527.047	A Nilai	27.520.514.001	A Nilai	28.654.227.694	A Nilai	29.688.586.566	Sosial
2	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PPKS	13,88%	62,11%	337.065.108	62.17%	368.558.151	62.23%	378.535.887	62.28%	389.345.920	62.34%	390.138.067	Sosial
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	N/A (Indikator baru)	100%	32.101.439	100%	33.985.895	100%	33.831.410	100%	33.758.317	100%	32.846.049	Sosial
4	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang mendapatkan pelayanan dasar	25,67%	39,89%	5.624.950.729	39.95%	5.975.450.291	40.01%	5.973.474.100	40.07%	5.985.699.528	40.13%	5.848.396.995	Sosial
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	0,16%	21,30%	12.260.289.167	21.15%	12.784.631.871	21.00%	12.792.735.672	20.85%	13.201.480.524	20.70%	13.302.457.365	Sosial
6	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	473.496.223	100%	501.291.952	100%	499.013.297	100%	497.935.173	100%	484.479.218	Sosial
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase penanganan Taman Makam Pahlawan sesuai standar	100%	100%	438.190.633	100%	463.913.811	100%	461.805.061	100%	460.807.326	100%	448.354.696	Sosial
	TOTAL					45.662.406.131		47.505.359.018		47.659.909.428		49.223.254.482		50.195.258.956	

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85,31	85,35	36.178.779.153	85,40	37.683.200.186	85,45	37.906.857.546	85,50	39.812.008.618	85,55	41.264.164.138	Tenaga Kerja
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	70%	73%	452.911.069	75%	502.155.647	76%	503.632.111	78%	521.298.629	79%	507.211.312	Tenaga Kerja
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	63,10 Juta/Orang	64,73 Juta/Orang	1.016.098.998	65,56 Juta/Orang	1.297.741.131	66,40 Juta/Orang	1.502.889.041	67,25 Juta/ Orang	1.700.480.535	68,12 Juta/ Orang	1.850.668.643	Tenaga Kerja
		Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase pencari kerja yang kompeten	21,33%	40%	720.474.350	45,71%	913.163.238	50%	1.045.390.568	53,33%	1.199.598.036	56%	1.397.872.359	Tenaga Kerja
4	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0,001:1000 perusahaan	0,001:1000 perusahaan	3.880.732.388	0,001:1000 perusahaan	4.598.922.378	0,001:1000 perusahaan	5.047.372.106	0,001: 1000 perusahaan	5.504.807.579	0,000: 1000 perusahaan	5.812.097.512	Tenaga Kerja
5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	75,03%	75,10%	367.069.253	75,12%	392.242.543	75,15%	394.068.263	75,18%	396.817.761	75,21%	389.597.932	Tenaga Kerja
		Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan K3	Persentase pengujian hiperkes dan keselamatan kerja di perusahaan	100%	100%	1.261.839.031	100%	355.547.142	100%	1.405.021.412	100%	427.605.346	100%	924.695.388	Tenaga Kerja

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja lintas sektor	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	N/A (Indikator baru)	100%	321.014.389	100%	245.453.686	100%	248.472.911	100%	255.062.838	100%	364.956.097	Tenaga Kerja
	TOTAL					44.198.918.631		45.988.425.951		48.053.703.958		49.817.679.342		52.511.263.381	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai	A Nilai	1.103.627.721	A Nilai	953.266.900	A Nilai	993.266.900	A Nilai	1.018.266.900	A Nilai	1.072.000.000	Sosial
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG	100%	100%	168.211.540	100%	188.432.907	100%	198.101.701	100%	208.176.287	100%	212.769.404	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
3	Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang tertangani	4.69	100%	149.806.715	100%	176.726.654	100%	181.937.805	100%	187.546.204	100%	188.317.346	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Kualitas Keluarga	81.49	81.5	269.545.082	82	286.992.003	82.5	287.942.889	83	289.571.340	83.5	283.205.931	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah	100%	100%	46.368.745	100%	49.845.979	100%	50.371.210	100%	51.012.568	100%	50.363.941	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)	65.75	66	700.247.662	68	743.620.144	70	742.495.398	72.91	743.141.782	75	725.249.222	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	4.37	76	197.709.195	79	220.530.697	80	224.415.019	86.44	228.806.369	88	227.367.648	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	TOTAL					2.635.516.660		2.619.415.284		2.678.530.922		2.726.521.450		2.759.273.492	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur Pendukung Cadangan Pangan	N/A (Indikator baru)	27,54 Persen	35.668.265	43,48 Persen	43.426.421	60,87 Persen	49.713.377	79,71 Persen	57.046.829	100 Persen	63.831.040	Pangan
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Pengembangan Kelompok Pangan Lokal	N/A (Indikator baru)	16,40 Persen	221.190.679	18,40 Persen	271.937.378	20,06 Persen	300.773.633	21,73 Persen	337.633.049	23,41 Persen	379.602.874	Pangan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Angka Kecukupan Energi (AKE)	3,355 kkal/kap/ hari	2420 kkal/kap/ hari	124.838.929	2430 kkal/kap/ hari	134.433.096	2440 kkal/kap/ hari	135.325.640	2450 kkal/kap/hari	142.535.115	2460 kkal/kap/hari	145.982.439	Pangan
			Pola Pangan Harapan (PPH)	92,03 Nilai	92,50 Nilai	243.324.091	93,01 Nilai	272.790.376	93,34 Nilai	297.196.811	93,67 Nilai	325.455.011	94,00 Nilai	341.022.107	Pangan
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	78,40 Persen	70,00 Persen	141.246.331	72,00 Persen	153.314.149	72,50 Persen	156.376.295	73,00 Persen	159.789.366	73,50 Persen	159.120.858	Pangan
			Persentase Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan	16 Persen	16 Persen	214.151.892	16 Persen	236.541.434	16 Persen	240.728.883	16 Persen	245.460.079	16 Persen	244.666.185	Pangan
	TOTAL					980.420.187		1.112.442.854		1.180.114.639		1.267.919.449		1.334.225.503	
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	N/A (Indikator baru)	100,00%	54.127.306	100,00%	73.956.631	100,00%	80.982.502	100,00%	88.888.292	100,00%	95.134.840	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
2	Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya Persentase data informasi pertanahan yang andal	Persentase data informasi pertanahan yang andal	30,00%	70%	157.285.637	100%	183.170.682	100%	200.571.875	100%	220.152.390	100%	235.623.411	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Meningkatnya Persentase data informasi pertanahan yang andal	Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi	100,00%	100%	31.014.056	100%	36.118.147	100%	39.549.367	100%	43.410.312	100%	46.460.934	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
	TOTAL					242.426.999		293.245.460		321.103.744		352.450.994		377.219.185	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,21	82,50	803.873.070	82,75	836.027.993	83,00	840.208.133	83,25	882.218.539	83,50	908.685.096	Lingkungan Hidup
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak lingkungan	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	164.609.045	100%	274.775.961	100%	300.879.644	100%	330.252.549	100%	353.460.764	Lingkungan Hidup
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	• Indeks kualitas air laut • Indeks kualitas udara • Indeks kualitas air	• 86,68 • 92,12 • 61,12	• 86,21 • 80,73 • 73,3	214.983.336	• 86,26 • 80,94 • 73,4	250.363.893	• 86,31 • 81,24 • 73,5	274.148.433	• 86,36 • 81,54 • 73,6	300.911.745	• 86,36 • 81,54 • 73,6	322.058.060	Lingkungan Hidup
			Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	87,50%	96%	187.700.680	96,02%	218.591.235	96,41%	239.357.376	96,80%	262.724.265	97,20%	281.186.988	Lingkungan Hidup

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	N/A (Indikator baru)	6,73%	629.188.202	6,78%	694.822.743	6,83%	802.345.719	6,88%	880.673.465	6,93%	942.562.038	Lingkungan Hidup
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan B3 dan limbah B3	Persentase limbah B3 yang terkelola	N/A (Indikator baru)	100%	113.703.296	100%	132.415.844	100%	144.995.333	100%	159.150.276	100%	170.334.425	Lingkungan Hidup
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam persetujuan lingkungan	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan	53,33%	72%	70.783.673	73,33%	82.432.788	80%	90.263.893	86,67%	99.075.765	93,33%	106.038.230	Lingkungan Hidup
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam PPLH	Persentase partisipasi masyarakat dalam PPLH	52,50%	52,50%	70.783.673	52,50%	82.432.788	57%	90.263.893	59%	99.075.765	62%	106.038.230	Lingkungan Hidup
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyelesaian penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	100%	100%	70.783.673	100%	82.432.788	100%	90.263.893	100%	99.075.765	100%	106.038.230	Lingkungan Hidup
9	Program Pengelolaan Sampah	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	48	60	10.263.170.640	61	11.952.216.402	62	13.087.675.511	63	14.365.339.374	64	15.374.851.280	Lingkungan Hidup
	TOTAL					12.589.579.288		14.606.512.435		15.960.401.828		17.478.497.508		18.671.253.341	

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
1	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk Se-Provinsi Bali	Persentase Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai target	66,67%	77,78%	356.682.654	77,78%	415.383.162	88,89%	451.085.466	88,89%	487.620.131	100,00%	474.442.925	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Layanan Pencatatan Sipil Se-Provinsi Bali	Persentase Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak 0-4 Tahun sesuai target	77,78%	77,78%	356.682.654	77,78%	415.383.162	88,89%	451.085.466	88,89%	487.620.131	100 %	474.442.925	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	TOTAL					713.365.308		830.766.324		902.170.932		975.240.262		948.885.850	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,70 Nilai	81,74 Nilai	14.370.304.757	81,78 Nilai	14.967.864.687	81,82 Nilai	15.056.701.969	81,86 Nilai	15.813.432.908	81,90 Nilai	16.390.232.841	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa melalui Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antardesa dan kemitraan	4,25%	4,87%	109.110.076	5,19%	132.167.370	5,35%	150.361.822	5,5%	187.546.204	5,66%	218.973.658	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	84,90%	94,34%	729.059.345	94,81%	887.636.054	95,28%	973.592.798	95,75%	1.067.512.995	96,23%	1.143.042.494	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Desa dalam Pembangunan Desa	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	100,00%	100,00%	15.336.067.502	100,00%	17.213.728.895	100,00%	18.126.118.629	100,00%	19.140.656.581	100,00%	19.724.104.408	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	TOTAL					30.544.541.680		33.201.397.006		34.306.775.218		36.209.148.688		37.476.353.401	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR)	60,60%	61,00%	557.493.523	61,20%	649.242.176	61,50%	710.920.104	61,80%	780.322.568	62,10%	835.159.066	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,29	68,52	95.760.162	69,66	111.519.745	70,82	122.114.107	72	134.035.307	73,2	143.454.522	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	73,5	74	61.454.281	74,1	71.571.803	74,2	78.366.980	74,3	86.017.434	74,4	92.062.236	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	TOTAL					714.707.966		832.333.724		911.401.191		1.000.375.309		1.070.675.824	

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.85	83.95	32.591.188.613	84	33.946.426.982	84.05	34.147.905.842	84.1	35.864.136.721	84.15	37.172.292.374	Perhubungan
2	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya infrastruktur layanan transportasi	Persentase perencanaan pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang telah memiliki kriteria kesiapan	N/A (Indikator baru)	33,33	1.070.047.963	44,44	1.189.506.327	55,56	1.243.304.316	66,67	1.265.430.505	77,78	1.292.796.207	Perhubungan
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas	Persentase manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindak lanjuti	N/A (Indikator baru)	100	829.011.322	100	897.004.571	100	919.639.209	100	945.258.256	100	947.582.228	Perhubungan
		Meningkatnya Cakupan Layanan Angkutan Umum	Persentase jaringan transportasi darat yang terlayani	N/A (Indikator baru)	75	820.370.105	80	925.171.587	85	977.351.843	90	1.031.504.124	100	1.058.372.680	Perhubungan
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Angkutan Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan angkutan umum	82.5	83.2	57.069.224.668	83.4	67.971.790.095	83.6	71.421.865.471	83.8	71.267.557.670	84	72.991.219.304	Perhubungan
		Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Tingkat pelayanan simpang (tundaan) pada simpang ATCS	N/A (Indikator baru)	E (tundaan 40-60 dtk)	2.640.874.633	E (tundaan 40-60 dtk)	2.978.716.429	E (tundaan 40-60 dtk)	3.148.107.913	E (tundaan 40-60 dtk)	3.324.816.861	E (tundaan 40-60 dtk)	3.341.506.634	Perhubungan
		Meningkatnya Perlengkapan Keselamatan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang dan terpelihara terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi	38.58	49.48	2.487.706.536	55.21	2.712.755.074	60.95	2.781.436.791	66.69	2.858.690.287	72.42	2.864.881.603	Perhubungan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Persentase Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian dan Pengembangan Pelabuhan Laut	N/A (Indikator baru)	33	43.788.026.522	33	1.132.863.168	67	1.146.508.893	67	1.162.786.467	85	1.167.859.509	Perhubungan
		Meningkatnya pengawasan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang sudah Menerapkan SPM	50	67	114.474.608	67	127.254.362	67	133.009.715	67	139.358.463	67	142.372.135	Perhubungan
	TOTAL					141.410.924.970		111.881.488.595		115.919.129.993		117.859.539.354		120.978.882.674	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,95	83,05	40.151.699.165	83,10	41.405.496.320	83,15	41.591.894.247	83,20	43.179.663.192	83,25	44.389.901.830	Komunikasi dan Informasi
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Informasi Publik yang disebarluaskan	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	N/A (Indikator baru)	93,98%	9.987.114.317	94,00%	11.706.252.739	95,58%	12.818.345.329	96,05%	14.678.798.809	96,85%	15.710.338.808	Komunikasi dan Informasi
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan layanan teknologi informatika	Nilai Pilar Pemerintah Indeks Transformasi Digital	N/A (Indikator baru)	54,95	227.552.017.341	55,85	266.646.780.760	56,75	292.928.191.386	57,65	322.501.082.515	60,39	345.867.310.965	Komunikasi dan Informasi

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Meningkatnya Pengembangan, Inovasi dan Interoperabilitas Layanan Digital	Persentase implementasi atas Pengembangan, Inovasi dan Interoperabilitas Layanan Digital	N/A (Indikator baru)	80,10%	5.118.391.236	80,20%	5.960.742.721	80,30%	6.527.012.557	80,40%	7.164.201.954	80,50%	7.667.660.103	Komunikasi dan Informasi
	TOTAL					282.809.222.059		325.719.272.540		353.865.443.519		387.523.746.470		413.635.211.706	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
1	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,71	82,75	17.311.242.526	82,85	18.031.095.378	82,95	18.138.113.549	83,05	19.049.712.366	83,15	19.744.556.609	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi yang difasilitasi izin usaha	4,99	6,99	228.276.899	7,99	271.887.160	8,99	300.723.644	9,99	337.583.168	10,99	364.956.097	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Koperasi Sehat dan Aktif	Persentase koperasi sehat	17,81	21,00	178.341.327	22,00	226.572.634	23,00	263.133.189	24,00	300.073.927	25,00	328.460.487	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Kompetensi SDM Koperasi dan Pelaku UMKM yang terampil dan andal	Persentase pengelola KUMKM yang berkompeten	25,00	18,75	3.210.143.888	22,75	3.776.210.561	26,75	4.210.131.017	30,75	4.726.164.351	34,75	5.109.385.351	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi	Persentase koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN,BUMD/Swasta	34,68	40,95	121.272.102	42,95	151.048.422	44,95	180.434.186	46,95	210.051.749	48,95	240.871.024	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase pertumbuhan kewirausahaan	1,26	1,30	513.623.022	1,34	596.641.269	1,38	669.110.108	1,42	750.184.818	1,46	875.894.632	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Kelas Usaha UMKM	Persentase UMKM naik kelas	3,00	3,04	321.014.389	3,08	392.725.898	3,12	451.085.466	3,16	517.627.524	3,20	583.929.754	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	TOTAL					21.883.914.153		23.446.181.322		24.212.731.159		25.891.397.903		27.248.053.954	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84,46 Nilai	84,75 Nilai	17.065.933.298	84,85 Nilai	17.775.585.464	85,00 Nilai	17.881.087.134	85,25 Nilai	18.779.768.125	85,45 Nilai	19.464.766.067	Penanaman Modal
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya potensi dan peluang penanaman modal dan kemudahan berusaha	Jumlah Peta Potensi Investasi	N/A (Indikator baru)	1 Dokumen	285.346.123	2 Dokumen	339.858.950	1 Dokumen	375.904.555	1 Dokumen	412.601.650	1 Dokumen	437.947.316	Penanaman Modal
			Jumlah UMKM yang difasilitasi Bekerja sama dengan Usaha Besar		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		Penanaman Modal
3	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya pemasaran penanaman modal di Provinsi Bali	Persentase Peningkatan Investor yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali	14,92%	16,92%	108.112.724	18,46%	188.810.528	20,38%	225.542.733	21,15%	262.564.686	23,08%	291.964.877	Penanaman Modal

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya pelayanan dan pengawasan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan serta penanganan pengaduan	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	100%	100%	672.716.557	100%	713.703.796	100%	714.218.655	100%	713.425.762	100%	694.876.408	Penanaman Modal
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Realisasi Investasi	36,52 T	13,2 T	520.338.307	14,00 T	566.431.584	14,83 T	571.374.924	15,72 T	577.642.310	16,66 T	569.331.511	Penanaman Modal
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya data dan informasi penanaman modal dan Perizinan	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	100%	100%	196.026.238	100%	217.910.279	100%	227.765.742	100%	238.637.333	100%	243.796.408	Penanaman Modal
	TOTAL					18.848.473.247		19.802.300.601		19.995.893.743		20.984.639.866		21.702.682.587	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	81,90	83,55	32.818.882.434	84,38	41.160.051.512	85,23	74.432.660.183	86,10	88.532.008.388	86,94	61.571.468.689	Kepemudaan dan Olahraga
2	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	52,86	53,92	32.897.613.972	54,46	36.129.577.997	55,01	67.358.467.331	55,56	68.557.197.321	56,11	38.842.144.538	Kepemudaan dan Olahraga

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan	60,00	61,21	1.070.047.963	61,82	1.170.625.274	62,44	1.202.894.576	63,06	1.237.804.949	63,69	1.240.850.728	Kepemudaan dan Olahraga
	TOTAL					66.786.544.369		78.460.254.783		142.994.022.090		158.327.010.658		101.654.463.955	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	N/A (indikator baru)	35%	512.033.644	45%	763.353.491	55%	835.871.980	65%	917.472.675	75%	981.947.280	Statistik
	TOTAL					512.033.644		763.353.491		835.871.980		917.472.675		981.947.280	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya kualitas keamanan Informasi Pemerintah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	596Nilai	551 Nilai	586.956.976	552 Nilai	834.602.953	553 Nilai	898.853.950	554 Nilai	986.603.162	555 Nilai	1.055.935.853	Statistik
	TOTAL					586.956.976		834.602.953		898.853.950		986.603.162		1.055.935.853	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Poin	82 Poin	103.688.792.792	82 Poin	103.965.253.487	82 Poin	104.337.343.038	82 Poin	108.974.839.711	82 Poin	109.919.615.093	Kebudayaan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian Tradisi Budaya	Persentase Tradisi dan Warisan Budaya yang terfasilitasi dan berkembang secara berkelanjutan	5 Persen	31.89%	11.541.728.792	33.48%	12.164.228.792	35.16%	14.340.978.792	36.92%	16.284.528.792	38.76%	21.388.978.792	Kebudayaan
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Taman Budaya	75 Persen	76.61	300.000.000	76.61	300.000.000	76.61	300.000.000	76.61	300.000.000	76.61	300.000.000	Kebudayaan
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kesenian Bali yang terfasilitasi, dilestarikan, dan ditampilkan secara aktif	5 Persen	6.54%	2.200.332.460	6.87%	2.925.332.460	7.21%	2.287.012.573	7.57%	2.475.332.460	7.95%	4.000.332.460	Kebudayaan
4	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya Akses Informasi Sejarah	Persentase Objek Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan yang terdokumentasi dan terakses publik	5 Persen	14.29%	210.000.000	28.57%	225.000.000	42.86%	245.000.000	57.14%	260.000.000	71.43%	295.000.000	Kebudayaan
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya Eksplorasi Objek Warisan Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Permuseuman yang teregistrasi, terkelola, dan difungsikan	0,25 Persen	30,00%	2.080.199.476	30%	2.326.199.476	33%	2.607.299.476	33%	2.929.609.476	40%	3.300.370.476	Kebudayaan
6	Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Permuseuman	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD, Museum Bali & UPTD, Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75 Persen	76.61	600.000.000	76.61	600.000.000	76.61	600.000.000	76.61	600.000.000	76.61	600.000.000	Kebudayaan
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai	82,25 Nilai	14.309.298.919	82,50 Nilai	14.904.322.045	83 Nilai	14.992.782.189	83,25 Nilai	15.746.300.600	83,50 Nilai	16.320.651.861	Kebudayaan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Meningkatnya Desa Adat yang mandiri Dalam Penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	15%	16,74%	335.305.977.310	17,75%	390.449.852.458	18,76%	427.542.541.068	19,77%	469.280.713.282	20,78%	502.259.012.992	Kebudayaan
	TOTAL					470.236.329.749		527.860.188.718		567.252.957.136		616.851.324.321		658.383.961.674	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Provinsi Bali	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	60%	70%	1.030.000.000	72%	1.133.000.000	74%	1.246.300.000	76%	1.370.930.000	78%	1.508.023.000	Perpustakaan (Biro Organisasi Setda Provinsi Bali)
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno di Provinsi Bali	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	5%	5%	225.000.000	7%	247.500.000	9%	272.250.000	11%	299.475.000	13%	329.422.500	Perpustakaan (Biro Organisasi Setda Provinsi Bali)
	TOTAL					1.255.000.000		1.380.500.000		1.518.550.000		1.670.405.000		1.837.445.500	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
1	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	- Nilai Evaluasi Kearsipan - Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	63 100%	65 60%	449.040.991	65 65%	489.663.489	65,5 70%	502.060.379	66 75%	500.975.672	66,5 80%	487.437.552	Kearsipan (Biro Umum Setda Provinsi Bali)
	TOTAL					449.040.991		489.663.489		502.060.379		500.975.672		487.437.552	

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	83	31.777.756.345	84	33.099.169.785	85	33.295.620.004	86	34.969.016.067	87	36.244.521.912	Kelautan dan Perikanan
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	28,49%	32,50%	1.619.339.250	34,42%	1.948.524.649	36,33%	2.052.438.871	38,24%	2.445.602.505	40,15%	2.634.983.017	Kelautan dan Perikanan
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	Persentase Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali)	67%	83%	1.248.389.290	100%	1.453.841.066	100%	1.591.955.791	100%	1.747.367.986	100%	1.785.155.374	Kelautan dan Perikanan
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	3,03%	2%	671.462.230	2%	1.084.063.954	2%	1.187.049.899	2%	1.302.933.789	2%	1.331.110.147	Kelautan dan Perikanan
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1,75%	2%	2.106.767.498	2%	2.452.180.509	2%	2.685.137.360	2%	2.944.547.427	2%	3.007.593.557	Kelautan dan Perikanan
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	3%	19%	770.457.361	20%	1.657.669.734	20%	5.574.193.709	21%	6.118.365.656	21%	6.250.677.258	Kelautan dan Perikanan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan produksi olahan hasil perikanan	2,22%	2%	915.580.844	2%	1.066.261.174	2%	1.167.555.856	2%	1.281.536.671	2%	1.309.250.309	Kelautan dan Perikanan
		Meningkatnya Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan mutu dan keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	2%	2%	1.512.334.454	2%	1.761.224.606	2%	1.928.540.730	2%	2.116.811.503	2%	2.162.588.225	Kelautan dan Perikanan
	TOTAL					40.622.087.272		44.522.935.477		49.482.492.220		52.926.181.604		54.725.879.799	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	84,02 Nilai	16.449.758.328	84,04 Nilai	17.133.788.110	84,06 Nilai	17.235.480.583	84,06 Nilai	18.101.714.200	84,08 Nilai	18.761.979.911	Pariwisata
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Berkualitas	Persentase Destinasi Pariwisata yang berstandar	14%	25%	1.070.047.963	27%	1.246.149.485	29%	1.364.533.535	30%	1.497.743.988	32%	1.602.996.663	Pariwisata
3	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	6.333.360 Orang	6.565.000 Orang	3.923.509.196	6.630.650 Orang	4.569.214.779	6.696.956 Orang	5.003.289.629	6.763.925 Orang	5.491.727.957	6.831.564 Orang	5.877.654.430	Pariwisata

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kapasitas usaha ekonomi kreatif	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang memenuhi standar	50 Usaha	55 Usaha	178.341.327	60 Usaha	226.572.634	65 Usaha	263.133.189	70 Usaha	300.073.927	75 Usaha	328.460.487	Pariwisata
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi	230 Orang	240 Orang	972.316.915	250 Orang	1.132.334.499	260 Orang	1.239.906.139	270 Orang	1.360.950.037	280 Orang	1.456.589.634	Pariwisata
	TOTAL					22.593.973.729		24.308.059.507		25.106.343.075		26.752.210.109		28.027.681.125	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,64 Nilai	82,70 Nilai	61.540.808.110	82,75 Nilai	64.099.857.593	82,80 Nilai	64.480.303.120	82,85 Nilai	67.721.002.207	82,90 Nilai	70.191.147.034	Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian	90 Persen	90 Persen	11.474.911.144	90 Persen	12.903.766.897	90 Persen	13.596.921.099	90 Persen	14.317.729.605	90 Persen	14.660.726.534	Pertanian
			Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	0,60 Persen	0,75 Persen	1.562.554.624	0,80 Persen	2.164.069.957	0,85 Persen	2.360.664.782	0,90 Persen	2.648.105.108	0,95 Persen	2.794.754.046	Pertanian
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	0,60 Persen	0,75 Persen	1.083.558.870	0,80 Persen	1.615.322.173	0,85 Persen	1.768.822.732	0,90 Persen	2.007.502.585	0,95 Persen	2.117.907.236	Pertanian

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	0,60 Persen	0,70 Persen	1.201.836.292	0,75 Persen	1.378.469.857	0,80 Persen	1.480.440.488	0,85 Persen	1.600.950.286	0,90 Persen	1.688.626.295	Pertanian
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak	2,63 Persen	3,70 Persen	3.727.428.602	3,80 Persen	4.275.526.032	3,90 Persen	4.432.766.492	4,00 Persen	4.490.706.081	4,10 Persen	4.668.615.453	Pertanian
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Prasarana Pertanian	15 Persen	16 Persen	274.778.681	17 Persen	318.007.147	18 Persen	339.867.707	19 Persen	369.890.996	20 Persen	397.120.766	Pertanian
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	68,72 Persen	70,92 Persen	8.160.622.186	72,04 Persen	9.067.010.631	73,16 Persen	9.472.457.120	74,28 Persen	9.919.972.726	75,40 Persen	10.130.001.475	Pertanian
			Persentase Pengujian Penyakit Hewan dan Pangan Asal Hewan	4,30 Persen	4,47 Persen	164.074.021	4,64 Persen	179.747.623	4,81 Persen	184.193.232	4,98 Persen	189.796.759	5,16 Persen	189.777.170	Pertanian
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	82,91 Persen	82,91 Persen	270.866.574	82,92 Persen	306.366.059	82,93 Persen	326.434.092	82,94 Persen	349.284.527	82,95 Persen	365.056.692	Pertanian
6	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Pertanian yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	40 Persen	20 Persen	36.795.383	40 Persen	46.507.809	60 Persen	53.814.496	80 Persen	61.200.077	100 Persen	66.845.359	Pertanian
	TOTAL					89.498.234.487		96.354.651.778		98.496.685.360		103.676.140.957		107.270.578.060	

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,21	82,50	43.294.428.631	82,75	45.096.011.996	83,00	45.364.447.737	83,25	47.644.625.330	83,50	49.388.190.647	Lingkungan Hidup
2	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya perlindungan hutan dan produktivitas hasil hutan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	30,4 Milyar	35 Milyar	804.259.819	36 Milyar	936.619.661	37 Milyar	1.025.598.415	38 Milyar	1.125.720.857	39 Milyar	1.204.829.925	Kehutanan
3	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem	Persentase peningkatan kelestarian hutan konservasi *mangrove*	N/A (indikator baru)	16,50%	70.783.673	18,50%	82.432.788	20,50%	90.263.893	22,50%	99.075.765	24,50%	106.038.230	Kehutanan
4	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok	3,40%	4,23%	375.153.465	4,76%	436.893.779	5,44%	478.398.635	6,12%	525.101.554	6,80%	562.002.615	Kehutanan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatnya kelestarian dan kualitas lahan di sepanjang aliran sungai	Indeks Kualitas Lahan	46,87	63,12	153.271.033	63,17	178.495.381	63,22	195.452.420	63,27	214.533.157	63,27	229.609.291	Kehutanan
	TOTAL					44.697.896.621		46.730.453.605		47.154.161.100		49.609.056.663		51.490.670.708	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL														
1	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Meningkatnya usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan	Persentase usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berwawasan lingkungan	N/A (indikator baru)	50%	249.677.858	60%	113.286.317	70%	187.952.278	80%	262.564.686	90%	364.956.097	Energi Sumber Daya Mineral
2	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Mitigasi Kerusakan Alam Bali melalui Pengendalian Exploitasi Air Tanah yang berlebihan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Air Tanah sesuai dengan Dokumen Ijin dan Penetapan Nilai Perolehan Air tanah sesuai Peraturan Perundang-undangan	N/A (indikator baru)	20%	128.405.756	25%	135.943.580	30%	135.325.640	35%	135.033.267	40%	131.384.195	Energi Sumber Daya Mineral
3	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya Kapasitas EBT (Energi Baru Terbarukan)	Jumlah Pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan)	18,95 MW	45 MW	82.004.338	68,95 MW	90.629.053	114,45 MW	93.976.139	114,45 MW	112.527.723	139,45 MW	145.982.439	Energi Sumber Daya Mineral
4	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Meningkatnya Pengusahaan Ketenagalistrikan	Persentase Pengusahaan Ketenagalistrikan	N/A (indikator baru)	92%	7.133.653	94%	11.328.632	96%	16.539.800	98%	26.256.469	100%	18.247.805	
	TOTAL					467.221.605		351.187.582		433.793.857		536.382.145		660.570.536	

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,86	84	18.989.345.484	84,2	19.778.978.838	84,4	19.896.371.050	84,6	20.896.337.681	85	21.658.538.162	Perdagangan
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase kepuasan terhadap fasilitas sarana distribusi	N/A (indikator baru)	73	713.365.308	76	1.510.484.224	79	2.255.427.331	82	3.000.739.270	85	3.649.560.965	Perdagangan
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang Pokok	9,9	9,5	713.365.308	9	1.510.484.224	8,5	2.255.427.331	8	3.000.739.270	7,5	3.649.560.965	Perdagangan
4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah pelaku usaha yang berhasil masuk ke pasar ritel modern atau *e-commerce*	N/A (indikator baru)	10	713.365.308	15	1.510.484.224	20	2.255.427.331	25	3.000.739.270	30	3.649.560.965	Perdagangan
5	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Nilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan perizinan dan pendaftaran	85,14	85,3	713.365.308	85,5	830.766.323	85,7	902.170.932	85,9	975.240.263	86,1	1.021.877.070	Perdagangan
6	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor industri pengolahan	US$ 634,496,916	US$ 666.221.761	713.365.308	US$ 700.865.292	830.766.323	US$ 739.412.883	902.170.932	US$ 781.559.417	975.240.263	US$ 828.452.982	1.021.877.070	Perdagangan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Indeks Keberdayaan Konsumen	59,65	59,67	713.365.308	59,69	1.510.484.224	59,71	2.255.427.331	59,73	3.000.739.270	59,75	3.649.560.965	Perdagangan
	TOTAL					23.269.537.332		27.482.448.380		30.722.422.238		34.849.775.287		38.300.536.162	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya industri kreatif lokal yang terkorelasi pada penyediaan pangan	Jumlah Penumbuhan industri kreatif	30.166,00	31.000	7.133.653.083	32000	8.307.663.234	33000	9.021.709.323	34000	9.752.402.629	35000	10.218.770.703	Perindustrian
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase pelaku industri yang mematuhi ketentuan izin usaha	73,77	75	713.365.308	76	830.766.323	77	902.170.932	78	975.240.263	79	1.021.877.070	Perindustrian
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Jumlah pelaku usaha industri yang telah terdaftar dalam SIINas	2023	2100	713.365.308	2200	830.766.323	2300	902.170.932	2400	975.240.263	2500	1.021.877.070	Perindustrian
	TOTAL					8.560.383.699		9.969.195.880		10.826.051.187		11.702.883.155		12.262.524.843	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tercapainya Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD	100%	100%	66.923.867	100%	90.629.053	100%	110.515.939	100%	111.777.538	100%	116.785.951	Transmigrasi
	TOTAL					66.923.867		90.629.053		110.515.939		111.777.538		116.785.951	

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	173.165.053.318	83 Nilai	180.365.770.269	83 Nilai	181.436.277.334	83 Nilai	190.555.036.861	83 Nilai	197.505.591.686	Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Umum)
				85 Nilai	87 Nilai		88 Nilai		88 Nilai		88 Nilai		88 Nilai		Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
				81 Nilai	81,5 Nilai		82 Nilai		82,5 Nilai		82,5 Nilai		83 Nilai		Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
				82 Nilai	83 Nilai		84		84		84		84		Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian)
				82 Nilai	83 Nilai		84 Nilai		85 Nilai		86 Nilai		87 Nilai		Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
				N/A	82 Nilai		83 Nilai		84 Nilai		85 Nilai		86 Nilai		Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Humas dan Protokol)
		Meningkatnya kepuasan layanan	Persentase Informasi Publik yang tersampaikan dengan baik ke Masyarakat	N/A	94%	16.500.000.000	95%	17.325.000.000	96%	18.191.250.000	97%	19.100.812.500	98%	20.055.853.125	Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		informasi publik dan layanan keprotokolan	Persentase Kepuasan Pimpinan Terhadap Layanan Keprotokolan	N/A	91%	4.423.858.964	92%	4.645.051.912	93%	4.877.304.508	94%	5.121.169.733	95%	5.377.228.220	(Biro Humas dan Protokol)
2	Program Penataan Organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	87%	91%	770.434.533	93%	897.227.629	95%	982.464.145	97%	1.078.375.671	99%	1.154.157.597	Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
3	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100%	100%	3.592.992.161	100%	4.184.303.404	100%	4.581.811.720	100%	5.029.103.926	100%	5.382.519.892	Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
4	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	100%	892.420.001	100%	1.039.288.671	100%	1.138.020.968	100%	1.249.118.486	100%	1.336.899.217	Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian)
5	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	85%	85%	853.541.591	85%	994.011.906	90%	1.088.442.916	90%	1.194.700.455	90%	1.278.657.005	
6	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	87%	87%	114.851.815	87%	133.753.378	90%	146.459.933	90%	160.757.855	90%	172.054.975	

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan	70%	77%	1.959.614.502	79%	2.282.115.090	81%	2.498.915.747	83%	2.742.868.491	85%	2.935.621.222	Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
8	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual yang Ditindaklanjuti	73%	80%	32.839.191.764	83%	36.205.209.920	85%	37.985.470.416	87%	39.884.743.937	90%	41.878.981.134	
	TOTAL					241.920.533.159		255.220.735.415		260.432.871.084		279.998.463.982		285.353.428.944	
4.02	SEKRETARIAT DPRD														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,12	83,12	129.873.353.722	83,15	135.273.873.294	83,20	136.076.750.896	83,25	147.415.797.567	83,30	148.128.696.176	Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penganggaran, pengawasan serta kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	127.276.960.767	100 %	139.889.619.941	100 %	145.049.548.483	100 %	150.128.449.279	100 %	150.396.343.766	Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)
	TOTAL					257.150.314.489		275.163.493.235		281.126.299.379		297.544.246.846		298.525.039.942	
5.01	PERENCANAAN														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,24	86,50	22.308.236.314	86,55	23.827.562.407	86,60	24.564.235.614	86,65	25.878.441.016	86,70	26.815.828.544	Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	3.168.220.922	100%	2.706.494.755	100%	2.858.835.620	100%	3.009.444.819	100%	3.681.034.725	Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	635.023.981	100%	723.074.750	100%	852.266.768	100%	898.871.994	100%	951.498.331	Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	535.023.981	100%	610.708.411	100%	685.800.010	100%	751.278.878	100%	787.076.573	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	535.023.981	100%	623.074.743	100%	682.266.768	100%	753.871.994	100%	806.498.331	
	TOTAL					27.181.529.179		28.490.915.066		29.643.404.780		31.291.908.701		33.041.936.504	
5.02	KEUANGAN														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Nilai	81,5 Nilai	29.541.757.539	82 Nilai	30.770.191.511	82,5 Nilai	30.952.818.776	83 Nilai	32.508.468.590	83,5 Nilai	33.694.225.193	Keuangan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran disusun Tepat Waktu	N/A (indikator baru)	100%	674.040.392.794	100%	713.622.099.707	100%	710.393.808.930	100%	708.879.099.498	100%	689.742.699.904	Keuangan
			Persentase Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota disusun tepat waktu	N/A (indikator baru)	100%		100%		100%		100%		100%		
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah disusun Tepat Waktu	N/A (indikator baru)	100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran Provinsi disusun Tepat Waktu	N/A (indikator baru)	100%		100%		100%		100%		100%		
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Baik	Baik	764.727.611	Baik	817.927.207	Baik	819.471.930	Baik	823.327.838	Baik	806.552.973	Keuangan
			Persentase pendapatan pemanfaatan BMD terhadap total PAD	N/A (indikator baru)	0,184	1.890.418.067	0,182	2.080.692.019	0,180	2.150.174.055	0,178	2.224.297.984	0,176	2.240.830.433	Keuangan
			Jumlah terbit buku sertifikat tanah dan bangunan milik atau dikuasai Pemerintah Provinsi Bali	N/A (indikator baru)	12 bidang		12 bidang		12 bidang		12 bidang		12 bidang		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83,58 Nilai SAKIP	84 Nilai SAKIP	163.647.426.149	84,5 Nilai SAKIP	171.539.437.786	85 Nilai SAKIP	173.277.014.438	85,5 Nilai SAKIP	182.307.441.647	86 Nilai SAKIP	189.183.028.953	Keuangan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100%	82.060.600	100%	83.602.000	100%	84.449.000	100%	88.850.000	100%	92.200.000	Keuangan
6	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan PAD	Persentase Realisasi PAD Terhadap Target PAD	N/A (indikator baru)	100%	6.237.440.236	100%	6.354.640.137	100%	6.419.008.050	100%	6.753.538.107	100%	7.008.243.766	Keuangan
	TOTAL					876.204.222.996		925.268.590.367		924.096.745.179		933.585.023.664		922.767.781.222	
5.03	KEPEGAWAIAN														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85,78	86,00	50.453.129.925	86,25	52.717.452.709	86,50	53.054.082.180	86,75	55.921.548.726	87,00	58.107.206.038	Kepegawaian
2	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Indeks NSPK	87,62	88,25	8.653.622.131	88,50	12.860.343.624	88,75	15.070.445.335	89,00	17.749.351.469	89,25	20.472.284.410	Kepegawaian
	TOTAL					59.106.752.056		65.577.796.333		68.124.527.515		73.670.900.195		78.579.490.448	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Indeks Profesionalitas ASN	79,56	86,00	6.358.319.294	87,00	8.627.222.293	88,00	9.819.244.729	89,00	11.264.117.694	90,00	12.732.736.599	Pendidikan dan Pelatihan (diklat)

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	TOTAL					6.358.319.294		8.627.222.293		9.819.244.729		11.264.117.694		12.732.736.599	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	81,00	15.462.862.954	81,50	16.105.854.696	82,00	16.201.446.178	82,50	17.015.710.524	83,00	17.636.363.910	Penelitian dan Pengembangan
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Hasil Kelitbangan yang Digunakan Sebagai Landasan Rekomendasi dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	7.640.142.452	100%	8.888.066.797	100%	9.728.673.020	100%	10.680.294.977	100%	11.438.142.670	Penelitian dan Pengembangan
3	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan terkait riset dan inovasi daerah	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Terkait Riset dan Inovasi Daerah	100%	100%	267.511.991	100%	302.096.845	100%	319.518.872	100%	337.583.168	100%	346.708.292	Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual	Persentase Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Pendaftarannya	100%	100%	178.341.327	100%	226.572.634	100%	263.133.189	100%	300.073.927	100%	328.460.487	Penelitian dan Pengembangan
	TOTAL					23.548.858.724		25.522.590.972		26.512.771.259		28.333.662.596		29.749.675.359	
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	82,5	7.681.982.081	83	8.001.421.700	83,5	8.048.911.745	84	8.453.439.944	84,5	8.761.781.822	Penunjang Urusan Pemerintahan (Penghubung)

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	Program Pelayanan Penghubung	Meningkatnya komunikasi pemerintahan secara vertikal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90	90	2.924.797.764	90	3.398.589.505	90	3.458.321.907	90	3.525.868.643	90	3.503.578.527	Penunjang Urusan Pemerintahan (Penghubung)
	TOTAL					10.606.779.845		11.400.011.205		11.507.233.652		11.979.308.587		12.265.360.349	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85,19	85,2	31.662.460.836	85,5	32.979.079.947	86	33.174.817.409	86,5	34.842.142.085	87	36.113.020.162	Pengawasan
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pengawasan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	5.792.526.304	100 Persen	6.196.761.530	100 Persen	6.203.928.778	100 Persen	6.230.284.910	100 Persen	6.109.365.056	Pengawasan
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	2.846.327.580	100 Persen	3.051.178.133	100 Persen	3.060.614.888	100 Persen	3.083.259.600	100 Persen	3.034.244.986	Pengawasan
	TOTAL					40.301.314.720		42.227.019.610		42.439.361.075		44.155.686.595		45.256.630.204	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	84,2	13.136.319.495	84,5	13.682.566.654	84,7	13.763.775.435	85	14.455.525.510	85,3	14.982.795.343	Pemerintahan Umum

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Deteksi Dini dan Cegah Dini	Indeks Kewaspadaan Nasional di Daerah	N/A (indikator baru)	75	11.120.698.332	80	4.925.187.575	85	5.262.663.772	90	5.551.367.650	95	5.839.297.544	Pemerintahan Umum
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik masyarakat di daerah	Persentase terlaksananya kebijakan fasilitasi politik dalam negeri	N/A (indikator baru)	90	18.589.346.661	92	20.013.915.973	94	120.298.845.976	96	170.630.082.484	100	20.437.541.405	Pemerintahan Umum
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Pemahaman Wawasan Kebangsaan	82,76	83	4.494.201.443	84	5.060.122.152	85	5.262.663.772	86	5.551.367.650	87	5.839.297.544	Pemerintahan Umum
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama di masyarakat	Indeks Pemahaman ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	N/A (indikator baru)	83	1.498.067.148	84	1.737.056.858	85	1.879.522.776	86	2.063.008.248	87	2.189.736.579	Pemerintahan Umum

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi masyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	N/A (indikator baru)	75	1.898.573.259	76	2.039.153.703	77	2.180.246.420	78	2.325.572.935	80	2.481.701.456	Pemerintahan Umum
	TOTAL					50.737.206.338		47.458.002.915		148.647.718.151		200.576.924.477		51.770.369.871	
	TOTAL KESELURUHAN					6.479.953.596.979		6.590.319.004.050		6.969.866.310.309		7.373.777.708.038		7.278.916.327.922	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 menetapkan sasaran dan target kinerja yang terukur guna menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan. Untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan hasil yang terukur, maka diperlukan sistem indikator kinerja yang dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini ditetapkan melalui dua jenis indikator utama, yaitu:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menggambarkan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan, mencerminkan dampak dari kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Bali.
2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang lebih operasional dan digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. IKD menjadi alat ukur kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan.

Dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, IKU dan IKD disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan antara kebijakan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Target IKU dan IKD juga mengacu pada arah kebijakan strategis yang tertuang dalam RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintahan Provinsi Bali

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU menjadi alat ukur utama dalam menilai efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali, sehingga hasil yang dicapai dapat terukur, terarah, dan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, IKU disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintah daerah, serta harus mencerminkan hasil pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, IKU dirancang sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan program pembangunan dalam lima tahun ke depan, sekaligus menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif.

Penetapan IKU dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

1. Mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah secara objektif dan berbasis data, sehingga efektivitas kebijakan dapat dievaluasi secara berkala.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
3. Memastikan konsistensi antara visi, misi, dan strategi pembangunan daerah dengan hasil yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan.
4. Mengarahkan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
5. Menyelaraskan kebijakan pembangunan Provinsi Bali dengan prioritas pembangunan nasional dan regional, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025-2045.
6. Mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah, sehingga anggaran dan program pembangunan dapat difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Melalui penetapan IKU, diharapkan bahwa kebijakan pembangunan daerah dapat lebih terukur, efektif, dan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bali.

IKU memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Bali berorientasi pada hasil yang konkret. Secara khusus, fungsi IKU dalam pembangunan Provinsi Bali lima tahun ke depan mencakup:

1. Sebagai Tolok Ukur Keberhasilan Pemerintah Daerah.
   IKU digunakan untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan adanya indikator yang jelas, keberhasilan dan kekurangan

dalam pelaksanaan program dapat diidentifikasi secara lebih akurat.

2. Sebagai Dasar Evaluasi dan Pengambilan Keputusan.
   IKU menjadi dasar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Jika capaian IKU tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, maka pemerintah daerah dapat segera melakukan perbaikan kebijakan dan strategi implementasi.
3. Sebagai Alat Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
   Dengan adanya IKU, kinerja pemerintah daerah dapat dikendalikan secara lebih efektif, sehingga seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
4. Sebagai Dasar dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja.
   IKU membantu dalam merumuskan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), sehingga setiap anggaran yang dialokasikan memiliki dampak yang jelas terhadap pembangunan daerah.
5. Sebagai Instrumen Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan.
   IKU juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan berfungsinya IKU secara optimal, maka seluruh perencanaan pembangunan di Provinsi Bali selama lima tahun ke depan dapat berjalan lebih efektif, terarah, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. IKU juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada hasil, sehingga pembangunan di Bali tetap berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*.

Penetapan IKU Pemerintah Provinsi Bali didasarkan pada indikator-indikator terpilih dalam Tujuan Pembangunan Jangka Menengah sesuai hasil pemetaan turunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks pembangunan kebudayaan	Angka	73,00	73,73	74,43	75,15	75,88	76,60	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan
2	Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali	Angka	18,96	24,25	28,30	33,13	37,23	43,11	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan
3	Indeks Membangun Desa Adat	Angka	0,8020	0,8100	0,8200	0,8300	0,8400	0,8500	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	78,78	78,94	79,1	79,25	79,41	79,56	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,57-3,93	3,00-3,50	2,50-3,00	2,00-2,50	1,79-2,79	1,50-2,50	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)
6	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,32	75,54	75,76	75,98	76,2	76,42	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
7	Indeks Pendidikan	Angka	0,714	0,721	0,728	0,735	0,742	0,790	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Indeks Pembangunan Gender	Angka	95,31	95,52	95,73	95,94	96,15	96,36	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,78-2,35	1,77-2,30	1,75-2,25	1,70-2,20	1,63-2,17	1,50-2,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,50-6,00	6,00-6,50	6,50-7,50	7,50-8,00	8,00-8,50	8,25-8,75	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)
11	Rasio Gini	Angka	0,343–0,347	0,340 –0,345	0,335-0,340	0,333-0,337	0,331-0,335	0,330-0,334	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan)
12	Indeks Ekonomi Biru	Angka	25,47-27,49	27,50-29,69	29,70-32,07	32,08-34,64	34,65-37,41	37,42-40,41	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan
13	Persentase Peningkatan Perekonomian Desa	Persen	99,68	99,7	99,75	99,8	99,9	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah desa
14	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	21,8	22,1	22,3	22,5	22,7	22,8	Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	76,00	76,47	76,88	77,32	77,80	78,27	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
16	Persentase Wilayah yang Terjangkau Jaringan Telekomunikasi	Persen	91,25	92,50	92,63	92,75	92,88	93,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi
17	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	68,00	68,40	69,42	70,46	71,50	72,54	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi
18	Indeks Provinsi Hijau	Angka	65,67	68,13	70,59	73,05	75,51	77,97	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral
19	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	7,77	20,63	28,37	31,07	32,65	36,49	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
20	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Angka	76,19	76,37	76,54	76,71	76,89	77,06	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
21	Porsi EBT dalam Bauran Energi Daerah	Persen	3,36	3,40	3,50	3,60	3,80	4,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
22	Indeks Risiko Bencana	Angka	132,43	130,84	129,27	127,72	126,19	124,67	Perangkat Daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
23	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	6,92	6,93	6,94	6,96	6,98	7,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum
24	Indeks Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat	Angka	36	41	45	50	55	60	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum dan urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat
25	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	92.80	93.40	93.80	94.40	94.80	95.40	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)
26	Indeks Demokrasi Provinsi	Angka	84,55	85,15	85,9	86,3	86,8	87,11	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
27	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pengawasan urusan pemerintahan dan urusan keuangan

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi Bali

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD bersifat lebih operasional dibandingkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena secara spesifik digunakan untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, IKD ditetapkan berdasarkan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan. IKD juga menjadi tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, IKD berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki target kinerja yang jelas dan terukur dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Bali.

Penetapan IKD dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025-2029 bertujuan untuk:

1. Mengukur pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah, sehingga kinerja pemerintah dapat dinilai secara sistematis.
2. Menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan, dengan memastikan bahwa setiap target yang ditetapkan dapat dicapai melalui pendekatan yang terukur dan berbasis bukti.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan mengarahkan setiap perangkat daerah untuk bekerja sesuai dengan prioritas pembangunan.
4. Memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan memiliki dampak nyata terhadap masyarakat.
5. Mendukung akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dengan memastikan bahwa setiap perangkat daerah bertanggung jawab atas target kinerja yang telah ditetapkan.
6. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur, guna meningkatkan efektivitas program pembangunan di berbagai sektor.

Dengan adanya IKD, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki peran yang jelas dalam mencapai sasaran pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien.

IKU dan IKD memiliki hubungan yang erat dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. IKU mencerminkan capaian pembangunan daerah secara makro dan strategis, sementara IKD

merupakan ukuran yang lebih operasional dalam menilai pencapaian sasaran pembangunan. Hubungan antara IKU dan IKD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. IKU bersifat lebih luas dan mencerminkan dampak jangka panjang pembangunan, sedangkan IKD lebih spesifik dan digunakan untuk mengukur hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
2. IKD merupakan bagian dari IKU, karena keberhasilan pencapaian IKD akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian IKU dalam skala yang lebih besar.
3. IKU digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan pembangunan secara keseluruhan, sedangkan IKD menjadi alat ukur dalam mengawasi implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat perangkat daerah.
4. IKU lebih berorientasi pada *outcome* (hasil akhir pembangunan), sementara IKD lebih berorientasi pada *output* (hasil langsung dari program yang dijalankan oleh perangkat daerah).
5. IKD berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan optimalisasi strategi guna mendukung pencapaian IKU.

Dengan demikian, IKU dan IKD saling melengkapi dalam sistem pengukuran kinerja pemerintahan daerah. IKU memberikan gambaran besar tentang keberhasilan pembangunan daerah, sementara IKD memastikan bahwa setiap perangkat daerah bekerja secara efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025-2029, IKD memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Fungsi utama IKD dalam pembangunan jangka menengah Provinsi Bali antara lain:

1. Sebagai Instrumen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah
   IKD digunakan untuk menilai sejauh mana perangkat daerah mampu menjalankan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
2. Sebagai Dasar Penyusunan Kebijakan dan Program Pembangunan
   IKD membantu dalam mengarahkan perencanaan dan implementasi kebijakan daerah, sehingga setiap program yang dijalankan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas.
3. Sebagai Acuan dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
   IKD juga digunakan sebagai dasar dalam perencanaan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), sehingga alokasi anggaran daerah lebih efektif dan tepat sasaran.
4. Sebagai Alat Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
   IKD memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan

secara berkala, serta melakukan perbaikan strategi jika target yang ditetapkan belum tercapai.

5. Sebagai Instrumen Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan
   Dengan adanya IKD, pemerintah daerah memiliki mekanisme yang lebih transparan dalam menilai kinerja perangkat daerah, sehingga publik dapat mengetahui capaian pembangunan secara lebih terbuka.
6. Sebagai Dasar Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
   IKD membantu dalam mengukur efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Sebagai Acuan dalam Penyelarasan Program Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Nasional
   IKD memastikan bahwa program pembangunan daerah tetap selaras dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta program strategis lainnya.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, IKD menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dapat berjalan secara efektif, efisien, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Adapun Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Bali

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	79,47	80,84	82,24	83,66	85,1	85,67	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	3,18	3,16	2,93	2,70	2,47	2,24	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
3	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	0,560	0,566	0,57	0,58	0,582	0,59	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	76,19	76,37	76,54	76,71	76,89	77,06	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	5,36	19,02	26,18	28,03	28,57	31,11	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
6	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	Persen	7,77	20,63	28,37	31,07	32,65	36,49	Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup
7	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Persen	1,22	3,95	7,16	10,16	12,88	15,67	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
8	Indeks Provinsi Hijau	Angka	65,67	68,13	70,59	73,05	75,51	77,97	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral
9	Persentase Sumber Daya Mineral yang Terkelola	Persen	40	50	60	70	80	90	Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral
10	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1.580	1.550	1.520	1.489	1.459	1.428,75	Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral
11	Intensitas Energi Primer	(SBM/Rp milyar)	139.913	136.617,50	133.322	130.026,50	126.731	123435,50	Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	88,5	89,5	90,5	91,5	92,5	93,5	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
13	Kapasitas Air Baku	(m3/detik)	0,65	0,88	1,11	1,34	1,58	1,81	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
14	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	46,5	49,13	51,75	54,38	57	59,63	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
15	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	92	92,5	93	94,5	95,5	96	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
16	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	22	26	29	33	36	39,50	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
17	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	79	84	90	95	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
18	Indeks Risiko Bencana	Angka	132,43	130,84	129,27	127,72	126,19	124,67	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum dan urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat
19	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,65	0,66	0,68	0,69	0,70	0,72	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum dan urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat
20	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,67	0,68	0,69	0,7	0,71	0,72	Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,50-6,00	6,00-6,50	6,50-7,50	7,50-8,00	8,00-8,50	8,25-8,75	Perangkat Daerah yang menangani unsur penujang urusan pemerintahan (perencanaan)
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,57-3,93	3,00 – 3,50	2,50 – 3,00	2,00 – 2,50	1,79 – 2,79	1,50 – 2,50	Perangkat Daerah yang menangani unsur penujang urusan pemerintahan (perencanaan)
3	PDRB per kapita (ADHB)	Rp Ribu	71.021,25-71.357,843	75.282,525-75.996,103	80.175,889-81.695,811	86.189,08-88.231,476	93.084,207-95.731,151	100.763,654-104.107,627	Perangkat Daerah yang menangani unsur penujang urusan pemerintahan (Perencanaan)
4	Rasio Gini	Angka	0,343-0,347	0,340-0,345	0,335-0,340	0,330-0,337	0,331-0,335	0,330-0,334	Perangkat Daerah yang menangani unsur penujang urusan pemerintahan (perencanaan)
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	78,78	78,94	79,10	79,25	79,41	79,56	Perangkat Daerah yang menangani unsur penujang urusan pemerintahan (perencanaan)
6	Angka Melek Huruf	Angka	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
7	Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Angka	10,02	10,17	10,32	10,48	10,63	12,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
8	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	13,74-13,77	13,80-13,83	13,87-13,89	13,93-13,95	13,99-14,01	14,05-14,07	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
9	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
	a. Literasi Membaca	Persen	55,56-77,78	63,89-83,34	72,23-88,89	80,56-94,45	88,89-100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
	b. Numerasi	Persen	22,22-33,33	25,00-36,11	27,78-38,89	30,44-41,66	33,33-44,44	36,11-47,22	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
	a. Literasi Membaca	Persen	69,84-72,34	71,01-73,51	72,19-74,69	73,36-75,86	74,53-77,03	75,70-78,20	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
	b. Numerasi	Persen	57,52-60,02	58,42-60,92	59,32-61,82	60,22-62,72	61,12-63,62	62,02-64,52	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
12	Usia harapan hidup	Tahun	75,32	75,54	75,76	75,98	76,2	76,42	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
13	Prevalensi Stunting	Persen	8,7	8,20	8,00	7,80	7,6	7,50	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
14	Angka partisipasi angkatan kerja	Orang	2.746.998	2.776.020	2.804.620	2.834.115	2.863.549	2.903.484	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
15	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	77,56	77,80	78,11	78,44	78,81	79,48	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
16	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	44,37	47,33	50,28	53,24	56,19	59,15	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
17	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	1,78-2,35	1,77-2,30	1,75-2,25	1,70-2,20	1,63-2,17	1,50-2,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
18	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	52	53,9	55,80	57,70	59,6	61,50	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
19	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
20	Persentase Penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Persen	35	37,25	39,50	41,75	44,00	46,25	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
21	Persentase Keselamatan dan Pelindungan Tenaga Kerja	Persen	2,79	2,8	2,83	2,87	2,91	2,94	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	2,79	2,8	2,83	2,87	2,91	2,94	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)
23	Indeks Perlindungan Anak	Angka	68,15	68,35	68,55	68,75	68,95	69,15	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
24	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,179	0,176	0,174	0,171	0,169	0,167	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
25	Indeks Pembangunan Gender	Angka	95,31	95,52	95,73	95,94	96,15	96,36	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
26	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	73,13	73,64	74,15	74,65	75,16	75,67	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
27	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	58,76	59,03	59,3	59,57	59,84	60,11	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
28	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	63,29	63,61	63,93	64,25	64,57	64,89	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga
29	Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	0,336	0,337	0,339	0,341	0,342	0,344	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga
30	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	73,00	73,73	74,43	75,15	75,88	76,60	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan
31	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	82,08-82,11	82,47-82,54	82,86-82,96	83,25-83,39	83,64-83,31	83,68-83,83	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Umum
32	Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali	Angka	18,96	24,25	28,30	33,13	37,23	43,11	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
33	Indeks Membangun Desa Adat	Angka	0,8020	0,8100	0,8200	0,8300	0,8400	0,8500	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan
34	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Perangkat Daerah yang menangani unsur penujang urusan pemerintahan (pengawasan)
35	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	91,00	92,50	93,01	93,34	93,67	94,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
36	Penguatan cadangan pangan	Persen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
37	Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB	Persen	1,72	2,02	2,32	2,62	2,92	3,22	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
38	Kontribusi sektor tanaman hortikultura terhadap PDRB	Persen	1,93	2,23	2,53	2,83	3,13	3,43	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
39	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	Persen	1,64	1,94	2,24	2,54	2,84	3,14	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
40	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	Persen	4,87	5,17	5,47	5,77	6,67	6,37	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Nilai Tukar Petani	Persen	100,00	100,00	100,50	101,00	101,50	102,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
2	Angka kriminalitas	Kasus	5.209	4.897	4.603	4.327	4.067	3.823	Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
3	Laju Inflasi (Denpasar)	Persen	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5 ±1	2,5±1	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)
4	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	21,8	22,1	22,3	22,5	22,7	22,8	Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	9,45	9,75	10,05	10,35	10,65	10,95	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
6	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	6,77-6,82	6,43-6,44	6,09-6,06	5,74-5,68	5,4-5,3	5,06-4,92	Perangkat Daerah yang menangani urusan perindustrian
7	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	21,8	22,1	22,3	22,5	22,7	22,8	Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata
8	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Persen	1,67	1,68	1,70	1,71	1,72	1,73	Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata
9	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Persen	4,71	4,86	5,01	5,15	5,3	5,45	Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi,dan usaha kecil, dan menengah
10	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	Persen	1,86	1,95	2,05	2,14	5,86	5,95	Perangkat Daerah yang menangani urusan perindustrian
11	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	7,43	7,44	7,46	7,47	7,48	7,49	Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi,dan usaha kecil, dan menengah
12	*Return on Asset* (ROA) BUMD	Persen	2,84	3,00	3,15	3,31	3,46	3,62	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)
13	Rasio Penerimaan Daerah terhadap PDRB	Persen	5,89	6,13	6,37	6,61	6,85	7,09	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
14	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	60,46	61,44	62,41	63,39	64,36	65,34	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
15	Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	Rupiah	6.929.050,64	7.470.212,99	8.011.375,33	8.552.537,68	9.093.700,02	9.634.862,37	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
17	Total Kredit/PDRB	Persen	35,50	37,38	39,26	41,14	43,02	44,90	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
18	Tingkat Inklusi Keuangan per Provinsi	Persen	95,83	96,45	97,07	97,68	98,3	98,92	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
19	Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/Sister City)	Angka	13	14	15	16	17	18	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)
20	Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	76	77,00	77,50	78,00	78,50	79,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum
21	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	6,3	6,35	6,4	6,45	6,5	6,55	Perangkat Daerah yang menangani urusan perindustrian
22	Rasio Kewirausahaan di Bali	Persen	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,1	Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi,dan usaha kecil, dan menengah
23	Indeks Inovasi Daerah	Angka	69,95	70,00	70,05	70,10	70,15	70,20	Perangkat Daerah yang menangani urusan penelitian dan pengembangan
24	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	68,84	69,25	69,66	70,07	70,48	70,89	Perangkat Daerah yang menangani unsur penujang urusan pemerintahan (perencanaan)
25	Indeks Ekonomi Biru	Angka	25,47	27,5	29,7	32,08	34,65	37,42	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan
26	Porsi Bauran EBT dalam Bauran Energi Daerah	Persen	3,36	3,40	3,50	3,60	3,80	4,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	96,99	97,09	97,20	97,30	97,40	97,50	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
28	Tingkat Inflasi	Persen	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)
29	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Persen	15,68	15,87	16,06	16,25	15,68-16,44	16,44	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
30	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	Persen	74,76	74,76	74,76	74,76	78,86	78,86	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
31	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,40	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi
32	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Angka	8,7	8,58	8,45	8,33	8,2	8,08	Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan
33	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	28,42	28,7	28,98	29,26	29,20 - 29,54	29,82	Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan
34	Ekspor Barang dan Jasa	Persen	39,43-39,55	39,72-39,91	40,02-40,27	40,31-40,63	40,60-40,99	40,89-41,25	Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan
35	Persentase Peningkatan Ekspor Produk Industri Lokal Bali	Persen	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan
36	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Persen	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,86	Perangkat Daerah yang menangani unsur penunjang urusan pemerintahan (Perencanaan)
37	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	87,26	89,18	91,09	93,01	94,92	96,84	Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
38	Persentase Desa Mandiri	Persen	61,01	62,86	64,71	66,55	68,40	70,25	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan
39	Persentase Peningkatan Perekonomian Desa	Persen	99,68	99,7	99,75	99,8	99,9	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat desa
40	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	76,00	76,47	76,88	77,32	77,80	78,27	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
41	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi (Aman, Nyaman, Lancar, Selamat, dan Terjangkau)	Angka	N/A (indikator baru)	77,50	78,00	78,50	79,00	80,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
42	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Persen	6,96	1,89	3,70	3,93	4,81	4,92	Perangkat Daerah yang menangani urusan penanaman modal
43	Persentase Wilayah yang Terjangkau Jaringan Telekomunikasi	Persen	91,25	92,50	92,63	92,75	92,88	93,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi
44	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	68,00	68,40	69,42	70,46	71,50	72,54	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	98,31	98,32	98,33	98,34	98,35	98,36	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)
2	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	4,15	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi
3	Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)	Angka	-	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Indeks Pelayanan Publik	Angka	89,00	91,00	93,00	95,00	97,00	99,00	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)
5	Indeks Integritas Nasional	Angka	82,65	83,495	84,34	85,19	86,03	86,88	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan
6	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,95	3,96	3,97	3,98	3,99	4,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan penelitian dan pengembangan
7	Angka Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	Angka	89,35	89,63	89,92	90,20	90,48	90,76	Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
8	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
9	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	70,00	73,75	78,00	81,00	85,00	88,75	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	86,5	87,25	88,00	88,75	89,5	90,25	Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
11	Indeks Demokrasi Provinsi	Angka	84,55	85,15	85,90	86,30	86,8	87,11	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum
12	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	6,92	6,93	6,94	6,96	6,98	7,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum
13	Indeks Sistem Merit	Angka	0,95	0,95	0,98	0,98	0,99	0,99	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	Nilai AKIP	Nilai	79,40	79,80	80,20	80,60	81,00	81,40	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)
15	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Nilai	3,52	3,54	3,56	3,58	3,6	3,62	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (sekretariat daerah)
16	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Untuk Provinsi Bali	Angka	85,1	85,3	85,5	85,7	85,9	86,00	Perangkat Daerah yang menangani unsur penujang urusan pemerintahan (perencanaan)
	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
	Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	**Pendidikan**								
1.1	Angka Partisipasi Kasar								
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan								
1.2.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	32,73	32,90	33,06	33,23	33,39	33,56	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.3	Angka Partisipasi Murni								
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	75,30	76,43	77,58	78,74	79,92	81,12	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.4	Angka Partisipasi Sekolah								
1.4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.5	Angka Putus Sekolah								
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen	0,06	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6	Angka Kelulusan								
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.7	Angka Transisi (AT)								
1.7.1	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	Persen	95,91	96,06	96,2	96,35	96,49	96,64	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.8	Fasilitas Pendidikan								
1.8.1	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	82,07	83,71	85,38	87,09	88,83	90,61	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.9	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persen	18,25	18,70	19,17	19,65	20,14	20,64	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.10	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah								Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
	- SMA/MA (per 1000 murid)	Persen	70,42	70,77	71,13	71,48	71,84	72,20	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
	- SMK (per 1000 murid)	Persen	66,51	66,84	67,18	67,51	67,85	68,19	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.11	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata								
1.11.1	SMA/SMK/MA	Persen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.12	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.13	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	95,80	95,99	96,18	96,38	96,57	96,76	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV								Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.14.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	Persen	95,83	96,31	96,79	97,27	97,76	98,25	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.15	Rerata Kompetensi Literasi								
1.15.1	Rerata Kompetensi Literasi SMA	Nilai	80,61	81,21	81,81	82,41	83,01	83,61	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.15.2	Rerata Kompetensi Literasi SMK	Nilai	76,59	77,89	79,19	80,49	81,79	83,09	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.15.3	Rerata Kompetensi Literasi SDLB	Nilai	72,83	74,43	76,03	77,63	79,23	80,83	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.15.4	Rerata Kompetensi Literasi SMPLB	Nilai	85,73	86,23	86,73	87,23	87,73	88,23	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.15.5	Rerata Kompetensi Literasi SMALB	Nilai	85,52	86,02	86,52	87,02	87,52	88,02	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.16	Rerata Kompetensi Numerasi								
1.16.1	Rerata Kompetensi Numerasi SMA	Nilai	68,26	69,86	71,46	73,06	74,66	76,26	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.16.2	Rerata Kompetensi Numerasi SMK	Nilai	64,28	66,48	68,68	70,88	73,08	75,28	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.16.3	Rerata Kompetensi Numerasi SDLB	Nilai	76,77	77,37	77,97	78,57	79,17	79,77	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.16.4	Rerata Kompetensi Numerasi SMPLB	Nilai	80,45	80,70	80,95	81,20	81,45	81,70	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.16.5	Rerata Kompetensi Numerasi SMALB	Nilai	78,13	78,63	79,13	79,63	80,13	80,63	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.17	Indeks Iklim Keamanan								
1.17.1	Indeks Iklim Keamanan SMA	Angka	86,19	87,39	88,59	89,79	90,99	92,19	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.17.2	Indeks Iklim Keamanan SMK	Angka	73,74	74,94	76,14	77,34	78,54	79,74	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.17.3	Indeks Iklim Keamanan SDLB	Angka	83,17	83,67	84,17	84,67	85,17	85,67	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.17.4	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	Angka	78,93	80,13	81,33	82,53	83,73	84,93	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.17.5	Indeks Iklim Keamanan SMALB	Angka	78,30	79,60	80,90	82,20	83,50	84,80	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.18	Indeks Iklim Kebinekaan								
1.18.1	Indeks Iklim Kebinekaan SMA	Angka	75,75	76,75	77,75	78,75	79,75	80,75	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.18.2	Indeks Iklim Kebinekaan SMK	Angka	72,12	73,42	74,72	76,02	77,32	78,62	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.18.3	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	Angka	74,78	75,78	76,78	77,78	78,78	79,78	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.18.4	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	Angka	76,53	78,33	80,13	81,93	83,73	85,53	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.18.5	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	Angka	78,80	80,80	82,80	84,80	86,80	88,80	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.19	Indeks Iklim Inklusivitas								
1.19.1	Indeks Iklim Inklusivitas SMA	Angka	64,71	66,21	67,71	69,21	70,71	72,21	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.19.2	Indeks Iklim Inklusivitas SMK	Angka	62,48	64,78	67,08	69,38	71,68	73,98	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.19.3	Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	Angka	74,63	75,93	77,23	78,53	79,83	81,13	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.19.4	Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	Angka	75,13	76,53	77,93	79,33	80,73	82,13	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.19.5	Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	Angka	78,10	79,70	81,30	82,90	84,50	86,10	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.20	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persen	93,40	94,94	96,47	98,00	99,54	100,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
1.21	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persen	80,06	80,60	81,14	81,68	82,22	82,76	Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan
2	**Kesehatan**								
2.1	Angka Kematian Balita	/1000 KH	12,08	11,46	10,84	10,22	9,6	8,98	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2. 2	Angka keberhasilan pengobatan TBC	Persen	85	86	87	88	89	90	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.3	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	Nilai	85,5	86	86,5	87	87,5	88	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.4	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	Persen	84,17	84,25	84,5	84,75	85,00	85,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.5	Presentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi standar	Persen	75	78	81	84	87	90	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.6	Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 15% penduduknya menerapkan perilaku hidup sehat	Kab/Kota	1	2	3	4	5	6	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.7	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera	Persen	87,66	88,0	88,2	88,4	88,6	88,8	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.8	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	98,01	88,86	79,71	70,55	61,4	52,25	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9	Cakupan Penemuan Kasus TBC / *Treatment Coverage* (TC)	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.10	Persentase Fasyankes Terakreditasi Paripurna	Persen	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,5	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.11	Cakupan kunjungan Ibu hamil K6	Persen	86,5	87,00	87,5	88,00	88,5	89,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.12	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai Eliminasi Malaria	Kab/Kota	9	9	9	9	9	9	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.13	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.14	ODHIV baru yang ditemukan yg mendapat pengobatan ART	Persen	90	90	90	90	90	90	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.15	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <18 Jam	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.15	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Presentase	2,04	2,06	2,07	2,09	2,1	2,1	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.16	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	36	46	55	61	70	76	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.17	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	95,7	95,9	96,1	96,3	96,6	97	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.18	Persentase hipertensi dalam pengendalian	Persen	10	20	35	50	60	60	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan
2.19	Proporsi penduduk dengan aktifitas cukup	Persen	55	60	65	70	75	75	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
3.1	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	82,04	83,13	83,73	84,33	84,93	85,53	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
3.2	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Persen	48,74	48,87	48,88	48,89	48,9	48,91	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
3.3	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	82,65	84,1	85,38	87,04	88,9	90,72	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
3.4	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	Persen	76	77	78	79	80	81	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
3.5	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persen	7,21	9,53	11,85	14,16	16,48	18,79	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
3.6	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah (UPT.PAL)	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
3.7	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi (UPT.BPP)	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
3.8	Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman (UPT.PAM)	Persen	44,00	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
3.9.1	Persentase cakupan layanan Air Minum Aman	Persen	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.9.2	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Persen	92,00	92,5	93,00	94,5	95,5	96,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
3.10	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Ruang	Persen	94,34	96,24	96,31	96,69	96,97	97,21	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**								
4.1	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman
4.2	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persen	6,96	6,77	6,67	6,57	6,37	6,13	Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman
5	**Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat**								
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	36	40	45	49	54	58	Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	49	62	74	87	100	100	Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	47	49	51	53	56	58	Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
5.6	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
5.7	Persentase penanganan pra bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
5.8	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
6	**Sosial**								
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	21,30	21,15	21,00	20,85	20,70	20,55	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	1,22	0,64	0,64	0,64	0,64	0,65	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	1,42	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	14,89	15,96	17,02	18,09	19,15	20,21	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
6.5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
6.6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
6.7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	6,19	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
6.8	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	61,32	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6,9	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
7.0	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
7.1	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
7.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1	**Tenaga Kerja**								
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per 1000 Perusahaan	0,001:1000 perusahaan	0,001:1000 perusahaan	0,001:1000 perusahaan	0,001:1000 perusahaan	0,001:1000 perusahaan	0,000:1000 perusahaan	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	72	73	75	76	78	79	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
1.4	Keselamatan dan perlindungan	Persen	2,79	2,80	2,83	2,87	2,91	2,94	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
1.5	Besaran pekerja/buruh (formal) yang menjadi peserta program Jamsostek/BPJS TK	Persen	53,39	53,41	53,44	53,46	53,49	53,52	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
1.6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persen	2,79	2,80	2,83	2,87	2,91	2,94	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
1.7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	32,00	40,00	45,71	50,00	53,33	56,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
1.10	Rasio lulusan S1/S2/S3	Per 10.000 Penduduk	0,092:10.000	0,094:10.000	0,095:10.000	0,097:10.000	0,099:10.000	0,101:10.000	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
1.11	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
1.12	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	8,98	9,43	9,90	10,39	10,91	11,46	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
1.13	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/Orang	63,90	64,73	65,56	66,40	67,25	68,12	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
1.14	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak	Persen	75,06	75,10	75,12	75,15	75,18	75,21	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
1.15	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	72	73	75	76	78	79	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
1.16	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	2,79	2,80	2,83	2,87	2,91	2,94	Perangkat Daerah yang menangani urusan tenaga kerja
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	53,56	53,57	53,57	53,58	53,58	53,59	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	18,18	18,18	18,18	18,18	20,00	20,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	50,36	50,37	50,37	50,38	50,38	50,39	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.4	Rasio KDRT	Persen	0,00028	0,00027	0,00027	0,00026	0,00026	0,00025	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	70,5	70,5	70,51	70,51	70,52	70,52	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kkerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	99,04	99,05	99,05	99,06	99,06	99,07	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	104,09	104,1	104,1	104,11	104,11	104,12	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	100,6	100,61	100,61	100,62	100,62	100,63	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persen	105,54	105,55	105,55	105,56	105,56	105,57	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.17	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	97,17	97,18	97,18	97,19	97,19	97,2	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.18	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	2,21	2,31	2,41	2,51	2,61	2,71	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.19	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Persen	1,57	1,55	1,53	1,51	1,49	1,47	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.20	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	8,57	8,55	8,53	8,51	8,49	8,47	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	**Pangan**								
3.1	Ketersediaan Pangan Utama								
3.1.1	Padi	Ton	764,923	776,416	788,062	799,863	811,822	823,94	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
3.1.2	Jagung	Ton	74,891	76,016	77,156	78,312	79,483	80,669	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
3.1.3	Kedelai	Ton	1,629	1,653	1,678	1,703	1,729	1,754	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
3.1.4	Kacang Tanah	Ton	4,163	4,225	4,289	4,353	4,418	4,484	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
3.1.5	Ubi Kayu	Ton	31,81	32,29	32,774	33,265	33,762	34,266	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
3.1.6	Kacang Hijau	Ton	81	82	83	85	86	87	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
3.1.7	Ubi Jalar	Ton	20,042	20,343	20,648	20,957	21,271	21,588	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (standar WNPG)	Kkal/Kap/Hari	2,41	2,42	2,43	2,44	2,45	2,46	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
		Gram/Kap/Hari	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	70,00	70,00	72,00	72,50	73,00	73,50	Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan
4	**Pertanahan**								
4.1	Persentase data informasi pertanahan yang handal	Persen	50	70	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
5	**Lingkungan Hidup**								
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada/tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Angka	80,34	80,73	80,94	81,24	81,54	81,54	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.7	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Angka	73,20	73,30	73,40	73,50	73,60	73,60	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	63,07	63,12	63,17	63,22	63,27	63,27	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.9	Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut	Angka	86,16	86,21	86,26	86,31	86,36	86,36	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.10	Laporan Inventarisasi GRK	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.11	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.12	Jumlah limbah B3 yag dikelola	Ton/tahun	28.621,63	28.621,63	28.621,63	28.621,63	28.621,63	28.621,63	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.13	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Jumlah	6	6	6	6	6	6	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	60	66,67	73,33	80	86,67	93,33	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.15	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.16	Penetapan hak MHA	Jumlah	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.17	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	90	90	90	90	90	90	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.18	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.19	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.20	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
5.21	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Persen	70	70	70	70	70	70	Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
6.1	Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk	Persen	99,05	99,10	99,15	99,20	99,25	99,30	Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	99,60	99,65	99,70	99,75	99,80	99,80	Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	99,60	99,65	99,70	99,75	99,80	99,85	Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	55	57	59	61	63	65	Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	96,23	97,65	99,07	100,49	101,91	103,33	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
7.2	Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina	Persen	39,8	47,76	55,72	63,68	71,64	79,60	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
7.3	Persentase LPM Berprestasi	Persen	24,27	25,69	27,11	28,53	29,95	31,37	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
7.5	Persentase Posyandu Desa/Kelurahan yang menyediakan layanan 6 Bidang SPM	Persen	50	60	70	80	90	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	337,25	344,50	351,75	359,00	366,25	373,50	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
7.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	99,68	99,7	99,75	99,8	99,9	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,67	0,68	0,69	0,7	0,71	0,72	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	rata-rata anak per wanita	2,05	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	1	1	1	1	1	1	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	4	4	4	4	4	4	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	3	3	3	3	3	3	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.9	Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	63,6	65,6	67,6	69,6	71,6	73,6	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 wus 15-19 tahun	19,5	19	18,7	18,4	18,1	18	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	10,3	10	9,7	9,4	9,1	8,8	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	50,3	51,3	52,3	53,3	54,3	55,3	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.13	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	13	15	17	19	21	23	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00	68,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	73,1	74,1	75,1	76,1	77,1	78,1	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	83,9	84,9	85,9	86,9	87,9	88,9	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.17	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	83,5	84,5	85,5	86,46	87,46	88,46	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.18	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.19	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.20	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA) yang ber-KB mandiri	Persen	71,60	72,60	73,60	74,61	75,61	76,61	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.21	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.22	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.23	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.24	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP)	Tahun	22,7	22,8	22,9	23	23	23	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8,25	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Persen	84,57	85,21	85,83	86,43	86,99	87,54	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8,26	Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	Persen	9,97	9,70	9,40	9,20	8,96	8,75	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8,27	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Persen	88,82	89,12	89,41	89,70	90,00	90,30	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.28	Indeks Lansia Berdaya	Persen	65,31	66,18	67,02	67,83	68,61	69,37	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8.29	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persen	31,92	32,54	33,15	33,76	34,35	34,93	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9	**Perhubungan**								
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum								Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
9.1.1	Angkutan Darat	Jumlah	1.912.670	2.103.737	2.314.331	2.545.764	2.800.340	3.084.374	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
9.1.2	Angkutan Laut	Jumlah	26.582.764	27.911.902	29.307.497	32.238.247	35.462.072	40.781.382	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
9.1.3	Angkutan Udara	Jumlah	24.881.038	25.128.253	25.050.066	25.077.323	24.986.214	25.312.410	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
9.2	Jumlah ijin trayek	Jumlah	197	197	197	197	197	197	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis								
9.4.1	Jumlah Pelabuhan	Jumlah	37	37	37	37	37	37	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
9.4.2	Jumlah Bandara	Jumlah	2	2	2	2	2	2	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.4.3	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	20	20	20	20	20	20	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
9.5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	3	3	3	3	3	3	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
9.6	Pemasangan rambu-rambu pada ruas jalan provinsi	Persen	43,75	49,48	55,21	60,95	66,69	72,42	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
9.7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	627,18	658,54	691,47	726,04	762,34	800,46	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
9.8	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun								
9.9.1	Dermaga								
	- Orang	Orang	26.582.764	27.911.902	29.307.497	32.238.247	35.462.072	40.781.382	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
	- Barang	Kilogram	3.661.710	4.027.881	4.430.669	4.873.736	5.361.109	6.065.276	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
9.9.2	Bandara								
	- Orang	Orang	25.845.375	27.913.005	30.146.045	32.557.729	35.162.347	37.975.335	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
	- Barang	Kilogram	422.738.719	486.149.527	559.071.956	642.932.749	739.272.661	850.278.560	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
9.9.3	Terminal								
	-Orang	Orang	1.912.670	2.103.937	2.314.331	2.545.764	2.800.340	3.084.374	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
	-Barang	Kilogram	200.626	220.688	242.757	267.033	293.736	323.110	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.10	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	1	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
9.11	V/C Rasio di Jalan Provinsi	Rasio	0,8	0,82	0,84	0,86	0,88	0,9	Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan
10	**Komunikasi dan Informatika**								
10,1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	96,55	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi
10,2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi
10,3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi
10.4	Nilai Pilar Pemerintah Indeks Transformasi Digital	Nilai	-	54,95	55,85	56,75	57,65	60,39	Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi
11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**								
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	68,60	68,75	68,89	69,03	69,16	69,29	Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi,dan usaha kecil, dan menengah
11.2	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	0,20	0,27	0,33	0,40	0,47	0,53	Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi,dan usaha kecil, dan menengah
11.3	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi,dan usaha kecil, dan menengah
11.4	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	24,08	24,48	24,87	25,26	25,64	26,02	Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi,dan usaha kecil, dan menengah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11.5	Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	Persen	11,25	11,66	12,07	12,48	12,88	13,28	Perangkat Daerah yang menangani urusan koperasi,dan usaha kecil, dan menengah
	Penanaman Modal								
12	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500	Perangkat Daerah yang menangani urusan pananaman modal
12.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah (Triliun)	13,25	13,50	14,00	14,55	15,25	16,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pananaman modal
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	Perangkat Daerah yang menangani urusan pananaman modal
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Persen	17,25	17,50	17,75	18,00	18,25	18,50	Perangkat Daerah yang menangani urusan pananaman modal
12.5	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Angka	89,00	93,65	93,70	93,75	93,80	93,85	Perangkat Daerah yang menangani urusan pananaman modal
12.6	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	Persen	6,96	1,89	3,7	3,93	4,81	4,92	Perangkat Daerah yang menangani urusan pananaman modal
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**								
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	81,41	81,81	82,22	82,63	83,05	83,46	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persen	28,14	28,28	28,42	28,56	28,71	28,85	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga
13.3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	59,50	59,55	59,60	59,65	59,70	59,75	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga
13.4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	85,60	85,65	85,70	85,75	85,80	85,85	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga
13.5	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	63,57	63,88	64,20	64,52	64,85	65,17	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13.6	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	51,08	51,34	51,60	51,85	52,11	52,37	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga
13.7	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persen	17,17	17,34	17,52	17,69	17,87	18,05	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga
13.8	Jumlah atlet berprestasi	Orang	231	235	240	245	250	255	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga
13.9	Jumlah prestasi Olahraga	Cabor	39	41	43	45	47	50	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga
14	**Statistik**								
14,1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan statistik
14,2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan statistik
15	**Persandian**								
15,1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	59,91	60,00	60,02	60,13	60,24	60,35	Perangkat Daerah yang menangani urusan persandian
15.2	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	550	551	552	553	554	555	
16	**Kebudayaan**								
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	6	6	6	6	6	6	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan								Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan
16.2.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	75	77	80	85	90	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan
16.2.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	2	4	6	8	10	10	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16.2.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	10	10	10	15	15	20	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan
16.2.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan
16.2.5	Struktur Cagar Budaya	Jumlah	12	14	16	18	20	22	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu								
16.3.1	Situs Cagar Budaya	Jumlah	29	31	33	35	37	39	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan
16.3.2	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan
16.4	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	152,00	170,00	188,00	206,00	224,00	242,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan
17	**Perpustakaan**								
17.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan perpustakaan
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	114,9	115	115,1	115,2	115,3	115,4	Perangkat Daerah yang menangani urusan perpustakaan
17.3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	Jumlah	419,00	427,00	436,00	445,00	454,00	463,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan perpustakaan
17.4	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	54,15	54,2	54,25	54,3	54,35	54,4	Perangkat Daerah yang menangani urusan perpustakaan
17.5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	105	110	112	114	116	118	Perangkat Daerah yang menangani urusan perpustakaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	**Kearsipan**								
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	60	60	65	70	75	80	Perangkat Daerah yang menangani urusan kearsipan
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan kearsipan
18.3	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	Persen	60%	65%	70%	75%	80%	85%	Perangkat Daerah yang menangani urusan kearsipan
18.4	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	60%	65%	70%	75%	80%	85%	Perangkat Daerah yang menangani urusan kearsipan
LAYANAN URUSAN PILIHAN									
1	**Pariwisata**								
1.1	Kunjungan Wisatawan								
1.1.1	Wisatawan Nusantara	Orang	10.500.000	10.605.000	10.711.050	10.818.161	10.926.342	11.035.606	Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata
1.1.2	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	6.565,000	6.630,650	6.696,957	6.763,926	6.831,565	6.899,881	Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata
1.2	Lama Tinggal Wisatawan								
1.2.1	Wisatawan Nusantara	Hari	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	Hari	3,45	3,55	3,65	3,75	3,85	3,95	Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata
1.3	PAD Sektor Pariwisata	Persen	22,07	22,17	22,27	22,37	22,47	22,57	Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata
2	**Pertanian**								
2.1	Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB	Persen	1,72	2,02	2,32	2,62	2,92	3,22	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2	Kontribusi sektor tanaman hortikultura terhadap PDRB	Persen	1,93	2,23	2,53	2,83	3,13	3,43	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
2.3	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	Persen	1,64	1,94	2,24	2,54	2,84	3,14	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
2.4	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	Persen	5	5	5	6	6	6	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
2.5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar								
2.5.1	Padi	Ku/Ha	62,11	62,58	63,08	63,61	64,19	64,80	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
2.5.2	Jagung	Ku/Ha	48,24	48,61	48,99	49,41	49,86	50,33	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
2.5.3	Kedelai	Ku/Ha	17,20	17,33	17,47	17,61	17,77	17,94	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	0,01	25	30	35	40	45	Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian
3	**Kehutanan**								
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Persen	6,93	7,46	7,51	7,63	7,75	7,88	Perangkat Daerah yang menangani urusan kehutanan
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	Perangkat Daerah yang menangani urusan kehutanan
3.3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persen	73,71	73,71	73,71	73,71	73,71	73,71	Perangkat Daerah yang menangani urusan kehutanan
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persen	1,43	1,44	1,47	1,48	1,51	1,57	Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral
4.3	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral
4.4	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral
5	**Perdagangan**								
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Persen	74	75	76	77	78	79	Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan
5.2	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	Persen	21,56	23,72	25,88	28,03	30,19	32,35	Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan
5.3	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Nilai	US$ 634.496.916	US$ 666.221.761	US$ 700.865.292	US$ 739.412.883	US$ 781.559.417	US$ 828.452.982	Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan
5.4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan
5.5	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	80	81	82	83	84	85	Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan
5.6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan
5.7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	9,7	9,5	9	8,5	8	7,5	Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan
6	**Perindustrian**								
6.1	Cakupan Bina Perajin	Persen	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	Perangkat Daerah yang menangani urusan perindustrian

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.2	Persentase Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	%	3,58	4,1	4,61	5,13	5,64	6,16	Perangkat Daerah yang menangani urusan perindustrian
6.3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan perindustrian
6.4	Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan perindustrian
7	**Transmigrasi**								
7.1	Persentase Transmigran Swakarsa	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan transmigrasi
7.2	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD (Kerja Sama Antar Daerah)	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan transmigrasi
8	**Kelautan dan Perikanan**								
8.1	Produksi Perikanan	Ton	140.958,19	143.777,35	146.652,90	149.585,96	152.577,68	155.629,23	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan
8.2	Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/ tahun	51,20	51,5	52,66	53,2	54,73	55,27	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan
8.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	40,96	52,73	64,50	76,27	88,04	99,81	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan
8.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persen	83	84	85	87	88	90	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan
8.5	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	107.515,02	109.665,32	111.858,62	114.095,80	116.377,71	118.705,27	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan
8.6	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Persen	5	5	11	11	11	11	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.7	Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,25	100,28	100,31	100,34	100,37	100,40	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan
8.8	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Persen	109,13	110,56	112,01	113,47	114,96	116,46	Perangkat Daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan
PENUNJANG URUSAN									
1	**Perencanaan Pembangunan**								
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang menangani unsur penujang urusan pemerintahan (Perencanaan)
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang menangani unsur penujang urusan pemerintahan (perencanaan)
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang menangani unsur penujang urusan pemerintahan (perencanaan)
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	Perangkat Daerah yang menangani unsur penujang urusan pemerintahan (perencanaan)
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	Perangkat Daerah yang menangani unsur penujang urusan pemerintahan (perencanaan)
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	Perangkat Daerah yang menangani unsur penujang urusan pemerintahan (perencanaan)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**Keuangan**								
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
2.2	Persentase SiLPA	Persen	6	6	6	6	6	6	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	6	6	6	6	6	6	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
2.4	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persen	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	20	20	20	20	20	20	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	10	10	10	10	10	10	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
2.7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah	582.188.016.684	582.188.016.684	582.188.016.684	582.188.016.684	582.188.016.684	582.188.016.684	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
2.8	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**								
3.1	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP	20	20	20	20	20	20	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian
3.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	42	42	42	42	42	42	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Orang	7.291	7.291	7.291	7.291	7.291	7.291	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Orang	12.673	12.673	12.673	12.673	12.673	12.673	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian
3.7	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/Dasar (%)(ASN Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	76,39	75,72	75,11	74,52	73,99	73,37	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian
3.8	Rasio Pegawai Fungsional (%) (ASN tidak termasuk Guru dan tenaga kesehatan)	Persen	30,05	30,36	30,87	31,06	31,68	32,29	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian
3.9	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (ASN tidak termasuk Guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian
4	**Penelitian dan Pengembangan**								
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan penelitian dan pengembangan
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan penelitian dan pengembangan
	Penerapan SIDa:								Perangkat Daerah yang menangani urusan penelitian dan pengembangan
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan penelitian dan pengembangan
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang menangani urusan penelitian dan pengembangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	**Pengawasan**								
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	95,61	95,75	95,85	96	96,10	96,25	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen	3,10	2,00	1,50	1,30	1,20	1,00	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan
5.3	Jumlah Temuan BPK	Jumlah	30	29	28	27	26	25	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan
5.4	Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)	Nilai	98,00	98,20	98,30	98,50	98,70	98,80	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan
5.5	Nilai maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Level	3	3	3	3	3	4	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan
5.6	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	4	Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan
6	**Sekretariat Dewan**								
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat DPRD)
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat DPRD)
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perangkat Daerah yang menangani unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat DPRD)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
1.1	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	Persen	30,90	40	45	50	55	60	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Umum

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini merupakan pedoman strategis dalam mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas yang dirumuskan secara terukur, responsif terhadap isu-isu strategis daerah, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional serta Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru, 2025-2125.

Sebagai dokumen perencanaan yang holistik dan *integratif*, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, pelestarian budaya, serta kelestarian lingkungan. Setiap program dan kebijakan yang termuat dalam dokumen ini disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai tantangan global, nasional, serta dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini dilandasi oleh kaidah-kaidah pelaksanaan yang menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian, dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik.

Guna memastikan bahwa arah pembangunan Provinsi Bali selama periode 2025–2029 dapat berjalan secara efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan, maka diperlukan sistem pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala dan sistematis. Mekanisme tersebut mencakup:

- **Pengendalian tahunan** melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
- **Evaluasi kinerja pembangunan daerah** berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD),
- **Evaluasi jangka menengah (*midterm review*)** pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, serta
- **Evaluasi akhir periode** sebagai dasar penyusunan RPJMD berikutnya maupun penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Seluruh proses evaluasi akan diselaraskan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia, dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), guna menjamin efektivitas pencapaian sasaran pembangunan serta

mewujudkan tata kelola pemerintahan Provinsi Bali yang bersih, modern, dan terpercaya.

Sebagai kaidah pelaksanaan pembangunan, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 menegaskan pengarusutamaan pembangunan yang meliputi:

1. **Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial**
   Pembangunan daerah harus menjamin kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok rentan lainnya. Hal ini menjadi landasan dalam menciptakan pembangunan yang adil dan berkeadilan sosial.
2. **Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**
   Setiap program dan kegiatan pembangunan diarahkan agar berkontribusi pada pencapaian SDGs, terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, kesetaraan gender, penyediaan pekerjaan yang layak, pengurangan kesenjangan, serta pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan daerah Bali selaras dengan agenda pembangunan global.
3. **Pengarusutamaan Transformasi Digital**
   Pembangunan ke depan akan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, memperluas akses pelayanan publik, mendukung pengembangan ekonomi digital dan kreatif, serta mempercepat inovasi daerah menuju Bali sebagai Pulau Digital.
4. **Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon**
   Arah pembangunan Bali berkomitmen pada pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dengan menekan emisi karbon, memperluas energi baru dan terbarukan, mendorong ekonomi hijau, serta menjaga kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Hal ini sejalan dengan identitas Bali sebagai Pulau Hijau dan pusat peradaban dunia yang berlandaskan harmoni dengan alam.
5. **Pengarusutamaan Pembangunan Berketahanan Iklim**
   Menghadapi perubahan iklim yang semakin kompleks, pembangunan daerah dirancang agar adaptif dan tangguh dalam mengurangi risiko bencana, menjaga ketahanan pangan dan air, melindungi wilayah pesisir, serta memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat Bali dalam jangka panjang.

Dengan menerapkan kaidah pengarusutamaan tersebut, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi dokumen yang visioner sekaligus operasional, yang tidak hanya menjawab kebutuhan pembangunan saat ini tetapi juga menyiapkan fondasi yang kokoh bagi generasi mendatang.

Dengan komitmen dan sinergi antara seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, masyarakat adat, dan seluruh lapisan masyarakat, pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Provinsi Bali Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi landasan kuat dalam mengantarkan Bali menuju cita-cita besarnya dalam 100 Tahun Bali Era Baru: sebuah Bali yang hijau, tangguh, unggul, berdaulat secara budaya dan spiritual, serta sejahtera secara adil dan merata.

Keberhasilan implementasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta seluruh Krama Bali. Peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung dan mengawal setiap kebijakan pembangunan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini selanjutnya menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, serta menjadi acuan dalam penyusunan APBD yang berbasis kinerja setiap tahun.

Dalam kerangka Pembangunan Bali dengan pendekatan satu kesatuan wilayah: satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman dan arahan dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota se-Bali, guna mewujudkan keselarasan visi-misi dan program prioritas Pembangunan daerah provinsi dengan kabupaten/kota.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER